



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

R K P D

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023



BAPPEDA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
2022



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

22. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);
25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 19);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda, adalah lembaga teknis daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:

- a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - d. Kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *corona virus disease 19* di daerah.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKP Tahun 2023, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat dan RKPD Provinsi.
 - (4) Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD Tahun 2023 memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah.

Pasal 3

Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2023.

Pasal 4

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai bahan evaluasi dan menjadi dasar penyusunan rancangan KUA, PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I	: PENDAHULUAN
Bab II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab III	: KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Bab IV	: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Bab V	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Bab VI	: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bab VII	: PENUTUP
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 08 Juli 2022

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 08 Juli 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 44

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas rahmat dan ridho-Nya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ini sebagai pedoman atau acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta seluruh pelaku pembangunan dan sebagai langkah awal dalam menyusun Kebijakan Umum APBD dan menyusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta pedoman penyusunan RAPBD.

Gunung Sugih, 2022
Bupati Lampung Tengah,

MUSA AHMAD

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan	
Dasar	II 106
2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	II 155
2.1.3.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan	II 176
2.1.3.5 Fokus Layanan Penunjang Urusan Kesatuan	
Bangsa dan Politik Dalam Negeri.....	II 187
2.1.3.6 Fokus Layanan Umum Kewilayahan.....	II 187
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II 188
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II 188
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II 189
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	II 190
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia.....	II 191
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai	
Tahun Berjalan dan Realisasi Tahun 2021	II 236
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	II 408
2.3.1 Permasalahan Daerah Berhubungan dengan Prioritas	
dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II 408
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan	
Pemerintah Daerah.....	II 409

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III 1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Perkembangan	
Tahun 2023.....	III 1
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah	
Tahun 2022.....	III 3
3.1.2.1 Tantangan Perekonomian Nasional dan Provinsi	
Lampung Tahun 2022	III 3
3.1.2.2 Tantangan Perekonomian Kabupaten Lampung	
Tengah Tahun 2022	III 5
3.1.2.3 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023.....	III 7
3.1.2.4 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III 8
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III 9
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III 12
3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III 13

3.2.3	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III 16
3.2.4	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III 20

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV 1
4.1.1	Tinjauan Kebijakan Pembangunan Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RKP 2023	IV 1
4.1.2	Tinjauan Kebijakan Pembangunan Dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	IV 4
4.1.3	Tinjauan Kebijakan Pembangunan Dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026	IV 11
4.1.4	Sasaran Makro Nasional, Provinsi dan Kabupaten	IV 24
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan	IV 24

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	VI 1
6.2	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	VI 3

BAB VII. PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Kampung/Kelurahan, Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021.....	II 4
Tabel 2.2	Tutupan Lahan Berdasarkan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031.....	II 12
Tabel 2.3	Persentase Ancaman Bencana Kekeringan, Gempa, Dan Kebakaran Hutan Berdasarkan Luas Wilayah di Kabupaten Lampung Tengah.....	II 25
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 dan Tahun 2021.....	II 26
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 - 2021.....	II 28
Tabel 2.6	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017–2021 (Miliar Rupiah).....	II 29
Tabel 2.7	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017–2021 (Miliar Rupiah).....	II 30
Tabel 2.8	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017–2021 (Miliar Rupiah)	II 32
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017–2021	II 34
Tabel 2.10	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2017–2021	II 35
Tabel 2.11	Inflasi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015–2020....	II 36
Tabel 2.12	Pendapatan Perkapita Kabupaten Lampung Tengah Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2021.....	II 37
Tabel 2.13	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial Kabupaten Lampung Tengah.....	II 42

Tabel 2.14	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupate/Kota di Provinsi Lampung.....	II 44
Tabel 2.15	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021.....	II 45
Tabel 2.16	Dimensi Pengetahuan Kabupaten Lampung Tengah.....	II 47
Tabel 2.17	Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) Lampung Tengah	II 48
Tabel 2.18	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Lampung Tengah	II 49
Tabel 2.19	Angka Melek Huruf Kabupaten Lampung Tengah.....	II 51
Tabel 2.20	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lampung Tengah	II 51
Tabel 2.21	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lampung Tengah	II 52
Tabel 2.22	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Lampung Tengah.....	II 53
Tabel 2.23	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Kabupaten Lampung Tengah.....	II 54
Tabel 2.24	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Lampung Tengah	II 54
Tabel 2.25	Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Lampung Tengah	II 55
Tabel 2.26	Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) Lampung Tengah	II 56
Tabel 2.27	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Kabupaten Lampung Tengah	II 58
Tabel 2.28	Perkembangan Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Tahun 2018 – 2021.....	II 59
Tabel 2.29	Perkembangan Jumlah Sanggar Seni dan Jumlah Pentas Seni Tahun 2018 – 2021	II 59
Tabel 2.30	Perkembangan Organisasi Kepemudaan Dan Olah Raga Tahun 2018 – 2021	II 60
Tabel 2.31	Pencapaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2017- 2021	II 62
Tabel 2.32	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	II 64
Tabel 2.33	Sarana Prasarana Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.....	II 65
Tabel 2.34	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit dan Klinik Per Jumlah Penduduk.....	II 66
Tabel 2.35	Jumlah Tenaga Kesehatan	II 67

Tabel 2.36	Jumlah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	II 68
Tabel 2.37	Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan	II 69
Tabel 2.38	Pencapaian Kinerja Urusan Kesehatan.....	II 69
Tabel 2.39	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bidang Kesehatan	II 73
Tabel 2.40	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kesehatan Tahun 2017-2021.....	II 76
Tabel 2.41	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018-2021.....	II 86
Tabel 2.42	Capaian Kinerja Pembangunan Jaringan Jalan Kabupaten Lampung Tengah.....	II 87
Tabel 2.43	Daerah Irigasi Kabupaten Lampung Tengah.....	II 89
Tabel 2.44	Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Pekerjaan Umum Bidang Pengairan	II 90
Tabel 2.45	Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2017 – 2021.....	II 92
Tabel 2.46	Perkembangan Jumlah Rumah Sehat (Layak Huni) Tahun 2017 – 2021	II 92
Tabel 2.47	Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Jamban Keluarga Tahun 2017–2021.....	II 92
Tabel 2.48	Perkembangan Jumlah Pengguna Listrik Tahun 2017–2021	II 93
Tabel 2.49	Luas Lingkungan Kumuh (Lingkungan Kumuh) Tahun 2017–2021	II 93
Tabel 2.50	Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum tahun 2021.....	II 93
Tabel 2.51	Penataan Ruang	II 95
Tabel 2.52	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II 97
Tabel 2.53	Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat.....	II 98
Tabel 2.54	Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II 99

Tabel 2.55	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II 100
Tabel 2.56	Pencapaian Kinerja Bidang Sosial Tahun 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah.....	II 102
Tabel 2.57	Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	II 105
Tabel 2.58	Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2017 – 2021	II 109
Tabel 2.59	Pencapaian Kinerja Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2015 - 2020 di Kabupaten Lampung Tengah.....	II 110
Tabel 2.60	Pencapaian Kinerja Indek Pangarusataaman Gender (IPG)	II 114
Tabel 2.61	Pencapaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II 115
Tabel 2.62	Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama (Beras) Tahun 2017 – 2021	II 118
Tabel 2.63	Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 – 2020	II 118
Tabel 2.64	Ketersediaan Pangan di Kabupaten Lampung Tengah 2017 – 2021	II 119
Tabel 2.65	Kebutuhan Pangan di Lampung Tengah 2017-2021.....	II 120
Tabel 2.66	Capaian Kinerja Urusan Pangan 2015-2020.....	II 122
Tabel 2.67	Pencapaian Kinerja Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 - 2021	II 123
Tabel 2.68	Pencapaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 - 2021.....	II 125
Tabel 2.69	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 - 2021.....	II 128
Tabel 2.70	Pencapaian Kinerja Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lampung Tengah 2017- 2021	II 128
Tabel 2.71	Klasifikasi Indek Desa Membangun Tahun 2017- 2021 di Kabupaten Lampung Tengah.....	II 131
Tabel 2.72	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tahu 2017-2021	II 133

Tabel 2.73	Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017- 2021.....	II 135
Tabel 2.74	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Aktif Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021 ...	II 135
Tabel 2.75	Pencapaian Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2017-2021	II 136
Tabel 2.76	Jumlah Kendaraan Roda Empat Yang Melakukan Uji KIR di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016–2021..	II 140
Tabel 2.77	Perkembangan Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 – 2021	II 141
Tabel 2.78	Capaian Kinerja Dibidang Perhubungan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 – 2021	II 142
Tabel 2.79	Pencapaian Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2021	II 144
Tabel 2.80	Pencapaian Kinerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017-2021.....	II 146
Tabel 2.81	Pencapaian Kinerja Bidang Penanaman Modal Tahun 2017 – 2021	II 148
Tabel 2.82	Perkembangan PMA dan PMDN Tahun 2017 – 2021	II 148
Tabel 2.83	Pencapaian Kinerja Bidang Penanaman Modal Tahun 2017 – 2021	II 149
Tabel 2.84	Pencapaian Kinerja Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2017 – 2021	II 150
Tabel 2.85	Pencapaian Kinerja Urusan Statitik Tahun 2017 – 2021.....	II 151
Tabel 2.86	Pencapaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2017 – 2021.....	II 152
Tabel 2.87	Jumlah Sanggar Seni Budaya & Situs Budaya 2017 – 2021.....	II 153
Tabel 2.88	Capaian Kinerja Urusan Bidang Kebudayaan Tahun 2017 – 2021	II 153
Tabel 2.89	Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Perpustakaan Tahun 2017 – 2021	II 154

Tabel 2.90	Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Kearsipan Tahun 2017 – 2021	II 155
Tabel 2.91	Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 – 2021	II 156
Tabel 2.92	Objek Wisata Alam di Kabupaten Lampung Tengah	II 157
Tabel 2.93	Jalan Objek Wisata Alam Buatan di Kabupaten Lampung Tengah.....	II 158
Tabel 2.94	Objek Wisata Agro di Kabupaten Lampung Tengah	II 158
Tabel 2.95	Objek Wisata Tirta di Kabupaten Lampung Tengah	II 159
Tabel 2.96	Objek Wisata Air Modern di Kab. Lampung Tengah.....	II 159
Tabel 2.97	Objek Wisata Budaya di Kabupaten Lampung Tengah ...	II 160
Tabel 2.98	Objek Wisata Religi dan Sejarah di Kabupaten Lampung Tengah.....	II 160
Tabel 2.99	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pariwisata di Kabupaten Lampung Tengah.....	II 162
Tabel 2.100	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pertanian di Kabupaten Lampung Tengah.....	II 165
Tabel 2.101	Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan Tahun 2018 – 2021 (ton)	II 169
Tabel 2.102	Populasi Sapi, Kerbau, Kambing Di Lampung Tengah	II 170
Tabel 2.103	Populasi Sapi Potong dan Kambing Kabupaten Lampung Tengah.....	II 171
Tabel 2.104	Perkembangan Jumlah Pasar Tahun 2017 – 2021.....	II 172
Tabel 2.105	Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Perdagangan Tahun 2017 – 2021	II 173
Tabel 2.106	Pencapaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2017 – 2021	II 173
Tabel 2.107	Perkembangan Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja Tahun 2017 – 2021	II 174
Tabel 2.108	Perkembangan Nilai Investasi Tahun 2017 – 2021 (juta rupiah)	II 174
Tabel 2.109	Perkembangan Transmigran Asal Lampung Tengah 2017 – 2021	II 176
Tabel 2.110	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Perencanaan Tahun 2017 – 2021	II 177

Tabel 2.111	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Keuangan Tahun 2015 – 2020	II 178
Tabel 2.112	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2017–2021 .	II 180
Tabel 2.113	Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2017 – 2021	II 181
Tabel 2.114	Pencapaian Kinerja Bidang Kepegawaian Tahun 2017 – 2021	II 181
Tabel 2.115	Pencapaian Kinerja Bidang Kepegawaian Tahun 2017 – 2021	II 183
Tabel 2.116	Pencapaian Kinerja Bidang Pengawasan Tahun 2017 – 2021	II 185
Tabel 2.117	Jumlah Rapat/Sidang Yang Difasilitasi Tahun 2019 – 2021	II 185
Tabel 2.118	Pencapaian Kinerja Sekretariat Dewan Tahun 2019 – 2021	II 186
Tabel 2.119	Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 – 2020	II 186
Tabel 2.120	Pencapaian Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017 – 2021	II 187
Tabel 2.121	Pencapaian Indikator Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Tahun 2017 – 2021	II 189
Tabel 2.122	Pencapaian Indikator Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur Tahun 2015 – 2020	II 190
Tabel 2.123	Pencapaian Indikator Fokus Iklim Investasi Tahun 2017 – 2021	II 190
Tabel 2.124	Pencapaian Indikator Fokus Sumber Daya Manusia Tahun 2015 – 2020	II 191
Tabel 2.125	Pencapaian Indikator SDGs Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021	II 194
Tabel 2.126	Realisasi Kinerja Tujuan dan Kinerja Sasaran Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Berdasarkan RPJMD 2016-2021	II 237
Tabel 2.127	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021	II 241

Tabel 3.1	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2018 s/d 2023 Kabupaten Lampung Tengah	III 15
Tabel 3.2	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Tahun 2020 s/d 2023 Kabupaten Lampung Tengah	III 19
Tabel 3.3	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2020 s/d 2023 Kabupaten Lampung Tengah	III 20
Tabel 4.1	Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2023 Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah.....	IV 24
Tabel 4.2	Keselarasn Tema Pembangunan Nasional, Indikasi Tema Pembangunan Provinsi Lampung dan Tema Kabupaten Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023.....	IV 25
Tabel 4.3	Penyelarasan Sasaran Prioritas Nasional dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	IV 25
Tabel 4.4	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten, Prioritas Daerah Provinsi dengan Prioritas Pembangunan Nasional.	IV 26
Tabel 4.5	Pemetaan Dukungan Kegiatan Terhadap Standar Pelayanan Minimal	IV 45
Tabel 5.1	Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	V 2
Tabel 6.1	Target dan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023.....	VI 1
Tabel 6.2	Target dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023.....	VI 3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Keterkaitan Antara RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Lainnya.....	I 6
Gambar 2.1	Peta Orientasi Kabupaten Lampung Tengah.....	II 1
Gambar 2.2	Peta Administrasi Kabupaten Lampung Tengah	II 3
Gambar 2.3	Peta Kelerengan Kabupaten Lampung Tengah.....	II 6
Gambar 2.4	Peta Geologi Kabupaten Lampung Tengah.....	II 8
Gambar 2.5	Peta Sub Das Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah	II 10
Gambar 2.6	Peta Curah Hujan Kabupaten Lampung Tengah.....	II 11
Gambar 2.7	Peta Tutupan Lahan Berdasarkan RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031.....	II 12
Gambar 2.8	Peta Tutupan Lahan Kab. Lampung Tengah Tahun 2011-2031	II 13
Gambar 2.9	Peta Sistem Perkotaan Kabupaten Lampung Tengah.....	II 19
Gambar 2.10	Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir	II 22
Gambar 2.11	Peta Kawasan Rawan Bencana Longsor.....	II 24
Gambar 2.12	Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi.....	II 25
Gambar 2.13	Grafik Perkembangan Indeks Gini/Koefisien Gini Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018-2021.....	II 38
Gambar 2.14	Grafik Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021.....	II 39
Gambar 2.15	Grafik Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021.....	II 40
Gambar 2.16	Grafik Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021.....	II 41
Gambar 2.17	Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021.....	II 41
Gambar 2.18	Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021.....	II 42
Gambar 2.19	Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Tengah.....	II 44

Gambar 2.20	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	
	Kabupaten Lampung Tengah.....	II 46
Gambar 2.21	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS)	
	Kabupaten Lampung Tengah.....	II 46
Gambar 2.22	Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	
	Kabupaten Lampung Tengah.....	II 47
Gambar 2.23	Perkembangan Pengeluaran Perkapita Kabupaten	
	Lampung Tengah.....	II 50

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).


Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 didasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005 - 2025, Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Kelurahan/Kampung, sampai dengan tingkat Kecamatan dan Kabupaten, serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, kebijakan Pemerintah Pusat dan kebijakan Pemerintah Propinsi, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara APBD, serta Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan

- 
- Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 23. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500)



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);

26. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 19);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 04);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Bupati. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program PD, lintas PD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama

dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-OPD, (4) RKPD dan (5) Renja-PD. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka Panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Undang-undang No. 25 tahun 2004

Gambar.11. Hubungan Keterkaitan Antara RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Lainnya

Mengacu pada Gambar di atas dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

- RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang.

- RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah
- RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja PD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap PD
- RKPD nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja PD.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 ini harus mengacu dan berpedoman pada dokumen RKP Nasional Tahun 2023, RKPD Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 - 2026.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD adalah untuk memberikan arah pembangunan Kabupaten Lampung Tengah dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2023 adalah sebagai :

- 1) Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2023;
- 2) Kerangka acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2023;
- 3) Pedoman bagi PD untuk menyusun Renja-PD; dan
- 4) Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam

periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra PD, Renja PD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD Provinsi Lampung, RTRW nasional, RTRW Provinsi Lampung, dan RTRW Kabupaten.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu dan realisasi target indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah, isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi PD.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berisi tentang perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan yang diambil dari dokumen RPJPD Kabupaten Lampung Tengah dan RKPD Provinsi Lampung.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

Berisi gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan arah pembangunan pada RPJPD Kabupaten Lampung Tengah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah tanggal 20 April 1999. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 maka Kabupaten Lampung Tengah secara resmi dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah sendiri. Kemudian pada tahun itu juga terjadi perpindahan Ibu Kota dari Metro ke Gunung Sugih.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki letak yang sangat strategis. Secara umum Kabupaten Lampung Tengah merupakan wilayah yang dinamis dan berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik pada bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor.

Gambar 2.1
Peta Orientasi Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

a. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah tanggal 20 April 1999. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 maka Kabupaten Lampung Tengah secara resmi dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah sendiri. Bersamaan dengan pembentukan tersebut, juga terjadi perpindahan Ibu Kota dari Metro ke Gunung Sugih. Menurut UU Nomor 12 Tahun 1999 ini, luas Kabupaten Lampung Tengah menjadi 3.802,68 Km².

Berdasarkan hasil survey Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) sekarang berubah menjadi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2002 yang meliputi pendataan seluruh wilayah kecamatan, diketahui bahwa luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah 4.659,37 Km². Kemudian berdasarkan hasil survey ulang oleh BAPPEDA Kabupaten Lampung Tengah tahun 2008 dalam kegiatan penyusunan Sistem Informasi Geografis Sumber Daya Alam, dilakukan koreksi terhadap luas Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh BAKOSURTANAL tersebut, sehingga Kabupaten Lampung Tengah mempunyai luas wilayah 4.789,82 Km². Data inilah yang selanjutnya digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Tengah dalam dokumen-dokumen dan publikasi resmi. aaaaa

Selanjutnya berdasarkan kebijakan Penggunaan Satu Sumber Peta (*One Map Policy*) Provinsi Lampung, disyaratkan penggunaan Peta Batas Administrasi yang bersumber dari Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) nomor 26.4 Tahun 2021. Berdasarkan peta tersebut dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode proyeksi Cylindrical Equal Area, sehingga diperoleh luas areal Kabupaten Lampung Tengah adalah **4.548,93 Km²** yang dipakai saat ini sebagai luas administrasi secara resmi.

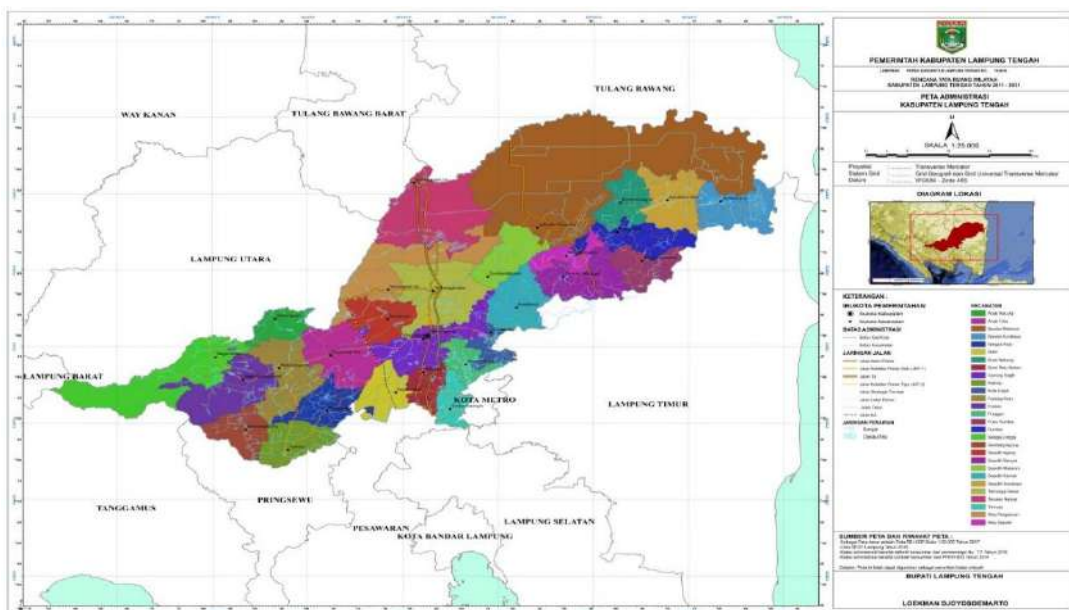
Secara geografis Kabupaten Lampung Tengah terletak di antara 104°35' sampai dengan 105°50' Bujur Timur dan 4°30" sampai dengan 4°15' Lintang Selatan dengan ibukota di Kota Gunung Sugih.

Secara administratif, Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 28 kecamatan, 10 kelurahan dan 301 kampung, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Lampung Utara.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pesawaran, Tanggamus dan Lampung Selatan.
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro.
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat.

Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi Lampung (13,57 persen dari total luas wilayah Provinsi Lampung). Kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kabupaten Lampung Tengah adalah Kecamatan Bandar Mataram dengan luas sebesar 101.789,15 hektar sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah terkecil adalah Kecamatan Kota Gajah seluas 4.690 Ha.

Gambar 2.2
Peta Administrasi Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2011-2031

Tabel 2.1
Jumlah Kampung/Kelurahan, Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah		Jumlah Kampung/Kel	
			km ²	%	Kampung	Keluraha
1	Padang Ratu	Haduyang Ratu	164,00	3,61	15	-
2	Anak Ratu Aji	Gedung Sari	70,22	1,54	6	-
3	Selagai	Negri Katon	272,63	6,00	14	-
4	Pubian	Negri	187,40	4,12	20	-
5	Anak Tuha	Negara AjiTua	162,68	3,58	12	-
6	Kalirejo	Kalirejo	111,90	2,46	17	-
7	Sendang	Sendang Agung	97,90	2,15	9	-
8	Bangun Rejo	Bangun Rejo	104,88	2,31	17	-
9	Gunung	Gunung Sugih	164,01	3,61	11	4
10	Bekri	Kusumadadi	94,15	2,07	8	-
11	BumiRatu	Bulusari	63,71	1,40	10	-
12	Trimurjo	Simbarwaringin	64,18	1,41	11	3
13	Punggur	Tanggul Angin	60,70	1,34	9	-
14	Kota Gajah	Kota Gajah	46,90	1,03	7	-
15	Seputih	Rukti Harjo	130,00	2,86	14	-
16	Terbanggi	Terbanggi Besar	217,15	4,78	7	3
17	Seputih	Dono Arum	106,96	2,35	10	-
18	Way	Tanjung Ratu	214,48	4,72	8	-
19	Terusan	Gunung Batin	289,69	6,37	7	-
20	Spt. Mataram	Kurnia	115,96	2,55	12	-
21	Bdr. Mataram	Jati Datar	1.017,8	22,39	9	-
22	Spt. Banyak	Tanjung	136,62	3,01	13	-
23	Way Seputih	Suko Binangun	62,34	1,37	6	-
24	Rumbia	Reno Basuki	118,39	2,60	9	-
25	Bumi Nabung	Bumi Nabung	97,75	2,15	7	-
26	Putra Rumbia	Binakarya	93,38	2,05	10	-
27	Spt.Surabaya	Gaya Baru Satu	141,55	3,11	13	-
28	Bdr.Surabaya	Surabaya Ilir	141,09	3,04	10	-
	Jumlah		4.548,9	100,	301	10

Sumber data: Keputusan Kepala BIG Nomor 26.4 Tahun 2021

b. Kondisi Topografi

Secara Topografi Lampung Tengah dapat dibagi 5 (lima) bagian yaitu:

- Daerah Topografi Berbukit sampai Bergunung.

Daerah ini terdapat di Kecamatan Selagai Lingga dengan ketinggian rata-rata 1.600 mdpl.

- Daerah Topografi Berombak sampai Bergelombang.
Ciri khusus daerah ini adalah terdapatnya bukit-bukit rendah yang dikelilingi dataran-dataran sempit, dengan kemiringan antara 8%-15% dan ketinggian antara 300-500 mdpl.
- Daerah Dataran Aluvial.
Dataran ini sangat luas, meliputi Lampung Tengah sampai mendekati pantai timur, juga merupakan bagian hilir dari sungai-sungai besar seperti Way Seputih dan Way Pengubuan. Ketinggian daerah ini berkisar antara 25-75 mdpl dengan kemiringan 0%-3%.
- Daerah Rawa Pasang Surut.
Daerah ini terletak di sebelah timur Kabupaten Lampung Tengah, mempunyai ketinggian antara 0,5-1 mdpl
- Daerah River Basin.
Kabupaten Lampung Tengah memiliki 3 dari 5 DAS di Provinsi Lampung yaitu sebagian besar adalah DAS Way Seputih dan sebagian kecil adalah DAS Way Sekampung di Kecamatan Selangai Lingga.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Tengah berada pada ketinggian 15-65 meter dpl dan mempunyai kemiringan lereng antara 0-2% (92,29%). Keadaan lereng bervariasi, mulai datar, landai, miring, dan terjal, dengan pengelompokan sebagai berikut:

- Lereng 0-2%, terletak pada ketinggian 50 meter dpl yang hampir tersebar di seluruh wilayah (92,16%).
- Lereng 2-15%, terletak pada ketinggian 50-100 meter dpl yang tersebar antara lain di Kecamatan Selagai Lingga dan Sendang Agung.
- Lereng 15-40%, terletak pada ketinggian 100-500 meter dpl yang tersebar antara lain di Kecamatan Selagai Lingga, dan Sendang Agung.
- Lereng diatas 40%, terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter dpl yang tersebar hanya di Kecamatan Selagai Lingga, dan Sendang Agung.

Berdasarkan karakteristik topografi tersebut, maka wilayah tanah usaha di Kabupaten Lampung Tengah dikelompokkan menjadi 5 golongan:

- **Tanah Usaha Khusus I.**

Tanah usaha ini terletak pada ketinggian 0 – 7 m dpl yang tersebar di daerah-daerah pertemuan air. Sebagian besar daerah ini tergenang air secara periodik atau terus-menerus tergantung pada besar kecilnya volume air yang tertampung di tempat tersebut.

- **Tanah Usaha Utama IA dan B**

Terletak pada ketinggian 7-40 m dpl yang dipergunakan untuk bendungan-bendungan besar dan pada ketinggian ini sebagian besar digunakan untuk usaha pertanian sawah.

- **Tanah Usaha Utama IC**

Terletak pada ketinggian 50-100 m dpl, yang merupakan daerah persawahan yang relatif baik, akan tetapi biasanya daerah yang bisa diairi relatif ber-kurang.

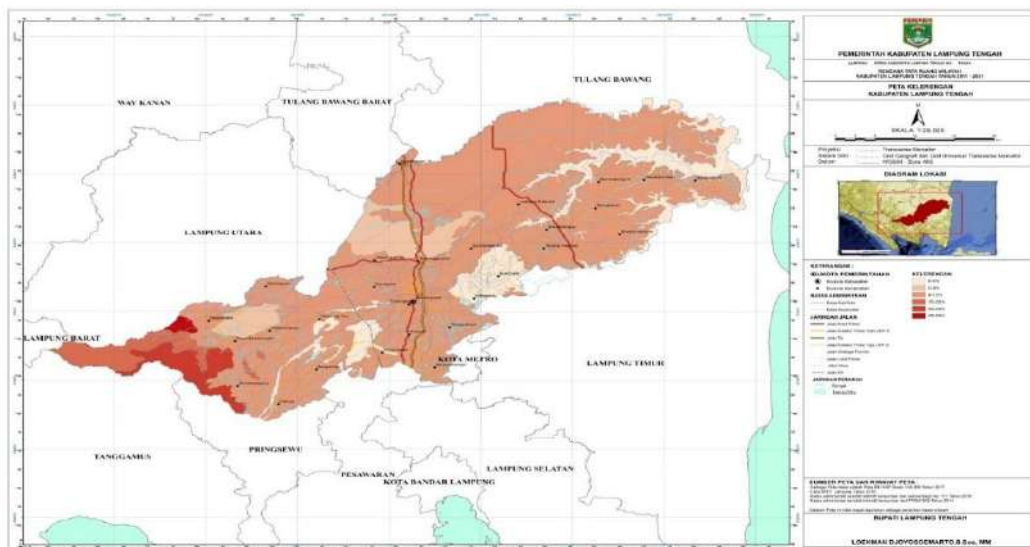
- **Tanah Usaha Utama ID**

Terletak pada ketinggian 100-500 m dpl dengan permukaan yang sudah agak bergelombang.

- **Tanah Usaha Utama II**

Terletak pada ketinggian 500-1000 m dpl yang merupakan daerah peralihan antara daerah yang beriklim panas dengan yang beriklim sedang.

Gambar 2.3
Peta Kelereng Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

c. Kondisi Geologi

Di Kabupaten Lampung Tengah terdapat aliran asam batuan gunung berapi yaitu Luffa Lampung (Latosol) yang hampir meliputi seluruh daerah Lampung Tengah dengan tanah Latosol dan Podsolik. Pada ketinggian 50-500 meter terdapat bahan Luffa Lampung yang semakin ke barat semakin tinggi letaknya, terdiri dari endapan Gunung Api (Plistosen). Di bagian utara wilayah ini terdapat formasi Palembang yang lebih didominasi oleh morfologi dataran rendah, sedangkan bagian barat daya fisiografinya menjadi daerah berbukit dan pegunungan karena masuk Jalur Bukit Barisan.

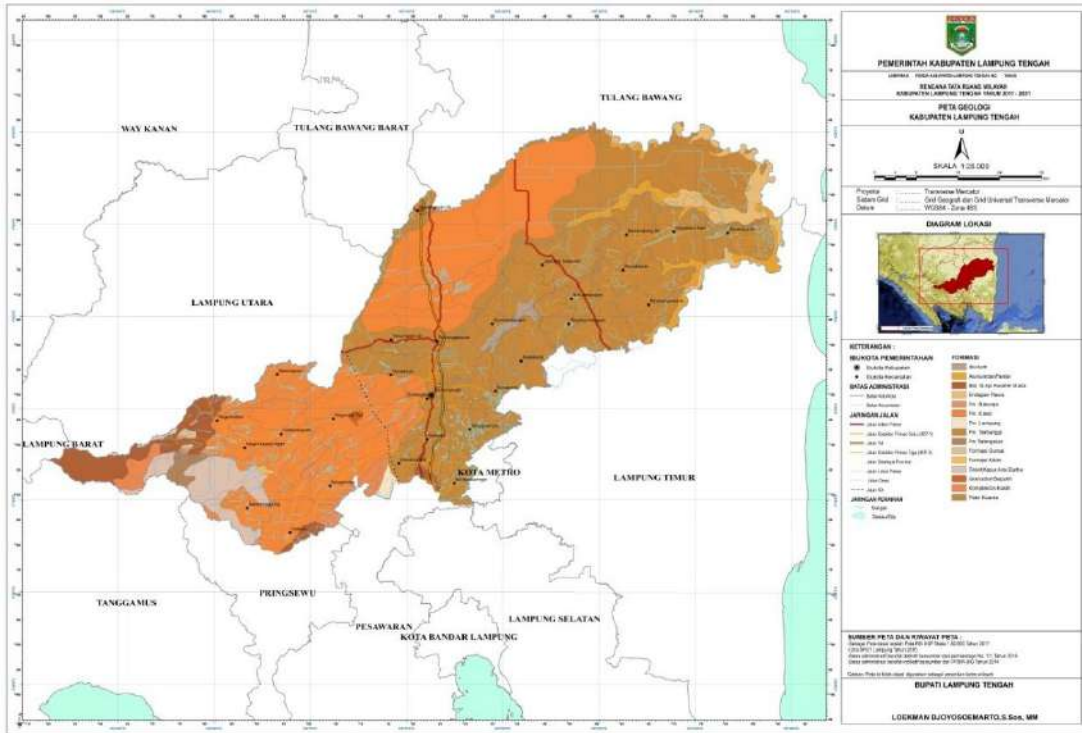
Di wilayah Kecamatan Kalirejo dan Bangunrejo terdapat batuan Tasobosan, Granit Kapen dan batuan Metamorf Sakis (Pratersier) selain juga mempunyai potensi sumber bahan galian batu Gamping Endapan batuan di wilayah Kabupaten Lampung Tengah didominasi oleh *tuffs with purniceous* dan *Coarse grained clastic tuffaceous*.

Bagian utara Kabupaten Lampung Tengah lebih didominasi oleh endapan tuffs dengan purniceous, sedangkan bagian selatan lebih didominasi oleh *Coarse grained clastic tuffaceous*. Namun begitu formasi-formasi batuan lainnya tetap ada diantaranya yaitu:

1. Endapan pasir kwarsa, rawa, dan alluivium.
2. Batuan gunung api kuartar muda dengan komposisi batuan breksi, lava, dan andesit-basaltis.
3. Formasi Lampung. Formasi ini terdiri atas batuan tuff berbatu apung, batuan pasir tufan dan sisipan tufit yang berumur Plestocin.
4. Formasi Terbanggi yang menjadi dengan formasi Kasai. Komposisi batuan ini meliputi batuan pasir dengan sisipan batulempung.
5. Formasi Kasai. Merupakan perselingan batu pasir tufaan dengan tuff batu apung, strukturnya yaitu silang siur, sisipan tipis lignis dan kayu terkesikan.
6. Formasi Gumai yang bermumur Miosen Awal-Tengah. Formasi ini tersusun oleh batuan serpih gamping, napal, batu lempung, dan batu lanau.
7. Formasi Hulu Simpang. Susunan batuan ini terdiri atas batuan breksi gunung api, lava, tuff bersusunan andesitik basaltik terubah, berurat kuarsa dan mineral sulfida.

8. Formasi Talangakar yang berumur Oligosen dengan susunan breksi konglomerat, batupasir kuarsa, batu pasir sisipan lignit/batubara, dan batu gamping.
9. Formasi Komplek Gunung Asih dengan susunan batuan malihan seperti Sekis, kuarsit, marmar, gneis, dan perlit.
10. Batuan terobosan Mesoizoikumakhir.


Gambar 2.4
Peta Geologi Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

d. Kondisi Hidrologi

Secara hidrologi sungai-sungai di Kabupaten Lampung Tengah masuk dalam Wilayah Sungai (WS) Way Seputih dan Way Sekampung. Keadaan hidrologi di Kabupaten Lampung Tengah dipengaruhi oleh beberapa sungai baik sungai besar maupun sungai kecil. Salah satu sungai yang menjadi perhatian di Kabupaten Lampung Tengah adalah sungai Way Seputih yang membentang sejauh 193 km dan melintasi 12 kecamatan. Sungai Way Seputih ini dikategorikan sebagai salah satu dari 7 (tujuh) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di Provinsi Lampung. Luas wilayah DAS Way Seputih sendiri adalah 749.299,20 ha yang meliputi 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota. Wilayah DAS Way Seputih terbesar adalah di Kabupaten Lampung Tengah dengan luas 461.922,20 ha atau 61,65% dari luas DAS Way Seputih.



Selain terdapatnya DAS Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah juga menjadi bagian dari wilayah DAS lainnya seperti DAS Sekampung di bagian selatan dan DAS Tulang Bawang di bagian utara. Dengan demikian, wilayah Kabupaten Lampung Tengah menjadi jalur wilayah bagi 3 (tiga) DAS di Provinsi Lampung yaitu:

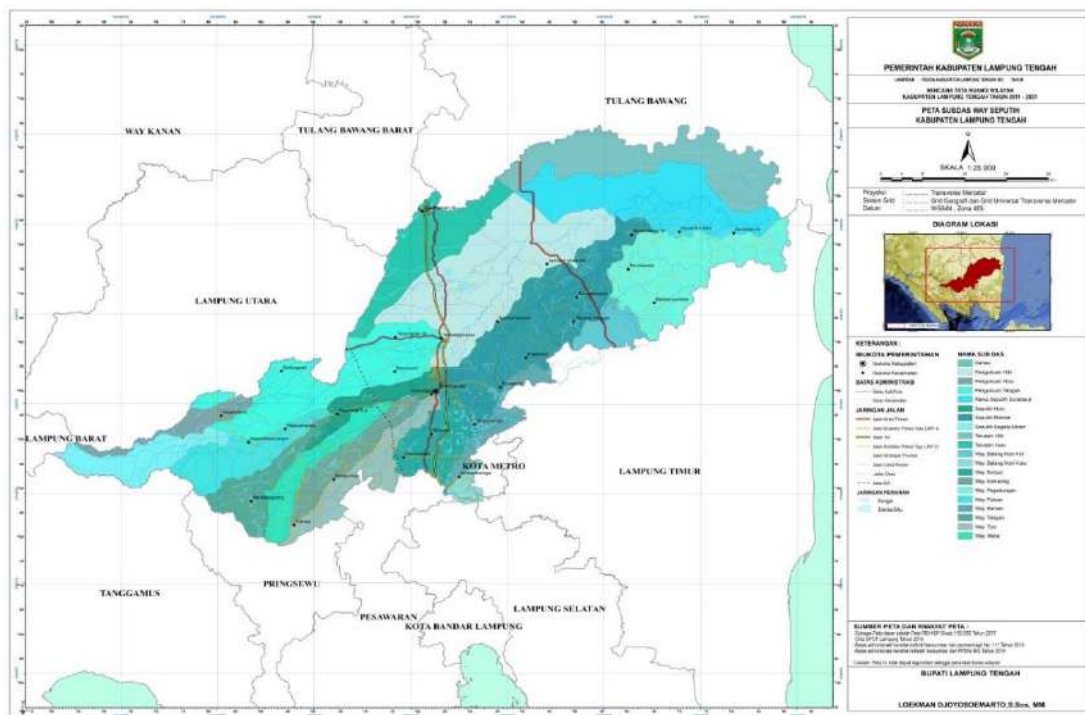
1. DAS Way Seputih.
2. DAS Way Sekampung.
3. DAS Way Tulang Bawang.

Tidak kurang dari 18 (delapan belas) sungai dan anak sungainya terdapat di Kabupaten Lampung Tengah. Sungai-sungai tersebut membelah dan membentang di wilayah Kabupaten Lampung Tengah dengan total panjang sungai-sungai secara keseluruhan adalah 813 km melebihi panjang garis keliling Kabupaten Lampung Tengah (517,077 km). Beberapa sungai yang mengalir di Kabupaten Lampung Tengah, adalah:

1. Way Waya
2. Way Ketaya
3. Kali Pasir
4. Way Besi
5. Kali Macas
6. Way Tipo
7. Way Seputih
8. Way Pengakuan
9. Way Tatayan
10. Way Pubian
11. Kali Punggur
12. Way Sekampung
13. Way Raman
14. Way Bening
15. Way Keliwang
16. Way Buring
17. Way Pengubuan
18. Way Pengandungan



Gambar 2.5
Peta Sub DAS Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

e. Kondisi Klimatologi

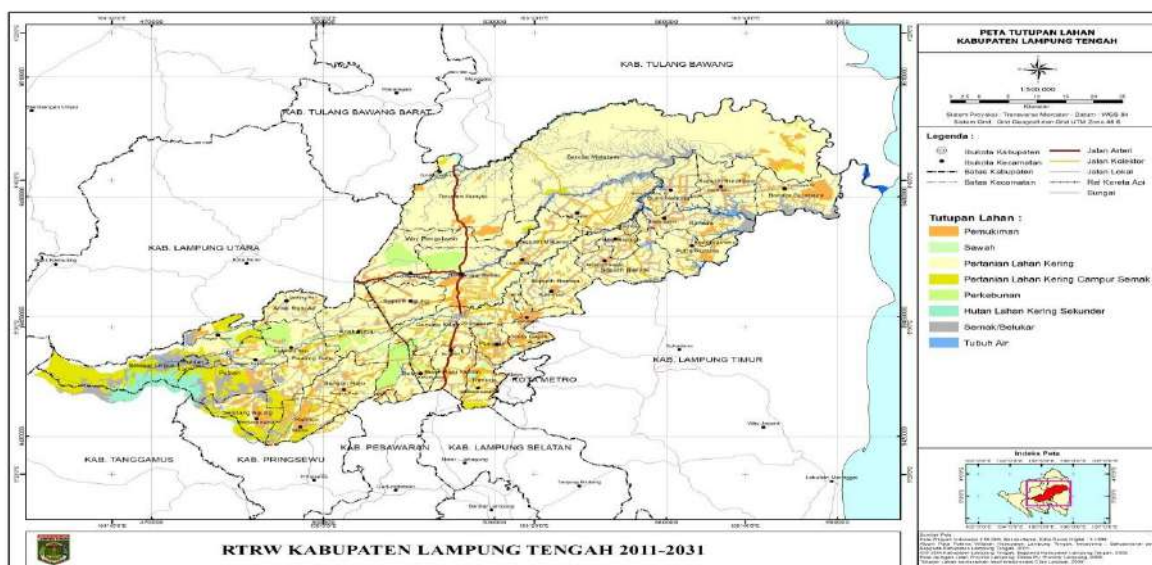
Sebagaimana daerah tropis lainnya, Kabupaten Lampung Tengah hanya memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Iklim di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson termasuk dalam kategori iklim A. Sebagian besar wilayah bagian timur dan utara Kabupaten Lampung Tengah merupakan daratan rendah yang mempunyai ketinggian berkisar antara 0-50 mdpl sedangkan pada wilayah bagian barat merupakan pegunungan dengan Kecamatan Pubian (Kampung Kota Batu) dengan ketinggian berkisar 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan titik terendah berada di Kecamatan Bandar Surabaya (Kampung Cabang/Sadewa) yang ketinggiannya hanya 7 meter di atas permukaan laut.

Wilayah dengan jumlah curah hujan tertinggi berada di wilayah utara sekitar Kecamatan Bandar Mataram dan Terusan Nunyai dengan curah hujan di atas rata-rata curah hujan tahunan, yaitu antara 180-260 mm/bulan. Curah hujan rendah atau di bawah rata-rata berada di sekitar Kecamatan Bekri, Padang Ratu, Bangunrejo, Kalirejo, dan Anak Tuha yang merupakan kawasan sentra perkebunan sawit di Kabupaten Lampung Tengah. Kawasan terbagus yang saat ini menjadi pusat

f. Kondisi Tutupan Lahan

Komposisi penggunaan lahan di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2009, seperti teruang dalam revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031, didominasi oleh lahan bukan sawah sebesar 65,75 persen yang terdiri dari ladang/huma, tegal dan perkebunan, dan lahan sawah 28,929 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Pengembangan pertanian sawah dan bukan sawah akan sangat berarti untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan wilayah.

Gambar 2.7
Peta Tutupan Lahan Berdasarkan RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031



Sumber data: RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

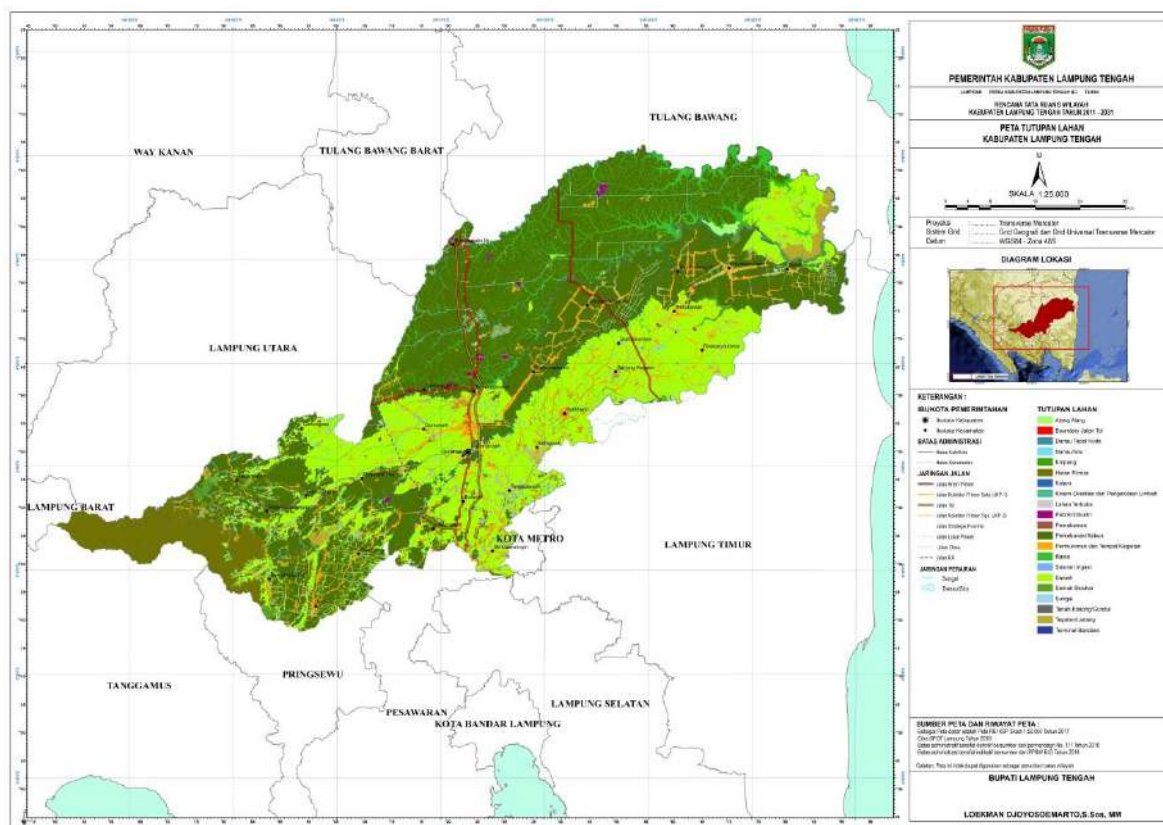
Tabel 2.2
Tutupan Lahan Berdasarkan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

No.	JENIS	LUAS (ha)	(%)
1	Alang Alang	846,54	0,186
2	Boundary Jalan Tol	772,22	0,170
3	Danau Tapal Kuda	68,86	0,015
4	Danau/Situ	224,35	0,049
5	Empang	203,00	0,045
6	Hutan Rimba	26426,75	5,814
7	Kolam Oksidasi & Pengelolaan Limbah	300,58	0,066
8	Lahan Terbuka	38,81	0,009
9	Pabrik/Industri	1535,85	0,338
10	Pemukaman	1,83	0,0004
11	Perkebunan/Kebun	219317,59	48,249
12	Permukiman dan Tempat Kegiatan	37532,66	8,257
13	Rawa	20419,93	4,492
14	Saluran Irigasi	535,54	0,118
15	Sawah	131496,07	28,929
16	Semak Belukar	5534,65	1,218

No.	JENIS	LUAS (ha)	(%)
17	Sungai	2325,35	0,512
18	Tanah Kosong/Gundul	876,69	0,193
19	Tegalan/Ladang	6070,90	1,336
20	Terminal Bandara	21,88	0,005
	Jumlah	454893	100,00

Sumber : Revisi RTRW Kab. Lampung Tengah Tahun 2011-2031

Gambar 2.8
Peta Tutupan Lahan Kab. Lampung Tengah Tahun 2011-2031




Sumber data: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

g. Kondisi Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Lampung Tengah turut memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031. Pertimbangan ini dilakukan dalam upaya mewujudkan ruang Kabupaten Lampung Tengah sebagai kawasan agribisnis yang berwawasan lingkungan, serta mampu menggerakkan perekonomian wilayah. Berdasarkan RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 – 2031, sistem pusat kegiatan Kabupaten terbagi atas:

1. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp); adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala provinsi atau beberapa kabupaten serta berperan sebagai penyeimbang dalam pengembangan wilayah provinsi meliputi kawasan perkotaan Terbanggi Besar, perkotaan Bandar Jaya, dan perkotaan Gunung Sugih (TERBAGUS) yang berfungsi sebagai Pusat pemerintahan dan pelayanan regional, pusat pendidikan unggulan terpadu, pusat permukiman, pusat perdagangan dan jasa regional, pusat koleksi dan distribusi, serta simpul transportasi regional.
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan meliputi : (1) PKL Kalirejo di kawasan perkotaan Kalirejo yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pertanian, industri kecil dan menengah, minapolitan dan permukiman; dan (2) PKL Seputih Banyak di kawasan perkotaan Seputih Banyak yang berfungsi sebagai pusat pengolahan hasil pertanian, industri menengah dan besar, perdagangan jasa dan permukiman.
3. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala kabupaten atau beberapa kecamatan serta berperan sebagai penyeimbang dalam pengembangan wilayah kabupaten, yaitu PKLp Bandar Sari di kawasan perkotaan Padang Ratu yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan perkebunan, perdagangan jasa dan konservasi.
4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan, meliputi:
 - a. PPK Kota Gajah di kawasan perkotaan Kota Gajah yang berfungsi sebagai pusat pengembangan hasil pertanian, perdagangan dan jasa, dan minapolitan;
 - b. PPK Wates di kawasan perkotaan Bumi Ratu Nuban yang berfungsi sebagai pusat pengembangan tanaman bahan pangan dan buah-buahan dan pusat pemasaran produk unggulan;

- 
- c. PPK Kurnia Mataram di kawasan perkotaan Seputih Mataram yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pertanian dan perkebunan, industri kecil dan rumah tangga dan pengem-bangan peternakan sapi;
 - d. PPK Gaya Baru I di kawasan perkotaan Seputih Surabaya yang berfungsi sebagai pusat pengem-bangan pertanian tanaman pangan, pengembang-an perkebunan, perdagangan jasa dan konservasi hutan lindung.
5. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, meliputi: dddd
- a. PPL Dono Arum yang berfungsi sebagai pengem-bangan peternakan sapi dan industri menengah;
 - b. PPL Sendang Mulyo yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian dan peternakan, pengembangan industri dan kawasan wisata;
 - c. PPL Bangun Rejo berfungsi sebagai pengem-bangan komoditi perkebunan, pengembangan peternakan, dan kawasan industri;
 - d. PPL Sukobinangun yang berfungsi sebagai pengembang pertanian lahan kering dan kawasan industri kecil menengah;
 - e. PPL Reno Basuki yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, pertanian lahan basah, dan permukiman perkampungan;
 - f. PPL Bina Karya Utama yang berfungsi sebagai pengembangan perkebunan dan permukiman pekampungan;
 - g. PPL Surabaya Ilir yang berfungsi sebagai kawasan minapolitan, perdagangan jasa, dan konservasi kawasan lindung;
 - h. PPL Negeri Kepayang yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian, pengembangan perke-bunan, dan pengembangan agribisnis/industri pengolahan;
 - i. PPL Gedung Sari yang berfungsi sebagai pengam-bangan pertanian lahan basah dan permukiman pekampungan;



- j. PPL Trimurjo yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian lahan basah, Sentra pemasaran pertanian dan perdagangan jasa;
- k. PPL Tanggul Angin yang berfungsi sebagai pengembangan agrobisnis dan tanaman pangan, perdagangan jasa;
- l. PPL Rukti Harjo yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian lahan basah dan pengembangan ternak besar; dan
- m. PPL Kusumodadi yang berfungsi sebagai pengembangan perkebunan, peternakan dan pertanian hortikultura.

Adapun rencana sistem perkotaan Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031 adalah sebagai berikut:

- 1) **Pusat Kegiatan Lokal (PKL)** ; PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL di Kabupaten Lampung Tengah telah ditetapkan dalam RTRWP Lampung 2009 – 2029 di dua wilayah yaitu:
 - a. **PKL TERBAGUS yang meliputi Kecamatan Terbanggi Besar, Bandar Jaya dan Gunung Sugih** memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan unggulan terpa-du, perdagangan dan jasa dan pusat koleksi dan distribusi. PKL TERBAGUS akan melayani seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah.
 - b. **PKL Kalirejo** dengan fungsi utama pusat perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pengembangan industri kecil dan menengah, pengembangan produksi perikanan air tawar. PKL Kalirejo akan melayani beberapa kecamatan disekitarnya seperti Kecamatan Bangun Rejo, dan Kecamatan Bekri.
 - c. **PKL Seputih Banyak** dengan fungsi utama pusat pengolahan hasil pertanian dan perikanan budidaya air tawar, payau, penangkapan dan industri pengolahan. PKL Seputih Banyak akan melayani beberapa Kecamatan di sekitarnya diantaranya yaitu Kecamatan Way Seputih, Seputih Raman, Rumbia, dan Seputih Surabaya.

2) **Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);** PPK merupakan kawasan perkotaan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK di Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan di empat wilayah yaitu;

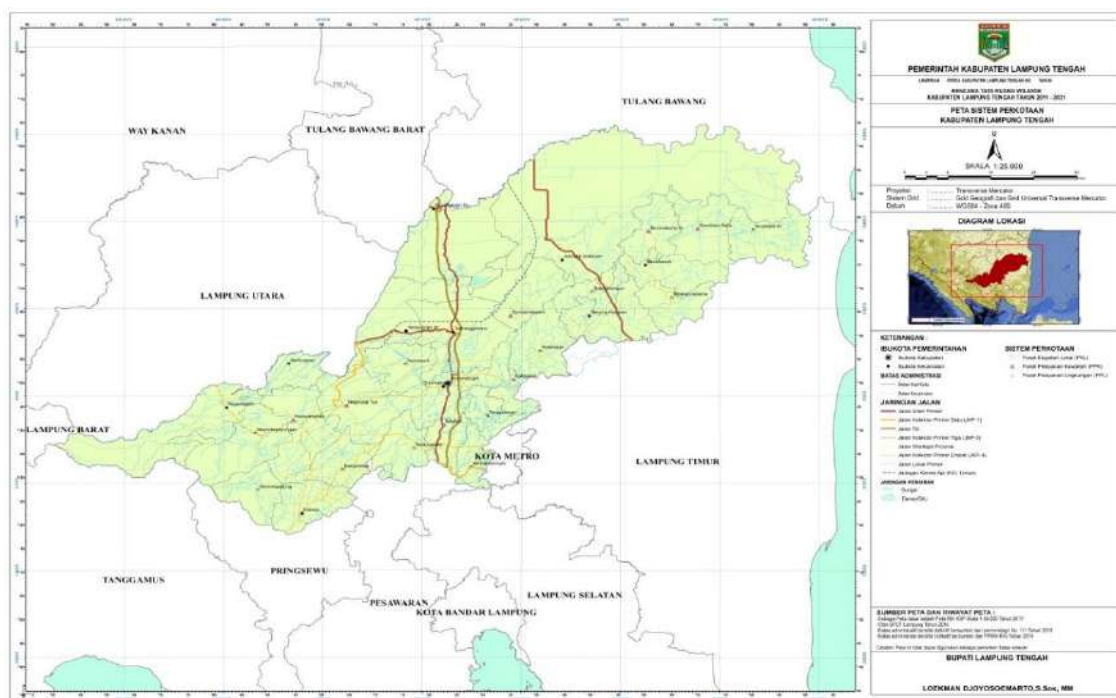
- a. **PPK Haduyang Ratu** di kawasan perkotaan Padang Ratu yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan perkebunan, perdagangan jasa dan permukiman perkotaan.
- b. **PPK Kota Gajah** di kawasan perkotaan Kota Gajah yang berfungsi sebagai pengembangan hasil pertanian, perdagangan dan jasa, serta kawasan minapolitan.
- c. **PPK Gaya Baru I** di kawasan perkotaan Seputih Surabaya yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan perkebunan, perdagangan dan jasa dan kawasan hutan lindung.
- d. **PPK Bulusari** di kawasan perkotaan Bumi Ratu Nuban yang berfungsi sebagai pusat pengembangan tanaman bahan pangan dan buah-buahan dan pusat pemasaran produk unggulan;
- e. **PPK Kurnia Mataram** di kawasan perkotaan Seputih Mataram yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pertanian dan perkebunan, industri kecil dan rumah tangga dan pengembangan peternakan sapi;
- f. **PPK Bumi Nabung Ilir**, PPK Bumi Nabung ditetapkan untuk mengakomodir rencana pembentukan pusat pemerintahan di rencana DOB Seputih Timur. Adapun fungsi utama PPK Bumi Nabung adalah sebagai Pengembangan pertanian tanaman pangan, pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa dan permukiman perkotaan.
- g. **PPK Negara Aji Tuha**, PPK Anak Tuha memiliki fungsi utama sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, simpul transportasi darat dan permukiman perkotaan.
- h. **PPK Reno Basuki**, PPK Rumbia memiliki fungsi utama sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, permukiman perkotaan, dan perdagangan dan jasa.

- 3) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);** merupakan kawasan perkotaan yang melayani kegiatan skala antar desa. PPL di Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan di 13 wilayah yaitu:
- a. PPL Dono Arum dengan fungsi utama sebagai pengembangan peternakan sapi dan industri menengah. PPL Dono Arum akan melayani seluruh kampung dalam Kecamatan Seputih Agung.
 - b. PPL Sendang Agung dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian dan peternakan, pengembangan industri, dan pariwisata. PPL Sendang Agung akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Sendang Agung.
 - c. PPL Bangun Rejo dengan fungsi utama sebagai pengembang komoditi perkebunan, peternakan, dan kawasan industri. PPL Bangun Rejo akan melayani kegiatan di seluruh kampung di Kecamatan Bangun Rejo.
 - d. PPL Sukobinangun dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian lahan kering dan industri kecil dan menengah. PPL Sukobinangun akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Way Seputih.
 - e. PPL Bina Karya Utama dengan fungsi utama sebagai pengembangan komoditi perkebunan. PPL Bina Karya Utama akan melayani kampung-kampung di Kecamatan Putra Rumbia
 - f. PPL Surabaya Ilir dengan fungsi utama sebagai kawasan minapolitan, perdagangan dan jasa, serta konservasi kawasan lindung. PPL Surabaya Ilir akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Bandar Surabaya.
 - g. PPL Negeri Kepayungan dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian perkebunan, dan agribisnis/ industri pengolahan. PPL Negeri Kepayang akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Pubian.
 - h. PPL Gedung Sari dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian lahan basah dan permukiman pedesaan. PPL Gedung Sari akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Anak Ratu Aji.
 - i. PPL Trimurjo dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian lahan basah dan kering, sentra pemasaran hasil

pertanian, dan perdagangan dan jasa. PPL ini akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Trimurjo.

- j. PPL Tanggul Angin dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian lahan basah, pengembangan agrobisnis, serta perdagangan dan jasa. PPL Tanggul Angin akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Punggur.
- k. PPL Rukti Harjo dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian lahan basah, dan pengembangan ternak besar. PPL Rukti Harjo akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Seputih Raman.
- l. PPL Kusumodadi dengan fungsi utama sebagai pengembangan perkebunan, peternakan, dan tanaman hortikultura. PPL Kusumodadi akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Bekri.

Gambar 2.9
Peta Sistem Perkotaan Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah 2011-2031

Wilayah kabupaten Lampung Tengah mempunyai pengaruh penting terhadap pengembangan ekonomi, sosial, budaya maupun lingkungan yang menjadi prioritas dalam kebijakan penataan ruang daerah. Ditetapkan kawasan strategis Propinsi Lampung dari sudut kepentingan ekonomi berupa Kawasan Strategis Perkotaan Bandar Lampung yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah meliputi 2 kecamatan yaitu

Kecamatan Trimurjo dan Kecamatan Punggur. Kedua Kecamatan tersebut merupakan PPL dengan garis besar RTR sebagai Kawasan tanaman pangan berupa Lahan Sawah Produktif yang dapat direncanakan dalam kawasan strategis Provinsi sebagai kawasan penyangga pangan terhadap Kawasan Strategis Provinsi tersebut

Penetapan kawasan strategis didalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah dibagi menjadi dua terdiri atas:


1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi
Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi berada pada :
 - a. Kawasan TERBAGUS di Kecamatan Gunung Sugih dan Kecamatan Terbanggi Besar; dan
 - b. Kawasan Technopark di kecamatan Anak Tuha.
2. Kawasan staregis dari sudut kepentingan sosial budaya
Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya berada pada kawasan Danau Tirta gangga di Kecamatan Seputih Banyak.

h. Kondisi Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan kondisi eksisting wilayah, Kabupaten Lampung Tengah tidak memiliki resiko bencana alam geologi seperti letusan gunung berapi dan tsunami dikarenakan wilayahnya tidak dilalui oleh jalur pegunungan dan jauh dari laut. Peta potensi gerakan tanah terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa potensi gerakan tanah di sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Tengah masuk dalam kategori sedang ke rendah. Dengan demikian jenis bencana alam yang potensi terjadi adalah banjir, tanah longsor dan gempa bumi, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Kawasan Rawan Bencana Banjir

Secara alamiah, pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan di atas normal, sehingga sistim pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Kemampuan/daya tampung sistem pengaliran air berkurang akibat



sedimentasi, maupun penyempitan sungai akibat fenomena alam dan manusia. Secara umum pada sebuah sistem aliran sungai yang memiliki tingkat kemiringan (gradien) sungai yang relatif tinggi (lebih dari 30%) apabila di bagian hulunya terjadi hujan yang cukup lebat, maka potensi terjadinya banjir bandang relatif tinggi. Tingkat kemiringan sungai yang relatif curam ini dapat dikatakan sebagai faktor “bakat” atau bawaan. Sedangkan curah hujan adalah salah satu faktor pemicu.

Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (*catchment area*) juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air yang masuk ke dalam sistem pengaliran air menjadi tinggi sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan curam yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem pengaliran air dan wadah air lainnya. Selain itu berkurangnya daerah resapan air di wilayah daratan juga berkontribusi terhadap meningkatnya debit banjir.

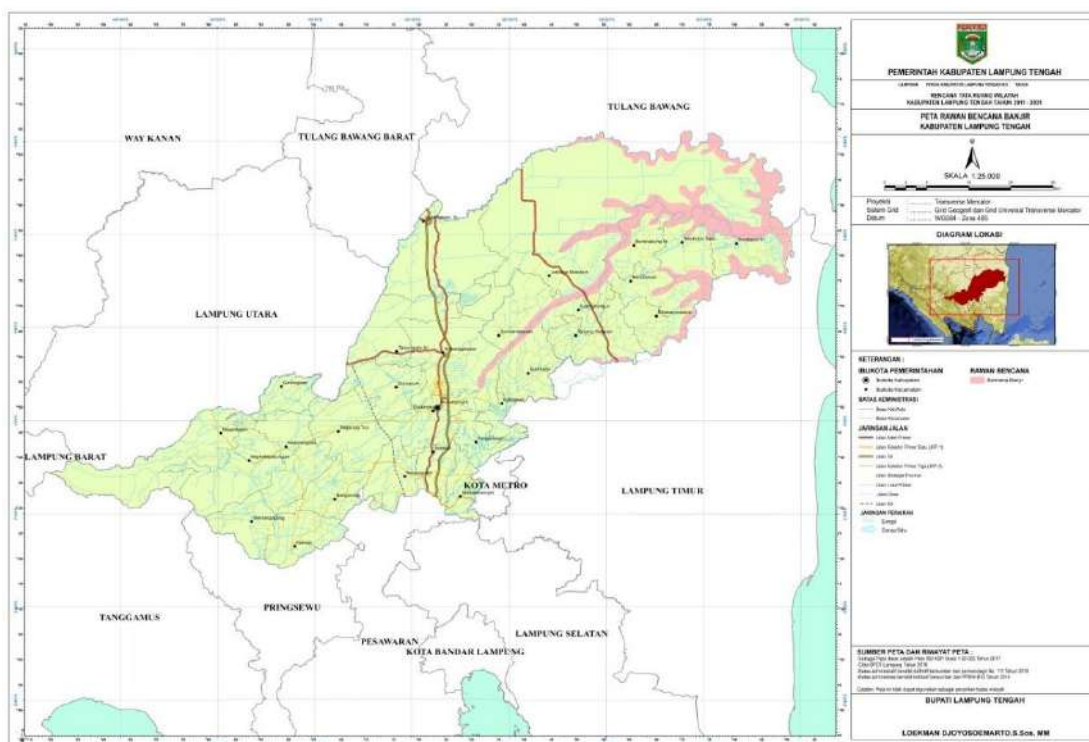
Pada daerah permukiman yang telah padat dengan bangunan sehingga tingkat resapan air ke dalam tanah berkurang, jika terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi sebagian besar air akan menjadi aliran permukaan yang langsung masuk ke dalam sistem pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir.

Perilaku manusia yang menimbulkan bencana banjir diantaranya kegiatan pembalakan kayu secara ilegal, proyek-proyek pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, perkebunan kopi skala besar, HPH, HTI, dan IPK yang tidak direncanakan dengan baik telah menyebabkan terjadinya banjir. Akibatnya, beberapa DAS di Lampung Tengah kondisinya semakin kritis, sehingga diperlukan adanya manajemen pengelolaan air. Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Lampung Tengah secara umum terjadi di sekitar bantaran sungai Way Seputih dengan total luas sekitar 41.524,15 Ha yang melalui sebagian besar wilayah yaitu Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Way Seputih, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Gunung



Sugih, Kecamatan Terbanggi Besar dan Kecamatan Putra Rumbia namun demikian kawasan yang paling rawan diantaranya adalah Kecamatan Bandar Surabaya khususnya di Kampung Cabang.

Gambar 2.10
Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir



Sumber data: Dokumen Revisi RTRW Kab. Lampung Tengah Tahun 2011-2031

2) Kawasan Rawan Bencana Longsor

Bencana longsor merupakan suatu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Longsor merupakan bentuk erosi yang pengangkutan atau pemindahan tanahnya terjadi pada suatu saat yang relatif pendek dalam volume yang sangat besar. Longsor sangat dipengaruhi oleh keseimbangan air dalam tanah.

Apabila keseimbangan air terganggu maka aliran permukaan akan meningkat yang mengakibatkan laju erosi meningkat. Tanah yang jenuh air berpo-tensi untuk longsor, pada umumnya longsor terjadi apabila:

- a. Kemiringan lereng cukup curam, sehingga memungkinkan massa tanah bergerak secara gravitasi
- b. Curah hujan yang tinggi: intensitas hujan tinggi dan jangka waktu hujannya lama

- c. Adanya bidang peluncur atau bidang gelincir (slide bed-plane) dibawah permukaan tanah. Dapat berupa lapisan atau batuan kedap air (impermeable layer)

Longsor dipengaruhi oleh curah hujan, penggunaan lahan, topografi, erodabilitas, serta tanaman penutup, yang dapat mengakibatkan:

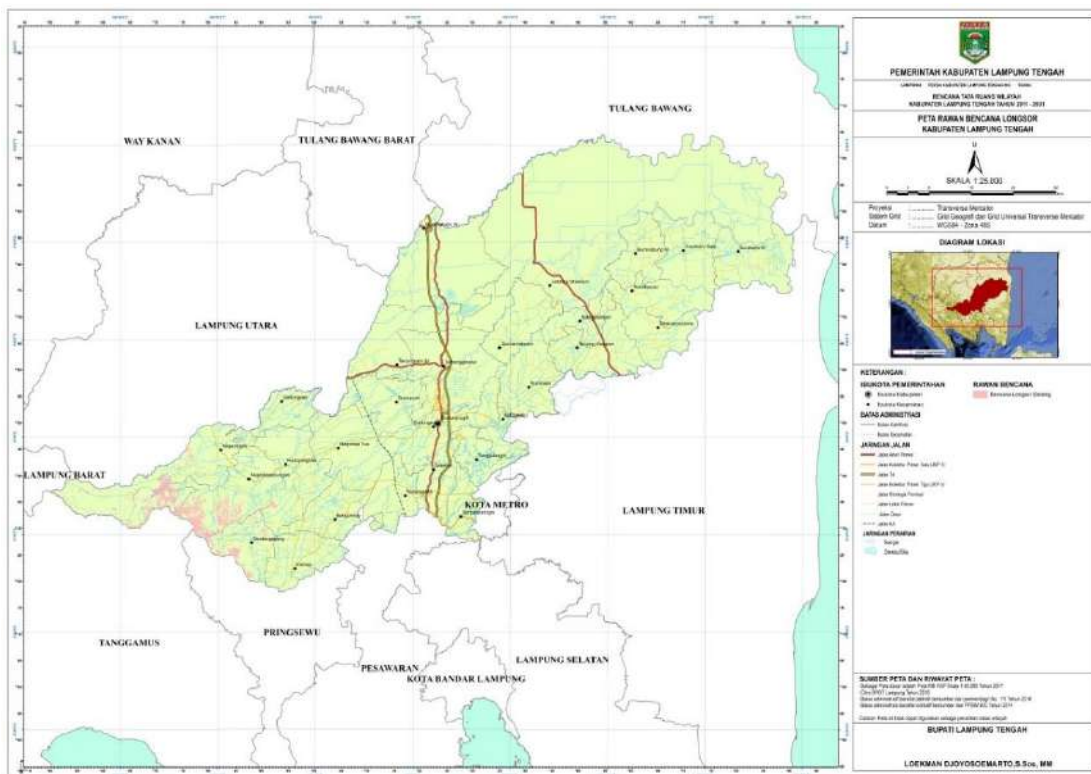
- Kerusakan lingkungan
- Kerusakan lahan pertanian
- Kerusakan pemukiman, sarana, prasana
- Kehilangan aset ekonomi dan manusia.

Selain itu, bahaya ikutan akibat longsor adalah bencana banjir, termasuk banjir yang membawa material keras, seperti kayu yang berasal dari pohon-pohon (debris flow), yang dapat menyebabkan kerugian harta benda bahkan jiwa. Tanah longsor dapat disebabkan karena:

- Getaran-getaran bumi karena gempa, peledakan (bom, dan lain lain.)
- Perubahan kadar air dalam tanah akibat hujan lebat atau kenaikan ketinggian muka air
- Hilangnya penopang tanah permukaan bumi yang bisa terjadi akibat erosi
- Peningkatan beban pada tanah yang disebabkan oleh hujan deras, salju, oleh penumpukan batu-batu lepas, atau bahan-bahan yang dimuntahkan gunung api, bangunan, sampah/limbah, tanaman.
- Pengairan atau tindakan fisik/kimiawi lainnya yang dapat menurunkan kekuatan tanah dan bebatuan dalam jangka waktu tertentu.

Kawasan rawan bencana tanah longsor dengan luas sekitar 6.777,26 Ha berada di sekitar kawasan hutan lindung di Kecamatan Selagai Linggga, Kecamatan Pubian, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Bangun Rejo dan Kecamatan Sendang Agung.

Gambar 2.11
Peta Kawasan Rawan Bencana Longsor



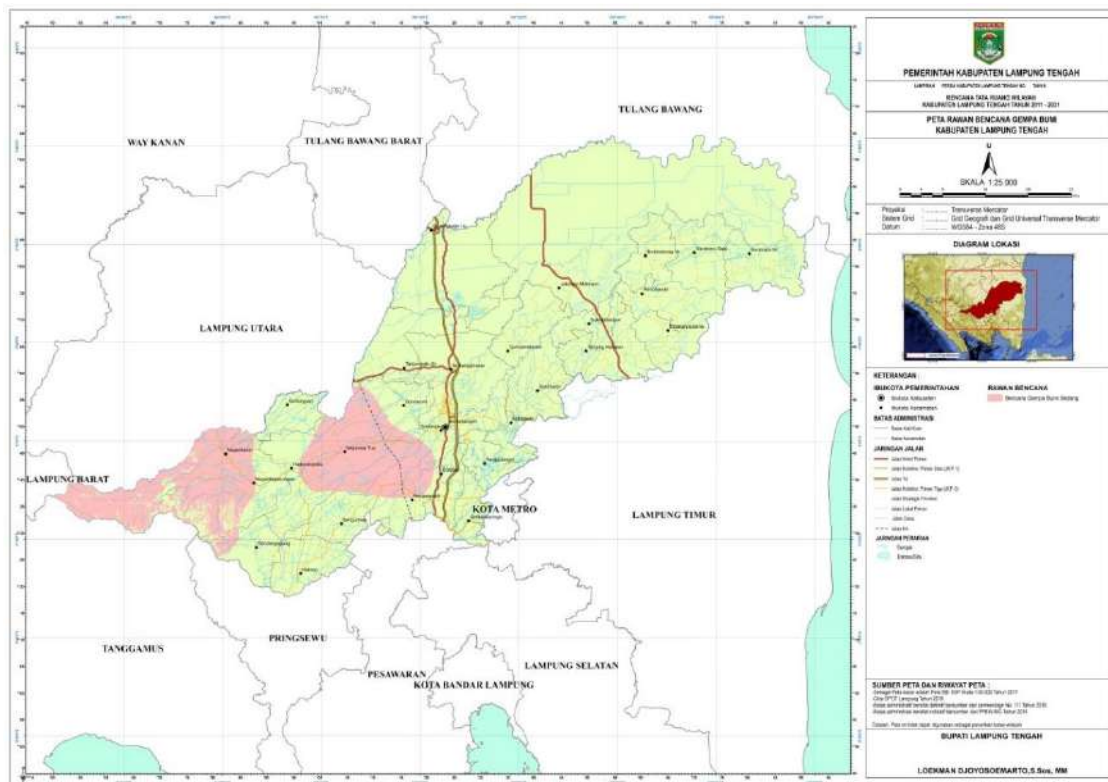
Sumber data: Revisi RTRW Kab. Lampung Tengah Tahun 2011-2031

3) Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Bencana Gempa Bumi adalah bencana alam berupa peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Gempa Bumi terjadi karena pergerakan kerak bumi (lempeng bumi).

Kawasan rawan bencana gempa bumi di Kabupaten Lampung Tengah mayoritas berkategori sedang tersebar di Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Pubian, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Way Pengubuan, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Anak Ratu Aji dan Kecamatan Anak Tuha seluas kurang lebih 68.595,4 ha.

Gambar 2.12
Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Wilayah



Sumber data: Dokumen Revisi RTRW Kab. Lampung Tengah Tahun 2011-2031

Mengacu pada Indeks Risiko Bencana (IRB) dalam dokumen Rencana Nasional Penanggulangan Rencana 2020-2024 oleh BNPB, dalam hal ini Kabupaten Lampung Tengah berada pada kelas risiko sedang dengan skor 131,20.

Tabel 2.3
Persentase Ancaman Bencana Kekeringan, Gempa, Dan Kebakaran Hutan Berdasarkan Luas Wilayah di Kabupaten Lampung Tengah

No	Ancaman Bencana	Kelas Resiko (%)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Kekeringan	8%	23% ^c	23%	0.04	41%
2	Gempa	24%	17%	19%	30%	10%
3	Kebakaran Hutan dan Lahan	1 %	30%	7%	40%	5%
4	Banjir Bandang	17%	19%	20%	24%	19%

Sumber data: BNPB Kabupaten Lampung Tengah

i. Aspek Demografi

Penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan, keadaan penduduk sangat menentukan keberhasilan karena penduduk bukan hanya sebagai sasaran pembangunan tetapi juga merupakan pelaku pembangunan.

Penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 berjumlah 1.477.395 jiwa. Penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 didominasi oleh penduduk laki-laki yang berjumlah 755.635 jiwa dan penduduk perempuan 721.760 jiwa. Banyaknya penduduk laki-laki tercermin dari rasio jenis kelamin, pada tahun 2020 rasio jenis kelamin 104,83 artinya pada tahun 2021 setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki.

Komposisi penduduk menurut umur dapat dipakai untuk menghitung angka beban ketergantungan yang lebih dikenal sebagai *Dependency Ratio* (DR). Selama periode tahun 2017-2021, Rasio Ketergantungan Umur (*Dependency Ratio*) mengalami penurunan dari sebesar 49,59 % tahun 2017 menjadi 42,85% tahun 2021. Interpretasi dari angka Rasio Ketergantungan Umur adalah dari 100 orang penduduk usia produktif di tahun 2021 menanggung 42 penduduk yang tidak produktif yang meliputi 32 orang anak-anak dan 10 orang usia lanjut.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 dan Tahun 2021

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Tahun 2017				Jumlah Penduduk Tahun 2021			
	Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio	Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
0-4	57.800	55.779	113.579	103,62	58.622	56.007	114.629	104,67
5-9	58.995	56.001	114.996	105,35	60.693	57.748	118.441	105,10
10-14	56.863	53.702	110.565	105,89	58.144	54.687	112.931	106,32
15-19	53.367	49.077	102.444	108,74	58.990	55.831	114.821	105,66
20-24	47.823	46.521	94.344	102,8	62.391	60.042	122.433	103,91
25-29	49.008	48.148	97.156	101,79	62.046	61.100	123.146	101,55
30-34	51.419	50.373	101.792	102,08	59.927	59.026	118.953	101,53
35-39	51.218	50.230	101.448	101,97	58.542	57.686	116.228	101,48
40-44	48.177	46.258	94.435	104,15	57.941	56.980	114.921	101,69
45-49	43.655	41.204	84.859	105,95	53.070	51.056	104.126	103,94
50-54	36.189	34.780	70.969	104,05	45.606	42.500	88.106	107,31

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Tahun 2017				Jumlah Penduduk Tahun 2021			
	Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio	Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
55-59	29.235	27.235	56.470	107,34	38.962	35.747	74.709	108,99
60-64	21.557	20.237	41.794	106,52	29.700	27.019	56.719	109,92
65-69	14.341	14.812	29.153	96,82	22.026	19.617	41.643	112,28
70-74	10.335	11.213	21.548	92,17	14.151	12.604	26.755	112,27
75	12.003	13.943	25.946	86,09	14.824	14.110	28.934	105,06
Jumlah	641.985	619.513	1.261.498	103,63	755.635	721.760	1.477.395	104,69

Sumber data: BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2021

Salah satu gambaran demografi yang kerap dianalisis dan dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan wilayah adalah struktur kependudukan yang ditunjukkan oleh komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Lampung Tengah selama kurun 5 tahun pada periode 2017-2021 menunjukkan adanya kecenderungan pola semakin menua yang ditandai dengan menurunnya proporsi penduduk muda dan meningkatnya proporsi penduduk usia kerja dan penduduk usia lanjut. Perbedaan struktur umur akan menimbulkan pula perbedaan dalam aspek sosial ekonomi seperti masalah angkatan kerja, pertumbuhan penduduk, dan masalah pendidikan. Sejalan dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, akan meningkatkan pula usia harapan hidup, sehingga peningkatan jumlah penduduk usia lanjut yang makin besar menuntut kebijakan-kebijakan yang serasi dan sesuai dengan perubahan tersebut. Hal ini juga menjadi suatu tantangan agar penduduk usia lanjut yang masih potensial bisa dimanfaatkan sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Struktur umur penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi, yang saling berpengaruh satu dengan yang lain, dan selanjutnya berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi daerah.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 - 2021

No	Kecamatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Padang Ratu	49.696	49.887	50.062	62.716	63.461
2	Selagai Lingga	33.610	33.866	34.113	39.956	40.431
3	Pubian	42.303	42.448	42.579	53.854	54.494
4	Anak Tuha	37.899	38.131	38.391	48.028	48.599
5	Anak Ratu Aji	16.091	16.151	16.207	19.927	20.164
6	Kalirejo	67.478	67.983	68.468	76.884	77.798
7	Sendang Agung	37.779	37.935	38.079	45.995	46.543
8	Bangunrejo	57.513	57.688	57.844	70.242	71.077
9	Gunung Sugih	68.260	69.001	69.727	78.030	78.957
10	Bekri	27.155	27.389	27.615	31.370	31.743
11	Bumi Ratu Nuban	31.436	31.801	32.160	35.533	35.955
12	Trimurjo	51.741	52.028	52.297	58.570	59.266
13	Punggur	39.400	39.810	40.213	42.068	42.568
14	Kota Gajah	33.914	34.163	34.4902	37.064	37.504
15	Seputih Raman	49.147	49.505	49.850	54.030	54.672
16	Terbanggi Besar	120.912	122.626	124.323	129.482	131.019
17	Seputih Agung	50.333	50.852	51.259	57.479	58.162
18	Way Pengubuan	43.776	44.733	45.850	48.099	48.671
19	Terusan Nunyai	44.254	44.121	43.974	58.850	59.549
20	Seputih Mataram	48.332	48.594	48.841	55.856	56.621
21	Bandar Mataram	78.327	79.024	79.698	84.621	85.627
22	Seputih Banyak	45.550	46.010	46.458	53.453	54.088
23	Way Seputih	18.618	18.827	19.032	20.744	20.991
24	Rumbia	35.928	36.187	36.437	41.305	41.796
25	Bumi Nabung	32.265	32.400	32.524	38.112	38.565
26	Putra Rumbia	18.409	18.531	18.646	22.562	22.830
27	Seputih Surabaya	47.048	47.326	47.592	53.600	54.237
28	Bandar Surabaya	34.364	24.549	34.722	41.514	42.007

Sumber data: BPS Kabupaten Lampung Tengah

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah. PDRB dihitung dalam dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

Secara makro besaran PDRB Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 yang diukur atas dasar harga berlaku mengalami

peningkatan sebesar Rp 3,27 triliun atau 4,5% dari Rp 71,070 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 74,336 triliun pada tahun 2021. Capaian peningkatan PDRB harga berlaku tersebut, menggambarkan perekonomian Lampung Tengah yang mulai bergeliat seiring diterapkannya Kenormalan Baru ditengah Pandemi Covid 19. Perkembangan PDRB belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Lampung Tengah, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.

Sementara itu, sama seperti halnya PDRB harga berlaku, PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010 di Kabupaten Lampung Tengah pun mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 sempat mengalami kontraksi sebesar -1,02 persen dari sebesar Rp 47.837,7 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 47.348,0 triliun pada tahun 2020, mulai kembali meningkat di tahun 2021 sebesar 2,88% atau menjadi sebesar Rp. 48.710 triliun.

Kondisi tersebut merupakan indikasi produk barang/jasa secara umum mulai mengalami peningkatan atau perekonomian Kabupaten Lampung Tengah secara makro berkembang ke arah positif.

Tabel 2.6
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017–2021 (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22.011,07	23.855,90	24.592	25.180	25.419
B	Pertambangan dan Penggalian	3.030,67	3.259,67	3.486	3.658	3.649
C	Industri Pengolahan	14.000,58	15.172,77	16.807	16.176	17.560
D	Pengadaan Listrik dan Gas	56,36	63,89	69	74	80
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22,42	23,42	24	26	28
F	Konstruksi	6.320,59	6.957,29	7.586	7.391	8.137
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.936,82	6.592,94	7.175	7.047	7.468
H	Transportasi dan Pergudangan	1.663,65	1.779,80	1.905	1.855	1.952

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	681,90	754,08	825	788	782
J	Informasi dan Komunikasi	1.971,84	2.167,09	2.361	2.488	2.489
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	989,23	1.057,37	1.115	1.156	1.237
L	Real Estat	1.142,29	1.244,80	1.366	1.345	1.392
M,N	Jasa Perusahaan	72,38	76,75	82	82	85
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	1.056,47	1.056,73	1.201	1.260	1.311
P	Jasa Pendidikan	1.337,32	1.1481,43	1.644	1.739	1.817
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	327,82	350,40	373	417	440
R, S, T, U	Jasa Lainnya	333,63	364,65	407	388	390
Produk Domestik Regional Bruto		48.878,37	60.955,37	71.017	71.070	74.336

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.7
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017–2021 (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15.262,87	15.787,65	15925	16.052	16.025
B	Pertambangan dan Penggalian	1.970,29	2.083,26	2208	2.281	2.235
C	Industri Pengolahan	9.748,22	10.328,07	11301	10.777	11.443
D	Pengadaan Listrik dan Gas	47,35	51,55	56	60	62
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,78	15,83	16	17	19
F	Konstruksi	4.640,55	5.036,46	5389	5.279	5.615
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.547,40	4.820,93	5136	4.939	5.120
H	Transportasi dan Pergudangan	1.181,29	1.248,79	1330	1.274	1.305
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	418,96	454,42	489	464	457
J	Informasi dan Komunikasi	1.646,99	1.788,67	1931	2.051	2.182
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	671,87	695,59	720	747	765
L	Real Estat	848,67	893,52	938	909	927
M,N	Jasa Perusahaan	45,30	457,23	49	49	50
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	654,89	687,95	720	750	779

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Jaminan Sosial wajib					
P	Jasa Pendidikan	946,93	1.027,09	1109	1.162	1.181
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	227,00	240,48	251	279	288
R, S, T, U	Jasa Lainnya	232,70	248,85	269	258	257
Produk Domestik Regional Bruto		43.107,05	45.456,32	47.837	47.348	48.710

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah

Selama periode 2017-2021, struktur perekonomian Kabupaten Lampung Tengah didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha diantaranya kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan, konstruksi; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; serta pertambangan dan penggalian. Hal ini dapat dilihat dari peran masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Tengah.

Peran terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu mencapai 34,19%. Kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan dari 35,43% di tahun 2020. Penurunan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB sektor pertanian lebih lambat dari sektor PDRB lainnya.

Selanjutnya lapangan usaha industri pengolahan sebesar 23,62 persen, yang mengalami peningkatan kontribusi dari 22,76% ditahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri yang sempat terpukul oleh pandemi Covid 19, mulai bangkit dan tumbuh di Lampung Tengah.

Lapangan usaha konstruksi pada tahun 2021 sebesar 10,95% dan berhasil meningkatkan kontribusinya sebesar 0,55% dibandingkan tahun 2020 sebesar 10,4%. Hal ini menunjukkan bahwa geliat pembangunan di Lampung Tengah kembali bergairah, setelah ditahun 2020 mengalami perlambatan.

Berikutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,05%, mengalami kenaikan dari 9,92% di tahun 2020. Peningkatan kontribusi sektor perdagangan besar, reparasi mobil dan sepeda motor seiring sejumlah pelanggaran pembatasan kegiatan masyarakat dan mulai dibukanya pusat-pusat

perbelanjaan serta dengan adanya peningkatan belanja sektor otomotif yaitu peningkatan penjualan mobil baru sebagai akibat dari adanya kebijakan penghapusan PPNBM kendaraan roda 4.

Adapun lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 4,91%, mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 5,15%.

Seiring berjalannya waktu kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalian mulai menurun. Penurunan ini diimbangi dengan peningkatan beberapa lapangan usaha lainnya, antara lain lapangan usaha konstruksi, industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor.

Penyebab menurunnya peran lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan diantaranya adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut, lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain, serta perubahan pola distribusi akibat percepatan pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan lapangan usaha lain yang terkait.

Tabel 2.8
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017–2021 (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha ¹	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	36,11	35,96	34,63	35,43	34,19
B	Pertambangan dan Penggalian	4,97	4,91	4,91	5,15	4,91
C	Industri Pengolahan	22,97	22,87	23,67	22,76	23,62
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,10	0,1	0,1	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04
F	Konstruksi	10,37	10,49	10,68	10,4	10,95
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,74	9,94	10,10	9,92	10,05
H	Transportasi dan Pergudangan	2,73	2,68	2,68	2,61	2,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,12	1,14	1,16	1,11	1,05
J	Informasi dan Komunikasi	3,23	3,27	3,32	3,5	3,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,62	1,59	1,57	1,63	1,66
L	Real Estate	1,87	1,88	1,92	1,89	1,87
M,N	Jasa Perusahaan	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11

Kategori	Lapangan Usaha ¹	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	1,73	1,72	1,69	1,77	1,76
P	Jasa Pendidikan	2,19	2,23	2,31	2,45	2,44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,54	0,53	0,52	0,59	0,59
R, S, T, U	Jasa Lainnya	0,55	0,55	0,57	0,55	0,52
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah dalam waktu setahun.

Ditinjau dari indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang secara teknis merupakan pertumbuhan dari volume produk yang dihasilkan, secara kategori merupakan gambaran kecepatan peningkatan volume produk yang dihasilkan pada kategori yang bersangkutan dan dapat dipergunakan dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Kinerja perekonomian Kabupaten Lampung Tengah selama periode 2017-2021 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dari 5,27 persen tahun 2017, naik menjadi 5,45 persen pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 5,46 persen dan tahun 2020 justru berkontraksi atau menurun sebesar -1,02% akibat pandemi Covid-19. Namun pertumbuhan kembali bergerak ke zona positif pada tahun 2021 sebesar 2,88. Hal tersebut seiring dengan mulai diterapkannya kebiasaan normal baru dan pelaksanaan vaksinasi Covid 19.

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2017–2021

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
A2	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,40	3,44	1,06	0,8	-0,2
B	Pertambangan dan Penggalian	6,07	5,73	5,97	3,31	-2,0
C	Industri Pengolahan	5,43	5,95	9,42	-4,63	6,2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	20,70	8,86	7,88	7,93	4,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,97	0,34	4,01	5,6	6,75
F	Konstruksi	9,40	8,53	7	-2,03	6,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,98	6,02	6,97	-3,84	3,68
H	Transportasi dan Pergudangan	7,51	5,71	6,47	-4,21	2,5
I	Penyediaan Akomodasi Makan Minum	5,99	8,46	7,67	-5,16	1,6
J	Informasi dan Komunikasi	14,10	8,60	7,95	6,24	6,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,43	3,53	3,55	3,72	2,38
L	Real Estat	5,17	5,28	4,98	-3,08	2
M,N	Jasa Perusahaan	2,77	4,27	4,54	-1,49	1,95
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	4,34	5,05	4,68	4,09	3,89
P	Jasa Pendidikan	4,12	8,46	7,94	4,81	1,62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,85	5,94	4,52	10,83	3,43
R, S, T, U	Jasa Lainnya	3,17	6,94	8,26	-4,21	-0,25
Laju Pertumbuhan Ekonomi		5,27	5,45	5,46	-1,02	2,88

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah

Apabila dikelompokkan berdasarkan kinerjanya, kategori-kategori ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok kategori dengan pertumbuhan di atas rata-rata (LPE Lampung Tengah yang merupakan *baseline*) dan kelompok kategori dengan laju pertumbuhan di bawah rata-rata. Ada beberapa kategori yang menunjukkan kinerja cukup tinggi di tahun 2021 meliputi 8 (delapan) kategori yaitu Industri Pengolahan (6,18%), Pengadaan Listrik dan Gas (4,05%), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (6,75%), Konstruksi (6,25%), Perdagangan Besar dan Eceran (3,68%), Informasi dan Komunikasi

(6,38%), Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib (3,89%), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (3,43%). Sedangkan tujuh kategori lainnya tumbuh di bawah rata-rata, yakni pertanian, kehutanan dan perkebunan (0,17%); Pertambangan dan Penggalian (2%), Transportasi dan Pergudangan (2,5%), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (2%), Jasa Keuangan dan Asuransi (2,38%), Real Estate (2%), Jasa Perusahaan (1,95%), Jasa Pendidikan (1,62%), dan Kasa Lainnya (0,25%)

Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi tahun 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah adalah 3,57 persen. Nilai ini berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung (3,36 persen) dan Nasional (3,38 persen).

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Lampung Tengah	5,27	5,45	5,46	-1,02	2,88
2	Provinsi Lampung	5,16	5,25	5,27	-1,67	2,79
3	Nasional	5,1	5,2	5,02	-2,07	3,69

Sumber data: BPS Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dan Nasional

2.1.2.1.2. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus dan terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Pada tahun 2021, perhitungan inflasi Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan data BPS yang mengacu pada tingkat inflasi di Kota Metro sebagai daerah otonom terdekat dari Lampung Tengah (hal tersebut dikarenakan BPS Kabupaten Lampung Tengah tidak melakukan pengukuran inflasi tingkat Kabupaten), menunjukkan kondisi peningkatan harga-harga yang masih terkendali, dimana selama kurun waktu 12 bulan inflasi secara umum telah mencapai 2,74 persen berdasarkan perhitungan tahun kalender (*point to point*) dan *year on year (y-o-y)*. Angka tersebut menunjukkan meningkat dibandingkan dengan 2020 dimana pada periode yang sama mengalami inflasi sebesar 2,53 persen. Kondisi inflasi pada tahun 2021 tersebut di atas inflasi Provinsi Lampung sebesar 1,56 persen berdasarkan perhitungan tahun kalender

(*point to point*) dan *year on year (y-o-y)*. Angka tersebut berada di atas dari inflasi secara nasional sebesar 1,61 persen.

Tabel 2.11
Inflasi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017–2021

No.	Tahun	Nasional	Lampung	Metro
1	2017	2,92	3,02	2,32
2	2018	3,13	2,73	1,64
3	2019	2,72	-	2,93
4	2020	1,68	2	2,53
5	2021	1,61	1,56	2,74

Sumber data: BPS (diolah)

2.1.2.1.3. PDRB Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk berarti tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Pendapatan perkapita merupakan hasil bagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan mengasumsikan bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka pendapatan perkapita sama dengan PDRB perkapita yang diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan kata lain pendapatan perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk yang berasal dari proses produksi seluruh kegiatan ekonomi.

Pada tahun 2021 pendapatan per kapita mengalami peningkatan 2,97 persen atau dari semula Rp 48.862.000 rupiah/kapita/tahun,- pada tahun 2020 menjadi Rp 50.316.000 rupiah/kapita/tahunnya pada tahun 2021. Namun demikian, baik peningkatan maupun penurunan tersebut belum sepenuhnya dapat dipakai untuk menggambarkan peningkatan ataupun penurunan dari daya beli masyarakat. Karena pada PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB), selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional di Kabupaten Lampung Tengah tidak mutlak merata. Peningkatan Kembali pendapatan perkapitan pada tahun 2021 seiring dengan berhasilnya program vaksinasi nasional di Lampung Tengah dan lainnya

terbentuknya perilaku kehidupan Normal Baru ditengah-tengah masyarakat. PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat produktifitas penduduk di suatu wilayah yang menunjukkan nilai pendapatan yang dihasilkan akibat kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah Lampung Tengah per penduduk selama satu tahun.

Tabel 2.12
Pendapatan Perkapita Kabupaten Lampung Tengah Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2021

Tahun	PDRB (Milyar rupiah)		Jumlah Penduduk	PDRB Perkapita (ribu rupiah)	
	Berlaku	Konstan		Berlaku	Konstan
2017	60.955	43.107	1.261.498	48.320	34.171
2018	66.340	45.456	1.271.566	51.979	35.709
2019	71.017	47.837	1.281.310	55.369	37.296
2020	71.070	47.348	1.460.045	48.862	32.552
2021	74.336	48.710	1477.395	50.316	32.970

Sumber data: Badan Pusat Statistik

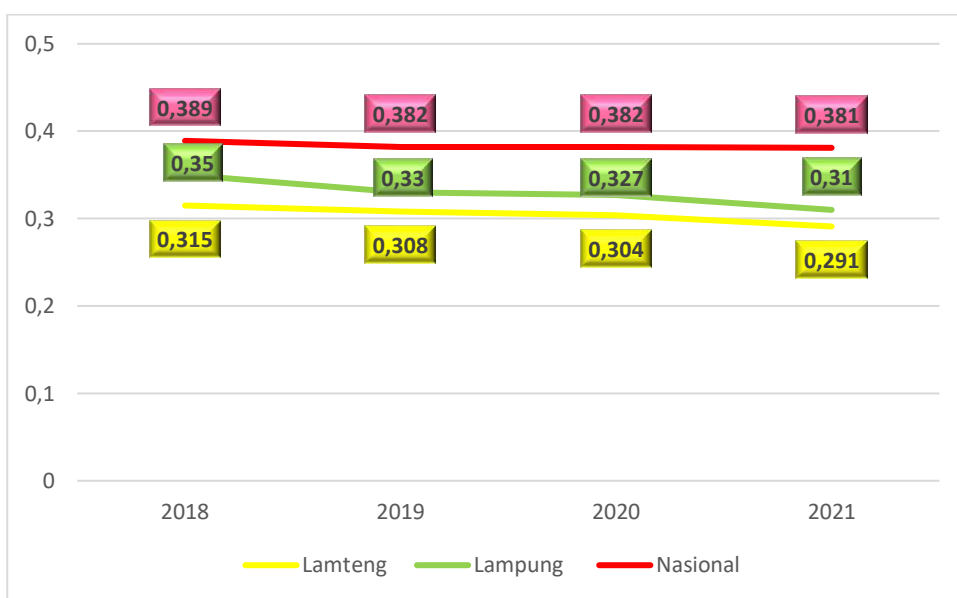
2.1.2.1.4. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai gini rasio, makin tinggi ketimpangan yang terjadi. Ini artinya bagian pendapatan yang diterima kelompok penduduk kaya semakin besar. Idealnya, kemajuan ekonomi suatu wilayah dapat diiringi dengan pemerataan pendapatan sehingga kesenjangan tidak tinggi. Masyarakat golongan ekonomi bawah harus didorong untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan mereka, sehingga ketimpangan dapat diperkecil. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 (nol) untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Berdasarkan Data BPS mencatat Koefisien Gini Kabupaten Lampung Tengah pada rentang tahun 2018-2021, sebesar 0,315 pada tahun 2018 dan terus mengalami penurunan hingga mencapai angka 0,291 pada tahun 2021, yang artinya semakin mendekati pemerataan sempurna. Penurunan ini mengindikasikan bahwa distribusi

pengeluaran (konsumsi) penduduk pada periode tersebut semakin merata. Selama kurun waktu tahun 2018-2021 Koefisien Gini Kabupaten Lampung Tengah di bawah (lebih baik) jika dibandingkan dengan Koefisien Gini Propinsi Lampung dan Nasional yang lebih mendekati ketimpangan sempurna (mendekati angka 1).

Gambar 2.13
Grafik Perkembangan Indeks Gini/Koefisien Gini
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018-2021



Sumber data: Badan Pusat Statistik

2.1.2.1.5. Penduduk Miskin

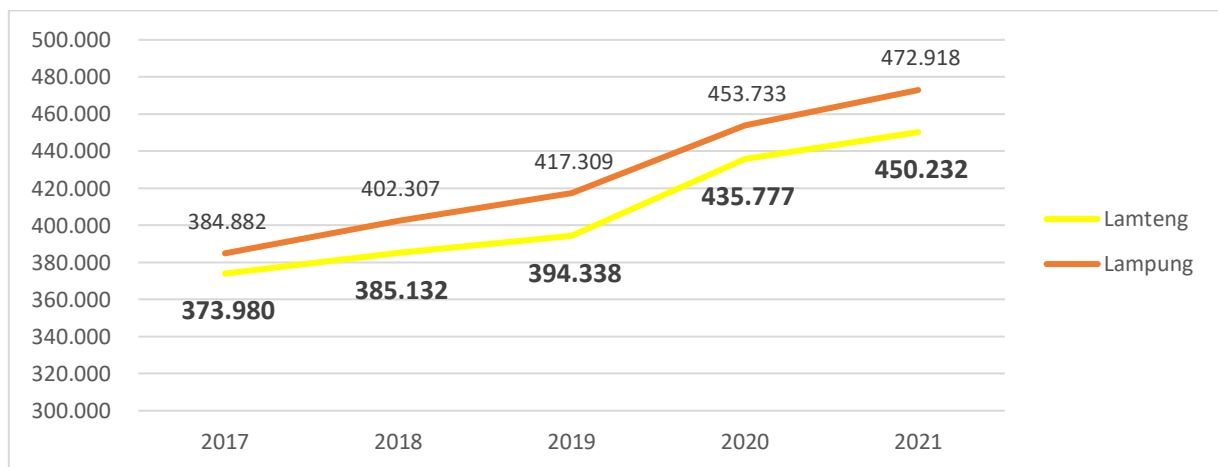
Pengukuran kemiskinan secara makro dilakukan BPS melalui estimasi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Dalam hal ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan penduduk dari sisi pengeluaran konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Kebutuhan dasar makanan (GKM) setara dengan besaran minimal jumlah rupiah per bulan untuk pemenuhan kebutuhan kalori 2100 kkal per kapita per hari untuk 52 jenis paket komoditi kebutuhan dasar makanan. Sedangkan kebutuhan dasar bukan makanan (GKNM) setara dengan besaran rupiah per bulan untuk pemenuhan kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis di pedesaan. Sehingga, secara teknis penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan.

Dari hasil pendataan BPS tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 11,99% mengalami peningkatan sebanyak 3.494 jiwa dari 152.280 jiwa (11,82 persen) pada tahun 2020, atau meningkat sebesar 0,17 persen. Peningkatan persentase penduduk miskin pada tahun 2021 tersebut dibanding kabupaten dan kota di Propinsi Lampung berada pada peringkat ke-8.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 13,4 persen menjadi Rp. 450.232 dari sebesar Rp.436.777 per kapita per bulan pada tahun 2020. Apabila dilihat perkembangannya, selama periode tahun 2017-2021, garis kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

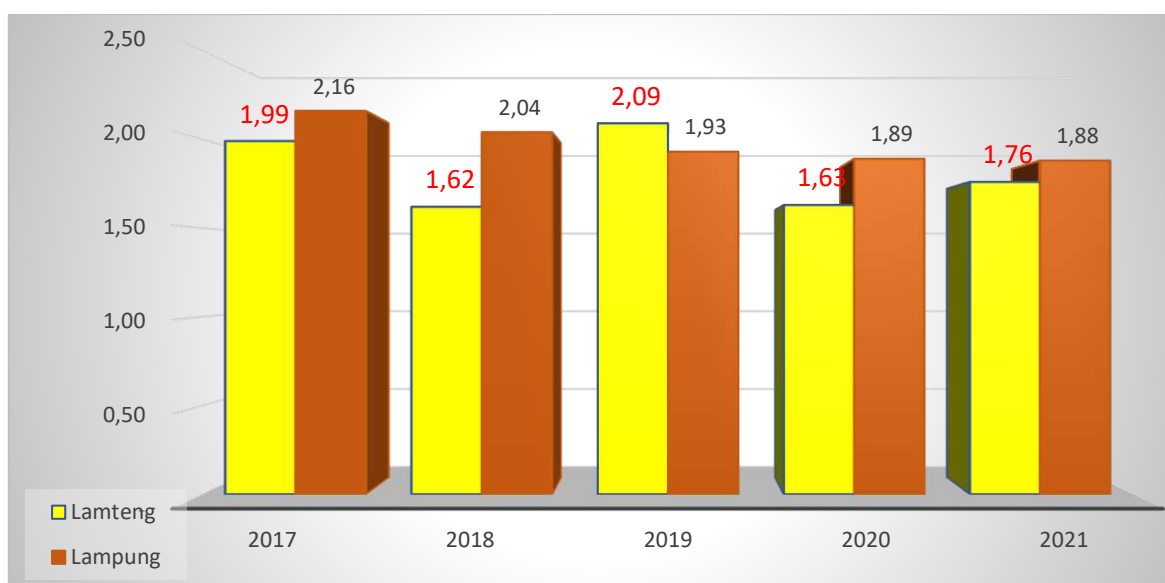
Namun demikian, kenaikan garis kemiskinan per tahunnya masih tetap dibawah garis kemiskinan Propinsi Lampung selama periode 5 tahun. Secara umum, garis kemiskinan Tahun 2021 menunjukkan peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan komoditi non makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat pada tingkat ekonomi rendah lebih didominasi pengeluaran untuk kebutuhan makanan dibandingkan kebutuhan bukan makanan.

Gambar 2.14
Grafik Perkembangan Garis Kemiskinan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.15
Grafik Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2017 – 2021



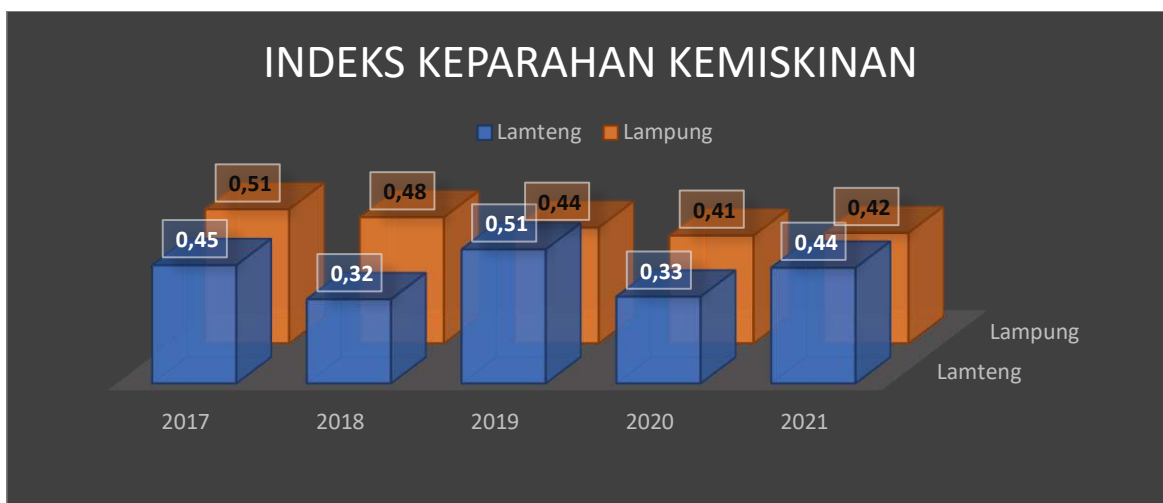
Sumber data: Badan Pusat Statistik

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu mengendalikan peningkatan jumlah penduduk, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bias mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebagai ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dan juga Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) sebagai indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, keduanya sama-sama menunjukkan kecenderungan meningkat. Ini mengindikasikan adanya penurunan kondisi kesejahteraan pada penduduk miskin. Penurunan tersebut tidak lepas dari pengaruh Pandemi Covid 19 dan diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan menurunnya pendapatan masyarakat.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari tahun 2017 s.d. tahun 2021 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, yaitu turun dari 1,99 menjadi 1,63 atau turun sebesar 0,36 poin, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar 1,76, artinya peningkatan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) dari tahun 2017 s.d. tahun 2021 juga menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, turun dari 0,45 di tahun

2017 menjadi 0,33 pada tahun 2020, namun kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 0,44 artinya kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin menyebar.

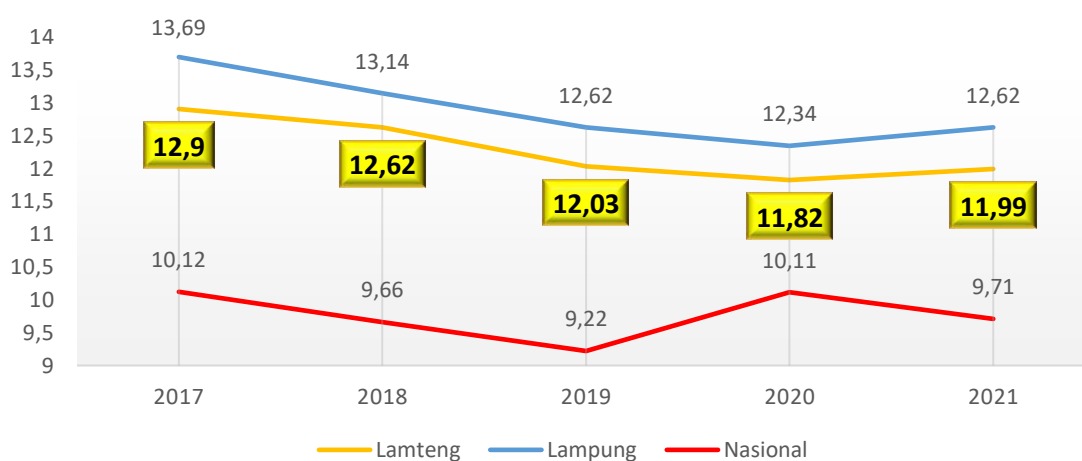
Gambar 2.16
Grafik Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Angka Kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,17 menjadi 11,99 % dari 11,82%, dan lebih rendah dari angka kemiskinan propinsi sebesar 12,62%.

Gambar 2.17
Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021

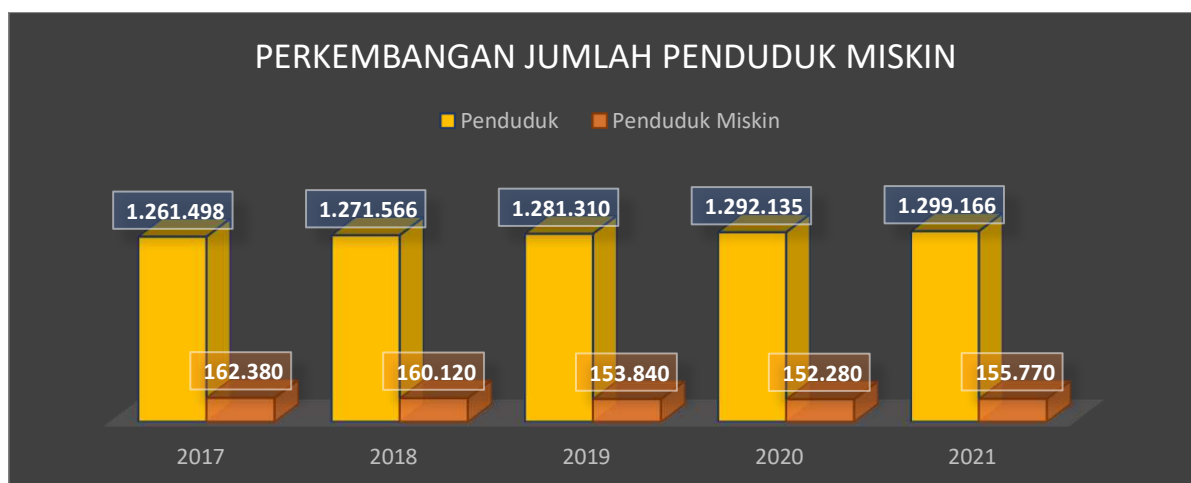


Sumber data: Badan Pusat Statistik

Jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Tengah selama lima tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dan sampai dengan tahun 2020 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin. Namun

seiring dengan adanya Pandemi Covid 19, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Tengah

Gambar 2.18
Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan pendataan terakhir Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 terdapat 679.322 jiwa, meningkat sebesar 219.909 jiwa atau 47,85% dari tahun 2020 sebesar 459.413 jiwa. Peningkatan jumlah penerima bantuan social dikarenakan adanya pendataan ulang dari Pihak Kampung dan hasil entri aplikasi SIKS NG Kementerian Sosial RI oleh operator Kampung. Dari data tersebut, pada tahun 2021 Kecamatan Penerima Bantuan Sosial terbanyak adalah Kecamatan Terbanggi Besar yaitu sebesar 49.873 jiwa, dan Kecamatan Penerima Bantuan Sosial paling sedikit adalah 8.357 jiwa. Adapun Kecamatan dengan persentase peningkatan penambahan penerima bantuan social terbesar adalah Kecamatan Padang Ratu dengan penambahan sebesar 63,96% dari tahun 2020.

Tabel 2.13
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial Kabupaten Lampung Tengah

No	Kecamatan	TAHUN	
		2020	2021
1	Padang Ratu	19.716	32.327
2	Selagai Lingga	14.915	23.979
3	Pubian	19.533	30.564

No	Kecamatan	TAHUN	
		2020	2021
4	Anak Tuha	22.745	31.420
5	Anak Ratu Aji	8.709	12.384
6	Kalirejo	30.154	43.513
7	Sendang Agung	15.101	21.958
8	Bangunrejo	17.929	29.164
9	Gunung Sugih	25.847	40.574
10	Bekri	8.929	13.506
11	Bumi Ratu Nuban	13.953	19.760
12	Trimurjo	15.512	23.865
13	Punggur	13.049	18.664
14	Kota Gajah	7.749	11.394
15	Seputih Raman	12.116	18.213
16	Terbanggi Besar	32.515	49.873
17	Seputih Agung	16.403	22.160
18	Way Pengubuan	12.071	17.780
19	Terusan Nunyai	14.887	23.736
20	Seputih Mataram	21.522	28.435
21	Bandar Mataram	29.473	41.625
22	Seputih Banyak	16.319	23.359
23	Way Seputih	5.490	8.357
24	Rumbia	11.861	17.719
25	Bumi Nabung	12.243	17.147
26	Putra Rumbia	8.413	12.315
27	Seputih Surabaya	17.929	25.413
28	Bandar Surabaya	14.330	20.118
	Jumlah	459.413	679.322

Sumber data: Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah

2.1.2.1.6. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Tengah selama periode 2017-2021 mengalami kemajuan yang signifikan, dengan pertumbuhan IPM pada periode Tahun 2017-2020 sebesar 0,71 persen dari sebesar 68,95 pada tahun 2017 menjadi 70,23 pada tahun 2021 (meningkat 1,28 poin).

Sejak tahun 2019, indeks pembangunan manusia Kabupaten Lampung Tengah sudah berstatus “tinggi” yaitu 70,04. Dalam tingkat Kabupaten se-Provinsi Lampung, IPM Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021 merupakan IPM tertinggi kedua (70,23) di Provinsi Lampung setelah Kabupaten Pringsewu. Sedangkan dalam lingkup Kabupaten/Kota, IPM Kabupaten Lampung Tengah merupakan IPM tertinggi keempat di Provinsi Lampung setelah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

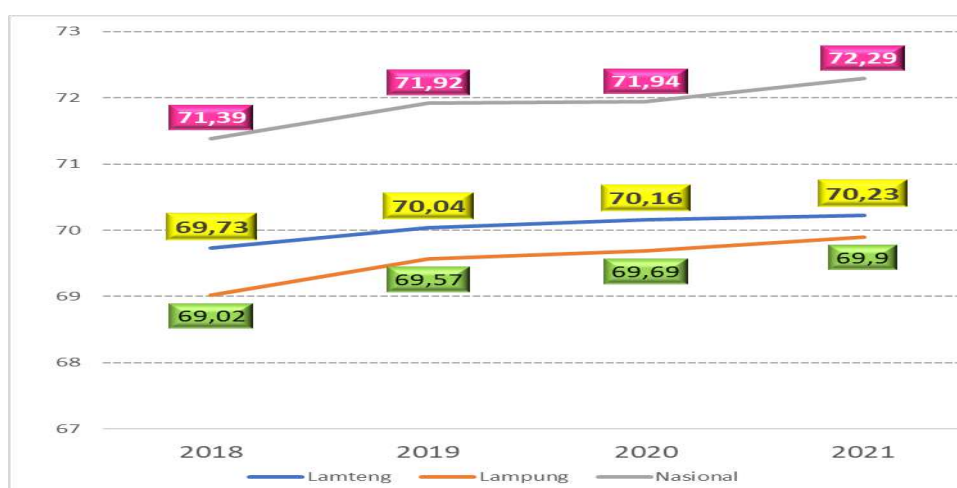
Tabel 2.14
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupate/Kota
di Provinsi Lampung Tahun 2017- 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Lampung Barat	66,06	66,74	67,50	67,80	67.90
2	Tanggamus	64,94	65,67	66,37	66,36	66.65
3	Lampung Selatan	66,95	67,68	68,22	68,38	68.49
4	Lampung Timur	68,05	69,04	69,34	69,37	69.66
5	Lampung Tengah	68,95	69,73	70,04	70,16	70.23
6	Lampung Utara	66,58	67,17	67,63	67,67	67.89
7	Way Kanan	65,97	66,63	67,19	67,44	67.57
8	Tulang Bawang	67,07	67,70	68,23	68,52	68.73
9	Pesawaran	64,43	64,97	65,75	65,79	66.14
10	Pringsewu	68,61	69,42	69,97	70,30	70.45
11	Mesuji	61,87	62,88	63,52	63,63	64.04
12	Tulang Bawang Barat	64,58	65,30	65,93	65,78	66.22
13	Pesisir Barat	62,20	62,96	63,79	63,91	64.30
14	Bandar Lampung	75,98	76,63	77,33	77,44	77.58
15	Metro	75,87	76,22	76,77	77,19	77.49
	Propinsi Lampung	68,25	69,02	69,57	69,69	69.90

Sumber data: Badan Pusat Statistik

IPM Kabupaten Lampung Tengah pada tiga tahun terakhir selalu diatas rata-rata IPM Provinsi Lampung, namun masih berada dibawah capaian IPM Nasional secara keseluruhan.

Gambar 2.19
Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 - 2021



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Pencapaian pembangunan manusia, diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks di masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.15
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021

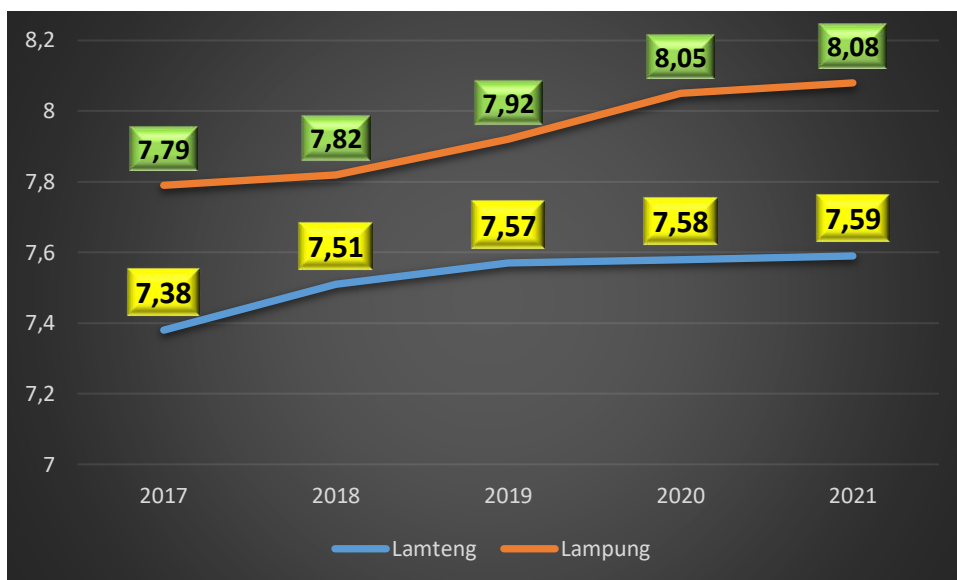
Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Harapan lama sekolah (thn)	12,60	12,90	12,91	12,92	12,93
Rata-rata lama sekolah	7,38	7,51	7,57	7,58	7,59
Usia Harapan Hidup (Tahun)	68,95	69,73	70,04	69,84	69,87
Pengeluaran per kapita	10.820,00	11.052,00	11.154,00	11.219,00	11.259,00
Indek Pembangunan	68,95	69,73	70,04	70,16	70,23
Pertumbuhan IPM	0,91	1,13	0,44	0,12	0,07

Sumber data: BPS Lampung Tengah

a. Dimensi Pengetahuan

Indikator yang dipergunakan untuk menilai IPM di tinjau dari dimensi pengetahuan adalah angka rata-rata lama sekolah (RLS) dan angka harapan lama sekolah (HLS). Pada Tahun 2017, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Lampung Tengah sebesar 7,38 dan pada tahun 2021 telah naik hingga mencapai 7,59. Namun nilai masih berada di bawah RLS Provinsi yaitu 8,08. Standar rata-rata lama sekolah dari UNDP adalah 15,00. Pada tahun 2021 rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas mencapai 7,59 tahun. Hal ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Lampung Tengah telah mencapai pendidikan hingga kelas VIII (SLTP). Kesenjangan rata-rata lama sekolah Kabupaten Lampung Tengah dengan Provinsi Lampung dari tahun 2018 sampai dengan 2021 mengalami kecenderungan yang meningkat, yaitu mencapai 0,49.

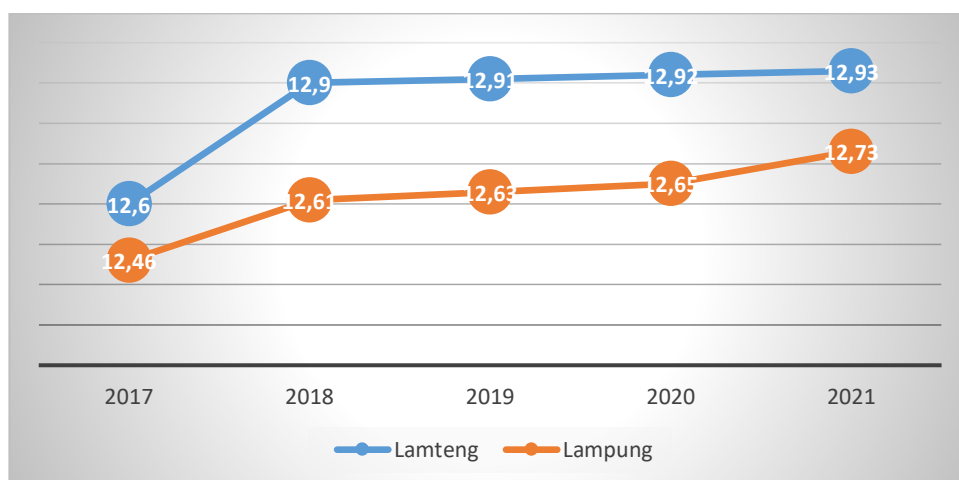
Gambar 2.20
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018– 2021



Sumber data: BPS Lampung Tengah

Sementara itu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2017 sebesar 12,6 dan pada tahun 2021 telah naik hingga mencapai 12,93. Namun angka ini masih berada lebih sedikit dari HLS Provinsi yaitu 12,73. Hal ini menunjukkan bahwa anak usia 7 tahun di Kabupaten Lampung Tengah memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga Diploma I (D-I).

Gambar 2.21
Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018– 2021



Sumber: BPS Lampung Tengah

Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah terus mengalami peningkatan. Secara umum HLS dapat digunakan sebagai

indikator untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang pendidikan di suatu wilayah/daerah.

Tabel 2.16
Dimensi Pengetahuan Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2017– 2021

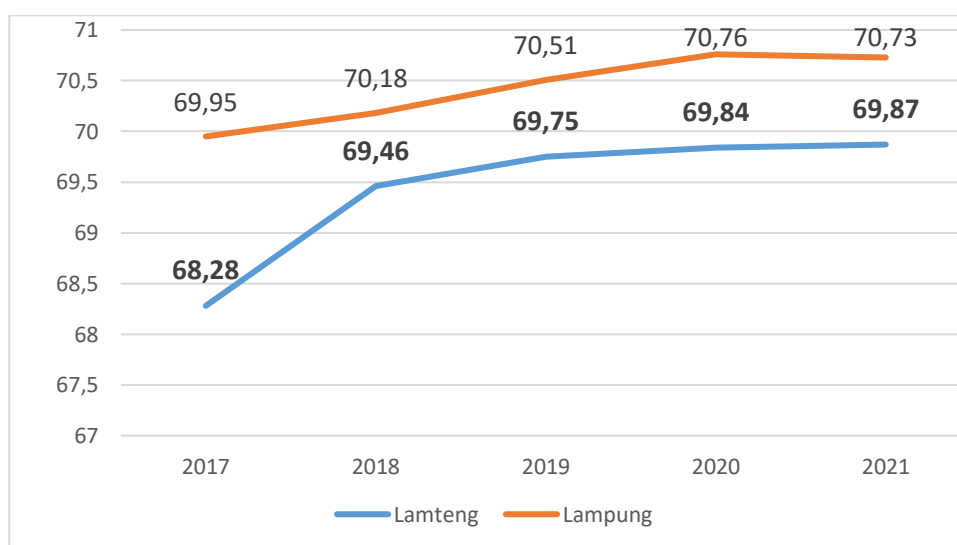
No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Harapan Lama Sekolah	12,60	12,90	12,91	12,92	12,93
2	Rata-rata Lama Sekolah	7,38	7,51	7,57	7,58	7,59

Sumber data: BPS Lampung Tengah

b. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Pencapaian IPM jika di tinjau dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, maka indikator yang dipergunakan yaitu umur harapan hidup saat lahir (UHH), dimana pada tahun 2021 telah mencapai 69,87 tahun. Selama kurun waktu 2017 hingga 2021, walaupun relatif lambat, UHH terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 2,3 persen selama lima tahun dan meningkat 1,59 poin. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi.

Gambar 2.22
Perkembangan Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 – 2021



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Pada Tahun 2017 umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 69,46 dan pada tahun 2021 telah naik hingga

mencapai 69,87. Namun angka UHH ini masih berada dibawah UHH Propinsi yaitu 70,73. Angka UHH ini juga belum mencapai nilai maksimum standar UNDP sebesar 85,00. Kondisi tersebut merefleksikan, dari perspektif IPM, derajat kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah masih berada dibawah rata-rata Provinsi Lampung.

Tabel 2.17
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)	68,28	69,46	69,75	69,84	69,87

Sumber data: BPS Lampung Tengah

Teori klasik H. L. Bloom menyatakan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan secara berturut-turut, yaitu: 1) gaya hidup (*life style*); 2) lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya); 3) pelayanan kesehatan; dan 4) faktor genetik (keturunan). Keempat determinan tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi status kesehatan seseorang.

Dari sisi lingkungan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2021 menunjukkan kondisi lingkungan belum sepenuhnya sehat, yang ditunjukkan dari masih terdapat 11,45 % rumah tangga yang belum mampu mengakses air bersih dan masih terdapat 5,7 % rumah tangga belum menikmati sanitasi layak. Belum semua penduduk dapat mengakses persalinan dengan tenaga medis terutama untuk kelompok berpenghasilan rendah. Akselerasi pembangunan pada dimensi kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah sangat intervensid dilakukan terhadap faktor-faktor determinan yang mempengaruhi dimensi tersebut, yang tidak sebatas pada sektor kesehatan, namun melibatkan hampir seluruh sektor pembangunan yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, infrastruktur, sanitasi, pendidikan dan lain sebagainya. Pada dasarnya, upaya yang harus dilakukan harus diarahkan untuk meningkatkan kecukupan dan aksesibilitas penduduk terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan serta peningkatan responsivitas penduduk terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut.

Percepatan pelaksanaan program-program kesehatan untuk menekan angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan yang disertai dengan upaya mewujudkan fasilitas kesehatan yang memadai serta tenaga medis yang lebih merata, mutlak harus dijaga dan ditingkatkan konsistensinya. Sehingga diharapkan dapat menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan secara optimal. Disamping itu, akselerasi pencapaian IPM diharapkan tidak hanya bertumpu pada dinas teknis saja, melainkan harus terintegrasi dengan tugas-tugas kecamatan, kelurahan dan pemerintah-an desa, serta lebih diarahkan kepada upaya perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dengan seluruh jaringan kerjanya.

c. Pengeluaran Per Kapita

Pencapaian IPM di tinjau dari dimensi standar hidup layak, maka indikator yang dipergunakan adalah indikator perkembangan tingkat pengeluaran sebagai pendekatan pengukuran daya beli masyarakat di suatu wilayah. Pada tahun 2021 pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Lampung Tengah mencapai Rp 11,259 juta per kapita per tahun. Walaupun relatif lambat, pengeluaran per kapita Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat selama lima tahun terakhir sebesar 439 poin dan tumbuh sebesar 4,05 persen.

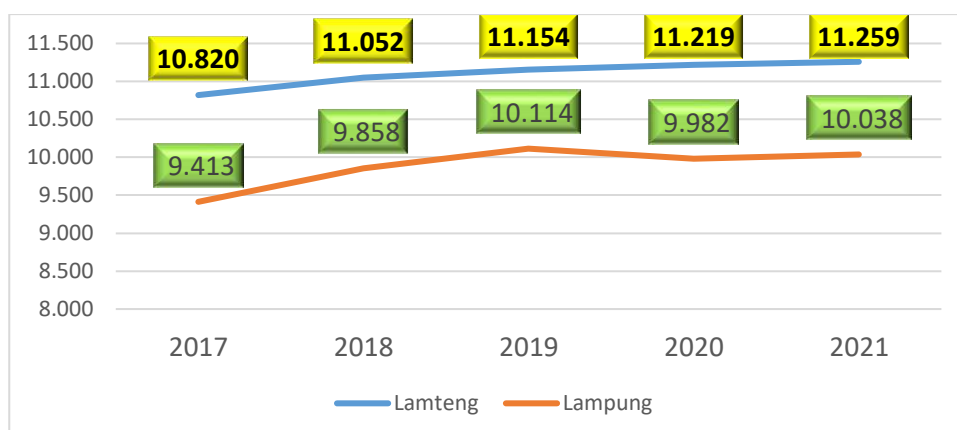
Tabel 2.18
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2017– 2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran per Kapita (Rp 000)	10.820	11.052	11.154	11.219	11.259

Sumber data: BPS Lampung Tengah

Pada Tahun 2021, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Lampung Tengah mencapai Rp 11,259 juta per tahun. Nilai ini relatif lebih tinggi dibandingkan pengeluaran perkapita propinsi Lampung yaitu Rp 10,038 juta per tahun atau masih terpaut hampir Rp 1,221 juta per kapita per tahun.

Gambar 2.23
Perkembangan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2017 – 2021



Sumber data: BPS Lampung Tengah

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator-indikator: angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, rasio penduduk yang bekerja.

2.1.2.2.1 Pendidikan

a. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf, semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Baik angka melek huruf maupun angka buta huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf. Angka melek huruf Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 telah mencapai 97,06 persen dan angka ini meningkat dari tahun 2020 yang hanya sebesar 96,55 persen. Meningkatnya kemampuan membaca dan menulis dengan huruf latin dan berhitung serta berketerampilan diharapkan akan

membantu seseorang/penduduk untuk dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 2.19
Angka Melek Huruf Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Angka Melek Huruf		
		Laki-laki	Perempuan	(Rata rata Laki dan Perempuan)
1	2017	98,05	94,68	96,39
2	2018	98,79	94,78	96,81
3	2019	96,54	93,09	94,95
4	2020	98,31	94,75	96,55
5	2021	98,38	95,68	97,06

Sumber data: Statkesra 2021, BPS Lampung

b. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Rata-rata lama sekolah menunjukkan trend peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Hal ini dapat dimaknai bahwa penduduk Lampung Tengah semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 2.20
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2018– 2021

No	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Lama Sekolah	7,51	7,57	7,58	7,59

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Tengah

Angka Rata-rata lama sekolah penduduk Lampung Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 7,51 kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 7,59. Angka 7,59 menunjukkan bahwa penduduk usia lebih dari 15 tahun memiliki

rata-rata lama sekolah sebesar 7 tahun sehingga dapat diketahui bahwa rata-rata Pendidikan penduduk Kabupaten Lampung Tengah hanya mencapai pendidikan hingga kelas VIII atau belum lulus SMP/MTs/ sederajat). Hal ini disebabkan masih adanya penduduk usia lebih dari 15 tahun yang belum menyelesaikan sekolahnya, baik melalui satuan pendidikan formal maupun non formal.

c. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) diartikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Tabel 2.21
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2018– 2021

No	Indikator	2018	2019	2020	2021
1	Harapan Lama Sekolah	12,90	12,91	12,92	2,93

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Tengah

Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2018 sebesar 12,9 dan pada tahun 2021 telah naik hingga mencapai 12,93. Hal ini menunjukkan bahwa anak usia 7 tahun di Kabupaten Lampung Tengah memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga Diploma I (D-I).

d. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk

usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. APK berguna untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat Pendidikan dan menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK juga digunakan sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan/tidak naik kelas atau tidak lulus. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Tabel 2.22
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2018– 2021

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
1	APK SD/MI/Paket A	112,23	106,43	110,31	110,33
2	APK SMP/MTs/Paket B	96,16	88,2	99,4	99,53

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah

APK SD//MI/Paket A Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 mencapai 110,33. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah murid yang bersekolah pada jenjang SD/MI/paket A lebih besar dari jumlah murid usia 7-12 tahun yang bersekolah jenjang SD/MI/paket A. Sedangkan APK SMP/MTs/Paket B pada tahun 2021 mencapai 99,53. Hal jumlah murid yang bersekolah pada jenjang SMP/MTs/paket B lebih kecil dari jumlah murid usia 13-15 tahun yang bersekolah jenjang SMP/MTs/paket B.

e. Angka Pendidikan Yang ditamatkan

Angka Pendidikan Yang ditamatkan atau Angka Kelulusan pada jenjang SD/MI/Paket A dan jenjang SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Lampung Tengah pada 2021, yaitu mencapai angka maksimal yaitu 100%. Hal ini disebabkan oleh capaian prestasi siswa secara akademik sesuai dengan standar kelulusan yang telah ditentukan, sistem pendidikan yang diterapkan, kurikulum yang diberlakukan dan kualitas pendidik yang baik dalam mengantarkan siswa mengikuti ujian.

Tabel 2.23
Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2018– 2021

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI/Paket A	100	100	100	100
2	SMP/MTs/Paket B	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah

f. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APM berguna untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen.

Tabel 2.24
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2018– 2021

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI/Paket A	99,13	99,5	99,20	99,23
2	SMP/MTs/Paket B	75,77	75,27	90,16	90,18

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah

Angka Partisipasi Murni pada jenjang SD/MI/Paket A di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021, yaitu mencapai angka 99,23%. Hal ini menunjukkan bahwa dari masih ada 7 orang dari 1000 orang yang berusia 7-12 masih belum menyelesaikan Pendidikan SD/MI/Paket A atau belum mulai bersekolah SD.

Angka Partisipasi Murni pada jenjang SMP/MI/paket B di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021, yaitu mencapai angka 90,18%. Hal ini menunjukkan bahwa dari masih ada 8 orang dari 1000 orang yang berusia 13-15 masih belum menyelesaikan Pendidikan SMP/MTs/Paket B atau belum mulai bersekolah SMP.

g. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi). Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Terdapat perbedaan faktor-faktor yang berhubungan dengan kelangsungan hidup bayi, yaitu meliputi berat badan lahir, waktu pemberian ASI, penolong persalinan, frekuensi pemeriksaan antenatal, dan tempat persalinan. Keadaan saat lahir merupakan faktor penting yang berhubungan signifikan dengan kelangsungan hidup bayi, faktor waktu pemberian ASI pertama kali merupakan faktor dominan yang berhubungan dengan kelangsungan hidup bayi.

Tabel 2.25
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2018- 2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
Angka Kelangsungan Hidup Bayi	995	996	999,4	993
<i>Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu</i>	96	73	10	98
<i>Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu</i>	19.424	20.136	19.820	18.500

Sumber : Dinas Kesehatan Lampung Tengah

h. Angka Usia Harapan Hidup

Selama kurun waktu 2018 hingga 2021, walaupun relatif lambat, UHH terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 1,07 persen selama lima tahun dan meningkat 0,74 poin. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi.

Selama periode 2017-2021, Kabupaten Lampung Tengah berhasil meningkatkan umur harapan hidup saat lahir sebesar 1,59. Selama periode tersebut, secara rata-rata tumbuh sebesar 0,5 persen per tahun. Pada Tahun 2017 umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 68,28 dan pada tahun 2021 telah naik hingga mencapai 69,87. Namun angka UHH ini masih berada dibawah UHH Propinsi yaitu 70,73. Angka UHH ini juga belum mencapai nilai maksimum standar UNDP sebesar 85,00.

Namun demikian jika dibandingkan dengan UHH Propinsi Lampung pada tahun 2021 yang mencapai 70,73 tahun, maka UHH Kabupaten Lampung Tengah masih terpaut 0,86 tahun lebih rendah dari Provinsi Lampung. Kondisi tersebut merefleksikan, dari perspektif IPM, derajat kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah masih berada dibawah rata-rata Provinsi Lampung.


Tabel 2.26
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018– 2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)	68,28	69,46	69,75	69,84	69,87

Sumber data: BPS Lampung Tengah

Teori klasik H. L. Bloom menyatakan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan secara berturut-turut, yaitu: 1) gaya hidup (*life style*); 2) lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya); 3) pelayanan kesehatan; dan 4) faktor genetik (keturunan). Keempat determinan tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi status kesehatan seseorang.

Dari sisi lingkungan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2020 menunjukkan kondisi lingkungan belum sepenuhnya sehat, yang ditunjukkan



dari masih terdapat 11,45 % rumah tangga yang belum mampu mengakses air bersih dan masih terdapat 5,7 % rumah tangga belum menikmati sanitasi layak. Belum semua penduduk dapat mengakses persalinan dengan tenaga medis terutama untuk kelompok berpenghasilan rendah. Akselerasi pembangunan pada dimensi kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah sangat intervensif dilakukan terhadap faktor-faktor determinan yang mempengaruhi dimensi tersebut, yang tidak sebatas pada sektor kesehatan, namun melibatkan hampir seluruh sektor pembangunan yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, infrastruktur, sanitasi, pendidikan dan lain sebagainya. Pada dasarnya, upaya yang harus dilakukan harus diarahkan untuk meningkatkan kecukupan dan aksesibilitas penduduk terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan serta peningkatan responsivitas penduduk terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut.

Percepatan pelaksanaan program-program kesehatan untuk menekan angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan yang disertai dengan upaya mewujudkan fasilitas kesehatan yang memadai serta tenaga medis yang lebih merata, mutlak harus dijaga dan ditingkatkan konsistensinya. Sehingga diharapkan dapat menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan secara optimal. Disamping itu, akselerasi pencapaian IPM diharapkan tidak hanya bertumpu pada dinas teknis saja, melainkan harus terintegrasi dengan tugas-tugas kecamatan, kelurahan dan pemerintah-an desa, serta lebih diarahkan kepada upaya perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dengan seluruh jaringan kerjanya.

i. Rasio Penduduk yang bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja.



Tabel 2.27
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun
Ke Atas Kabupaten Lampung Tengah

Indikator	2018	2019	2020	2021
Rasio penduduk bekerja terhadap penduduk usia 15 tahun kerja ke atas	71,99	70,28	73,05	72,26
<i>Penduduk yang bekerja</i>	671.308	662.539	685.826	684.843
<i>Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas</i>	932.492	942.686	980.166	990.428

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja

Dari Tabel 2.26 dapat diketahui bahwa terjadi jumlah penduduk yang bekerja setiap tahunnya fluktuatif. Pada tahun 2021 Rasio penduduk bekerja berada pada nilai 72,26% sehingga dapat disimpulkan bahwa 27,74% dari angkatan kerja masih mencari pekerjaan, atau termasuk kedalam kelompok Bukan Angkatan Kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya)

2.1.2.3. Fokus Seni, Budaya dan Olahraga

2.1.2.3.1 Kebudayaan

Secara umum keberhasilan di bidang kebudayaan dapat dilihat dari perkembangan jumlah sanggar seni budaya daerah, jumlah pentas seni budaya yang difasilitasi pemerintah daerah, dan Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.

Pada tahun 2021 Jumlah sanggar seni budaya di Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 815 buah, atau meningkat sebesar 0,25 persen dibanding tahun 2020 yang berjumlah 792 buah. Hal ini disebabkan adanya sanggar seni yang mendaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah sebagai sanggar seni yang aktif.

Jumlah Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan pada tahun 2021 sebanyak 22 buah, berupa benda purbakala, artefak, cemeti, benteng, goa, prasasti, talotua, meriam, makam kuno. Secara rinci Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.28
Perkembangan Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Tahun 2018 – 2021

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	20	22	15	15

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 2.29
Perkembangan Jumlah Sanggar Seni dan Jumlah Pentas Seni Tahun 2018 – 2021

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Sanggar Seni Budaya Daerah	789	792	815	815
2.	Jumlah Pentas Seni yang difasilitasi Pemerintah Daerah	22	23	4	4

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.1.2.3.2 Olahraga

Secara umum keberhasilan di bidang pemuda dan olah raga dapat dilihat jumlah organisasi kepemudaan dan olah raga, jumlah klub olah raga, jumlah lapangan olah raga, Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi, Jumlah Organisasi Pemuda, Jumlah Organisasi Olahraga, Jumlah Kegiatan Kepemudaan, dan jumlah Kegiatan Keolahragaan.

Jumlah kegiatan kepemudaan pada tahun 2021 sebanyak 2 kali, naik sedikit dibandingkan pada tahun 2020 tidak ada kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, yang disebabkan karena adanya pandemic COVID-19.

Sedangkan jumlah organisasi olah raga pada tahun 2021 sebanyak 25 organisasi tidak meningkat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini karena belum ada pembentukan usulan kepanitian olahraga baru di kalangan masyarakat.

Tabel. 2.30
Perkembangan Organisasi Kepemudaan Dan Olah Raga
Tahun 2018– 2021

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Organisasi Kepemudaan (termasuk karang taruna)	20	20	20	20
2.	Jumlah Organisasi Olah Raga	25	25	25	25
3.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	20	9	-	2
4.	Jumlah Kegiatan Keolahragaan	25	2	2	2

Sumber data : Dinas Pemuda dan Olahraga

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek pelayanan umum dalam menyusun rancangan awal RKPD Kabupaten Lampung Tengah terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang dianalisis menurut kabupaten.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Konkuren

2.1.3.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib

2.1.3.1.1.1. *Urusan wajib Pendidikan*

Sektor pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun modal sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja yaitu Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka pendidikan yang ditamatkan (APT), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan Sekolah, Angka Melanjutkan (AM), Fasilitas

Pendidikan, Rasio guru/murid, Angka melek, dan kualifikasi pendidikan guru.

Rata-rata Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan pertumbuhan 0,134 persen per tahun. Rata-rata Angka Partisipasi Kasar (APK) SD menurun sebesar 0,02 persen per tahun, sedangkan APK SMP meningkat sebesar 1,76% per tahun. Rata-rata Angka Partisipasi Murni (APM) juga terus meningkat dengan pertumbuhan masing-masing adalah SD (0,086 persen per tahun) dan SMP (2,96 persen per tahun).

Rata-rata Angka Putus Sekolah tahun 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah untuk SD, SMP, dan SMP cenderung konstan. Demikian juga dengan angka Angka Kelulusan Sekolah juga cenderung konstan dan sudah maksimal yaitu mencapai 100 persen. Angka

Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs terus meningkat dengan pertumbuhan 1,44 dalam kurun waktu 2017-2021.

Kondisi fasilitas bangunan baik juga terus meningkat dimana pertumbuhannya masing-masing adalah SD (1,10 persen per tahun) dan SMP (3,86 persen per tahun). Angka melek huruf terus meningkat dengan pertumbuhan 0,75 per tahun dan tahun 2021 angka melek huruf sudah mencapai 99,7 persen. Persentase guru berpendidikan S-1 terus meningkat dengan pertumbuhan 2,10 persen per tahun. Pada akhir 2021, guru berpendidikan S-1 sudah mencapai 92,74 persen.

Target pencapaian 33n SPM bidang Pendidikan yaitu 100% terhadap warga negara yang seharusnya mendapat pelayanan untuk setiap jenis pelayanan dasar, antara lain: (1) Pendidikan Dasar; (2) Pendidikan Kesetaraan; maupun (3) Pendidikan Anak Usia Dini. Capaian kinerja jenis pelayanan dasar Pendidikan Dasar pada Tahun 2020 dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Keberhasilan secara akademik dengan adanya kejuaraan lomba yang dari tahun ke tahun meningkat.

2. Nilai rata-rata Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional sebagai akhir kegiatan belajar mengajar dalam satuan jenjang tertentu baik SD maupun SMP mengalami peningkatan.
3. Semakin terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana baik SD maupun SMP serta proses PPDB secara zonasi semakin dimengerti oleh masyarakat.

Sementara capaian kinerja jenis pelayanan dasar Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 sebagai hasil dari penjangkauan ATS (Anak Tidak Sekolah).

Tabel 2.31
Pencapaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Ratio	63,66	64,02	64,56	64,32	64,33
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) :						
	- APK SD/MI/Paket A	Ratio	110,42	112,23	106,43	110,31	110,32
	- APK SMP/MTs/Paket B	Ratio	90,73	96,16	88,2	99,4	99,53
3	Angka pendidikan yang ditamatkan (APT):						
	- APT SD/MI/Paket A	Ratio	100	100	100	100	100
4	Angka Partisipasi Murni (APM):						
	- APM SD/MI/Paket A	Ratio	98,8	99,13	99,5	99,5	99,23
	- APM SMP/MTs/Paket B	Ratio	75,36	75,77	75,27	90,5	90,18
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS):						
	- APM SD/MI/Paket A	Ratio	100	100	95,65	95,66	99,95
	- APM SMP/MTs/Paket B	Ratio	95,69	96,99	82,23	82,38	99,55
6	Angka Putus Sekolah:						
	- Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A	Ratio	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- Angka Putus Sekolah APM SMP/MTs/Paket B	ratio	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
7	Angka Kelulusan Sekolah:						
	- Angka Kelulusan SD/MI	ratio	100	100	100	100	100

No.	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
	- Angka Kelulusan SMP/MTs/9	ratio	100	100	100	100	100
8	Angka Melanjutkan (AM):						
	- Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	ratio	98,56	98,78	98,93	98,95	100
9	Fasilitas Pendidikan:						
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Unit	326	328	334	338	363
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Unit	83	84	87	93	51
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	ratio	46,49	46,5	46,52	46,53	35
11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	ratio	5,94	6,96	6,94	6,95	5,06
12	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Ratio	0,045	0,059	0,06	0,07	0,07
13	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata SMP	ratio	0,062	0,07	0,07	0,08	0,08
14	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Ratio	45,5	46,02	46,54	46,57	46,60
15	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	98,5	98,9	99,6	99,7	100
16	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	96,39	96,81	94,95	95	97,06
17	Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	49,73	74	85	85,03	84,7
18	Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	86,67	86,67	92,72	92,74	92,7

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah

Tabel 2.32
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
				2021
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100 %	100
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	100
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	100

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah

2.1.3.1.1.2. Kesehatan

a. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Persatuan Penduduk

Sampai dengan tahun 2021, jumlah Puskesmas di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 39 buah, dengan Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk sebesar 1 : 37.437 Jumlah ini terdiri dari Jumlah Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) sebanyak 10 buah dengan Rasio persatuan Penduduk 1 : 146.045 dan Puskesmas Tanpa Tempat Perawatan (TTP) sebanyak 29 buah dengan rasio persatuan Penduduk sebesar 1 : 50.346 Kondisi tersebut masih di bawah target nasional yaitu sebesar 1 : 20.000. sehingga dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada, tingkat ketersediaan Puskesmas di Kabupaten Lampung Tengah masih kurang dan memerlukan tambahan untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dasar masyarakat. Sementara itu rasio Puskesmas terhadap jumlah kecamatan pada tahun 2021 mencapai 1 : 1,39 artinya bahwa dalam satu kecamatan bisa terdapat lebih dari 1 unit Puskesmas.

Tabel 2.33
Sarana Prasarana Kesehatan Milik Pemerintah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Puskesmas DTP (Dengan Tempat Perawatan)	Unit	10	10	10	10	10
2	Jumlah Puskesmas TTP (Tanpa Tempat Perawatan)	Unit	29	29	29	29	29
3	Jumlah Puskesmas Mampu PONED	Unit	10	10	10	10	10
4	Jumlah Pustu	Unit	114	114	114	114	114
5	Jumlah Poskesdes	Unit	95	95	95	125	201
6	Rasio Puskesmas DTP Persatuan Penduduk	Rasio	126.149	127.156	128.131	129.041	140.045
7	Rasio Puskesmas TTP Persatuan Penduduk	Rasio	43.499	43.847	44.183	44.497	50.346
8	Rasio Puskesmas PONED Persatuan Penduduk	Rasio	126.149	127.156	128.131	129.041	140.045
9	Rasio Pustu Persatuan Penduduk	Rasio	11.065	11.154	11.239	11.319	12.807
10	Rasio Poskesdes Persatuan Penduduk	Rasio	13.278	13.384	9.780	10.323	7.263
11	Jumlah Kecamatan	Jumlah	28	28	28	28	28
12	Jumlah kampung/ kelurahan	Jumlah	311	311	311	311	311
13	Rasio Puskesmas Per Kecamatan	Rasio	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39

Sumber data: Dinas Kesehatan Lampung Tengah

b. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 sebanyak 9 (sembilan) unit, terdiri dari rumah sakit daerah sebanyak 1 unit dan rumah sakit swasta 8 (delapan) unit. Rasio pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021 mencapai 1 : 162.227 yang berarti bahwa untuk 1 rumah sakit di Kabupaten Lampung Tengah melayani 162.227 penduduk.

Tabel 2.34
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit dan Klinik Per Jumlah Penduduk
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah Sakit	Unit	9	9	9	9	9
2	Jumlah Klinik	Unit	36	36	29	29	29
3	Rasio Rumah Sakit Thd Penduduk	Rasio	140.166	141.285	142.367,9	143.379,0	162.227

Sumber data: Dinas Kesehatan Lampung Tengah

c. Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk

Jumlah Tenaga Kesehatan secara keseluruhan selama tahun 2017 - 2021 mengalami peningkatan, namun apabila dibandingkan terhadap jumlah penduduk masih kurang. Angka ideal rasio pemenuhan tenaga Kesehatan dokter adalah 1 : 2.500. Pada tahun 2021, jumlah tenaga dokter mencapai 307 orang dan apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 1.477.395 jiwa, maka jumlah dokter yang seharusnya adalah 590 orang. Sehingga kekurangan tenaga dokter di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021 sebanyak 283 orang.

Tabel 2.35
Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Dokter Umum + gigi	Orang	145	164	183	152	198
2	Jumlah Dokter Spesialis	orang	93	114	123	79	138
3	Jumlah Dokter	Orang	238	278	306	231	307
4	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.261.498	1.271.566	1.281..310	1.460.045	1.477.395
5	Rasio Dokter Terhadap Penduduk per 100.000 penduduk	Rasio	0,38	0,44	8	10	9
6	Jumlah Perawat	Orang	993	1089	1027	979	1072
7	Jumlah Bidan	Orang	751	844	760	592	757
8	Rasio Bidan Terhadap Penduduk per 100.000 penduduk	Rasio	1,38	1,52	1,39	59	51

Sumber data: Dinas Kesehatan Lampung Tengah

d. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita

Selama periode tahun 2017-2021, jumlah Posyandu di Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan 42 buah posyandu atau 2,9% dari sebanyak 1.406 buah pada tahun 2017 menjadi sebanyak 1450 buah pada tahun 2021. Sampai tahun 2021 Posyandu Pratama sebanyak 1,9 persen, posyandu madya sebanyak 10,11 persen, posyandu purnama sebanyak 67,2% dan Posyandu Mandiri sebanyak 20,8 persen. Kondisi tersebut menggambarkan masih perlunya pembinaan peningkatan cakupan untuk meningkatkan strata posyandu purnama ke mandiri.

Tabel 2.36
Jumlah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Posyandu Pratama	buah	0	1	2	2	27
2	Jumlah Posyandu Madya	buah	225	254	62	62	146
3	Jumlah Posyandu Purnama	buah	1005	1020	897	897	974
4	Jumlah Posyandu Mandiri	buah	178	181	176	176	303
5	Total Posyandu	buah	1408	1456	1448	1448	1450
6	Persentase						
	- Posyandu Pratama	%	0	0,07	0,14	0,14	1,9
	- Posyandu Madya	%	15,98	17,45	4,28	4,28	10,11
	- Posyandu Purnama	%	71,38	70,05	61,95	61,95	67,2
	- Posyandu Mandiri	%	12,64	12,43	12,15	12,15	20,9
7	Jumlah Balita	orang	113.579	111.743	109.907	108.059	114.629
8	Rasio Jumlah Balita Setiap Posyandu	Rasio	12,40	13,03	13,17	13,40	12,64

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah

e. Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan

Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada saat proses persalinan. Persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat meminimalisir jumlah komplikasi/kematian ibu dan bayi, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2021 sebesar 83,9 persen. Namun apabila capaian kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan capaian tahun 2020 mengalami peningkatan 14,59 persen.

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya:

- Kualitas sumber daya manusia bidang kebidanan;
- Sarana prasarana dalam mendukung pertolongan persalinan sesuai standar;
- Akses informasi mengenai pentingnya persalinan oleh tenaga kesehatan semakin meningkat;
- Kualitas pelayanan Antenatal care;

- Peran serta masyarakat dalam memobilisasi pertolongan persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Tabel 2.37
Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan	orang	21.449	19.889	20.141	15.594	18.351
2	Jumlah Total Ibu Bersalin	orang	23.829	23.379	22.937	22.500	21.869
3	Persentase	%	90	85,1	87,8	69,31	83,9

Sumber: Dinas Kesehatan Lampung Tengah

Tabel 2.38
Pencapaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase balita gizi buruk	%	0,026	0,013	0,019	0,093	
2	Jumlah kasus kematian ibu akibat melahirkan	kasus	12	10	17	21	38
3	Jumlah kasus kematian bayi	kasus	63	96	74	78	112
4	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga Kesehatan	%	90,01	85,07	87,8	69,31	83,9
5	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	%	91,08	83,49	83,6	66,08	81,32
6	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	86,49	91,4	100	100	100

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
7	Persentase Puskesmas mampu Poned	%	25,64	25,64	20,51	20,51	20,51
8	Rasio RSU terhadap Penduduk	Rumah Sakit terhadap penduduk	140.166	141.285	142.367,9	143.379	164.155
9	Rasio Puskesmas terhadap penduduk	Puskesmas terhadap penduduk	11.066	11.154	11.239	37.437	37.881
10	Rasio dokter : penduduk	dokter terhadap penduduk	5.300	4.573	4.781	5.586	8.741
11	Rasio dokter spesialis : penduduk	dokter spesialis terhadap penduduk	13.564,4	11.154	10.417	16.334	10.705
12	Cakupan pelayanan Kesehatan Rumah Sakit						
	- Kunjungan Rawat Jalan	orang	859.555	943.169	148.112	256.835	305.363
	- Kunjungan Rawat Inap	orang	45.449	46.800	49.712	41.914	44.024
	Quality of Place :						
	- Bed Occupancy Rate (BOR)	%	41,37	36,66	46,4	44,2	39,9
	- Turn Over Interval (TOI)	hari	4	4	3	3	3
	- Bed Turn Over (BTO)	kali	61	54	66	62	63
	Quality of Servive :						
	- Average Length Of Stay(Avlos)	Hari	2	3	3	3	2
	Angka Kematian Bayi (IMR)	Per 1000	2,92	4,95	3,6	0,8	6,1
	Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	per 100.000	52,88	51,48	83,58	106,4	206
13	Cakupan Kunjungan Pasien pada puskesmas	%	52,95	63,12	52,46	44,27	37,8

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah kunjungan	Pasien	668.079	802.642	672.194	646.491	558.542
	JUmlah Penduduk	Jiwa	1.261.498	1.271.566	1.281.310	1.460.045	1.477.395
14	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Hipertensi	%	n.a	49,42	5,9	8,3	3,5
	Mendapat Pelayanan Kesehatan	Jiwa	n.a	113.163	55.728	78.656	34.319
	Jumlah penderita hipertensi	Jiwa	n.a	228.982	942.686	952.913	989.251
15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DM	%	n.a	46	68	89,7	3,5
	Mendapat Pelayanan Kesehatan	Jiwa	n.a	25.675	7.824	10.430	8.257
	Jumlah penderita DM	Jiwa	n.a	55.830	11.501	11.626	11.871

Sumber data: Dinas Kesehatan Lampung Tengah

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 mencapai 38 kasus, disebabkan oleh Covid-19 sebanyak 19 kasus (50%), perdarahan 9 kasus (23,68%), Hipertensi dalam kehamilan, infeksi, masing-masing 3 kasus (7,89%), Sesak nafas, Lupus, Multi organ failure dan akibat gangguan sistem peredaran darah masing-masing 1 kasus (2,63%).

Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2021 mencapai 112 kasus, disebabkan IUFD (Intrauterine Fetal Death) 29 kasus (25,89), Prematur dan BBLR masing-masing 18 kasus (16,07%), Asfiksia 16 kasus (14,29%), Kelainan Bawaan 13 kasus (11,61%), Tersedak, RDS, Tali Pusat Menumbung, Letak Sunsang yang masing-masing 2 kasus (1,79%), dan

Sepsis, Sumbatan darah diotak, fetal distress, ikterus, syrosis hepatis, hypoglicemia, dehidrasi, gagal nafas, serotinus, partus tak maju (PYM) yang masing-masing 1 kasus (0,89%).

Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, budaya dan perilaku masyarakat (tidak periksa ke fasyankes, persalinan di dukun), terbatasnya jangkauan pelayanan kesehatan terutama pada daerah-daerah kantong, kurangnya dukungan/ suport dari lintas sektor merupakan determinan faktor penyebab tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan penurunan AKI dan AKB sesuai dengan tupoksi nya masing-masing guna mempermudah dan mendekatkan akses ke pelayanan kesehatan. Hal tersebut diikuti dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan Penguatan Program Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K), Kelas ibu, pemanfaatan Rumah Singgah dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-Kohort sebagai kontrol pemantauan kondisi terintegrasi bagi ibu hamil dan bayi.

f. Capaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bidang Kesehatan

Jenis layanan dasar untuk SPM bidang kesehatan tingkat kabupaten terdiri dari 12 jenis layanan. SPM pelayanan kesehatan ibu hamil tahun 2021 sebesar 81,32%, meningkat sebesar 11,56% dibanding tahun 2020 sebesar 69,76%, pelayanan kesehatan ibu bersalin tahun 2021 sebesar 83,91% atau meningkat sebesar 19,11% dibanding tahun 2020, kesehatan bayi baru lahir tahun 2021 sebesar 95,79% atau meningkat sebesar 25,14% dibanding tahun 70,65, kesehatan balita tahun 2021 sebesar 64,06% atau meningkat sebesar 8,85% dibanding tahun 2020, kesehatan pada usia pendidikan dasar tahun 2021 sebesar 38,17% atau menurun sebesar 8,97 % dibanding tahun 2020 sebesar 47,14%, kesehatan pada usia produktif tahun 2021 sebesar 4,61%

atau menurun sebesar 10,56% dibanding tahun 2020 sebesar 15,17, kesehatan pada usia lanjut tahun 2021 sebesar 77,79% atau meningkat sebesar 11,78% dibanding tahun 2020 sebesar 66,01, kesehatan penderita hipertensi tahun 2021 sebesar 11,41% atau menurun sebesar 40,23% dibanding tahun 2020 sebesar 51,64, kesehatan penderita diabetes melitus tahun 2021 sebesar 69,56% atau meningkat sebesar 24,45% dibanding tahun 2020 sebesar 45,11%, kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat tahun 2021 sebesar 84,16% atau menurun sebesar 0,71% dibanding tahun 2020 sebesar 84,91%, kesehatan orang terduga tuberkulosis tahun 2021 sebesar 52,07% atau meningkat sebesar 39,63% dibanding tahun 2020 sebesar 12,44%, kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) tahun 2021 sebesar 68,57% atau meningkat sebesar 18,57% dibanding tahun 2020 sebesar 50%,

Tabel 2.39
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bidang Kesehatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021

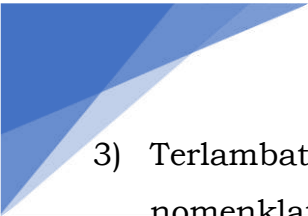
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	100 %	91,08	83,49	93,34	69,76	81,32
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan	100 %	90,01	85,07	87,81	64,80	83,91
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan	100 %	91,83	85,18	93,11	70,65	95,79
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	100 %	64,25	46,83	76,23	55,21	64,06
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan	100 %	97,30	74,53	66,33	47,14	38,17
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan	100 %	39,18	27,95	58,06	15,17	4,61

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi				
				2017	2018	2019	2020	2021
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	60,80	60,68	61,31	66,01	77,79
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	46,05	49,42	57,00	51,64	11,41
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	40,05	46,00	68,03	45,11	69,56
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 %	43,13	60,00	76,00	84,91	84,16
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	20,24	52,17	73,10	12,44	52,07
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	n.a	93,88	24,69	50,00	68,57

Sumber data: Dinas Kesehatan Lampung Tengah

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan pada tahun 2021 di Kabupaten Lampung Tengah yang belum dapat mencapai target adalah sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi Regulasi terlambat dilaksanakan Untuk melaksanakan sesuatu kegiatan yang baru seharusnya dilakukan pengenalan kegiatan tersebut kepada sasaran maupun pelaksanaan kegiatan, dengan keterlambatan tersebut maka belum semua tenaga kesehatan sebagai pelaksana pencapaian SPMBK
- 2) Tim Penerapan dan Pelaksana SPMBK Tim Penerapan dan Pelaksana SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah belum berjalan optimal sesuai dengan rencana yang dijadwalkan karena disibukkan dengan penanggulangan wabah Covid 19 berupa tracing penderita, vaksinasi dan pemeriksaan kontrak erat.

- 
- 3) Terlambatnya Penyerapan Anggaran Akibat adanya perubahan nomenklatur kegiatan pada sistem perencanaan dan penganggaran daerah (SIPD dan Simda) untuk melaksanakan SPM Bidang Kesehatan, sehingga harus menunggu mekanisme anggaran perubahan disahkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu juga belum ada dana khusus SPM Bidang Kesehatan di Dokumen Perencanaan Jangka menengah (RPJMD/Renstra Dinkes) dan Dokumen Perencanaan Tahunan Tahun 2021 (Renja 2021). Hal ini akan menyulitkan ketika akan melakukan kegiatan pencapaian SPMBK tahun 2021 sesuai Permendagri 100 tahun 2018.



Tabel 2.40

Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kesehatan Tahun 2017-2021

No	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup		2,73	4,94	3,625347636	0,6	6,1
	<i>Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu.</i>		63	96	73	10	112
	<i>Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu</i>		23.109	19.424	20.136	19.820	18.402
2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi		997	995	996	999,4	993,91
	<i>Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu</i>		63	96	73	10	112
	<i>Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu</i>		23109	19424	20136	19.820	18.402
3	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup		2,86	0,57	1,14	0,5	0,8
	<i>Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu</i>		66	11	23	6	15
	<i>Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu</i>		23109	19424	20136	19.820	18.402

No	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup		2,51	4,74	2,73	3,5	5,3
	<i>Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu.</i>		58	92	55	69	97
	<i>Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu</i>		23109	19424	20136	19.820	18.402
5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup		56,33	50,28	84,05	106,39	206,5
	<i>Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun</i>		12	10	17	21	38
	<i>Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama</i>		21304	19889	20226	19.820	18.402
6	Rasio Pos Yandu per satuan balita		12,40	13,02	13,17	1,3	17,8
	<i>Jumlah posyandu</i>		1408	1455	1448	1448	1.450
	<i>Jumlah balita</i>		113579	111743	109907	108.059	81.423
7	Rasio Puskesmas, Poliklinik, pustu, per satuan penduduk		0,12	0,12	0,12	0,12	0,1

No	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	<i>Jumlah puskesmas, poliklinik,ustu</i>		154	154	154	154	197
	<i>Jumlah penduduk</i>		1.261.498	1.271.566	1.281.310	1.460.045	1.477.395
8	Rasio Rumah sakit per satuan penduduk		0,007134375	0,007077887	0,007024061	0,006974544	0,006
	<i>Jumlah rumah sakit</i>		9	9	9	9	9
	<i>Jumlah penduduk</i>		1.261.498	1.271.566	1.281.310	1.460.045	1.477.395
9	Rasio Dokter per satuan penduduk		0,011	0,013	0,014	0,010	0,06
	<i>Jumlah dokter (umum + gigi)</i>		145	164	183	152	198
	<i>Jumlah penduduk</i>		1.261.498	1.271.566	1.281.310	1.460.045	1.477.395
10	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk (dokter + spesialis)		0,019	0,022	0,024	0,016	0,08
	<i>Jumlah tenaga medis</i>		238	278	306	231	125
	<i>Jumlah penduduk</i>		1.261.498	1.271.566	1.281.310	1.460.045	1.477.395
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani		100,0	100,0	100,0	96,9	80,1

No	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	<i>Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu</i>		325	2791	3762	4202	3.672
	<i>Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama</i>		3245	2791	3762	4338	4.582
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		99	99,54	99,58	76,83	83,9
	<i>Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu</i>		21103	19889	20141	17287	18.351
	<i>Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama</i>		21304	19980	20226	22500	21.869
13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		85,67	91,40	100,00	100,00	100
	<i>Jumlah Desa / Kelurahan UCI</i>		269	287	314	314	314
	<i>Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan</i>		314	314	314	314	314

No	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
14	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan		100	100	100	100	100
	<i>Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu</i>		30	30	30	10	16
	<i>Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama</i>		30	30	30	10	16
15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak		98,8	111,7	100,9	8,7	85,6
	<i>Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun</i>		22035	24477	21731	1861	17.292
	<i>Jumlah anak usia 1 tahun pada w</i>		22292	21915	21538	21428	20.206
16	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk		2,06	0,884762618	2,657815158	0	85,6
	<i>Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan</i>		7	3	9	0	17.292
	<i>jumlah penduduk < 15 tahun</i>		339074	339074	338624	337494	20.206

No	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani		9,92	23,80	19,22	13,92	21,8
	<i>Jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun</i>		376	593	471	337	626
	<i>Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama</i>		3788,956312	2491,8689	2450,9261	2421	2.867
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC, BTA		100	100	100	100	40,0
	<i>Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun</i>		954	1082	1311	1289	6.019
	<i>Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama</i>		954	1082	1311	1289	15.036
19	Tingkat prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk		89,66	163,11	102,32	14,00	138,1
	<i>Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)</i>		1131	2074	1311	180,66	2.041
	<i>Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama</i>		1261498	1271566	1281310	1290407	1.477.395

No	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
20	Tingkat Kematian karena tuberkulosis per 100.000 penduduk		0,475625011	1,179647773	0,936541508	0,30997972	0,9
	<i>Jumlah Paisen TB yang meninggal</i>		6	15	12	4	13
	<i>Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama</i>		1261498	1271566	1281310	1290407	1.477.395
21	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS		100	100	100	100	38,1
	<i>Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS</i>		954	766	1575	1580	563
	<i>Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut</i>		954	766	1575	1580	1.478
22	Proporsi kasus Ttuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS		52	100	99	98	90,8
	<i>Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun</i>		493	766	1565	1548	1.342
	<i>Jumlah Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu yang sama</i>		954	766	1575	1580	1.478

No	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		100	100	100	100	100
	<i>Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP selama 1 Tahun</i>		75	109	366	110	223
	<i>Jumlah penderita DBD yang ditemukan dalam Kurun waktu yang sama</i>		75	109	366	110	223
24	Penderita Diare yang ditangani		41,97	52,59	30,47	38,67	14,7
	<i>Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader</i>		14294	18056	10540	13472	5.863
	<i>Jumlah perkiraan penderita diare (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)</i>		34060,446	34332,282	34595,37	34841	39.890
25	Angka kejadian malaria		0,71	0,39	0,62	n.a	0,1
	<i>Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu</i>		9	5	8	0	2
	<i>Jumlah penduduk pada pertengahan tahun</i>		1261498	1271566	1281310	1460045	1.477.395

No	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
26	Tingkat Kematian akibat malaria		0	0	0	0	0
	<i>Jumlah kematian tersangka malaria</i>		0	0	0	0	0
	<i>Jumlah penduduk beresiko pada kurun waktu 1 tahun</i>		1261498	1261498	1261498	n.a	1.477.395
27	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi		0,008640521	0,002	0,007	0,018	0,010
	<i>Jumlah pasien HIV dan AIDS</i>		109	30	93	227	151
	<i>Jumlah penduduk</i>		1261498	1271566	1281310	1460045	1477935
28	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		84,52189119	40,62952785	62,95306812	65,56	372,6
	<i>Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1</i>		369266	65056	96847	99847	580.447
	<i>Jumlah seluruh miskin di Kab/Kabupaten</i>		436888	160120	153840	152.280	155.770

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah

2.1.3.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Jaringan Jalan

Panjang jalan di Kabupaten Lampung Tengah sepanjang 1.343,3 km dan terbagi dalam 366 ruas. Sampai dengan tahun 2021 jalan mantab di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 61,50 persen atau sepanjang 826,185 km. Kondisi permukaan jalan kabupaten sampai dengan tahun 2021 meliputi aspal/hotmix sepanjang 1.058,661 km (78,81%), Beton sepanjang 46,255 km (3,44%), lapis penetrasi/latasir sepanjang 30,574 km (2,28%), Kerikil (Telford) sepanjang 184,994 km (13,77%), dan jalan tanah 22,842 Km (1,70%). Sementara itu, jumlah jembatan di Kabupaten Lampung Tengah mencapai 324 Unit.

Tabel 2.41

**Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018-2021**

Jenis Permukaan Jalan	2018		2019		2020		2021	
	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
Aspal (AC,HRS,ATB)	1013,539	75,47	1041,114	77,50	1076,273	80,12	1058,661	78,81
Perkerasan Beton	22,568	1,68	-	-	32,374	2,41	46,255	3,44
Lapis Penetrasi/Latasir/Macadam	-	-	-	-	-	-	30,574	2,28
Telford /Kerikil/Urpil	273,367	20,35	268,121	19,96	214,126	15,94	184,994	13,77
Tanah /Belum Tembus	33,852	2,52	34,091	2,54	20,553	1,53	22,842	1,70
Jumlah	1.343,326	100	1.343,326	100	1.343,326	100	1.343,326	100

Sumber: Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, 2021

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Pembangunan Jaringan Jalan
Kabupaten Lampung Tengah

No.	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	58,39	61,20	61,07	61,91	61,50
	<i>Panjang jalan kondisi baik</i>	Km	537,04	804,747	731,221	313,995	345,249
	<i>Jalan Kabupaten Kondisi Sedang</i>	Km	161,78	17,35	89,191	517,719	480,935
	<i>Jalan Kabupaten Kondisi Rusak Ringan</i>	Km	160,14	47,793	40,391	495,749	501,359
	<i>Jalan Kabupaten Kondisi Rusak Berat</i>	Km	337,84	473,436	482,523	15,863	15,778
	<i>Panjang jalan seluruhnya</i>	Km	1.196,82	1.343,326	1.343,326	1.343,326	1.343,326
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk		0,0011	0,0011	0,0010	0,0010	0,0010
	<i>Jumlah panjang jalan</i>	Km	1.343,326	1.343,326	1.343,326	1.343,326	1.343,326
	<i>Jumlah penduduk</i>	Jiwa	1.261.498	1.271.566	1.281.310	61,91	61,50
3	Persentase Jalan yang memiliki trotoar dan drenase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	0,59	0,88	1,21	n.a	n.a
	<i>Panjang jalan yang memiliki trotoar dan dranesi</i>	Km	7,054	12	16	n.a	46,255
4	Panjang jalan menurut jenis permukaan						
	<i>Aspal (AC,HRS,ATB)</i>	Km	N/A	1013,539	1041,114	1076,273	1058,661
	<i>Perkerasan Beton</i>	Km	N/A	22,568	-	32,374	46,255
	<i>Lapis Penetrasi/Latasir/Macadam</i>	Km	N/A	-	-	-	30,574
	<i>Telford / Kerikil/Urpil</i>	Km	N/A	273,367	268,121	214,126	184,994
	<i>Tanah / Belum Tembus</i>	Km	N/A	33,852	34,091	20,553	22,842

b. Sumber Daya Air

Pada aspek infrastruktur jaringan irigasi, pembangunan difokuskan dalam upaya meningkatkan intensitas tanam padi sawah khususnya pada daerah Irigasi Teknis yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pada wilayah Kabupaten Lampung Tengah terdapat daerah irigasi (D.I.) yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu D.I Way Seputih, D.I. Way Pengubuan, dan D.I. Punggur Utara. Dengan panjang saluran irigasi primer sepanjang 67,789 km, jaringan irigasi sekunder 496,940 km dengan luas sawah yang terairi 48.335 Ha.

Selain itu juga ada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yaitu D.I. Way Kali Pasir, D.I. Way Srikaton, D.I. Way Tatayan Kotabaru, dan D.I. Way Tipo Balak. Dengan panjang saluran irigasi primer sepanjang 44,892 km, jaringan irigasi sekunder 108,091 km dengan luas sawah yang terairi 6.904 Ha.

Untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sebanyak 163 daerah irigasi. Dengan panjang saluran irigasi primer sepanjang 403,888 km, jaringan irigasi sekunder 487,757 km dengan luas sawah yang terairi 16.408 Ha.

Pada periode 2017-2021, di Kabupaten Lampung Tengah rata-rata daerah irigasi teknis kewenangan pemerintah kabupaten yang kondisi baik adalah 94,48 persen dan rata-rata embung pada kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air dalam kondisi baik meningkat 28,78 persen per tahun. Rata-rata persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar adalah 33,67 persen.

Selama periode 2017-2021, di Kabupaten Lampung Tengah rata-rata Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun terus menurun dengan penurunan 7,38 persen per tahun. Rata-rata persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik terus menurun dengan penurunan 0,20 persen per tahun. Rata-rata persentase jumlah embung dalam kondisi baik 51,85 persen. Rata-rata persentase jumlah bendung dalam kondisi

baik 72,72 persen. Rata-rata persentase panjang talud dan bangunan pelengkap 66,80 persen. Rata-rata persentase luas sawah yang terairi oleh jaringan irigasi 90,70 persen. Rata-rata persentase jumlah saluran irigasi dalam kondisi baik 61,34 persen.

Tabel 2.43.
Daerah Irigasi Kabupaten Lampung Tengah

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Kewenangan Pemerintah Pusat	DI	3	3	3	3	3
2	Kewenangan Pemerintah Propinsi	DI	4	4	4	4	4
3	Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten	DI	163	163	163	163	163

Sumber: Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah 2021

Tabel 2.44
Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Pekerjaan Umum Bidang Pengairan

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	40	40	41	41	42%
1.1	<i>Panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (Km)</i>	Km	325	327	331	335	340,00
1.2	<i>Panjang seluruh sempadan sungai kabupaten (Km)</i>	Km	813	813	813	813	813,00
2	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	79%	61%	58%	56%	60%
2.1	<i>Luasan daerah yang tergenang</i>	Ha	5.896	4.100	3.840	3.560	3.870,00
2.2	<i>Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang</i>	Ha	7.460	6.674	6.600	6.387	6.400,00
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	10	11	17	18	11,38%
3.1	<i>Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik</i>	Ha	1.710	1.905	1.850	1.980	9.065,00
3.2	<i>Luas irigasi kabupaten</i>	Ha	16.636	16.636	11.160	11.160	79.664,17
4	Rasio jaringan Irigasi		16,51	16,51	16,51	16,51	60%
4.1	<i>Panjang saluran irigasi</i>	Km	2.780,98	2.780,98	2.780,98	2.780,98	3.870,00
4.2	<i>Luas lahan budidaya pertanian</i>	Ha	16.849	16.849	16.849	16.849	6.400,00

Sumber data: Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah

c. Air Bersih dan Sanitasi

Kondisi air bersih dan sanitasi mencerminkan kesejahteraan penduduk yang menempatinnya. Untuk itu Pemerintah telah menetapkan target 100-0-100 yang bermakna 100% penduduk menggunakan air bersih, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi masyarakat baik. Perkembangan jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih tahun 2017 – 2021 mengalami kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 3,56 persen. Sampai dengan tahun 2021 sebanyak 89,88 persen rumah tangga di Kabupaten Lampung Tengah sudah menikmati air bersih.

Perkembangan jumlah rumah sehat (rumah layak huni) tahun 2017 – 2021 di Kabupaten Lampung Tengah juga mengalami kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 1,70 persen. Sampai dengan tahun 2021 sebanyak 94,49 persen rumah tangga di Kabupaten Lampung Tengah sudah masuk kategori rumah sehat (rumah layak huni).

Perkembangan jumlah rumah tangga yang menggunakan jamban keluarga tahun 2017–2021 di Kabupaten Lampung Tengah juga mengalami kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 1,78 persen. Sampai dengan tahun 2021 sebanyak 98,65 persen rumah tangga di Kabupaten Lampung Tengah sudah menggunakan jamban sehat keluarga.

Perkembangan jumlah pengguna listrik tahun 2017 di Kabupaten Lampung Tengah juga mengalami kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 2,41 persen. Sampai dengan tahun 2021 sebanyak 89,66 persen rumah tangga di Kabupaten Lampung Tengah sudah menjadi pengguna listrik.

Luas lingkungan kumuh (lingkungan kumuh) tahun 2017–2021 di Kabupaten Lampung Tengah juga mengalami kecenderungan menurun dengan rata-rata pertumbuhan penurunan 6,73 persen. Sampai dengan tahun 2021 Luas

lingkungan kumuh (lingkungan kumuh) di Kabupaten Lampung Tengah hanya tinggal 1,4 persen.

Tabel 2.45
Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah Tangga	331.849	335.167	338.519	339.563	339.763
2	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	285.898	285.898	298,319	320.207	305.395
	Persentase	86,15	86,15	88,12	94,30	89,88

Sumber data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.46
Perkembangan Jumlah Rumah Sehat (Layak Huni) Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah Tangga	331.849	335.167	338.519	339.563	339.763
2	Jumlah Rumah sehat (Layak Huni)	283.752	286.752	287.502	294.002	321.046
	Persentase	85,51	85,54	86,18	86,58	94,49

Sumber data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.47
Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Sanitasi Jamban Keluarga Tahun 2017–2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah Tangga	331.849	335.167	338.519	339.563	339.763
2	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Sanitasi Jamban Sehat Keluarga	308.455	311.855	315.240	320.207	321.046
	Persentase	92,95	93,04	93,12	94,30	94,49

Sumber data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.48
Perkembangan Jumlah Pengguna Listrik Tahun 2017–2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah Tangga	331.849	335.167	338.519	339.563	339.763
2	Jumlah Rumah Pengguna Listrik	275.992	281.512	285.686	303.229	304.651
	Persentase	83,13	83.99	84.39	89.30	89.66

Sumber data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.49
Luas Lingkungan Kumuh (Lingkungan Kumuh) Tahun 2017–2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Luasan Lingkungan Permukiman (Ha)	527,38	527,38	642,21	553,74	553,74
2	Luasan Lingkungan Permukiman Kumuh (Ha)	11,21	10,20	9,89	8,42	7,79
	Persentase	2,1	1,9	1,54	1,52	1,40

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	Realisasi
			%	
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Presentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	100	98,42%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Presentase jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Pengolahan Air Limbah Domestik Minimal sesuai Haknya	100	100

Sumber data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pada tahun 2021 penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari mencapai 98,42%, dimana jumlah warga negara di Lampung Tengah telah memperoleh akses untuk memiliki air, dengan target rumah tangga di Kabupaten Lampung Tengah mencapai 319.293 unit dan realisaasi rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum mencapai 314.258 unit. Perolehan pelayanan akses air tersebut dibagi menjadi dua yaitu dengan pelayanan jaringan perpipaan dan pelayanan bukan jaringan perpipaan. Jumlah angka Warganegara yang berada di Kabupaten Lampung Tengah yang mendapatkan pelayanan dari kedua akses tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk jenis pelayanan penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik pada tahun 2021 capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) jenis pelayanan dasar penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik mencapai 100% dengan rincian pelayanan rumah tangga SPALD-S25jiwa/Ha sebanyak 57 SR/Rumah Tangga dari target 57 SR/Rumah Tangga dan yang terakhir pelayanan rumahtangga SPALD-T sebanyak 2.850 SR/Rumah Tangga dari target 2.850 SR/Rumah Tangga. Dengan demikian secara keseluruhan capaian telah mencapai 100%. Untuk mengetahui jumlah warga negara khususnya di Kabupaten Lampung Tengah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik kami asumsikan bahwa 1 SR atau 1 rumah tangga terdapat 5 jiwa yang terlayani, angka jumlah warga negara yang terlayani di kabupaten Lampung Tengah secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut

d. Penataan Ruang

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah saat ini memiliki ruang terbuka hijau (RTH) seluas 5,26 Ha atau sebesar 8,42 persen dari luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 2.51
Penataan Ruang

No	Uraian	Luas (m2)			LOKASI
		2019	2020	2021	
1	Taman Tugu Canang	18.623	18.623	18.623	Kec. Gunung Sugih
2	Taman Kopiah Emas	3.063	3.063	3.063	Kec. Gunung Sugih
3	Taman Budaya	632	632	632	Kec. Gunung Sugih
4	RTH Way Tippto dan Halaman Pabung	245	245	245	Kec. Gunung Sugih
5	Kolam Air Mancur Utara-Selata	3.557	3.557	3.557	Kec. Gunung Sugih
6	Lapangan Upacara Baru	18.376	18.376	18.376	Kec. Gunung Sugih
7	RTH Plaza Bandar Jaya	220	220	220	Kec. Gunung Sugih
8	Tugu Perbatasan Pesawaran - Lampung Tengah	414	414	414	Kec. Bumi Ratu
9	Tugu Nanas	18	18	18	Kec. Punggur
10	RTH Poncowati	150	150	150	Kec. Terbanggi Besar
11	RTH Haji Pemanggilan	298	298	298	Kec. Padang Ratu
12	RTH Wates	100	100	100	Pasar Wates
13	RTH Taman Gajah	4.338	4.338	4.338	Kec. Gunung Sugih
14	RTH Kec. Padang Ratu	594	594	594	Kec. Padang Ratu
15	RTH Seputih Banyak	840	840	840	Kec. Seputih Banyak
16	RTH Sendang Agung	630	630	630	Kec. Sendang Agung
17	RTH Kota Gajah	110	110	110	Kec. Kota Gajah
18	RTH Bekri	112	112	112	Kec. Bekri
19	RTH Kampung Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan	66	66	66	Kec. Way Pengubuan
20	RTH Perbatasan Kampung Lempuyang Bandar - Kec. Terbanggi Besar	75	75	75	Kec. Way Pengubuan
21	Kolam Air Mancur Masjid Istiqlal	38	38	38	Kec. Terbanggi Besar
22	RTH Dam Raman	66	66	66	Kec. Punggur
Total RTH (m2)		52.566	52.566	52.566	52.566
Total RTH (ha)		5,26	5,26	5,26	5,26

Sumber data: Dinas Pengairan

2.1.3.1.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah layak huni pada tahun 2017 sebanyak 286.102 unit, pada tahun 2018 sebanyak 286.752 unit, serta pada 2019 rumah layak huni sebanyak 287.502 unit, pada tahun 2020, dan 2021 sebanyak 294.002 unit. Rata-rata pertumbuhan rumah layak huni selama 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Lampung Tengah adalah 0,63 persen, rata-rata Rasio permukiman layak huni adalah 0,43 persen, rata-rata cakupan ketersediaan rumah layak huni 93,30 persen, dan rata-rata cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU adalah 100 persen. Capaian kinerja standar pelayanan minimal (SPM) bidang perumahan rakyat tahun 2021 di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan capaian 100%. Indikator yang digunakan untuk mengukur SPM tersebut ada 2 (dua) indikator, yaitu adalah penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang Layak huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota

Tabel 2.52
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio rumah layak huni		0,23	0,23	0,23	0,20	0,19
	<i>Jumlah rumah layak huni</i>	unit	286.102	286.752	287.502	294.002	294.002
	<i>Jumlah penduduk</i>	jiwa	1.261.498	1.271.566	1.281.310	1.460.045	1.477.395
2	Rasio Permukiman layak huni		0,93	0,93	0,93	0,94	0,86
	<i>Luas pemukiman layak huni</i>	ha	490	491	493	494	478
	<i>Luas wilayah permukiman</i>	ha	527	527	527	527	553,74
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni		93,4	93,6	93,9	94,4	94,35
	<i>Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu</i>	unit	275.744	276.394	277.144	278.501	278.501
	<i>Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu</i>	unit	295.167	295.167	295.167	295.167	295.167
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau		63	64	65	67	67,04
	<i>Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu</i>	unit	46.711	47.361	48.111	49.468	49.468
	<i>Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu</i>	unit	73.792	73.792	73.792	73.792	73.792
5	Luas area permukiman tertata	ha	24	498	499	501	501
6	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	0,001	0,001	0,001	0,001	0,013
	<i>Luas lingkungan permukiman kumuh</i>	ha	6	6	5	4	66,77
	<i>Luas wilayah</i>	Ha	479.000	479.000	479.000	479.000	478.982
7	Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu	Ha	478,965	478965	478,965	478,964	478,964

Sumber data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.53
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar3	Indikator SPM	Target	Capaian		
			%	2019	2020	2021
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Presentase Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	93,89	85,54	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang Layak huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Presentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang layak huni	0,0069	1,79	100%	100%

Sumber data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

2.1.3.1.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat erat kaitannya dengan tingkat kriminalitas. Rasa aman masyarakat menjadi tolak ukur kualitas indikator keamanan ketertiban dan perlindungan masyarakat. Indikator lain untuk menunjang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah keberhasilan penerapan suatu peraturan per Undang-Undangan, seperti halnya peraturan daerah dan peraturan Bupati. Apabila penegakan hukum tidak berfungsi baik, peraturan per-undang-undangan yang paling sempurna sekalipun akan kurang bahkan tidak memberikan arti yang sesuai dengan tujuannya. Karena itu, secara umum dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan ujung tombak untuk menilai apakah suatu peraturan itu baik atau tidak, bermanfaat atau tidak, menjamin adanya ketenteraman dan ketertiban atau tidak. Indikator penegakan hukum antara lain tergambar dari jumlah kasus pelanggaran perda dan

pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku ujung tombak penegakan perda.

Rasio Angka kriminalitas per 10.000 Penduduk tahun 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah memiliki kecenderungan menurun dengan rata-rata penurunannya dalah 3,78 persen. Hal ini salah satunya di dukung oleh adanya peningkatan rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk yang rata-rata pertumbuhannya adalah 22,98 persen. Persentase penegakan PERDA di Kabupaten Lampung Tengah juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhannya 13,30 persen. Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit di Kabupaten Lampung Tengah juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhannya 12,76 persen. Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhannya adalah 1,73 persen.

Tabel 2.54
Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM	Target Nasional	Target Daerah	Realisasi	%
					2021	
1	Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 %	28 Kec.	28 Kec.	100
2	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	28 Kec.	28 Kec.	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Lamteng

Tabel 2.55
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)		1	1	1	1	1
	<i>100 orang petugas Linmas</i>	Orang	100	100	100	100	100
	<i>1 Wilayah kerja kabupaten/kota</i>	Orang	9641	9641	9641	9641	9641
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	95	93	100	100	95
	<i>Pelanggaran K3 yang terselesaikan</i>	Kasus	23	27	27	25	26
	<i>Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP</i>	Kasus	24	29	27	25	27
3	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	kebakaran	17	12	16	14	19
4	Persentase penegakan PERDA	Persen	88	100	89	90	100
	<i>Jumlah penyelesaian penegakan PERDA</i>	Kegiatan	15	16	17	18	19
	<i>Jumlah pelanggaran PERDA</i>	Kasus	17	16	19	20	19
5	Rasio Angka kriminalitas per 10.000 Penduduk	Rasui	5,32	4,39	4,25	4,25	3,53
6	<i>Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 Penduduk</i>	Rasio	349	676	658	643	610
	<i>Jumlah Penduduk</i>	Orang	1.261.498	1.271.566	1.281.310	1,460,045	1.477.395

2.1.3.1.1.6.Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Dalam upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Lampung Tengah didukung oleh keberadaan panti-panti sosial (panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah, dan lain-lain).

Pada akhir tahun 2021 sebanyak 79 persen PPKS sudah memperoleh bantuan. Persentase PPKS skala skala yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 66,99 persen.

Persentase PPKS yang menerima program pemberdayaan melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok ekonomi sejenis lainnya juga terus mengalami peningkatan. Pada akhir tahun 2021 sudah 100 persen PPKS telah menerima bantuan program pemberdayaan, semua panti telah menyediakan sarana prasarana layanan kesehatan, wahana kesejahteraan berbasis masyarakat (WKBSM) telah menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan, korban bencana telah menerima bantuan selama masa tanggap darurat, dan korban bencana telah dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.

Tabel 2.56
Pencapaian Kinerja Bidang Sosial Tahun 2017-2021
di Kabupaten Lampung Tengah

No	Kelompok PPKS	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan	%	85	84	82	88	79
2	Prosentase Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	%	2,9%	0,80%	1,40%	0,80%	44,69%
3	Jumlah Anak Terlantar Yang dilakukan Pembinaan	anak	47	200	160	200	200
4	Jumlah penyandang cacat dan trauma yang dibina	orang	30	30	10	15	15
5	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	lembaga	3	3	3	3	7
6	Persentase PPKS skala skala yag memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	83	79	59	98	55,36%
	<i>Jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun</i>	Orang	95.981	79.496	95.981	146.355	161.115
	<i>Jumlah PPKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial</i>	Orang	115.847	100.925	163.027	149.692	291.157
9	Persentase panti yang menyediakan sarana prasarana	%	100	100	100	100	100,00%

No	Kelompok PPKS	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	layanan kesehatan						
	<i>Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos</i>	Panti	48	69	26	43	43
	<i>Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos</i>	Panti	48	69	26	43	43
10	Persentase wahana kesejahteraan berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan		100	100	100	100	100,00%
	<i>Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos</i>		143	143	143	143	143
	<i>Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos skala</i>		143	143	143	143	143
11	Persentase korban bencana yang menerima	%	100	100	100	100	100,00%

No	Kelompok PPKS	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	bantuan selama masa tanggap darurat						
	<i>Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun</i>	kejadian bencana	23	46	57	19	906
	<i>Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) 993 tahun</i>	kejadian bencana	23	46	57	19	906
12	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	%	100	104	100	100	100,00%
	<i>Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun</i>	Kebakaran	17	26	46	22	48
	<i>Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana</i>	Kebakaran	17	25	46	22	48

No	Kelompok PPKS	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	<i>tanggap darurat skala</i>						

Sumber data: Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.57
Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capainnya					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100 persen	1,04%	1,05%	0,49%	0,16%	0,24%	4,45%
2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	n.a	n.a	64,21%	30,51%	33,56%	88,49%
3	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	1,04%	1,76%	3,59%	5,20%	5,68%	11,74%
4	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh bantuan	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh bantuan	100 persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data: Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah


2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1. Tenaga Kerja

Bidang ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan, selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun.

Dalam bidang ketenagakerjaan, indikator kesempatan kerja (*demand for labour*) merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan/ lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif sebagai sumber daya manusia. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Berdasarkan hasil pendataan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras Kabupaten Lampung Tengah, untuk tahun 2019 diketahui bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 73,46 persen dan pada tahun 2020 TPAK sebesar 72,81 persen. Sedangkan pada tahun 2021, TPAK sebesar 72,26. Ini berarti bahwa dari 100



penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) terdapat di antaranya 72 orang yang termasuk dalam angkatan kerja. Secara rata-rata selama kurun waktu 2017-2021 TPAK di Kabupaten Lampung Tengah adalah 71,10 persen.


Jika dilihat menurut jenis kelamin maka tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini sejalan dengan pendapat Susanti et al. (1995) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja adalah jenis kelamin. Perbedaan tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin ini disebabkan karena laki-laki lebih memiliki tanggung jawab dalam kegiatan ekonomi (baik bekerja maupun mencari kerja) sedangkan perempuan cenderung mengurus rumah tangga.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020 dan 2021, diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 adalah sebesar 4,42 persen sedangkan di tahun 2021 meningkat menjadi yaitu sebesar 4,31 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin maka tingkat pengangguran terbuka laki-laki lebih rendah dibanding dengan tingkat pengangguran terbuka perempuan. Secara rata-rata selama kurun waktu 2017-2021 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lampung Tengah adalah 3,17 persen.

Rata-rata persentase pencari kerja yang ditempatkan tahun 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung fluktuatif. Pada akhir tahun 2021 tercatat sebesar 50,5 persen pencari kerja yang ditempatkan. Hal ini tidak lepas dari adanya pengaruh pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya perekonomian. Sehingga semakin sedikit angkatan kerja yang berhasil ditempatkan dan semakin melemahnya serapan/lowongan untuk tenaga kerja.

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun kerja ke atas tahun 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung fluktuatif. Pada akhir tahun 2021 sebanyak 69,14 persen penduduk usia 15 tahun kerja ke atas telah memiliki kesempatan kerja.





Angka sengketa pengusaha pekerja pada tahun 2021 mengalami peningkatan bila disbanding tahun 2020. Pada tahun 2021 tercatat ada 20 kasus, atau meningkat 5 kasus bila dibandingkan tahun 2020. Namun semua (100 persen) kasus dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB). Besaran pekerja/baruh yang menjadi peserta program Jamsostek cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 20,25 persen.

Jumlah lulusan S1/S2/S3 juga cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 3,00 persen. Pada tahun 2021, jumlah tenaga kerja dengan Pendidikan sarjana sebesar 47.753 orang, atau meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 30.329 orang.



Tabel 2.58
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan
dan Jenis Kelamin Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja				Jumlah (Usia Kerja)	% Tingkat Pengangguran Terbuka	% Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja/TPAK
		Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah Bukan Angkatan Kerja			
1	2017										
	Laki-Laki	415.891	8228	424.119	19130	8469	17890	45.489	458.540	2.45	89.49
	Perempuan	223.595	12116	235.711	29029	180139	10310	219.478	444.115	3.84	50.05
2	2018										
	Laki-Laki	418.135	8.005	426.140	21.115	14.735	12.165	48.015	458.540	2.45	89.49
	Perempuan	253.173	9.275	262.448	29.059	156.419	12.114	197.592	444.115	3.84	50.05
3	2019							0			
	Laki-Laki	416.820	7.977	424.797	26.472	13.747	15.234	55.453	474.205	1.89	57.05
	Perempuan	245.719	9.817	255.536	26.725	172.747	10.840	210.312	460.040	3.53	89.87
4	2020										
	Laki-Laki	426.428	15.178	441.966	27.703	7.743	20.063	55.509	497.475	3.56	88,84
	Perempuan	259.578	14.478	274.056	33.371	160.855	14.049	208.275	482.691	5,28	56,78

No	Tahun	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja				Jumlah (Usia Kerja)	% Tingkat Pengangguran Terbuka	% Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja/TPAK
		Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah Bukan Angkatan Kerja			
5	2021										
	Laki-Laki	428.236	15.665	443.901	21.936	23.503	6.790	57.980	501.881	3,53	88,45
	Perempuan	256.607	15.197	271.804	22.458	195.335	4.701	216.743	488.547	5,59	55,64

Sumber data: BPS Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.59

**Pencapaian Kinerja Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2017 - 2021
di Kabupaten Lampung Tengah**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,18	2,52	2,62	4,22	4,31
2	Rata-rata persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	60,60	62	85,89	21,27	50,5
3	Persentase Tenaga Kerja Yang Sudah mengikuti BPJS Keteagakerjaan	%	70	80	90	39,97	86,%
4	Angka partisipasi angkatan kerja	%	71,53	73,85	72,17	73,05	72,26
	<i>Angkatan kerja 15 tahun ke atas</i>	Jiwa	659.830	688.638	680.333	716.022	715.705

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	<i>Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas</i>	Jiwa	922.424	932.492	942.686	980.166	990.428
5	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun kerja ke atas	%	69,36	71,99	70,28	69,97	69,14
	<i>Kesempatan kerja</i>	Unit	639.830	671.308	662.539	685.826	684.843
	<i>Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas</i>	Jiwa	922.424	932.492	942.686	980.166	990.428
6	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	%	62,50	90,91	62,50	37,59	50,13
	<i>Jumlah sengketa pengusaha pekerja</i>	Kasus	4	11	9	15	20
	<i>Jumlah perusahaan</i>	Unit	64	121	144	399	399
7	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	%	100	100	100	100	100
	<i>Σ kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)</i>	Kasus	1	5	4	7	11
	<i>Σ kasus yang dicatatkan</i>	Kasus	1	5	4	15	22
8	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	60,6	55,3	85,88	21,3	16,7
	<i>Σ pencari kerja yang ditempatkan</i>	Jiwa	2.232	2.300	2867	770	377
	<i>Σ pencari kerja yang terdaftar</i>	Jiwa	3.683	4162	3338	3620	2270
9	Besaran pekerja/baruh yang menjadi peserta program Jamsostek	orang	85,00	93,50	56,57	100	86%

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Σ pekerja/buruh JAMSOSTEK	Jiwa	27.565	31.721	32.715	40.936	45.187
	Σ pekerja/buruh	Jiwa	32.429	33928	57.828	60.524	65.758
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	n.a	n.a	100	80	35
	Σ tenaga kerja yang dilatih	Jiwa	n.a	n.a	65	100	35
	Σ pendaftar pelatihan berbasis masyarakat	Jiwa	n.a	n.a	65	125	100
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	0,81	31,23	1,15	80	35,00
	Σ tenaga kerja yang dilatih	Jiwa	30	1300	65	100	35
	Σ pendaftar pelatihan kewirausahaan	Jiwa	3.683	4162	5657	125	100
12	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	17,38	27,58	20,67	20.7	32,32
	Jumlah lulusan S1/S2/S3	Jiwa	21998	26395	25712	30239	47.753
	Jumlah penduduk	Jiwa	1261498	1271566	1281310	1460045	1.477.395

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras Kabupaten Lampung Tengah

2.1.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Tujuan diselenggarakannya pemberdayaan perempuan adalah:

- a. Untuk meningkatkan kedudukan dan peran perempuan diberbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
- c. Meningkatkan kualitas peran kemandirian organisasi perempuan
- d. Untuk mengembangkan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga, masyarakat, dan perlindungan anak.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2021 tingkat IPG tertinggi terdapat di Kota Metro (95,89), sedangkan tingkat IPG terendah terdapat pada Kabupaten Mesuji (84,37). Kabupaten Lampung Tengah berada pada posisi ke-7 dengan nilai IPG = 89,94. Rata-rata pertumbuhan IPG di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017-2021 adalah 0,18%.

Jumlah kasus KDRT tahun 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah mengalami tren menurun di tahun 2021, yaitu sebesar 37 kasus, lebih sedikit dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 46 kasus. Namun jumlah kasus KDRT yang ditangani berhasil ditangani seluruh kasus (100 persen).

Jumlah penanganan kasus terhadap perempuan dan anak tahun 2017-2020 di Kabupaten Lampung Tengah selalu mencatatkan capaian 100%, berhasil ditangani.

Jumlah pekerja perempuan tahun 2021 di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 274.056 orang, dan tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan sebesar 55,65%. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah cenderung menurun dalam 3 tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan 4,1 persen. Hal ini dikarenakan banyak ASN perempuan yang mengalami pension.

Tabel 2.60
Pencapaian Kinerja Indeks Pangarusataan Gender (IPG)

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Lampung Barat	92,47	92,74	92,55	92,55	93,00
2	Tanggamus	90,71	91,14	90,88	91,13	90,98
3	Lampung Selatan	89,52	89,87	89,54	89,60	89,61
4	Lampung Timur	87,85	88,67	88,78	88,83	88,78
5	Lampung Tengah	89,23	89,57	89,88	89,87	89,94
6	Lampung Utara	88,69	89,34	89,48	89,46	89,54
7	Way Kanan	87,85	88,25	88,22	88,19	88,32
8	Tulang Bawang	88,51	88,69	89,17	89,31	89,56
9	Pesawaran	87,25	87,57	87,30	87,20	87,22
10	Pringsewu	92,26	92,59	92,37	92,33	92,29
11	Mesuji	83,82	84,49	84,22	84,17	84,37
12	Tulang Bawang Barat	88,08	88,53	88,45	88,56	88,96
13	Pesisir Barat	82,84	93,40	93,22	93,21	93,51
14	Kota Bandar Lampung	93,53	93,55	93,96	93,86	93,93
15	Kota Metro	94,97	94,98	95,02	95,55	95,89

Sumber data: BPS Propinsi Lampung/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung Tengah

Tabel 2.61
Pencapaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kasus KDRT	Kasus	24	20	45	46	37
1.1	<i>Jumlah Kasus KDRT Yang ditangani</i>	Kasus	9	20	45	46	37
1.2	<i>Persentase Kasus KDRT Yang Ditangani</i>	%	27,5	100	100	100	100
2	Jumlah Kasus terhadap perempuan dan anak	Kasus	357	405	109	46	37
2.1	<i>Jumlah Kasus terhadap perempuan dan anak yang ditangani</i>	Kasus	357	405	109	46	37
2.2	<i>Persentase penyelesaian kekerasan terhadap perempuan dan anak</i>	%	100	100	100	100	100
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	2,29	2,25	2,40	2,26	1,89%
3.1	<i>Pekerja perempuan di lembaga pemerintah</i>	orang	5,835	5,716	5,918	5.714	5.176
3.2	<i>Jumlah pekerja perempuan</i>	orang	253,711	253,173	245,719	256.607	274.056
4	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	orang	4	4	12	12	10
4.1	<i>Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan</i>	orang	2	2	6	6	5
4.2	<i>Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD</i>	orang	50	50	50	50	50
5	Jumlah pekerja perempuan	orang	253.711	253.173	245.719	256.607	274.056
6	Rasio KDRT	Rasio	0,03	09,04	0,01	n.a	0,01%
6.1	<i>Jumlah KDRT</i>	Kasus	145	182	50	62	37
6.2	<i>Jumlah rumah tangga</i>	RT	439.874	439.583	452.495	n.a	479.159
7	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	26,56	27,15	27,11	25	20,72

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100%
8.1	<i>Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu</i>	Kasus	357	405	109	123	69
8.2	<i>Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu</i>	Kasus	357	405	109	123	69
9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di puskesmas mampu tata laksana KIP/A dan PPT/PKT di rumah sakit	%	49,5	47,4	38,4	60,7	88,60%
9.1	<i>Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu</i>	orang	141	145	28	54	86
9.2	<i>Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus Ktp/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu</i>	orang	285	306	73	89	97
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	50,53	50	50	50	100%

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
11.1	<i>Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undnagan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak</i>	Kasus	144	161	45	35	53
11.2	<i>Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan</i>	orang	285	322	90	70	53
12	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	72	100	100	100	88,60%
12.1	<i>Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum</i>	orang	206	306	73	89	86
12.2	<i>Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum</i>	orang	285	306	73	89	97
13	<i>Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya</i>	orang	144	161	45	35	21
14	<i>Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi social</i>	orang	144	161	45	35	21

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Lampung Tengah

2.1.3.2.3. Pangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pengertian pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Tabel 2.62
Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama (Beras)
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ketersediaan Beras (ton)	477.948	519.054	471.735	460.888	482.115
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.261.498	1.271.566	1.281.310	1.460.045	1.477.395
Rata-rata Perkapita (kg/thn)		378,873	408,201	368,166	315,667	326,327

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan.

Pada tabel 2.69 diatas dapat dilihat bahwa perkembangan ketersediaan pangan utama di Kabupaten Lampung Tengah dengan rata-rata perkapita tahun 2017 sebesar 378,873 kg/th dan terjadi penurunan mulai dari pada tahun 2019 hingga ke tahun 2020 dan mulai kembali meningkat pada tahun 2021.

Tabel 2.63
Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 – 2021

No	Kelompok Pangan	2017	2018	2019	2020	2021	PPH Nasional
1	Padi – padian	25,0	25,0	25,0	25,0	25	25
2	Umbi – umbian	2,5	2,5	2,5	2,5	1,7	2,5
3	Pangan Hewani	14,7	13,4	16,7	18,4	18,5	24
4	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	5,0	5,0	5	5

No	Kelompok Pangan	2017	2018	2019	2020	2021	PPH Nasional
5	Buah /Biji Berminyak	0	0	0	0	1	1
6	Kacang – kacang	2,8	9,8	3,8	3,3	5,9	10
7	Gula	2,5	2,3	2,4	2,1	2,2	2.5
8	Sayur dan Buah	30,0	28,7	29,7	26,3	28,3	30
9	Lain –lain	0,0	0,0	0,0	0,0		00
	SKOR POLA PANGAN HARAPAN	82,5	86,7	85,2	82,7	87,5	100

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan.

Dari tabel 2.71 perkembangan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2017-2021 dapat dilihat bahwa Pola Pangan Harapan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan, hal ini ada perubahan perilaku dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat dalam konsumsi pangan. Dari table tersebut dapat dilihat juga pada tahun 2020 Pola Pangan Harapan mencapai 82,7 dan pada tahun 2021 mencapai 87,5 terdapat beberapa komoditas pangan yang sudah memenuhi PPH Nasional seperti padi-padian, minyak/ lemak, dan buah/biji-bijian, sedangkan untuk kooditi yang lain belum mencapai PPH yang ditetapkan Nasional.

Hal yang perlu diupayakan adalah bagaimana ketersediaan bahan pangan yang belum memenuhi target PPH agar dapat meningkat dan seimbang terdistribusi.

Tabel 2.64
Ketersediaan Pangan di Kabupaten Lampung Tengah 2017 – 2021

No	Jenis	2017	2018	2019	2020	2021
1	Beras	471.735	378.873	561.679	454.897	414.162
2	Jagung	472.334	472.334	432.966	343.027	343.027
3	Ubi Jalar	3.574	3.574	1.903	3.509	3.509
4	Ubi Kayu	1.188.211	1.188.211	1.402.129	1.872.943	1.872.943
5	K. Tanah	890	890	696	474	474
6	K. Kedelai	38	38	10.408	1.858	-
7	Kacang Hijau	234	234	129	224	129

No	Jenis	2017	2018	2019	2020	2021
8	Sayuran	54,864	54,864	19.186	35.106	22.161
9	Buah-Buahan	103.969	103.969	689.584	92.297	689.584
10	Ikan	38.355	38.355	35.276	40.370	35.276
11	Daging	19.805	19.805	983.394	19.185	508.250
12	Telur	4.993	4.993	229.403	229.403	229.403
13	M. Goreng	58.288	58.288	64.626	64.626	84.626
14	Gula	13.820	13.820	288.453	288.453	288.453


Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan Lampung Tengah

Tabel 2.65
Kebutuhan Pangan di Lampung Tengah 2017-2021

No	Jenis	2017	2018	2019	2020	2021
1	Beras	144.568	144.568	168.563	167.321	166.153
2	Jagung	1.261	1.261	1.471	1.460	1.450
3	Ubi Jalar	2.435	2.435	2.839	2.818	2.798
4	Ubi Kayu	10.849	10.849	12.650	12.556	12.469
5	Kacang Tanah	13.776	13.776	16.062	15.944	15.832
6	Kacang Kedelai	22.064	22.064	25.726	25.536	25.358
7	Kacang Hijau	656	656	765	759	754
8	Sayur sayuran	65.081	65.081	75.883	75.324	74.798
9	Buah-buahan	34.401	34.401	40.111	39.815	39.537
10	Ikan	16.349	16.349	19.063	18.922	18.790
11	Daging	5.260	5.260	6.134	6.088	6.046
12	Telur	11.353	11.353	13.238	13.140	13.049
13	Minyak Goreng	13.120	13.120	15.297	15.184	15.078
14	Gula	12.687	12.867	15.003	14.892	14.788
15	Susu	1.198	1.198	1.397	1.387	1.377

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan Lampung Tengah

Dari tabel 2.72 dan 2.73 di atas tentang perkembangan ketersediaan pangan Tahun 2020 dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 terdapat beberapa komoditas kebutuhan pangan yang mengalami surplus diantaranya padi, jagung, ubi jalar, ubi kayu, buah-buahan, ikan, daging, telur, minyak goreng, dan gula, sedangkan beberapa komoditas kebutuhan pangan yang



mengalami kekurangan diantaranya kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan sayuran. Hal yang perlu diupayakan adalah bagaimana ketersediaan bahan pangan dapat seimbang terdistribusi, serta aman untuk kebutuhan pangan masyarakat. Namun demikian secara umum tahun 2017-2021 rata-rata ketersediaan pangan utama di Kabupaten Lampung Tengah cenderung fluktuatif. Sedangkan pada ketersediaan dan protein perkapita, dalam 4 tahun terakhir cenderung meningkat dengan tingkat penurunan 1,66 persen per tahun.

Pencapaian skor pola pangan harapan tahun 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan 1,14 persen per tahun. Selain itu aktifitas penanganan daerah rawan pangan juga terus ditingkatkan dengan peningkatan pertumbuhan sebesar 32,02 persen per tahun.



Tabel 2.66
Capaian Kinerja Urusan Pangan 2015-2021

60	URAIAN	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Ketersediaan pangan utama	kg/thn	378,873	408,201	368,166	315,667	326,327
	<i>Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)</i>	Ton	477.948	519.054	471.735	460.888	482.115
	<i>Jumlah penduduk</i>	Jiwa	1.261.498	1.271.566	1.281.310	1.460.045	1.477.395
2	Ketersediaan dan protein perkapita	Kkal	57,09	53,92	56,31	57,78	60,60
	<i>Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari): Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandungan Kalori X BDD</i>	Kalori	11441,62	13072,52	10989,41	12876,9	10.537
	<i>Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari): Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandungan Protein X BDD</i>	gr/kap/hr	200,41	242,43	195,15	222,87	173,86
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	83,33	83,33	90,91	97,78	85
	<i>Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu</i>	sampel	100	120	1000	1100	950
	<i>Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu</i>	sampel	120	144	1100	1125	1125
4	Pencapaian Skor Pola Pangan harapan	Skor	81,8	85,4	86,7	86,9	87,5
	<i>Penguatan Cadangan pangan</i>	Ton	30	30	31,4	31,4 Ton	
5	<i>Penanganan Daerah Rawan Pangan</i>	Persen	35	40	40	45	

2.1.3.2.4. Pertanahan

Saat ini tanah menjadi permasalahan yang terjadi didalam masyarakat karena setiap orang ingin berusaha untuk mempunyai dan menguasai tanah yang dapat mengakibatkan konflik yang berkepanjangan dalam kehidupan masyarakat. Tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Jika ingin memperoleh sertifikat tanah, memerlukan proses pelaksanaan pendaftaran tanah yang harus disesuaikan dengan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Persentase luas tanah yang bersertifikat tahun 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan 2,25 persen per tahun. Jumlah kasus sengketa tanah pada tahun 2021 mengalami penurunan, dan hanya tercatat sebanyak 2 kasus, dan berhasil tertangani kedua kasus tersebut atau penanganan kasus sengketa tanah mencapai 100%.

Tabel 2.67
Pencapaian Kinerja Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2017 - 2021

No	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	56,74	55,78	56,74	56,74	68
	<i>Jumlah Luas Lahan bersertifikat</i>	ha	271.778	271,778	271,778	271,778	325,710
	<i>Jumlah luas wilayah</i>	ha	478,982	478,982	478,982	478,982	478,982
2	Penyelesaian konflik tanah yang difasilitasi	100	66,67	100	66,67	66,67	100%
	<i>Jumlah kasus yang diselesaikan</i>	kasus	8	5	8	8	2
	<i>Jumlah kasus yang terdaftar</i>	kasus	12	5	12	12	2

No	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
3	Penyelesaian izin lokasi	%	100	100	100	100	100
	<i>Jumlah Ijin Lokasi</i>		6	10	14	14	3
	<i>Permohonan Ijin Lokasi</i>		6	10	14	14	3

Sumber data: Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah

2.1.3.2.5. Lingkungan Hidup

Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997 tentang PPLH, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan dengan kualitas baik akan sangat penting bagi terciptanya kehidupan manusia yang sehat, aman dan sejahtera. Kualitas tersebut dikatakan baik jika keadaan unsur hayati maupun unsur fisik yang ada mampu mendukung kehidupan berbagai spesies. Hal ini dapat dilihat dengan mengetahui daya dukung lingkungan bagi kehidupan. Namun, daya dukung lingkungan bukanlah tanpa batas. Ia memiliki keterbatasan, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas.

Semua indikator lingkungan hidup tahun 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung menurun dengan tingkat pertumbuhan masing-masing adalah indek kualitas air (16,91 persen), indek kualitas udara (0,89 persen), indeks Tutupan Lahan dan indek kualitas lingkungan hidup (5,99 persen).

Tabel 2.68
Pencapaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Indek Kualitas Air	IKA	46,67	51,70	71,62	73,58	56,67
2	Indek Kualitas Udara	IKU	74,9	81,24	86,35	84,35	83,46
3	Indek Kualitas Tutupan Lahan	IKTL	30,13	30,13	30,13	30,13	24,48
4	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH	48,52	51,93	59,40	59,43	53,44
4	Persentase perusahaan yang memiliki Dokumen Amdal / IPAL /UKP/UPL	%	100	100	100	100	100
5	Persentase Penanganan Sampah	%	11,11	13,79	20,6	24,91	14,79%

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Lampung Tengah

Dari tabel 2.75 terlihat bahwa IKLH Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2017 yaitu dari 48,52 meningkat menjadi 53,44. Peningkatan signifikan ini dari komponen indeks kualitas air (IKA) dari angka 46,67 pada tahun 2017 menjadi 56,67 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air di beberapa titik sampel yang dipantau mengalami peningkatan kualitas bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indek kualitas udara mengalami peningkatan dari 74,9 pada tahun 2017 menjadi 83,46 pada tahun 2021. Indeks kualitas tutupan hutan (IKTH) Kabupaten Lampung Tengah mengalami penurunan 30,13 pada tahun 2017 menjadi 24,48 pada tahun 2021.

Dari kinerja persentase perusahaan yang memiliki dokumen amdal/IPAL/UKP/UPL menunjukkan adanya kesadaran perusahaan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2016 sampai dengan

tahun 2020 persentase jumlah perusahaan yang telah memiliki Dokumen Amdal/IPAL/ UKP/UPL adalah 100% .

Tahun 2016 jumlah wajib perusahaan sebanyak 285 Perusahaan dengan perusahaan yang telah memiliki Dokumen Amdal/IPAL/UKP/UPL sebanyak 285 Perusahaan atau 100 persen. Tahun 2017 jumlah wajib perusahaan sebanyak 305 Perusahaan dengan perusahaan yang telah memiliki Dokumen Amdal/IPAL/UKP/UPL sebanyak 305 Perusahaan atau 100 persen. Tahun 2018 jumlah wajib perusahaan sebanyak 309 Perusahaan dengan perusahaan yang telah memiliki Dokumen Amdal/IPAL/UKP/UPL sebanyak 309 Perusahaan atau 100 persen. Tahun 2019 jumlah wajib perusahaan sebanyak 309 Perusahaan dengan perusahaan yang telah memiliki Dokumen Amdal/IPAL/ UKP/UPL sebanyak 309 Perusahaan atau 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran yang tinggi dari perusahaan untuk mematuhi ketentuan perundangan dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Penanganan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan hidup baru mencakup 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Gunung Sugih dan Terbanggi Besar, dan itupun masih belum seluruh kampung/kelurahan dapat terlayani. Gambaran pengelolaan sampah yang telah dilaksanakan dikabupaten Lampung Tengah menunjukkan terdapat peningkatan pengelolaan sampah dari 11,11 persen pada tahun 2017 menjadi 14,79 persen pada tahun 2021, dengan volume sampah yang cenderung terus meningkat dari 10.800 ton pada tahun 2016, 10.800 ton pada tahun 2016. 13.500 ton pada tahun 2017, 14.500 ton pada tahun 2018, 14.500 ton pada tahun 2019, 16060 ton pada tahun 2020, dan 25.550 ton pada tahun 2021. Persentase jumlah sampah yang ditangani tahun 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan 27,31 persen per tahun.

Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah pertama kali menyusun RPPLH dan Raperda tentang RPPLH tahun 2014. Raperda tersebut berhasil disahkan menjadi Perda RPPLH

tahun 2017. Namun pada saat bersamaan terbit Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan *SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016* tentang Pedoman Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya Perda tentang RPPLH Kabupaten Lamteng dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ternyata Perda tersebut tidak sesuai dengan *SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016*.

Pada tahun 2019 Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah menyusun kembali dokumen RPPLH, sudah diverifikasi oleh Pemerintah Provinsi dan mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tahun 2020 Raperda RPPLH tersebut sudah disahkan dan bernomor 6 tahun 2021.

2.1.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Persentase penduduk wajib KTP yang telah memiliki E-KTP di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan 1,82 persen per tahun. Persentase pertumbuhan penduduk yang telah memiliki akte kelahiran meningkat dengan tingkat pertumbuhan 3,62 persen per tahun. Jumlah kepala keluarga yang telah memiliki kartu keluarga meningkat dengan tingkat pertumbuhan 135,7 persen per tahun. Jumlah akte kematian yang diterbitkan meningkat dengan tingkat pertumbuhan 127,4 persen per tahun.

Tabel 2.69
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk	jiwa	1.261.498	1.271.566	1.281.310	1.460.045	1.477.395
2	Jumlah Penduduk Wajib KTP	orang	1.103.985	1.038.564	1.115.949	1.104.663	1.204.800
3	Jumlah Penduduk Wajib KTP yang telah melakukan perekaman E-KTP	orang	893.313	902.942	935.223	935.223	988.174
4	Jumlah Penduduk Wajib KTP yang telah memiliki E-KTP	orang	847.721	892.560	913.672	956.072	981.264
5	Jumlah Penduduk Yang memiliki Akte Kelahiran	orang	578.299	621.754	665.603	687.673	682.983
6	Jumlah Kepala Keluarga	KK	439.874	439.583	452.495	475.800	415.074
7	Jumlah Kepala Keluarga Yang Memiliki Kartu Keluarga	KK	53.322	89.034	104.823	395.021	415.074
8	Jumlah Akte Perkawinan yang diterbitkan	akte	6.011	6.520	7.659	8.724	755
9	Jumlah Akte Kematian yang diterbitkan	akte	493	790	1.307	1.992	3.633

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel 2.70
Pencapaian Kinerja Administrasi Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Lampung Tengah 2017- 2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio bayi berakte kelahiran	Persen	89	83	83	81	66
	<i>Jumlah bayi berakte kelahiran</i>		19.120	16.663	12.372	2.509	13.585
	<i>Jumlah bayi</i>		21.489	20.031	14.886	3.101	20.569
2	Rasio pasangan berakte nikah	Persen	14	15	17	20	100

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	<i>Jumlah pasangan nikah berakte nikah</i>		6.011	6.520	7.659	8.724	153.574
	<i>Jumlah keseluruhan pasangan nikah</i>		43.580	43.798	44.174	44.320	153.574
3	Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi		ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
	<i>Ada/tidak ada</i>						
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		SUDAH	SUDAH	SUDAH	SUDAH	SUDAH
	<i>Sudah/belum</i>						
5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	77	88	90	86	95,75
	<i>Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan</i>		847.721	892.686	912.296	950.531	981.264
	<i>Jumlah penduduk wajib KTP</i>		1.103.985	1.010.650	1.015.138	1.098.935	1.024.800
6	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	89	83	83	81	66
	<i>jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan</i>		19.120	16.663	12.372	2.509	13.585
	<i>Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan</i>		21.489	20.031	14.886	3.101	20.569

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2.1.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kampung)

Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian penting dari perwujudan pembangunan otonomi daerah dalam rangka pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengalokasikan dana desa guna meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Secara umum keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa dapat dilihat dari Indek Desa Membangun (IDM). IDM merupakan

komposit dari ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang dikembangkan dalam 22 variabel dan 52 indikator, yaitu:

- Ketahanan Sosial: Kesehatan, Pendidikan, Modal Sosial, serta Permukiman.
- Ketahanan ekonomi: keberagaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi, serta keterbukaan wilayah.
- Ekologi: kualitas lingkungan dan potensi/rawan bencana alam.

Indeks Desa Membangun (IDM) mengklasifikasi Desa dalam lima status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 memiliki jumlah desa sangat tertinggal sebanyak **0** Desa, Desa tertinggal sebanyak **3**, Desa Berkembang **174**, Desa Maju sebanyak **121** Dan Desa Mandiri sebanyak 3. Kondisi tersebut lebih baik dibanding Tahun 2017 yang memiliki desa sangat tertinggal sebanyak **1** Desa, Desa tertinggal sebanyak **100**, Desa Berkembang **177**, Desa Maju sebanyak **23** Dan Desa Mandiri sebanyak **0**.

Indikator pemberdayaan masyarakat lainnya pada tahun 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan masing-masing adalah untuk pertumbuhan jumlah kantor pemerintahan desa yang baik (6,64 persen), pertumbuhan jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (6,49 persen), pertumbuhan kelompok binaan PKK (6,49 persen), pertumbuhan LSM aktif (22,79 persen), pertumbuhan jumlah LPM berprestasi (5,70 persen), pertumbuhan jumlah PKK aktif (6,42 persen), pertumbuhan jumlah Posyandu aktif (4,34 persen), dan pertumbuhan jumlah swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat (4,74 persen).

Tabel 2.71
Klasifikasi Indek Desa Membangun Tahun 2017- 2021 di Kabupaten Lampung Tengah

x No.	Kecamatan	2017					2019					2020					2021				
		DS T	DT	DB	D M	D Md	DS T	D T	DB	D M	D Md	DS T	DT	DB	D Mj	D Md	DS T	DT	DB	D Mj	D Md
1	Padang Ratu	-	4	8	3	-	-	-	11	4	-	-	-	11	4	-	-	-	10	5	-
2	Anak Ratu Aji	-	4	2	-	-	-	1	5	-	-	-	1	5	-	-	-	-	6	-	-
3	Selagai Lingga	-	3	11	-	-	-	-	12	2	-	-	-	12	2	-	-	-	11	3	-
4	Pubian	-	10	9	1	-	-	4	15	1	-	-	4	15	1	--	-	2	17	1	-
5	Anak Tuha	-	9	3	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	7	5	--
6	Kalirejo	-	3	11	3	-	-	-	7	1	-	-	-	7	10	-	-	--	6	10	1
7	Sendang	-	3	5	1	-	-	-	8	1	-	-	-	8	1	-				10	
8	Bangun Rejo	-	-	16	1	-	-	-	14	3	-	-		14	3	-			12	5	
9	Gunung Sugih	-	7	4	-	-	-	-	10	1	-	-	-	10	1	-			9	2	
10	Bekri	-	5	3	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8	-	-			7	1	
11	BumiRatu	-	4	5	1	-	-	-	1	9	-	-	-	1	9	-			-	10	
12	Trimurjo	-	4	7	-	-	-	-	6	5	-	-	-	6	5	-			1	10	
13	Punggur	-	-	7	2	-	-	-	2	7	-	-	-	2	7	-			2	7	
14	Kota Gajah	-	-	5	2	-	-	-	4	3	-	-	-	4	3	-			2	4	1
15	Seputih Raman	-	4	8	2	-	-	-	9	5	-	-	-	9	5	-			7	7	
16	Terbanggi	-	2	5	-	-	-	-	3	4	-	-	-	3	4	-			4	3	
17	Seputih Agung	-	3	5	1	-	-	-	7	3	-	-	-	7	3	-				10	

x No.	Kecamatan	2017					2019					2020					2021				
		DS T	DT	DB	D M	D Md	DS T	D T	DB	D M	D Md	DS T	DT	DB	D Mj	D Md	DS T	DT	DB	D Mj	D Md
18	Way Pengubuan	-	4	4	-	-	-	1	5	2	-	-	1	5	2	-			6	2	
19	Terusan Nunyai	-	5	2	-	-	-	3	1	3	-	-	3	1	3	-			3	3	1
20	Seputih Mataram	-	4	8	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-			10	2	
21	Bandar Mataram	-	-	8	1	-	-	-	4	5	-	-	-	4	5	-			7	2	
22	Seputih Banyak	-	-	12	1	-	-	-	12	1	-	-	-	12	1	-			12	1	
23	Way Seputih	-	3	3	-	-	-	-	5	1	-	-	-	5	1	-			5	1	
24	Rumbia	-	5	4	-	-	-	-	7	2	-	-	-	7	2	-			2	7	
25	Bumi Nabung	-	2	4	1	-	-	-	2	5	-	-	-	2	5	-			1	6	
26	Putra Rumbia	1	5	3	1	-	-	-	9	1	-	-	-	9	1	-			7	3	
27	Seputih Surabaya	-	6	6	1	-	-	2	9	2	-	-	2	9	2	-		1	9	3	
28	Bandar	-	4	4	2	-	-	-	7	3	-	-	-	7	3	-			7	3	
	Jumlah	1	10	177	2	0	0	11	207	8	0	0	11	207	83	0	0	3	174	121	3

DST : Desa Sangat Tertinggal; DT : Desa Tertinggal; DB : Desa Berkembang; DMj : Desa Maju; D Mdr : Desa Mandiri

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Lampung Tengah

Tabel 2.72
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Kampung Tahu 2017-2021

No	URAIAN	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	63%	67%	72%	80%	100%
	<i>Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik</i>		189	203	216	240	301
	<i>Jumlah seluruh pemerintahan desa</i>		301	301	301	301	301
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Persen	0,75	0,80	0,85	0,95	100%
	<i>Jumlah kelompok binaan LPM</i>		225	242	257	287	301
	<i>Jumlah LPM</i>		301	301	301	301	301
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Persen	0,75	0,80	0,85	0,95	100%
	<i>Jumlah kelompok binaan PKK</i>		225	242	257	287	301
	<i>Jumlah PKK</i>		301	301	301	301	301
4	Persentase LSM aktif	Persen	33%	42%	49%	73%	100%
	<i>Jumlah LSM aktif</i>		65	83	97	143	301
	<i>Jumlah LPM</i>		197	197	197	197	301
5	Persentase LPM Berprestasi	Persen	80%	83%	88%	95%	100%
	<i>Jumlah LPM berprestasi</i>		240	250	265	287	301
	<i>Jumlah LPM</i>		301	301	301	301	301
6	Persentase PKK aktif	Persen	75%	80%	86%	89%	100%
	<i>Jumlah PKK aktif</i>		225	240	260	268	301
	<i>Jumlah PKK</i>		301	301	301	301	301
7	Persentase Posyandu aktif	Persen	79%	79%	94%	95%	100%
	<i>Jumlah Posyandu aktif</i>		1117	1120	1359	1382	1448
	<i>Total Posyandu</i>		1407	1425	1448	1448	1448
8	Swadaya masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	72%	74%	77%	79%	100%
	<i>Jumlah Swadaya masyarakat mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat</i>		217	223	233	238	301

No	URAIAN	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	<i>Total Program Pemberdayaan Masyarakat</i>		301	301	301	301	301
9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Persen	33%	40%	53%	53%	100%
	<i>program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat</i>		5	6	8	8	3
	<i>Total pasca program pemberdayaan masyarakat</i>		15	15	15	15	3

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Lampung Tengah

2.1.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kondisi kependudukan menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kemajuan pembangunan suatu negara adalah kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk produktif yang melimpah dan berkualitas jika dimanfaatkan dengan optimal akan mampu mendukung pembangunan suatu negara.

Indikator utama dalam pengendalian penduduk adalah laju pertumbuhan penduduk. Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan bila dibanding 3 tahun sebelumnya. Hal tersebut didasarkan dari hasil Sensus Penduduk 2020 yang menggunakan perpaduan metode antara pencatatan penduduk pada administrasi kependudukan Kementerian Dalam Negeri dan metode cacah penduduk BPS RI. Laju Pertumbuhan penduduk pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 1,18% atau melambat 0,17% dari tahun 2020

Tabel 2.73
Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2017- 2021

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk
1	2017	1.261.498	0,88
2	2018	1.271.566	0,80
3	2019	1.281.310	0,77
4	2020	1.460.045	1,39
5	2021	1.477.395	1,18%

Sumber data: BPS Kab. Lampung Tengah

Penurunan laju pertumbuhan penduduk Salah satu strategi dalam penurunan atau pengendalian kelahiran penduduk adalah melalui program keluarga berencana (KB) dengan pemakaian alat kontrasepsi, terutama bagi Pasangan Usia Subur (PUS). Jumlah pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021 terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 2,39 persen per tahun. Pada akhir tahun 2020 sebanyak 71,51 persen PUS telah menjadi peserta KB aktif.

Tabel 2.74
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Aktif
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 - 2021

No	Tahun	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Jumlah PUS peserta KB Aktif	Persentase PUS Peserta KB Aktif
1	2017	305296	223265	73,1
2	2018	310322	234443	75,5
3	2019	345802	246345	71,2
4	2020	345.978	247412	71,51
5	2021	330.837	250.015	75,57

Sumber data: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Tabel 2.75
Pencapaian Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	0,88	0,80	0,73	1,39	1,18
2	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,32	2,3	2,56	2,56	2,56
3	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	Persen	28	28	28	28	14
	<i>Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB</i>	Dinas/Badan	10	10	10	10	5
	<i>Jumlah semua perangkat daerah</i>	Dinas/Badan	36	36	36	36	36
4	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk		28	28	28	28	14
	<i>Jumlah perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk</i>	Dinas/Badan	10	10	10	10	5
	<i>Jumlah semua perangkat daerah</i>	Dinas/Badan	36	36	36	36	36
5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk		5	5	5	5	5
	<i>Jumlah Perda atau Perkada tentang Pengendalian Penduduk</i>		5	5	5	5	5
6	Jumlah sector yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Dinas/Badan	0	0	10	0	10
7	Jumlah kerja sama penyelenggara Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal yang melakukan pendidikan kependudukan	sekolah	0	N/A	1	0	5
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga		0,87	0,89	0,83	0,83	0,78

No	Uraian	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	<i>Jumlah anak</i>		381.750	392.400	376.320	37.6320	366.883
	<i>Jumlah keluarga</i>		439.874	439.583	452.495	452.495	466.732
9	Ratio Akseptor KB	Persen	73,13	75,55	71,24	71,51	67,95
	<i>Jumlah Akseptor KB</i>	orang	223.265	234.443	246.345	247.370	176.379
	<i>Jumlah pasangan usia subur</i>	orang	305.296	310.322	345.802	345.937	259.564
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi wanita nikah usia 15 – 49	Persen	73,13	75,55	71,24	71,51	67,95
	<i>Jumlah peserta KB aktif</i>	orang	223.265	234.443	246.345	247.370	176.379
	<i>Jumlah pasangan usia subur</i>	orang	305.296	310.322	345.802	345.937	259.564
11	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)	persen	26,87	24,45	28,76	28,49	17,86
	<i>Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani</i>	orang	82031	75879	99457	98567	46352
	<i>Jumlah pasangan usia subur</i>	orang	305296	310322	345802	345937	259564
12	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persen	44,16	45,25	43,88	43,67	35,64
	<i>Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP</i>	orang	98587	106075	108099	108018	62868
	<i>Jumlah akseptor KB</i>	orang	223265	234443	246345	247370	176379
13	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	persen	8,79	8,74	24,79	24,22	47,16
	<i>Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi</i>	orang	19626	20492	61071	59921	83185
	<i>Jumlah akseptor KB</i>	orang	223265	234443	246345	247370	176379
14	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	persen	51,93	54,83	98,45	n.a	59,42
	<i>Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB</i>	orang	16762	16954	32164	n.a	16378
	<i>Jumlah anggota kelompok BKB</i>	orang	32281	30921	32671	n.a	27564
15	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB	persen	48,68	45,78	98,34	98,04	56,66
	<i>Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB</i>	orang	10051	9606	20974	20911	10.575
	<i>Jumlah anggota kelompok BKR</i>	orang	20647	20981	21327	21327	18.664

No	Uraian	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB	persen	32,58	37,64	97,40	105,41	53,36
	<i>Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB</i>	orang	2839	3510	9080	9826	5.793
	<i>Jumlah anggota BKL</i>	orang	8714	9325	9322	9322	10.856
	<i>Jumlah PKB/PLKB</i>	orang	78	72	72	n.a	
17	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	persen	214,29	214,29	235,71	235,71	235,71
	<i>Jumlah PIK R/M</i>	kelompok	60	60	66	66	66
	<i>Jumlah kecamatan</i>	kelompok	28	28	28	28	28
18	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	persen	100	100	100	100	88,24
	<i>Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan</i>	orang	78	72	72	72	60
	<i>Jumlah PKB/PLKB</i>	orang	78	72	72	72	68
19	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB Mandiri	persen	100	100	100	100	82,39
	<i>Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri</i>	orang	2670	2670	2670	2670	8095
	<i>Jumlah anggota kelompok UPPKS</i>	orang	2670	2670	2670	2670	9825
20	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPPKBD) setiap desa/kelurahan	persen	100	100	100	100	100
	<i>Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa</i>	orang	311	311	311	311	311
	<i>Jumlah desa/kelurahan</i>	desa	311	311	311	311	311
21	Cakupan ketersediaan dan distribusi obat dan alat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	persen	91,76	100,00	87,64	91,14	95,62
	<i>Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota</i>		35620	35820	33500	47600	346535

No	Uraian	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	<i>Perkiraan Permintaan Masyarakat</i>		38820	35820	38225	52225	362420
22	Cakupan faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	100	100	100	100	100
	<i>Jumlah Faskes dan jejaring bekerjasama dengan BPJS</i>		122	125	126	128	164
	<i>Jumlah Faskes dan jejaring</i>		122	125	126	128	164
23	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa	Persen	42,86	66,67	100	100	100
	<i>Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia</i>		30	40	60	60	60
	<i>Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga</i>		70	60	60	60	60
24	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	85,11	86,53	86,44	92,21	85,22
	<i>Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi</i>		9600	9700	10200	11065	1885
	<i>Jumlah kelompok kegiatan</i>		11280	11210	11800	12000	2212
25	Cakupan keluarga yang mempunyai Balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen	100	100	100	100	100
	<i>Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak yang memahami & melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang</i>		30493	30000	30171	30111	27564
	<i>Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak</i>		30493	30000	30171	30111	27564
26	Persentase Pembiayaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD	Persen	N/A	100	100	100	100
	<i>Jumlah anggaran untuk urusan PPKB</i>	Juta Rupiah	N/A	3.451	4.372	2.213	6.624
	<i>Jumlah APBD</i>	Juta Rupiah	N/A	3.451	4.372	2.213	6.624

Sumber data: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

2.1.3.2.9. Perhubungan

Bidang perhubungan memegang peranan yang cukup penting dalam upaya menjaga keselamatan pengguna jalan serta konektivitas antar daerah. Dalam upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan telah dilakukan berbagai upaya sesuai dengan kewenangan daerah diantaranya pengujian KIR kendaraan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas.

Rata-rata pertumbuhan jumlah kendaraan roda empat yang melakukan uji KIR di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017 – 2021 mengalami fluktuasi. sempat terjadi penurunan di tahun 2020, Kembali meningkat pada tahun 2021. Penurunan ini terjadi karena banyaknya kendaraan yang tidak melakukan uji KIR pada masa pandemi Covid 19 pada tahun 2020. Dimana penurunannya mencapai 46,29 persen. Jenis kendaraan yang paling banyak melakukan uji KIR berturut-turut adalah truk, pick up, mikrolet, dan mobil tangki. Seiring mulai meredanya pandemic Covid 19 dan pemberlakuan hidup normal baru, pengurusan KIR mengalami peningkatan di tahun 2021 yaitu 8.407 kendaraan, meningkat 2,5% dari tahun 2020.

Tabel 2.76
Jumlah Kendaraan Roda Empat Yang Melakukan Uji KIR
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 – 2021

No	Jenis Kendaraan	2017	2018	2019	2020	2021
1	UMUM					
1.1	Truck	3264	3833	2572	1971	3007
1.2	Pick UP	147	215	185	23	2
1.3	Bus	41	339	542	65	9
1.4	Mikrolet	210	122	112	9	123
1.5	Mobil Penumpang	2	4	44	1	7
2	TDK UMUM					
2.1	Truck	2721	3450	5106	2468	1366
2.2	Pick UP	4353	5092	6615	3390	2644
2.3	Tangki	90	118	380	195	25
2.4	Bus	67	52	61	50	52
2.5	Kereta tempelan	67	62	6	25	23
	JUMLAH	10.962	13.287	15.263	8.197	8.407

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah

Sampai dengan tahun 2021 jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 1.466 unit atau meningkat sebesar 11,8 persen dibanding tahun 2017 yang berjumlah 1.212 unit. Pertumbuhan rata-rata jumlah rambu-rambu yang terpasang tahun 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah adalah 2,3 persen per tahun. Pada akhir tahun 2021 pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah telah berhasil menyediakan 58,05 persen kebutuhan rambu-rambu lalu lintas.

Tabel 2.77

Perkembangan Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Rambu-Rambu yang harus tersedia	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525
2.	Jumlah Rambu-Rambu yang terpasang	1.311	1.311	1.451	1.451	1.466
	Persentase	51,92	51,92	57,46	57,46	58,05

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah

Pencapaian indikator jumlah izin trayek dapat dilihat dari perkembangan jumlah armada yang memiliki izin trayek. Sampai dengan tahun 2021 jumlah armada yang melakukan perpanjangan izin trayek di Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 40 buah. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 2 trayek/jurusan atau mengalami penurunan sebesar 5 persen dibanding Tahun 2020 yang berjumlah 42 buah. Penurunan tersebut disebabkan oleh terjadinya Pandemi COVID-19, yang mengakibatkan berkurangnya pergerakan masyarakat terutama anak sekolah yang merupakan konsumen utama kendaraan angkutan umum.

Tabel 2.78

**Capaian Kinerja Dibidang Perhubungan
Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 – 2021**

No	Indikator Kinerja Program	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	2.018.764	2.120.000	2.131.120	1.287.564	1.369.811
	<i>Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun</i>	2.018.764	2.120.000	2.131.120	1.287.564	1.369.811
	<i>Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah</i>	2.018.764	2.120.000	2.131.120	1.287.564	1.369.811
2	Rasio izin trayek	0,000022	0,000019	0,000020	0,0000046	0,000029
	<i>Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan</i>	41	41	46	6	40
	<i>Jumlah penduduk</i>	1.881.011	2.189.800	2.315.210	1.290.407	1.391.683
3	Jumlah uji kir angkutan umum	10.962	13.287	13.287	7627	8.407
4	Jumlah Terminal Bis	2	2	2	2	3
	<i>Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis</i>	3	3	3	4	4
5	Persentase layanan angkutan darat	65,79	65,79	65,79	65,79	65,79
	<i>Jumlah angkutan darat</i>	343517	381686	424095	471217	518339
	<i>Jumlah penumpang angkutan darat</i>	522.146	580.162	644.625	716.250	787.875
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	23,38	23,60	42,53	62,01	56,08
	<i>Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada Tahun n</i>	65	63	94	111	83
	<i>Jumlah angkutan umum pada Tahun n</i>	278	267	221	179	148
7	Pemasangan Rambu-Rambu	23,17	18,66	16,47	18,41	6%
	<i>Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n</i>	196	150	140	130	36

No	Indikator Kinerja Program	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
	<i>Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia</i>	846	804	850	706	576
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,34%	0,34%	0,31%	0,28%	0,26%
	<i>Panjang Jalan</i>	1196,82	1343,326	1343,326	1343,326	1343,326
	<i>Jumlah Kendaraan</i>	343.517	381.686	424.095	471.217	518339
9	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	98.402	97.217	87.213	41.107	74.131
10	Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun	98.402	97.217	87.213	41.107	74.131

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah

2.1.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Pengembangan teknologi menjadi instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu pelayanan perijinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan. Pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh Pemerintah. Masyarakat, sektor swasta dan pemerintah mengharapkan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (telematika) di Indonesia menjadi lebih terarah dan terintegrasi serta tidak tumpang tindih pengembangannya mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Pengembangan *e-Government* merupakan

upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik.

Pada tahun 2021 cakupan layanan telekomunikasi sudah mencapai 87,66 persen, meningkat 12,71% dari tahun 2017. Peningkatan cakupan layanan telekomunikasi seiring dengan pertumbuhan BTS operator telephone selular. Penduduk yang menggunakan HP/telepon mencapai 88,8 persen di tahun 2021, meningkat 32,49% dari tahun 2017. Peningkatan penduduk yang menggunakan HP/telepon seiring dengan perluasan wilayah cakupan layanan telekomunikasi yang terus bertambah, sehingga memungkinkan penduduk untuk menikmati layanan telekomunikasi. Rumah tangga dengan akses internet mencapai 59,7 persen, meningkat 38,36% bila dibandingkan tahun 2017, dan rumah tangga yang memiliki computer pribadi mencapai 88,8 persen, meningkat 17,55% dari tahun 2017. Peningkatan kedua indikator tersebut didorong dari adanya pandemic Covid 19, dimana banyak penduduk yang harus memanfaatkan internet dan memiliki perangkat yang terkait dengan internet, dalam mendukung tugas pekerjaan atau tugas sekolah yang dilaksanakan melalui metode *online* atau Dalam Jaringan (Daring).

Tabel 2.79
Pencapaian Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika
Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		belum ada KIM	17,9%	71,4%	100,0%	100,0%
	<i>Jumlah KIM</i>	kelompok	belum ada KIM	5	20	28	28
	<i>Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota</i>	28	28	28	28	28	28
2	Cakupan layanan telekomunikasi	km ²	74,95%	78,70%	82,63%	83,6%	87,66%
	<i>Luas Wilayah Yang Tercoverage</i>		3589,88	3769,38	3957,85	3967,85	3985,00

No.	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
	<i>Luas Wilayah Keseluruhan</i>		4789,82	4789,82	4789,82	4789,82	4545,55
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	orang	56,31%	56,72%	61,12%	83,05%	88,8%
	<i>Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon</i>		710.350	721.232	783.137	1.212.566	1.311.927
	<i>Jumlah penduduk</i>		1.261.498	1.271.566	1.281.310	1.460.043	1477.395
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	rumah tangga	21,34%	29,72%	36,16%	48,08%	59,7%
	<i>Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet</i>		73.578	105.442	130.909	182.765	232.903
	<i>Jumlah rumah tangga</i>		344.787	354.786	362.026	380.127	390.122
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki computer pribadi	rumah tangga	71,25%	75,92%	80,9%	83,05%	88,8%
	<i>Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi</i>		245.661	269.354	292.879	315.695	346.428
	<i>Jumlah rumah tangga</i>		344.787	354.786	362.026	380.127	390.122

Sumber data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah

2.1.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sampai dengan tahun 2021 jumlah koperasi di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 675 unit. Dari Jumlah tersebut yang aktif sebesar 61,78 % atau sekitar 417 unit koperasi. Jumlah koperasi aktif tahun 2017-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan 3,37 persen per tahun. Namun seiring dengan Pandemi Covid 19 yang masih berlangsung pada tahun 2021, jumlah koperasi maupun koperasi yang masih aktif mengalami penurunan sebesar 0,42%, atau hanya 417 koperasi yang masih aktif dari 675 koperasi.

Persentase usaha mikro kecil pada tahun 2021 mencapai 100 persen dari total unit usaha. Pertumbuhan jumlah usaha mikro dan kecil dari tahun 2017-2021 sebesar 3,34% persen. Peran penting usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia telah terbukti dengan kinerjanya dalam hal besarnya penyerapan tenaga kerja, kontribusinya terhadap pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB),

kontribusinya terhadap ekspor, sebagai sumber peningkatan pendapatan per- kapita, dan jumlah unit usaha yang banyak sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan output produksi. UMKM juga berperan sebagai tempat usaha terakhir (“*last resort*”) bagi sebagian masyarakat Indonesia. Sebagai bagian dari *last resort* masyarakat, maka UMKM menawarkan keunggulan yang mudah dimasuki dan sekaligus mudah untuk ditinggalkan (*free entry and exit*), tidak memerlukan persyaratan keterampilan tertentu, dapat mencakup diberbagai bidang usaha, memiliki ceruk pasar sendiri, dan tidak memerlukan modal besar untuk menjalankan usaha. UMKM juga merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat untuk bertahan hidup.

Tabel 2.80
Pencapaian Kinerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2017-2021

No.	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Koperasi aktif		81,35	85,23	60,85	62,20	61,78
	<i>Jumlah koperasi aktif</i>	koperasi	397	381	401	446	417
	<i>Jumlah seluruh koperasi</i>	koperasi	488	447	659	717	675
2	Persentase UKM non BPR / LKM aktif	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100
	<i>Jumlah UKM non BPR/LKM aktif</i>	unit	6.379	6.602	6.777	60.972	38.044
	<i>Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM</i>	unit	6.379	6.602	6.777	60.972	38.044
3	Persentase BPR / LKM aktif	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Jumlah BPR/LKM aktif</i>	unit	40	45	75	86	86
	<i>Jumlah seluruh BPR/LKM</i>	unit	40	45	75	86	86
4	Persentase Usaha Mikro Kecil	persen	96,66	96,67	96,65	99,61	100
	<i>Jumlah usaha mikro dan kecil</i>	unit	6.166	6.382	6.550	60.732	38.044
	<i>Jumlah seluruh UKM</i>	unit	6.379	6.602	6.777	60.972	38.044

Sumber data: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah

3.1.3.2.12. Penanaman Modal

Secara umum keberhasilan di bidang penanaman modal dapat dilihat dari jumlah nilai investasi dan jumlah PMA/ PMDN yang menanamkan investasinya di Kabupaten Lampung Tengah.

Dari data perizinan yang tercatat pada aplikasi OSS penanaman modal yang masuk ke Kabupaten Lampung Tengah, jumlah perusahaan yang berinvestasi menunjukkan peningkatan dari 64 perusahaan (PMA/ PMDN) pada tahun 2017 menjadi 210 perusahaan pada tahun 2021, dengan jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 36.371 orang.

Pada Tahun 2021 jumlah investasi penanaman modal yang berkembang di Kabupaten Lampung Tengah mencapai Rp 14.204.492.171.158 atau mengalami peningkatan sebesar 55% persen dibandingkan dengan Tahun 2017 yang sebesar Rp 9.163.728.080.000,-. Daya serap tenaga kerja PMA/ PMDN pada tahun 2021 rata-rata mencapai 36.221 tenaga kerja, kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar 36.063 tenaga kerja.

Rata-rata pertumbuh jumlah *investor* berskala nasional (PMDN/PMA) tahun 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 45,6 persen per tahun. Sedangkan rata-rata pertumbuhan nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) adalah 12,9 persen per tahun.

Penambahan 146 perusahaan yang berinvestasi di Lampung Tengah menunjukkan bahwa iklim usaha di Kabupaten Lampung Tengah masih menjadi daya Tarik investor untuk mendirikan usahanya di Lampung Tengah. Selain berkat jumlah penduduk yang besar yang dapat menyediakan tenaga kerja dalam jumlah banyak, iklim investasi juga berkat proses pengurusan perizinan berusaha yang relative cepat, yang hanya membutuhkan waktu 3 hari pelayanan, dan sudah menggunakan sistem layanan berbasis internet.

Tabel 2.81
Persentase Peningkatan Nilai Investasi Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase peningkatan nilai investasi	26%	17%	16%	9%	5%

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lampung Tengah

Tabel 2.82
Perkembangan Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Nilai Investasi dan Waktu Perizinan Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
I.	Jumlah Perusahaan	64	121	144	195	210
	1. PMA	28	31	32	32	32
	2. PMDN	47	90	112	163	178
II.	Jumlah Tenaga Kerja	36.063	35.981	36.186	36.221	36.371
	1. Indonesia	35.971	35.891	36.091	36.120	36.270
	2. Asing	92	90	95	101	101
III.	Nilai Investasi (Rp Juta)	9.163.728	10.756.024	12.493.155	13.580.010	14.204.492
	1. PMA	3.114.176	3.159.088	3.162.088	3.162.088	3.162.088
	2. PMDN	6.049.551	7.596.936	9.331.066	10.417.922	11.042.403
IV	Waktu Penyelesaian Perizinan (hari)	7 hari	7 hari	3 hari	3 hari	3 hari

Tabel 2.83
Pencapaian Kinerja Bidang Penanaman Modal Tahun 2017 – 2021

No	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	%	481	297	251	208	173
	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan		36.063	35.981	36.186	36.271	36.371
	PMA/PMDN jumlah seluruh PMA/PMDN		75	121	144	174	210
2	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (ribu rupiah)	%	26%	23%	12%	6%	26%

Sumber data: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.1.3.2.12. Pemuda dan Olah Raga

Pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Peran pemuda dalam pembangunan diharapkan akan selalu meningkat untuk terwujudnya masyarakat yang lebih baik. Keberadaan organisasi pemuda di Kabupaten Lampung Tengah dapat membantu proses pembangunan wilayah terutama di dalam menggerakkan peran pemuda secara lebih aktif. Sampai tahun 2017 di Kabupaten Lampung Tengah terdapat 5% organisasi pemuda yang aktif meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 0,9%. Keberadaan wirausaha muda juga sangat berperan di dalam proses pembangunan, tercatat 1.116 orang di tahun 2021. Selain mendorong peran aktif organisasi kepemudaan, pembinaan terhadap olah raga perlu terus dilaksanakan sehingga meningkatkan motivasi menuju prestasi. Pada tahun 2017 sampai dengan 2021 cakupan pembinaan olahraga mengalami flukttuatif. Penurunan pembinaan olahraga pada tahun 2020 seiring dengan adanya refocusing anggaran akibat mulai mewabahnya Covid 19, pun demikian cakupan pelatih yang berprestasi yang fluktuatif, dan ditahun 2021 mencapai sebesar 30%. Adapun untuk cakupan pembinaan atlet muda adalah 40%. Peningkatan prestasi ini diharapkan dapat mendorong kemajuan khususnya pembangunan pemuda secara lebih luas

Tabel 2.84
Pencapaian Kinerja Bidang Pemuda dan Olahraga
Tahun 2017 – 2021

No	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	Persen	10%	8,5%	7%	4,5%	5%
2	Cakupan pembinaan olahraga (%)	Persen	80%	86%	90%	50%	80%
3	Cakupan pelatih yang bersertifikasi (%)	Persen	25%	35%	40%	25%	30%
4	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	Persen	30%	45%	50%	30%	40%
5	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	9	18	17	3	3
6	Jumlah prestasi olahraga	buah	6	5	5	3	1

Sumber data: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Tengah

2.1.3.2.13. Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis, serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang statistik daerah, antara lain perumusan kebijakan teknis perencanaan; pengkoordinasian penyusunan statistik daerah; dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang statistik daerah. Penyediaan sistem data dan statistik daerah yang terintegrasi dilakukan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

Sampai dengan tahun 2021, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah telah berhasil menyediakan informasi statistika dalam bentuk Buku "Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka", Buku "PDRB", dan Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi.

Tabel 2.85
Pencapaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Buku "Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka"	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada
2	Buku "PDRB"	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada
3	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber data: Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Tengah

2.1.3.2.14. Persandian

Definisi persandian menurut Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 bahwa persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. Urusan Persandian saat ini dalam pengamanannya terhadap informasi publik, tidak berfokus pada informasi rahasia, Layanan yang diberikan persandian tidak hanya pada kerahasiaan, namun juga keutuhan, keotentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan penyangkalan atas informasi dan yang terpenting adalah pelaksanaan keamanan informasi secara menyeluruh.

Pelaksanaan bidang urusan persandian belum dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang mampu dan memahami system pengelolaan persandian.

Hingga tahun 2021, persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah sudah mencapai 100 persen. Rata-rata pertumbuhan jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah tahun 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 6,7 persen per tahun.

Tabel 2.86
Pencapaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2017 – 2021

URAIAN	Satuan	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	65,22%	79,73%	85,14%	100%	100%
<i>Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah</i>	OPD	30	59	63	74	74
<i>jumlah total perangkat daerah</i>	46	46	74	74	74	

2.1.3.2.15. Kebudayaan

Dalam masyarakat, pengertian kebudayaan sering diartikan sebagai *the general body of the art* yang meliputi seni musik, seni sastra, seni rupa, seni pahat, seni penge-tahuan, atau bagian-bagian indah yang terdapat dalam diri manusia.

Dalam rangka upaya mendorong peningkatan pengem-bangan kebudayaaan telah dilakukan melalui berbagai upaya diantaranya dengan melestarikan situs budaya, serta melaku-kan pembinaan dan pengembangan sanggar seni yang ada di Lampung Tengah.

Hingga tahun 2021, jumlah situs budaya di Kabupaten Lampung Tengah cenderung stagnan yaitu sebanyak 22 unit. Hal tersebut dikarenakan belum ada usulan penetapan situs budaya baru yang ada dilingkungan masyarakat dan untuk menetapkan Cagar Budaya lebih lanjut diperlukan keberadaan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dan Kabupaten Lampung Tengah tengah mempersiapkan keberadaan tim tersebut.

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan mencapai 100 persen. Rata-rata jumlah sanggar seni budaya tahun 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 3,53 persen per tahun.

Tabel 2.87
Jumlah Sanggar Seni Budaya & Situs Budaya 2017 – 2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Situs Budaya	Unit	18	20	22	22	22
2	Jumlah Sanggar Seni Budaya	Unit	779	789	792	815	815

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 2.88
Capaian Kinerja Urusan Bidang Kebudayaan Tahun 2017 – 2021

No	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	1	1	5	5	5
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
	<i>Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan</i>		16	16	18	18	18
	<i>Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah</i>		16	16	18	18	18
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	0	1	1	1	1

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.1.3.2.16. Perpustakaan

Menurut Undang Undang Perpustakaan dinyatakan bahwa Perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan Tujuan perpustakaan adalah untuk membantu masyarakat dalam segala umur dengan memberikan kesempatan dengan dorongan melalui jasa pelayanan perpustakaan agar mereka:

- a. Dapat mendidik dirinya sendiri secara berkesimbangan;
- b. Dapat tanggap dalam kemajuan pada berbagai lapang-an ilmu pengetahuan, kehidupan sosial dan politik;

- c. Dapat memelihara kemerdekaan berfikir yang konstruktif untuk menjadi anggota keluarga dan masyarakat yang lebih baik;
- d. Dapat mengembangkan kemampuan berfikir kreatif, membina rohani dan menggunakan kemampuannya untuk menghargai hasil seni dan budaya manusia
- e. Dapat meningkatkan tarap kehidupan sehari-hari dan lapangan pekerjaannya;
- f. Dapat menjadi WN yang baik dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional dan dalam membina saling pengertian antar bangsa;
- g. Dapat menggunakan waktu senggang dengan baik yang bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan sosial.

Tabel 2.89
Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Perpustakaan
Tahun 2017 – 2021

No	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	1,58	1,60	2,03	2,86	2,9
	<i>Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun</i>	Orang	1.300	1.200	1.220	600	1.620
	<i>Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani</i>	Orang	825	750	600	210	550
2	Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persen	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20
	<i>Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah</i>	Buku	16.195	17.001	17.570	17.800	17.854
	<i>Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah</i>	Buku	85.474	87.914	90.434	90.744	90.744
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,06	0,06	0,06	0,088	0,088
	<i>Jumlah perpustakaan</i>	Unit	70	679	1.299	1.299	1.299
	<i>Jumlah penduduk</i>	Orang	1.261.498	1.271.566	1.281.310	1.460.045	1.477.395
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan / tahun		1.270	1.200	1.220	210	440
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	1	16.195	17.001	17.570	17.800	17.854

2.1.3.2.17. Kearsipan

Kearsipan (*filling*) adalah suatu proses kegiatan pengaturan arsip (file) mulai dari penciptaan, penerimaan, pencatatan, penyimpanan. Proses kearsipan menggunakan sistem tertentu dalam penyusunan, pemeliharaan arsip agar dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat serta untuk pemusnahan arsip berdasarkan kriteria tertentu. Ruang lingkup kegiatan kearsipan meliputi:

- Penciptaan, penerimaan, pengumpulan arsip
- Pengendalian, pemeliharaan dan perawatan arsip
- Penyimpanan dan pemusnahan arsip.

Tabel 2.90
Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Kearsipan Tahun 2017 – 2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	100	100	100	100	100
	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku arsip secara baku</i>	OPD	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7
	<i>Jumlah Perangkat Daerah</i>		36	36	36	36	31
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	kegiatan	2	2	3	3	3

Sumber data: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.3.1. Kelautan dan Perikanan

Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Lampung Tengah cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya. Salah satu arah kebijakan pembangunan urusan bidang Kelautan dan Perikanan yaitu peningkatan produksi perikanan, serta peningkatan hasil pengolahan perikanan.

Pada tahun 2021 produksi ikan mencapai 48.474 ton, kondisi ini mengalami peningkatan sebesar 2,71 persen, dibanding tahun 2020. Produksi ikan kolam mengalami peningkatan sebesar 3,1 persen dari 41.434 ton pada tahun 2020 menjadi 42.697 ton pada tahun 2021. Produksi ikan keramba pada

tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1 persen dari 893,5 ton pada tahun 2020 menjadi 904,3 ton pada tahun 2021. Produksi ikan perairan laut mengalami kenaikan sebesar 3,5 persen dari 3.217 ton pada tahun 2020 menjadi 3.331 ton pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh adanya bantuan sarana, prasarana dan bantuan pakan, benih dan lainnya yang menyebabkan kenaikan produksi ikan.

Produksi ikan perairan umum mengalami penurunan sebesar (- 4,97) persen dari 1.948 ton pada tahun 2020 menjadi 1.851 ton pada tahun 2021. Sehubungan dengan masih adanya dampak dari pandemi covid-19 hingga sampai 2021, maka nelayan masih kesulitan dalam hal pemasaran, untuk itu menyebabkan jumlah produksi berkurang. Karena kesulitan dalam melakukan pemasaran dan menjual hasil tangkapan menyebabkan penurunan dari hasil tangkapan ikan di perairan umum serta perairan laut.

Tabel 2.91
Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan
Tahun 2017 – 2021

No	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi perikanan						
	Jumlah Produksi Perikanan Berdasarkan Jenis Unit Usaha Perikanan (ton)						
	- Kolam	Ton	35.362	37.311	38.724	41.434	42.698
	- Keramba	Ton	877	878	1.161	895,3	904,3
	- Perairan Laut	Ton	3.472	3.468	3.473	3.217	3.331
	- Perairan Umum	Ton	1.790	1.864	1.875	1.948	1.851
	Jumlah Produksi Perikanan Berdasarkan Komoditas Unggulan Perikanan (ton)						
	- Patin	Ton	11.620	12.660	12.967	13.981	14.400
	- Gurame	Ton	8.850	9.285	10.316	10.591	10.909
	- Lele	Ton	9.200	9.688	11.203	11.328	11.668
	- Nila	Ton	3.672	3.674	3.754	4.167	4.292
	- Baung	Ton	0	0	5,10	5,15	5,2
	- Bawal	Ton	2.200	2.184	0	2.257	
	- Teri	Ton	0		116	61	102
	- Daging Rajungan	Kg	0		3.875	3.459	161.278
2	Konsumsi ikan						
	<i>Jumlah Produksi Ikan (Ton)</i>	Ton	28,01	28,4	28,9	29,31	30,04

Sumber data: Dinas perikanan

2.1..3.3.2. Pariwisata

Kabupaten Lampung Tengah memiliki banyak objek wisata. Sebagian besar objek wisata tersebut adalah yang berbasis sumber daya alam, seperti wisata alam, wisata agro, dan wisata tirta. Objek wisata alam yang ada di kabupaten ini ada yang benar-benar alami dan ada pula yang buatan. Sementara itu, objek wisata agro di Kabupaten Lampung Tengah ada dua, yaitu Kampung Sayur Wisata Edukasi Liman Benawi yang terdapat di Kecamatan Trimurjo dan Perkebunan Nanas Asto Mulyo di Kecamatan Punggur. Hingga tahun 2020, jumlah objek wisata alam yang ada di Kabupaten Lampung Tengah adalah 6 (enam) wisata alam, jumlah objek wisata alam buatan adalah 4 (empat) objek wisata buatan, jumlah objek wisata agro adalah 2 (dua) obyek wisata, jumlah objek wisata tirta agro adalah 3 (tiga) obyek wisata, jumlah objek wisata air modern adalah 3 (tiga) obyek wisata, jumlah objek wisata budaya adalah 4 (empat) obyek wisata, dan jumlah objek wisata religi dan sejarah adalah 4 (empat) obyek wisata.

Tabel 2.92
Objek Wisata Alam di Kabupaten Lampung Tengah

No	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
1	Air Terjun Curug 7	Kampung Marga Jaya, Kecamatan Selagai Lingga	Panorama Alam	87
2	Air Terjun Curug Lestari	Kampung Kota Batu Kec. Pubian	Panorama Alam	45
3	Air Terjun Curug Gading	Kecamatan Sendang Agung	Panorama Alam	35
4	Watu Agung	Kecamatan Terusan Nunyai	Panorama Alam	30
5	Watu Tumpang	Kecamatan Pubian	Panorama Alam	46
6	Sungai Cabang	Kecamatan Bandar Surabaya	Penyelenggaraan Event Perahu Dayung	40

Sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.93
Jalan Objek Wisata Alam Buatan di Kabupaten Lampung Tengah

No	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
1	Embung Tanjung Anom	Kampung Tanjung Anom, Kecamatan Terusan Nuyai	Tempat Rekreasi dan Pemancingan	28
2	Embung Dua Wisata Telaga Tangkit Puntang	Kampung Payung Makmur, Kecamatan Pubian	Tempat Rekreasi, Pemancingan, dan event gasstrack	48
3	Banyu Asri	Kampung Nyukangharjo, Kecamatan Selagai Lingga	Tempat Pemancingan, Taman Bermain, Karaoke, gasstrack, dan meeting room	80
4	Banyu Selo	Kampung Watu, Kecamatan Kalirejo	Tempat Rekreasi, Perahu Bebek Air dan Pemancingan	50

Sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.94
Objek Wisata Agro di Kabupaten Lampung Tengah

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
1	Kampung Sayur Wisata Edukasi Liman Benawi	Kampung Liman Benawi, Kecamatan Trimurjo	Rekreasi Agro Wisata Tanaman Obat, Sayur dan Buah	40
2	Perkebunan Nanas Asto Mulyo	Kampung Asto Mulyo, Kecamatan Punggur	Rekreasi Agro Wisata Buah Nanas Quin	30

Sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah

Objek wisata tirta di Kabupaten Lampung Tengah ada tiga, yaitu Danau Telago Rejo di Kecamatan Sendang Agung, Danau Tirta Gangga di Kecamatan Seputih Banyak dan Danau Bekri di Kecamatan Bekri (lihat Tabel 3.42). Selain objek wisata tirta di atas, kabupaten ini juga memiliki objek wisata air modern. Objek wisata tersebut adalah Kolam Renang Telaga Putri di Kecamatan Seputih Banyak, Kolam Renang Tirta Bening di Kecamatan Pubian dan Kolam Renang Telogo Rejo di Kecamatan Sendang Agung.

Tabel 2.95
Objek Wisata Tirta di Kabupaten Lampung Tengah

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
1	Danau Telago Rejo	Kampung Sendang Baru, Kecamatan Sendang Agung	Panorama Alam	74
2	Danau Tirta Gangga	Kampung Swastika Buana, Kecamatan Seputih Banyak	Taman Rekreasi Danau, Pura, Patung Hanoman	50
3	Danau Bekri	Kecamatan Bekri	Panorama Alam	26

Sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.96
Objek Wisata Air Modern di Kabupaten Lampung Tengah

No	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
1	Kolam Renang Telaga Putri	Kampung Setia Bakti, Kecamatan Seputih Banyak	Kolam Renang, Water Boom, Sepeda Air, dan Kolam Ikan	46
2	Kolam Renang Tirta Bening	Kampung Payung Rejo, Kecamatan Pubian	Kolam Renang dengan beberapa permainan anak-anak	40
3	Kolam Renang Telogo Rejo	Kampung Sendang Baru, Kecamatan Sendang Agung	Kolam Renang dengan Panorama Alam Perbukitan Hijau	74

Sumber data: Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (2019)

Selain objek-objek wisata berbasis sumber daya alam di atas, Kabupaten Lampung Tengah juga memiliki objek wisata budaya serta objek wisata religi dan sejarah. Sebagian besar objek wisata budaya berlokasi di Kecamatan Gunung Sugih. Sementara itu, objek wisata religi dan sejarah tersebar di empat kecamatan, yaitu Makam Minak Ngediko Pulun bin Minak Brajo Nato di Kecamatan Bandar Surabaya, Petilasan Syekh Abdul Qodir Jaelani di Kecamatan Bangun Rejo, Makam Syekh Sadatullah di Kecamatan Terbanggi Besar serta Gua Maria di Kecamatan Seputih Mataram.

Tabel 2.97
Objek Wisata Budaya di Kabupaten Lampung Tengah

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
1	Tugu Kopiah Emas	Kecamatan Gunung Sugih	Tugu Kopiah Emas dan Foto Area	0,5
2	Nuwo Balak dan Sesat Agung	Kecamatan Gunung Sugih	Bangunan Kulturalistik Pertemuan Serbaguna	1
3	Kampung Wisata Terbanggi Besar	Kecamatan Terbanggi Besar	Rumah Adat Khas Lampung yang Berusia Ratusan Tahun dan Kesenian Adat Lampung	15
4	Tugu Gajah Siwo Mergo	Kecamatan Gunung Sugih	Patung Gajah dengan Kereta Kencana dan Foto Area	3

Sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.98
Objek Wisata Religi dan Sejarah di Kabupaten Lampung Tengah

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
1	Makam Minak Ngediko Pulun bin Minak Brajo Nato	Kecamatan Bandar Surabaya	Bukti Peninggalan Sejarah Keris, Sabuk, Buku Kayu Alim dan Rompi Terbang	90
2	Petilasan Syekh Abdul Qodir Jaelani	Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Bangun Rejo	Panorama Alam, Tempat Petilasan dan Tempat Peristirahatan	45
3	Makam Syekh Sadatullah	Kecamatan Terbanggi Besar	Situs Sejarah Makam Syekh Sadatullah	6
4	Gua Maria	Kampung Fajar Mataram, Kec. Seputih Mataram	Panorama Alam dan Patung Bunda Maria	40

Sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah

Wisata Alam Kabupaten Lampung Tengah

1. Danau Tirta Gangga Taman: terletak di Kecamatan Seputih Banyak dengan luas sekitar 175 ha. Pada mulanya berfungsi untuk penampungan air irigasi, namun seiring perkembangan waktu danau buatan tersebut akhirnya menjadi menarik untuk sarana rekreasi.
2. Air Terjun Curup Bilik Air: terletak di dusun Harapan Jaya kampung Gedung Harta Kecamatan Selagai Lingga.
3. Air Terjun Curup Tujuh: terletak di kampung Marga Jaya Kecamatan Selagai Lingga.
4. Danau Telogo Rejo: terletak di kampung Sendang baru kecamatan Sendang Agung.
5. Danau Bekri: terletak di kecamatan Bekri
6. Pemancingan Ikan Way Seputih: terletak di daerah susuk Kecamatan Rumbia. Pemancingan ini termasuk dalam wisata minapolitan.
7. Pemancingan Kolam Kalirejo: terletak di Kecamatan Kalirejo tepatnya di kampung di Way Kerui. Pemancingan ini termasuk dalam wisata minapolitan.

Secara umum keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya objek wisata dilihat dari indikator meningkatnya kualitas objek wisata (kelengkapan sarana dan prasarana), jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata, jumlah penginapan/hotel dan kontribusi sektor wisata terhadap PAD.

Pencapaian keberhasilan dari meningkatnya kualitas obyek wisata sangat ditentukan oleh kondisi sarana dan prasarana yang tersedia pada kawasan objek wisata. Kabupaten Lampung Tengah mempunyai objek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan untuk menarik wisatawan, seperti objek wisata Danau Tirta Gangga, Air Terjun Curup Tujuh, Danau Bekri, Danau Telogo Rejo, Embung Tanjung Anom, Wisata Agro dan juga Pasar Kreatif. Namun demikian sampai dengan saat ini objek wisata tersebut belum dikembangkan secara optimal, sehingga belum memberikan kontribusi terhadap

perkembangan perekonomian daerah baik dari sisi pendapatan asli daerah maupun usaha ekonomi masyarakat.

Namun demikian untuk lebih menghidupkan ekonomi kreatif masyarakat Dinas Pariwisata berupaya untuk melakukan pelatihan serta memberikan bantuan peralatan guna pengembangan ekonomi kreatif. Perkembangan jumlah pengunjung objek wisata di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan kenaikan, pada tahun 2020 berjumlah 1.208 wisatawan mengalami penurunan drastis dari tahun sebelumnya dikarenakan dampak pandemic Covid-19, dan ditahun 2021 meningkat signifikan yaitu sebanyak 41.510 wisatawan. Hal tersebut seiring dengan dibukanya beberapa ikon tujuan wisata di Kabupaten Lampung Tengah yang baru, yaitu paling banyak diminati oleh wisatawan adalah Tugu Kopiah Emas dan Tugu Canang yang berada di Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 2.99
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pariwisata
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021

No	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Kunjungan wisata	%	146	122	115	13,4	207
	<i>Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se-Kabupaten dan Kota</i>	Orang	8.800	8.544	9.206	1208	41.510
	<i>Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan se-Kabupaten dan Kota</i>	Orang	6.000	7.000	8.000	9000	20000
2	Lama kunjungan wisata	Hari	1	1	1	1	1
3	PAD Sektor wisata	%	1,83%	2,91%	3,05%	1,87%	4,7%
	<i>Total PAD sektor pariwisata</i>	Juta rupiah	2.998,0	4.214,3	5.297,2	3.288,3	4.724
	<i>Total PAD</i>	Juta rupiah	164.046,7	144.961,3	173.533,1	175.676,78	100.743

Sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah

2.1.3.3.2. Pertanian


Pertanian Kabupaten Lampung Tengah berkontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Lampung Tengah dalam setiap tahunnya. Pada Tahun 2017-2021, kontribusi hasil pertanian terhadap PDRB cenderung menurun, yaitu dari tahun 2017 sebesar 36,11% menjadi 34,19% ditahun 2021. Penurunan kontribusi pertanian di Lampung Tengah berkaitan dengan penurunan luas lahan baku sawah sebagai dampak pembangunan dan perluasan permukiman penduduk.

Cakupan bina kelompok tani di Kabupaten Lampung Tengah cukup mendapat perhatian dengan ditandai dari meningkatnya jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan pemerintah daerah.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan pada Perda Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2014 sebesar 53.206 Ha dan Luas Lahan Cadangan LP2B sebesar 18.585 Ha. Luas Lahan Tanaman Pangan Kabupaten Lampung Tengah selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Lahan tanam pertanian tanaman pangan terluas terdapat pada tanaman padi yaitu pada tahun 2018 dengan luas 161.659 Ha. Secara keseluruhan luas lahan tanaman padi pada tahun 2017 – 2021 mengalami penurunan dari 134.631 Ha menjadi 112.026 Ha. Penurunan luas tanam padi mengalami penurunan disebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian untuk jalan tol maupun bangunan lainnya, dan terjadinya perbaikan pada beberapa irigasi pendukung pertanian.

Luas lahan tanaman jagung mengalami fluktuatif dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Luas lahan tanaman jagung terluas terjadi pada tahun 80.713 ha, dan paling sedikit pada tahun 2019 yaitu 59.041 ha. Secara keseluruhan, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, luas tanaman jagung mengalami penyusutan, dari 77.310 ha menjadi 69.292 Ha.

Produktivitas tanaman padi mengalami fluktuatif dari tahun 2017-2021. Produktivitas tanaman padi mengalami puncak tertinggi pada tahun 2017 yaitu 52,72 Kuintal/Ha, kemudian



cenderung turun pada kurun waktu 2020-2021, yaitu secara berturut-turut sebesar 52,29 Kuintal/Ha, dan 48,92 Kuintal/Ha. Penurunan produktivitas tanaman padi diantaranya disebabkan adanya beberapa kegiatan perbaikan jaringan irigasi dan menurunnya debit air dari Bendungan Batu Tegi.

Produktivitas tanaman jagung mengalami fluktuatif dari tahun 2017-2021. Produktivitas tanaman jagung mengalami puncak tertinggi pada tahun 2017 yaitu 68,65 Kuintal/Ha, kemudian cenderung turun pada tahun 2021, yaitu sebesar 62,45 kuintal/ha.

Rata-rata persentase kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB tahun 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung menurun dengan tingkat penurunan 0,12 persen per tahun. Kondisi ini terjadi salah satunya karena adanya kecenderungan penurunan luas tanam pertanian selama tahun 2016-2020 khususnya komoditas padi yaitu turun 3,75 persen per tahun. Namun demikian beberapa komoditas lain mengalami peningkatan luas tanam pertanian selama tahun 2016-2020, yaitu jagung (12,36 persen) dan ubi kayu (7,75 persen).

Rata-rata pertumbuhan produksi tanaman pangan tahun 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata masing-masing yaitu padi (1,79 persen), jagung (22,91 persen), dan ubi kayu (8,72 persen). Rata-rata pertumbuhan kelompok tani tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata masing-masing yaitu kelompok tani pemula (18,31 persen), kelompok tani lanjut (91,68 persen), dan kelompok tani madya (90,01 persen).

Tabel 2.100
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pertanian di Kabupaten Lampung Tengah

NO	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Kontribusi pertanian/perkebunan terhadap PDRB		36,11	35,96	34,86	36,09	34,19
	<i>Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan</i>	milyar	22.011,07	23.855,9	25.085,73	25.837,7	25.419
	<i>Jumlah PDRB</i>	milyar	60.955,29	66.340,55	71.952,7	71.591,8	74.3363
2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya per hektar	Persen	5,27	4,80	4,89	5,29	4,89
	<i>Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)</i>		796.580	771.669	705.402	599.111	490.309
	<i>Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)</i>		151.035	160.837	144.399	113.890	100.232
3	Cakupan bina kelompok tani	Persen	3,00	3,67	10,18	22,06	19,8
	<i>Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n</i>		153	187	518	1.123	1142
	<i>jumlah kelompok tani</i>		5.107	5.097	5.089	5.089	5.765
4	Luas Tanam Pertanian (Ha)						
	Padi	Ha	134.631	161.659	155.434	136.039	112.026,00
	Jagung	Ha	77.484	81.411	61.524	65.148	76.499,60
	Kedelai	Ha	115	12.214	2.392	n.a	53,40

NO	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Ubi Kayu	Ha	69.167	62.118	67.708	103.779	65.159,06
5	Luas Panen						
	Padi	Ha	151.035	160.837	144.399	146.915	100.232,04
	Jagung	Ha	77.310	80.713	59.041	68.175	69.292,00
	Kedelai	Ha	30	10.836	n.a	n.a	53,40
	Ubi Kayu	Ha	53.718	64.560	60.568	86.545	76.901,60
6	Produktivitas Tanaman Pangan						
	Padi	ku/ha	52,72	47,98	48,85	52,29	48,92
	Jagung	ku/ha	68,65	55,9	60,8	69,62	62,45
	Kedelai	ku/ha	13,36	9,77	12,95	n.a	12,95
	Ubi Kayu	ku/ha	260,23	222,06	247,39	254,60	247,39
7	Produksi Tanaman Pangan						
	Padi	ton	796.580	771.669	705.402	768.147	490.309,07
	Jagung	ton	530.712	451.624	359.506	385.426	391.838,17

NO	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Kedelai	ton	40,08	14.056	n.a	n.a	69,15
	Ubi Kayu	ton	1.397.895	1.433.638	1.500.624	2.203.462	2.089.369,82
8	Kelompok Tani						
	Pemula	poktan	1.706	3.005	2.848	2.800	3.459
	Lanjut	poktan	376	1.706	1.819	1.935	1.874
	Madya	poktan	10	376	412	412	422
	Utama	poktan	5.107	10	10	10	10
9	Perkembangan Lembaga tani						
	Jumlah Kelompok Tani		5.107	5.097	5.089	5.157	5765
	Jumlah P3A		260	273	273	273	273
	Jumlah GP3A		24	24	24	24	24
	Jumlah UPJA		114	117	117	117	117
	Jumlah kelompok penangkar benih		45	45	45	45	45

Sumber data: Dinas Pertanian TPH Kabupaten Lampung Tengah



Perkebunan

Pada tahun 2021 produksi komoditas tanaman Kelapa Sawit mencapai 43.095 ton atau menurun sebesar 408 ton atau 0,93 persen dibanding tahun 2020 sebesar 43.503 ton, hal ini disebabkan adanya alih fungsi lahan, masih terdapat tanaman yang belum menghasilkan sebanyak 3.607 hektar, kurangnya pemeliharaan tanaman oleh petani dan tanaman memasuki peremajaan.

Produksi Kakao Tahun 2021 mencapai 3.015 ton meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 2.992 ton, hal ini disebabkan tanaman yang belum menghasilkan atau berproduksi masih cukup luas mencapai 1.156 hektar, kurangnya pemeliharaan tanaman oleh petani dan tanaman memasuki peremajaan.

Produksi Karet Tahun 2021 mencapai 4.923 ton atau menurun sebesar 8,98 ton atau 0,18 persen dibanding tahun 2020 sebesar 4.931,98 ton hal ini disebabkan hal ini disebabkan masih terdapat tanaman yang belum menghasilkan kurang lebih sebanyak 5.940 hektar, alih fungsi lahan dan adanya hama penyakit yang menyerang tanaman karet.

Produksi Tebu Tahun 2021 mencapai 65.246 ton atau meningkat sebesar 5.465 ton atau 9,14 persen dibanding tahun 2020 sebesar 59.781 hal ini disebabkan peningkatan produksi tanaman tebu dipengaruhi oleh minat para petani untuk mengusahakan dan memelihara tanaman tebu dengan baik cenderung meningkat seperti pemberian pupuk dan pencegahan OPT.

Produksi Lada Tahun 2021 mencapai 105 ton atau meningkat 3 ton atau 2,94 persen dibanding tahun 2020 sebesar 102 ton, hal ini disebabkan respon petani lada dalam rangka pembinaan dan penyuluhan oleh petugas mendapat respon positif, yakni melalui pemberian bantuan berupa bibit lada, melakukan pemeliharaan yang baik dan benar sehingga tanaman lada mampu berproduksi secara baik dan hingga saat ini tanaman lada yang belum menghasilkan masih 26,56 persen dari luas keseluruhan areal tanaman lada.

Produksi Kelapa Dalam Tahun 2021 mencapai 6.259 ton atau menurun sebesar 683 ton atau 9,83 persen dibanding tahun 2020 sebesar 6.942 hal ini hal ini disebabkan banyaknya jumlah tanaman kelapa dalam yang telah memasuki masa peremajaan/tua sehingga produksi menurun dan jumlah tanaman kelapa dalam yang masih belum menghasilkan juga mempengaruhi tingkat produksi tanaman ini.

Tabel 2.101
Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan
Tahun 2018 – 2021 (ton)

No	Jenis Tanaman	Produksi (Ton)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kelapa Sawit	59.778,6	53.941,9	43.553	43.503	43.095
2	Kelapa	6.538,40	6.865,4	6.258	6.942	6.259
3	Karet	4.790,5	4.701,3	4.930,83	4.931,98	4.923
4	Kopi	299,8	298,75	298,75	298,30	303,4
5	Kakao	2.775,4	3.255,6	2.992	2.992	3.015
6	Tebu	18.367	21.785	28.523	10.183	65.246

Sumber data: Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka (2017-2021)

Peternakan

Ternak ruminansia yang dikembangkan di Lampung Tengah meliputi sapi, kerbau, kambing dan domba. Di antara keempat jenis ternak tersebut, berdasarkan data tahun 2021, populasi tertinggi adalah ternak sapi sebesar 273.136 ekor, kemudian diikuti kambing sebesar 232.776 ekor. Sedangkan ternak domba dan kerbau populasinya kurang, yaitu masing-masing 8.982 dan 5.216 ekor. Pada beberapa kecamatan, bahkan tidak tercatat data ternak domba, sedangkan ternak kambing cukup merata di seluruh kecamatan. Rata-rata jumlah sapi per kecamatan adalah 9.754 ekor, kerbau 186 ekor, kambing 8.313 ekor, dan domba 320 ekor.

Tabel 2.102
Populasi Sapi, Kerbau, Kambing Di Lampung Tengah

No	Kecamatan	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba
1	Padang Ratu	7.251	621	10.635	43
2	Selanggai Lingga	2.722	126	4.393	182
3	Pubian	5.026	695	6.276	87
4	Anak Tuha	4.034	708	5.678	272
5	Anak Ratu Aji	3.306	46	3.992	56
6	Kali Rejo	2.515	61	12.838	191
7	Sendang Agung	1.906	46	3.338	225
8	Bangun Rejo	10.690	127	16.554	563
9	Gunung Sugih	6.996	129	21.764	254
10	Bekri	9.063	62	3.130	96
11	BumiRatu Nuban	1.641	31	2.793	885
12	Trimurjo	2.683	411	3.343	679
13	Punggur	8.475	83	2.689	612
14	Kota Gajah	4.659	83	2.077	401
15	Seputih Raman	17.402	21	1.764	467
16	Terbanggi Besar	33.057	168	17.277	2.639
17	Seputih Agung	26.206	320	5.096	7
18	Way Pengubuan	3.760	247	3.777	856
19	Terusan Nunyai	5.180	18	9.804	n.a
20	Seputih Mataram	22.449	29	12.989	323
21	Bandar Mataram	12.994	332	19.300	15
22	Seputih Banyak	28.271	164	8.382	651
23	Way Seputih	13.099	37	8.585	n.a
24	Rumbia	12.814	51	6.928	n.a
25	Bumi Nabung	7.555	43	6.371	n.a
26	Putra Rumbia	10.595	29	2.780	n.a
27	Seputih Surabaya	4.717	59	13.359	n.a
28	Bandar Surabaya	4.070	469	16.864	25
	Lampung Tengah	273.136	5.216	232.776	8.982

Sumber data: Dinas Pertanian Kab. Lampung Tengah

Populasi ternak sapi dan kambing tercatat meningkat pada tahun 2021. Pada tahun 2021 populasi sapi menjadi 343.049 atau meningkat 47,2 persen dari tahun 2017, atau meningkat 9,4% per tahun. Sedangkan kambing menjadi 290.970 ekor atau meningkat sebesar 29,9 persen dari tahun 2017, atau meningkat 5,9% per tahun. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat di Lampung Tengah lebih berminat untuk mengembangkan ternak sapi daripada kambing. Hal tersebut dikarenakan program Inseminasi Buatan Sapi lebih besar daripada program inseminasi BUatan pada kambing.

Tabel 2.103
Perkembangan Populasi Ternak
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021

No.	Jenis Ternak	Populasi Ternak				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Sapi Potong	233.128	273.136	297.253	311.259	343.049
2.	Kambing	223.905	235.266	270.543	289.957	290.970
3.	Ayam Buras	1.001.325	1.007.525	1.032.780	1.014.199	1.033.368
4.	Ayam Ras Pedaging	2.147.110	2.257.141	2.151.805	1.054.883	1.136.765
5.	Ayam Ras Petelur	650.149	751.129	735.841	933.985	1.956.182

Sumber data: Dinas Pertanian Kab. Lampung Tengah

Jumlah usaha peternakan sapi tidak linier dengan jumlah populasi sapi. Usaha peternakan sapi yang paling banyak di kecamatan Punggur, di mana jumlah populasinya menempati urutan ke 12. Di kecamatan Seputih Banyak, yang menempati urutan ke 2 populasi sapi bahkan tidak tercatat adanya usaha ternak sapi.

Kabupaten Lampung Tengah memiliki populasi ternak sapi yang paling tinggi di provinsi Lampung, yaitu sebesar 41,7% dari 15 kabupaten yang ada. Peringkat berikutnya adalah kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur. Berdasar kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa kabupaten Lampung Tengah merupakan sentra pengembangan ternak Sapi di Lampung yang berpotensi mendukung penyediaan daging sapi secara nasional.

2.1.3.3.3. Perdagangan

Sarana perdagangan yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari Pasar Kampung, Pasar Daerah, Mall/Supermarket/Mini Market. Jumlah infrastruktur tersebut semakin bertambah, terutama pada fasilitas perdagangan modern seperti Mall. Pada tahun 2021, pusat perbelanjaan Pasar Bandar Jaya diberikan izin sebagai Mall dan direncanakan untuk dilengkapi fasilitasnya untuk dapat beroperasi seperti layaknya pusat perbelanjaan setingkat Mall.

Perkembangan jumlah fasilitas perbelanjaan di Kabupaten Lampung Tengah tergambar pada tabel di bawah ini. Pada tahun 2019, tercatat jumlah pasar kampung adalah 75 fasilitas, pasar daerah berjumlah 9 fasilitas, dan mall/supermarket/mini market berjumlah 157 fasilitas.

Tabel 2.104
Perkembangan Jumlah Pasar Tahun 2017 – 2021

No	Jenis	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pasar Kampung	75	75	75	75	75
2	Pasar Daerah	9	9	9	9	9
3	Mall / Super Market / Mini Market	90	123	134	144	157
	JUMLAH	84	207	218	228	241

Sumber data: Dinas Perdagangan Kab. Lampung Tengah

Sektor perdagangan besar dan eceran memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PDRB Kabupaten Lampung Tengah, setelah sektor pertanian, industri pengolahan, dan konstruksi. Sektor perdagangan besar dan eceran mengalami pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah. Catatan Nilai ekspor berdasarkan PDRB ADHK Menurut Jenis Pengeluaran, pada tahun 2017 sebesar Rp 17,691 trilyun dan meningkat 7,4 persen pada tahun 2021 yaitu 4,168 trilyun. Nilai impor pada tahun 2017 sebesar Rp 14,241 trilyun lebih meningkat menjadi sebesar Rp 14,825 Trilyun lebih pada tahun 2021. Rata-rata peningkatan ekspor tahun 2017-2021 adalah 7,35 persen per tahun, dan Rata-rata peningkatan ekspor tahun 2017-2021 adalah 0,82 persen per tahun.

Tabel 2.105
Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Perdagangan Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Ekspor Bersih Perdagangan	Milyar Rp.	3.441	3.068	3.265	3.471	4.168
	Nilai ekspor	Milyar Rp.	17.681	17.761	19.345	18.243	18.993
	Nilai impor	Milyar Rp.	14.241	14.692	16.080	14.772	14.825
2	Jumlah Pasar Kampung	Unit	75	75	75	75	75
	Jumlah Pasar Daerah	Unit	9	9	9	9	9
	Jumlah Mall/Super Market/ Mini Market	Unit	90	123	134	144	157

Sumber data: Dinas Perdagangan Kab. Lampung Tengah

2.1.3.3.5. Perindustrian

Bidang perindustrian salah satu bidang urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang mengurus segala sesuatu yang bertalian dengan industri. Di Kabupaten Lampung Tengah sektor industri menjadi salah satu sektor yang berkontribusi cukup signifikan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Tengah. Rata-rata prosentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah tahun 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan pertumbuhan 248,4% atau mengalami pertumbuhan 49,7% per tahunnya.

Tabel 2.106
Pencapaian Kinerja Urusan Perindustrian
Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Prosentase Peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Persen	57,03%	37,12%	0,77%	0,05%	1,74%

Sumber data: Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.107
Perkembangan Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Unit Usaha					Jumlah Tenaga Kerja (orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
I	IHPK										
	besar	89	n.a	65	65	65	32.457	30.734	30.743	23.057	23.057
	menengah	137	170	170	170	170	5.429	1.738	1.738	1.390	1.390
	kecil	455	1.424	1.437	1.365	1.424	1.595	4.343	4.385	3.069	4.343
	jumlah	681	1.659	1.672	1.600	1.659	39.481	36.815	36.866	27.516	36.815
2	ILMEKA										
	besar	89	n.a	n.a	n.a		2.641	n.a	n.a		
	menengah	17	n.a	n.a	n.a		1.881	n.a	n.a		
	kecil	265	14	14	14	14	625	336	336	300	336
	jumlah	371	14	14	14	14	5.147	336	336	300	336
3	Total										
	Besar	178	65	65	65	65	30.734	30.743	23.057		30.734
	menengah	154	170	170	170	170	7.310	1.738	1.738	1.390	1.738
	Kecil	720	1.372	1.451	1.379	1.372	2.220	4.679	4.721	3.369	4.679
	Total	1.052	1.673	1.686	1.614	1.673	44.628	37.151	37.202	27.816	27.816

Sumber data: Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.108
Perkembangan Nilai Investasi Tahun 2017 – 2021 (juta rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
I	IHPK					
	besar	1.258.899	1.615.406,3	1.615.491,3	1.453.950,6	1.615.406,3
	menengah	30.901	30.689	30.809	29.268,5	30.689
	kecil	10.513	21.064,2	21.180,1	18.003,1	21.064,2
	jumlah	1.300.313	1.667.159,5	1.667.480,4	1.501.22,2	1.667.159,5
2	ILMEKA					
	besar	1.249.662	-	-	-	-
	menengah	7.975	-	-	-	-
	kecil	1.968	1.559,2	1.605,9	1.445,4	1.559,2
	jumlah	1.259.605,8	1.559,2	1.605,9	1.445,4	1.559,2
3	Total					
	Besar	2.508.561,9	1.615.406,3	1.615.491,3	1.453.950,6	1.615.491,2
	menengah	38.876	30.689	30.809	29.268,5	30.589
	Kecil	12.481	22.623,4	22.786	19.448,4	22.623,4
	Total	2.559.918,9	1.668.718,7	1.669.086	1.502.667,6	1.668.718,7

Sumber data: Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah

Rata-rata pertumbuhan jumlah unit usaha industri kecil, menengah, dan besar untuk kelompok IHPK tahun 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan tertinggi pada industri kecil, yaitu sebesar 143,6% atau mengalami pertumbuhan 28,7% per tahun, namun mengalami penurunan pada industri besar selama 26,9%, atau mengalami penurunan 5,3% per tahunnya.

Sedang untuk kelompok Industri Logam, Mesin, dan Elektronika (ILMEKA) terdapat kecenderungan menurun dari tahun 2017 ke 2021, yaitu mengalami penurunan sebesar 96,22%.

Nilai Investasi yang ditanamkan pada Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (IHPK) selama kurun waktu 2017-2021 mengalami peningkatan sebesar 28,2% atau meningkat 5,6% pada setiap tahunnya.

Sektor pertanian sangat mewarnai setor-sektor lain di Kabupaten Lampung Tengah. Sektor hilir (sekunder) di wilayah ini didominasi oleh industri hasil pertanian atau agroindustri. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan sektor pertanian dengan berbagai komoditas unggulannya, akan memacu perkembangan sektor lainnya seperti industri.

2.1.3.3.6. Transmigrasi

Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk (kota) ke daerah lain (desa) di dalam wilayah Indonesia. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis di Indonesia, transmigrasi dilaksanakan dengan paradigma baru yaitu:

- Mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan
- Mendukung kebijakan energi alternatif (bio-fuel)
- Mendukung pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia

- Mendukung ketahanan nasional pulau terluar dan wilayah perbatasan
- Menyumbang bagi penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan

Transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan *top down* dari Jakarta, melainkan berdasarkan Kerja sama Antar Daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Penduduk setempat semakin diberi kesempatan besar untuk menjadi transmigran penduduk setempat (TPS), proporsinya hingga mencapai 50:50 dengan transmigran penduduk asal (TPA). Selama kurun waktu 2016-2020, telah terjadi penambahan jumlah transmigran umum (KK) sebanyak 53 KK.

Tabel 2.109
Perkembangan Transmigran Asal Lampung Tengah 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Transmigran Umum (KK)	10	10	13	0	0
2	Jumlah Transmigran Swakarsa (KK)	0	0	0	0	0
3	Jumlah Transmigran Swakarsa Mandiri (KK)	0	0	0	0	0
	Jumlah	10	10	13	0	0

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.1.3.4. Fokus Layanan Penunjang Urusan

2.1.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, antara lain perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Hingga tahun 2021, Kabupaten Lampung Tengah telah memiliki dokumen RPJPD 2005 – 2025 (Perda Nomor 03 Tahun 2010), RTRW 2011-2031 (Perda Nomor 01 Tahun 2012), RPJMD 2016-2021 (Perda Nomor 07 Tahun 2016). Rata-rata penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD adalah 95 persen, rata-rata Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD adalah 100 persen, dan rata-rata kesatuan rencana pembangunan dengan RTRW adalah 80 persen.

Tabel 2.110
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Perencanaan
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	ada	Ada	ada	ada	ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	ada	Ada	ada	ada	ada
3	Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	ada	Ada	ada	ada	ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	ada	Ada	ada	ada	ada
5	Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD		97%	91%	94%	94%	220
	<i>Jumlah program RKPD Tahun berkenaan</i>		180	170	174	174	186
	<i>Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan</i>		186	186	186	186	100%
6	Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam APBD		100%	100%	100%	100%	220
	<i>Jumlah program RKPD Tahun berkenaan</i>		180	170	174	174	220
	<i>Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan</i>		180	170	174	174	220

Sumber data: Bappeda Kabupaten Lampung Tengah

2.1.3.4.2. Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah meliputi pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta asset daerah. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Lampung terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Pada Tahun Anggaran 2020 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Rata-rata dana SILPA tahun 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah adalah 22,78 persen per tahun, rata-rata dana urusan pendidikan, dan Bagi hasil kabupaten dan desa adalah 5,28 persen per tahun.

Tabel 2.111
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Keuangan
Tahun 2015 – 2020

No	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Skor	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	SILPA	Juta rupiah	55.714,484	139.955,248	200.010,842	269.944,049	157.096,665
3	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	2,24	5,86	7,21	12,36	6,29
	<i>Total SILPA</i>	Juta rupiah	55.714,484	139.955,248	200.010,842	269.944,049	157.096,665
	<i>Total APBD</i>	Juta rupiah	2.491.283,236	2.388.867,281	2.529.103,615	2.184.236,301	2.495.723,221
4	Persentase belanja pendidikan (20 %)	Persen	36,35	37,07	35,94	32,63	34,8
	<i>Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan</i>	Juta rupiah	905.699,537	885.643,419	909.053,155	712.744,110	868.930,278
	<i>Total APBD</i>	Juta rupiah	2.491.283,236	2.388.867,281	2.529.103,615	2.184.236,301	2.495.723,221
5	Persentase belanja kesehatan (10 %)	Persen	7,73	8,23	8,59	9,37	11,38
	<i>Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan</i>	Juta rupiah	192.643,272	196.689,118	217.263,619	204.744,695	284.213,609

No	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	<i>Total APBD</i>	Juta rupiah	2.491.283,236	2.388.867,281	2.529.103,615	2.184.236,301	2.495.723,221
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Persen	70,28	62,55	59,86	35,82	27,89
	<i>Jumlah Belanja Langsung</i>	Juta rupiah	1.028.193,413	919.223,350	947.036,441	576.079,025	540.879,241
	<i>Jumlah Belanja Tidak Langsung</i>	Juta rupiah	1.463.089,823	1.469.643,931	1.582.067,174	1.608.157,275	1.939.165,759
7	Bagi hasil kabupaten dan desa	Persen	0,22	0,29	0,31	0,36	0,39
	<i>Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/kota/desa</i>	Juta rupiah	5.575,613	7.044,716	7.929,178	7.766,649	9.734,373
	<i>Total APBD</i>	Juta rupiah	2.491.283,236	2.388.867,281	2.529.103,615	2.184.236,301	2.495.723,221
8	Penetapan APBD		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

2.1.3.4.3. Kepegawaian

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Lampung Tengah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah dalam sistem NKRI.

Pada aspek sumber daya aparatur (PNS), jumlah PNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 sebanyak 10.200 orang, terdiri dari 4.485 orang laki-laki dan 5.711 orang perempuan. Kondisi tersebut mengalami penurunan sebanyak 1.472 orang dibanding kondisi tahun 2017 sebanyak 11.672 orang. Dari sisi ketersediaan perangkat daerah, rasio ketersediaan PNS per 1.000 penduduk, yang merupakan salah satu indikator kualitas pelayanan publik, adalah sebesar rata-rata 7 PNS melayani 1.000 penduduk. PNS menurut golongan terbanyak ada pada golongan III yakni sebanyak 5.163 orang dan paling sedikit golongan I sebanyak 63 orang. Selanjutnya, hal yang juga berkontribusi terhadap kualitas pelayanan adalah sebaran PNS menurut tingkat pendidikan.

Pada tahun 2021, tingkat pendidikan PNS di Kabupaten Lampung Tengah di dominasi oleh S-1 (66,03 persen), SMA (17,09 persen), dan D-3 (10,48 persen).

Tabel 2.112
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Golongan I	127	99	71	63	63
2	Golongan II	2.676	2.206	2.209	1966	1566
3	Golongan III	4.574	4.585	4.874	5263	5163
4	Golongan IV	4.295	4.150	3.863	3584	3408
Jumlah		11.672	11.040	11.017	10.876	10.200

Sumber data: BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.113
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD	123	89	70	55	44
2	SMP	173	151	103	97	88
3	SMA	3.077	2.553	2.127	1.859	1.634
4	D1	109	89	78	77	67
5	D2	2.413	1.967	1.035	728	530
6	D3	1.120	1.066	1.165	1.140	1.101
7	D4/ S1	4.225	4.687	5.852	6.377	6180
8	S2	429	436	584	540	554
9	S3	3	2	3	3	2
Jumlah		11.672	11.040	11.012	10.876	10.200

Sumber data: BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.114
Pencapaian Kinerja Bidang Kepegawaian Tahun 2017 – 2021

No	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari	5	5	5	5	5
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	0,69%	2,33%	6,91%		0,98%
	<i>Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal</i>		80	257	761	n.a	100
	<i>Jumlah total ASN</i>		11672	11040	11017	10447	10200
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tor	Persen	2,56%	6,82%	3,41%	5,12%	58,24%
	<i>Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural</i>		30	80	40	60	696
	<i>Jumlah total jabatan</i>		1173	1173	1173	1173	1195
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Unit	41	35	39	36	42
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Unit	1064	974	1006	956	1153
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Unit	8319	7611	7736	7306	7270

Sumber data: BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah

2.1.3.4.4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan merupakan suatu proses yang di gunakan untuk mengembangkan serta memvalidasi suatu produk tertentu yang di pakai dalam sebuah lembaga. Hasil penelitian dan pengembangan nanti hendaknya bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan untuk kemakmuran masyarakat.

Rumusan kebijakan merupakan sebuah dokumen yang menguraikan dasar rasional dalam pemilihan sebuah alternatif kebijakan khusus atau rangkaian tindakan dalam sebuah kebijakan saat ini, yang diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah dalam menginisiasi kebijakan yang lebih efektif.

Rata-rata persentase implementasi rencana kelitbangan di Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 2017 sampai dengan 2020 cenderung menurun dengan tingkat penurunan 9,99 persen per tahun, dan kembali meningkat pada tahun 2021 dengan realisasi mencapai 95,65%. Peningkatan tersebut didukung dengan bertambahnya kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan. Rata-rata persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah juga pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan dengan tingkat penurunan 13,35 persen per tahun. Hal tersebut disebabkan Perangkat Daerah yang mengusulkan inovasi mengalami penurunan jumlah. Namun pada tahun 2021, Perangkat Daerah yang mengusulkan inovasi meningkat menjadi 32 Perangkat Daerah.

Rata-rata persentase pemanfaatan hasil kelitbangan mencapai 89,02 persen per tahun. Rata-rata persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah meningkat 5,66 persen per tahun.

Pada tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah telah memperoleh predikat SANGAT INOVATIF dari Kementerian Dalam Negeri dengan skor 1.705 (Kepmendagri Nomor 100-4672 Tahun 2020).

Tabel 2.115
Pencapaian Kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2017 – 2021

No	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100,00%	92,86%	88,24%	75,00%	95,65%
	<i>Jumlah kelitbangan dalam RKPD</i>	kegiatan	11	13	15	12	22
	<i>Jumlah kelitbangan dalam RPJMD</i>	kegiatan	11	14	17	16	23
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	11	13	15	12	100%
	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti		11	13	15	12	26
	Jumlah kelitbangan dalam renja OPD		11	13	15	12	26
	Penerapan SIDA:	ada	ada	ada	Ada	Ada	Ada
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	100,00%	100,00%	68,75%	71,88%	100%
	<i>Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi</i>	perangkat daerah	32	32	22	23	32
	<i>Jumlah total perangkat daerah</i>	perangkat daerah	32	32	32	32	32
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah		18,29%	76,15%	100,00%	80,00%	100%
	<i>Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan</i>	rekomendasi	15	83	45	24	26
	<i>Jumlah inovasi yang diusulkan</i>	rekomendasi	82	109	45	30	26
5	Indeks inovasi daerah	indeks	n.a	n.a	n.a	inovatif	inovatif
6	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	n.a	n.a	n.a	2,29 (Sedang)	2,94 (Tinggi)
7	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	n.a	46,1706	47,1785	43,4414	-

Sumber data: Balitbang Kabupaten Lampung Tengah

2.1.3.4.5. Pengawasan

Proses penyelenggaraan pemerintahan yang terus berkembang mengikuti perkembangan dan dinamika turut meningkatkan tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan dan akuntabel. Segenap jajaran penyelenggara pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan *good governance* dan *clean government*.

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan *good governance* khususnya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Dalam pelaksanaan tugasnya, pengawasan internal APIP tidak hanya membantu mengawasi apakah pemerintah telah mengerjakan yang seharusnya dikerjakan, membelanjakan uangnya sesuai tujuan yang ditetapkan dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*oversight*), namun juga memberikan jasa konsultasi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah (*insight*) serta mampu mengidentifikasi *trend* atau perkembangan dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah (*foresight*).

Pada tahun 2021 semua (100 persen) temuan sudah ditindaklanjuti. Rata-rata persentase Jumlah total temuan tahun 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung menurun dan pada tahun 2021 menurun 25 persen jika dibandingkan tahun 2020. Rata-rata persentase pelanggaran pegawai terus menurun dengan penurunan per tahunnya.

Tabel 2.116
Pencapaian Kinerja Bidang Pengawasan Tahun 2017 – 2021

No	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	95,65	100	100	100	100
	<i>Jumlah temuan yang ditindaklanjuti</i>	Jumlah	1100	1200	1100	970	727
	<i>Jumlah total temuan</i>	Jumlah	1150	1200	1100	970	727
2	Persentase pelanggaran pegawai	Persen	0,06	0,12	0,09	0,03	0,03
	<i>Jumlah ASN yang dikenai sanksi</i>	Orang	7	13	10	3	3
	<i>Jumlah total ASN</i>	Orang	11.672	11.040	11.017	10.447	10.200
3	Jumlah temuan BPK	Jumlah	51	57	34	33	15

Sumber data: Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah

2.1.3.4.6. Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya.

Dalam pembentukan kebijakan pembangunan daerah terdapat unsur Lembaga legislatif, yang memiliki kewenangan membentuk, menyusun dan mengontrol pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Rata-rata rapat/sidang Hearing per tahun adalah 36,5 kali dalam setahun. Sedangkan Rata-rata rapat/sidang Banmus per tahun adalah 28 kali dalam setahun dan Paripurna adalah 21,5 kali setahun. Rata-rata persentase Rancangan Peraturan Daerah yang disepakati menjadi Perda adalah 81,5 persen per tahun.

Tabel 2.117
Jumlah Rapat/Sidang Yang Difasilitasi Tahun 2019 – 2021

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021
1	Hearing	Kali	43	30	81
2	Rapat Banmus	Kali	22	34	34
3	Paripurna	Kali	27	16	24
	Jumlah		92	80	139

Sumber data: Sekretariat DPRD Lampung Tengah

Tabel 2.118
Pencapaian Kinerja Sekretariat Dewan Tahun 2019 – 2021

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021
1	Persentase Peraturan Daerah yang disepakati menjadi Perda	%	81	82	73

Sumber data: Sekretariat DPRD Lampung Tengah

2.1.3.4.7. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah.

Rata-rata indek kepuasan masyarakat tahun 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 3,42 persen per tahun. Nilai SAKIP meningkat dengan rata-rata peningkatan 4,30 persen per tahun. Jumlah peraturan yang diterbitkan juga terus per tahun. Persentase KUR yang disalurkan juga terus per tahun.

Tabel 2.119
Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indek Kepuasan Masyarakat	Skor	80.59	80.71	85.9	85.9	85,15
2	Nilai SAKIP	Skor	51,86	60,13	62,05	63,52	64,35
3	Nilai LPPD	Skor	1,889	3,1566	n.a	n.a	
4	Jumlah Paket Pengadaan Barang & Jasa	Paket	741	386	357	221	186
5	Jumlah Peraturan yang diterbitkan						
	- Peraturan Daerah	Buah	87	14	14	11	10
	- Peraturan Bupati	Buah	11	50	69	61	67
6	Persentase KUR yang disalurkan	Juta rp	109.851	630.666	802.162	1.107.876	1.682.354
7	Indeks Reformasi Birokrasi	skor	n.a	N3.a	n.a	35,92	53,57

Sumber data: Sekretariat Daerah Lampung Tengah

2.1.3.5. Fokus Layanan Penunjang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan pada upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP, pembinaan terhadap masyarakat dalam pemahaman pengembangan wawasan kebangsaan.

Tumbuh dan berkembangnya demokrasi dapat dilihat dari perkembangan jumlah LSM, Ormas dan Parpol yang terdaftar secara resmi di pemerintah daerah. Sampai dengan tahun 2021 jumlah LSM yang terdaftar sebanyak 49 LSM, kemudian jumlah Ormas berjumlah 159 Ormas, serta Partai Politik yang terdaftar sebanyak 12 parpol.

Rata-rata jumlah Ormas tahun 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan pertumbuhan 21,8 persen per tahun. Namun rata-rata jumlah LSM terus menurun dengan penurunan 7,9 persen per tahun.

Tabel 2.120
Pencapaian Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	LSM	Unit	81	88	88	88	49
2.	Ormas	Unit	76	87	114	116	159
3.	Parpol	Unit	12	12	12	12	12

Sumber data: Badan Kesbangpol Lampung Tengah

2.1.3.6. Fokus Layanan Umum Kewilayahan

Unsur kewilayahan ditingkat kabupaten dalam hal ini dilaksanakan oleh Pemerintah kecamatan selaku pelaksana sebagian kewenangan bupati yang diserahkan atau dikuasakan kepada camat. Pada saat ini di Kabupaten Lampung Tengah terdapat 28 Kecamatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang camat. Adapun tugas pokok dan fungsi camat adalah sebagai berikut:

- Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.

- Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ada di kecamatan.
- Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.
- Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan.
- Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
- Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
- Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing wilayah menunjukkan kemampuan suatu wilayah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Aspek daya saing dapat dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Aspek daya saing ekomi daerah dapat dilihat dari kemampau ekonomi daerah yang tercermin dari pengeluaran konsumsi masyarakat, rasio ekspor dan impor dan persentase desa (kampung) maju.

Rata-rata Pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga per kapita tahun 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah dalam 2 tahun terakhir terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 13,9 persen per tahun. Sedangkan rata-rata Pengeluaran konsumsi non pangan rumah tangga perkapita juga terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 41,5 persen per tahun.

Rata-rata rasio ekspor + import terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) tahun 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah dalam 2 tahun terakhir mengalami penurunan. Hal tersebut berkaitan dengan adanya pandemic Covid 19, yang menyebabkan turunnya aktivitas ekspor dan import di Kabupaten Lampung Tengah.

Rata-rata Prosentase desa maju terhadap total desa juga terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 4,38 persen per tahun.

Tabel 2.121
Pencapaian Indikator Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga per kapita	Rupiah/bulan	451.886	432.544	469.537	480.895	766.161
2	Pengeluaran konsumsi non pangan rumah tangga perkapita	Rupiah/bulan	321.924	378.715	415.446	422.998	990.284
3	Rasio ekspor + import terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	Rasio	74,05	71,47	74,05	69,72	69,42
4	Prosentase desa maju terhadap total desa	%	17	27	27	27	38,9

Sumber data: BPS Lampung Tengah

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Aspek daya saing wilayah/ infrastruktur daerah dapat dilihat dari kondisi infrastruktur wilayah. Rata-rata persentase jalan mantap (baik dan sedan) tahun 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 5,64 persen per tahun. Hingga akhir tahun 2021 sebanyak 61,5 persen jalan di Kabupaten Lampung Tengah masuk kategori jalan mantap.

Rata-rata cakupan rumah tinggal bersanitasi 2016-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 0,96 persen per tahun. Hingga akhir tahun 2020 cakupan rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Lampung Tengah sudah mencapai 94,35 persen. Rata-rata persentase rumah tangga yang

menggunakan listrik 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 1,57 persen per tahun. Hingga akhir tahun 2021 persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sudah mencapai 89,66 persen.

Tabel 2.122
Pencapaian Indikator Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Tahun 2015 – 2020

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase jalan mantap (baik dan sedan)	%	67,68	54,43	61,62	56,4	61,50
3	Cakupan Rumah Tinggal Bersanitasi	%	92,95	93,04	93,12	94,3	94,3
4	Tingkat jaringan irigasi teknis kabupaten berkualitas baik	%	28,68	31,15	37,08	43,71	43,96
5	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	83,13	83,99	84,39	89,30	89,66

Sumber: Dinas Bina Marga/Perumahan dan Permukiman/Pengairan

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Aspek daya saing iklim berinvestasi dapat dilihat dari kondisi iklim berinvestasi. Angka kriminalitas rasio per 10.000 penduduk cenderung menurun, menunjukkan bahwa di Kabupaten Lampung Tengah semakin aman. Kondisi ini semakin menjadi daya tarik investasi.

Tabel 2.123
Pencapaian Indikator Fokus Iklim Investasi Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka kriminalitas rasio per 10.000 penduduk	rasio per 10.000 penduduk	5.33	4.40	4.25	4,19	2,89
2.	Nilai Investasi (Rp Juta)	Juta rupiah	9.163.728	10.756.024	12.493.155	13.580.010	14.204.492
	1. PMA	Juta rupiah	3.114.176	3.159.088	3.162.088	3.162.088	3.162.088
	2. PMDN	Juta rupiah	6.049.551	7.596.936	9.331.066	10.417.922	11.042.403

Sumber data: Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas PMPTSP Kab Lampung Tengah.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Aspek sumber daya manusia dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat. Rata-rata rasio ketergantungan 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah terus menurun dengan tingkat penurunan 1,26 persen per tahun. Pada akhir tahun 2021, rasio ketergantungan di Kabupaten Lampung Tengah hanya mencapai 42,85. Ini artinya dalam 100 orang penduduk hanya menanggung 42 orang.

Rata-rata penduduk yang tamat perguruan tinggi 2017-2021 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 8,56 persen per tahun. Namun demikian tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Lampung Tengah masih di dominasi tamatan SD, disusul dengan tamatan SMA/Sederajat, dan tamatan SMP/Sederajat.

Tabel. 2.124
Pencapaian Indikator Fokus Sumber Daya Manusia
Tahun 2015 – 2020

No	Tingkat Pendidikan	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Ketergantungan	rasio	49.16	49.03	48.92	48.6	42,85
3	Tamat SD	jumlah	238.446	183.850	307.664	242.612	300.183
4	Tamat SMP/Sederajat	jumlah	233.293	182.061	171.323	172.515	172.102
5	Tamat SMA/Sederajat	jumlah	137.900	178.460	159.668	186.010	192.823
6	Tamat Perguruan Tinggi	jumlah	35.421	35.877	41.028	41.653	50.597

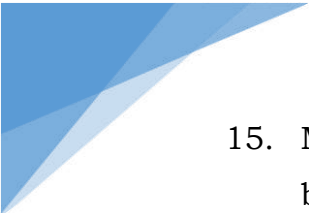
Sumber data: BPS Lampung Tengah

Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. Konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca MDG's, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), maka TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator, adapun tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di Tahun 2016-2030 yaitu:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosika pertanian berkelanjutan;
3. Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempro-mosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industri-alisasi insklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar nagara;
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;

- 
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
 16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif disemua tingkatan;
 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) memiliki empat pilar utama, yakni pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Kondisi lingkungan merupakan dasar dalam menopang kesejahteraan sosial dan ekonomi, dalam pencapaian kesejahteraan manusia. Ilustrasinya, kondisi lingkungan yang sehat dan bersih disertai dengan daya dukung yang baik, akan mampu menciptakan masyarakat yang sehat dan bahagia, untuk kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat tercipta kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 2.125
Pencapaian Indikator SDGs Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 – 2021

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1,2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	12,9%	12,62%	12,03%	11,82%	11,99%
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	70%	80%	90%	90%	90%
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	100%	100%	100%	100%	100%

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	rentan.							
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	85%	84%	82%	99,28%	99,8%
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	90,01%	85,07%	87,81%	87,07%	83,9%
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 0-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Pasangan Usia Subur (PUS)	Pasangan Usia Subur (PUS)	Pasangan Usia Subur (PUS)	Pasangan Usia Subur (PUS)	Pasangan Usia Subur (PUS)

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.							
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	73,1%	75,55%	71,24%	71,51%	67,95%

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	86,15%	86,15%	88,12%	94,3%	89,8%
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	APM	76,58	77,42	100	100

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	tepat, termasuk keuangan mikro.							
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	98,8	99,13	99,5	99,5	99,23
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	75,35	75,77	75,27	90, 5	90,18

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro							
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	91,76%	94,94%	93,17%	97,7%	104%
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	83,13	83,99	84,39	89,30	89

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro							
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	1 lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	100%	100%	100%	100%	100%
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan	-	-	12 kampung	12 Kampung	3 Kecamatan

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.		layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)					
2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	5,25	6,9	3,97	5,71	4,6
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	37%	25,32%	13,98%	13,34%	6,3%

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	manula							
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	37%	25,32%	13,98%	13,34%	20,8%
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	0,03 %	0,01 %	0,02%	5,6	3,2%
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	5,7	7,7	11,59	10,33	9,12

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.							
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	77,1%	44,5%	52,1%	41,3	43,4
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	81,8%,	86,7	85,2	82,7	87,5

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.							
3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	50.28	84.05	102.67	206.5	50.28
3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	90,01	85,07	87,8	87,1	83,6
3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	90,01	85,07	87,8	87,1	83,6
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	0,14	0.57	1.14	0.28	0.8

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.							
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 100	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	2,51	4,74	2,73	0,7	5,3
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2.(a)	(AKB) per 1000 kelahiran hidup	2,78	4,94	3,6	0,6	6,1
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	106	107,2	102,5	96,5	83,3

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.							
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0,0086	0.002	0.07	0.07	0.07
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	N/A	163.11	102.32	14	138.1
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan,	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	0,007	0.39	0.62	0	0.1

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya							
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	1	1	1	1	1
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	1	1	1	1	1
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta	3.3.5	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	43	90	37	22	38

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	penyakit menular lainnya.							
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	1	1	1	1	1
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	8.26	49.4	5.9	8.3	3.5
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	1	1	1	1	1
3,7	Pada tahun 2030,	3.7.1*	Proporsi perempuan usia	73,1	75,6	71,2	71,51	67,95

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.		reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.					
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	73,1	75,6	71,2	71,51	67,95
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	N/A	98.587 (44,16%)	106.091 (45,23%)	108.099 (43,88%)	108.038 (43,66%)

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	nasional.							
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	N/A	N/A	56	24,16	24,16
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	2,32	2,3	2,56	2,6	2,56
3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	26,87	24,45	28,76	28,49	17,86

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.							
3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2* J	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	598,615	752,905	793,505	665,750	725,221
3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.1	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	47,45	59,2	61,9	51,6	49,09
	Memperkuat pelaksanaan the	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15	32,08	N/A	34,03	32,56	33,70

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.		tahun.					
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	100	100	100	100	100

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	bagi semua							
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	110,42	112,23	106,43	110,31	110,33
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	90,73	96,16	88,2	99,4	99,53
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun	7,38	7,51	7,57	7,58	7,59

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	relevan dan efektif.							
4,5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anakanak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat;	100,7	98,33	N/A	98,6	99,95
			Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat;	83,86	98,41	NA	94,06	102,7
4,6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	96,3	96.81	94.95	94,06	97.06
4,6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan,	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15- 24 tahun dan umur 15-59 tahun.	96,54	96.43	100	100	96.43

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	memiliki kemampuan literasi dan numerasi.							
5,1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	17	3	4	5	6
5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	7 kasus	9 kasus	2 kasus	0 kasus	3 kasus
5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	2 kasus	11 kasus	5 kasus	4 kasus	93 kasus
5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	1 kasus	8 kasus	7 kasus	4 kasus	92 kasus

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	0 kasus	42 kasus	6 kasus	5 kasus	101 kasus
5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	N/A	N/A	56	24,16	24,16
5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	4	4	12	12	10
5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	N/A	24,45	28,76	28,49	17,86

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumendokumen hasil revidi dari konferensikonferensi tersebut							
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	N/A	58,66	61,12	83,05	88,8
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	N/A	86,15	88,12	94,3	89,88
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan	311	311	311	311	311

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)					
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	129	177	209	200	247
7,1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	N/A	83.99	84.39	89.30	89.66
7,1	Pada tahun 2030, menjamin akses	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.							
7,1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7,1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	0	8%	7%	-12%	3%
8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	0	51.979	55.369	48.862	50.316
8,2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat	81,05%	87,25%	88,45%	69,33%	85,44%

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya		pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.					
8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin.	90,45%	91,86%	90,15%	90,48%	90,65%
8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	72,90%	79,81%	80,45%	65,25%	82,75%

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	melalui akses terhadap jasa keuangan.							
	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	88,45%	90,86%	91,15	90,48%	90,65%
8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan lakilaki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.		2,52	2,62	4,22	4,31
8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan lakilaki, termasuk	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	41,25%	53,09%	63,45%	45,45%	61,10%

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.							
8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	0	1,14%	1,16%	1,11%	1,05%
8,10	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	28,150 KM	28,150 KM	28,150 KM	28,150 KM	28,150 KM
9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.							
9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	-	-	0,88	-0,86	0,73
9,c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	2020.							
9,c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10,3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	0	0	0	0	0
10,4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	79,75%	81,60%	82,55%	83,86%	84,30%
1,5	Pada tahun 2030, secara	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.		Indonesia (IRBI).					
1,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.		22547 dokumen	14332 dokumen	42773 dokumen	63419 dokumen
11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.(Rp.)	3.450.154.000	3.857.273.456	1.428.200.000	3.229.096.656	3.456.464.500

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.							
11,6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.		13,79	20,6	24,91	14,79
11,b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.							
12,6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	86,15%	87,35%	87,90%	88,50%	89,75%
13,1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen
13,1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	-	4 orang	0	0	3 orang
15,9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	penganggaran pengurangan kemiskinan.							
16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	3	3	2	3	4
16,2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	1	15	2	1	13
16,2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	9	12	5	4	93
16,2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	2	8	5	4	103
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	94,90%	91,85%	91,16	92,05	89,87

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).		60,13	62,05	63,52	64,35
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan Eprocurement terhadap belanja pengadaan.	52,91	40,12	29,291	26,29	47,78
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	1	1	1	1	1
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/	N/A	47,45	78,84	N/A	85,48

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
			Kabupaten/Kota).					
16,7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	N/A	4	12	12	10
16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	145.377	138.314	131.292	124.052	114.287
16,b	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	0	0	0	0	0
17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	3,77%	3,36%	3,56%	3,41%	3,77%
17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	0,12%	0,12%	0,13%	0,12%	0,14%

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya							
917,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	0,12%	0,12%	0,13%	0,12%	0,14%
17,6	Meningkatkan kerjasama UtaraSelatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile <i>broadband</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	fasilitasi teknologi global							
17,8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet	19,87	29,7	36,16	48,08	59,07
17,17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	0	0	0	0	0
17,17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	0	0	0	0	0

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
17,18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	N/A	N/A	86,62	91,14	100
17,18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	N/A	N/A	83,33	94,29	91,18

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.							
17,18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)	N/A	N/A	N/A	7	9

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
	konteks nasional							
17,19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Tersedia data Lahir (268.719) / Mati (493)	Tersedia data Lahir 395.561 / (Mati) 790	Tersedia data Lahir 393.926 / Mati (1307)	Tersedia data Lahir (406.232) / (Mati) 1992	432.114 / 3633
17,19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	N/A	N/A	86,3	87,22	100

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi Tahun 2021

RPJMD adalah dokumen perencanaan bagi pemerintah daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan kepada RPJM Provinsi dan RPJM Nasional. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan lintas SKPD, serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, maka perlu adanya suatu pengendalian dan evaluasi terkait dengan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, maupun hasil dari RPJMD tersebut.

Pengendalian dan evaluasi menjadi suatu hal yang penting dalam suatu siklus perencanaan pembangunan baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal ini terlihat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yang berisi tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah dimana di dalamnya juga mengamanatkan untuk dilaksanakannya pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan, pelaksanaan, dan hasil dari suatu perencanaan pembangunan. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati sebagai Kepala Daerah melalui Bappeda berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi tersebut.

Salah satu pengendalian dan evaluasi yang wajib untuk dilaksanakan oleh daerah adalah pengendalian dan evaluasi terhadap hasil dari pelaksanaan RPJMD. Hal ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana tingkat capaian dari pelaksanaan RPJMD tersebut dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Berikut tingkat capaian kinerja daerah tahun 2021 yang ditetapkan dalam RPJMD.

Tabel 2.126
Realisasi Kinerja Tujuan dan Kinerja Sasaran Kabupaten Lampung
Tengah Tahun 2021 Berdasarkan RPJMD 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	KET
1	Mewujudkan kondisi aman, tertib dan tentram dalam kehidupan masyarakat	Menurunnya rasio angka kriminalitas	Rasio Angka kriminalitas	Rasio	4,62	3,53	
		Meningkatnya kerukunan hidup dalam bermasyarakat	Persentase Konflik Sosial pertahun	Persen	100	100	
			Jumlah Pebinaan Lembaga Keagamaan	kali	20	20	
2	Terwujudnya kelestarian niali-nilai budaya daerah	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Persentase Situs budaya yang lestari	Persen	90	70	
			Prosentase Sanggar sani budaya yang aktif	Persen	90	80	
3	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas	Meningkatkan konektivitas wilayah secara terpadu	Jalan Kabupaten yang kondisinya baik	Persen	56	61,5	
			Persentase pelayanan angkutan jalan	Persen	57,92	65	
		Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Jaringan irigasi primer yang kondisinya baik	persen	82	83,57	
			Jaringan irigasi sekunder yang kondisinya baik	persen	78,5	78,01	
			Jaringan irigasi tersier yang kondisinya baik	persen	45	43,98	
			Luas sawah yang mendapat pelayanan irigasi	persen	92	91,87	
		Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	90	94,49	
			Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	Persen	4,5	1,4	
			Persentase penduduk berakses air bersih	Persen	90	89,88	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	KET
			Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	90	94,89	
		Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi daerah	Cakupan Layanan Telekomunikasi	persen	85	85	
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya angka kemiskinan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi unggulan	Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	persen	5,34	3,24	
			Pertumbuhan ekonomi sektor industri	persen	6,65	5,95	
			Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	persen	5,61	5,58	
			Prosentase peningkatan volume usaha Koperasi	persen	6	-	
			Prosentase peningkatan volume Usaha UMKM/UKM	persen	10	-	
		Meningkatnya kunjungan wisatawan	Prosentase peningkatan jumlah wisatawan	persen	75,72	33,36	
			Rata-rata lama tinggal	hari	2	1	
		Meningkatnya nilai investasi	Prosentase peningkatan nilai investasi	persen	10	9	
		Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	persen	10,66	11,99	
		Meningkatnya kesempatan kerja	Angka Pengangguran Terbuka	persen	2,1	4,31	
		Meningkatnya jumlah desa cepat berkembang	Persentase jumlah desa dengan kategori cepat berkembang	persen	70	99	
		Meningkatnya pelayanan kepada calon transmigran	Jumlah peserta transmigran yang diberangkatkan	KK	20	-	
		Menjaga ketersediaan pangan masyarakat	Rasio Ketersediaan pangan utama (beras)	Kg/Perkapita	641,7	315,67	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	KET
5	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,52	7,59	
			Lama harapan sekolah	Tahun	12,27	12,93	
			Nilai rata-rata ujian SD	Nilai	77	-	
			Nilai rata-rata ujian SMP	Nilai	80,9	-	
		Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,8	69,87	
			Angka Kematian Bayi	Per 1000	2	6,09	
			Angka Kematian Ibu	Per 100.000	10	206,5	
			Prevalensi Stunting	Persen	10	6,8	
		Meningkatnya pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	persen	0,75	1,59	
		Meningkatnya partisipasi perempuan dan perlindungan anak	Indek Pembangunan Gender	persen	89,56	90,27	
			Prosentase penyelesaian kekerasan terhadap perempuan dan anak	persen	100	100	
		Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Jumlah organisasi pemuda	lembaga	25	25	
			jumlah organisasi olahraga	cabor	25	25	
		6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Indek Kualitas Air	IKA	58
Indek Kualitas Udara	IKU				80	83,46	
Indek Tutupan Lahan	TTL				40	24,48	
Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang	Ketaatan terhadap RTRW			persen	82	73,4	
Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Prosentase desa siaga bencana			persen	3,22	-	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	KET
7	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan Profesional	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Kategori	B	B	
			Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	
		Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Prosentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	persen	9	9	
		Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,93	85,15	

Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Tengah. Di biayai belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021, dengan memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 dievaluasi untuk mengetahui tingkat kinerjanya, permasalahan dan pemecahan masalah, yang direlevansikan dengan (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026. Tingkat capaian kinerja program prioritas RKPD adalah rasio capaian kinerja dan anggaran program prioritas bersangkutan.

Tabel 2.127
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
						Pendidikan		-	4.893.346.047.238			-	959.748.882.991	96,50	907.078.471.560	96,50	94,51	96,50	907.078.471.560	96,50	18,54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	3.635.120.625.357			100	685.356.020.051	100	676.681.072.166	99,25	98,73	100	676.681.072.166	100	18,62			
							Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100				100		100		100		100		100				
							Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100				100		100		100		100		100				
							Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi	85				85		85		85		85		85				
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	25	302.096.000			5	60.419.200	5	33.950.000	100	56,19	5	33.950.000	20	11,24			
						1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	25	302.096.000			5	60.419.200	5	33.950.000	5	56,19	5	33.950.000	20	11,24		
						2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	20	3.422.538.039.005			-	684.507.607.801	0	675.882.791.766	4	98,74	4	675.882.791.766	20	19,75		
						2	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai	30.905	3.409.392.404.005				681.878.480.801		673.411.306.046		98,76	0	673.411.306.046	-	19,75		
						3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	150	12.733.432.500			30	2.546.686.500	30	2.389.747.600	30	93,84	30	2.389.747.600	20	18,77		
						7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran Perangkat daerah yang disusun	20	412.202.500			4	82.440.500	4	81.738.120	4	99,15	4	81.738.120	20	19,83		
						6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	125	410.717.000			25	82.143.400	25	62.513.400	25	76,10	25	62.513.400	20	15,22		
						1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	25	29.250.000			5	5.850.000	5	5.850.000	5	100,00	5	5.850.000	20	20,00		
						3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	40	27.067.000			6	5.413.400	8	5.413.400	8	100,00	8	5.413.400	20	20,00		
						5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	20	224.750.000			4	44.950.000	4	44.950.000	4	100,00	4	44.950.000	20	20,00		
						9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	40	129.650.000			8	25.930.000	1	6.300.000	1	24,30	1	6.300.000	3	4,86		
						7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan	40	1.004.748.250			8	200.949.650	8	197.307.000	8	98,19	8	197.307.000	20	19,64		
						6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40	1.004.748.250			8	200.949.650	8	197.307.000	8	98,19	8	197.307.000	20	19,64		
						8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	1.306.000.000			12	261.200.000	12	261.200.000	12	100,00	12	261.200.000	20	20,00		

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
	1	1	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	1.306.000.000			12	261.200.000	12	261.200.000	12	100,00	12	261.200.000	20	20,00							
	1	1	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	3.065	1.218.500.000			14	243.700.000	14	243.310.000	14	99,84	14	243.310.000	20	19,97							
	1	1	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	15	702.550.000			3	140.510.000	3	140.510.000	3	100,00	3	140.510.000	20	20,00							
	1	1	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50	101.500.000			10	20.300.000	10	20.300.000	10	100,00	10	20.300.000	20	20,00							
	1	1	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.000	414.450.000			1	82.890.000	1	82.500.000	1	99,53	1	82.500.000	0	19,91							
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	64,40	1.135.904.804.531			64	253.111.643.640	64	183.746.111.480	64	72,59	64	183.746.111.480	99	16,18							
						Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	95,80				100		100	-		100		-	104								
						Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	76				60		60	-		60		-	79								
	1	1	15		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah SD Terakreditasi	581	749.079.304.000			531,00	181.281.145.840	531	27.336.760.311	531	15,08	531	27.336.760.311	91	3,65							
						Angka Kelulusan SD/MI (AL)	100				100,00		100	-		100		-	100								
						Angka Putus Sekolah SD dan sederajat	4,22				4,32		4,32	-		4,32		-	102								
	1	1	15	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapat bantuan rehab jamban	80	3.328.500.000			16	665.700.000	16	628.329.890	16	94,39	16	628.329.890	20	18,88							
	1	1	15	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah sekolah yang mendapat bantuan rehab ruang kelas	120	37.565.300.000			24	7.513.060.000	24	6.971.036.477	24	92,79	24	6.971.036.477	20	18,56							
	1	1	15	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah sekolah yang mendapat rehab ruang guru dan ruang kepala sekolah	70	6.074.680.000			14	1.214.936.000	14	1.151.842.714	14	94,81	14	1.151.842.714	20	18,96							
	1	1	15	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapat bantuan rehab jamban	80	1.565.640.000			16	313.128.000	16	299.113.220	16	95,52	16	299.113.220	20	19,10							
	1	1	15	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapat rehab dan pembangunan (6 Sekolah)	30	6.359.046.000			6	1.271.809.200	6	1.199.565.000	6	94,32	6	1.199.565.000	20	18,86							
	1	1	15	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapat bantuan mebel	65	2.925.000.000			13	585.000.000	13	582.342.200	13	99,55	13	582.342.200	20	19,91							
	1	1	15	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah yang mendapat TIK dan Media Pendidikan	255	68.986.695.000			51	13.797.339.000	51	13.675.838.110	51	99,12	51	13.675.838.110	20	19,82							
	1	1	15	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta pelatihan AN	1.500	175.000.000			300	35.000.000	300	31.980.000	300	91,37	300	31.980.000	20	18,27							
	1	1	15	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah peserta yang mengikuti lomba	8.120	3.119.010.500			1.624	623.802.100	1624	612.919.700	1.624	98,26	1624	612.919.700	20	19,65							
	1	1	15	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga yang dibina, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan ANKOR	5.000	948.962.500			1.000	189.792.500	1000	188.367.500	1.000	99,25	1000	188.367.500	20	19,85							
	1	1	15	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang mendapat pembangunan LAB	5	1.925.000.000			1	385.000.000	1	353.895.000	1	91,92	1	353.895.000	20	18,38							
	1	1	15	32	Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang mendapat rehab LAB	5	455.250.000			1	91.050.000	1	86.560.000	1	95,07	1	86.560.000	20	19,01							
	1	1	15	33	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah lokal pengadaan mebel ruangan	390	7.845.000.000			78	1.569.000.000	78	1.554.970.500	78	99,11	78	1.554.970.500	20	19,82							
			1	15	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		-	38.675	607.806.220.000			121.561.244.000	0	121.540.044.000	-	99,98	0	121.540.044.000	-	20,00							
			1	15	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	38.675	806.831.455.500			-	121.561.244.000	0	121.540.044.000	-	99,98	0	121.540.044.000	-	15,06						

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
						5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	1	16	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP Terakreditasi	187	481.604.380.500			162	43.584.259.600	162	7.317.721.379	162	16,79	162	7.317.721.379	87	1,52		
					Angka kelulusan SMP dan Sederajat	100				100		100	-	100		100	-	100			
					Angka Putus Sekolah SMP dan sederajat	17	-			18		18	-	18		18	-	106			
		1	1	16	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5	578.397.000		1	115.679.400	1	109.899.400	1	95,00	1	109.899.400	20	19,00		
		1	1	16	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	10	3.025.457.500		2	605.091.500	2	565.301.034	2	93,42	2	565.301.034	20	18,68		
		1	1	16	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	10	1.598.854.500		2	319.770.900	2	303.873.400	2	95,03	2	303.873.400	20	19,01		
		1	1	16	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	5	821.047.000		1	164.209.400	1	155.824.400	1	94,89	1	155.824.400	20	18,98		
		1	1	16	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	5	915.982.500		1	183.196.500	1	166.408.600	1	90,84	1	166.408.600	20	18,17		
		1	1	16	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	15	7.181.875.000		3	1.436.375.000	3	1.362.203.500	3	94,84	3	1.362.203.500	20	18,97		
		1	1	16	25	Pengadaan Mebel Sekolah	195	6.450.000.000		39	1.290.000.000	39	1.278.581.300	39	99,11	39	1.278.581.300	20	19,82		
		1	1	16	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	35	14.963.900.000		7	2.992.780.000	7	2.986.834.500	7	99,80	7	2.986.834.500	20	19,96		
		1	1	16	44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	5	790.297.000		1	158.059.400	1	150.519.400	1	95,23	1	150.519.400	20	19,05		
		1	1	16	45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	5	141.297.000		1	28.259.400	1	26.819.400	1	94,90	1	26.819.400	20	18,98		
		1	1	16	46	Pemeliharaan Mebel Sekolah	20	1.080.527.500		4	216.105.500	4	211.456.445	4	97,85	4	211.456.445	20	19,57		
		1	16			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	287.679.440.000		-	57.535.888.000	0	57.493.572.000	-	99,93	0	57.493.572.000		19,99		
		1	16	42		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.175	156.377.305.500		-	57.535.888.000	0	57.493.572.000	-	99,93	0	57.493.572.000	-	36,77		
		1	1	17		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	269	73.224.941.000		229,00	22.254.761.100	229	20.791.844.400	229	93,43	229	20.791.844.400	85	28,39		
						Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	64,44			64,34		64,34	-		64,34	-	100				
															0	-					
				17	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		370.895.000		2	74.179.000	2	70.365.000	2	94,86	2	70.365.000		18,97		
				17	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	32	908.500.000		1	181.700.000	1	172.710.000	1	95,05	1	172.710.000	3	19,01		
				17	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	7.875	1.334.735.000		8.500	266.947.000	8500	264.864.500	8.500	99,22	8500	264.864.500	108	19,84		
				17	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	7.875	379.109.000		1.300	75.821.800	1300	75.119.800	1.300	99,07	1300	75.119.800	17	19,81		
				17	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		725.000.000		3	145.000.000	3	144.210.000	3	99,46	3	144.210.000		19,89		
				17	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	4.293	2.624.066.500		4	524.813.300	4	505.975.100	4	96,41	4	505.975.100	0	19,28		
				17	20	Pemeliharaan Mebel Sekolah direhab		35.000.000		1	7.000.000	1	7.000.000	1	100,00	1	7.000.000		20,00		

No	Kode		Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1		18 21	Pengelolaan Dana BOP PAUD		66.847.635.500				19.551.600.000		19.551.600.000		100,00	0	19.551.600.000		29,25					
	1 1 18		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	21,0			11	5.991.477.100	11	1.468.376.340	11	24,51	11	1.468.376.340	52						
				Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	76,0	-		60			-			0	-							
	1 1 18	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Kesetaraan yang mendapat bantuan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	6	2.225.000.000		1	445.000.000	1	425.484.000	1	95,61	1	425.484.000	17	19,12					
	1 1 18	9	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2.600	2.247.640.000		520	449.528.000	520	446.847.890	520	99,40	520	446.847.890	20	19,88					
	1 1 18	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah yang mendapat bantuan alat paraktik dan peraga	-	-		-	-	0	-	-		0	-							
	1 1 18	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	20	374.995.500		4	74.999.100	4	74.944.450	4	99,93	4	74.944.450	20	19,99					
	1 1 18	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan								5.021.950.000			0	5.021.950.000							
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Presentase Guru yang bersertifikasi	68,00	120.639.802.350		58	20.945.056.300	58	20.751.878.614	58	99,08	58	20.751.878.614	85	17,20					
	1 1 21		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Presentase Guru yang bersertifikasi	68,00	120.639.802.350		58	20.945.056.300	58	20.751.878.614	58	99,08	58	20.751.878.614	85	17,20					
	1 1 21	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Guru yang bersertifikasi	41.565	120.639.802.350		8.313	20.945.056.300	8313	20.751.878.614	8.313	99,08	8313	20.751.878.614	20	17,20					
	1 1 20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		60	1.680.815.000			336.163.000		334.806.350		99,60	0	334.806.350	-	19,92					
		20 2	Penyelenggaraan Statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota		60	1.680.815.000			336.163.000				-	0	-	-	-					
		20 2 02.01	Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral		60	1.680.815.000			336.163.000		334.806.350		99,60	0	334.806.350	-	19,92					
			Kesehatan		-	901.162.135.106		-	339.635.942.494	85,70	274.456.741.825	85,70	80,81	85,70	274.456.741.825	85,70	30,46	Dinas Kesehatan				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	612.987.536.942		100	108.709.596.818	100	106.261.058.548	100	97,75	100	106.261.058.548	100	17,33					
				Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100			100		100		100		100		100						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100				100		100		100		100		100			
			Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi	85				85		85		85		85		85			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			85	18.108.000	85	18.068.000	85	99,78	85	18.068.000	85			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50	90.540.000			10	18.108.000	10	18.068.000	10	99,78	10	18.068.000	20	19,96		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	642.839.024.608			-	107.503.739.818	-	105.297.749.079	-	97,95	-	105.297.749.079		16,38		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		639.085.984.908				106.514.330.818		104.324.400.079		97,94		104.324.400.079		16,32		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.875	3.703.974.700			1.375	979.596.000	1.375	963.536.000	1.375	98,36	1.375	963.536.000	20	26,01		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	49.065.000			4	9.813.000	4	9.813.000	4	100,00	4	9.813.000	33	20,00		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	142.500.000			-	28.500.000	41	24.450.000	41	85,79	41	24.450.000		17,16		
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	142.500.000	1 dinkes, 39 puskesmas, 1 Labkesda		1 dinkes, 39 puskesmas, 1 Labkesda	28.500.000	41	24.450.000	41	85,79	41	24.450.000		17,16		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	966.791.000			-	189.458.200	49	166.923.600	49	88,11	49	166.923.600		17,27		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5	42.000.000			1	4.500.000	1	3.416.000	1	75,91	1	3.416.000	20	8,13		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	355.915.000			1	71.183.000	1	70.913.000	1	99,62	1	70.913.000	20	19,92		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5	29.998.500			1	5.999.700	1	5.999.700	1	100,00	1	5.999.700	20	20,00		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5	104.277.500			1	20.855.500	1	20.854.900	1	100,00	1	20.854.900	20	20,00		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	434.600.000			45	86.920.000	45	65.740.000	45	75,63	45	65.740.000	23	15,13		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.715.000.000			-	543.000.000	36	430.136.762	36	79,21	36	430.136.762		15,84		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	2.715.000.000			12	543.000.000	12	430.136.762	12	79,21	12	430.136.762	33	15,84		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.133.950.000			-	426.790.000	-	323.731.107	-	75,85	-	323.731.107		15,17		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60	1.766.300.000			12	353.260.000	12	253.146.107	12	71,66	12	253.146.107	20	14,33		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60	117.650.000			15	23.530.000	15	20.785.000	15	88,33	15	20.785.000	25	17,67		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25	250.000.000			6	50.000.000	6	49.800.000	6	99,60	6	49.800.000	24	19,92		
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		100	257.424.598.164			146.616.100.833		63.170.017.358				63.170.017.358	-	24,54			
				Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	1290	150.000.000			100%			-			-	-	-			
				Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	100	112.000.000			85%			-			-	-	-			
				Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	100	250.000.000			87%			-			-	-	-			
				Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	7.200.000.000			85%			-			-	-	-			
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayu baru lahir	100	275.000.000			65%			-			-	-	-			
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	175.000.000			76%			-			-	-	-			
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	150.000.000			93%			-			-	-	-			
				Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	70.000.000			83%			-			-	-	-			
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	75.000.000			12%			-			-	-	-			
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	70.000.000			74%			-			-	-	-			
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	70.000.000			92%			-			-	-	-			
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	58.000.000			69%			-			-	-	-			
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	130.000.000			79%			-			-	-	-			
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	130.000.000			89%			-			-	-	-			
				Cakupan Kampung/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	130.000.000														
				Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	100															
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RS Rujukan Kabupaten yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar		97.239.104.000			9	16.984.495.000	-	15.195.742.897	-	89,47	-	15.195.742.897	15,63			
				Jumlah RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	9															
				Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun dalam satu tahun																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	3	21.000.000.000			1	4.222.500.000	1	3.723.611.670	1	88,19	1	3.723.611.670	33	17,73		
				Jumlah dokumen Izin Lingkungan yang disusun	5	1.000.000											-	-		
				Jumlah IPAL Puskesmas yang terbangun	3	3.238.104.000											-	-		
			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pustu yang dibangun	7	3.000.000.000			1	2.703.325.000	1	2.595.310.144	1		1	2.595.310.144	1	86,51		
			Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun					7	3.130.000.000	7	2.740.030.370	7	87,54	7	2.740.030.370				
			Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang dikembangkan	5	10.000.000.000			1	285.000.000	1	191.224.755	1	67,10	1	191.224.755	1	1,91		
			Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dikembangkan	10	4.000.000.000			2	2.110.264.000	2	1.840.097.900	2	87,20	2	1.840.097.900	20	46,00		
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dikembangkan					-	211.652.000	-	209.602.000	-	99,03	-	209.602.000				
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang direhab dan dipelihara	75	10.000.000.000			26	194.100.000	26	190.261.984	26	98,02	26	190.261.984	35	1,90		
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Rehabilitasi dan Pelihara	6	6.000.000.000			-	1.822.353.470	-	1.460.472.464	-	80,14	-	1.460.472.464	-	24,34		
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang diRehabilitasi dan Pelihara	6	7.500.000.000			-	2.157.352.530	-	2.105.429.410	-	97,59	-	2.105.429.410	-	28,07		
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dipelihara dan rehabilitasi	6	7.500.000.000			-								-	-		
			Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan		25.000.000.000			-	147.948.000		139.702.200		94,43		139.702.200		0,56		
			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	39	154.035.719.164			-	127.820.232.833	-	75.990.057.853	-	59,45	-	75.990.057.853	-	49,33		
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	60000	5.500.000.000			20.343	1.686.035.000	20.343	997.210.500	20.343	59,15	20.343	997.210.500	34	18,13		
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Kalibrasi yang dilakukan pengadaan dan pemeliharaan	2400	6.000.000.000			650		650	-	650		650	-	27	-		
			Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat, Vaksin yang diadakan	65000	7.500.000.000			15.398	5.896.666.100	15.396	4.206.502.722	15.396	71,34	15.396	4.206.502.722	24	56,09		
			Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Kebutuhan Bahan Habis Pakai yang disediakan	63000	150.000.000			650		650	-	650		650	-	1	-		
			Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	13000	250.000.000			33.413	522.337.900	33.413	279.764.000	33.413		33.413	279.764.000	257	111,91		
			Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dipelihara	32000	120.000.000			750								-	-		
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dipelihara secara berkala	139.040	863.000.564			27.808	528.392.500	27.808	151.179.000	27.808	28,61	27.808	151.179.000	20	17,52		
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang didistribusikan					750											
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	150.090	700.000.000			30.018	494.840.000	-	179.925.000	-	36,36	-	179.925.000	-	25,70		
				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut sesuai standar	586				-			-				-	-			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.212	1.576.825.000			231	315.365.000	231	105.105.000	231	33,33	231	105.105.000	10			
			Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan Penderita Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	147				-			-				-				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100%	4.677.950.000			17	3.659.909.900	17	2.793.863.435	17	76,34	17	2.793.863.435	1.700	59,72		
			Jumlah Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilayani kesehatannya																
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100%	5.745.000.000			100	4.631.360.000	100	3.642.991.551	100	78,66	100	3.642.991.551	10.000	63,41		
			Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	39	2.643.965.100			-	1.889.460.800	-	914.022.700	-	48,37	-	914.022.700	-	34,57		
			Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	39	1.975.642.500			-	1.478.761.100	-	731.584.763	-		-	731.584.763	-	37,03		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	39	20.663.813.000			-	10.550.000	-	10.550.000	-	100,00	-	10.550.000	-	0,05		
			Jumlah Pengelolaan Surveilans Kesehatan	39	853.271.000			-	623.847.500	-	284.357.500	-	45,58	-	284.357.500	-	33,33		
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	39	50.852.000			-	46.840.000	-	46.840.000	-		-	46.840.000	-	92,11		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	39	4.068.400.000			-	3.873.370.800	-	1.815.225.000	-	46,86	-	1.815.225.000	-	44,62		
			Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang dikelola	100%	21.850.000.000			0	21.000.000.000	-	20.543.824.700	-		-	20.543.824.700	-	94,02		
			Jumlah Jaminan Kesehatan Masyarakat																
			Operasional Pelayanan Puskesmas	39	72.690.000.000			-	72.133.632.233	-	38.667.545.382	-	53,61	-	38.667.545.382	-	53,20		
			Jumlah Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5	695.000.000			1	648.278.000	1	605.266.600	1	93,37	1	605.266.600	20	87,09		
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	65	1.732.000.000			5	1.380.586.000	5	14.400.000	5	1,04	5	14.400.000	8	0,83		
			Jumlah Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	-	11.025.600.000			-	138.600.000	-	131.660.000	-	94,99	-	131.660.000		1,19		
			Jumlah Data dan Informasi Kesehatan yang dikelola	5	1.395.000.000			-	130.000.000	-	123.060.000	-	94,66	-	123.060.000	-	8,82		
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5	9.630.600.000			-	8.600.000		8.600.000	100,00			8.600.000	-	0,09		
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	2.051.000.000			-	1.672.773.000	-	1.640.164.600	-	98,05	-	1.640.164.600		79,97		
			Jumlah Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya yang diawasi																
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	55	28.000.000			15	27.650.000	15	15.050.000	15	54,43	15	15.050.000	27	53,75		
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan tata kelolanya	55	43.000.000			15	40.240.000	15	40.240.000	15	100,00	15	40.240.000	27	93,58		
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	55	1.980.000.000			15	1.604.883.000	15	1.584.874.600	15	98,75	15	1.584.874.600	27	80,04		
			Peningkatan Fasilitas Kesehatan yang tingkatkan Mutunya																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	100	58.362.800.000			27.157.148.000		23.806.991.898		87,66		23.806.991.898	-	40,79			
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	30.500.000.000			29.200.000		29.200.000		100,00		29.200.000		0,10			
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan yang dibina dan diawasi	500	30.500.000.000			185	29.200.000	185	29.200.000	185	100,00	185	29.200.000	37	0,10		
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	27.632.800.000			26.935.288.000		23.627.791.898		87,72		23.627.791.898		85,51			
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1.500	27.632.800.000			350	26.935.288.000	350	23.627.791.898	350	87,72	350	23.627.791.898	23	85,51		
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dibina dan diawasi	1.500	-			350								-			
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	230.000.000			192.660.000		150.000.000		77,86		150.000.000		65,22			
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5	230.000.000			192.660.000		150.000.000		77,86		150.000.000		65,22			
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana Kefarmasian (Apotik dan toko obat) dan Usaha Mikro Obat Tradisional sesuai standar yang diawasi	100	417.200.000			397.940.850	100	255.842.500	100	64,29	100	255.842.500	100	61,32			
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan	-	250.000.000			214.020.500		138.289.500		64,62		138.289.500		55,32			
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dilakukan pengawasan	150	150.000.000			32	134.909.500	32	125.578.000	32	93,08	32	125.578.000	21	83,72		
		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	135	100.000.000			35	79.111.000	35	12.711.500	35	16,07	35	12.711.500	26	12,71		
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-	167.200.000			156.799.100		117.553.000		74,97		117.553.000		70,31			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1																								
						Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	54.000.000			-	53.700.000	-	53.250.000	-	99,16	-	53.250.000		98,61			
						Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	54.000.000			-	53.700.000	-	53.250.000	-	99,16	-	53.250.000		98,61			
						Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	4.000.000.000			-	39.981.817.799	-	33.453.403.757	-	83,67	-	33.453.403.757		836,34			
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	200	4.000.000.000			-	39.981.817.799	-	33.453.403.757	-	83,67	-	33.453.403.757	20	836,34			
						Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		200	43.800.000.000				43.302.042.799		12.284.375.391		28,37		12.284.375.391	20	28,05			
						Operasional Pelayanan Puskesmas		200	43.800.000.000			-	43.302.042.799	39	12.284.375.391	39	28,37	39	12.284.375.391	20	28,05			
1	03					Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		-	419.943.774.369				395.126.517.004	79,88	317.754.955.695	86,80	80,42	86,80	317.754.955.695	86,80	75,67	Dinas Bina Marga		
1	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	156.500.911.926			100	9.587.181.154	93,18	8.933.135.235	100	93,18	100	8.933.135.235	100	5,71			
						Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku		100	156.500.911.926															
						Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti		100																
						Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin		100																
						Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik		85																
1	03	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		20	67.647.379			6	42.003.700	4	41.930.200	4	99,83	4	41.930.200	20	61,98			
1	03	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		20	67.647.379			4	42.003.700	4	41.930.200	4	99,83	4	41.930.200	20	61,98			
1	03	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		60	14.511.145.815			12	7.899.076.754	12	7.600.601.560	12	96,22	12	7.600.601.560	20	52,38			
1	03	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		60	12.549.298.711			12	6.919.145.054	12	6.620.669.860	12	95,69	12	6.620.669.860	20	52,76			
1	03	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		60	1.929.041.016			12	959.561.700	12	959.561.700	12	100,00	12	959.561.700	20	49,74			
1	03	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5	7.295.610			1	4.530.000	1	4.530.000	1	100,00	1	4.530.000	20	62,09			
1	03	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		25	18.553.075			5	11.520.000	2	11.520.000	2	100,00	2	11.520.000	8	62,09			
1	03	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		12	6.957.403			2	4.320.000	2	4.320.000	2	100,00	2	4.320.000	16,67	62,09			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
	1	03	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya	54	60.500.000			7	50.000.000	7	24.000.000	7	48,00	7	24.000.000	12,96	39,67			
	1	03	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi	35	60.500.000			7	50.000.000	7	24.000.000	7	48,00	7	24.000.000	20	39,67		
	1	03	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	243	1.173.946.961			-	682.100.700	0	493.779.657	0	72,39	0	493.779.657	0	42,06			
	1	03	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	35	41.176.553			7	25.567.400	7	20.154.180	7	78,83	7	20.154.180	20	48,95		
	1	03	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	75	480.091.743			18	298.099.200	18	297.772.200	18	99,89	18	297.772.200	24	62,02		
	1	03	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	150	17.018.420			26	13.867.100	26	13.765.100	26	99,26	26	13.765.100	17,33	80,88		
	1	03	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	120	119.912.133			25	74.456.000	25	73.546.200	25	98,78	25	73.546.200	20,83	61,33		
	1	03	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	150	515.748.112			36	270.111.000	36	88.541.977	36	32,78	36	88.541.977	24	17,17		
	1	03	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan	4	2.480.980.992						-					-	0	-		
	1	03	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kebutuhan kendaraan dinas perorangan/jabatan yang disediakan	1	870.470.992						-				-	0	-		
	1	03	01	2	07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah kebutuhan alat besar yang disediakan	3	1.610.510.000						-				-	0	-		
	1	03	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	336.000.701			-	227.530.000	12	131.691.620	12	57,88	12	131.691.620	20	39,19			
	1	03	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	296.559.311			12	196.140.000	12	100.426.620	12	51,20	12	100.426.620	20	33,86		
	1	03	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	20	39.441.390			4	31.390.000	4	31.265.000	4	99,60	4	31.265.000	20	79,27		
	1	03	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	31	1.112.363.152			-	686.470.000	-	641.132.198	-	93,40	-	641.132.198	0	57,64			
	1	03	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	95	916.959.974			19,00	569.360.000	19	534.142.198	19	93,81	19	534.142.198	20	58,25		
	1	03	01	2	09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang mendapat pemeliharaan	20	195.403.178			4,00	117.110.000	4	106.990.000	4	91,36	4	106.990.000	20	54,75		
	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Prosentase jalan dalam kondisi Mantab	73,5	261.768.511.263			64	325.034.347.249	61,50	258.579.487.241	61,50	79,55	61,50	258.579.487.241	83,67	98,78			
	1	03	10	2	01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dikelola tahun berkenaan (dalam satu tahun) berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kabupaten	250	261.768.511.263			50	325.034.347.249	97,037	258.579.487.241	97,037	79,55	97,037	258.579.487.241	38,81	98,78			

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
1	03	10	2	01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan	228	8.671.776.431			49	7.559.742.395	78	7.059.653.400	78	93,38	78	7.059.653.400	34,21	81,41			
1	03	10	2	01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang dibangun pada Jalan Kabupaten	5	281.113.957			5	374.549.650	0,843	351.349.030	0,843	93,81	0,843	351.349.030	16,86	124,98			
1	03	10	2	01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan hotmik yang kondisinya baik	500	177.899.249.344			59	263.303.882.674	97,037	201.660.323.943	97,037	76,59	97,037	201.660.323.943	19,41	113,36			
1	03	10	2	01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang di pelihara pada jalan kabupaten	80.000	23.342.354.517			21.700	20.793.765.650	43474	20.526.321.300	43474	98,71	43474	20.526.321.300	54,34	87,94			
1	03	10	2	01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	100	43.935.462.492			24	27.280.465.500	20	23.760.684.425	20	87,10	20	23.760.684.425	20	54,08			
1	03	10	2	01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	250	7.638.554.522			58	5.721.941.380	75	5.221.155.143	75	91,25	75	5.221.155.143	30	68,35			
1	03	11				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisi yang memiliki sertifikat kompetensi	97,78	1.674.351.180			100	296.434.750	42	124.289.150	42	41,93	42	124.289.150	42,95	7,42			
1	03	11	2	01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi di wilayah kabupaten	3060	1.597.132.862			510	197.283.550	60	95.455.100	60	48,38	60	95.455.100	1,96	5,98			
1	03	11	2	01	01	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat	3060	1.597.132.862			510	197.283.550	60	95.455.100	60	48,38	60	95.455.100	1,96	5,98			
1	03	11	2	02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SSH yang disusun	6	77.218.318			1	99.151.200	1	28.834.050	1	29,08	1	28.834.050	16,67	37,34			
1	03	11	2	02	07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah dokumen SSH yang disusun	6	77.218.318			1	99.151.200	1	28.834.050	1	29,08	1	28.834.050	16,67	37,34			
						PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan gedung ber IMB dan memenuhi standar keselamatan	75,42	56.342.417.996				11.152.098.855		10.192.016.627		91,39		10.192.016.627	-	18,09			
1	3	22				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Terbangun dan terpeliharannya bangunan gedung yang memenuhi standar keselamatan dan ramah lingkungan serta Laik fungsi	-	-			-	11.152.098.855	0	10.192.016.627	0	91,39	0	10.192.016.627					
1	3	22				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Yang disusun	-	-			-	5.608.735.355	0	5.036.707.523	0	89,80	0	5.036.707.523					
1	3	22				Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.496.023.500	0	4.189.516.519	0	93,18	0	4.189.516.519					
1	3	22				Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.047.340.000	0	965.792.585	0	92,21	0	965.792.585					
						PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata	75,42	1.232.153.000				134.720.500		128.348.000		95,27		128.348.000	10,42				
1	3	23				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan dan lingkungannya yang tertata dan dan terpelihara, sehingga memenuhi standar keselamatan dan ramah lingkungan serta Laik fungsi	-	-			-	134.720.500	0	128.348.000	0	95,27	0	128.348.000					
1	3	23				Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan	-	-			-	134.720.500	0	128.348.000	0	95,27	0	128.348.000					

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1						PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Prosentase jalan dalam kondisi Mantab	73,5	966.120.989.748			64	323.085.797.599	64	256.720.408.025	64	79,46	64	256.720.408.025	64	26,57		
1	3	24				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dikelola tahun berkenaan (dalam satu tahun) berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kabupaten	50	-			-	323.085.797.599	0	256.720.408.025	0	79,46	0	256.720.408.025	0			
1	3	24			1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan	228	32.400.000.000			38	7.427.382.395	38	6.927.293.400	38	93,27	38	6.927.293.400	16	21,38		
1	3	24			8	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan hotmik yang kondisinya baik	-	611.689.967.178			-	262.298.562.674	0	200.766.363.757	0	76,54	0	200.766.363.757		32,82		
1	3	24			11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang di pelihara pada jalan kabupaten	-	49.391.281.080			-	20.632.125.650	0	20.364.681.300	0	98,70	0	20.364.681.300		41,23		
1	3	24			12	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	-	118.619.031.600			-	27.086.665.500	0	23.566.884.425	0	87,01	0	23.566.884.425		19,87		
1	3	24			23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	-	31.200.000.000			-	5.641.061.380	0	5.095.185.143	0	90,32	0	5.095.185.143		16,33		
						PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisi yang memiliki sertifikat kompetensi	97,78	5.747.676.000			44	264.454.750	44	113.314.050	44	42,85	44	113.314.050	45	1,97		
1	3	25				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi di wilayah kabupaten	54	-			9	189.903.550	9	89.967.550	9	47,38	9	89.967.550	16			
							Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten	3060							-					-	0		
1	3	25			4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat	3060	5.434.200.000			510,00	189.903.550	0	89.967.550	0	47,38	0	89.967.550	0	1,66		
1	3	26				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SSH yang disusun	6	313.476.000			-	74.551.200	1	23.346.500	1	31,32	1	23.346.500	16,67	7,45		
1	3	26			7	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah dokumen SSH yang disusun	6	313.476.000			1	74.551.200	1	23.346.500	1	31,32	1	23.346.500	16,67	7,45		
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	22.568.604.650			100	2.560.254.000	100	19.172.500	100	0,75	100	19.172.500	100	0,08		
							Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100				100			-					-	0		
							Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100				100			10.700.000					10.700.000	0		
							Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	92				85			26.119.000					26.119.000	0		
1	3	1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	24	287.127.775			4	19.760.000	4	19.172.500	4	97,03	4	19.172.500	16,67	6,68		
1	3	1			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	24	287.127.775			4	19.760.000	4	19.172.500	4	97,03	4	19.172.500	16,67	6,68		
1	3	2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	18	108.075.427.724			15	1.224.762.300	15	1.209.976.000	15	98,79	15	1.209.976.000	83,33	1,12		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9=8/7x100%		10=6+8				11=10/5x100%	
																		K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	1	3	2			2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	97.347.890.052			12	1.171.762.300	12	1.161.386.000	12	99,11	12	1.161.386.000	20,00	1,19				
	1	3	2			7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	504.039.758			3	53.000.000	3	48.590.000	3	91,68	3	48.590.000	16,67	9,64				
	1	3	5				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31	326.847.714			4	25.000.000	4	2.000.000	4	8,00	4	2.000.000	12,90	0,61				
	1	3	5			9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	31	326.847.714			4	25.000.000	4	2.000.000	4	8,00	4	2.000.000	12,90	0,61				
	1	3	6				Administrasi Umum Perangkat Daerah	289	2.409.969.940			69	356.822.700	0	72.992.700	0	20,46	0	72.992.700	-	3,03				
	1	3	6			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	64	28.695.941			8	4.089.200	4	4.089.200	4	100,00	4	4.089.200	6,25	14,25				
	1	3	6			3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	120	39.175.722			18	5.497.000	18	5.497.000	18	100,00	18	5.497.000	15,00	14,03				
	1	3	6			5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72	455.995.076			10	64.266.500	10	33.407.500	10	51,98	10	33.407.500	13,89	7,33				
	1	3	6			9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202	1.886.103.200			33	282.970.000	10	29.999.000	10	10,60	10	29.999.000	4,95	1,59				
	1	3	7				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82	2.155.244.079			-	232.029.000	0	197.599.500	0	85,16	0	197.599.500	-	9,17				
	1	3	7			6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61	614.021.311			10	192.129.000	10	191.625.000	10	99,74	10	191.625.000	16,39	31,21				
	1	3	7			9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14	1.044.012.768			1	39.900.000	1	5.974.500	1	14,97	1	5.974.500	7,14	0,57				
	1	3	8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	1.243.505.821			12	185.900.000	12	136.449.745	12	73,40	12	136.449.745	20,00	10,97				
	1	3	8			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	1.243.505.821			12	185.900.000	12	136.449.745	12	73,40	12	136.449.745	20,00	10,97				
	1	3	9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25	5.418.371.649			5	515.980.000	5	484.544.450	5	93,91	5	484.544.450	20,00	8,94				
	1	3	9			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	83.340.000				41.670.000	1	41.189.500	1	98,85	1	41.189.500	100,00	49,42				
	1	3	9			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50	729.040.000				330.680.000	0	311.114.950	0	94,08	0	311.114.950	-	42,67				
	1	3	9			6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	177	306.665.694			25	22.500.000	25	22.500.000	25	100,00	25	22.500.000	14,12	7,34				
	1	3	9			9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16	4.242.855.955			2	121.130.000	2	109.740.000	2	90,60	2	109.740.000	12,50	2,59				
							PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	26,56531819	148.272.413.772			26	59.910.763.851		50.120.956.619	85	83,66	85	50.120.956.619	319,97	33,80				
							persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	32,85				8			-				-	0					

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13			
							persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	30				5		-							0					
							Persentase panjang saluran irigasi tersier kondisi baik	34,76				10		-							0					
1	3	15				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	29.452	26.513.601.144			29.602	2.624.480.000		2.459.909.154		93,73		2.459.909.154	0	9,28					
							Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	114.820				114.820		-							0					
							Panjang Infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	185.243				169.863		-							0					
1	3	15			1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	5	1.556.586.900			3	247.863.000		3	246.196.400		3	99,33		3	246.196.400	60	15,82		
1	3	15			6	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air yang terbangun	19	5.092.701.274			1	351.250.000		1	308.311.387		1	87,78		1	308.311.387	5,26	6,05		
1	3	15			12	Pembangunan Kanal Banjir	Jumlah kanal yang terbangun	12	4.179.689.578			1	365.250.000		1	325.813.267		1	89,20		1	325.813.267	8,33	7,80		
1	3	15			21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung Yang direhabilitasi	24	5.092.701.274			2	544.600.000		2	502.443.000		2	92,26		2	502.443.000	8,33	9,87		
1	3	15			24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Jumlah Tanggul Sungai yang direhabilitasi	17	1.792.735.027			2	223.300.000		2	221.970.000		2	99,40		2	221.970.000	11,76	12,38		
1	3	15			27	Rehabilitasi Kanal Banjir	Jumlah Kanal Banjir yang direhabilitasi	13	1.877.466.672			1	223.600.000		1	222.960.000		1	99,71		1	222.960.000	7,69	11,88		
1	3	15			34	Peningkatan Tanggul Sungai	Jumlah tanggul sungai yang mengalami peningkatan fungsi	17	2.512.987.135			2	323.300.000		2	292.503.100		2	90,47		2	292.503.100	11,76	11,64		
1	3	15			49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air yang terpelihara	25	2.696.489.352			3	345.317.000		3	339.712.000		3	98,38		3	339.712.000	12,00	12,60		
1	3	16				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun	1.388	121.758.812.627			129	35.189.468.290		0	29.703.397.088		0	84,41		0	29.703.397.088	-	24,40		
							Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	5.108	-			1.472		-							-	-				
1	3	16			2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang talud irigasi dan bangunan pelengkap yang dibangun	3.419	2.745.112.568			-	353.986.756		0	313.831.500		0	88,66		0	313.831.500	-	11,43		
1	3	16			14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang talud irigasi yang direhabilitasi	10.583	88.109.339.480			2.295	30.958.288.411		0	25.804.386.134		0	83,35		0	25.804.386.134	-	29,29		
							Panjang Jalan Inspeksi yang direhabilitasi dan dibangun	10.003				1.715		-							-	-				
							Jumlah P3A yang berbadan hukum	25				-		-							-	-				
							Panjang Jaringan Irigasi Kampung yang direhab	14.375				3.550		-							-	-				
1	3	16			15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung yang direhabilitasi	11	4.562.323.258			1	606.856.123		1	477.141.715		1	78,63		1	477.141.715	9,09	10,46		
1	3	16			21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Yang dipelihara	14.964	11.334.293.655			2.200	1.368.100.000		2200	1.361.186.500		2200	99,49		2200	1.361.186.500	14,70	12,01		
1	3	16			22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung yang dinormalisasi	17	6.504.475.093			2	851.266.000		2	836.423.200		2	98,26		2	836.423.200	11,76	12,86		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Jumlah Bendung yang dipelihara	21	-			3			-								
	1	3	16			27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	12	2.764.452.944			2	356.718.875	2	352.851.500	2	98,92	2	352.851.500	16,67	12,76		
	1	3	16			28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	18	5.738.815.630			3	694.252.125	3	557.576.539	3	80,31	3	557.576.539	16,67	9,72		
							Jumlah Dokumen Pengawasan	11				1			-								
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	74	1.724.791.698				297.790.000	10	111.350.000	10	37,39	10	111.350.000	13,51	6,46		
	1	3	31				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	66	1.587.321.698			10	174.840.000	33	9.470.000	33	5,42	33	9.470.000	50,00	0,60		
	1	3	31			1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	66	1.587.321.698			10	174.840.000	10	9.470.000	10	5,42	10	9.470.000	15,15	0,60		
	1	3	32				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	50	137.470.000			-	122.950.000	10	101.880.000	10	82,86	10	101.880.000	20,00	74,11		
	1	3	32			4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	50	137.470.000			-	122.950.000	10	101.880.000	10	82,86	10	101.880.000	20,00	74,11		
			1	4			Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	-	118.711.494.215			-	61.866.453.710		56.401.189.610	-	91,17		56.401.189.610			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	27.947.804.546			-	9.598.500		9.598.500	91,17	100	9.598.500	100	3%			
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	27.947.804.546			-	9.598.500		9.598.500	91,17	100	9.598.500	100	3%			
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	27.947.804.546			12	9.598.500	12 Bulan	9.598.500	12 Bulan	91,17	12	9.598.500	100	3%		
							Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	100	111.125.246.665			-	22.225.049.333	0	20.168.654.818	0		0	20.168.654.818	100	18		
							Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		111.125.246.665			-	22.225.049.333	0	20.168.654.818	0	90,75	0	20.168.654.818	0	18		
							Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	210	6.172.756.849			67	10.590.534.591	67 Paket	9.648.543.706	67 Paket	91,11	67	9.648.543.706	32	156		
							Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	100	44.765.881.000			19	8.953.176.200	19 Paket	8.247.214.381	19 Paket	92,11	19	8.247.214.381	19	18		
							Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	20	5.224.666.000			4	1.306.166.500	4 Lokasi	1.284.440.981	4 Lokasi	98,34	4	1.284.440.981	20	25		
							Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	500	5.500.688.168			200	1.375.172.042	200 Rumah	988.455.750	200 Rumah	71,88	200	988.455.750	40	18		
							Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	100	17.443.905.000				3.488.781.000	0	3.488.781.000	95	100,00	95	3.488.781.000	95	20		
							Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		17.443.905.000			-	3.488.781.000	0	3.488.781.000	0	100,00	0	3.488.781.000		20		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	24	1.035.000.000			8	3.488.781.000	8	3.488.781.000	8	100,00	8	3.488.781.000	33	337		
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	100	8.750.000.000				1.750.000.000	0	1.582.331.880	0	90,42	0	1.582.331.880	-	18		
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	80,00	8.750.000.000			15	1.750.000.000	15	1.582.331.880	15	90,42	15	1.582.331.880	19	18		
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	80	4.603.283.075			15	1.750.000.000	15 Paket	1.582.331.880	15 Paket	90,42	15	1.582.331.880	19	34		
			Program Penataan Bangunan Gedung	100	67.566.598.205				13.513.319.641	0	12.191.487.144	0	90,22	0	12.191.487.144	-	18		
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		67.566.598.205			-	13.513.319.641	0	12.191.487.144	0	90,22	0	12.191.487.144	#DIV/0!	18		
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	18	16.464.356.555			4	6.104.436.141	4 Paket	5.502.860.309	4 Paket	90,15	4	5.502.860.309	22	33		
			Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	9	1.600.023.845			2	6.289.063.500	2 Paket	5.650.354.250	2 Paket	89,84	2	5.650.354.250	22	353		
			Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	15	9.451.917.423			4	1.119.820.000	4 Paket	1.038.272.585	4 Paket	92,72	4	1.038.272.585	27	11		
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	100	818.802.500			-	163.760.500	0	157.388.000	0	96,11	0	157.388.000	-			
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		818.802.500			-	163.760.500	0	157.388.000	0	96,11	0	157.388.000		19		
			Penataan Bangunan dan Lingkungan	25	818.802.500			5	163.760.500	5	157.388.000	5	96,11	5	157.388.000	20	19		
			Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						18.352.446.820		16.558.096.233		90,22		16.558.096.233				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	69.659.420.286				10.024.241.620		9.202.536.468				9.202.536.468	-	13		
			Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100												-			
			Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100												-			
			Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100												-			
			Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85												-			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	1	4	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	-		-		-	247.917.700	0	186.001.300	0		0	186.001.300				
	1	4	1	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	20	1.239.588.500	4	247.917.700	4	186.001.300	4	75,03	4	186.001.300	20	15				
	1	4	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	12	40.313.234.600	2	8.062.646.920	2	7.757.502.536	2	96,22	2	7.757.502.536	17	19				
	1	4	2	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai	60	34.545.800.600	12	6.909.160.120	12	6.607.662.511	12	95,64	12	6.607.662.511	20	19				
	1	4	2	2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	5.637.734.000	12	1.127.546.800	12	1.123.900.025	12	99,68	12	1.123.900.025	20	20				
	1	4	2	7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun Perangkat Daerah yang disusun	12	129.700.000	2	25.940.000	2	25.940.000	2	100,00	2	25.940.000	17	20				
	1	4	5			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya	60	300.000.000	12	60.000.000	12	25.000.000	12	41,67	12	25.000.000	20	8				
	1	4	5	9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi	25	300.000.000	10	60.000.000	5	25.000.000	5	41,67	5	25.000.000	20	8				
	1	4	6			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	2.876.275.000	12	575.255.000	12	339.797.500	12	59,07	12	339.797.500	20	12				
	1	4	6	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	22.500.000	12	4.500.000	12	4.500.000	12	100,00	12	4.500.000	20	20				
	1	4	6	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30	1.125.000.000	8	225.000.000	8	220.659.000	8	98,07	8	220.659.000	27	20				
	1	4	6	5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	5	256.400.000	1	51.280.000	1	48.594.000	1	94,76	1	48.594.000	20	19				
	1	4	6	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	5	1.472.375.000	1	294.475.000	1	66.044.500	1	22,43	1	66.044.500	20	4				
	1	4	7			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan	60	1.425.960.000	12	285.192.000	12	213.950.000	12	75,02	12	213.950.000	20	15				
	1	4	7	2		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25	1.425.960.000	5	285.192.000	5	213.950.000	5	75,02	5	213.950.000	20	15				
	1	4	8			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	25	921.000.000	5	184.200.000	5	151.819.551	5	82,42	5	151.819.551	20	16				
	1	4	8	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	60	1.105.200.000	12	184.200.000	12	151.819.551	12	82,42	12	151.819.551	20	14				
	1	4	9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	60	3.654.180.000	100	609.030.000	100	528.465.581	100		100	528.465.581	167	14				
	1	4	9	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	60	3.394.980.000	18	565.830.000	18	497.750.581	18		18	497.750.581	30	15				
	1	4	9	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	30	259.200.000	5	43.200.000	5	30.715.000	5	71,10	5	30.715.000	17	12				

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
						PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak huni dan Kawasan Kumuh yang ditangani	500	44.512.370.000			110	2.512.370.000	110	2.431.379.000	110	96,78	110	2.431.379.000	22	5			
			1	4	25	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah luasan Permukiman kumuh dan jumlah rumah yang tertangani	500	44.512.370.000			110	2.512.370.000	110	2.431.379.000	110	96,78	110	2.431.379.000	22	5			
			1	4	25	2	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah TTLH yang tertangani	500	44.512.370.000			110	2.512.370.000	110	2.431.379.000	110	96,78	110	2.431.379.000	22	5		
						PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Presentase Komplek Perumahan dengan PSU Memadai	73	59.189.185.200				5.815.835.200	1	4.924.180.760	1	84,67	1	4.924.180.760	1	8			
			1	4	26	1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan permukiman berkualitas dan sehat	40	29.079.176.000			8	5.815.835.200	8	4.924.180.760	8	84,67	8	4.924.180.760	20	17		
			1	4	26	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	40	29.079.176.000			8	5.815.835.200	8	4.924.180.760	8	84,67	8	4.924.180.760	20	17		
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.539.703.929			7	2.363.497.916	7	2.244.852.040	7	94,98	7	2.244.852.040		49			
						Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		100	4.539.703.929			100	2.363.497.916	100	2.244.852.040	100	94,98	100	2.244.852.040	100	49			
						Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang diadakan	550	4.539.703.929			181	2.363.497.916	181	2.244.852.040	181	94,98	181	2.244.852.040	33	49			
						Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang diadakan	667	3.368.400.708			181	1.296.255.035	181	1.183.138.033	181	91,27	181	1.183.138.033	27	35			
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkaan jalan yang dipelihara	5.000	1.171.303.221			1.067	1.067.242.881	1067	1.061.714.008	1067	99,48	1067	1.061.714.008	21	91			
			1	6		Sosial		100	23.374.842.374			-	6.114.159.129	93,25	5.533.684.309	93,25	90,51	93,25	5.533.684.309	93,25	24	Dinas Sosial		
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	17.511.103.572			100	3.795.120.929	100	3.325.963.091	100	87,64	100	3.325.963.091	100	19			
							Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100				100		100		100		100		100				
							Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100				100		100	-	100		100		-	100			
							Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85				85		85	-	85		85		-	85			
			1	6	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100%	130.404.936			10	21.360.000	10	12.420.000	100	58,15	100	12.420.000	100	10			

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			1	6	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	10	42.491.496			2	6.960.000	2	5.100.000	2	73,28	2	5.100.000	20	12		
			1	6	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	10	53.724.880			2	8.800.000	2	6.120.000	2	69,55	2	6.120.000	20	11		
			1	6	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	30	34.188.560			6	5.600.000	2	1.200.000	2	21,43	2	1.200.000	7	4		
			1	6	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	100%	13.239.152.645			-	3.121.186.129	-	2.765.635.588	-	88,61	-	2.765.635.588	-	21		
			1	6	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60	13.239.152.645			12	2.647.830.529	12	2.365.090.288	12	89,32	12	2.365.090.288	20	18		
			1	6	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	2.901.080.637			1	473.355.600	1	400.545.300	1	84,62	1	400.545.300	2	14		
			1	6	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya	100%	345.426.558			-	46.580.000	-	36.968.500	-	79,37	-	36.968.500	-	11		
			1	6	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	258	284.375.558			129	46.580.000	129	36.968.500	129	79,37	129	36.968.500	50	13		
			1	6	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat	10	61.051.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1	6	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	100%	2.349.760.192			-	367.884.800	-	331.851.960	-	90,21	-	331.851.960	-	14		
			1	6	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Ketersediaan komponen instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	45	204.740.634			9	33.536.000	9	28.208.900	9	84,12	9	28.208.900	20	14		
			1	6	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	175	1.158.894.502			17	174.824.000	17	174.026.500	17	99,54	17	174.026.500	10	15		
			1	6	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah ketersediaan bahan dan peralatan kebersihan	100	36.739.271			22	6.017.800	22	4.871.900	22	80,96	22	4.871.900	22	13		
			1	6	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian yang tersedia	45	231.841.173			9	35.975.000	9	32.925.500	9	91,52	9	32.925.500	20	14		
			1	6	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah penyediaan makan dan minum harian yang tersedia	60	717.544.613			12	117.532.000	12	91.819.160	12	78,12	12	91.819.160	20	13		
			1	6	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	100%	549.459.000			-	90.000.000	-	61.299.349	-	-	-	61.299.349	-	11		
			1	6	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Surat Kabar, Internet, Listrik	60	549.459.000			12	90.000.000	12	61.299.349	12	-	12	61.299.349	20	11		
			1	6	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	100%	896.900.241			-	148.110.000	-	117.787.694	-	-	-	117.787.694	-	13		
			1	6	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas yang dipenuhi	56	698.667.644			3	115.640.000	3	94.680.194	3	81,87	3	94.680.194	5	14		
			1	6	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	24	67.888.712			5	11.120.000	5	7.935.000	5	-	5	7.935.000	21	12		
			1	6	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	3	130.343.885			1	21.350.000	1	15.172.500	1	-	1	15.172.500	33	12		
							PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase (%) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang di bentuk dan dibina;	95	6.002.779.917			622.774.400	436.174.500	70,04	436.174.500	-	7						

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	1	6	17		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja sosial profesional dan atau TKS dan atau relawan sosial yang disediakan	12	6.002.779.917			-	622.774.400	-	436.174.500	-		-	436.174.500	-	7		
	1	6	17	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang mengikuti sosialisasi/bimtek/workshop	360	2.189.188.718			-	-	-	-	-		-	-	-	-		
	1	6	17	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Kesos yang mendapat sosialisasi/bimtek/workshop peningkatan kompetensi dan profesionalisme	33	284.641.776			3	24.186.000	3	21.557.500	3	89,13	3	21.557.500	9	8		
	1	6	17	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat yang mendapat sosialisasi/workshop/bimtek	35	3.021.598.283			7	520.365.200	7	356.780.000	7	68,56	7	356.780.000	20	12		
	1	6	17	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah SDM yang mendapat pelatihan	15	507.351.140			3	78.223.200	3	57.837.000	3	73,94	3	57.837.000	20	11		
					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	3.628.907.827				504.468.000		410.622.200		81,40		410.622.200	-	11		
						Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	80							-				-	-			
						Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	30												-			
						Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	80												-			
	1	6	19		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	8200	1.431.822.233			-	130.522.000	-	118.842.200	-	91,05	-	118.842.200	-	8		
	1	6	19	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singah/shelter	195	677.961.041			13	37.475.000	13	87.917.200	13	234,60	13	87.917.200	7	13		
	1	6	19	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	61	186.572.831			80	16.790.000	80	11.900.000	80	70,88	80	11.900.000	131	6		
	1	6	19	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah layanan data dan pengaduan yang disediakan	60	567.288.361			12	76.257.000	12	47.025.000	12	61,67	12	47.025.000	20	8		
	1	6	20		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapat layanan kebutuhan dasar	5508	2.197.085.594			-	373.946.000	-	291.780.000	-	78,03	-	291.780.000	-	13		
	1	6	20	4	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang menerima paket sandang	2200	818.478.000			200	214.276.000	200	140.580.000	200	65,61	200	140.580.000	9	17		
	1	6	20	6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	300	1.160.540.094			50	159.670.000	50	151.200.000	50	94,70	50	151.200.000	17	13		

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			1	6	20	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	12000	218.067.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase (%) PMKS skala Kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	100	6.228.915.878			772.078.800	563.127.200		72,94		563.127.200	-	9				
							Persentase (%) Verifikasi dan validasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional	100																
							Persentase (%) Verifikasi dan Validasi Data Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM), Basis Data Terpadu (BDT) Kabupaten	100																
							Verifikasi dan Validasi data Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Kabupaten	100																
			1	6	22		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	311	6.228.915.878	-	772.078.800	-	563.127.200	-	72,94	-	563.127.200	-	9				
			1	6	22	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pendataan fakir miskin terpadu cakupan Kabupaten yang disusun	60	1.220.939.601	311	161.415.800	311	131.055.200	311	81,19	311	131.055.200	518	11				
			1	6	22	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat	60	5.007.976.277	12	610.663.000	12	432.072.000	12	70,75	12	432.072.000	20	9				
							PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana lam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100	4.960.586.203		419.717.000	343.036.000		81,73		343.036.000	-	7					
							Persentase TAGANA Aktif	100																
			1	6	23		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	100%	1.824.372.391	-	419.717.000	-	343.036.000	-	81,73	-	343.036.000	-	19				
							Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	4144	1.824.372.391															
			1	6	23	1	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	3750	1.558.748.681	750	336.085.000	750	288.293.000	750	-	750	288.293.000	20	18				
			1	6	23	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	1250	265.623.710	50	83.632.000	50	56.743.000	50	-	50	56.743.000	4	21				
							Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan atau relawan sosial yang tersedia																	
			1	5			Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		100	193.918.610.497		36.662.978.225	-	34.071.382.937	97	93	34.071.382.937	96,03	18	Satuan Polisi Pamong Praja				
							Satuan Polisi Pamong Praja			85.764.282.591		20.988.433.149	19.422.767.237	96,03	92,54034	96,03	19.422.767.237	96,03	23					
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	68.810.329.691	100	19.053.158.449	100	17.890.496.037	100	93,90	100	17.890.496.037	100	26				
							Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100			100	100	100	100	100	100	100	100	100					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100				100		100		100		100		100			
			Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85				85		85		85		85		85			
	1 5 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	24	266.846.600			6	38.683.000	6	38.683.000	6	100,00	6	38.683.000	6	14		
	1 5 1 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	32	193.415.000			6	38.683.000	6	38.683.000	6	100,00	6	38.683.000	19	20		
	1 5 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	10	25.632.687.416			2	18.140.377.149	2	17.184.989.413	2	94,73	2	17.184.989.413	20	67		
	1 5 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai	60	5.677.409.500			12	11.913.910.649	12	11.507.579.913	12	96,59	12	11.507.579.913	20	203		
	1 5 2 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah cakupan layanan administrasi keuangan	60	31.132.332.500			12	6.226.466.500	12	5.677.409.500	12	91,18	12	5.677.409.500	20	18		
	1 5 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	1.047.849.000			12	209.569.800	12	142.887.200	12	68,18	12	142.887.200	20	14		
	1 5 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	14.750.000			12	2.950.000	12	2.950.000	12	100,00	12	2.950.000	20	20		
	1 5 6 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah ketersediaan bahan dan peralatan kebersihan	60	25.125.000			12	5.025.000	12	5.000.000	12	99,50	12	5.000.000	20	20		
	1 5 6 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60	185.719.000			12	37.143.800	12	37.071.250	12	99,80	12	37.071.250	20	20		
	1 5 6 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan Kebutuhan Cetak dan Penggandaan	60	179.375.000			12	35.875.000	12	35.851.150	12	99,93	12	35.851.150	20	20		
	1 5 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Perangkat Daerah	60	642.880.000			12	128.576.000	12	62.014.800	12	48,23	12	62.014.800	20	10		
	1 5 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	317.992.500			12	63.598.500	12	42.139.224	12	66,26	12	42.139.224	20	13		
	1 5 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	60	317.992.500			-	63.598.500	-	42.139.224	-	66,26	-	42.139.224	-	13		
	1 5 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	100	3.004.650.000			20	600.930.000	20	481.797.200	20	80,18	20	481.797.200	20	16		
	1 5 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	100	3.004.650.000			20	600.930.000	20	481.797.200	20	80,18	20	481.797.200	20	16		
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	98	16.953.952.900			91	1.935.274.700		1.532.271.200		79,18		1.532.271.200	-	9		
			Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan) (%)	97				86								-			
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	97				86								-			
			Persentase anggota Satlinmas yang terlatih	100				64,3								-			
	1 5 15	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kabupaten yang ditangani	21	7.144.202.500			3	1.428.840.500	3	1.294.436.500	3	90,59	3	1.294.436.500	14	18		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1								5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	9.641				4.665		-									
			1	5	15	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah kegiatan pencegahan trantibum	20	4.055.210.000		4	811.042.000	4	795.332.000	4	98,06	4	795.332.000	20	20		
			1	5	15	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah penindakan atas gangguan trantibum	288	308.000.000		24	61.600.000	22	50.840.000	22	82,53	22	50.840.000	8	17		
					15	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		60	864.600.000		12	172.920.000	12	130.580.000	12	75,51	12	130.580.000	20	15		
			1	5	15	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Satlinmas yang dikukuhkan	18.600	1.528.312.500		4.650	305.662.500	4.650	280.298.500	4.650	91,70	4.650	280.298.500	25	18		
			1	5	15	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah anggota SatpolPP yang mendapat pelatihan	150	388.080.000		30	77.616.000	30	37.386.000	30	48,17	30	37.386.000	20	10		
			1	5	16		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	22	2.532.171.000		3	506.434.200	3	237.834.700	3	46,96	3	237.834.700	14	9		
			1	5	16	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100	2.532.171.000		19	506.434.200	19	237.834.700	19	46,96	19	237.834.700	19	9		
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	94.047.270.456			15.674.545.076	98	14.648.615.700	95,36	93,45	95,36	14.648.615.700	95,36	16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
							Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100						-					-				
							Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100							-				-				
							Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85							-				-				
			1	5	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	24	266.846.600		4	31.141.100	4	31.141.100	4	100,00	4	31.141.100	17	12		
			1	5	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	18	186.846.600		4	31.141.100	4	31.141.100	4	100,00	4	31.141.100	22	17		
			1	5	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	10-	2.641.141.628		2	4.409.807.176	2	1.411.116.300	2	32,00	2	1.411.116.300	20-	53		

No	Kode						Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13				
			1	5	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60	13.922.820.380			12	2.784.564.076	12	2.641.141.628	12	94,85	12	2.641.141.628	20	19						
			1	5	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	72	7.840.354.700			12	1.596.155.700	12	1.382.028.900	12	86,58	12	1.382.028.900	17	18						
			1	5	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran Perangkat daerah yang disusun	24	174.524.400			4	29.087.400	4	29.087.400	4	100,00	4	29.087.400	17	17						
			1	5	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	-	2.464.128.200			-	207.380.100	-	157.008.250	-	75,71	-	157.008.250		6						
			1	5	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	81.276.000			6	8.638.000	6	8.638.000	6	100,00	6	8.638.000	10	11						
			1	5	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	127	54.640.200			16	7.820.100	6	7.820.000	6	100,00	6	7.820.000	5	14						
			1	5	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	-	-			40.000	27.867.000	40.000	27.867.000	40.000	100,00	40.000	27.867.000								
			1	5	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	150	1.203.055.000			12	163.055.000	6	112.683.250	6	69,11	6	112.683.250	4	9						
			1	5	8		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	72	4.917.550.000			12	113.550.000	43	110.150.000	43	97,01	43	110.150.000	60	2						
			1	5	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	108.000.000			3	64.000.000	3	60.600.000	3	94,69	3	60.600.000	4	56						
			1	5	8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	210	247.750.000			40	49.550.000	40	49.550.000	40	100,00	40	49.550.000	19	20						
			1	5	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	114	4.176.910.000			19	481.240.000	19	447.440.000	19	92,98	19	447.440.000	17	11						
			1	5	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	6	291.670.000			1	41.670.000	1	41.670.000	1	100,00	1	41.670.000	17	14						
			1	5	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang mendapat pemeliharaan	108	3.167.290.000			15	439.570.000	15	405.770.000	15	92,31	15	405.770.000	14	13						
							PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Warga Negara yang memperoleh Informasi Rawan Bencana	300	13.098.043.600			60	10.346.231.300	60	9.756.674.622	60	94,30	60	9.756.674.622	20	74	Dinas Pengulangan Bencana					
								Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100				100			-		-		-	-							
								Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100				100			-		-		-	-							
								Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100				100			-		-		-	-							
								Persentase Penanganan Pra Bencana	0,12				0,12			-		-		-	-							
			1	5	19		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yg memperoleh Informasi Rawan Bencana	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-							

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			1	5	19	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Penduduk di Kawasan rawan bencana yang memperoleh Informasi rawan bencana (Perjenis Ancaman)	1050	224.555.500													
			1	5	20		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-	51.649.061.500			-	10.329.812.300	-	9.740.255.622	-	-	-	9.740.255.622		19	
			1	5	20	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPB yang disusun	6	147.104.200			1	19.639.400	1	19.639.400	1	100,00	1	19.639.400	17	13	
			1	5	20	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pasca Bencana yang tertangani	126	70.374.343.223			14	10.229.331.000	14	9.699.913.722	14	94,82	14	9.699.913.722	11	14	
			1	5	20	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) terlatih	2.606	618.090.700			303	80.841.900	303	40.341.900	303	49,90	303	40.341.900	12	7	
			1	5	21		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.500	477.465.400			250	16.419.000	250	16.419.000	250	100,00	250	16.419.000	17	3	
			1	5	21	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	125	477.465.400			2	16.419.000	2	16.419.000	2	100,00	2	16.419.000	2	3	
							PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100	1.009.013.850			100	54.794.400	100	43.903.400	100	80,12	100	43.903.400	100	4	
								Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100				100										
								Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	4				4										
								Waktu tanggap (Respon Time) penanganan kebakaran	15				15										
								Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	0,357				0,071										
			1	5	23		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten	288	2.268.922.350			48	24.383.800	48	14.383.800	48		48	14.383.800	17	1	
								Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana dan prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di Kantor Kecamatan	8	-			2										
								Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana dan prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di setiap desa/kelurahan	15	-			3										
								Jumlah pos pemadam kebakaran di Kecamatan yang terbentuk	16				3										
			1	5	23	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian informasi publik Pencegahan kebakaran	6	170.658.850			1	24.383.800	1	14.383.800	1		1	14.383.800	17	8	

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Tersedianya aparaturnya selama 24 (Jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di Kantor Kecamatan	90	-														
	1	5	26			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten	864	185.000.000			144	30.410.600	144	29.519.600	144		144	29.519.600	17	16		
							Jumlah Kampung yang terbentuk/memiliki relawan pemadam kebakaran	72				12			-					-	-		
	1	5	26	1		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Sosialisasi dan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	6	215.410.600			1	30.410.600	1	29.519.600	1		1	29.519.600	17	14		
	2	1				Tenaga Kerja		100	20.576.821.127			-	4.200.451.885	95,84	4.025.587.611	97,50	95,84	97,50	4.025.587.611	97,50	20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	85	5.220.247.269			100	3.678.201.885	100	3.559.678.311	100	96,78	100	3.559.678.311	100	68	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
							Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100				100		100	-	100		100	-	100	-		
							Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100				100		100	-	100		100	-	100	-		
							Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85				85		85	-	85		85	-	85	-		
	2	1	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	30	68.669.400			16	18.669.400	6	18.669.400	6	100,00	6	18.669.400	20	27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2	1	1	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	20	53.220.000			4	13.220.000	4	13.220.000	4	100,00	4	13.220.000	20	25		
	2	1	1	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60	15.449.400			12	5.449.400	12	5.449.400	12	100,00	12	5.449.400	20	35		
	2	1	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	90	4.464.090.869			2	3.171.342.185	2	3.100.739.521	2	97,77	2	3.100.739.521	2	69	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2	10	2	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	3.993.950.569			12	2.841.201.885	12	2.771.830.221	12	97,56	12	2.771.830.221	20	69		
	2	1	2	2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40	470.140.300			12	330.140.300	12	328.909.300	12	99,63	12	328.909.300	30	70		
	2	1	5			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya	75	123.000.000			39	43.000.000	39	36.708.000	39	85,37	39	36.708.000	52	30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2	1	5	2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40	58.000.000			36	18.000.000	36	15.708.000	36	87,27	36	15.708.000	90	27		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13				
			2	1	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	65.000.000			3	25.000.000	3	21.000.000	3	84,00	3	21.000.000	8	32					
			2	1	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum perangkat daerah	60	376.981.500			12	280.449.800	12	266.736.760	12	95,11	12	266.736.760	20	71	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
			2	1	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	116.000.000			7	106.000.000	7	92.838.000	7	87,58	7	92.838.000	28	80					
			2	1	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	87	12.000.000			12	3.703.300	12	3.703.300	12	100,00	12	3.703.300	14	31					
			2	1	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.000	75.000.000			200	13.765.000	200	13.765.000	200	100,00	200	13.765.000	20	18					
			2	1	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	200	64.003.500			40	54.003.500	40	54.003.500	40	100,00	40	54.003.500	20	84					
			2	1	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	109.978.000			24	102.978.000	24	102.426.960	24	99,46	24	102.426.960	24	93					
			2	1	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	90	42.420.500			52	42.420.500	16	22.623.880	16	53,33	16	22.623.880	18	53	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
			2	1	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	500	2.310.000			40	2.310.000	40	2.302.000	40	99,65	40	2.302.000	8	100					
			2	1	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	40	40.110.500			12	40.110.500	12	20.321.880	12	50,66	12	20.321.880	30	51					
			2	1	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	98	206.320.000			28	122.320.000	28	114.200.750	28	93,36	28	114.200.750	29	55					
			2	1	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	93.670.000			2	71.670.000	2	68.286.250	2	95,28	2	68.286.250	20	73					
			2	1	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65	34.500.000			18	12.500.000	18	12.420.000	18	99,36	18	12.420.000	28	36					
			2	1	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	78.150.000			1	38.150.000	1	33.494.500	1	87,80	1	33.494.500	20	43					
							PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100	92.000.000			57	140.750.000	57	140.750.000	57	100,00	57	140.750.000	57	153	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
								Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	80	42.020.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
								Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	50	135.446.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
								Persentase LPK yang terakreditasi	40	135.446.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
								Persentase LPK yang memiliki perizinan	96	80.804.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
								Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	80	49.910.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
								Jumlah Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	30	30.894.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			2	1	16		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Lulusan bersertifikat kompetensi	160	510.000.000			35	98.730.000	35	98.730.000	35	100,00	35	98.730.000	22	19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	500	181.250.000			100	36.250.000	100		100	-	100	33.500.000	20	18		
			2	1	16	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	500	510.000.000			35	98.730.000	35	98.730.000	35	100,00	35	98.730.000	7	19		
			2	1	17		Lembaga pelatihan kerja swasta yang mendapat pembinaan (Lembaga)	60	1.930.000.000			22	42.020.000	22	48.000.000	22	114,23	22	48.000.000	37	2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			2	1	17	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	60	1.930.000.000			22	42.020.000	22	42.020.000	22	100,00	22	42.020.000	37	2		
							PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	500	1.230.000.000			100	240.750.000	100	227.766.650	100	94,61	100	227.766.650	20	19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			2	1	23		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	46	700.000.000			35	135.446.000	35	123.999.650	35	91,55	35	123.999.650	76	18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
							Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	180	-										-	-			
							Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar di Kabupaten	21.720	-										-	-			
			2	1	23	3	Job Fair/Bursa Kerja	150	700.000.000			35	135.446.000	35	123.999.650	35	91,55	35	123.999.650	23	18		
			2	1	24		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	600	530.000.000			120	105.304.000	120	103.767.000	120	98,54	120	103.767.000	20	20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			2	1	24	1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	500	270.000.000			100	49.910.000	100	48.604.000	100	97,38	100	48.604.000	20	18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
							Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau Calon Tenaga Kerja (CTKI) yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	600	-			100							-	-			
							Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau Calon Tenaga Kerja (CTKI) yang mendapatkan fasilitas kepulangan	600	-			100							-	-			
			2	1	24	3	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	100	260.000.000			20	55.394.000	20	55.163.000	20	99,58	20	55.163.000	20	21		
							PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	85	230.750.000			115	140.750.000	115	140.750.000	115	100,00	115	140.750.000	135	61	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
							Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	26											-	-			
							Persentase Perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	78											-	-			
							Persentase Perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	88											-	-			
							Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketaqakerjaan	88											-	-			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			Persentase penyelesaian hubungan industrial	100															
	2 1 26	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan (PP)	320	250.000.000			70	48.000.000	70	48.000.000	70	100,00	70	48.000.000	22	19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah Perusahaan yang telah terdaftar PKB																
			Jumlah Perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah																
			Jumlah Perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan																
	2 1 26 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	320	250.000.000			70	48.000.000	70	48.000.000	70	100,00	70	48.000.000	22	19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2 1 27	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus perselisihan perusahaan	180	410.000.000			45	92.750.000	45	92.750.000	45	100,00	45	92.750.000	25	23	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Jumlah Perusahaan yang berselisih	52	-			12											
			Jumlah Mogok kerja	-	-			-											
			Jumlah penutupan perusahaan	-	-			-											
			Jumlah perselisihan kepentingan	1	-														
			Jumlah perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	-	-			-											
			Jumlah perselisihan PHK	51	-														
	2 1 27 1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	90	240.000.000			15	48.000.000	15	48.000.000	15	100,00	15	48.000.000	17	20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2 1 27 2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	90	170.000.000			30	44.750.000	30	44.750.000	30	100,00	30	44.750.000	33	26	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2 3	Pangan		100	30.238.010.272			100	6.451.437.551	94,68	5.959.934.216	94,68	92,38	94,68	5.959.934.216	95	20	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	6.167.500.146			100	3.944.732.551	79	3.130.207.608	82	79,35	79	3.130.207.608	79	51	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100				100										DINAS KETAHANAN PANGAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100				100										DINAS KETAHANAN PANGAN		
			Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85				85										DINAS KETAHANAN PANGAN		
	2	3	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25	185.000.000	-	-	5	35.500.000	5	30.840.000	100,00	86,87	-	30.840.000	-	17	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	3	1	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	56.000.000	-	-	3	11.500.000	3	7.600.000	100,00	66,09	3	7.600.000	20	14	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	3	1	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32	122.000.000	-	-	6	24.000.000	6	23.240.000	100,00	96,83	6	23.240.000	19	19	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	3	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60	16.950.000.000	-	-	12	3.300.057.551	12	3.156.381.808	100,00	95,65	-	3.156.381.808	-	19	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	3	2	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	155	15.500.000.000			32	3.012.049.551	32	2.874.228.808	100,00	95,42	32	2.874.228.808	21	19		
	2	3	2	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	1.450.000.000	-	-	12	288.008.000	12	282.153.000	100,00	97,97	12	282.153.000	17	19	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	3	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	2.721.814.000	-	-	100	332.395.000	91	288.684.820	91,00	86,85	-	288.684.820	-	11	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	3	6	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	83	57.500.000	-	-	10	6.500.000	10	5.715.000	100,00	87,92	10	5.715.000	12	10	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	3	6	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	821.000.000	-	-	5	70.000.000	5	61.981.370	100,00	88,54	5	61.981.370	8	8	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	3	6	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60	34.811.700	-	-	12	3.500.000	1	1.000.800	8,33	28,59	1	1.000.800	2	3	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	3	6	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	340	918.094.300	-	-	50	141.000.000	50	140.935.650	100,00	99,95	50	140.935.650	15	15	DINAS KETAHANAN PANGAN	
					305															
	2	3	6	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000	170.030.000	-	-	1.000	19.000.000	800	13.266.000	80,00	69,82	800	13.266.000	16	8	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	3	6	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270	720.378.000	-	-	50	92.395.000	50	65.786.000	100,00	71,20	50	65.786.000	19	9	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	3	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72	710.400.000	-	-	3	103.500.000	3	83.318.588	100,00	80,50	3	83.318.588	4	12	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	3	8	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15	710.400.000	-	-	3	103.500.000	3	83.318.588	100,00	80,50	3	83.318.588	20	12	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	3	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237	1.603.640.000	-	-	26	173.280.000	26	168.473.000	100,00	97,23	26	168.473.000	11	11	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	3	9	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50	821.380.000	-	-	10	110.340.000	10	105.693.000	100,00	95,79	10	105.693.000	20	13	DINAS KETAHANAN PANGAN	

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			2	3	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang dilakukan perbaikan	158	163.380.000	-	-	20	12.970.000	20	12.830.000	100,00	98,92	20	12.830.000	13	8	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			2	3	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/Kantor yang dipelihara	6	543.880.000	-	-	1	49.970.000	1	49.950.000	100,00	99,96	1	49.950.000	17	9	DINAS KETAHANAN PANGAN	
							PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Desa Dengan Kemandirian Pangan	100	5.629.185.449			94	754.834.000	92	694.533.500	97,88	92,01	92	694.533.500	92	12	DINAS KETAHANAN PANGAN	
								Persentase Kampung yang telah memiliki lumbung pangan masyarakat	82				34											
			2	3	15		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan yang disediakan	47	49.252.551.150	-	-	5	754.834.000	5	694.533.500	100,00	92,01	5	694.533.500	11	1	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			2	3	15	1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung Pangan yang dibangun	47	46.500.000.000	-	-	1	500.000.000	1	498.000.000	100,00	99,60	1	498.000.000	2	1	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			2	3	15	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	50	139.410.000	-	-	10	139.410.000	10	95.852.000	100,00	68,76	10	95.852.000	20	69	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			2	3	15	5	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	45	115.424.000	-	-	10	115.424.000	10	100.681.500	100,00	87,23	10	100.681.500	22	87	DINAS KETAHANAN PANGAN	
							PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rasio cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan (beras)	100,00	11.435.795.177			31,00	1.317.705.000	94	1.242.145.600	96,00	94,27	96	1.242.145.600	96	11	DINAS KETAHANAN PANGAN	
								Persentase ketersediaan pangan	100,00				31,00											
								Konsumsi Beras (Kg/Kapita/Tahun)	105,40				108,09											
								Konsumsi Kelompok Pangan Buah dan Sayur (Kg/Kapita/Tahun)	88,04				76,99											
								Konsumsi Kelompok Pangan Hewani (Kg/Kapita/Tahun)	54,17				50,38											
			2	3	16		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah	400	7.523.245.350	-	-	85	446.550.000	84	413.060.000	84,00	92,50	84	413.060.000	21	5	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			2	3	16	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah informasi Harga Pangan dan NBM yang tersedia	6	1.106.830.000	-	-												DINAS KETAHANAN PANGAN
			2	3	16	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	jumlah pangan sumber daya lokal yang disediakan	61	1.612.140.600	-	-	7	100.000.000	7	86.280.000	100,00	86,28	7	86.280.000	11	5	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			2	3	16	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	42	447.110.000	-	-	5	61.000.000	5	54.110.000	100,00	88,70	5	54.110.000	12	12	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			2	3	16	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Lokasi daerah yang dipantau	90	520.920.000	-	-	15	75.000.000	15	68.470.000	100,00	91,29	15	68.470.000	17	13	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			2	3	16	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	jumlah peserta yang mengikuti	260	859.499.750														DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13		
			2	3	16	6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah lembaga pangan dan Toko Tani Indonesia yang dibina	33	2.976.745.000	-	-	10	210.550.000	10	204.200.000	100,00	96,98	10	204.200.000	30	7	DINAS KETAHANAN PANGAN			
			2	3	17		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah CCP (Cadangan Pangan Pemerintah) yang disediakan (Beras)	50	4.984.764.000	-	-	20	285.155.000	20	256.025.000	99,00	89,78	20	256.025.000	40	5	DINAS KETAHANAN PANGAN			
			2	3	17	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan evaluasi serta monitoring	64	884.962.200	-	-	14	80.500.000	14	71.334.500	100,00	88,61	14	71.334.500	22	8	DINAS KETAHANAN PANGAN			
			2	3	17	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah rencana kebutuhan pangan lokal yang disusun	84	1.634.446.800	-	-	1	91.000.000	1	88.582.500	100,00	97,34	1	88.582.500	1	5	DINAS KETAHANAN PANGAN			
			2	3	17	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan yang diadakan	185	2.465.355.000	-	-	15	113.655.000	15	96.108.000	100,00	84,56	15	96.108.000	8	4	DINAS KETAHANAN PANGAN			
			2	3	18		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Persentase penentuan Harga Minimum Daerah pangan Lokal	71,43	1.699.670.000	-	-	28,00	197.000.000	28	185.260.000	95,00	94,04	28	185.260.000	39	11	DINAS KETAHANAN PANGAN			
			2	3	18	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah pengendalian dan pelaksanaan pasar murah	75	1.699.670.000	-	-	7	197.000.000	7	185.260.000	100,00	94,04	7	185.260.000	9	11	DINAS KETAHANAN PANGAN			
			2	3	19		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase pelaksanaan Target Konsumsi pangan perkapita pertahun	95	6.211.737.500	-	-	85	389.000.000	83	387.800.600	99,70	99,69	83	387.800.600	87	6	DINAS KETAHANAN PANGAN			
			2	3	19	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah data penetapan target konsumsi pangan perkapita pertahun yang disusun	70	1.396.947.500	a	-	15	45.000.000	15	45.000.000	100,00	100,00	15	45.000.000	21	3	DINAS KETAHANAN PANGAN			
			2	3	19	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kecamatan yang dibina	22	1.540.000.000	-	-	2	140.000.000	2	140.000.000	100,00	100,00	2	140.000.000	9	9	DINAS KETAHANAN PANGAN			
			2	3	19	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi konsumsi perkapita pertahun	70	3.274.790.000	-	-	2	204.000.000	2	202.800.600	100,00	99,41	2	202.800.600	3	6	DINAS KETAHANAN PANGAN			
							PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Rawan Pangan	43	2.452.849.500	-	-	25	242.666.000	23,50	179.304.500	94,00	73,89	24	179.304.500	55	7	DINAS KETAHANAN PANGAN			
			2	3	21		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan yang disusun	68	1.884.164.500	-	-	28	242.666.000	28	179.304.500	75,00	73,89	28	179.304.500	41	10	DINAS KETAHANAN PANGAN			
			2	3	21	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	1.709.498.500	-	-	8	68.000.000	8	37.650.000	100,00	55,37	8	37.650.000	13	2	DINAS KETAHANAN PANGAN			
			2	3	21	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang mendapatkan bantuan penyaluran rawan pangan	50	900.000.000	-	-	10	174.666.000	10	141.654.500	100,00	81,10	10	141.654.500	20	16	DINAS KETAHANAN PANGAN			
							PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	100	4.552.680.000	-	-	90	191.500.000	74	141.561.500	82,14	73,92	74	141.561.500	74	3	DINAS KETAHANAN PANGAN			
			2	3	22		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pangan segar yang diawasi	54	4.552.680.000	-	-	9	191.500.000	9	141.561.500	100,00	73,92	9	141.561.500	17	3	DINAS KETAHANAN PANGAN			
								Jumlah Laporan Kajian Hasil Pengawasan Keamanan pangan segar yang disusun	6	4.552.680.000	-	-	1													

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			2	3	22	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	65	2.181.070.000	-	-	4	58.000.000	4	44.360.000	100,00	76,48	4	44.360.000	6	2	DINAS KETAHANAN PANGAN		
			2	3	22	2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	72	634.000.000	-	-	8	70.000.000	8	46.601.500	100,00	66,57	8	46.601.500	11	7	DINAS KETAHANAN PANGAN		
			2	3	22	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	67	1.737.610.000	-	-	8	63.500.000	8	50.600.000	100,00	79,69	8	50.600.000	12	3	DINAS KETAHANAN PANGAN		
Rata-rata capaian kinerja (%)												6.451.437.551						92,38	5.959.934.216					
			2	2			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	100	22.414.539.542			-	4.875.792.727	95,63	4.573.867.064	95,63	93,81	95,63	4.573.867.064	96	20	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	4.875.792.727			100	3.039.792.327	100	2.816.568.061	100	92,66	100	2.816.568.061		58			
							Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100				100		100	-	100		100	-	100	-			
							Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100				100		100	-	100		100	-	100	-			
							Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85				85		85	-	85		85	-	85	-			
			2	2	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	160.000.000			6	33.431.000	6	33.431.000	6	100,00	6	33.431.000	20	21			
			2	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	150.000.000			4	30.431.000	4	30.431.000	4	100,00	4	30.431.000	20	20			
			2	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	20.000.000			2	3.000.000	2	3.000.000	2	100,00	2	3.000.000	20	15			
			2	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10	13.104.770.135			2	2.620.954.027	2	2.441.983.328	2	93,17	2	2.441.983.328	20	19			
			2	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	125	11.539.970.135			24	2.307.994.027	24	2.147.188.828	24	93,03	24	2.147.188.828	19	19			
			2	2	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	1.564.800.000			12	312.960.000	12	294.794.500	12	94,20	12	294.794.500	20	19			
			2	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	708.300.000			12	143.090.000	12	119.005.338	12	83,17	12	119.005.338	20	17			
			2	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	14.300.000			12	3.345.000	12	3.344.000	12	99,97	12	3.344.000	20	23			
			2	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	75.000.000			12	14.300.000	12	14.300.000	12	100,00	12	14.300.000	20	19			
			2	2	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60	45.000.000			12	9.025.000	12	9.013.600	12	99,87	12	9.013.600	20	20			
			2	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60	105.000.000			12	21.842.000	12	21.792.500	12	99,77	12	21.792.500	20	21			
			2	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	149.500.000			12	28.945.000	12	28.824.000	12	99,58	12	28.824.000	12	19			

No	Kode				Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
							5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			2	2	6	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Makan dan Minum Staf	60	74.500.000			12	14.400.000	12	14.400.000	12	100,00	12	14.400.000	20	19		
			2	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya penyelenggaraan rapat konsultasi SKPD	60	245.000.000			12	51.233.000	12	100	12	0,00	12	27.331.238	20	11		
			2	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	100	204.500.000			100	99.528.300	-	95.167.995	-	95,62	-	95.167.995	-	47		
			2	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terpenuhinya sarana Kantor	100	124.500.000			100	24.000.000	90	20.134.895	90	83,90	90	20.134.895	90	16		
			2	2	8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpenuhinya sarana Kantor	100	80.000.000			100	16.240.000	98	15.780.000	98	97,17	98	15.780.000	98	20		
			2	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terpenuhinya peralatan kantor	100	300.000.000			100	59.288.300	99	59.253.100	99	99,94	99	59.253.100	99	20		
			2	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	30	680.000.000			10	142.789.000	10	126.980.400	10	88,93	10	126.980.400	33	19		
			2	2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpenuhinya pemeliharaan kendaraan Dinas	25	600.000.000			5	127.010.000	5	113.201.400	5	89,13	5	113.201.400	20	19		
			2	2	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpenuhinya perlengkapan kantor	25	80.000.000			5	15.779.000	5	13.779.000	5	87,32	5	13.779.000	20	17		
							PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	5	400.000.000			1	96.650.000	1	96.650.000	1	100,00	1	96.650.000	20	24		
			2	2	15		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten yang telah dilatih PUG	5	400.000.000			1	96.650.000	1	96.650.000	1	100,00	1	96.650.000	20	24		
								Jumlah program PUG pada Perangkat Daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten																
								Jumlah Pokja PUG Perangkat Daerah yang dibina dalam pelaksanaan PPRG																
			2	2	15	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG		160	400.000.000			35	96.650.000	35	96.650.000	35	100,00	35	96.650.000	22	24		
							PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan perempuan termasuk TPPO (Per 100.000 penduduk perempuan)	100	750.000.000			100	897.000.000	100	221.994.435	100	24,75	100	221.994.435	100	30		
								Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100															
								Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100															
								Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pembinaan dan penguatan	100															

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2			3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			2 2 18	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada Perangkat Daerah yang sudah dievaluasi	320	750.000.000				146.182.500	-	146.181.810	-	100,00	-	146.181.810	20	19			
			2 2 18 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapat Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	320	350.000.000			60	70.365.000	60	70.364.310	60	100,00	60	70.364.310	19	20			
			2 2 18 2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya Hak reproduksi Perempuan	320	400.000.000			60	75.817.500	60	75.817.500	60	100,00	60	75.817.500	19	19			
			2 2 20	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0					750.817.500	60	75.812.625	60	10,10	60	75.812.625	20	19			
			2 2 20 4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		0				60	750.817.500	60	750.610.625	60	99,97	60	75.812.625	20	19			
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang	100	2.100.000.000			100	395.550.000	99	395.550.000	99	100,00	99	395.550.000	99	19			
					Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar	100	200.000.000			100	45.398.000	40	14.308.000	40	31,52	40	14.308.000	40	7			
			2 2 21	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0				100	395.550.000	100	395.550.000	100	100,00	100	395.550.000	20	19			
			2 21 2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			150	850.000.000			30	170.550.000	30	170.550.000	30	100,00	30	170.550.000	20	20		
			2 2 21 3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		0		520	1.250.000.000		100	225.000.000	100	225.000.000	100	100,00	100	225.000.000	19	18		
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun data terpilah	100	500.000.000			100	49.800.000	100	8.950.000	95	17,97	95	8.950.000	95	2			
			2 2 24	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data terpilah yang disusun	200	500.000.000			50	49.800.000	50	8.950.000	50	17,97	50	8.950.000	25	2			
			2 2 24 2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Data gender dan Anak	200	500.000.000			50	49.800.000	50	48.010.800	50	96,41	50	48.010.800	25	10			
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan hak dasar anak					100	222.000.100	100	143.752.894	100	64,75	100	143.752.894					

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar (Forum anak Kab/Kota, Forum anak Kec, kelurahan, TESA, PISA)																
			2	2	25		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100	900.000.000			100	176.602.100	100	124.524.894	100	70,51	100	124.524.894	100	14		
			2	2	25	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100	900.000.000			100	176.602.100	100	124.524.894	100	70,51	100	124.524.894	100	14		
			2	2	26		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	311	230.000.000			80	45.398.000	80	19.228.000	60	42,35	60	19.228.000	19	8		
			2	2	26	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	311	230.000.000			80	45.398.000	80	19.228.000	60	42,35	60	19.228.000	19	8		
							PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	100	850.000.300			100	175.000.300	100	174.348.050	100	99,63	100	174.348.050	100	21		
							Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100															
							Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100															
							Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang memiliki sarana pendukung sesuai dengan standar																
			2	2	28		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	750	850.000.300			80	175.000.300	80	174.348.050	80	99,63	80	174.348.050	11	21		
			2	2	28	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	750	850.000.300			80	175.000.300	80	174.348.050	80	99,63	80	174.348.050	11	21		
			2	4			Pertanahan	100	3.412.102.675			-	3.257.893.000	4,94	160.965.000	5	4,94	5	160.965.000	5	5		
							PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	75	3.412.102.675			50	3.257.893.000	50	160.965.000	5	4,94	5	160.965.000	7	5		
			2	4	18		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Mediasi, Perhyesarian	17	409.781.775			2	57.893.000	2	31.265.000	2	54,00	2	31.265.000	12	8		
			2	4	18	2	Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	17	409.781.775			2	57.893.000	2	31.265.000	2	54,00	2	31.265.000	12	8		

No	Kode				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2 4 19				Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya	100	3.002.320.900			100	3.200.000.000	45	129.700.000	45	4,05	45	129.700.000	45	4		
	2 4 19 2				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	100	3.002.320.900			100	3.200.000.000	45	129.700.000	45	4,05	45	129.700.000	45	4		
	2 5				Lingkungan Hidup	-	100	49.533.750.000			-	10.036.811.153	88	8.397.115.052	88	83,66	88	8.397.115.052	88	17	Dinas Lingkungan Hidup	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	39.616.000.000			100	7.412.348.853	100	7.157.511.296	100	96,56	100	7.157.511.296	100	18		
						Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100				100		100		100		100		100			
						Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100				100		100		100		100		100			
						Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85				85		100	-	100		100	-	85	-		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (poin)	72	120.000.000			62	15.000.000	62	15.000.000	62	100	62	15.000.000	86	13		
	2 3 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyusunan laporan	24	120.000.000			4	15.000.000	4	15.000.000	4	100	4	15.000.000	17	13		
	2 5 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Administrasi Keuangan OPD(%)	92	26.250.000.000			82	5.894.884.853	82	5.821.940.876	82	99	82	5.821.940.876	89	22		
	2 5 2				1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	210	9.450.000.000			41	3.514.408.853	41	3.450.266.456	41	98	41	3.450.266.456	20	37		
	2 5 2				2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN dan Non ASN yang difasilitasi	1.003	16.800.000.000			165	2.365.476.000	165	2.356.674.420	165	100	165	2.356.674.420	16	14		
	2 5 2				7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan penyusunan laporan	24	125.000.000			4	15.000.000	4	15.000.000	4	100	4	15.000.000	17	12		
	2 5 5				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya	54	60.000.000			4	8.000.000	4	8.000.000	4	100	4	8.000.000	7	13		
	2 5 5				9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparaturnya yang mengikuti pelatihan	12	60.000.000			2	8.000.000	2	8.000.000	2	100	2	8.000.000	17	13		
	2 5 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	340	1.615.000.000			80	272.046.000	80	225.575.628	80	82,92	80	225.575.628	24	14		
	2 5 6				1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	17.750.000			10	2.702.800	10	2.520.400	10	93,25	10	2.520.400	17	14		

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			2	5	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	298	298.000.000			48	48.841.200	48	41.539.990	48	85,05	48	41.539.990	16	14		
			2	5	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah SDM Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor setiap Bulan yang terpenuhi	108	32.200.000			18	5.115.000	18	5.114.200	18	100	18	5.114.200	17	16		
			2	5	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ketersediaan kebutuhan alat tulis kantor	18	89.750.000			3	12.325.000	3	12.120.515	3	98,34	3	12.120.515	17	14		
			2	5	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan Kebutuhan Cetak dan Penggandaan	66	74.800.000			11	12.318.000	11	12.198.500	11	99,03	11	12.198.500	17	16		
			2	5	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen yang disusun	195	174.500.000			30	24.240.000	30	24.240.000	30	100,00	30	24.240.000	15	14		
			2	5	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan dan minum peserta rapat/tamu (bulan)	2.160	108.000.000			360	16.500.000	160	16.185.000	160	98,09	160	16.185.000	7	15		
			2	5	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kai)	600	820.000.000			100	150.004.000	100	111.657.023	100	74,44	100	111.657.023	17	14		
			2	5	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan	107	1.881.000.000			17	42.550.000	17	42.403.790	17	99,66	17	42.403.790	16	2		
			2	5	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeuler yang diadakan(unit)	50	1.500.000.000			10	9.000.000	10	8.956.650	10	99,52	10	8.956.650	20	1		
			2	5	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yg diadakan (unit)	40	159.000.000			7	33.550.000	7	33.447.140	7	99,69	7	33.447.140	18	21		
			2	5	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	18	360.000.000			3	56.388.000	3	49.021.217	3	86,94	3	49.021.217	17	14		
			2	5	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pembayaran (bulan)	72	360.000.000			12	56.388.000	12	49.021.217	12	86,94	12	49.021.217	17	14		
			2	5	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	324	9.330.000.000			64,00	1.123.480.000	64	995.569.785	64	88,61	64	995.569.785	20	11		
			2	5	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin (unit)	282	9.000.000.000			46,00	1.085.480.000	46	957.884.785	46	88,25	46	957.884.785	16	11		
			2	5	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis peralatan kantor yg dilakukan pemeliharaan(item)	36	165.000.000			17,00	15.000.000	17	14.865.500	17	99,10	17	14.865.500	47	9		
			2	5	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yg dilakukan pemeliharaan unit	6	165.000.000			1	23.000.000	1	22.819.500	1	99,22	1	22.819.500	17	14		
							PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan LH	6	150.000.000			1	25.000.000	1	22.467.500	1	89,87	1	22.467.500	17	15		
			2	5	15		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah PERKADA tentang RPPLH Kabupaten yang ditetapkan	6	150.000.000			1	25.000.000	1	22.467.500	1	89,87	1	22.467.500	17	15		
			2	5	15	2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan RPPLH yang disusun	6	150.000.000			1	25.000.000	1	22.467.500	1	89,87	1	22.467.500	17	15		
							PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik sampling Kualitas air sampling yang memenuhi standar baku mutu	76	3.492.500.000			71	1.500.000.000	71	158.504.650	71	10,57	71	158.504.650	93	5		
								Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	86															

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	5	17	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Kategori Kualitas Air yang dipantau	12	3.395.000.000			2	190.000.000	2	184.785.500	2	97,26	2	184.785.500	17	5			
					Jumlah Kategori Lokasi Titik Pantau Kualitas Udara ambien	24	-											-				
	2	5	17	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Titik Pantau IPAL Perusahaan(perusahaan)	300	2.040.000.000			4	40.000.000	4	37.200.900	4	93,00	4	37.200.900	1	2		
					Jumlah Titik Pantau DAS (titik)	52												-				
					Jumlah Alat Monitor Kualitas Air Online DAS Seputih (unit) dan Biaya Pemeliharaan Alat (unit/tahun)	5												-				
	2	5	17	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara ambien (titik)	76	225.000.000			6	20.000.000	6	17.836.500	6	89,18	6	17.836.500	8	8		
	2	5	17	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah uji sample kualitas air Limbah atau Sungai yang dapat dianalisis (uji)	225	1.130.000.000			30	130.000.000	30	129.748.100	30	99,81	30	129.748.100	13	11		
	2	5	18		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten	6	97.500.000			1	10.000.000	1	7.700.000	1	77,00	1	7.700.000	17	8		
	2	5	18	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi	465	97.500.000			65	10.000.000	65	7.700.000	65	77,00	65	7.700.000	14	8		
	2	5	19		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-				1.300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2	5	19	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	-	-			1	1.300.000.000		-		-		-		-			
					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang Terpelihara	93	3.990.000.000			74	864.212.300	74	804.005.555	74	93,03	74	804.005.555	80	20		
	2	5	20		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Keaneekaragaman Hayati/RTH/Hutan Kota yang terpelihara	135	3.990.000.000			20	864.212.300	20	804.005.555	20	93,03	20	804.005.555	15	20		
	2	5	20	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang dikelola	162	3.850.000.000			11	864.212.300	11	804.005.555	11	93,03	11	804.005.555	7	21		
					PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Total Perusahaan yang memiliki Perizinan B3 dengan Total Perusahaan	40	155.000.000			15	30.000.000	15	28.355.700	15	94,52	15	28.355.700	38	18		
	2	5	21		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Tersusunnya Laporan Tahunan Penyimpanan Sementara LB3 di Lampung Tengah	6	155.000.000			1	30.000.000	1	28.355.700	1	94,52	1	28.355.700	17	18		

No	Kode			Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2			3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
		2	5	21	2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Perizinan dan Instalasi LB3 Perusahaan yang diverifikasi (Perusahaan)	225	155.000.000	25	30.000.000	25	28.355.700	25	94,52	25	28.355.700	11	18		
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten	100	212.500.000	50	12.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Rasio pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) di Kabupaten terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	0,12		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	5	23		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten	200	212.500.000	-	12.500.000	-	12.265.000	-	98,12	-	12.265.000	-	6		
		2	5	23	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi Izin Lingkungan dan/atau Rekomendasi Izin PPLH yang diterbitkan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)	12	75.000.000	2	12.500.000	2	12.265.000	2	98,12	2	12.265.000	17	16		
						PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100	210.000.000	100	30.000.000	100	17.204.000	100	57,35	100	17.204.000	100	8		
		2	5	26		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	12	210.000.000	2	30.000.000	2	29.948.000	2	99,83	2	29.948.000	17	14		
		2	5	26	3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah kampung/kelurahan yang mendapat penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	12	210.000.000	2	30.000.000	2	29.948.000	2	99,83	2	29.948.000	17	14		
						PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Nominasi penerima penghargaan LH Lampung Tengah yang didaftarkan ke tingkat provinsi atau nasional	12	318.750.000	2	48.750.000	2	22.593.000	2	46,34	2	22.593.000	17	7		
		2	5	27		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kategori Penghargaan LH	18	318.750.000	2	48.750.000	3	40.300.500	3	82,67	3	40.300.500	17	13		
		2	5	27	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Penghargaan LH (Adiwiyata, Kalpataru, dan Perusahaan Terbaik dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH)	54	318.750.000	3	48.750.000	9	40.300.500	9	82,67	9	40.300.500	17	13		
						PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Total Pengaduan yang ditangani dengan Total Pengaduan yang masuk	50	84.000.000	50	14.000.000	45	6.645.000	45	47,46	45	6.645.000	90	8		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	5	28		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan yang dapat diselesaikan	12	84.000.000			14.000.000	-	10.943.000	-	78,16	-	10.943.000	-	13		
				1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan LH dari masyarakat	24	84.000.000		4	14.000.000	4	10.943.000	4	78,16	4	10.943.000	17	13		
					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	rasio Volume Sampah yang diolah/Volume timbunan sampah (poin)	36	1.305.000.000		31,25	100.000.000	31,25	95.833.000	31,25	95,83	31,25	95.833.000	86	7		
					Pengelolaan Sampah	Jumlah penanganan timbunan sampah	96.000	1.305.000.000		16000	100.000.000	16.000	98.833.000	16.000	98,83	16.000	98.833.000	17	8		
					Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPST/SPA Kabupaten yang operasional	12	675.000.000		2	75.000.000	2	74.481.000	2	99,31	2	74.481.000	17	11		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Alat Operasional untuk petugas Pengelolaan Persampahan	77	230.000.000		15	25.000.000	15	24.352.000	15	97,41	15	24.352.000	19	11		
					Administrasi Kependudukan dan Capil		0	28.997.742.800		-	9.931.793.850	94,76	8.983.617.611	94,76	90,45	94,76	8.983.617.611	94,76	30,98	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	28.369.123.600		100	9.926.928.150	93	9.149.493.778	93	92,17	93	9.149.493.778	93	32,25		
						Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100			100		100	-	100		100	-	100	-		
						Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100			100		100	-	100		100	-	100	-		
						Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85			85		85	-	85		85	-	85	-		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	90	334.001.500		10	252.885.000	10	205.000.000	10	81,06	10	205.000.000	11	61		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	40	43.358.000		5	6.350.000	5	6.350.000	5	100,00	5	6.350.000	13	15		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20	5.700.400		5	1.425.100	5	1.425.100	5	100,00	5	1.425.100	25	25		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30	3.000.000		-	-	0	-	0		0	-	-	-		

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			2	6	1	7	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	161	41.801.600			41	10.450.400	41	10.450.400	41	100,00	41	10.450.400	25	25			
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	50	240.141.500			15	234.659.500	15	186.774.500	15	79,59	15	186.774.500	30	78			
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	150	5.581.842.600			12	4.995.406.650	24	4.979.476.616	24	99,68	24	4.979.476.616	16	89			
			2	6	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	60	19.542.214.250			12	3.908.442.850	12	3.908.442.852	12	100,00	12	3.908.442.852	20	20			
			2	6	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	5.464.360.800			12	1.079.478.000	12	1.063.547.964	12	98,52	12	1.063.547.964	20	19			
			2	6	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun Perangkat Daerah yang disusun	15	3.000.000			-								-	-			
			2	6	2	2	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang dibuat	15	3.000.000			-									-	-		
			2	6	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran perangkat daerah yang dibuat	60	111.481.800			12	7.485.800	12	7.485.800	12	100,00	12	7.485.800	20	7			
			2	6	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya	100	907.860.000			100	142.260.000	90	121.527.000	90	85,43	90	121.527.000	90	13			
			2	6	5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi	100	711.300.000			100	142.260.000	90	121.527.000	90	85,43	90	121.527.000	90	17			
			2	6	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	14.385.326.000			12	2.277.039.500	12	2.086.912.814	12	91,65	12	2.086.912.814	20	15			
			2	6	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	25	12.571.883.500			4	2.021.503.000	4	1.885.422.325	4	93,27	4	1.885.422.325	16	15			
			2	6	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	30	37.703.500			10	203.500	10	203.500	10	100,00	10	203.500	33	1			
			2	6	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	5	8.160.000			1	160.000	1	160.000	1	100,00	1	160.000	20	2			
								Jumlah penggandaan kebutuhan kantor	13.000	-											-	-			
			2	6	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	50	279.074.000			93	64.757.000	93	58.800.000	93	90,80	93	58.800.000	186	21			
			2	6	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		60	31.000.000			12	6.200.000	12	6.200.000	12	100,00	12	6.200.000	20	20			
			2	6	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi	300	1.281.672.000			20	179.616.000	20	139.018.989	20	77,40	20	139.018.989	7	11			
			2	6	6	11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD		60	23.000.000			12,00	4.600.000	12	4.600.000	12	100,00	12	4.600.000	20	20			
			2	6	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan	25	4.325.000.000			10,00	1.587.500.000	10,00	1.205.674.000	10,00	75,95	10,00	1.205.674.000	40	28			
			2	6	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor yang diadakan	25	162.250.000			10,00	1.587.500.000	10,00	1.205.674.000	10,00	75,95	10,00	1.205.674.000	40	743			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2 6 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	72	1.698.413.500			12	410.197.000	12	340.121.250	12	82,92	12	340.121.250	17	20			
					2 6 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang di arsipkan	850	24.789.500			100	3.495.000	100	2.895.000	100	82,83	100	2.895.000	12	12		
					2 6 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	60	648.000.000			12	133.000.000	12	113.921.250	12	85,66	12	113.921.250	20	18		
					2 6 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	60	1.000.624.000			12	273.702.000	2	223.305.000	12	81,59	12	223.305.000	20	22		
					2 6 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	136	1.136.680.000			6	261.640.000	6	210.782.098	6	80,56	6	210.782.098	4	19		
					2 6 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	29	659.990.000			4	129.310.000	4	80.035.818	4	61,89	4	80.035.818	14	12		
					2 6 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	101	225.610.000			21	25.900.000	21	25.845.000	21	99,79	21	25.845.000	21	11		
					2 6 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	6	251.080.000			1	106.430.000	1	104.901.280	1	98,56	1	104.901.280	17	42		
						PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP-EI	92	628.619.200				1.172.900		2.345.800		200,00		2.345.800	-	0		
						Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan KTP	261.000															
							Jumlah penerbitan KK	141.000															
							Jumlah penerbitan KIA	81.000															
						Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah KIPEM yang terbit	600	20.889.600	-													
							Jumlah Penduduk Rentan Yang Memperoleh Identitas	600	-														
						Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen pencatatan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	60	12.686.600	-													
							Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan sesuai dengan SOP	72	-														
						Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah buku register peristiwa kependudukan yang disusun	60	20.229.600	-													
						Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen kebijakan terkait dengan Pendaftaran Penduduk yang ditetapkan	2	810.000.000	-													

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah pengadaan material keperluan pelayanan pendaftaran penduduk selain Blangko E-KTP	28	800.000.000	-													
			Jumlah pengadaan Blangko Kartu Identitas Anak (KIA)	120.000	-														
			Jumlah peralatan penunjang perekaman dan pencetakan dokumen kependudukan	24	-														
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan pendaftaran penduduk langsung (Jemput Bola)	28	587.500.000	-													
		Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan pendaftaran penduduk langsung (Jemput Bola)	28	307.500.000	-													
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100	463.754.600														
			Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinanya dilaporkan	100															
			Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	100															
	2	6	19	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan Akta Kelahiran	81.000		412.203	918.300	432.114	918.300	432.114	100,00	432.114	918.300	105	100		
					Jumlah penerbitan Akta Perkawinan														
					Jumlah penerbitan Akta Perceraian														
					Jumlah penerbitan Akta Kematian														
	2	6	19	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen register akta catatan sipil yang disusun	60	12.918.300	12	918.300	12	918.300	12	100,00	12	918.300	20	7	
	2	6	20		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan kementerian terkait	30	463.754.600	5,00	254.600	5	254.600	5	100,00	5	254.600	17	5	
					Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan pencatatan sipil langsung (Jemput Bola)		28	-	28,00										

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			2	6	20	1	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan kementerian terkait	25	4.254.600			10	254.600	10	254.600	10	100,00	10	254.600	40	6		
			2	6	20	4	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Peristiwa terkait	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan pencatatan sipil langsung (Jemput Bola)	28	307.500.000											-	-		
							PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan		223.036.700			1.633.600	1.513.600	92,65	2.146.000		1						
			2	6	22		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah dokumen Data Agregat yang dapat diakses oleh publik	60	28.742.000			10	492.000	10	372.000	10	75,61	10	372.000	17	1		
								Jumlah Sistem data informasi terkait data yang terbatas yang dapat diakses oleh instansi/lembaga tertentu dengan persyaratan tertentu melalui kerjasama	6	-														
			2	6	22	2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan																
			2	6	24		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah database SIAK yang dikelola	6	160.254.600			1	254.600	1	254.600	1	100,00	1	254.600	17	5		
								Jumlah sistem informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang terintegrasi dengan																
			2	6	25		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen evaluasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5	38.387.000			1	887.000	1	887.000	1	100,00	1	887.000	20	2		
			2	6	25	1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5	3.387.000			1	887.000	10	887.000	1	100,00	1	887.000	20	26		
							PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Prosentase keterisian data profil kependudukan	100	68.059.200			100	2.059.200	70	1.040.100	70	50,51	70	1.040.100	70	2		
			2	6	26		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen Profil Kependudukan yang disusun	100	68.059.200			10	2.059.200	7	1.040.100	7	50,51	7	1.040.100	7	2		
			2	6	26	1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Kependudukan Yang Tersedia																
			2	6	26	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan yang disusun	90	34.040.100			10	2.059.200	7	1.040.100	7	50,51	7	1.040.100	8	3		
			2	7			Pemberdayaan Masyarakat Desa		-	51.533.189.805			0	5.714.919.971	98,53	5.465.756.463	98,53	95,64	98,53	5.465.756.463	98,53	95,64	Dimas Pemberdayaan Masyarakat dan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	23.814.987.105			100	4.292.337.771	100	4.156.293.533	100	96,83	100	4.156.293.533	100	96,83			
			Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100				100		100	-	100		100	-	100	-			
			Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100				100		100	-	100		100	-	100	-			
			Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85				85		85	-	85		85	-	85	-			
	2	7	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25	255.700.000		5	23.200.000	5	23.200.000	5	100	5	23.200.000	20	9,07			
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	255.700.000		5	23.200.000	5	23.200.000	5	100	5	23.200.000	20	9,07			
	2	7	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	18.609.756.105		2	3.720.951.221	2	3.599.960.364	2	96,75	2	3.599.960.364	17	19,34			
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60	16.574.599.855		12	3.314.919.971	12	3.203.134.920	12	96,63	12	3.203.134.920	20	19,33			
			2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	1.985.156.250		12	397.031.250	12	387.825.444	12	97,68	12	387.825.444	20	19,54			
	2	7	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	50.000.000		2	9.000.000	2	9.000.000	2	100,00	2	9.000.000	17	18,00		
	2	7	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45	134.180.000		21	14.880.000	21	14.833.500	21	100	21	14.833.500	47	11,05			
			2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	384	134.180.000		62	14.880.000	62	14.833.500	62	100	62	14.833.500	16	11,05			
	2	7	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	625	3.502.881.000		79	329.286.550	79	326.131.669	79	99,04	79	326.131.669	13	9,31			
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	115	187.900.000		10	4.200.000	10	4.200.000	10	100,00	10	4.200.000	9	2,24			
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61	822.300.000		10	86.374.550	10	83.226.000	10	96,35	10	83.226.000	16	10,12			
			3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	425	124.996.000		14	12.000.000	14	11.999.500	14	100,00	14	11.999.500	3	9,60			
			4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2	7	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24	153.700.000		12	25.727.000	12	25.727.000	12	100,00	12	25.727.000	50	16,74		
	2	7	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.345	2.213.985.000		12	200.985.000	12	200.979.169	12	100,00	12	200.979.169	0	9,08		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			2	7	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	699.570.000			12	109.680.000	12	101.798.000	12	92,81	12	101.798.000	20	14,55		
			2	7	8	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	fasilitasi tupoksi aparatur yang terlayani	350	32.180.000			75	4.680.000	75	4.680.000	75	100,00	75	4.680.000	21	14,54		
			2	7	8	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik kantor	60	547.500.000			12	85.000.000	12	77.638.000	12	91,34	12	77.638.000	20	14,18		
			2	7	8	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	120	119.890.000			20	20.000.000	20	19.480.000	20	97,40	20	19.480.000	17	16,25		
			2	7	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib administrasi	36	612.900.000			6	94.340.000	6	90.370.000	6	95,79	6	90.370.000	17	14,74		
			2	7	9	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jasa pemeliharaan rutin/berkala dan pajak kendaraan dinas	36	612.900.000			6	94.340.000	6	90.370.000	6	95,79	6	90.370.000	17	14,74		
						PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase BUMKAM kategori berkembang	100	21.867.002.700			100	1.065.625.900	97	1.042.369.630	97	97,82	97	1.042.369.630	97	4,77		
			2	7	17	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	301	21.867.002.700			50	1.065.625.900	50	1.042.369.630	50	97,82	50	1.042.369.630	17	4,77		
			2	7	17	2 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	jumlah produk hukum kampung	100	245.650.000			20	48.100.000	20	48.100.000	20	100,00	20	48.100.000	20	19,58		
			2	7	17	4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah kampung yang difasilitasi pelatihan Pengelolaan Keuangan kampung	1.505	4.711.700.000			301	793.550.000	301	771.993.500	301	97,28	301	771.993.500	20	16,38		
			2	7	17	8 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMKAM yang mendapat pembinaan	301	690.000.000			75	100.000.000	75	99.929.730	75	99,93	75	99.929.730	25	14,48		
			2	7	17	13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	inventarisir aset kampung	1.500	359.879.500			301	71.975.900	301	70.756.400	301	98,31	301	70.756.400	20	19,66		
			2	7	17	18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah kampung/kelurahan berprestasi tingkat kabupaten	1.500	260.000.000			301	52.000.000	301	51.590.000	301	99,21	301	51.590.000	20	19,84		
						PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kampung yang tertata	100	5.851.200.000				356.956.300		267.093.300		74,83		267.093.300	-	4,56		
							Rata rata jumlah kelompok binaan PKK	33												-			
							Persentase peningkatan Kampung yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	40												-			
							Persentase LPM Berprestasi	15												-			
							Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	100												-			
							Persentase Kampung yang menerapkan TTG	75												-			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2 7 18				Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	1.806	5.851.200.000			356.956.300	-	267.093.300	-	74,83	-	267.093.300	-	4,56			
						Jumlah kampung yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;	1.806												-			
						Jumlah peningkatan Kampung yang lembaga masyarakat dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	115													-		
	2 7 18 3				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kampung yang dilakukan bimbingan teknis Lembaga Masyarakat Kampung	301	953.000.000			8	94.502.300	8	83.022.300	8	87,85	8	83.022.300	3	8,71		
	2 7 18 6				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Tingkat Partisipasi Kabupaten dalam Gelar TTG Nasional	2.500	1.852.500.000			450	176.454.000	420	114.043.000	420	64,63	420	114.043.000	17	6,16		
	2 7 18 7				Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Partisipasi dalam BBGRM	1.550	838.000.000			301	86.000.000	301	70.028.000	301	81,43	301	70.028.000	19	8,36		
	2 8				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		100	78.446.836.676			-	11.808.393.200	82,63	9.756.867.432	86,45	82,63	86,45	9.756.867.432	86,45	12,44		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	80	20.614.766.495			100	3.728.220.899	100	3.628.923.586	100	97,34	100	3.628.923.586	100	17,60		
						Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100				100		100	-	100		100	-	100	-		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100				100			100	-	100	100	-	100	-		
							Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	95				85			85	-	85	85	-	85	-		
			2	8	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35	68.809.000			7	4.882.500	7 Dokumen	4.882.500	7 Dokumen	100,00	7	4.882.500	20	7		
			2	8	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35	68.809.000			7	4.882.500	7	4.882.500	7	100,00	7	4.882.500	20	7		
			2	8	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	110	17.751.418.495				3.352.163.899		3.271.920.036		97,61		3.271.920.036	-	18		
			2	8	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60	16.760.819.495			12	2.976.090.199	12	2.909.346.836	12	97,76	12	2.909.346.836	20	17		
			2	8	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50	990.599.000			12	376.073.700	12	362.573.200	12	96,41	12	362.573.200	24	37		
			2	8	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	50	990.599.000				70.824.500	-	66.704.500	-	94,18	-	66.704.500	-	7		
			2	8	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	64	22.100.000			2	2.130.000	2	2.130.000	2	100,00	2	2.130.000	3	10		
			2	8	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	288	239.379.500			15	13.500.000	15	13.500.000	15	100,00	15	13.500.000	5	6		
			2	8	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	123	31.978.500			17	1.854.500	17	1.854.500	17	100,00	17	1.854.500	14	6		
			2	8	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45	75.673.000			9	4.660.000	9	4.660.000	9	100,00	9	4.660.000	20	6		
			2	8	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20	207.480.000			12	27.480.000	12	27.000.000	12	98,25	12	27.000.000	60	13		
			2	8	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.894	413.988.000			158	21.200.000	158	17.560.000	158	82,83	158	17.560.000	5	4		
			2	8	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	209.000.000			12	30.000.000	12	27.184.800	12	90,62	12	27.184.800	20	13		
			2	8	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	209.000.000			12	30.000.000	12	27.184.800	12	90,62	12	27.184.800	20	13		
			2	8	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	573	1.594.940.000				270.350.000	-	258.231.750	-	95,52	-	258.231.750	-	16		
			2	8	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	525	1.402.550.000			105	267.510.000	105	255.391.750	105	95,47	105	255.391.750	20	18		
			2	8	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80	49.440.000			4	2.840.000	4	2.840.000	4	100,00	4	2.840.000	5	6		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility rate/ASFR 15-19)	108	612.865.300			24	72.865.300	24	22.933.700	24	31,47	24	22.933.700	22	4		
			Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25 tahun	21.0												-			
			Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	100												-			
			Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100												-			
	2 8 15	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		-	202.944.700			22.944.700	-	22.161.700	-	96,59	-	22.161.700		11			
	2 8 15 7	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan	26	202.944.700			2	22.944.700	-	22.161.700	-	96,59	-	22.161.700	-	11		
	2 8 16	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		-	409.920.600			49.920.600	-	49.920.600	-	100,00	-	49.920.600		12			
	2 8 16 1	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah dokumen yang disusun	4	205.553.200			1	25.553.200	1	25.553.200	1	100,00	1	25.553.200	25	12		
	2 8 16 2	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah kecamatan yang memperbaharui data operasional program KB (up to date)	112	204.367.400			28	24.367.400	28	24.367.400	28	100,00	28	24.367.400	25	12		
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	65	56.660.214.881			60	7.898.317.001	60	5.188.524.665	60	65,69	60	5.188.524.665	92	9		
			Persentase fasilitasi kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	91				100								-			
			Persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	53				53								-			
			Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	7				7								-			
			Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	40				40								-			
			Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	90				100								-			
			Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	91				91								-			
			Persentase kesertaan KB di Kabupaten dengan kesertaan rendah	75				75								-			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
							Persentase kesertaan KB keluarga penerima Bantuan Iuran PBI	0				0												
			2	8	17		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	7.097.671.000			1.273.455.000	-	609.058.914	-	47,83	-	609.058.914			9			
			2	8	17	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Rakor Program KKBPK Tingkat Kabupaten	285	220.000.000			66	40.000.000	66	25.420.000	66	63,55	66	25.420.000	23	12		
			2	8	17	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		15	6.877.671.000			1	1.233.455.000	1	583.638.914	1	47,32	1	583.638.914	7	8		
			2	8	18		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		-	48.521.656.000			6.467.848.000	-	5.197.184.665	-	80,35	-	5.197.184.665			11		
			2	8	18	2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Balai	79	48.311.656.000			17	6.437.848.000	17	5.188.524.665	17	80,59	17	5.188.524.665	22	11		
			2	8	18	3	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB	402	210.000.000			90	30.000.000	90	8.660.000	90	28,87	90	8.660.000	22	4		
			2	8	19		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		-	843.745.381			139.871.501	-	137.994.863	-	98,66	-	137.994.863			16		
			2	8	19	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Akseptor KB yang terlayani	21.100	515.000.000			1.700	65.000.000	1.700	63.123.500	1.700	97,11	1.700	63.123.500	8	12		
			2	8	19	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah retensi yang dibayarkan	14	328.745.381			3	74.871.501	3	74.871.363	3	100,00	3	74.871.363	21	23		
			2	8	20		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Desa		-	197.142.500			2	17.142.500	2	16.235.500	2	94,71	2	16.235.500			8	
			2	8	20	4	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah dokumen yang disusun	13	197.142.500			2	17.142.500	2	16.235.500	2	94,71	2	16.235.500	15	8		
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	100	558.990.000			100	108.990.000		95.387.604		87,52		95.387.604			17	
							Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB		98			98												
							Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB		96			96												

No	Kode				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
						Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	98				98									-	Dinas Pengulangan Bencana	
						Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	100				100									-		
						Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	92				92									-		
						Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	92				92									-		
		2	8	21		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	558.990.000			108.990.000	-	95.387.604	-	87,52	-	95.387.604			17		
		2	8	21	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah KIT stunting siap nikah	44	200.000.000		4	40.000.000	4	39.599.604	4	99,00	4	39.599.604	9	20		
		2	8	21	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Balita Jumlah Kelompok PPPKS Jumlah PIK Remaja	24	368.990.000		6	68.990.000	6	55.788.000	6	80,86	6	55.788.000	25	15		
		2	9			Perhubungan	-	100	51.054.889.500		-	6.390.278.653	-	6.206.856.220	97,45	97,13	97,45	6.206.856.220	97,45	12	Dinas Perhubungan	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	22.735.289.500		100	5.341.475.953	100	5.155.484.512	100	96,52	100	5.155.484.512	100	23		
							Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100			100		100		100		100		100			
							Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100			100		100	-	100		100	-	100	-		
							Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85			85		85	-	85		85	-	85	-		
		2	6	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	20	50.000.000		3	9.280.000	3	8.780.000	3	94,61	3	8.780.000	15	18		
		2	6	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	20	50.000.000		3	9.280.000	3	8.780.000	3	94,61	3	8.780.000	15	18		

No	Kode			Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
						5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			2 9 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	12	18.540.000.000			3	4.529.240.853	3	4.474.923.112	3	98,80	3	4.474.923.112	25	24		
			2 9 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	16.000.000.000			12	3.985.658.653	12	3.985.658.652	12	100,00	12	3.985.658.652	20	25		
			2 9 2 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	pembayaran honorarium tugas ASN	60	2.500.000.000			12	536.182.200	12	484.844.460	12	90,43	12	484.844.460	20	19		
			2 9 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dokumen laporan	60	40.000.000			10	7.400.000	10	4.420.000	10	59,73	10	4.420.000	16,66667	11		
			2 9 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya	50	35.000.000				5.000.000	1	4.500.000	1	90,00	1	4.500.000	2	13		
			2 9 5 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	50	35.000.000			1	5.000.000	1	4.500.000	1	90,00	1	4.500.000	2	13		
			2 9 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	1.140.289.500				228.057.900	-	193.992.796	-	85,06	-	193.992.796	0	17		
			2 9 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik	35	27.500.000			7	5.134.000	7	5.121.000	7	99,75	7	5.121.000	20	19		
			2 9 6 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan kantor yang tersedia	75	400.000.000			14	19.566.600	14	19.041.000	14	97,31	14	19.041.000	18,67	5		
			2 9 6 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	50	125.000.000			10	20.479.800	10	20.317.000	10	99,21	10	20.317.000	20,00	16		
			2 9 6 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	penyediaan barang cetakan	70	375.000.000			16	74.855.500	16	62.439.450	16	83,41	16	62.439.450	22,86	17		
			2 9 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	pelaksanaan perjalanan dinas penyediaan makan minum kegiatan	765	1.000.000.000			150	108.022.000	150	87.074.346	150	80,61	150	87.074.346	19,61	9		
			2 9 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	350.000.000			12	60.400.000	12	58.359.724	12	96,62	12	58.359.724	20	17		
			2 9 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	penyediaan listrik kantor	60	350.000.000			12	60.400.000	12	58.359.724	12	96,62	12	58.359.724	20	17		
			2 9 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib administrasi	14	2.620.000.000			3	509.497.200	3	414.928.880	3	81,44	3	414.928.880	21,43	16		
			2 9 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	110	2.200.000.000			22	437.560.000	22	344.631.244	22	78,76	22	344.631.244	20	16		
			2 9 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Alat yang dipelihara	50	120.000.000			10	20.637.200	10	19.325.000	10	93,64	10	19.325.000	20	16		
			2 9 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	gedung yang di rehab	5	300.000.000			1	51.300.000	1	50.972.636	1	99,36	1	50.972.636	20	17		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Type C	82	27.819.600.000			77	906.065.200		799.363.012		88,22		799.363.012	0	3		
					Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau kota	95															
					Prosentase alat uji kendaraan bermotor dengan kondisi baik (%)	87															

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			Jumlah Izin Trayek	150															
			Persentase kepemilikan KIR angkutan Umum	52															
			Pemasangan Rambu-rambu	28															
			Presentase ketersediaan Lampu Jalan	82															
			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana induk Jaringan LLAJ Kabupaten	5	1.100.000.000													
			<i>Pelaksanaan Penyusunan Rencana induk Jaringan LLAJ Kabupaten</i>	Jumlah Dokumen Rencana induk Jaringan LLAJ Kabupaten	1	55.000.000													
			<i>Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana induk Jaringan LLAJ Kabupaten</i>	Jumlah Dokumen Penetapan	1	15.000.000													
			<i>Pengendalian Pelaksanaan Rencana induk Jaringan LLAJ Kabupaten</i>	Jumlah Dokumen Evaluasi	1	25.000.000													
			<i>Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	5	500.000.000													
			<i>Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	5	600.000.000													
			Rehabilitasi Prasaranan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota																
			Rehabilitasi Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah lampu yang direhabilitasi	12	25.843.500.000													
			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan yang terbangun/terpasang		8.000.000.000													
			Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah Lampu yang dipasang		17.000.000.000													
			<i>Pembangunan Area Traffic Control System (ATCS)</i>	Beroperasinya ATCS	10	800.000.000													
	2	9	16	<i>Pembangunan Zona Selamat sekolah</i>	Tersedianya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) dan Kelengkapannya	-													
		2	9	16	2	<i>Penyediaan Alat Pemberi Isyarat Lalu - Lintas / APILL (Traffic Light)</i>	Jumlah APILL yang Terpasang - Traffic Light												
		2	9	16	2	<i>Penyediaan Alat Pemberi Isyarat Lalu - Lintas / APILL (Warning Light)</i>	Jumlah APILL yang Terpasang Warning Light /Lampu Peringatan												
						<i>Pemasangan Rambu - Rambu Lalu Lintas</i>	Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Terpasang	75	76.500.000										
						<i>Pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)</i>	Jumlah Rambu Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) yang Terpasang	20	300.000.000										
						<i>Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guard Rail)</i>	Jumlah Pagar Pengaman Jalan (Guard Rail) yang Terpasang	1000	1.300.000.000										
						<i>Pemasangan Traffic Cone</i>	Jumlah Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone) yang Tersedia	500	1.650.000.000										
						<i>Pemasangan Road Barrier</i>	Jumlah Pagar alat pembatas Median Jalan (Road Barrier) yang Tersedia	225	397.500.000										
						<i>Pemasangan Alat Pemandu Lalu Lintas (Stick Lamp)</i>	Jumlah Pagar alat Lampu Pemandu Lalu Lintas (Stick Lamp) yang Tersedia	175	49.000.000										

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan (Alat Pemberi Isyarat Lalu - Lintas / APILL)	Jumlah APILL yang di Rehabilitasi / di perbaiki	136	448.000.000														
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Rambu dan Guadrail yang di Rehabilitasi / di perbaiki	50	125.000.000														
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Halte yang di Rehabilitasi	15	375.000.000														
						Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Titik Lokasi Rute Aman Sekolah Yang Dibangun	4	540.000.000														
							Jumlah Zebra Cross yang dibangun	15	750.000.000														
							Jumlah Jalur Sepeda yang dibangun	25000	825.000.000														
							Jumlah Cermin Tikung yang dibangun	100	450.000.000														
							Jumlah Marka Jalan yang dibangun	30000	990.000.000														
							Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan di Perlintasan Sebidang yang terbangun	3	225.000.000														
							Jumlah Halte yang dibangun	10	600.000.000														
							Jumlah LPJU yang terbangun	5	5.000.000.000														
			2	9	16	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Rambu Lalu Lintas Vortable yang Terpasang	5	375.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	100,00	1	75.000.000	20	20			
			2	9	16		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5	225.000.000	1	40.800.000	1	39.267.012	1	96,24	1	39.267.012	20	17			
			2	9	19		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang diuji	5	1.580.000.000		321.150.000	1	321.150.000	1	100,00	1	321.150.000	20	20			
			2	9	19	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	alat pengujian kendaraan bermotor sarana pengujian (kartu uji)	5	1.030.000.000	1	221.150.000	1	221.150.000	1	100,00	1	221.150.000	20	21			
			2	9	19	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah sarana dan prasarana pengujian	6	550.000.000	1	100.000.000	1	99.550.000	1	99,55	1	99.550.000	16,67	18			
			2	9	20		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	% Penurunan angka kecelakaan lalu lintas	3.500,00	800.000.000	500	174.440.000	500	131.795.000	500	75,55	500	306.235.076	14,29	38			
			2	9	20	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	dokumentasi kegiatan pelaksanaan PAM isidentil pelaksanaan PAM rutin	3.500,00	800.000.000	500	174.440.000	500	131.795.000	500	75,55	500	306.235.076	14,29	38			
							Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksananya Manjemen dan Rekasa pada Persimpangan Ruas Jalan	5	165.000.000													
							Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Tersedianya Fasilitas dan perlengkapan di Kawasan Car Free Day (CFD)	5	210.000.000													
								Tersedianya Fasilitas dan perlengkapan di Kawasan Car Free Day (CFD)	5	210.000.000													
							Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terwujudnya Lalu lintas yang tertib dan Lancar	5	350.000.000													

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			Terwujudnya Lalu lintas yang tertib dan Lancar	5	33.750.000														
			Tersedianya Petugas Pengatur Lalu Lintas	10	382.200.000														
			Tersedianya Petugas Pengatur Lalu Lintas	60	37.500.000														
		Pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor	Tersedianya Petugas Pemeriksa Kendaraan dan Pengatur Lalu Lintas dan Atribut Kelengkapannya	50	205.000.000														
		Pelaksanaan Survey Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Teredianya Dokumen Hasil Survey Lalu Lintas	10	191.000.000														
		Pelaksanaan Managemen dan Rekayasa untuk jaringan jalan kabupaten atau kota	jumlah petugas Pengawasan dan penataan lalulintas pada masa lebaran dan tahun baru	6800	750.000.000														
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang disusun	1	300.000.000														
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rekomendasi permasalahan lalu lintas	60	490.000.000														
		Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah peserta pelajar pelopor	5	500.000.000														
		Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas (WTN)	Hasil Penilaian WTN	3	150.000.000														
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten	tersedianya Dokumen persetujuan Hasil Analisis Andalalin	175	266.000.000														
			Tersedianya SDM Tim Penilai	60	337.500.000														
			Tersedianya SDM yang Handal dan berkompeten	22	136.000.000														
			Tersusunnya Dokumen Persetujuan dan Berita Acara	75	66.250.000														
			Tersusunnya Dokumen Monev	40	30.000.000														
		Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kab/kota dalam sistem pelayanan berusaha	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan sesuai standar	15	1.250.000.000														
		Pembangunan fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / kota	Jumlah Fasilitas Parkir Sepedah yang dibangun	15	900.000.000														
		Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kab/kota	Laporan hasil monitoring	20	200.000.000														
		Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kab/kota	Dokumen Survey	3	150.000.000														
		Pengelolaan Terminal Penumpang Type C		3	540.000.000														
			Rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	3	540.000.000														
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		20	1.090.000.000														

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
						Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	5	490.000.000														
						Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	15	300.000.000														
						Survai daerah potensi dan rawan kecelakaan lalu lintas	3	300.000.000														
						Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	55	8.887.000.000														
						Operasional pengujian berkala kendaraan bermotor	10	750.000.000														
						Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20	662.000.000														
						Penyediaan Tanda Bukti Lulus Uji Elektronik Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5	2.700.000.000														
						Sosialisasi Sistem Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5	425.000.000														
						Peningkatan dan Pemeliharaan Aplikasi Kir Online	10	500.000.000														
						Pengadaan peralatan Pengujian kendaraan Bermotor	5	3.850.000.000														
			2	9	23	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	90	500.000.000			294.675.200	233.955.200										
						Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	5	500.000.000			294.675.200	233.955.200										
			2	9	23	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	500.000.000			1	294.675.200	1	233.955.200	1	79,39	1	233.955.200	20	47		
			2	9	23	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20	803.500.000			5	160.700.000	5	148.920.000	5	92,67	5	148.920.000	25	19	
			2	9	23	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	750	669.876.000			150	133.975.200	150	85.035.200	150	63,47	150	85.035.200	20	13	
						PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	5	500.000.000			1	142.737.500	1	125.121.500	1	87,66	1	125.121.500	20	25		
			2	9	43	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	60	500.000.000			12	142.737.500	12	125.121.500	12	87,66	12	125.121.500	20	25		
			2	9	43	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	60	500.000.000			12	142.737.500	12	125.121.500	12	87,66	12	125.121.500	20	25	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2 10				Komunikasi dan Informatika	0	100	52.294.935.675			-	11.413.855.915	96,41	11.004.228.158	97,83	96,41	97,83	11.004.228.158	97,83	21	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	20.491.262.175			100	4.851.187.415		4.605.070.291	100	94,93	100	4.605.070.291	100	22			
					Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti		100	10.844.228.158			100				100								
					Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin		100				100				100								
					Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik		85				85				100								
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10	51.000.000			2	15.000.000		2	15.000.000	2	100,00	2	15.000.000	20	29		
					2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen	20	21.000.000			4	9.000.000		4	9.000.000	6	100,00	4	9.000.000	20	43		
					2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	10	30.000.000			2	6.000.000		2	6.000.000	2	100,00	2	6.000.000	20	20		
					2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	10	13.632.128.575			2	3.274.488.915		2	3.104.120.916	2	94,80	2	3.104.120.916	20	23		
					2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	13.140.224.575			12	2.628.044.915		12	2.628.044.916	12	100,00	12	2.628.044.916	20	20		
					2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	491.904.000			12	646.444.000		12	476.076.000	12	73,65	12	476.076.000	20	97		
					2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya	-	90.000.000			-			0	-	-		0	-	-			
					2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	100	90.000.000			-			0	-	-		0	-	-			
					2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	2.455.733.600			12	580.078.500		12	575.004.023	12	99,13	12	575.004.023	20	23		

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			2	10	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	145.405.000			12	29.405.000	12	27.463.450	12	93,40	12	27.463.450	20	19		
			2	10	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	67.618.600			12	52.988.600	12	51.461.833	12	97,12	12	51.461.833	12	76		
			2	10	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	48.800.000			75	2.881.400	75	2.880.500	75	99,97	75	2.880.500	75	6		
			2	10	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	800.000.000			12	222.821.500	12	222.727.842	12	99,96	12	222.727.842	12	28		
			2	10	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	1.393.910.000			12	271.982.000	12	270.470.398	12	99,44	12	270.470.398	12	19		
			2	10	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan	60	1.114.500.000			12	215.225.000	12	176.225.000	12	81,88	12	176.225.000	20	16		
			2	10	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60	1.114.500.000			12	215.225.000	12	176.225.000	12	81,88	12	176.225.000	20	16		
			2	10	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-														
			2	10	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	1.559.000.000			12	319.000.000	12	293.500.000	12	92,01	12	293.500.000	20	19		
			2	10	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa	60	309.000.000			12	84.000.000	12	84.000.000	12	100,00	12	84.000.000	20	27		
			2	10	8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	1.250.000.000			12	235.000.000	12	209.500.000	12	89,15	12	209.500.000	20	17		
			2	10	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib administrasi	30	1.588.900.000			5	447.395.000	5	441.220.352	5	98,62	5	441.220.352	17	28		
			2	10	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan kualitas SDM	60	909.400.000			12	175.680.000	12	172.313.625	12	98,08	12	172.313.625	20	19		
			2	10	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Kualitas SDM bidang aparatur	60	145.500.000			12	130.500.000	12	127.727.727	12	97,88	12	127.727.727	20	88		
			2	10	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Kualitas SDM bidang aparatur	5	534.000.000			1	141.215.000	1	141.179.000	1	99,97	1	141.179.000	20	26		
							PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten	100	31.803.673.500			60	5.116.668.500	58	5.110.160.311	58	99,87	58	5.110.160.311	58	16		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
						Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100				50	-										
						Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	80				55	-										
						Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemerintah Daerah (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	90				65											
						Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten sesuai amanat UU No.14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	90				65											
						Persentase mitra strategis Pemda (media komunitas seperti KIM dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	80				56											
			2	10	15	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	31.803.673.500	-	5.116.668.500	0	5.110.160.311	99,87	0	5.110.160.311						
			2	10	15	4 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik																
			2	10	15	5 Pengelolaan Media Komunikasi Publik																
			2	10	15	6 Pelayanan Informasi Publik	5	470.000.000			1	93.800.000	1	92.404.746	1	98,51	1	92.404.746				
			2	10	15	7 Layanan Hubungan Media	900	24.450.000.000			180	4.878.997.000	180	4.874.939.065	180	99,92	180	4.874.939.065				
			2	10	15	8 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan																
			2	10	15	10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	60	80.000.000			12	15.775.000	12	14.820.000	12	93,95	12	14.820.000				
			2	10	15	12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	950	655.000.000			311	128.096.500	311	127.996.500	311	99,92	311	127.996.500				
			2	10	15	13 kegiatan Internet sehat	100	29.008.000														
			2	10	15	14 Belanja Langganan Jurnal/Surat kabar/Majalah	100	105.000.000														
			2	10	15	16 pelaksanaan Pameran Pembangunan dan Oprasional Radio Pemerintah Daerah	100	513.405.000														
			2	10	15	17 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	100	5.285.369.500														
			2	10	15	18 Pelaksanaan Bakohumas	100	42.019.000														
			2	10	15	19 Pelaksanaan Kegiatan PPID dan E - LAPOR	100	30.775.000														

No	Kode				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%				
															K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	10	15	20	Kegiatan Kelompok Informasi	Jumlah Kegiatan Kelompok Informasi	100	143.097.000															
					PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	7.240.000.000			-	1.446.000.000	96,55	1.376.062.139	96,55	95,16	96,55	1.376.062.139	96,55	19			
						Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100				-												
						Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	95				-												
						Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	95				-												
						Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	100				-												
						Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100				-												
						Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	95				-												
						Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	89				-												
						Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	75				-												
						Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	89				-												
						Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	93				-												
						Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	13				-												

No	Kode				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							100						-					-				
							100						-					-				
							98						-					-				
							93						-					-				
							15						-					-				
							92						-					-				
			2	10	17	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	311	7.240.000.000			180	1.446.000.000	180	1.376.062.139	180	95	180	1.376.062.139	58	19	
			2	10	17	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah					100	740.000.000			100	57	100	84.000.000	100	11	
			2	10	17	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik					100	6.500.000.000			100	99	100	1.292.062.139	100	20	
			2	12		Penanaman Modal	-	100	18.498.572.400	-	-	100	4.681.824.913	94	4.423.836.894	97,05	94	97,05	4.423.836.894	97,05	23,91	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	9.511.993.300			100	3.669.418.113	96	3.504.435.363	97	96	97,00	3.504.435.363	97,00	36,84	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
								100				100										DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
								100				100										DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
								100				100										DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
								85				85										DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			2	12	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	24	20.000.000	-	-	4	4.414.400	4	4.414.000	100	100	4	4.414.000	16,67	22,07	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
			2	12	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24	20.000.000	-	-	4	4.414.400	4	4.414.000	100	100	4	4.414.000	16,67	22,07	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			2	12	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	36	3.059.601.300	-	-	6	3.111.586.013	-	2.986.868.196	-	96	-	2.986.868.196	-	97,62	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
				12	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	3.059.601.300			12	2.830.586.013	12	2.717.868.196	100	96	12	2.717.868.196	20,00	88,83		
			2	12	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	pembayaran honorarium tugas ASN	155	3.005.040.000	-	-	31	281.000.000	31	269.000.000	100	96	31	269.000.000	20,00	8,95	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			2	12	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester an yang disusun tepat waktu	36	54.561.300	-	-	6	3.593.600	6	3.527.000	100	98	6	3.527.000	16,67	6,46	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			2	12	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya	48	234.750.000	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			2	12	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus Hari hari tertentu yang di adakan	276	89.750.000	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			2	12	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat	48	145.000.000	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			2	12	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	2.739.597.000	-	-	12	276.537.700	12	262.788.076	100	95	12	262.788.076	20,00	9,59	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			2	12	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Ketersediaan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan	250	880.223.900	-	-	31	83.000.000	31	82.646.600	100	100	31	82.646.600	12,40	9,39	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			2	12	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	120	221.301.100	-	-	12	30.000.800	12	29.998.000	100	100	12	29.998.000	10,00	13,56	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			2	12	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	180	329.074.900	-	-	30	42.762.900	30	42.762.000	100	100	30	42.762.000	16,67	12,99	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			2	12	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	350.000	454.926.100	-	-	125	49.773.000	125.000	49.772.000	100.000	100	125.000	49.772.000	35,71	10,94	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			2	12	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	480	854.071.000	-	-	440	71.001.000	440	57.609.476	100	81	440	57.609.476	91,67	6,75	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			2	12	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	3	1.117.955.000	-	-	3	116.780.000	-	90.285.091	-	77	-	90.285.091	-	8,08	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			2	12	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Telpon, Internet dan Listrik	15	1.117.955.000	-	-	3	116.780.000	3	90.285.091	100	77	3	90.285.091	20,00	8,08	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			2	12	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib administrasi	60	2.340.090.000	-	-	12	160.100.000	12	160.080.000	100	100	12	160.080.000	20,00	6,84	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			2	12	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang perlu pemeliharaan	6	320.020.000	-	-	1	41.670.000	1	41.670.000	100	100	1	41.670.000	16,67	13,02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			2	12	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24	664.410.000	-	-	4	81.340.000	4	81.320.000	100	100	4	81.320.000	16,67	12,24	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			2	12	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang dilakukan Perbaikan	36	387.780.000	-	-	6	37.090.000	6	37.090.000	100	100	6	37.090.000	16,67	9,56	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2 12 9 9					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	6	967.880.000	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	13
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					Persentase Realisasi Investasi	70	963.120.200			70	130.158.200	65	115.430.959	65	89	65,00	115.430.959	65,00	11,99	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2 12 15					Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang bisa diberikan kepada investor	18	520.800.000	-	-	3	20.800.000	3	20.791.000	100	100	3	20.791.000	16,67	3,99	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 12 15 1					Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kajian/rumusan kebijakan daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang disusun	18	520.800.000	-	-	3	20.800.000	3	20.791.000	100	100	3	20.791.000	16,67	3,99	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 12 16					Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang dibuat	12	442.320.200	-	-	3	109.358.200	3	94.639.959	100	87	3	94.639.959	25,00	21,40	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 12 16 1					Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kajian/rumusan kebijakan RUPM Kabupaten Lampung Tengah yang disusun	12	35.000.000	-	-	2	35.000.000	2	21.808.880	100	62	2	21.808.880	16,67	62,31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 12 16 2					Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi dan peluang investasi Kabupaten Lampung Tengah yang disusun	6	407.320.200	-	-	1	74.358.200	1	72.831.079	100	98	1	72.831.079	16,67	17,88	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL sampai mana					Persentase Peningkatan Jumlah Investor Baru	10	1.843.592.800			10	136.705.200	95	134.307.426	95	98	95,00	134.307.426	95,00	7,29	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2 12 17					Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	6	1.843.592.800	-	-	2	136.705.200	2	134.307.426	100	98	2	134.307.426	33,33	7,29	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2 12 17 1					Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang disusun	6	370.294.600	-	-	1	23.381.400	1	21.586.000	100	92	1	21.586.000	16,67	5,83	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			2	12	17	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal tingkat daerah Provinsi/Kabupaten yang dilaksanakan pada tahun ke-n	12	1.473.298.200	-	-	2	113.323.800	2	112.721.426	100	99	2	112.721.426	16,67	7,65	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
							PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur	100	1.293.344.450			100	134.145.050	100	133.751.927	100	100	99,71	133.751.927	99,71	10,34	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			2	12	18		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan dalam setahun yang dilakukan sesuai dengan SOP	210	1.293.344.450	-	-		134.145.050	-	133.751.927	#DIV/0!	100	-	133.751.927	-	10,34	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			2	12	18	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang disediakan	12.000	1.108.130.250	-	-	2.000	114.145.050	2.000	114.029.927	100	100	2.000	114.029.927	16,67	10,29	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
								Jumlah kecamatan yang difasilitasi perizinan keliling	60	-			10	-			-							
			2	12	18	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah berita acara dan profil pengawasan perusahaan Jumlah LKPM dan Profil pemantauan Perusahaan Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			2	12	18	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah sarana/ media layanan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	18	185.214.200	-	-	3	20.000.000	3	19.722.000	100	99	3	19.722.000	16,67	10,65	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
							PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang dimonitoring LKPM Online-nya	70	3.516.189.350			70	407.560.850	68	332.329.719	97	82	68,00	332.329.719	68,00	9,45	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			2	12	19		Pengendalian Pelaksanaan penanaman modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat kabupaten		3.516.189.350	-	-		407.560.850	-	332.329.719	#DIV/0!	82	-	332.329.719		9,45	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			2	12	19	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang di pantau, di bina, awasi, pelaksanaan penanaman modal	240	295.595.600	-	-	40	40.048.900	40	30.000.000	100	75	40	30.000.000	16,67	10,15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			2	11	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	38	71.158.000			100	4.297.400	100	4.297.400	100	100,00	100	4.297.400	100	6		
			2	11	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	19.205.000			4	2.655.600	4	2.655.600	4	100,00	4	2.655.600	33	14		
			2	11	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30	11.353.000			6	1.641.800	6	1.641.800	6	100,00	6	1.641.800	20	14		
			2	11	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	12	24.911.105.454			2	3.796.329.202	0	3.694.249.450	2	97,31	2	3.694.249.450	17	15		
			2	11	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60	17.540.000.000			12	3.498.504.602	12	3.398.405.350	12	97,14	12	3.398.405.350	20	19		
			2	11	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	2.222.390.400			12	295.169.000	12	293.191.000	12	99,33	12	293.191.000	17	13		
			2	11	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	19.205.000			2	2.655.600	2	2.653.100	2	99,91	2	2.653.100	17	14		
			2	11	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya	217	374.201.000			100	7.770.000	100	7.770.000	100	100,00	100	7.770.000	46	2		
			2	11	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	217	374.201.000			37	7.770.000	37	7.770.000	37	100,00	37	7.770.000	17	2		
			2	11	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	750	1.229.556.600			165	90.277.000	165	90.217.386	165	99,93	165	90.217.386	22	7		
			2	11	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34	11.926.600			6	1.693.000	6	1.693.000	31	100,00	31	1.693.000	91	14		
			2	11	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23	68.945.000			3	14.000.000	3	14.000.000	12	100,00	12	14.000.000	52	20		
			2	11	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	104	50.537.000			19	7.464.000	19	7.464.000	30	100,00	30	7.464.000	29	15		
			2	11	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47	262.888.000			7	37.000.000	7	37.000.000	7	100,00	7	37.000.000	15	14		
			2	11	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.010	567.748.000			310	30.120.000	130	30.060.386	440	99,80	440	30.060.386	22	5		
			2	11	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	72	681.000.000			3	42.000.000	3	31.464.531	3	74,92	3	31.464.531	4	5		
			2	11	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	297.000.000			3	42.000.000	3	31.464.531	3	74,92	3	31.464.531	4	11		
			2	11	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang masih administrasi	131	672.240.000			15	99.680.000	15	97.782.000	15	98,10	15	97.782.000	11	15		
			2	11	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	6	250.020.000			1	41.670.000	1	39.800.000	2	95,51	2	39.800.000	33	16		
			2	11	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18	268.020.000			3	44.670.000	3	44.642.000	4	99,94	4	44.642.000	22	17		
			2	11	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81	55.330.000			11	7.670.000	11	7.670.000	6		6	7.670.000	7	14		
			2	11	9	9	Pemeliharaan/renovasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6	86.670.000			1	5.670.000	0	5.670.000	0		0	5.670.000	-	7		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	36	1.892.072.000			6,05	308.420.000	6	308.245.200	6	99,94	6	308.245.200	17	16		
						Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																
			2	11	15		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	240	677.448.500			40	46.589.000	40	46.559.000	40	99,94	40	46.559.000	17	7		
						Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	240	677.448.500			40	46.589.000	40	46.559.000	85	99,94	40	46.559.000	17	7		
			2	11	16		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	240	1.214.623.500			101	261.831.000	101	261.686.200	101	99,94	101	261.686.200	42	22		
						Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	240	1.214.623.500			101	261.831.000	101	261.686.200	101	99,94	101	261.686.200	42	22		
						PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksa-an dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	69	1.136.883.000			8	68.807.000		68.807.000	10	100,00	10	68.807.000	15	6		
			2	11	17		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	454	1.136.883.000			42	68.807.000	42	68.807.000	42	100,00	42	68.807.000	9	6		
						Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	240	635.718.000			40	55.020.000	40	55.020.000	40	100,00	40	55.020.000	17	9		
			2	11	17		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan	214	501.165.000			2	13.787.000	2	13.787.000	2	100,00	2	13.787.000	1	3		
						PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	56	770.723.000			15,4	55.150.000	15	54.890.000	98	99,53	15	54.890.000	27	7		
			2	11	18		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam 1	322	770.723.000			52	55.150.000	52	54.890.000	52	99,53	52	54.890.000	16	7		
						Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang mendapatkan penilaian kesehatan	322	570.723.000			52	55.150.000	52	54.890.000	89	99,53	52	54.890.000	16	10		
						PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	14	792.965.500			2,27	31.378.000		31.378.000				31.378.000	-	4		

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
							Persentase jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan																	
			2	11	19	Pendataan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Jumlah SDM Koperasi yang mengikuti pelatihan	180	792.965.500			70	31.378.000	70	31.378.000	30	100,00	30	31.378.000	17	4			
			2	11	19	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian pada Koperasi dan	Jumlah SDM Koperasi yang mengikuti pelatihan	180	792.965.500			70	31.378.000	70	31.378.000	70	100,00	70	31.378.000	39	4			
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	27,23	880.194.500			4,54	83.130.000		83.130.000	0	100,00	0	83.130.000	-	9			
							Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	27,23																
			2	11	20	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi pembinaan produktivitas dan pemasaran	700	880.194.500			30	83.130.000	30	83.130.000	94	100,00	30	83.130.000	4	9			
			2	11	20	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi pembinaan produktivitas dan pemasaran	700	880.194.500			30	83.130.000	30	83.130.000	30	100,00	30	83.130.000	4	9			
						PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	100	2.221.735.000			25	52.455.000	25	52.455.000	96	100,00	25	52.455.000	25	2			
			2	11	21	Pemberdayaan Usaha mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang didata dan dibina	1.680	2.221.735.000			25	52.455.000	25	52.455.000	96		25	52.455.000	1	2			
			2	11	21	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah peserta pendataan dan pembinaan bagi wirausaha muda	1.680	1.085.336.000			1.500	16.030.000	1500	16.030.000	97	100,00	1500	16.030.000	89	1		
			2	11	21	2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah peserta pembinaan kemitraan usaha mikro	550	701.694.000			50	36.425.000	50	36.425.000	50	100,00	50	36.425.000	9	5		
			2	11	21	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah peserta pembinaan kelembagaan dan potensi pengembangan usaha mikro																
			2	11	21	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro																
						PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	100	2.088.422.000			6,64	333.811.000	6,64	329.166.688	6,64	98,61	6,64	329.166.688	7	16			
							Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	40																

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
	2	11	22		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan pengembangan usaha	18.000	2.088.422.000			30	333.811.000	30	329.166.688	30	98,61	30	329.166.688	0,17	16			
	2	11	22	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi usaha	18.000	2.088.422.000			30	333.811.000	30	329.166.688	30	98,61	30	329.166.688	0,17	16			
	2	13			Kepemudaan dan Olah Raga		100	29.293.614.125			-	5.517.471.325	97,82	5.381.929.255	97,82	97,54	97,82	5.381.929.255	97,82	18	Dinas Pemuda dan Olah Raga		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat	100	14.510.378.625			100	2.724.954.825	100	100		0,00	100	1.982.132.670	100	14			
						Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100				100												
						Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100				100												
						Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85				85												
	2	13	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	20	22.000.000			4	8.000.000	4	8.000.000	4	100,00	4	8.000.000	20	36			
	2	13	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen yang tersusun	20	12.000.000			4	4.000.000	4	4.000.000	4	100,00	4	4.000.000	20	33			
	2	13	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen yang tersusun	12	10.000.000			2	4.000.000	2	4.000.000	2	100,00	2	4.000.000	16,67	40			
	2	13	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	12	13.983.188.625			2	2.464.408.825	2	1.868.162.670	85	75,81	2	1.868.162.670	16,67	13			
				2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	10.854.856.625			12	2.170.971.325	12	528.973.847	12	24,37	12	528.973.847	20	5		
	2	13	2	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	72	3.128.332.000			12	293.437.500	12	281.241.129	12	95,84	12	281.241.129	16,67	8,99		
	2	13	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	95	184.300.000			10	41.206.000	10	22.440.000	10	54,46	10	22.440.000	10,53	12,18			
	2	13	6	3	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yg tersedia	95	28.600.000			10	3.600.000	10	3.600.000	10	100,00	10	3.600.000	10,53	12,59		
	2	13	6	9	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah pelaksanaan rapat-rapat dan konsultasi	1.200	155.700.000			300	37.606.000	300	18.840.000	300	50,10	300	18.840.000	25,00	12,10		
	2	13	9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib administrasi	46	320.890.000			10	89.180.000	10	84.230.000	10	94,45	10	84.230.000	21,74	26,25		
	2	13	9	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	12	232.020.000			2	78.340.000	2	73.390.000	2	93,68	2	73.390.000	16,67	31,63		

No	Kode						Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			2	13	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kantor yang terpelihara	34	88.870.000			8	10.840.000	8	10.840.000	8	100,00	8	10.840.000	23,53	12,20		
							PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	5,00	8.581.258.000			5	843.129.000	4	836.803.240	4	99,25	4	836.803.240	4,00	9,75		
								Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	3,65															
			2	13	15		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	897	8.581.258.000			115	843.129.000	115	644.384.500	92	76,43	115	644.384.500	12,82	7,51		
			2	13	15	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor yang mendapat pelatihan/pembaan	300	390.000.000			80	-	80	192.418.740	80		80	192.418.740	26,67	49,34		
			2	13	15	4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan penguatan potensi pemuda/penanggulangan perilaku negatif Pemuda	180	255.000.000			80	55.000.000	80	54.742.000	80	99,53	80	54.742.000	44,44	21,47		
			2	13	15	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah peserta yang dilatih	210	5.651.258.000			35	788.129.000	35	782.061.240	96,04	99,23	35	782.061.240	16,67	13,84		
							PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	Persentase Cabang Olahraga yang berprestasi	32	5.001.977.500			18	1.599.387.500	18	1.284.319.500	18	80,30	18	1.284.319.500	56,00	25,68		
							Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota																	
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana	5	7.423.000.000			1	1.476.000.000	1	1.464.000.000	92	99,19	1	1.464.000.000	20,00	19,72		
			2	13	18		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event OR Prestasi tingkat daerah	250	3.021.050.000			60	80.000.000	60	74.919.500	60	93,65	60	74.919.500	24,00	2,48		
			2	13	18	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	6	1.483.500.000														
			2	13	18	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	400	1.537.550.000			70	80.000.000	70	74.919.500	70	93,65	70	74.919.500	17,50	4,87		

No	Kode			Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	13	19	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Daerah yang berprestasi	65	468.040.000			-	-	0	-	-	-	0	-	-	-			
	2	13	19	4 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet berprestasi yang diberi penghargaan	65	468.040.000				-	0	-	-	-	0	-	-	-			
	2	13	20	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina dan dikembangkan	11	1.400.000.000			5	30.000.000	5	26.540.000	85	88,47	5	30.000.000	45,45	2,14			
	2	13	20	2 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Olahraga di tingkat Kabupaten	20	900.000.000			5	30.000.000	5	26.540.000	85	88,47	5	26.540.000	25,00	2,95			
	2	13	21	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Festival dan Olahraga Rekreasi yang diselenggarakan	2	112.887.500			1	12.887.500											
	2	13	21	3 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan	Jumlah Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan	2	112.887.500			1	12.887.500											
	2	13	22	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		100	1.200.000.000			2	350.000.000	2	350.000.000	2	100,00	2	350.000.000	2,00	29,17			
	2	13		Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan		10	1.200.000.000			2	350.000.000	2	350.000.000	2	100,00	2	350.000.000	20,00	29,17			
	2	13		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah kegiatan	10	1.200.000.000			2	350.000.000	2	350.000.000	2	100,00	2	350.000.000	20,00	29,17			
	2	14		Statistik		-	100	68.750.000			90	13.750.000	98,45	13.750.000	98,45	95	98,45	13.750.000	98,45	20		
	2	14	15	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		0	100	68.750.000			90	13.750.000	90	13.750.000	90	95	90	13.750.000	95	20	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
	2	14	15	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase data sektoral kabupaten yang tersedia secara akurat	160	68.750.000			90	13.750.000	90	13.750.000	90	95	90	13.750.000	95	20			
	2	15		Persandian		100	200.000.000			100	40.000.000	100	39.551.247	98,75	98,88	98,75	39.551.247	98,75	20	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
	2	15	15	Penyelenggaraan Persandian untuk Penguaman Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0	100	200.000.000			98	40.000.000	98	39.551.247	98	98,88	98	39.551.247	98	20		
	2	15	15	2 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi paerangkat daerah	160	200.000.000			98	40.000.000	98	39.551.247	98	98,88	98	39.551.247	98	20			
	2	16		Kebudayaan		100	9.036.574.300			-	1.481.404.800	96,79	1.433.799.210	98,15	96,79	98,15	1.433.799.210	98,15	96,79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
						PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase Sanggar seni budaya yang aktif	80	6.354.693.250			100	1.086.915.500	100	1.043.883.100	98	96,79	98	1.043.883.100	98	16			
			2	16	15	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	52	2.078.672.400			12	306.169.900	12	298.892.700	12	96,79	12	298.892.700	23	14			
			2	16	15	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	52	2.078.672.400			12	306.169.900	12	298.892.700	12	96,79	12	298.892.700	23	14		
			2	16	16		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Sanggar seni budaya yang aktif	52	2.726.020.850			70	405.745.600	70	370.624.500	70	91,34	70	370.624.500	135	14		
			2	16	16	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah obyek pemajuan Tradisi Budaya yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	52	2.726.020.850			70	405.745.600	70	370.624.500	70	91,34	70	370.624.500	135	14		
			2	16	17		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Sanggar seni budaya yang aktif	100	1.550.000.000			100	375.000.000	100	374.365.900	97	99,83	97	374.365.900	97	24		
			2	16	17	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat	30	1.550.000.000			2	375.000.000	2	374.365.900	2	99,83	2	374.365.900	7	24		
							PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	40	2.681.881.050			10	394.489.300	10	389.916.110	10	98,84	10	389.916.110	25	15		
			2	16	20		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	35	2.681.881.050			5	394.489.300	5	389.916.110	5	98,84	5	389.916.110	14	15		
			2	16	20	2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Perkada tentang penetapan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda	35	2.681.881.050			5	394.489.300	5	389.916.110	5	98,84	5	389.916.110	14	15		
			2	17			Perpustakaan	-	-			-	4.250.340.745	99,47	4.227.784.408	99,85	99,47	99,85	4.227.784.408	99,85	99,47	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	21.364.384.244			100	3.552.656.245		3.544.783.998	100	99,78	100	3.544.783.998	100	17		
							Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100	4.352.636.195			100				100		100			100			
							Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100	4.352.636.294			100				100		100			100			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85				85				85		85					
			2	17	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	157.029.584			6	27.651.700	6	27.646.279	6	99,98	6	27.646.279	20	18		
			2	17	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	47.962.603			6	7.997.400	6	7.995.000	6	99,97	6	7.995.000	60	17		
			2	17	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10	56.608.787			2	9.775.400	2	9.773.279	2	99,98	2	9.773.279	20	17		
			2	17	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30	52.458.194			2	9.878.900	2	9.878.000	2	99,99	2	9.878.000	7	19		
			2	17	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10	17.181.444.746			2	3.010.474.745	2	3.009.545.064	99	99,97	2	3.009.545.064	20	18		
						1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60	14.758.980.030			12	2.764.139.845	12	2.763.231.064	12	99,97	12	2.763.231.064	20	19		
			2	17	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	127	2.422.464.716			15	432.814.900	15	432.724.000	15	99,98	15	432.724.000	12	18		
			2	17	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-										-				
			2	17	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-										-				
			2	17	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	30	1.041.130.563			232.949.800	0	232.300.433	-	99,72	0	232.300.433	-	22			
			2	17	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150	87.891.813			10	38.054.700	10	38.020.000	10	99,91	10	38.020.000	7	43		
			2	17	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15	396.710.000			2	35.000.000	2	34.969.000	2	99,91	2	34.969.000	13	9		
			2	17	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	150	104.088.025			16	33.991.600	16	33.903.065	16	99,74	16	33.903.065	11	33		
			2	17	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50	117.212.531			9	19.439.500	9	19.438.368	9	99,99	9	19.438.368	18	17		
			2	17	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15	68.022.701			2	12.810.000	2	12.810.000	2	100,00	2	12.810.000	13	19		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			2	17	6	9					3		0		-	99,47	0					
			2	17	8					2		2		2	89,96	0						
			2	17	8	2				2		2		2		2						
			2	17	9					4		4		99,89	99,88	4						
			2	17	9	1				6		6		6	100,00	6						
			2	17	9	6				10		10		10	96,06	10						
			2	17	9	9				1,00		1		1	99,69	1						
										84,00		82		82	97,14	82						
										1,14												
										0												
										1												
										5												
			2	17	15							0		-	99,89	0						
			2	17	15	6						134		134		134						
			2	17	15	7						67		67		67						
			2	17	15	9						663		663		663						

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
						Pengembangan Perpustakaan di Tingkat daerah kabupaten/kota	Terpenuhinya Perpustakaan di Tingkat daerah	200	159.474.625														
						Pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan daerah tingkat daerah	Tersedianya kekhasan koleksi perpustakaan daerah	400	94.822.750														
						Pembinaan perpustakaan khusus tingkat kabupaten	Terlaksananya Pembinaan perpustakaan khusus	200	237.056.875														
						Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Terkelolanya Bahan Pustaka	60	335.452.719														
		2	17	16		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		500	1.390.552.638		100	282.988.000	100	268.623.411	95	94,92	100	268.623.411	20	19			
		2	17	16	2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan perabot layanan yang dimiliki perpustakaan	40	1.055.270.000		8	211.054.000	8	196.721.120	8	93,21	8	196.721.120	20	19			
		2	17	16	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah keKelompok yang difasilitasi perpustakaan inklusi sosial	800	195.199.563		150	37.880.000	150	37.848.291	150	99,92	150	37.848.291	19	19			
		2	17	16	5	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang difasilitasi	28	140.083.075		2	34.054.000	2	34.054.000	2	100,00	2	34.054.000	7	24			
		2	18			Kearsipan		75	874.265.500		-	124.853.100	27	124.851.787	99,42	100	99,42	124.851.787	99,42	14		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		2	18	16		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	27 jenis	75	874.265.500		-	124.853.100	27	124.851.787	99	100,00	99	124.851.787	27	14			
		2	18	16	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	27 jenis	1.500	624.265.500		27	124.853.100	27	124.851.787	99	100	99	124.851.787	27	20			
						Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten		250	250.000.000														
		3	1			Kelautan dan Perikanan		0	55.908	9.744.149.224		-	6.679.089.185	97,53	6.513.654.384	98,35	97,52	98,35	6.513.654.384	98,35	67	DINAS PERIKANAN	
		4	3			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	5.230.149.224		100	4.537.792.435	100	4.380.230.794	97	96,53	97	4.380.230.794	97	97		DINAS PERIKANAN	
							Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100			100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	DINAS PERIKANAN	
							Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100			100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	DINAS PERIKANAN	
							Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85			85		85	-	85	-	85	-	85	-	85	DINAS PERIKANAN	
		3	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	25	30.367.843		5	23.794.000	5	23.794.000	5	100,00	5	23.794.000	20	78		DINAS PERIKANAN	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13		
			3	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25	30.367.843			5	23.794.000	5	23.794.000	5	100,00	5	23.794.000	20	78	DINAS PERIKANAN			
			3	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10	4.560.643.185			1	4.013.216.935	1	3.923.263.548	1	97,76	1	3.923.263.548	10	86	DINAS PERIKANAN			
			3	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	3.599.156.725			12	3.259.867.135	12	3.171.958.748	12	97,30	12	3.171.958.748	100	88	DINAS PERIKANAN			
			3	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	265	954.594.539			56	747.949.800	56	745.904.800	56	99,73	56	745.904.800	21	78	DINAS PERIKANAN			
			3	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	6.891.920			1	5.400.000	1	5.400.000	1	100,00	1	5.400.000	17	78	DINAS PERIKANAN			
			3	1	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	166.703.431			-	130.616.500	0	87.162.500	0	66,73	0	87.162.500	-	52	DINAS PERIKANAN			
			3	1	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	1.818.701			12	1.425.000	12	1.425.000	12	100,00	12	1.425.000	20	78	DINAS PERIKANAN			
			3	1	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60	14.061.432			12	11.017.500	12	11.017.500	12	100,00	12	11.017.500	20	78	DINAS PERIKANAN			
			3	1	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	150.823.297			12	118.174.000	12	74.720.000	12	63,23	12	74.720.000	20	50	DINAS PERIKANAN			
			3	1	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30	158.743.901			5	124.380.000	5	104.591.535	5	84,09	5	104.591.535	17	66	DINAS PERIKANAN			
			3	1	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	146.619.226			3	114.880.000	3	95.091.535	3	82,77	3	95.091.535	25	65	DINAS PERIKANAN			
			3	1	8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12.124.675			2	9.500.000	2	9.500.000	2	100,00	2	9.500.000	17	78	DINAS PERIKANAN			
			3	1	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75	313.690.864			28	245.785.000	28	241.419.211	28	98,22	28	241.419.211	37	77	DINAS PERIKANAN			
			3	1	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120	302.019.269			27	236.640.000	27	232.274.211	27	98,16	27	232.274.211	23	77	DINAS PERIKANAN			
			3	1	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	11.671.595			1	9.145.000	1	9.145.000	1	100,00	1	9.145.000	50	78	DINAS PERIKANAN			
							PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	5.428	2.144.000.000			5165	687.945.500	5165	684.399.600	5165	99,48	5165	684.399.600	95	32	DINAS PERIKANAN			
							Jumlah POKMASWAS dan benih yang di restocking															DINAS PERIKANAN			
			3	1	15		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	60	1.850.000.000			12	575.000.000	12	571.663.100	12	99,42	12	571.663.100	20	31	DINAS PERIKANAN			
			3	1	15	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	300	70.000.000			50	22.000.000	50	21.760.000	50	98,91	50	21.760.000	17	31	DINAS PERIKANAN			
			3	1	15	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	330	1.600.000.000			67	396.800.000	67	394.941.500	67	99,53	67	394.941.500	20	25	DINAS PERIKANAN			
			3	1	15	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3	180.000.000			1	156.200.000	1	154.961.600	1	99,21	1	154.961.600	33	86	DINAS PERIKANAN			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			3	1	16	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	100	219.000.000			-	99.215.500	-	99.006.500	-	99,79	-	99.006.500	-	45	DINAS PERIKANAN	
			3	1	16	1 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yang mengikuti pelatihan	60	80.000.000			40	18.776.000	40	18.766.000	40	99,95	40	18.766.000	67	23	DINAS PERIKANAN	
			3	1	16	2 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan nelayan kecil Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	135	50.000.000			25	23.832.500	25	23.753.500	25	99,67	25	23.753.500	19	48	DINAS PERIKANAN	
				1	16	3 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Tersedianya Bantuan Pendanaan, sarana, Kemitraan Usaha bagi nelayan kecil	2	89.000.000			1	56.607.000	1	56.487.000	1	99,79	1	56.487.000	50	63	DINAS PERIKANAN	
			3	1	20	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki Tanda Daftar Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di kawasan pengusahaan Kabupaten Lampung Tengah	10	75.000.000			2	13.730.000	2	13.730.000	98	100,00	2	13.730.000	2	18	DINAS PERIKANAN	
			3	1	20	1 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah dokumen kebijakan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang disusun	280	75.000.000			50	13.730.000	50	13.730.000	50	100,00	50	13.730.000	18	18	DINAS PERIKANAN	
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	3.847	2.140.000.000			3572,5	902.800.000	3572,5	899.679.850	3572,5	99,65	3572,5	899.679.850	93	42	DINAS PERIKANAN	
							Jumlah Pokdakan /UPR yang dibina	#REF!				15										DINAS PERIKANAN	
			3	1	22	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok perikanan pembudidaya ikan yang mendapatkan bantuan pmda Tahun n	100	1.250.000.000			10	394.697.500	10	394.192.200	10	99,87	10	394.192.200	10	32	DINAS PERIKANAN	
							Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)															DINAS PERIKANAN	
			3	1	22	1 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah peserta pelatihan dan pembinaan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	100	1.600.000.000			40	310.949.000	40	310.449.000	40	99,84	40	310.449.000	40	19	DINAS PERIKANAN	
			3	1	22	2 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok usaha perikanan Budidaya (POKDAKAN) baru yang terbentuk	80	50.500.000			20	36.069.500	20	36.069.500	20	100,00	20	36.069.500	25	71	DINAS PERIKANAN	
			3	1	22	4 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah peserta pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	200	100.000.000			40	47.679.000	40	47.673.700	40	99,99	40	47.673.700	20	48	DINAS PERIKANAN	
			3	1	24	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	12	890.000.000			-	508.102.500	0	505.487.650	0	99,49	0	505.487.650	-	57	DINAS PERIKANAN	
							Jumlah penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan budidaya yang disediakan															DINAS PERIKANAN	
							Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengelolaan pembudidayaan ikan di darat yang disusun															DINAS PERIKANAN	

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			3	1	24	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data produksi perikanan budidaya yang disusun	120	50.000.000			28	15.226.500	28	15.226.000	28	100,00	28	15.226.000	23	30	DINAS PERIKANAN	
			3	1	24	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60	140.000.000			12	66.252.000	12	66.252.000	12	100,00	12	66.252.000	20	47	DINAS PERIKANAN	
			3	1	24	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan sarana usaha perikanan budidaya yang disediakan	7	600.000.000			1	392.000.000	1	389.545.650	1	99,37	1	389.545.650	14	65	DINAS PERIKANAN	
			3	1	24	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan obat dan lingkungan budidaya yang disediakan	100	50.000.000			20	13.526.000	20	13.446.000	20	99,41	20	13.446.000	20	27	DINAS PERIKANAN	
			3	1	24	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah peserta pembinaan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik)	200	50.000.000			40	21.098.000	40	21.018.000	40	99,62	40	21.018.000	20	42	DINAS PERIKANAN	
							PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	meningkatkan Jumlah Kelompok Masyarakat pengawas yang aktif dalam pengawasan SDKP	10	160.000.000			2	41.497.500	2	41.497.500	2	100,00	2	41.497.500	20	26	DINAS PERIKANAN	
			3	1	25		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah POKMASWAS dan POKDAKAN yang mendapat pembinaan	15	160.000.000			3	41.497.500	3	41.497.500	3	100,00	3	41.497.500	20	26	DINAS PERIKANAN	
			3	1	25	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah POKMASWAS perikanan tangkap yang mendapat pembinaan	12	130.000.000			2	41.497.500	2	41.497.500	2	100,00	2	41.497.500	17	32	DINAS PERIKANAN	
							Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pokdakan yang dibina																
							PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan	29	1.255.000.000			25	509.053.750	25	507.846.640	25	99,76	25	507.846.640	25	40	DINAS PERIKANAN	
			3	1	26		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan skala Mikro dan Kecil yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha	5	70.000.000			1	30.000.000	1	30.000.000	1	100,00	1	30.000.000	20	43	DINAS PERIKANAN	
			3	1	26	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Database Pelaku Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	120	70.000.000		0	30	30.000.000	30	30.000.000	30	100,00	30	30.000.000	25	43	Dinas Pengulangan Bencana	
			3	1	27		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah produk hasil pengolahan perikanan skala usaha mikro dan kecil yang tersertifikasi	12	125.000.000			2	30.000.000	2	30.000.000	2	100,00	2	30.000.000	17	24	DINAS PERIKANAN	
			3	1	27	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah peserta bimbingan peningkatan kualitas SDM pada UPI dan POKLAHSAR	220	125.000.000			70	30.000.000	70	30.000.000	70	100,00	70	30.000.000	32	24	DINAS PERIKANAN	

No	Kode				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			3	1	28	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi kerja sama dan pemasaran	33	1.060.000.000			8	449.053.750	8	447.846.640	8	99,73	8	447.846.640	24	42	DINAS PERIKANAN	
			3	1	28	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lomba masak serba ikan yang dilaksanakan	15	170.000.000	3	227.853.750	3	227.359.640	3	99,78	3	227.359.640	20	134	DINAS PERIKANAN		
			3	1	28	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pameran produk hasil pengolahan perikanan skala usaha Mikro dan Kecil	125	600.000.000	27	221.200.000	27	220.487.000	27	99,68	27	220.487.000	22	37	DINAS PERIKANAN		
												97,53	6.513.654.384										
			3	2		Pariwisata	0	100	35.506.526.500		-	4.767.967.818	95,94	4.574.253.335	-	95,94	-	4.574.253.335	0	13			
			4	3		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	5.457.220.500		100	3.206.097.517	100	3.039.359.744	100	94,80	100	3.039.359.744	100	56			
							Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100			100		100	-	100		100		100				
							Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100			100		100	-	100		100		100				
							Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85			85		85	-	85		85		85				
			3	2	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	36	67.991.200		6	15.000.000	6	15.000.000	6	100,00	6	15.000.000	6	22			
			3	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	12	27.239.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	100,00	2	6.000.000	17	22			
			3	2	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun	24	54.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	4	100,00	4	9.000.000	17	17			
			3	2	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	36	3.073.596.000		6	2.660.735.517	6	2.548.364.188	6	95,78	6	2.548.364.188	17	83			
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60	11.000.000.000	12	2.172.176.517	12	2.091.437.180	12	96,28	12	2.091.437.180	20	19			
			3	2	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah cakupan layanan administrasi perkantoran	72	2.833.794.000	12	473.559.000	12	441.927.008	12	93,32	12	441.927.008	17	16			
			3	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi yang disusun	36	89.802.000	6	15.000.000	6	15.000.000	6	100,00	6	15.000.000	17	17			
			3	2	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya	280	85.000.000		-	22.050.000	0	20.972.800	0	95,11	0	20.972.800	22	25			
			3	2	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	280	85.000.000	62	22.050.000	62	20.972.800	62	95,11	62	20.972.800	22	25			
			3	2	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan/pelatihan	-	-													
			3	2	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	842.593.300		12	287.272.000	12	243.771.519	12	84,86	12	243.771.519	20	29			

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			3	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50	38.805.500			9	6.582.000	9	6.510.519	9	98,91	9	6.510.519	18	17			
			3	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	43	505.793.000			7	117.293.000	7	113.372.600	7	96,66	7	113.372.600	16	22			
			3	2	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah ketersediaan bahan dan peralatan kebersihan	119	56.968.800			19	6.000.000	19	5.995.300	19	99,92	19	5.995.300	16	11			
			3	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan kebutuhan cetak dan penggandaan	54	241.026.000			9	38.189.000	9	38.189.000	9	100,00	9	38.189.000	17	16			
			3	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan makan dan minum yang tersedia	12	500.000.000			2	119.208.000	2	79.704.100	2	66,86	2	79.704.100	17	16			
			3	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	12	540.000.000			3	90.000.000	3	80.963.884	3	89,96	3	80.963.884	25	15			
			3	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon, internet dan listrik	60	540.000.000			12	90.000.000	12	80.963.884	12	89,96	12	80.963.884	20	15			
			3	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	164	848.040.000			26	131.040.000	26	130.287.353	26	99,43	26	130.287.353	16	15			
			3	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	18	494.040.000			3	82.340.000	3	81.695.000	3	99,22	3	81.695.000	17	17			
			3	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	140	95.100.000			22	14.700.000	22	14.700.000	22		22	14.700.000	16	15			
			3	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	6	258.900.000			1	34.000.000	1	33.892.353	1		1	33.892.353	17	13			
							PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	10	16.108.340.000			3,00	763.713.301	3,00	760.769.391	3,00	99,61	3,00	760.769.391	30	5			
								Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten																	
			3	2	16		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	3	2.444.916.000			1,00	118.490.000	1	117.062.700	1	98,80	1	117.062.700	33	5			
			3	2	16	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	500	184.000.000			100	33.275.000	100	32.975.000	100	99,10	100	32.975.000	20	18			
			3	2	16	7	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang masuk dalam rute perjalanan wisata	60	1.222.458.000			10	85.215.000	10	84.087.700	10	98,68	10	84.087.700	17	7			
			3	2	17		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		0	15	13.663.424.000			3	645.223.301	3	643.706.691	3	99,76	3	643.706.691	20	5		
			3	2	17	2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang kunjungan wisatanya terdata	65	450.000.000			10	80.265.000	10	80.211.600	10	99,93	10	80.211.600	15	18			
			3	2	17	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	6	1.222.458.000			1	379.304.801	1	379.304.801	1	100,00	1	379.304.801	17	31			
			3	2	17	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang home industrinya terdata	-	-															
			3	2	17	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang dilatih Jumlah Pokdarwis yang mendapatkan bantuan	60	938.500.000			10	185.653.500	10	184.190.290	10	99,21	10	184.190.290	17	20			
							PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	67	12.440.966.000			55	503.405.000	55	488.953.100	55	97,13	55	488.953.100	55	4			

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			3	2	19	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	24	2.630.000.000			6	503.405.000	6	488.953.100	6	97,13	6	488.953.100	25	19		
			3	2	19	1 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah event kepariwisataan yang dilaksanakan	24	810.000.000			4	157.260.000	4	156.896.000	4	99,77	4	156.896.000	17	19		
			3	2	19	2 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah keikutsertaan festival krakatau	15	1.220.000.000			4	227.363.000	4	218.258.600	4	96,00	4	218.258.600	27	18		
			3	2	19	3 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah keikutsertaan dalam pelaksanaan pameran/pembangunan tingkat provinsi	-	-														
			3	2	19	4 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah pelaku usaha pariwisata yang dibina	850	612.000.000			150	118.782.000	150	113.798.500	150	95,80	150	113.798.500	18	19		
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	100	1.500.000.000			100	294.752.000	97	285.171.100	97	96,75	97	285.171.100	97	19		
			3	2	22	0 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		25	865.000.000			4	171.210.000	4	169.556.100	4	99,03	4	169.556.100	16	20		
			3	2	22	5 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah kelompok dibina	25	865.000.000			4	171.210.000	4	169.556.100	4	99,03	4	169.556.100	16	20		
			3	2	23	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		125	635.000.000			20	123.542.000	20	115.615.000	94	93,58	20	115.615.000	16	18		
			3	2	23	1 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		125	635.000.000			20	123.542.000	20	115.615.000	94	93,58	20	115.615.000	16	18		
			3	27		Lingkup Pertanian		100	151.590.741.196				44.275.131.318	93,70	41.484.337.223	95,65	93,70	95,65	41.484.337.223	95,65	27	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
			3	27		Pertanian		100	151.590.741.196				32.160.184.131		30.173.657.653	95,01	93,82	95,01	30.173.657.653	95,01	20	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
			3	27	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persentase Ketersediaan Penunjang urusan pemerintahan daerah di OPD	97,13	110.081.454.506			96	21.354.175.431	96,16	20.358.502.883	96,16	95,34	96	20.358.502.883	96	18	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
							Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100,00															
							Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100,00															

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85,00															
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100,00	74.810.000			100	10.810.000	100	10.770.000	100	99,63	100	10.770.000	100	14	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	12,00	18.680.000			2	4.680.000	2	4.680.000	2	100,00	2	4.680.000	17	25	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5,00	34.030.000			1	4.030.000	1	3.990.000	1	99,01	1	3.990.000	20	12	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	60,00	22.100.000			12	2.100.000	12	2.100.000	12	100,00	12	2.100.000	20	10	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	27	02	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100,00	104.610.838.006			100	20.331.558.931	100	19.606.529.505	100	96,43	100	19.606.529.505	100	19	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	27	02	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji Pegawai	60,00	87.391.569.006			12	17.157.109.931	12	16.482.454.505	12	96,07	12	16.482.454.505	20	19	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	27	02	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pelayanan jasa administrasi keuangan	15,00	17.206.072.000			3	3.173.252.000	3	3.122.878.000	3	98,41	3	3.122.878.000	20	18	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	27	02	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Triwulan/ Semesteran SKPD	25,00	13.197.000			6	1.197.000	6	1.197.000	6	100,00	6	1.197.000	24	9	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	27	06	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan administrasi umum	100,00	3.134.846.500			100	570.846.500	100	389.261.919	70	68,19	70	389.261.919	70	12	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	27	06	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	65	22.297.400			3	2.297.400	3	2.290.200	3	99,69	3	2.290.200	5	10	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	

No	Kode						Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	3	27	06	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	10	931.040.700			2	171.040.700	2	145.450.800	2	85,04	2	145.450.800	20	16	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	3	27	06	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	10	118.073.400			5	18.073.400	5	18.046.400	5	99,85	5	18.046.400	50	15	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	3	27	06	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia	15	204.420.000			3	40.420.000	3	40.400.000	3	99,95	3	40.400.000	20	20	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	3	27	06	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	60	1.859.015.000			12	339.015.000	12	183.074.519	12	54,00	12	183.074.519	20	10	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	3	27	08	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00	1.425.000.000			100	285.000.000	100	197.250.794	75	69,21	75	197.250.794	75	14	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	3	27	08	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi dan listrik yang tersedia	60,00	1.425.000.000			12	285.000.000	12	197.250.794	12	69,21	12	197.250.794	20	14	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	3	27	09	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	75,00	835.960.000			55	155.960.000	55	154.690.665	55	99,19	55	154.690.665	73	19	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	3	27	09	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	5,00	221.670.000			1	41.670.000	1	40.728.115	1	97,74	1	40.728.115	20	18	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	3	27	09	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	10,00	373.490.000			2	73.490.000	2	73.312.550	2	99,76	2	73.312.550	20	20	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	3	27	09	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	180,00	240.800.000			60	40.800.000	60	40.650.000	60	99,63	60	40.650.000	33	17	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	27	02			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Presentase peningkatan pendampingan sarana produksi pertanian utama (padi & cabai)	12,00	4.927.350.665			4	582.574.500	4	386.707.970	4	66,38	4	386.707.970	33	8	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	15,00	4.927.350.665			3	582.574.500	3	386.707.970	3	66,38	3	386.707.970	20	8	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	140	439.590.195			28	59.072.000	28	59.072.000	28	100,00	28	59.072.000	20	13	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	450	4.487.760.470			58	523.502.500	58	327.635.970	58	62,59	58	327.635.970	13	7	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana yang digunakan	100,00	35.835.976.025			100	5.979.180.000	100	5.849.283.000	98	97,83	98	5.849.283.000	98	16	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase lahan sawah yang terdata	100,00	2.674.309.400			43,3	279.220.000	99	278.520.000	99	99,75	99	278.520.000	99	10	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	133.000	1.806.442.400			15000	279.220.000	15.000	278.520.000	15.000	99,75	15.000	278.520.000	11	15	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	20,00	867.867.000									-	-	-	-	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase luas sawah yang terairi	87,80	33.161.666.625			86,3	5.699.960.000	86	5.570.763.000	86	97,73	86	5.570.763.000	86	17	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	25,00	4.093.604.160			8	2.247.600.000	8	2.247.600.000	8	100,00	8	2.247.600.000	32	55	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	8,00	2.802.685.000			3	370.210.000	3	370.210.000	3	100,00	3	370.210.000	38	13	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10,00	2.783.053.465			3	602.410.000	3	602.410.000	3	100,00	3	602.410.000	30	22	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20,00	3.019.780.000			5	619.780.000	5	619.780.000	5	100,00	5	619.780.000	25	21	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara																	
	3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	40,00	20.462.544.000			7	1.859.960.000	7	1.730.763.000	7	93,05	7	1.730.763.000	18	8	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas lahan yang terkena bencana	12,02	841.540.000			12,02	295.685.000	14	286.484.200	14	96,89	14	286.484.200	14	34	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	35,51	841.540.000			23	295.685.000	23	286.484.200	23	96,89	23	286.484.200	23	34	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	8700,00	560.880.000			1000	266.245.000	1.000	257.044.200	1.000	96,54	1.000	257.044.200	11	46	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	6074,00	280.660.000			1000	29.440.000	1.000	29.440.000	1.000	100,00	1.000	29.440.000	16	10	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	3	27	07			PROGRAM PENYULUH PERTANIAN	Prosentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh	4,50	8.962.358.400			4	3.948.569.200	4	3.292.679.600	4	83,39	4	3.292.679.600	91	37	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Presentase pelaksanaan penyuluh pertanian	0,75	8.962.358.400			75	3.948.569.200	1	3.292.679.600	1	83,39	1	3.292.679.600	1	37	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200,00	185.080.000			50	18.080.000	50	17.450.000	50	96,52	50	17.450.000	25	9	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	780,00	648.740.000			74	502.360.000	74	494.977.500	74	98,53	74	494.977.500	9	76	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	150,00	1.751.900.000			28	287.000.000	28	284.023.600	28	98,96	28	284.023.600	19	16	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	27	07	2.01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	60,00	140.420.000			10	23.020.000	10	23.000.000	10	99,91	10	23.000.000	17	16	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	125,00	6.236.218.400			24	3.118.109.200	24	2.473.228.500	24	79,32	24	2.473.228.500	19	40	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	27				Peternakan dan Perkebunan			36.257.967.745			12.114.947.187	93,36	11.310.679.570	95,72	93,36	95,72	11.310.679.570	95,72	31	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN		
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (SEBATAS INI) PERTANIAN SM KINERJA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	52.620.914.847			100	9.654.009.687	-	9.273.905.670	-	96,06	-	9.273.905.670	-	18	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
							Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100				100								-		DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
							Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100				100								-		DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85				85										DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
			3	3	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36	316.001.823			8	18.826.500	8	18.676.500	8	99,20	8	18.676.500	22	6	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
			3	3	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36	208.257.125			6	18.826.500	6	18.676.500	6	99,20	6	18.676.500	17	9	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
			3	3	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	107.744.698			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
			3	3	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60	45.356.175.000			12	8.987.590.887	12	8.723.816.594	12	97,07	12	8.723.816.594	20	19	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
			3	3	2	02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60	40.650.000.000			12	8.077.122.487	12	7.847.831.388	12	97,16	12	7.847.831.388	20	19	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
			3	3	2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	320	4.650.000.000			61	902.305.900	61	868.352.706	61	96,24	61	868.352.706	19	19	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
			3	3	2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6,00	56.175.000			1	8.162.500	1	7.632.500	1	93,51	1	7.632.500	17	14	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
			3	3	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	120.000.000													DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
			3	3	5		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12	120.000.000													DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
			3	3	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	3.372.729.476			12	260.583.300	12	232.122.848	12	89,08	12	232.122.848	20	7	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
			3	3	6		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	299	1.917.650.020			38	145.950.000	38	144.784.000	38	99,20	38	144.784.000	13	8	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
			3	3	6		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	84	74.254.800			14	12.375.800	14	12.375.800	14	100,00	14	12.375.800	17	17	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%				
	K	Rp	K	Rp	K			Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12			13
			3	3	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah ketersediaan kebutuhan cetak dan penggandaan	138.438	234.071.130			23073	35.869.500	23.073	31.200.000	23.073	86,98	23.073	31.200.000	17	13	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
			3	3	6	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat	4.050	418.945.526			90	31.100.000	90	31.025.000	90	99,76	90	31.025.000	2	7	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
			3	3	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah pelaksanaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	534	727.808.000			89	35.288.000	89	12.738.048	89	36,10	89	12.738.048	17	2	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
			3	3	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	1.232.980.890			12	148.159.000	12	80.576.601	12	54,39	12	80.576.601	20	7	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
			3	3	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang disiapkan	2.943	152.936.713			478	7.651.000	478	7.651.000	478	100,00	478	7.651.000	16	5	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
			3	3	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang terpenuhi	72	1.080.044.177			12	140.508.000	12	72.925.601	12	51,90	12	72.925.601	17	7	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
			3	3	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	462	2.223.027.658			40	238.850.000	40	218.713.127	40	91,57	40	218.713.127	9	10	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
			3	3	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan yang terpelihara	228	1.795.245.617			38	212.670.000	38	192.533.127	38	90,53	38	192.533.127	17	11	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
			3	3	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kantor yang dipelihara	228	186.011.518			38	26.180.000	38	26.180.000	38	100,00	38	26.180.000	17	14	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
			3	3	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung yang dipelihara	6	241.770.523									-	-	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
							PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah populasi peternakan (sapi)	350.527	12.039.816.010			317484	1.821.982.000	-	1.567.801.300	-	86,05	-	1.567.801.300	-	13	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Produktivitas komoditas unggulan(Kakao) (ton/ha)	kelapa sawit 3,661 ton/ha, karet 1,036 ton/ha, kakao 0,891 ton/ha, tebu 7,938 ton/ha, lada 0,880 ton/ha, kelapa dalam 1,311 ton/ha			kelapa sawit 3,009 ton/ha, karet 0,938 ton/ha, kakao 0,769 ton/ha, tebu 6,848 ton/ha, lada 0,837 ton /ha, kelapa dalam 1,188 ton/ha			-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	3	15		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi perkebunan	kelapa sawit 4%, karet 2%, kakao 3 %, tebu 3%, lada 1 % kelapa dalam 2 %	4.554.691.691			100	296.954.000	70	161.813.300	70	54,49	70	161.813.300	70	4	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	3	15	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Peserta yang dibina	900	4.554.691.691			100	296.954.000	70	161.813.300	70	54,49	70	161.813.300	70	4	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
							Jumlah pengadaan bibit perkebunan	30.000	-			5000										DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	3	17		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah produksi daging dan telur yang asuh (aman,sehat, utuh dan halal)	10	3.214.823.999			2	1.171.948.000	2	1.075.708.000	2	91,79	2	1.075.708.000	20	33	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	3	17	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	jumlah kelompok yang dibina	210	3.214.823.999			45	1.171.948.000	45	1.075.708.000	45	91,79	45	1.075.708.000	21	33	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	3	19		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	angka lahir (ekor)	293.641	4.270.300.320			46550	353.080.000	46.550	330.280.000	46.550	93,54	46.550	330.280.000	16	8	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	3	19	6	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	jumlah pengadaan ternak sapi	42	4.270.300.320			342	353.080.000	342	330.280.000	342	93,54	342	330.280.000	814	8	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
							Jumlah IB yang dilakukan	577.144	-			84850											
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan sarana dan rasarana peternakan dan perkebunan (0,1%)	15	2.993.654.763			10	222.680.000	10	75.934.000	10	34,10	-	75.934.000	10	3	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
		3	3	21		Pengembangan Prasarana Pertanian	jumlah pendampingan dan pembinaan	24	588.929.598			4	48.420.000	4	46.026.000	4	95,06	4	46.026.000	10	8	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	3	21	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	jumlah kelompok usaha yang mendapatkan kredit	27	588.929.598			2	48.420.000	2	46.026.000	2	95,06	2	46.026.000	7	8	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
							jumlah kelompok yang dibina	12	-											-			
		3	3	22		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	65	2.404.725.165			5	174.260.000	5	29.908.000	5	17,16	5	29.908.000	8	1	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	3	22	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	65	2.404.725.165			5	174.260.000	5	29.908.000	5	17,16	5	29.908.000	8	1	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
						PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	85	2.826.861.698			85	248.990.500	85	237.060.600	85	95,21	85	237.060.600	85	8	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	3	25		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pemberian vaksinasi dan pemberian pengobatan ternak	12	2.826.861.698			2	248.990.500	2	237.060.600	2	95,21	2	237.060.600	17	8	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	3	25	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	jumlah ternak yang divaksin dan diobati (ekor)	93.461	2.826.861.698			13261	248.990.500	13.261	237.060.600	13.261	95,21	13.261	237.060.600	14	8	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
						PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas lahan perkebunan yang tertangani akibat bencana	18,00	641.655.544			3	35.745.000	3	27.375.000	3	76,58	3	27.375.000	17	4	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	3	30		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	jumlah luasan komoditas perkebunan yang dilakukan pengendalian dan penanggulangan serangan OPT (ha)	18	641.655.544			3	35.745.000	3	27.375.000	3	76,58	3	27.375.000	17	4	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	3	30	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	jenis komoditas	18	641.655.544			3	35.745.000	3	27.375.000	3	76,58	3	27.375.000	17	4	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh	100	4.587.462.790			25	131.540.000	25	128.603.000	25	97,77	25	128.603.000	25	3	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	3	34		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kunjungan penyuluh (kali)	5.184	4.587.462.790			864	131.540.000	864	128.603.000	864	97,77	864	128.603.000	17	3	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3	3	34	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	jumlah kelompok yang dibina	21	1.264.034.350			15	76.450.000	15	75.813.500	15	99,17	15	75.813.500	71	6	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
							Jumlah penyuluh dan UPTD yang mengikuti pendidikan formal/seminar	198	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	3	34	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	jumlah pameran	18	3.323.428.440			2	55.090.000	2	52.789.500	2	95,82	2	52.789.500	11	2	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
													93,70	41.484.337.223									
		3	6			Perdagangan		0	100	58.195.011.960		0	11.248.733.302	95,47	10.738.795.920	98,61	95,47	98,61	10.738.795.920	98,61	18		
		3	6			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	48.349.874.760			100	9.669.974.352	100	8.444.106.654	100	87,32	100	8.444.106.654	100	17		
							Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100			100		100		100		100		100				
							Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100			100		100		100		100		100				
							Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85			85		85		85		85		85				
		3	6	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	40	100.000.000			8	19.999.400	8	19.999.400	100	100,00	8	19.999.400	20	20		
		3	6	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	25	50.000.000			5	9.999.400	5	9.999.400	100	100,00	5	9.999.400	20	20		
		3	6	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat daerah yang disusun	15	50.000.000			3	10.000.000	3	10.000.000	100	100,00	3	10.000.000	20	20		
		3	6	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	60	42.359.163.760			12	8.471.832.752	12	7.594.259.551	100	89,64	12	7.594.259.551	20	18		
		3	6	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60	31.766.826.760			12	6.353.365.352	12	5.861.160.551	100	92,25	12	5.861.160.551	20	18		
		3	6	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	10.592.337.000			12	2.118.467.400	12	1.733.099.000	100	81,81	12	1.733.099.000	20	16		
		3	6	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	3.832.611.000			12	766.522.200	12	563.247.703	100	73,48	12	563.247.703	20	15		
		3	6	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	491.910.000			11	98.382.000	11	54.944.500	100	55,85	11	54.944.500	18	11		
		3	6	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	45	2.160.823.500			9	432.164.700	9	364.249.000	100	84,28	9	364.249.000	20	17		
		3	6	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	796.797.500			12	159.359.500	12	124.737.000	100	78,27	12	124.737.000	20	16		
		3	6	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	383.080.000			12	76.616.000	12	19.317.203	100	25,21	12	19.317.203	20	5		

No	Kode			Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2			3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			3 6 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan	-	-			0	-	-	-	-	-	-	-				
			3 6 7 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kebutuhan kendaraan dinas perorangan/jabatan yang disediakan	-	-			0	-	-	-	-	-	-	-				
			3 6 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	70	2.058.100.000			10	411.620.000	10	266.600.000	100	64,77	10	266.600.000	14	13		
			3 6 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	5	183.350.000			1	36.670.000	1	35.689.000	100	97,32	1	35.689.000	20	19		
			3 6 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang mendapat pemeliharaan	20	1.051.300.000			5	210.260.000	5	96.591.000	100	45,94	5	96.591.000	25	9		
			3 6 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	40	190.300.000			8	38.060.000	8	7.820.000	100	20,55	88	7.820.000	220	4		
			3 6 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	633.150.000			1	126.630.000	1	126.500.000	100	99,90	1	126.500.000	20	20		
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah Kabupaten	100	4.059.974.000			100	1.012.809.750	85	859.802.460	85	84,89	85	859.802.460	85	21		
			3 6 22	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		0	3.557.200.000			0	879.342.450	-	787.610.960	90	89,57	-	787.610.960	-	22		
			3 6 22 1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah dokumen profil pasar Meningkatnya kualitas bangunan pasar daerah Meningkatnya sarana distribusi perdagangan melalui SRG	9	2.057.200.000			3	501.734.200	3	464.256.900	100	92,53	3	464.256.900	33	23		
			3 6 22 2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terealisasi 4 Pasar Sehat dan 9 Pasar Daerah	14	1.500.000.000			9	377.608.250	9	323.354.060	100	85,63	9	323.354.060	64	22		
			3 6 23	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		0	502.774.000			0	133.467.300	-	72.191.500	70	54,09	-	72.191.500	-	14		
			3 6 23 1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah pedagang yang telah dilakukan pendataan	54	207.774.000			9	35.793.500	9	34.823.500	100	97,29	9	34.823.500	17	17		
			3 6 23 2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah sdm yang dibina	420	295.000.000			9	97.673.800	9	37.368.000	100	38,26	9	37.368.000	2	13		
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	<9%	3.590.163.200			180.308.200	156.563.100	86,83	156.563.100	86,83	156.563.100	86,83	156.563.100	86,83	4		
			3 6 24	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		0	111 239.133.200			9	17.533.200	9	16.606.200	100	94,71	9	16.606.200	8	7		
			3 6 24 3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		0	111 239.133.200			9	17.533.200	9	16.606.200	100	94,71	9	16.606.200	8	7		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			3	6	25	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	0	140	3.351.030.000			0	162.775.000	-	139.956.900	85,98	-	139.956.900	-	4				
			3	6	25	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Tersedianya informasi variasi harga antar waktu Tersedianya informasi variasi harga antar waktu	140	339.550.000		9	123.150.000	9	106.727.500	100	86,66	9	106.727.500	6	31			
			3	6	25	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan sembako dengan harga murah	106	3.011.480.000		6	39.625.000	6	33.229.400	100	83,86	6	33.229.400	6	1			
							PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang pada tahun berjalan	100	2.195.000.000			385.641.000		379.846.000	99	98,50	99	379.846.000	99	17			
			3	6	28		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP wajib Tera/Tera Ulang yang bertanda Tera Sah yang berlaku	140	2.195.000.000		10	385.641.000	10	379.846.000	100	98,50	10	379.846.000	7	17			
			3	6	28	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang dilakukan Tera/Tera Ulang	42	1.048.000.000		10	331.871.000	10	326.546.000	100	98,40	10	326.546.000	24	31			
			3	6	28	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Kecamatan yang dilakukan pengawasan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus)	168	1.147.000.000		13	53.770.000	13	53.300.000	100	99,13	13	53.300.000	8	5			
							PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku UMKM yang dibina	70	570.213.000												DINAS PERDAGANGAN		
			6		29		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		-	570.213.000	-	-	0									DINAS PERDAGANGAN		
			6		29	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Berkembangnya pelaku usaha lokal (UMKM) melalui fasilitasi dan promosi produk unggulan dalam negeri	12	570.213.000	-	-	0										DINAS PERDAGANGAN	
													95,47	10.738.795.920										
			3		7		Perindustrian		100	32.524.234.000		0	4.865.722.427	95,48	4.645.895.601	96,73	95,48	96,73	4.645.895.601	14	14	DINAS PERINDUSTRIAN		
			4		3		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	16.550.000.000		100	3.267.477.427	100	2.989.601.920	100	91,50	100	2.989.601.920	100	18	DINAS PERINDUSTRIAN		
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100			100		100	-	100		100	-	100	-	DINAS PERINDUSTRIAN		
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100			100		100	-	100		100	-	100	-	DINAS PERINDUSTRIAN		
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85			85		85	-	85		85	-	85	-	DINAS PERINDUSTRIAN		
			3		7	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	8	727.000.000		8	158.748.000	7	138.328.000	7	87,14	7	138.328.000	88	19	DINAS PERINDUSTRIAN		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			3	7	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	15	432.000.000			3	85.428.000	4	80.998.000	4	94,81	4	80.998.000	27	19	DINAS PERINDUSTRIAN		
			3	7	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang disusun	12	125.000.000			2	23.320.000	2	20.830.000	2	89,32	2	20.830.000	17	17	DINAS PERINDUSTRIAN		
			3	7	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat daerah yang disusun	16	170.000.000			3	50.000.000	1	36.500.000	1	73,00	1	36.500.000	6	21	DINAS PERINDUSTRIAN		
			3	7	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	10	1.506.000.000			2	2.531.267.427	2	2.301.871.534	2	90,94	2	2.301.871.534	20	153	DINAS PERINDUSTRIAN		
			3	7	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	110	1.370.000.000			20	2.073.587.427	20	2.058.728.064	20	99,28	20	2.058.728.064	18	150	DINAS PERINDUSTRIAN		
			3	7	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	136.000.000			12	457.680.000	12	243.143.470	12	53,13	12	243.143.470	20	179	DINAS PERINDUSTRIAN		
			3	7	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya	25	125.000.000			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERINDUSTRIAN	
			3	7	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi	25	125.000.000			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERINDUSTRIAN	
			3	7	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	1.324.750.000			12	258.812.000	12	252.813.246	12	97,68	12	252.813.246	20	19	DINAS PERINDUSTRIAN		
			3	7	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	42	32.850.000			8	6.180.500	8	6.180.500	8	100,00	8	6.180.500	19	19	DINAS PERINDUSTRIAN		
			3	7	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	758	85.000.000			151	16.492.000	251	16.492.000	251	100,00	251	16.492.000	33	19	DINAS PERINDUSTRIAN		
			3	7	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makan dan minum harian pegawai	245	300.000.000			48	56.815.500	48	56.815.500	48	100,00	48	56.815.500	20	19	DINAS PERINDUSTRIAN		
			3	7	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	62.400	146.900.000			12326	28.861.000	12.326	28.861.000	12.326	100,00	12.326	28.861.000	20	20	DINAS PERINDUSTRIAN		
			3	7	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	365	170.500.000			72	33.705.000	72	28.460.000	72	84,44	72	28.460.000	20	17	DINAS PERINDUSTRIAN		
			3	7	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	3.345	550.000.000			648	109.038.000	648	108.284.246	648	99,31	648	108.284.246	19	20	DINAS PERINDUSTRIAN		
			3	7	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis perangkat daerah yang dikelola	725	39.500.000			144	7.720.000	144	7.720.000	144	100,00	144	7.720.000	20	20	DINAS PERINDUSTRIAN		
			3	7	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan	60	579.000.000			12	121.000.000	12	120.400.000	12	99,50	12	120.400.000	20	21	DINAS PERINDUSTRIAN		
			3	7	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kebutuhan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	60	579.000.000			12	121.000.000	12	120.400.000	12	99,50	12	120.400.000	20	21	DINAS PERINDUSTRIAN		
			3	7	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	176.000.000			12	36.000.000	12	14.639.140	12	40,66	12	14.639.140	20	8	DINAS PERINDUSTRIAN		
			3	7	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	176.000.000			12	36.000.000	12	14.639.140	12	40,66	12	14.639.140	20	8	DINAS PERINDUSTRIAN		
			3	7	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	167	827.500.000			0	161.650.000	-	161.550.000	-	99,94	-	161.550.000	-	20	DINAS PERINDUSTRIAN		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			3	7	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang mendapat pemeliharaan	22	451.000.000			4	89.340.000	4	89.340.000	4	100,00	4	89.340.000	18	20	DINAS PERINDUSTRIAN	
			3	7	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	140	93.500.000			27	18.310.000	27	18.310.000	27	100,00	27	18.310.000	19	20	DINAS PERINDUSTRIAN	
			3	7	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	283.000.000			1	54.000.000	1	53.900.000	1	99,81	1	53.900.000	20	19	DINAS PERINDUSTRIAN	
							PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Implementasi pelaksanaan RPIK	15	11.802.734.000			1.219.306.000	2.393.569.766	196,31	2.393.569.766	-	-	20	20	DINAS PERINDUSTRIAN			
			3	7	15		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RIPIK yang telah ditetapkan dengan PERDA	5	11.802.734.000			1	1.219.306.000	1	1.196.784.883	1	98,15	1	1.196.784.883	20	10	DINAS PERINDUSTRIAN	
			3	7	15	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan industri yang disusun	6	2.698.500.000			1	376.018.000	1	374.918.000	1	99,71	1	374.918.000	17	14	DINAS PERINDUSTRIAN	
			3	7	15	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	90	700.000.000			15	761.054.000	15	740.572.883	15	97,31	15	740.572.883	17	106	DINAS PERINDUSTRIAN	
			3	7	15	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana industri	5	7.500.000.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERINDUSTRIAN	
			3	7	15	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah masyarakat yang diberikan pembinaan / pelatihan	2.550	904.234.000			8	82.234.000	8	81.294.000	8	98,86	8	81.294.000	0	9	DINAS PERINDUSTRIAN	
							PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan industry yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan terhadap industry yang difasilitasi dan dilakukan pemantauan serta pengawasan	70,00	1.815.000.000			5	152.349.000	5	147.616.700	55	96,89	5	147.616.700	7	8	DINAS PERINDUSTRIAN	
			3	7	16		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha yang diterbitkan	49	1.815.000.000			20	152.349.000	20	147.616.700	20	96,89	20	147.616.700	41	8	DINAS PERINDUSTRIAN	
			3	7	16	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin usaha yang difasilitasi dalam Siinas yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan secara elektronik	47	1.085.000.000			15	89.269.000	15	84.619.000	15	94,79	15	84.619.000	32	8	DINAS PERINDUSTRIAN	
			3	7	16	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok yang dilakukan pengawasan dan pemantauan tentang perizinan	78	730.000.000			20	63.080.000	20	62.997.700	20	99,87	20	62.997.700	26	9	DINAS PERINDUSTRIAN	
							PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase peningkatan data perusahaan industri yang ada di dalam Siinas terhadap jumlah total perusahaan industri	100	2.356.500.000			5	226.590.000	3	115.152.100	3	50,82	3	115.152.100	3	5	DINAS PERINDUSTRIAN	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13			
			3	7	17	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah informasi industri yang ada di Siinas	504	2.356.500.000			32	226.590.000	30	115.152.100	30	50,82	30	115.152.100	6	5	DINAS PERINDUSTRIAN			
			3	7	17	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah ikm yang difasilitasi dalam pengumpulan, pengolahan dan analisa data industri melalui SIINas	138	1.001.500.000			16	116.590.000	16	115.152.100	16	98,77	16	115.152.100	12	11	DINAS PERINDUSTRIAN		
			3	7	17	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah publikasi data informasi dan analisa industri kabupaten yang dilaksanakan	20	1.355.000.000			2	110.000.000	1								DINAS PERINDUSTRIAN		
											0	4.865.722.427	95,48	4.645.895.601											
			3	8			Transmigrasi					151	140.750.000	60	63.950.000	40	45,43517	40	63.950.000	40	4,09				
							PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	100	1.564.250.000			151	140.750.000	252	63.950.000	100	45,44	252	63.950.000	252	4,09			
			3	8	16		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	100	1.564.250.000			151	63.950.000	-	63.950.000	100		-	63.950.000	-	4,09			
			3	8	16	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kerja sama antar daerah (KSAD) kabupaten/kota	201	854.500.000			1	27.800.000	-	-	100		-	-	-	-			
			3	8	16	4	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	6	120.000.000			50	49.000.000	-	-	85		-	-	-	-			
			3	8	16	5	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah calon peserta transmigran yang diberikan penyuluhan	300	254.000.000			250	37.200.000	250	37.200.000	6	100,00	250	37.200.000	250	14,65			
			3	8	16	6	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah calon peserta transmigran yang mendapat pelatihan	300	210.200.000			2	26.750.000	2	26.750.000	6	100,00	2	26.750.000	2	12,73			
									425	125.550.000				45	63.950.000			45	63.950.000	45	50,94				
			4	1			Administrasi Pemerintahan		100	293.471.820.495			0	52.280.124.921	95	49.411.962.605	98	94,51	98	49.411.962.605	98	17	Sekretariat Daerah		
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	222.302.421.378				41.067.764.521	97	39.389.923.406	97	95,91	97	39.389.923.406	97	18	Sekretariat Daerah		
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100														Sekretariat Daerah		
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100															Sekretariat Daerah	
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	100															Sekretariat Daerah	
								Persentase kebijakan bidang organisasi yang diimplementasikan	100															Sekretariat Daerah	
								Persentase PD yang menyampaikan LKJIP tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku	100															Sekretariat Daerah	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Persentase PD yang telah menyusun dokumen ANJAB dan ABK PD sesuai dengan ketentuan	100														Sekretariat Daerah	
							Persentase fasilitasi ketersediaan pidato dan naskah sambutan KDH dan WKDH	100														Sekretariat Daerah	
							Persentase fasilitasi keprotokolan pimpinan	100														Sekretariat Daerah	
							Persentase fasilitasi penunjang operasional dan kegiatan KDH/WKDH	100														Sekretariat Daerah	
							Tingkat pemenuhan pelayanan Kerumahtanggaan KDH/WKDH/Sekda	100														Sekretariat Daerah	
							Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100														Sekretariat Daerah	
			4	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	350	1.606.016.400		55	261.446.500	55	238.539.829	55	91,24	55	238.539.829	15,71	15		Sekretariat Daerah	
			4	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	400	744.858.000		55	205.973.700	55	189.720.985	55	92,11	55	189.720.985	13,75	25		Sekretariat Daerah	
			4	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	250	330.158.400		45	55.472.800	45	48.818.844	45	88,01	45	48.818.844	18	15		Sekretariat Daerah	
			4	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22	137.482.459.485		4	25.648.839.671	4	25.189.842.007	4	98,21	4	25.189.842.007	18,18	18		Sekretariat Daerah	
			4	1	2	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60	110.783.519.346		12	20.595.922.771	12	20.268.714.094	12	98,41	12	20.268.714.094	20	18		Sekretariat Daerah	
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	25.909.273.339		12	4.899.540.400	12	4.773.357.868	12	97,42	12	4.773.357.868	12	18		Sekretariat Daerah	
							Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10	293.666.800		2	153.376.500	2	147.770.045	2	96,34	2	147.770.045	20	50		Sekretariat Daerah	
			4	1	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	190	1.140.300.000		40	67.000.000	35	66.980.000	35	99,97	35	66.980.000	18,42	6		Sekretariat Daerah	
							Jumlah pegawai yang tidak pernah mendapat hukuman disiplin	190														Sekretariat Daerah	
							Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya	152														Sekretariat Daerah	
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	420	415.800.000		50	55.000.000	50	54.980.000	50	99,96	50	54.980.000	11,90	13		Sekretariat Daerah	
			4	1	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	59	424.500.000		3	12.000.000	3	12.000.000	3	100,00	3	12.000.000	5,08	3		Sekretariat Daerah	

No	Kode						Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	4	1	6				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	5.751	19.003.363.799			0	5.991.395.450							0	30	Sekretariat Daerah	
	4	1	6	1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	155	2.008.182.993			40	440.762.200	40	439.222.800			40	439.222.800	25,81	22	Sekretariat Daerah	
	4	1	6	2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	359	2.026.475.092			260	269.579.300	260	265.596.020	260	98,52	260	265.596.020	72,42	13	Sekretariat Daerah	
	4	1	6	3			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang disediakan	213	3.363.193.550			50	2.956.871.750	50	2.938.203.700	50	99,37	50	2.938.203.700	23,47	87	Sekretariat Daerah	
	4	1	6	4			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan rapat yang disediakan	300	12.000.000			45	2.400.000	45	2.400.000			45	2.400.000	15	20	Sekretariat Daerah	
	4	1	6	5			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	1.500	1.910.262.928			300	374.898.200	300	363.865.150	300	97,06	300	363.865.150	20	19	Sekretariat Daerah	
	4	1	6	6			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah barang bacaan yang disediakan	43	103.810.500			8	19.550.000	8	19.334.700	8	98,90	8	19.334.700	18,60	19	Sekretariat Daerah	
	4	1	6	8			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan dan minum kunjungan tamu	1.200	6.901.104.000			350	1.559.784.000	350	1.459.696.200	350	93,58	350	1.459.696.200	29,17	21	Sekretariat Daerah	
	4	1	6	9			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	1.981	2.678.334.735			12	367.550.000	12	278.891.407	12	75,88	12	278.891.407	0,61	10	Sekretariat Daerah	
	4	1	7				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	150	6.294.216.000			35	18.000.000	35	15.690.000	35	87,17	35	15.690.000	23,33	0	Sekretariat Daerah	
	4	1	8	3			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kebutuhan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	78	1.018.000.000			2	18.000.000	2	15.690.000	2	87,17	2	15.690.000	2,56	2	Sekretariat Daerah	
	4	1	8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	11.161.300.000			12	1.768.180.000	12	1.756.797.915	12	99,36	12	1.756.797.915	20	16	Sekretariat Daerah	
	4	1	8	2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Internet, Listrik	30	8.623.850.000			12	1.260.690.000	12	1.253.048.915	12	99,39	12	1.253.048.915	40	15	Sekretariat Daerah	
	4	1	8	3			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan kerja yang dilakukan perbaikan	600	2.537.450.000			12	507.490.000	12	503.749.000	12	99,26	12	503.749.000	2	20	Sekretariat Daerah	
	4	1	9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	758	27.868.517.100			310	4.454.757.000	310	3.705.025.628	310	83,17	310	3.705.025.628	40,90	13	Sekretariat Daerah	
	4	1	9	1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan jabatan	20	1.684.190.000			4	287.600.000	4	280.995.000	4	97,70	4	280.995.000	20	17	Sekretariat Daerah	
	4	1	9	2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional	112	14.008.210.000			97	2.264.290.000	97	2.231.756.407	97	98,56	97	2.231.756.407	86,61	16	Sekretariat Daerah	
	4	1	9	6			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang dilakukan perbaikan	601	5.574.782.100			205	669.072.000	205	653.980.000	205	97,74	205	653.980.000	34,11	12	Sekretariat Daerah	
	4	1	9	9			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	11	5.641.335.000			4	1.233.795.000	4	538.294.221	4	43,63	4	538.294.221	36,36	10	Sekretariat Daerah	
	4	1	15				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan operasional pelayanan KDH/WKD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	3	3.456.547.416			1	249.000.000	1	235.956.600	1	94,76	1	235.956.600	33,33	7	Sekretariat Daerah	
	4	1	15	2			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	jumlah pakaian dinas yang disediakan	152	1.176.547.416			32	209.000.000	32	208.676.600	32	99,85	32	208.676.600	21,05	18	Sekretariat Daerah	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
						5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		4	1	15	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10	480.000.000			2	40.000.000	2	27.280.000	2	68,20	2	27.280.000	20,00	6	Sekretariat Daerah	
		4	1	16		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	6	7.974.000.000			1	1.158.000.000	1	1.065.781.000	1	92,04	1	1.065.781.000	16,67	13	Sekretariat Daerah	
		4	1	16	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	75	3.814.000.000			15	612.000.000	15	607.819.000	15	99,32	15	607.819.000	20,00	16	Sekretariat Daerah	
		4	1	16	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	70	2.320.000.000			12	360.000.000	12	277.509.500	12	77,09	12	277.509.500	17,14	12	Sekretariat Daerah	
		4	1	16	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	70	1.840.000.000			12	186.000.000	12	180.452.500	12	97,02	12	180.452.500	17,14	10	Sekretariat Daerah	
		4	1	17		Penataan Organisasi	200	4.391.114.179			75	666.068.900	60	666.068.900	60	100,00	60	666.068.900	30,00	15	Sekretariat Daerah	
						Jumlah Dokumen LKJJP Kabupaten yang disusun tepat waktu	32														Sekretariat Daerah	
						Jumlah PD dengan Nilai SAKIP Minimal B	32														Sekretariat Daerah	
						Jumlah PD yang telah melaksanakan PMPRB	32														Sekretariat Daerah	
						Jumlah Dokumen Analisis Jabatan, ABK, dan Evaluasi Jabatan yang disusun	32														Sekretariat Daerah	
						Jumlah dokumen evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang disusun	1														Sekretariat Daerah	
						Jumlah Perda/Perkada tentang Kelembagaan yang disusun	10														Sekretariat Daerah	
						Jumlah Unit Layanan yang dilakukan Survey Kepuasan Pelayanan Publik	39														Sekretariat Daerah	
						Jumlah Perkada tentang Pedoman Tata Naskah Dinas; Pakaian Dinas; Jam Kerja; Metode Kerja; Prosedur Kerja; dan Pola Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang disusun															Sekretariat Daerah	
		4	1	17	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	50	1.660.775.911			10	303.918.300	10	276.637.069	10	91,02	10	276.637.069	20	17	Sekretariat Daerah	
		4	1	17	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5	619.941.757			1	65.021.100	1	65.020.900	1	100,00	1	65.020.900	20	10	Sekretariat Daerah	
						Jumlah PD yang difasilitasi penyusunan SOP dan Standar Pelayanan Publik	32														Sekretariat Daerah	
						Jumlah peserta sosialisasi Bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	279														Sekretariat Daerah	
		4	1	17	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5	1.319.894.455			1	150.071.000	1	145.993.000	1	97,28	1	145.993.000	20	11	Sekretariat Daerah	
						Jumlah PD yang difasilitasi penyusunan SAKIP PD	32														Sekretariat Daerah	
		4	1	17	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100	558.102.601			20	117.388.600	39	92.619.900	39	78,90	39	92.619.900	39	17	Sekretariat Daerah	
		4	1	17	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5	232.399.454			1	29.669.900	1	29.469.000	1	99,32	1	29.469.000	20	13	Sekretariat Daerah	

No	Kode			Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	4	1	18		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah kegiatan KDH difasilitasi (keprotokolan)	1.092	4.148.037.000		200	785.077.000	200	682.031.550	200	86,87	200	682.031.550	18,32	16	Sekretariat Daerah	
						Jumlah liputan dan dokumentasi kegiatan KDH dan WKDH	1.092													Sekretariat Daerah	
	4	1	18	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah koordinasi penyiapan kegiatan KDH dan WKDH	250	1.718.094.000		12	456.454.000	12	362.070.800	12	79,32	12	362.070.800	4,8	21	Sekretariat Daerah	
						Jumlah dokumen jadwal agenda Pemerintah Daerah yang disusun	12													Sekretariat Daerah	
	4	1	18	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Materi Bahan Rapat yang disusun	250	1.704.943.000		12	328.623.000	12	319.960.750	12	97,36	12	319.960.750	4,8	19	Sekretariat Daerah	
						Jumlah Naskah Smabutan dan Pidato KDH dan WKDH yang disusun	190													Sekretariat Daerah	
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase PD yang telah menyampaikan LPPD PD tepat waktu	100	59.413.981.041		100	8.763.105.300	70	2.665.541.595	70	30,42	70	2.665.541.595	70	4	Sekretariat Daerah	
						Persentase PD yang telah menyampaikan LKPJ PD tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100													Sekretariat Daerah	
						Persentase Perda/Perkada yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan	100													Sekretariat Daerah	
						Persentase fasilitasi bantuan hukum yang dilaksanakan	100													Sekretariat Daerah	
						Presentase Kerjasama Daerah yang ditindak lanjuti	100													Sekretariat Daerah	
						Prosentase peningkatan jumlah tempat ibadah yang representatif	100													Sekretariat Daerah	
						Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	100													Sekretariat Daerah	
	4	1	19		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang DUKCAPIL, KESBANGPOL, dan TRANTIBUM yang disusun	5	4.715.000.000		1	923.011.900	1	747.257.215	1	80,96	1	747.257.215	20	16	Sekretariat Daerah	
						Jumlah Rumusan Kebijakan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Pemekaran Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	5													Sekretariat Daerah	
						Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Kepada Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	10													Sekretariat Daerah	
	4	1	19	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi antar perangkat daerah yang dilaksanakan	60,00	1.210.000.000		12	82.320.000	12	56.320.000	12	68,42	12	56.320.000	20	5	Sekretariat Daerah	
						Jumlah Rapat Koordinasi bidang DUKCAPIL, KESBANGPOL, dan TRANTIBUM	4,00													Sekretariat Daerah	
						Jumlah pelaksanaan Upacara Hari-hari Besar Nasional	4,00													Sekretariat Daerah	
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi	1,00													Sekretariat Daerah	
	4	1	19	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah ASN Kecamatan yang mendapat pembinaan	2.100,00	2.155.000.000		500	407.041.500	500	359.338.815	500	88,28	500	359.338.815	23,81	17	Sekretariat Daerah	
						Jumlah Dokumen Penataan Batas Daerah dan Batas Wilayah yang disusun	1,00													Sekretariat Daerah	
						Jumlah Laporan Inventarisasi dan Identifikasi Pembakuan Rupan Bumi yang disusun	10,00													Sekretariat Daerah	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
							Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan sebagian Kewenangn Bupati Kepada Camat yang disusun	1,00				-											Sekretariat Daerah	
							Jumlah Laporan Evaluasi Pengelolaan Dana Kelurahan yang disusun	1,00															Sekretariat Daerah	
			4	1	19	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5,00	1.350.000.000		1	433.650.400	1	331.598.400	1	76,47	1	331.598.400	1	25			Sekretariat Daerah	
							Laporan Pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Perangkat Daerah	1,00				-											Sekretariat Daerah	
							Jumlah Dokumen LKPJ Kepala Daerah yang disusun	1,00				-											Sekretariat Daerah	
							Jumlah Dokumen Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) yang disusun	1,00				-											Sekretariat Daerah	
			4	1	20		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	60	47.751.206.561		5	6.660.643.200	5	6.210.113.200	5	93,24	5	6.210.113.200	8,33	13			Sekretariat Daerah	
			4	1	20	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	60	6.276.761.600		5	595.128.200	5	343.587.200	5	57,73	5	343.587.200	8,33	5			Sekretariat Daerah	
							Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dalam bulan suci Ramadhan dan bualan syawal	5															Sekretariat Daerah	
							Jumlah Perayaan hari besar keagamaan	20															Sekretariat Daerah	
							Jumlah verifikasi penyaluran bantuan tempat ibadah	2.500															Sekretariat Daerah	
							Jumlah verifikasi penyaluran bantuan lembaga pendidikan keagamaan	390															Sekretariat Daerah	
							Jumlah Cabang STQ yang disleenggarakan	15															Sekretariat Daerah	
			4	1	20	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	25.000	14.541.119.961		5542	671.350.000	5542	670.681.000	5542	99,90	5542	670.681.000	22,17	5			Sekretariat Daerah	
							Jumlah fasilitasi penyaluran bantuan beasiswa pendidikan sarjana	5															Sekretariat Daerah	
							Jumlah Hufaz Qur'an yang mendapat apresiasi Pemda	589															Sekretariat Daerah	
							Jumlah Lembaga yang mendapat hibah Pemerintah Daerah	390															Sekretariat Daerah	
							Jumlah Petugas TPHD, TPIHD, dan TKHD yang disiapkan	20															Sekretariat Daerah	
							Jumlah peserta Ritual Keagamaan yang diberangkatkan	6															Sekretariat Daerah	
							Jumlah Laporan Monev pelaksanaan Hibah/Bansos Badan; Lembaga Ormas; Kelompok Masyarakat; Individu dan Keluarga yang disusun	5															Sekretariat Daerah	
			4	1	20	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	5.500	26.933.325.000		798	5.394.165.000	798	5.195.845.000	798	96,32	798	5.195.845.000	14,51	19			Sekretariat Daerah	
							Jumlah pelaksanaan festival LASQI	8															Sekretariat Daerah	
							Jumlah Group LASQI yang mendapat pembinaan	100															Sekretariat Daerah	
							Jumlah anggota RISMA yang mendapat pembinaan	900															Sekretariat Daerah	

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4	1	21		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	520	4.315.494.480			25	784.460.200	25	518.443.700	25	66,09	25	518.443.700	4,81	12	Sekretariat Daerah	
							Jumlah rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah															Sekretariat Daerah	
			4	1	21	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	520	1.228.754.800			497	266.896.000	497	153.148.000	497	57,38	497	153.148.000	95,58	12	Sekretariat Daerah	
							Jumlah ketersediaan produk hukum daerah yang harmonisasi dan tersinkronisasi															Sekretariat Daerah	
			4	1	21	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	25	2.369.286.580			8	385.883.200	8	262.158.200	8	67,94	8	262.158.200	32	11	Sekretariat Daerah	
							Dokumen Laporan pelaksanaan RANHAM															Sekretariat Daerah	
							Jumlah Peserta penyuluhan hukum terpadu	100														Sekretariat Daerah	
							Jumlah Peserta pembinaan keluarga sadar hukum (Kadarkum) yang di bina	50														Sekretariat Daerah	
							Jumlah Penanganan Perkara Litigasi Perdata dan TUN	5														Sekretariat Daerah	
							Jumlah Penanganan Perkara Non Litigasi Perdata dan TUN	4														Sekretariat Daerah	
							Jumlah Eksekusi Perdata dan TUN	1														Sekretariat Daerah	
			4	1	21	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	2.600	717.453.100			597	131.681.000	597	103.137.500	597	78,32	597	103.137.500	22,96	14	Sekretariat Daerah	
			4	1	22		Fasilitasi Kerjasama Daerah	32	2.632.280.000			6	394.990.000	6	304.630.280	6	77,12	6	304.630.280	18,75	12	Sekretariat Daerah	
							Jumlah dokumen kerjasama Pemerintah Daerah Dalam Negeri dan dokumen kerjasama Pemerintah Dalam Luar Negeri yang disusun sesuai dengan ketentuan															Sekretariat Daerah	
			4	1	22	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	125	1.140.722.000			4	211.263.000	4	184.803.280	4	87,48	4	184.803.280	3,2	16	Sekretariat Daerah	
							Jumlah rumusan kebijakan dibidang Kerjasama Dalam Negeri yang disusun															Sekretariat Daerah	
			4	1	22	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	100	1.491.558.000			25	183.727.000	25	119.827.000	25	65,22	25	119.827.000	25	8	Sekretariat Daerah	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kerja Sama yang disusun															Sekretariat Daerah	
							PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.115	11.755.418.076				2.449.255.100		2.284.598.236		93,28		2.284.598.236		19	Sekretariat Daerah	
							Persentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan secara E-Procurement	100														Sekretariat Daerah	
							Prosentase PD yang melaporkan progres fisik dan keuangan tepat waktu	100														Sekretariat Daerah	
							Persentase PD yang melaporkan rencana penyerapan anggaran	100														Sekretariat Daerah	
							Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	100														Sekretariat Daerah	
			4	1	23		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	10	2.792.515.100			2	434.253.400	2	321.853.000	2	74,12	2	321.853.000	2	12	Sekretariat Daerah	
							Jumlah BUMD dan BLUD yang mendapat Pembinaan															Sekretariat Daerah	
							Laporan kinerja BUMD yang disusun	2														Sekretariat Daerah	
			4	1	23	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	10	334.483.200			1	52.652.100	1	39.841.700	1	75,67	1	39.841.700	10	12	Sekretariat Daerah	
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD dan BLUD															Sekretariat Daerah	

No	Kode					Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
							Jumlah Peserta Birtek Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMD dan BLUD	6														Sekretariat Daerah		
							Jumlah Regulasi dan Evaluasi Kinerja BUMD dan BUMD yang disusun	1															Sekretariat Daerah	
							Jumlah Dokumen RKAP BUMD yang telah dievaluasi	2															Sekretariat Daerah	
							Dokumen RBA BLUD yang telah dievaluasi	8															Sekretariat Daerah	
			4	1	23	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan distribusi BBM dan Gas	10	955.111.000		3	185.055.550	3	142.747.550	3	77,14	3	142.747.550	30	15		Sekretariat Daerah	
							Jumlah rapat Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	3															Sekretariat Daerah	
							Jumlah Laporan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	1															Sekretariat Daerah	
							Jumlah Laporan Harga Kebutuhan Pokok	1															Sekretariat Daerah	
							Jumlah Rapat Koordinasi KUR	3															Sekretariat Daerah	
			4	1	23	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Kebijakan perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang disusun	15	1.022.920.900		4	196.545.750	4	139.263.750	4	70,86	4	139.263.750	26,67	14		Sekretariat Daerah	
							Jumlah Fasilitasi Pengembangan Potensi Ekonomi Mikro Kecil	6															Sekretariat Daerah	
							Jumlah dokmen data ekonomi Mikro Kecil yang disusun	1															Sekretariat Daerah	
							Jumlah Rapat Koordinasi TPAKD																Sekretariat Daerah	
							Jumlah Laporan Sinkronisasi BUMK	1															Sekretariat Daerah	
							Jumlah Rapat Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah	2															Sekretariat Daerah	
			4	1	25		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan secara E-Procurement	100	7.458.289.316		100	1.742.299.700	99	1.701.180.336	99	98	99	1.701.180.336	99	23		Sekretariat Daerah	
							Persentase Penyelesaian Sanggah Pengadaan Barang/Jasa	100															Sekretariat Daerah	
			4	1	25	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Penyusunan standar Pedoman Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	22	5.448.887.300		5	1.479.731.100	5	1.451.251.613	5	98	5	1.451.251.613	22,73	27		Sekretariat Daerah	
							Pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan	110															Sekretariat Daerah	
							Jumlah dokumen e_katalog lokal yang disusun																Sekretariat Daerah	
							Jumlah Dokumen Identifikasi dan Mitigasi Risiko proses Pengadaan	1															Sekretariat Daerah	
							Laporan konsolidasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang disusun	5															Sekretariat Daerah	
			4	1	25	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah PD yang difasilitasi manajemen akun pengguna sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik	200	1.332.072.016		60	188.568.600	60	178.200.888	60	95	60	178.200.888	30	13		Sekretariat Daerah	
							Jumlah penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	1															Sekretariat Daerah	
			4	1	25	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ yang disusun	25	677.330.000		5	74.000.000	5	71.727.835	5	97	5	71.727.835	20	11		Sekretariat Daerah	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
						Jumlah dokumen analisis kebutuhan dan perencanaan pengembangan kompetensi personil UKPBJ	1															Sekretariat Daerah	
						Laporan pengukuran kinerja pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah yang disusun	1															Sekretariat Daerah	
						Jumlah ASN yang mendapat pembinaan dan pelatihan SIRUP/SPSE/e-Katalog/e-monev/SIKAP	500															Sekretariat Daerah	
						Jumlah Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah yang mendapat pelatihan dan Pelatihan	50															Sekretariat Daerah	
			4	1	24	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah PD yang mencapai target realiasi fisik dan keuangan	26	1.504.613.660		5	272.702.000	5	261.564.900	5	96	5	261.564.900	19,23	17		Sekretariat Daerah	
			4	1	24	1 Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah laporan yang disusun	15	91.858.460		3	17.330.000	3	17.330.000	3	100	3	17.330.000	20	19		Sekretariat Daerah	
			4	1	24	2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah dokumen inventarisasi kegiatan fisik yang disusun	15	713.380.000		3	134.600.000	3	127.782.900	3	95	3	127.782.900	20	18		Sekretariat Daerah	
							Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Progres Pembangunan Fisik Perangkat Daerah di Kecamatan	2														Sekretariat Daerah	
			4	1	24	3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan pelaksanaan progres fisik dan keuangan perangkat daerah yang disusun	4	699.375.200		1	120.772.000	1	116.452.000	1	96	1	116.452.000	25	17		Sekretariat Daerah	
							Jumlah fasilitasi rapat dan koordinasi TEPRa Kabupaten	2														Sekretariat Daerah	
			4	2		Pengawasan	0	-	54.418.079.070		0	18.040.459.167	0	17.050.158.940	95,68	94,51	95,68	17.050.158.940	95,68	31		Inspektorat	
			4	3		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	16.473.055.450		100	14.378.462.867	97	13.704.016.893	97	95,31	97	13.704.016.893	97	83		Inspektorat	
							Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100			100		100		100		100		100			Inspektorat	
							Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100			100		100		100		100		100			Inspektorat	
							Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85			85		85		85		85		85			Inspektorat	
			4	2	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	95	291.952.600		85	84.110.000	85	80.840.000	85	96,11	85	80.840.000	85	28		Inspektorat	
			4	2	1	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	129	137.820.600		19	40.350.800	19	38.350.800	19	95,04	19	38.350.800	15	28		Inspektorat	
			4	2	1	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	82	154.132.000		12	43.759.200	12	42.489.200	12	97,10	12	42.489.200	15	28		Inspektorat	
			4	2	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	12	41.742.111.068		0	10.435.527.767	10.290.458.335	98,61	10.290.458.335	-	25	Inspektorat					
			4	2	2	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah administrasi ASN yang tersedia	72	41.585.316.668		12	10.396.329.167	12	10.255.259.735	12	98,64	12	10.255.259.735	17	25		Inspektorat	
			4	2	2	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun tepat waktu	70	152.535.600		10	39.198.600	10	35.198.600	10	89,80	10	35.198.600	14	23		Inspektorat	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
								5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			4	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya	100	4.090.850.900			95	440.520.500	95	325.204.133	95	73,82	95	325.204.133	95	8	Inspektorat		
			4	2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang bersertifikasi	85	4.090.850.900			75	440.520.500	75	325.204.133	75	100,00	75	325.204.133	88	8	Inspektorat		
			4	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	96	4.060.315.100			86	640.864.100	86	636.161.613	86	99,27	86	636.161.613	90	16	Inspektorat		
			4	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang tersedia	72	95.117.949			12	31.390.000	12	31.089.500	12	99,04	12	31.089.500	17	33	Inspektorat		
			4	2	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN dan ketersediaan kebutuhan alat tulis kantor terpenuhi	180	156.433.112			25	41.233.200	25	37.312.800	25	90,49	25	37.312.800	14	24	Inspektorat		
			4	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Ketersediaan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	192	692.000.762			27	127.081.900	27	127.062.150	27	99,98	27	127.062.150	14	18	Inspektorat		
			4	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Ketersediaan Kebutuhan cetak dan penggandaan	51	680.595.995			6	130.125.000	6	129.956.500	6	99,87	6	129.956.500	12	19	Inspektorat		
			4	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	22992	222.830.664			3827	32.760.000	3.827	32.750.000	3.827	99,97	3.827	32.750.000	17	15	Inspektorat		
			4	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bahan Bacaan, buku dan peraturan perundangan yang tersedia	72	2.212.335.746			12	278.274.000	12	277.990.663	12	99,90	12	277.990.663	17	13	Inspektorat		
			4	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang menyelesaikan Rencana Aksi Daerah	192	2.632.837.500			27	1.996.910.500	27	1.723.716.875	27	86,32	27	1.723.716.875	14	65	Inspektorat		
						7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10	6.422.000.000			2	1.284.400.000	2	1.029.600.000	2	80,16	2	1.029.600.000	20	16	Inspektorat	
			4	2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	192	2.632.837.500			27	712.510.500	27	694.116.875	27	97,42	27	694.116.875	14	26	Inspektorat		
			4	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	100	530.565.750			97	113.000.000	97	102.002.427	97	90,27	97	102.002.427	97	19	Inspektorat		
			4	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komukasi, Sumber Daya air dan listrik yang terpenuhi	72	530.565.750			12	113.000.000	12	102.002.427	12	90,27	12	102.002.427	17	19	Inspektorat		
			4	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah barang milik daerah yang dipelihara	96	2.559.081.000			86	667.530.000	86	545.633.510	86		86	545.633.510	90	21	Inspektorat		
			4	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 yang terpelihara	55	1.619.541.000			8	305.360.000	8	201.538.010	8		8	201.538.010	15	12	Inspektorat		
			4	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	354	259.965.000			54	63.820.000	54	47.855.000	54	74,98	54	47.855.000	15	18	Inspektorat		
			4	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	6	679.575.000			1	298.350.000	1	296.240.500	1	99,29	1	296.240.500	17	44	Inspektorat		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	100	32.666.788.932			80	2.898.506.600	80	2.722.422.347	80	93,93	80	2.722.422.347	80	8	Inspektorat		
			4	2	15		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK - RI yang ditindaklanjuti	413	25.218.196.502			55	2.271.644.400	55	2.115.576.947	55	93,13	55	2.115.576.947	13	8	Inspektorat		
								Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti																	
			4	2	15	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	60	180.650.000			12	35.486.500	12	19.806.500	12	55,81	12	19.806.500	20	11	Inspektorat		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
						5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			4 2 15	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengawasan keuangan	2.005	21.045.888.218			278	1.659.662.700	278	1.619.592.900	278	97,59	278	1.619.592.900	14	8	Inspektorat	
			4 2 15	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu kinerja	760	1.682.860.569			95	247.409.900	95	173.815.093	95	70,25	95	173.815.093	13	10	Inspektorat	
			4 2 15	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	616	1.284.271.879			84	188.810.400	84	178.557.554	84	94,57	84	178.557.554	14	14	Inspektorat	
			4 2 15	6	Kerjasama Pengawasan Internal	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	42	993.069.748			2	100.462.600	2	84.262.600	2	83,87	2	84.262.600	5	8	Inspektorat	
			4 2 15	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah OPD yang dimonitori	2.424	212.106.088			324	39.812.300	324	39.542.300	324	99,32	324	39.542.300	13	19	Inspektorat	
			4 2 16		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penanganan kasus aduan di lingkungan Pemerintah Daerah Lampung tengah	95	7.448.592.430			70	626.862.200	70	606.845.400	70	96,81	70	606.845.400	74	8	Inspektorat	
			4 2 16	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	60	465.000.000			12	91.044.000	12	80.924.000	12	88,88	12	80.924.000	20	17	Inspektorat	
			4 2 16	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan	217	7.448.592.430			27	535.818.200	27	525.921.400	27		27	525.921.400	12	7	Inspektorat	
					PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi	100	5.278.234.689			100	763.489.700	100	596.494.700	100		100	596.494.700	100	11	Inspektorat	
			4 2 18		Pendampingan dan Asistensi		0	-			0	763.489.700	0	596.494.700	0	78,13	0	596.494.700				
			4 2 18	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi	1.267	1.275.419.189			175	382.149.900	175	312.820.400	175	81,86	175	312.820.400	14	25	Inspektorat	
			4 2 18	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan hasil penilaian reformasi birokrasi	226	283.749.275			24	41.716.100	24	33.356.100	24	79,96	24	33.356.100	11	12	Inspektorat	
			4 2 18	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan hasil evaluasi dan verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	2.250	2.721.591.557			250	257.477.500	250	218.655.500	250		250	218.655.500	11	8	Inspektorat	
			4 2 18	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan hasil asistensi penegakan integritas	245	997.474.667			25	82.146.200	25	31.662.700	25	38,54	25	31.662.700	10	3	Inspektorat	
			4 3		Perencanaan		0	35.143.285.826			0	11.005.356.250	96,35	10.433.772.765	96,35	94,81	96,35	10.433.772.765	96,35	30	Bappeda	
			4 3		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	46.741.720.267			100	10.813.962.850	100	10.245.572.421	100	94,74	100	10.245.572.421	100	22	Bappeda	
						Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100				100		100	-	100		100	-	100	-	Bappeda	
						Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100				100		100	-	100		100	-	100	-	Bappeda	
						Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85				85		85	-	85		85	-	85	-	Bappeda	
			4 3 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	41	85.985.641			8	54.312.000	0	53.933.000	8	99,30	8	53.933.000	19,51	63	Bappeda	
			4 3 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	15	50.628.996			3	40.000.000	3	39.621.000	3	99,05	3	39.621.000	20,00	78	Bappeda	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	4	10.380.666											-	-	Bappeda	

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	2	7.913.675														
			4	3	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	20	17.062.304		5	14.312.000	3	14.312.000	3	100,00	3	14.312.000	15,00	84	Bappeda		
			4	3	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	16	20.162.716.636		3	5.282.330.971	3	5.099.157.548	3	96,53	3	5.099.157.548	18,75	25	Bappeda		
			4	3	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tugas ASN	60	16.767.272.103		12	4.672.611.571	12	4.670.874.048	12	99,96	12	4.670.874.048	20,00	28	Bappeda		
			4	3	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	1.781.567.480		12	577.400.400	12	572.123.500	12	99,09	12	572.123.500	20,00	32	Bappeda		
							Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pengujian/verifikasi keuangan SKPD	60	49.853.258		5	32.319.000	5	32.245.000	5	12,00	5	32.245.000	8,33	65	Bappeda		
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun Perangkat Daerah yang disusun	18	1.354.000.000		4	695.639.100	4	689.299.155	4	99,09	4	689.299.155	22,22	51	Bappeda		
							Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaann Perangkat Daerah yang disusun	60	168.055.768		12	62.970.000	12	62.868.000	12		12	62.868.000	20,00	37	Bappeda		
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran Perangkat daerah yang disusun	12	41.968.027														
							Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	12	10.759.054														
							Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	12	10.759.054														
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah melengkapi berkas kepegawaianya	0	197.158.031														
							Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10	7.511.950														
							Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pendataan pegawai yang disusun	12	10.644.188														
							Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah laporan informasi pegawai yang disusun	10	7.179.023														
							Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian kinerja pegawai	JumlahMonitoring, Evaluasi, dan Penilaian kinerja pegawai yang disusun	11	7.905.045														
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi	10	60.775.313														
							Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	63	10.224.231														
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	63	92.918.281														
			4	3	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	390	2.824.933.647		30	200.000.000	30	195.351.000	30	97,68	30	195.351.000	7,69	7	Bappeda		
			4	3	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	120	178.180.800		30	59.393.600	30	59.365.100	30	99,95	30	59.365.100	25,00	33	Bappeda		
			4	3	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	120	243.101.250		30	125.937.500	30	125.907.800	30	99,98	30	125.907.800	25,00	52	Bappeda		
			4	3	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	60	1.250.000.000		12	247.338.000	12	245.807.255	12	99,38	12	245.807.255	20,00	20	Bappeda		
			4	3	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	30	934.604.000		5	233.651.000	5	227.709.696	5	97,46	5	227.709.696	16,67	24	Bappeda		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
							5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			4	3	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	219.047.597			12	63.376.000	12	60.835.196	12	95,99	12	60.835.196	20,00	28	Bappeda	
			4	3	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		34	2.325.200.000			8	170.275.000	8	166.874.500	8	98,00	8	166.874.500	23,53	7	Bappeda	
			4	3	7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan pada Perangkat Daerah yang disediakan	2	1.395.120.000			4	465.040.000	4	450.885.645	4	96,96	4	450.885.645	200,00	32	Bappeda	
			4	3	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya pada Perangkat Daerah yang disediakan	32	930.080.000			3	465.040.000	3	450.885.645	3	96,96	3	450.885.645	9,38	48	Bappeda	
			4	3	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	1.556.750.483			12	588.671.879	12	526.638.977	12	89,46	12	526.638.977	12,00	34	Bappeda	
			4	3	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pelayanan jasa kantor	60	1.556.750.483			12	41.670.000	12	40.094.500	12		12	40.094.500	20,00	3	Bappeda	
			4	3	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	0	5.247.306.156			12	150.010.000	12	135.151.905	12	90,10	12	135.151.905			Bappeda	
			4	3	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	35	656.596.257			7	218.865.419	7	191.714.400	7	87,59	7	191.714.400	20,00	29	Bappeda	
			4	3	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang mendapat pemeliharaan	6	241.897.899			1	178.126.460	1	159.678.172	1		1	159.678.172	16,67	66	Bappeda	
			4	3	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	200	4.053.848.000			50	1.013.462.000	50	912.086.500	50		50	912.086.500	25,00	22	Bappeda	
			4	3	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat pemeliharaan/rehabilitasi	15	294.964.000			3	73.741.000	3	61.616.000	3	83,56	3	61.616.000	20,00	21	Bappeda	
			4	3	15		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	0	3.517.323.460			78	28.219.000	78	28.219.000	78	100,00	78	28.219.000		1	Bappeda	
			4	3	15	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen penelaahan rencana pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	3	249.797.838			1	176.837.000	1	139.659.500	1	78,98	1	139.659.500	33,33	56	Bappeda	
							Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	3	136.016.000			1	34.004.000	1	34.004.000	1	100,00	1	34.004.000	33,33	25	Bappeda	
			4	3	15	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah pelaksanaan forum PD/Lintas Perangkat daerah yang dilaksanakan	15	2.101.983.000			3	700.661.000	3	620.369.000	3	74,91	3	620.369.000	20,00	30	Bappeda	
			4	3	15	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten yang dilaksanakan	125	338.676.263			28	178.231.100	28	168.007.722	28	94,26	28	168.007.722	22,40	50	Bappeda	
			4	3	15	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen koordinasi Musrenbang RKPD di Kecamatan yang disusun	1	83.793.233											-	-	Bappeda	
			4	3	15	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada	3	607.057.126			1	61.331.400	1	56.266.400	1		1	56.266.400	33,33	9	Bappeda	

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4	3	16		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5	760.859.995			1	50.908.200	1	49.449.822	1	97,14	1	49.449.822	20,00	6	Bappeda	
			4	3	16	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	15	279.239.102			3	65.991.500	3	62.291.500	3	94,39	3	62.291.500	20,00	22	Bappeda	
			4	3	16	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	175	340.461.600			38	113.487.200	38	96.087.200	38	84,67	38	96.087.200	21,71	28	Bappeda	
			4	3	16	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	12	141.159.293			2	30.291.700	2	30.291.700	2	100,00	2	30.291.700	16,67	21	Bappeda	
			4	3	17		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	40	1.337.888.964			9	83.195.500	9	65.795.500	9	79,09	9	65.795.500	22,50	5	Bappeda	
			4	3	17	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	12	1.140.940.000			2	570.470.000	2	552.879.500	2	96,92	2	552.879.500	16,67	48	Bappeda	
			4	3	17	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	35	196.948.964			4	45.377.000	4	35.373.000	4	77,95	4	35.373.000	11,43	18	Bappeda	
			4	3	18		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	300	2.884.544.050			76	3.048.729.600	76	2.863.716.778	76	93,93	76	2.863.716.778	25,33	99	Bappeda	
			4	3	18	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	102.738.478			2	15.599.000	2	15.599.000	2	100,00	2	15.599.000	33,33	15	Bappeda	
			4	3	18	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20	152.008.000			3	38.002.000	3	37.622.000	3	99,00	3	37.622.000	15,00	25	Bappeda	
			4	3	18	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12	113.310.708			3	37.624.000	3	36.532.000	3	97,10	3	36.532.000	25,00	32	Bappeda	
			4	3	18	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	20	396.588.000			4	132.196.000	4	130.816.000	4	98,96	4	130.816.000	20,00	33	Bappeda	
			4	3	18	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10	138.466.218			2	12.923.000	2	12.923.000	2	100,00	2	12.923.000	20,00	9	Bappeda	
			4	3	18	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	16	396.060.000			3	132.020.000	3	130.764.500	3	99,05	3	130.764.500	18,75	33	Bappeda	
			4	3	18	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	50	225.288.006			10	156.729.000	10	153.250.000	10	97,78	10	153.250.000	20,00	68	Bappeda	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			4	3	18	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	6	1.360.084.640		1	924.969.000	1	877.322.800	1	94,85	1	877.322.800	16,67	65	Bappeda	
			4	3	19		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen Renstra dan Renja PD lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) kualitas baik	25	4.122.201.677		4	54.512.000	4	53.036.000	4	97,29	4	53.036.000	16,00	1	Bappeda	
			4	3	19	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian yang disusun tepat waktu	5	329.040.000		1	109.680.000	1	105.157.500	1	95,88	1	105.157.500	20,00	32	Bappeda	
			4	3	19	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah PD yang dilakukan asistensi dokumen perencanaan	11	79.093.599		1	27.708.000	1	25.808.000	1	93,14	1	25.808.000	9,09	33	Bappeda	
			4	3	19	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Rekomendasi Lingkup Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	11	980.000.000		7	490.000.000	7	456.347.500	7	93,13	7	456.347.500	63,64	47	Bappeda	
			4	3	19	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun	30	182.325.938		7	44.554.000	7	43.794.000	7	98,29	7	43.794.000	23,33	24	Bappeda	
			4	3	19	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Sumber Daya Alam (SDA) yang disusun tepat waktu	30	217.804.134		7	121.429.000	7	120.344.000	7	99,11	7	120.344.000	23,33	55	Bappeda	
			4	3	19	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah PD yang dilakukan asistensi dokumen perencanaan	11	87.842.206		4	32.086.000	4	30.675.800	4	95,60	4	30.675.800	36,36	35	Bappeda	
			4	3	19	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Rekomendasi Lingkup Bidang Sumber Daya Alam (SDA) yang ditindaklanjuti	30	225.000.000		7	45.000.000	7	42.160.000	7	93,69	7	42.160.000	23,33	19	Bappeda	
			4	3	19	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA) yang disusun	5	2.021.095.800		1	673.698.600	1	591.564.678	1	87,81	1	591.564.678	20,00	29	Bappeda	
			4	3	20		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja PD lingkup bidang Infrastruktur dan Wilayah kualitas baik	20	1.708.092.473	-	3	573.566.100	3	23.877.600	3	4,16	3	95.464.472	15,00	6	Bappeda	
			4	3	20	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur yang disusun tepat waktu	5	213.600.913	-	1	13.980.500	1	1.410.000	1	10,09	1	0	20,00	0	Bappeda	
			4	3	20	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah PD yang dilakukan asistensi dokumen perencanaan	11	59.977.181	-	3	26.273.000	3	-	3	-	3	8.600.000	27,27	14	Bappeda	
			4	3	20	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rekomendasi Lingkup Bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	5	81.609.090	-	1	300.965.000	1	4.700.000	1	1,56	1	34.354.372	20,00	42	Bappeda	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2			3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13		
		4	3	20	7	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	1	253.068.401	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4	3	20	8	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah PD yang dilakukan asistensi dokumen perencanaan	12	77.610.074	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-			
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Rekomendasi Lingkup Bidang Kewilayahan yang ditindaklanjuti	5	188.926.623	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-			
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah rekomendasi lingkup bidang kewilayahan yang ditindaklanjuti	25	587.099.400	-	-	5	195.699.800	5	15.267.300	5	#####	5	37.858.100	20,00	6	Bappeda	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang disusun	5	246.200.791	-	-	1	36.647.800	1	2.500.300	1	#####	1	14.652.000	20,00	6	Bappeda	
		4	4			Keuangan Total						614.486.093.288	93,68	562.732.194.710	93,68	91,58	93,68	562.732.194.710	93,68	23	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		
		4	4			Keuangan	Realisas sudah	-	239.193.333.283			0	44.346.558.109	92	40.352.565.986	92	90,99	92	40.352.565.986	92	17	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
		4	3			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	228.721.950.837			100	42.411.409.309	100		100	100	100		100	16	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
							Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	100				100		100		100	100		100		100	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
							Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100				100		100		100	100		100		100	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
							Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85				85		85		85	85		85		85	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
		4	4	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	35	309.545.972			5	50.517.600	5	50.517.600	5	100,00	5	50.517.600	14	16	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
		4	4	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	20	162.057.713			5	24.296.000	5	24.296.000	5	100,00	5	24.296.000	25	15	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	

No	Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2							3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			4	4	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	15	147.488.259			9	26.221.600	9	26.221.600	9	100,00	9	26.221.600	60	18	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		
			4	4	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	12	66.200.416.319			2	12.176.869.409	2	11.906.093.157	2	97,78	2	11.906.093.157	17	18	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		
			4	4	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tugas ASN	406	57.171.733.194			12	10.516.809.009	12	10.334.269.927	12	98,26	12	10.334.269.927	3	18	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		
			4	4	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	406	8.860.940.087			12	1.624.744.900	12	1.536.507.730	12	94,57	12	1.536.507.730	3	17	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		
			4	4	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun tepat waktu	15	167.743.038			6	35.315.500	6	35.315.500	6	100,00	6	35.315.500	40	21	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		
			4	4	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya	57	385.000.000			6	85.000.000	6	84.000.000	6	98,82	6	84.000.000	11	22	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		
			4	4	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	57	385.000.000			6	85.000.000	6	84.000.000	6	98,82	6	84.000.000	11	22	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		
			4	4	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	3.346.477.396			12	1.106.918.800	12	1.036.526.045	12	93,64	12	1.036.526.045	20	31	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		
			4	4	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	127	58.708.435			23	15.466.000	23	15.466.000	23	100,00	23	15.466.000	18	26	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		
			4	4	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	176	1.446.421.669			35	562.030.000	35	509.546.515	35	90,66	35		20	-	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		
			4	4	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah ketersediaan bahan dan peralatan kebersihan	116	103.184.237			23	20.932.300	23	20.932.300	23	100,00	23	20.932.300	20	20	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		
			4	4	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan Kebutuhan Cetak dan Penggandaan	116	956.629.054			23	259.285.500	23	259.285.350	23	100,00	23	259.285.350	20	27	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		
			4	4	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi	61	781.534.001			355	249.205.000	355	231.295.880	355	92,81	355	231.295.880	582	30	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2			3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13		
			4 2 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan		3.202.560.000														BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		
			4 4 7	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	35	3.202.560.000															BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
			4 4 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	20	152.229.000.000		4	28.389.828.500	4	25.010.464.067	4	88,10	4	25.010.464.067	20	16			BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		
			4 4 8	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Internet, Listrik dan lampu jalan umum	20	152.229.000.000		4	28.389.828.500	4	25.010.464.067	4	88,10	4	25.010.464.067	20	16			BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		
			4 3 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	60	3.048.951.150		12	602.275.000	12	552.514.392	12	91,74	12	552.514.392	20	18			BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		
			4 3 9	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang mendapat pemeliharaan	135	1.662.796.738		16	266.020.000	16	222.296.392	16	83,56	16	222.296.392	12	13			BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		
			4 3 9	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	60	904.731.162		12	216.280.000	1	211.553.000	1	97,81	1	211.553.000	2	23			BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		
			4 3 9	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	60	481.423.250		12	119.975.000	1	118.665.000	1	98,91	1	118.665.000	2	25			BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pajak Daerah	100	10.471.382.446		100	1.935.148.800	100	1.712.795.425	100	88,51	100	1.712.795.425	100	16			BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		
					Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100			100		100		100		100		100				BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		
					Persentase kepatuhan wajib pajak daerah	100			100		100		100		100		100				BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		
			4 4 21	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		0	10.471.382.446		100	1.935.148.800	90	1.712.795.425	90	88,51	90	1.712.795.425	90	16			BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		
			4 4 21	1 Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah PPATS dan Protokol PPATS yang dibina	322	179.432.413		56	37.103.000	56	11.715.000	56	31,57	56	11.715.000	17	7			BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			4	4	21	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Permohonan keberatan yang terselesaikan	217	362.560.126			35	15.320.000	35	14.270.000	35	93,15	35	14.270.000	16	4	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
			4	4	21	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah permohonan yang didaftarkan sebagai wajib pajak	20.042	352.810.587			4000	35.005.000	4000	23.205.000	4000	66,29	4000	23.205.000	20	7	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
			4	4	21	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Alat yang digunakan oleh Pengusaha	542	184.650.143			100	33.845.600	100	19.445.000	100	57,45	100	19.445.000	18	11	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
			4	4	21	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	jumlah permohonan yang didaftarkan	7.108	994.328.793			1421	79.256.000	1421	60.796.000	1421	76,71	1421	60.796.000	20	6	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
			4	4	21	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah sistem informasi Yang dikelola	18	2.125.721.811			3	505.516.000	3	502.516.000	3	99,41	3	502.516.000	17	24	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
			4	4	21	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah SPPT PBB P2 yang ditetapkan sesuai dengan Perda Lampung Tengah	3.165.043	3.089.861.952			633000	341.445.200	60000	336.638.425	60000	98,59	60000	336.638.425	2	11	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
			4	4	21	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah SKPD dan SPTPD yang ditetapkan sesuai dengan Perda Lampung Tengah dan Jumlah SPTPD Pajak Rumah Makan dan Hotel yang ditetapkan sesuai dengan Perda Lampung Tengah Jumlah SPTPD Pajak Rumah Makan dan Hotel yang ditetapkan sesuai dengan Perda Lampung Tengah	9.605	492.159.725			1921	101.093.000	92	78.452.500	92	77,60	92	78.452.500	1	16	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
			4	4	21	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Kampung/Kelurahan Yang Lunas PBB-P2 Tercepat	442	323.517.874			85	-							-	-	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
			4	4	21	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		296	185.332.266				18.241.000	0	17.641.000	0	96,71	0	17.641.000	-	10	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
			4	4	21	11	Penagihan Pajak Daerah	umlah SPPT yang terdistribusikan	2.025.672	1.014.459.598			633000	365.749.000	60000	340.119.000	60000	92,99	60000	340.119.000	3	34	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
			4	4	21	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	jumlah permohonan yang terlayani	7.137	389.093.421			1421	80.552.000	900	57.142.000	900	70,94	900	57.142.000	13	15	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
			4	4	21	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Realisasi Jumlah SPPT, SKPD dan SPTPD yang tertagih	2.253.425	474.063.165			450681	191.185.000	45000	156.377.500	45000	81,79	45000	156.377.500	2	33	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	

No	Kode				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1			4	4	21	14		20			4		3		3		3		15			
			4	4				303.390.572			130.838.000		3		3		3		94.538.000			
			4	3						570.139.535.179		94,77		94,77		94,77		94,77		23		
			4	3				2.246.089.063.400			40.025.984.059		100		100		100		38.672.497.000			
			4	3								100		100		100		100		17		
			4	4	1			134		666.129.900		24		24		24		24		18		
			4	4	1																	
			4	4	1	1		35		327.335.895		6		6		6		6		17		
			4	4	1	2		5		141.968.880		1		1		1		1		20		
			4	4	1	3		12		196.825.125		2		2		2		2		17		
			4	4	1	4		7		176.914.364		1		1		1		1		14		
			4	4	1	5		15		79.731.162		2		2		2		2		13		

No	Kode							Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
										5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%			
	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			4	4	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	373.675.791			12	17.102.000	12	33.279.525	12	194,59	12	33.279.525	20	9	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
			4	4	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	100	210.929.576.836			100	37.951.467.359	70	169.080.670	70	0,45	70	169.080.670	70	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
			4	4	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tugas ASN	60	201.493.558.974			12	36.299.527.655	12	36.299.527.656	12	100,00	12	36.299.527.656	20	18	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
			4	4	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	8.068.788.175			12	1.406.303.704	12	117.209.400	12	8,33	12	117.209.400	20	1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
			4	4	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	300	427.650.873			64	84.978.200	64	51.871.270	64	61,04	64	51.871.270	21	12	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
			4	4	2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	300	351.547.297			64	63.078.200	64	63.000.000	64	99,88	64	63.000.000	21	18	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
			4	4	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	325	165.019.926			10	22.088.200	64	22.000.000	64	99,60	64	22.000.000	20	13	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
			4	4	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD	65	230.416.507			18	42.208.300	18	765.328.170	18	1.813,22	18	765.328.170	28	332	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
			4	4	2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	192.595.084			2	33.283.100	2	12.762.870	2	38,35	2	12.762.870	100	7	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
			4	4	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		0	100	804.637.886			100	124.558.800	100	115.184.150	95	92,47	95	135.184.150	95	17	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			4	4	3	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi dan penilaian barang milik daerah pada SKPD	5	415.036.139			1	72.206.400	1	134.328.700	1	186,03	1	134.328.700	20	32	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
			4	4	3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	5	389.601.747			1	52.352.400	1	100.828.035	1	192,59	1	100.828.035	20	26	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
			4	4	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya	100	364.137.098			100	8.000.000	98	-	98	98,00	98	8.000.000	98	2	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		

No	Kode					Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4	4	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	500	257.974.679			100	8.000.000	98	8.000.000	98	98,00	98	8.000.000	20	3	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			4	4	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	106.162.419												-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			4	4	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	6.515.027.573			12	935.735.000	12	528.846.665	12	56,52	12	528.846.665	20	8	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			4	4	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50	67.758.164			10	12.765.000	10	59.380.000	10	465,18	10	59.380.000	20	88	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			4	4	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	2.831.866.610			20	277.505.000	20	437.217.965	20	157,55	20	437.217.965	20	15	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			4	4	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000	713.668.901			1500	134.448.500	1500	26.068.700	1500	19,39	1500	26.068.700	25	4	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			4	4	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000	546.452.475			1000	100.946.500	1000	100.828.035	1000	99,88	1000	100.828.035	20	18	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			4	4	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	283.984.472			20	4.000.000	20	179.826.661	20	4.495,67	20	179.826.661	20	63	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			4	4	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	556.025.671			12	81.250.000	12	32.221.600	12	39,66	12	32.221.600	20	6	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			4	4	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.500	1.515.271.280			500	324.820.000	400	152.664.915	400	47,00	400	152.664.915	16	10	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			4	4	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	2.068.091.352			12	479.998.700	12	1.454.943.647	12	303,11	12	1.454.943.647	20	70	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			4	4	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000	147.706.610			1500	59.380.000	1000	34.647.800	1000	58,35	1000	34.647.800	17	23	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			4	4	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15	1.802.372.473			3	394.550.000	3	171.965.629	3	43,59	3	171.965.629	20	10	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

No	Kode				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1			4	4	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	80	118.012.269		15	26.068.700	0	-	0	-	0	-	-	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			4	4	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	215	1.806.651.998		42	335.280.000	42	97.853.750	42	29,19	42	97.853.750	20	5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			4	4	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	50	1.300.741.772		11	245.020.000	11	154.497.597	11	63,06	11	154.497.597	22	12	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			4	4	9	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	160	484.472.200		30	62.260.000	30	4.430.000	30	7,12	30	4.430.000	19	1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			4	4	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	21.438.026		1	28.000.000	1	24.412.500	1	87,19	1	24.412.500	20	114	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
							PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase Ketepatan waktu penyusunan dan penetapan RAPBD	100	234.752.283.167		100	529.455.237.720	100	279.698.990	100	0,05	100	279.698.990	100	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
								Prosentase ketepatan waktu penyelesaian SP2D berdasarkan SPM yang dinyatakan sah dan lengkap sesuai ketentuan dan ketepatan waktu	100			100		100	-	100					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
								Prosentase jumlah PD yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP	100			100		100	-	100					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
								Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun DPA sesuai ketentuan yang berlaku	100			100		100	-	100					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
								Persentase PD yang Menyampaikan Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100			100		100	-	100					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
			4	4	15		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	60	11.420.815.583		12	1.713.319.600	12	109.023.610	12	6,36	12	109.023.610	20	1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			4	4	15	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen penyusunan KUA dan PPAS	335	499.993.146		66	86.194.000	50	48.787.200	50	56,60	50	48.787.200	15	10	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			4	4	15	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Penyusunan perubahan KUA dan PPAS	335	488.063.144		66	63.946.500	66	62.744.000	66	98,12	66	62.744.000	20	13	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

No	Kode			Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1			4 4 15 3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen penyusunan dan verifikasi RKA - SKPD	5	634.930.889			1	136.555.000	1	77.955.000	1	57,09	1	77.955.000	20	12	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	13
			4 4 15 4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen penyusunan dan verifikasi perubahan RKA - SKPD	5	634.930.889			1	76.365.000	1	76.250.000	1	99,85	1	76.250.000	20	12	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			4 4 15 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen peraturan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD	5	7.560.697.469			1	1.136.794.200	1	499.962.460	1	43,98	1	499.962.460	20	7	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			4 4 15 9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen penyusunan Regulasi serta kebijakan Bidang anggaran	5	445.770.690			1	62.230.500	1	45.725.955	1	73,48	1	45.725.955	20	10	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			4 4 15 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12	357.128.786			2	67.279.700	2	42.081.800	2	62,55	2	42.081.800	17	12	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			4 4 15 12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen perencanaan anggaran pembiayaan	5	799.300.570			1	83.954.700	1	52.212.600	1	62,19	1	52.212.600	20	7	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			4 4 16	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		-	5.517.561.368				819.723.600		38.751.680		4,73		38.751.680		1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			4 4 16 1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	5	618.669.991			1	81.293.600	1	69.418.030	1	85,39	1	69.418.030	20	11	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			4 4 16 3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	500	592.487.154			100	86.269.000	100	68.779.700	100	79,73	100	68.779.700	20	12	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			4 4 16 4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	jumlah dokumen hasil penatausahaan pembiayaan daerah	5	2.687.140.691			1	419.277.000	1	350.583.970	1	83,62	1	350.583.970	20	13	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			4 4 16 5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	jumlah dokumen koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana transfer lainnya	5	564.943.314			1	60.760.000	1	49.461.885	1	81,41	1	49.461.885	20	9	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

No	Kode							Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
										5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4	4	16	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK) dan laporan hasil koordinasi dalam rangka penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	5	546.916.935			1	87.534.000	1	71.586.540	1	81,78	1	71.586.540	20	13	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
			4	4	16	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	100	507.403.283			100	84.590.000	100	70.994.440	100	83,93	100	70.994.440	100	14	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
			4	4	17		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	0	-	5.943.586.056			0	842.376.300	0	72.173.900	0	8,57	0	72.173.900	#DIV/0!	1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
			4	4	17	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	30	609.943.440			5	101.127.600	5	57.479.950	5	56,84	5	57.479.950	17	9	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
			4	4	17	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban	330	996.928.814			64	120.277.500	50	73.462.070	50	61,08	50	73.462.070	15	7	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
			4	4	17	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	jumlah laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD bulanan, Triwulanan dan semesteran	5	242.733.471			1	45.728.700	1	22.153.910	1	48,45	1	22.153.910	20	9	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
			4	4	17	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi	5	1.742.881.384			1	269.662.600	1	244.256.305	1	90,58	1	244.256.305	20	14	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
			4	4	17	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota	12	2.144.724.512			2	266.700.900	2	218.641.500	2	81,98	2	218.641.500	17	10	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
			4	4	17	6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	jumlah dokumen tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	12	206.374.435			2	38.879.000	2	22.104.500	2	56,85	2	22.104.500	17	11	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
			5	02	02	02.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100	210.914.858.387			100	525.899.818.220	100	525.899.818.220	100	100,00	100	525.899.818.220	100	249	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			5	02	02			311	210.914.858.387			12	456.347.945.200	12	420.332.075.000	12	92,11	12	420.332.075.000	4	199	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
								60	159.243.628.896			12	59.000.000.000	12	57.500.000.000	12	97,46	12	57.500.000.000	20	36	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
								311	51.671.229.491			12	10.551.873.020	12	9.850.000.000	12	93,35	12	9.850.000.000	4	19	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			4	4	19		0	310	955.461.773			64	180.000.000	64	59.749.800	64	33,19	64	59.749.800	21	6	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			4	4	19	2		310	955.461.773			64	180.000.000	30	59.749.800	30	33,19	30	59.749.800	10	6	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
								100	2.983.098.691		100	658.313.400		163.540.200		24,84		163.540.200	-	5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
			4	4	20		0	-	2.983.098.691		0	658.313.400	0	163.540.200	0	24,84	0	163.540.200		5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
			4	4	20	1		5	483.252.925			1	78.806.900	1	49.681.400	1	63,04	1	49.681.400	20	10	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			4	4	20	2		5	109.793.174			1	20.684.000	1	20.479.000	1	99,01	1	20.479.000	20	19	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			4	4	20	3		5	110.260.819			1	20.772.100	1	17.380.550	1	83,67	1	17.380.550	20	16	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			4	4	20	5		5	104.714.895			1	31.621.300	1	18.531.700	1	58,61	1	18.531.700	20	18	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			4	4	20	6		5	295.539.720			1	45.276.900	1	205.257.479	1	453,34	1	205.257.479	20	69	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			4	4	20	7		5	1.548.485.578			1	425.339.700	1	139.122.000	1	32,71	1	139.122.000	20	9	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

No	Kode				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13		
		4	4	20	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen	5	331.051.580			1	35.812.500	1	12.383.910	1	34,58	1	12.383.910	20	4	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		4	5			Kepegawaian		-	17.542.401.338			0	9.469.910.359	92	8.425.897.544	92	88,98	92,00	8.425.897.544	92,00	48			
		4	3			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	17.542.401.338			100	6.913.577.384	100	6.768.661.681	90	98	100	6.768.661.681	100	#####	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
							Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100				100		100		90	100	100		100		BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
							Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100				100		100		100		100		100		BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
							Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85				85		85	-	85		85		-	85		BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		4	5	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	120	161.000.000			4	21.000.000	4	21.000.000	4	100,00	4	21.000.000	3	13	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
		4	5	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra dan Renja yang disusun	120	161.000.000			4	21.000.000	4	21.000.000	4	100,00	4	21.000.000	3	13	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
		4	5	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	12	27.886.622.140			2	5.604.820.959	2	5.498.944.609	2	98,11	2	5.498.944.609	17	20	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			4	5	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tugas ASN		232	25.305.002.140			12	5.048.788.959	12	4.965.634.609	12	98,35	12	4.965.634.609	5	20	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
			4	5	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah SDM Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.200	2.485.200.000			444	549.162.000	444	526.440.000	444	95,86	444	526.440.000	20	21	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			4	5	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	240	59.120.000			12	6.870.000	12	6.870.000	12	100,00	12	6.870.000	5	12	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
							Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan tersusunnya laporan barang	16	26.500.000											-	-		
							Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Tersedianya laporan penerimaan retribusi daerah	60	10.800.000											-	-		
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	-														
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatkan kompetensi dan pengiriman peserta Diklat	26	140.000.000											-	-		
			4	5	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	950	3.931.426.025			172	475.342.025	172	457.203.481	172	96,18	172	457.203.481	18	12	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			4	5	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14	117.282.800			10	20.282.800	10	20.282.800	10	100,00	10	20.282.800	71	17	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			4	5	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang diadakan	41	401.160.000			7	57.824.000	7	57.640.000	7	99,68	7	57.640.000	17	14	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			4	5	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah ketersediaan Peralatan Rumah Tangga	120	193.486.000			30	29.986.000	30	29.986.000	30	100,00	30	29.986.000	25	15	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13		
			4	5	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ketersediaan kebutuhan alat tulis kantor	247	891.620.725			60	162.620.725	60	161.885.045	60	99,55	60	161.885.045	24	18	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			4	5	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan Kebutuhan Cetak dan Penggandaan	75	517.656.500			15	91.747.500	15	91.714.120	15	99,96	15	91.714.120	20	18	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			4	5	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	831.826.000			50	112.881.000	50	95.695.516	50	84,78	50	95.695.516	83	12	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			4	5	6	10	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	5	463.800.000											-	-		
			4	5	6	11	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubel untuk kantor	21	114.594.000											-	-		
			4	5	6	12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	35	400.000.000											-	-		
			4	3	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	3.795.000.000			12	549.000.000	12	539.489.911	12	98,27	12	539.489.911	20	14	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			4	5	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah SDM Pelayanan Jasa Surat Menyurat	360	960.000.000			192	192.000.000	192	192.000.000	192	100,00	192	192.000.000	53	20	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			4	5	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Internet, Listrik	150	1.587.000.000			84	309.000.000	84	299.489.911	84	96,92	84	299.489.911	56	19	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			4	5	8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah SDM Pelayanan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	70	240.000.000			48	48.000.000	48	48.000.000	48	100,00	48	48.000.000	69	20	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
							Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	105	1.008.000.000											-	-	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			4	3	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	505	1.565.198.800			16	263.414.400	16	252.023.680	16	95,68	16	252.023.680	3	16	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
			4	3	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang mendapat pemeliharaan	35	491.700.000			6	98.340.000	6	93.423.460	6	95,00	6	93.423.460	17	19	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			4	3	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	455	224.798.800			8	47.274.400	8	47.274.000	8	100,00	8	47.274.000	2	21	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			4	3	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	15	848.700.000			2	117.800.000	2	111.326.220	2	94,50	2	111.326.220	13	13	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
							PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data kepegawaian yang akurat	100	23.084.065.775			100	2.556.332.975	100	1.657.235.864	100	64,83	100	1.657.235.864	100	7	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
								Persentase terbitnya SK Kenaikan pangkat PNS tepat waktu	100														BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
								Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP	100														BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
								Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang sudah diseleksi secara terbuka	100														BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan fungsional	11														BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
							Persentase ASN yang lulus uji pengembangan kompetensi	100														BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
							Persentase Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang tertangani	100														BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
							Prosentase pemenuhan formasi sesuai dengan kebutuhan	95														BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
							Persentase SK Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan tepat waktu	100														BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			4	5	15	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah PNS yang data kepegawaianya update dan valid	66.000	11.510.035.200			11000	983.665.700	1913	706.903.416	1913	71,86	1913	706.903.416	3	6	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
							Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan tepat waktu	3.600	-													BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
							Jumlah kebutuhan formasi ASN yang terisi	6.474	-													BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13		
							Jumlah SK Kenaikan gaji berkala yang diterbitkan tepat waktu	32.628	-													BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			4	5	15	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah formasi Jabatan yang disusun	6.398	157.637.000			700	22.137.000	700	16.906.950	700	76,37	700	16.906.950	11	11	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
			4	5	15	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah koordinasi dan konsultasi fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK yang dilaksanakan	1.471	76.930.000												-	-	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			4	5	15	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah kegiatan seleksi penerimaan ASN	6.398	4.632.366.500			600	690.272.700	600	519.776.716	600	75,30	600	519.776.716	9	11	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
			4	5	15	7	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah PNS yang Purna Bhakti / Pensiun	3.000	443.934.000			600	66.006.000	600	65.280.750	600	98,90	600	65.280.750	20	15	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
			4	5	15	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah peserta Sosialisasi Dewan Pengurus dan anggota Korpri	3.000	186.245.000			120	128.214.000	30	28.118.000	30	21,93	30	28.118.000	1	15	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
			4	5	15	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dikelola	5	236.532.000			1	41.536.000	1	41.335.000	1	99,52	1	41.335.000	20	17	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
			4	5	15	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah updating data kepegawaian dalam Sistem Informasi Kepegawaian yang dilakukan	55.000	189.500.000			12	35.500.000	12	35.486.000	12	99,96	12	35.486.000	0	19	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
			4	5	16		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Penempatan ASN yang sesuai dengan analisa jabatan	62.872	1.099.752.000			8844	139.025.000	3171	112.051.128	3171	80,60	3171	112.051.128	5	10	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	4	5	16	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah PNS yang ditempatkan sesuai dengan Kualifikasi Pendidikan dan Kompetensinya	500	178.017.000			110	27.735.000	110	16.470.000	110	59,38	110	16.470.000	22	9	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	4	5	16	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat dan SK Kenaikan Gaji Berkala yang terbit	8.530	411.158.000			2507	66.290.000	2507	64.881.128	2507	97,87	2507	64.881.128	29	16	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	4	5	16	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Pejabat Struktural yang disumpah/ dilantik	3.000	48.800.000			554	45.000.000	554	30.700.000	554	68,22	554	30.700.000	18	63	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	4	5	17		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Uji kompetensi ASN (Jabatan dan fungsional) yang dilaksanakan	13	7.185.076.575			3000	1.202.593.275	2978	628.124.820	2978	52,23	2978	628.124.820	22.908	9	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	4	5	17	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian	600	212.365.800			300	96.182.300	300	95.782.800	300	99,58	300	95.782.800	50	45	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	4	5	17	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah peserta uji kelayakan pejabat struktural	1.175	2.210.226.000			1175	975.653.975	1175	424.994.420	1175	43,56	1175	424.994.420	100	19	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	4	5	17	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar dan ikatan dinas yang mendapatkan bantuan biaya	19	900.000.000			3	100.000.000	3	96.000.000	3	96,00	3	96.000.000	16	11	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
					Fasilitasi Pengembangan karir dalam Jabatan Fungsional	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan karir dalam Jabatan Fungsional berupa SK PAK	7.500	190.757.000											-	-	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	4	5	17	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah SK Jabatan Fungsional yang diterbitkan	31.407	200.329.400			1500	30.757.000	1500	11.347.600	1500	36,89	1500	11.347.600	5	6	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			4	5	18	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang diusulkan mendapat penghargaan Satya Lencana Karya Satya Nugraha	2.059	3.289.202.000			354	231.049.000	11005	210.156.500	11005	90,96	11005	210.156.500	534	6	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
							Jumlah kasus perceraian dan ijin perkawinan istri ke-dua dan seterusnya yang tertangani	105													-	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			4	5	18	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2	344.980.000			1	64.980.000	1	54.022.000	1	83,14	1	54.022.000	50	16	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			4	5	18	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	52.500	323.894.000			11000	56.426.000	11000	56.263.500	11000	99,71	11000	56.263.500	21	17	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			4	5	18	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	10	111.552.000			2	20.036.000	2	12.873.000	2	64,25	2	12.873.000	2	12	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
							Pembinaan disiplin ASN	6	64.500.000												-	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			4	5	18	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	25	533.879.000			5	89.607.000	5	86.998.000	5	97,09	5	86.998.000	20	16	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			4	5	18		Pelayanan proses izin perceraian pegawai	100	68.250.000														
			4	5	18		Penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	2	71.990.000														

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			4	5	18	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	Bintek bagi ASN yang menduduki JPTP, JA dan JP	320	571.282.800															
			4	5	18	Penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan sertifikasi kompetensi pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kopetensi, sumber belajar, kerjasama, pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan prajabatan serta jabatan fungsional.	Terbitnya Perbub tentang kebijakan diklat kepemimpinan JPTP, administrator dan pengawas, serta Diklat Prajabatan dan Fungsional	1	34.250.000															
			4	5	18	Penyelenggaraan dan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, prajabatan dan jabatan fungsional.	Terlaksananya diklat kepemimpinan JPTP, administrator dan pengawas, serta Diklat Prajabatan dan Fungsional	1.403	10.898.052.000															
			4	6		Pendidikan dan Pelatihan		0	100	22.940.239.000			0	2.790.824.000	94,60	2.596.733.550	94,60	93,05	94,60	2.596.733.550	94,60	11	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase tingkat kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional	100		22.940.239.000			100	2.790.824.000	100	2.596.733.550	100	93,05	100	2.596.733.550	100	11	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
							Persentase tingkat kelulusan peserta diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya	100					100		100							100	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
							Persentase tingkat kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan teknis sesuai bidang tugas	100					100		100							100	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
							Persentase tingkat kelulusan diklatsar prajabatan	100				100		100		100		100				BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
			4	6	16		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	0	200	13.950.000.000			50	2.790.824.000	50	2.596.733.550	50	93,05	50	2.596.733.550	25	19	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			4	6	16	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	0	200	13.950.000.000			50	2.790.824.000	50	2.596.733.550	50	93,05	50	2.596.733.550	25	19	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			4	7			Penelitian dan Pengembangan	0	-	23.869.553.029			0	5.395.653.307	90,72	4.732.474.084	90,72	88	90,72	4.732.474.084	90,72	20	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	3			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100		21.970.692.399			100	4.123.933.307	85	3.282.813.785	85	80	85	3.282.813.785	85	15	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
							Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100					100		100		100		100		100		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
							Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100					100		100		100		100		100		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
							Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85					85		85		85		85		85		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35	309.370.000			4	42.370.000	4	40.915.000	4	97	4	40.915.000	11	13	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			4	7	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	32.470.000			2	4.470.000	2	4.445.000	2	99	2	4.445.000	20	14	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			4	7	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	5	32.170.000			1	4.170.000	1	4.170.000	1	100	1	4.170.000	20	13	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	5	32.170.000			1	4.170.000	1	3.970.000	1	95	1	3.970.000	20	12	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	5	32.170.000			1	4.170.000	1	4.170.000	1	100	1	4.170.000	20	13	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	5	32.190.000			1	4.190.000	1	4.030.000	1	96	1	4.030.000	20	13	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	148.200.000			1	21.200.000	-	20.130.000	-	95	-	20.130.000	-	14	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	93	16.925.820.856				3.456.710.307		2.658.803.420		77		2.658.803.420	-	16	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tugas ASN		60	14.556.343.856			12	3.003.153.307	12	2.447.812.919	12	82	12	2.447.812.919	20	17	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	5	2.249.232.000			1	432.312.000	1	418.822.000	1	97	1	418.822.000	20	19	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	33.372.500			1	5.372.500	1	5.372.500	1	100	1	5.372.500	20	16	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	54.500.000			3	10.500.000	3	10.500.000	3	100	3	10.500.000	17	19	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran	5	32.372.500			1	5.372.500	1	5.312.000	1	99	1	5.312.000	20	16	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya	60	213.000.000			12	42.400.000	12	34.400.000	12	81	12	34.400.000	20	16	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			4	7	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	140	70.000.000			32	14.400.000	32	14.400.000	32	100	32	14.400.000	23	21	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH	
			4	7	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25	143.000.000			5	28.000.000	5	20.000.000	5	71	5	20.000.000	20	14	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH	
			4	7	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	95	2.517.241.543			348.303.000	347.227.615	100	347.227.615				347.227.615	-	14	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH	
			4	7	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5	69.185.000			1	13.875.000	1	13.696.000	1	99	1	13.696.000	20	20	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH	
			4	7	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70	1.308.877.343			14	148.920.000	14	148.386.000	14	100	14	148.386.000	20	11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH	
			4	7	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5	123.861.700			1	20.379.700	1	20.229.000	1	99	1	20.229.000	20	16	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH	
			4	7	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5	223.044.000			1	38.840.300	1	38.820.545	1	100	1	38.820.545	20	17	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH	
			4	7	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5	258.723.500			1	27.762.000	1	27.731.400	1	100	1	27.731.400	20	11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH	
			4	7	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	533.550.000			1	98.526.000	1	98.364.670	1	100	1	98.364.670	20	18	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH	
			4	7	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15	593.000.000			3	108.000.000	3	80.023.250	3	74	3	80.023.250	20	13	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH	
			4	7	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15	593.000.000			3	108.000.000	3	80.023.250	3	74	3	80.023.250	20	13	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH	
			4	7	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19	1.412.260.000			4	126.150.000	4	121.444.500	4	96	4	121.444.500	21	9	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH	

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			4	7	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	10	453.340.000			2	78.340.000	2	74.224.500	2	95	2	74.224.500	20	16	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	5	123.920.000			1	18.920.000	1	18.345.000	1	97	1	18.345.000	20	15	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang direhabilitasi dan terpelihara	4	835.000.000			1	28.890.000	1	28.875.000	1	100	1	28.875.000	25	3	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
							PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	90	1.898.860.630			70	1.271.720.000	70	1.220.644.300	70	96	70	1.220.644.300	78	64	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
								Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	90													BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			4	7	15		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	0	100	378.860.630				273.000.000	99,67	272.095.700	99	100	99	272.095.700	99	72	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	15	3	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen	100	58.860.630			1	153.000.000	1	152.331.700	1	100	1	152.331.700	1	259	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	15	4	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen	2	320.000.000			1	120.000.000	1	119.764.000	1	100	1	119.764.000	50	37	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	17		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	0	5	720.000.000			1	280.720.000	1	278.339.400	1	99	1	278.339.400	20	39	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	17	1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen Kajian Potensi dan pengembangan usaha mikro masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah	5	720.000.000			1	141.530.000	1	140.885.000	1	100	1	140.885.000	20	20	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	18		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	0	15	800.000.000			3	718.000.000	3	670.209.200	3	93	3	670.209.200	20	84	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	18	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen	15	800.000.000			3	718.000.000	3	670.209.200	3	93	3	670.209.200	20	84	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
							5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	4	8			Sekretariat DPRD	0	-	498.609.326.008			0	71.341.797.064		59.304.913.747		83,13	83,13	59.304.913.747		83,13	12	SEKRETARIA T DPRD
	4	3			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		19,4225928	138.914.400.513			1	39.332.079.064	100%	36.889.969.096	100%	93,79	100%	36.889.969.096	100%	27	SEKRETARIA T DPRD	
					Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100					1		100%	-	100%	100%	-	100%	-	100%	-	SEKRETARIA T DPRD
					Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100					1		100%	-	100%	100%	-	100%	-	100%	-	SEKRETARIA T DPRD
					Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85					0,85		85%	-	85%	85%	-	85%	-	85%	-	SEKRETARIA T DPRD
	4	8	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		14	84.041.400			4	28.581.000	4	28.156.300	100	98,51	4	28.156.300	29	34	SEKRETARIA T DPRD	
	4	8	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		10	48.354.000			2	14.350.500	2	14.031.500	100	97,78	2	14.031.500	20	29	SEKRETARIA T DPRD	
	4	8	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4	35.687.400			2	14.230.500	2	14.124.800	100	99,26	2	14.124.800	50	40	SEKRETARIA T DPRD	
	4	8	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		848	35.050.362.613			28	34.170.650.464	28	33.147.475.269	100	97,01	28	33.147.475.269	3	95	SEKRETARIA T DPRD	
	4	8	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tugas ASN		770	34.327.047.213			64	33.440.249.364	64	32.517.985.299	100	97,24	64	32.517.985.299	8	95	SEKRETARIA T DPRD	
	4	8	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		60	668.262.300			12	700.559.600	12	600.449.970	100	85,71	12	600.449.970	20	90	SEKRETARIA T DPRD	
	4	8	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		18	55.053.100			4	29.841.500	4	29.040.000	100	97,31	4	29.040.000	22	53	SEKRETARIA T DPRD	
	4	8	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		24	551.770.500			24	277.787.500	24	195.163.274	100	70,26	24	195.163.274	100	35	SEKRETARIA T DPRD	
	4	8	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		24	551.770.500			24	277.787.500	24	195.163.274	100	70,26	24	195.163.274	100	35	SEKRETARIA T DPRD	
	4	8	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah		60	8.310.139.000			0	2.001.878.020	211	1.387.204.585	#DIV/0!	69,30	211	1.387.204.585	352	17	SEKRETARIA T DPRD	
	4	8	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		60	198.500.000			12	39.440.000	12	27.179.000	100	68,91	12	27.179.000	20	14	SEKRETARIA T DPRD	
	4	8	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		50	1.516.365.000			23	569.503.020	23	528.275.000	100	92,76	23	528.275.000	46	35	SEKRETARIA T DPRD	
	4	8	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		6	67.050.000			2	13.410.000	2	11.010.000	100	82,10	2	11.010.000	33	16	SEKRETARIA T DPRD	
	4	8	6	5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12	686.364.000			6	227.871.000	6	220.435.050	100	96,74	6	220.435.050	50	32	SEKRETARIA T DPRD	
	4	8	6	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		384	131.340.000			96	9.550.000	96	9.425.000	100	98,69	96	9.425.000	25	7	SEKRETARIA T DPRD	
	4	8	6	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		60	265.925.000			12	53.185.000	12	38.420.750	100	72,24	12	38.420.750	20	14	SEKRETARIA T DPRD	
	4	8	6	9	Fasilitas Kunjungan Tamu		250	5.444.595.000			60	1.088.919.000	60	1.080.734.785	100	99,25	60	1.080.734.785	24	20	SEKRETARIA T DPRD	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
								5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			4	8	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Terkait Kondisi Perekonomian Daerah	15	1.130.431.100			15	92.965.080	15	88.885.000	100	95,61	15	88.885.000	100	8	SEKRETARIA T DPRD			
			4	8	7	2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan	100	971.100.000			31	1.922.965.080	31	1.721.446.181	100	89,52	31	1.721.446.181	31	177	SEKRETARIA T DPRD		
			4	8	7	5	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	20	971.100.000			15	92.965.080	15	88.885.000	100	95,61	15	88.885.000	75	9	SEKRETARIA T DPRD		
			4	8	8		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubel	75	5.350.000.000			16	1.830.000.000	16	1.632.561.181	100	89,21	16	1.632.561.181	21	31	SEKRETARIA T DPRD		
			4	8	8	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	12	5.366.397.000			4	314.000.000	4	174.018.173	100	55,42	4	174.018.173	33	3	SEKRETARIA T DPRD		
			4	8	8	4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	60	3.744.000.000			12	1.516.000.000	12	1.458.543.008	100	96,21	12	1.458.543.008	20	39	SEKRETARIA T DPRD		
			4	8	9		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Jasa Umum Kantor	100	1.622.397.000			47	930.217.000	47	589.750.761	100	63,40	47	589.750.761	47	36	SEKRETARIA T DPRD		
			4	8	9	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	178	88.580.590.000			31	693.190.000	31	447.597.761	100	64,57	31	447.597.761	17	1	SEKRETARIA T DPRD		
			4	8	9	9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang perlu Pemeliharaan	31	490.590.000			4	94.000.000	4	69.900.000	100	74,36	4	69.900.000	13	14	SEKRETARIA T DPRD		
			4	8	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	60	744.000.000			12	143.027.000	12	72.253.000	100	50,52	12	72.253.000	20	10	SEKRETARIA T DPRD		
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang dilakukan Perbaikan	87	87.346.000.000			90	32.009.718.000		22.638.335.142	-	70,72		22.638.335.142	-	26	SEKRETARIA T DPRD		
							PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas Sumber Daya Pimpinan dan Anggota DPRD dan Aparatur Sekretariat DPRD	90	285.960.031.752			90	-		100		90	-		100		SEKRETARIA T DPRD		
								Persentase fasilitasi pembahasan peraturan daerah	90				90	-		100		90	-		100		SEKRETARIA T DPRD		
								Persentase pembahasan Raperda	90				90	-		100		90	-		100		SEKRETARIA T DPRD		
								Persentase pembahasan produk hukum non perkada	90				90	-		100		90	-		100		SEKRETARIA T DPRD		
			4	8	15			Persentase pembahasan kebijakan anggaran	90				0								-		SEKRETARIA T DPRD		
			4	8	15	1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		0	20	7.838.484.400			4	2.398.046.600	4	1.058.202.673	100	44,13	4	1.058.202.673	20	14	SEKRETARIA T DPRD	
			4	8	15	2	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	25	2.602.164.100			5	2.421.174.000	5	573.693.407	100	23,69	5	573.693.407	20	22	SEKRETARIA T DPRD		
			4	8	15	3	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan Perda	35	2.310.186.700			6	385.000.000	6	245.000.000	100	63,64	6	245.000.000	17	11	SEKRETARIA T DPRD		
			4	8	15	4	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen hasil kajian/studi yang dihasilkan	35	350.000.000			6	50.000.000	6	49.775.000	100	99,55	6	49.775.000	17	14	SEKRETARIA T DPRD		
			4	8	15		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	32	2.576.133.600			7	858.711.200	7	789.199.084	100	91,91	7	789.199.084	22	31	SEKRETARIA T DPRD		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
								5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			4	8	16	1	Pembahasan Kebijakan Anggaran	0	5	21.536.702.200			1	61.340.000	1	59.797.000	100	97,48	1	59.797.000	20	0	SEKRETARIA T DPRD		
			4	8	16	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Laporan Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	5	306.222.500			1	57.730.000	1	50.437.000	100	87,37	1	50.437.000	20	16	SEKRETARIA T DPRD		
			4	8	16	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Hasil Pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	5	552.166.000			1	138.041.500	1	129.599.000	100	93,88	1	129.599.000	20	23	SEKRETARIA T DPRD		
			4	8	16	3	Pembahasan APBD	Jumlah Hasil Pembahasan APBD yang disusun	5	501.792.800			1	120.015.400	1	100.434.000	100		1	100.434.000	20	20	SEKRETARIA T DPRD		
			4	8	16	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Hasil Pembahasan APBD yang disusun	15	1.444.752.900			3	481.584.300	3	448.932.084	100		3	448.932.084	20	31	SEKRETARIA T DPRD		
			4	8	16	5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	120	18.731.768.000			36	9.365.884.000	36	8.518.904.892	100	90,96	36	8.518.904.892	30	45	SEKRETARIA T DPRD		
			4	8	17	1	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		-	30	53.536.996.200	-	-	6	2.088.170.000	6	2.088.170.000	100	100,00	6	2.084.946.867	20	4	SEKRETARIA T DPRD	
			4	8	17	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum Daerah	35	7.822.236.000	-	-	6	1.829.600.000	6	1.829.600.000	100	100,00	6	1.690.799.466	17	22	SEKRETARIA T DPRD		
			4	8	17	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Infrastruktur	35	8.653.860.000	-	-	6	2.128.776.000	6	2.128.776.000	100	100,00	6	1.715.066.467	17	20	SEKRETARIA T DPRD		
			4	8	17	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat	35	7.523.889.000	-	-	6	1.775.159.000	6	1.775.159.000	100	100,00	6	1.767.776.046	17	23	SEKRETARIA T DPRD		
			4	8	17	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian	35	1.872.038.000	-	-	6	808.855.000	6	808.855.000	100	100,00	6	673.015.820	17	36	SEKRETARIA T DPRD		
			4	8	17	6	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Sumber Daya Alam	35	761.289.000	-	-	4	53.636.000	4	53.636.000	100	100,00	4	53.636.000	11	7	SEKRETARIA T DPRD		
			4	8	17	7	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	36	3.550.000.000	-	-	6	681.688.000	6	681.688.000	100	100,00	6	681.688.000	17		SEKRETARIA T DPRD		
			4	8	18		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	60	23.353.684.200	-	-	12	11.676.842.100	12	11.676.842.100	100	100,00	12	11.676.842.100	20	50	SEKRETARIA T DPRD		
			4	8	18	2	Peningkatan Kapasitas DPRD		-	285	32.386.869.500	-	-	50	2.958.800.500	50	2.958.800.500	100	100,00	50	2.958.800.500	18	9	SEKRETARIA T DPRD	
			4	8	18	3	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah SDM yang Mendapat Pelatihan/Bimtek	900	20.821.377.500	-	-	139	8.178.041.600	139	8.178.041.600	100	100,00	139	8.178.041.600	15	39	SEKRETARIA T DPRD		
			4	8	18	4	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Media Massa yang dikerjasamakan Per Tahun	200	8.289.492.000	-	-	120	288.000.000	120	288.000.000	100	100,00	120	288.000.000	60	3	SEKRETARIA T DPRD		
			4	8	18	5	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Tenaga Ahli yang tersedia	14	2.016.000.000	-	-	7	252.000.000	7	252.000.000	100	100,00	7	252.000.000	50	13	SEKRETARIA T DPRD		
			4	8	19		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli yang tersedia	7	1.260.000.000	-	-	3	715.973.300	3	715.973.300	100	100,00	3	715.973.300	43	57	SEKRETARIA T DPRD		
			4	8	19	2	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		-	15	2.142.780.200	-	-	3	28.800.000	3	28.800.000	100	100,00	3	28.800.000	20	1	SEKRETARIA T DPRD	
			4	8	19	3	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD	3	972.464.500	-	-	3	687.173.300	3	687.173.300	100	100,00	3	687.173.300	100	71	SEKRETARIA T DPRD		
			4	8	20		Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses DPRD yang dilaksanakan	3	1.170.315.700	-	-	3	180.194.000	3	180.194.000	100	100,00	3	180.194.000	100	15	SEKRETARIA T DPRD		
			4	8	20	1	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		-	5	42.543.237.813	-	-	1	180.194.000	1	180.194.000	100	100,00	1	180.194.000	20	0	SEKRETARIA T DPRD	
			4	8	21		Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD yang disusun	5	42.543.237.813	-	-	1	2.015.416.400	1	2.015.416.400	100	100,00	1	2.015.416.400	20	5	SEKRETARIA T DPRD		
			4	8	21	2	Pembahasan Kerja Sama Daerah		-	5	42.543.237.813	-	-	1	2.015.416.400	1	2.015.416.400	100	100,00	1	2.015.416.400	20	5	SEKRETARIA T DPRD	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
						5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	8	22	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	5	42.543.237.813	-	-	1	2.015.416.400	1	2.015.416.400	100	100,00	1	2.015.416.400	20	5	SEKRETARIA T DPRD	
	4	8	22	1 Fasilitasi Tugas DPRD	-	200	42.543.237.813	-	-	24	1.634.766.000	24	1.634.766.000	100	100,00	24	1.634.766.000	12	4	SEKRETARIA T DPRD	
	4	8	22	3 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Kunjungan Kerja DPRD yang dilaksanakan	60	1.654.752.000	-	-	12	380.650.400	12	380.650.400	100	100,00	12	380.650.400	20	23	SEKRETARIA T DPRD	
	4	8	23	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	60	40.888.485.813	-	-	0	1.230.400.000	-	1.230.400.000		100,00					SEKRETARIA T DPRD	
	4	8	23	2 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	40.888.485.813	-	-		910.000.000		910.000.000		100,00					SEKRETARIA T DPRD	
	4	8	23	3 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	770	34.327.047.213	-	-		320.400.000		320.400.000		100,00					SEKRETARIA T DPRD	
	4	8	24	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	2.565.159.300	-	-	0	712.076.400	-	712.076.400		100,00					SEKRETARIA T DPRD	
	4	8	24	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran/ SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran/ SKPD	12	2.565.159.300	-	-		354.296.400		354.296.400		100,00					SEKRETARIA T DPRD	
	4	8	24	4 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	-	1.431.120.000	-	-		357.780.000		357.780.000		100,00					SEKRETARIA T DPRD	
				Layanan Administrasi DPRD		-														SEKRETARIA T DPRD	
				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	-	-													SEKRETARIA T DPRD	
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	-	-													SEKRETARIA T DPRD	
	4	11		Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	0	100	360.984.041.700			0	72.196.808.340	98	70.112.460.484	98	97,11	98,00	70.112.460.484	98	19	KECAMATAN TRIMURJO	
	4	11	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	30	10.746.810.000			5	2.149.362.000	5	1.047.120.100	100	48,72	5	1.047.120.100	17	10	KECAMATAN TRIMURJO	
	4	11	2	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	10.746.810.000			12	2.149.362.000	12	1.047.120.100	100	48,72	12	1.047.120.100	20	10	KECAMATAN TRIMURJO	
	4	11	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	814.970.000			12	162.994.000	12	49.903.900	100	30,62	12	49.903.900	20	6	KECAMATAN TRIMURJO	
	4	11	6	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	40	12.025.000			8	2.405.000	8	1.174.500	100	48,84	8	1.174.500	20	10	KECAMATAN TRIMURJO	
	4	11	6	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	50	25.687.500			10	5.137.500	10	900.400	100	17,53	10	900.400	20	4	KECAMATAN TRIMURJO	
	4	11	6	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	40	129.757.500			8	25.951.500	8	11.829.000	100	45,58	8	11.829.000	20	9	KECAMATAN TRIMURJO	
	4	11	6	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	45	647.500.000			9	129.500.000	9	36.000.000	100	27,80	9	36.000.000	20	6	KECAMATAN TRIMURJO	
	4	11	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	129.200.000			12	25.840.000	12	7.517.500	100	29,09	12	7.517.500	20	6	KECAMATAN TRIMURJO	
	4	11	8	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	129.200.000			12	25.840.000	12	7.517.500	100	29,09	12	7.517.500	20	6	KECAMATAN TRIMURJO	
	4	11	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	40	405.675.000			8	81.135.000	8	19.530.000	100	24,07	8	19.530.000	20	5	KECAMATAN TRIMURJO	
	4	11	9	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	40	258.850.000			8	51.770.000	8	17.500.000	100	33,80	8	17.500.000	20	7	KECAMATAN TRIMURJO	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
								5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			4	11	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	20	33.650.000			4	6.730.000	4	2.030.000	100	30,16	4	2.030.000	20	6	KECAMATAN TRIMURJO		
			4	11	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	25	613.175.000			0	122.635.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN TRIMURJO	
			4	11	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	5	10.053.560.000			1	2.010.712.000	1	651.045.500	100	32,38	1	651.045.500	20	6	KECAMATAN GUNUNG SUGIH		
			4	11	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	5	10.053.560.000			1	2.010.712.000	1	1.097.681.300	100	54,59	1	1.097.681.300	20	11	KECAMATAN GUNUNG SUGIH		
			4	11	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	5	1.193.017.500			1	238.603.500	1	540.380.300	100	226,48	1	540.380.300	20	45	KECAMATAN GUNUNG SUGIH		
			4	11	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5	11.275.000			1	2.255.000	1	1.335.000	100	59,20	1	1.335.000	20	12	KECAMATAN GUNUNG SUGIH		
			4	11	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	40	73.297.500			8	14.659.500	8	10.009.500	100	68,28	8	10.009.500	20	14	KECAMATAN GUNUNG SUGIH		
			4	11	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan	60	128.445.000			12	25.689.000	12	13.800.000	100	53,72	12	13.800.000	20	11	KECAMATAN GUNUNG SUGIH		
			4	11	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	980.000.000			12	196.000.000	12	68.600.000	100	35,00	12	68.600.000	20	7	KECAMATAN GUNUNG SUGIH		
			4	11	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan	25	830.227.500			5	166.045.500	5	149.676.560	100	90,14	5	149.676.560	20	18	KECAMATAN GUNUNG SUGIH		
			4	11	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	20	830.227.500			4	166.045.500	4	149.676.560	100	90,14	4	149.676.560	20	18	KECAMATAN GUNUNG SUGIH		
			4	11	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	40	54.000.000			8	10.800.000	8	4.800.000	100	44,44	8	4.800.000	20	9	KECAMATAN GUNUNG SUGIH		
			4	11	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	25	54.000.000			5	10.800.000	5	4.800.000	100	44,44	5	4.800.000	20	9	KECAMATAN GUNUNG SUGIH		
			4	11	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	20	628.625.000			4	125.725.000	4	90.121.000	100	71,68	4	90.121.000	20	14	KECAMATAN GUNUNG SUGIH		
			4	11	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	20	183.350.000			4	36.670.000	4	16.800.000	100	45,81	4	16.800.000	20	9	KECAMATAN GUNUNG SUGIH		
			4	11	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang mendapat pemeliharaan	20	112.500.000			4	22.500.000	4	9.800.000	100	43,56	4	9.800.000	20	9	KECAMATAN GUNUNG SUGIH		
			4	11	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	25	32.250.000			5	6.450.000	5	3.450.000	100	53,49	5	3.450.000	20	11	KECAMATAN GUNUNG SUGIH		
			4	11	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	300.525.000			1	60.105.000	1	60.071.000	100	99,94	1	60.071.000	20	20	KECAMATAN GUNUNG SUGIH		
			4	11	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	10	11.652.090.000			2	2.330.418.000	2	779.725.000	100	33,46	2	779.725.000	20	7	KECAMATAN TERBANGGI BESAR		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
								5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			4	11	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	11.652.090.000			12	2.330.418.000	12	779.725.000	100	33,46	12	779.725.000	20	7	KECAMATAN TERBANGGI BESAR		
			4	11	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya	60	138.750.000			12	27.750.000	12	27.711.750	100	99,86	12	27.711.750	20	20	KECAMATAN TERBANGGI BESAR		
			4	11	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5	138.750.000			1	27.750.000	1	27.711.750	100	99,86	1	27.711.750	20	20	KECAMATAN TERBANGGI BESAR		
			4	11	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	15	882.635.000			3	176.527.000	3	57.650.000	100	32,66	3	57.650.000	20	7	KECAMATAN TERBANGGI BESAR		
			4	11	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	25	12.025.000			5	2.405.000	5	650.000	100	27,03	5	650.000	20	5	KECAMATAN TERBANGGI BESAR		
			4	11	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	125.000.000			0	25.000.000	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN TERBANGGI BESAR	
			4	11	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	36	25.687.500			7	5.137.500	7	600.000	100	11,68	7	600.000	19	2	KECAMATAN TERBANGGI BESAR		
			4	11	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	36	82.922.500			7	16.584.500	7	8.400.000	100	50,65	7	8.400.000	19	10	KECAMATAN TERBANGGI BESAR		
			4	11	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	5	637.000.000			1	127.400.000	1	48.000.000	100	37,68	1	48.000.000	20	8	KECAMATAN TERBANGGI BESAR		
			4	11	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	196.500.000			12	39.300.000	12	13.950.000	100	35,50	12	13.950.000	20	7	KECAMATAN TERBANGGI BESAR		
			4	11	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	196.500.000			12	39.300.000	12	13.950.000	100	35,50	12	13.950.000	20	7	KECAMATAN TERBANGGI BESAR		
			4	11	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	60	336.350.000			12	67.270.000	12	23.050.000	100	34,26	12	23.050.000	20	7	KECAMATAN TERBANGGI BESAR		
			4	11	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	60	298.850.000			12	59.770.000	12	23.050.000	100	38,56	12	23.050.000	20	8	KECAMATAN TERBANGGI BESAR		
			4	11	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang direhab	5	37.500.000			0	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN TERBANGGI BESAR	
			4	11	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	40	10.207.066.185			8	2.041.413.237	8	1.920.897.162	100	94,10	8	1.920.897.162	20	19	KECAMATAN KALIREJO		
			4	11	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	45	1.652.053.100			9	330.410.620	9	106.275.000	100	32,16	9	106.275.000	20	6	KECAMATAN KALIREJO		
			4	11	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	277.440.000			12	55.488.000	12	7.857.500	100	14,16	12	7.857.500	20	3	KECAMATAN KALIREJO		
			4	11	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	12.025.000			12	2.405.000	12	750.000	100	31,19	12	750.000	20	6	KECAMATAN KALIREJO		
			4	11	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	60	6.617.500			12	1.323.500	12	517.100	100	39,07	12	517.100	20	8	KECAMATAN KALIREJO		
			4	11	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	45	38.797.500			9	7.759.500	9	1.590.400	100	20,50	9	1.590.400	20	4	KECAMATAN KALIREJO		
			4	11	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	20	220.000.000			4	44.000.000	4	5.000.000	100	11,36	4	5.000.000	20	2	KECAMATAN KALIREJO		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	4	11	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	20	82.750.000			4	16.550.000	4	1.871.490	100	11,31	4	1.871.490	20	2	KECAMATAN KALIREJO	
	4	11	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	5	82.750.000			1	16.550.000	1	1.871.490	100	11,31	1	1.871.490	20	2	KECAMATAN KALIREJO	
	4	11	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	5	446.600.000			1	89.320.000	1	49.820.000	100	55,78	1	49.820.000	20	11	KECAMATAN KALIREJO	
	4	11	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	36	203.350.000			7	40.670.000	7	8.700.000	100	21,39	7	8.700.000	19	4	KECAMATAN KALIREJO	
	4	11	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	5	40.750.000			1	8.150.000	1	660.000	100	8,10	1	660.000	20	2	KECAMATAN KALIREJO	
	4	11	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	202.500.000			1	40.500.000	1	40.460.000	100	99,90	1	40.460.000	20	20	KECAMATAN KALIREJO	
	4	11	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	36	13.067.998.905			7	2.613.599.781	7	2.526.142.477	100	96,65	7	2.526.142.477	19	19	KECAMATAN BANGUNREJO	
	4	11	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	2.024.571.500			12	404.914.300	12	92.750.000	100	22,91	12	92.750.000	20	5	KECAMATAN BANGUNREJO	
	4	11	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	272.028.500			12	54.405.700	12	14.650.000	100	26,93	12	14.650.000	20	5	KECAMATAN BANGUNREJO	
	4	11	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	8.350.000			0	1.670.000	-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BANGUNREJO	
	4	11	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	60	8.213.500			12	1.642.700	12	400.000	100	24,35	12	400.000	20	5	KECAMATAN BANGUNREJO	
	4	11	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	50	35.465.000			10	7.093.000	10	2.250.000	100	31,72	10	2.250.000	20	6	KECAMATAN BANGUNREJO	
	4	11	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	40	220.000.000			8	44.000.000	8	12.000.000	100	27,27	8	12.000.000	20	5	KECAMATAN BANGUNREJO	
	4	11	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	45	64.750.000			9	12.950.000	9	950.000	100	7,34	9	950.000	20	1	KECAMATAN BANGUNREJO	
	4	11	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	64.750.000			12	12.950.000	12	950.000	100	7,34	12	950.000	20	1	KECAMATAN BANGUNREJO	
	4	11	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	20	443.550.000			4	88.710.000	4	14.650.000	100	16,51	4	14.650.000	20	3	KECAMATAN BANGUNREJO	
	4	11	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	60	203.350.000			12	40.670.000	12	11.800.000	100	29,01	12	11.800.000	20	6	KECAMATAN BANGUNREJO	
	4	11	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	30	37.700.000			6	7.540.000	6	2.850.000	100	37,80	6	2.850.000	20	8	KECAMATAN BANGUNREJO	
	4	11	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	202.500.000			0	40.500.000	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	KECAMATAN BANGUNREJO	
	4	11	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	20	13.751.490.255			5	2.750.298.051	5	2.661.546.698	100	96,77	5	2.661.546.698	25	19	KECAMATAN PUNGGUR	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
			4	11	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	5	1.182.524.000			1	236.504.800	1	81.037.000	100	34,26	1	81.037.000	20	7	KECAMATAN PUNGGUR				
			4	11	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	5	193.426.000			1	38.685.200	1	2.649.000	100	6,85	1	2.649.000	20	1	KECAMATAN PUNGGUR				
			4	11	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	36	8.105.000			7	1.621.000	7	566.000	100	34,92	7	566.000	19	7	KECAMATAN PUNGGUR				
			4	11	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	25	5.556.000			0	1.111.200	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN PUNGGUR			
			4	11	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	60	23.265.000			12	4.653.000	12	2.083.000	100	44,77	12	2.083.000	20	9	KECAMATAN PUNGGUR				
			4	11	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	156.500.000			0	31.300.000	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN PUNGGUR			
			4	11	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	82.750.000			12	16.550.000	12	5.529.000	100	33,41	12	5.529.000	20	7	KECAMATAN PUNGGUR				
			4	11	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	82.750.000			12	16.550.000	12	5.529.000	100	33,41	12	5.529.000	20	7	KECAMATAN PUNGGUR				
			4	11	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	25	440.100.000			5	88.020.000	5	46.785.000	100	53,15	5	46.785.000	20	11	KECAMATAN PUNGGUR				
			4	11	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	25	203.350.000			5	40.670.000	5	22.119.000	100	54,39	5	22.119.000	20	11	KECAMATAN PUNGGUR				
			4	11	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	30	34.250.000			6	6.850.000	6	1.716.000	100	25,05	6	1.716.000	20	5	KECAMATAN PUNGGUR				
			4	11	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	202.500.000			1	40.500.000	1	22.950.000	100	56,67	1	22.950.000	20	11	KECAMATAN PUNGGUR				
			4	11	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	60	9.048.581.665			12	1.809.716.333	12	1.783.606.978	100	98,56	12	1.783.606.978	20	20	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM				
			4	11	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	1.047.552.500			12	209.510.500	12	57.290.000	100	27,34	12	57.290.000	20	5	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM				
			4	11	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	630.447.500			12	126.089.500	12	36.190.000	100	28,70	12	36.190.000	20	6	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM				
			4	11	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	48	21.725.000			9	4.345.000	9	2.350.000	100	54,09	9	2.350.000	19	11	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM				
			4	11	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	50	55.797.500			10	11.159.500	10	4.290.000	100	38,44	10	4.290.000	20	8	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM				
			4	11	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	60	117.925.000			12	23.585.000	12	14.550.000	100	61,69	12	14.550.000	20	12	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM				
			4	11	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	435.000.000			12	87.000.000	12	15.000.000	100	17,24	12	15.000.000	20	3	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM				
			4	11	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	82.750.000			12	16.550.000	12	8.100.000	100	48,94	12	8.100.000	20	10	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM				
			4	11	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	82.750.000			12	16.550.000	12	8.100.000	100	48,94	12	8.100.000	20	10	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
							5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		4	11	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	20	444.350.000			4	88.870.000	4	24.420.000	100	27,48	4	24.420.000	20	5	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM	
		4	11	9	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	50	202.500.000			0	40.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM	
		4	11	9	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	40	203.350.000			8	40.670.000	8	20.550.000	100	50,53	8	20.550.000	20	10	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM	
		4	11	9	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	38.500.000			1	7.700.000	1	3.870.000	100	50,26	1	3.870.000	20	10	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM	
		4	11	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	60	11.887.631.320			12	2.377.526.264	12	2.313.447.121	100	97,30	12	2.313.447.121	20	19	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK	
		4	11	2	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	1.638.162.500			12	327.632.500	12	105.610.000	100	32,23	12	105.610.000	20	6	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK	
		4	11	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	314.737.500			12	62.947.500	12	11.010.000	100	17,49	12	11.010.000	20	3	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK	
		4	11	6	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		8.350.000			0	1.670.000	-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK	
		4	11	6	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20	6.617.500			4	1.323.500	4	660.000	100	49,87	4	660.000	20	10	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK	
		4	11	6	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	20	39.770.000			4	7.954.000	4	1.350.000	100	16,97	4	1.350.000	20	3	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK	
		4	11	6	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	5	260.000.000			1	52.000.000	1	9.000.000	100	17,31	1	9.000.000	20	3	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK	
		4	11	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	5	58.750.000			1	11.750.000	1	2.509.000	100	21,35	1	2.509.000	20	4	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK	
		4	11	8	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	36	58.750.000			6	11.750.000	6	2.509.000	100	21,35	6	2.509.000	17	4	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK	
		4	11	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	25	480.350.000			5	96.070.000	5	60.088.500	100	62,55	5	60.088.500	20	13	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK	
		4	11	9	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	60	203.350.000			12	40.670.000	12	10.301.000	100	25,33	12	10.301.000	20	5	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK	
		4	11	9	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	30	40.750.000			6	8.150.000	6	2.570.000	100	31,53	6	2.570.000	20	6	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK	
		4	11	9	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	236.250.000			1	47.250.000	1	47.217.500	100	99,93	1	47.217.500	20	20	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK	
		4	11	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	60	10.291.431.390			12	2.058.286.278	12	1.988.877.983	100	96,63	12	1.988.877.983	20	19	KECAMATAN RUMBIA	
		4	11	2	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	840.976.400			12	168.195.280	12	40.350.000	100	23,99	12	40.350.000	20	5	KECAMATAN RUMBIA	
		4	11	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	100	278.238.550			100	55.647.710	50	12.550.000	50	22,55	50	12.550.000	50	5	KECAMATAN RUMBIA	

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
									5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%				
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			4	11	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	50	8.915.500			10	1.783.100	10	850.000	100	47,67	10	850.000	20	10	KECAMATAN RUMBIA		
			4	11	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	40	6.058.050			8	1.211.610	8	800.000	100	66,03	8	800.000	20	13	KECAMATAN RUMBIA		
			4	11	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	45	23.265.000			9	4.653.000	9	1.900.000	100	40,83	9	1.900.000	20	8	KECAMATAN RUMBIA		
			4	11	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	240.000.000			12	48.000.000	12	9.000.000	100	18,75	12	9.000.000	20	4	KECAMATAN RUMBIA		
			4	11	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	5	64.750.000			1	12.950.000	1	1.800.000	100	13,90	1	1.800.000	20	3	KECAMATAN RUMBIA		
			4	11	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	64.750.000			12	12.950.000	12	1.800.000	100	13,90	12	1.800.000	20	3	KECAMATAN RUMBIA		
			4	11	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	25	440.900.000			5	88.180.000	5	57.785.500	100	65,53	5	57.785.500	20	13	KECAMATAN RUMBIA		
			4	11	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	20	203.350.000			4	40.670.000	4	13.050.000	100	32,09	4	13.050.000	20	6	KECAMATAN RUMBIA		
			4	11	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	20	35.050.000			4	7.010.000	4	4.250.000	100	60,63	4	4.250.000	20	12	KECAMATAN RUMBIA		
			4	11	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	202.500.000			1	40.500.000	1	40.485.500	100	99,96	1	40.485.500	20	20	KECAMATAN RUMBIA		
			4	11	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	5	13.115.361.635			1	2.623.072.327	1	2.594.214.907	100	98,90	1	2.594.214.907	20	20	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN		
			4	11	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	36	1.933.845.000			9	386.769.000	9	95.625.500	100	24,72	9	95.625.500	25	5	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN		
			4	11	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	584.755.000			12	116.951.000	12	15.390.000	100	13,16	12	15.390.000	20	3	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN		
			4	11	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	12.500.000			12	2.500.000	12	390.000	100	15,60	12	390.000	20	3	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN		
			4	11	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	48	7.910.000			0	1.582.000	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN	
			4	11	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	50	74.345.000			10	14.869.000	10	2.000.000	100	13,45	10	2.000.000	20	3	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN		
			4	11	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	490.000.000			12	98.000.000	12	13.000.000	100	13,27	12	13.000.000	20	3	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN		
			4	11	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	58.750.000			12	11.750.000	12	1.984.350	100	16,89	12	1.984.350	20	3	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN		
			4	11	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	58.750.000			12	11.750.000	12	1.984.350	100	16,89	12	1.984.350	20	3	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN		
			4	11	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	60	414.100.000			12	82.820.000	12	17.000.000	100	20,53	12	17.000.000	20	4	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN		
			4	11	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	20	204.850.000			4	40.970.000	4	15.500.000	100	37,83	4	15.500.000	20	8	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN		

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4	11	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	50	40.500.000			10	8.100.000	10	1.500.000	100	18,52	10	1.500.000	20	4	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN	
			4	11	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	40	168.750.000			8	33.750.000	8	-	100	-	8	-	20	-	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN	
			4	11	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	45	9.742.164.410			9	1.948.432.882	9	1.921.948.985	100	98,64	9	1.921.948.985	20	20	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA	
			4	11	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	1.212.187.500			12	242.437.500	12	65.150.000	100	26,87	12	65.150.000	20	5	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA	
			4	11	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	377.437.500			12	75.487.500	12	11.400.000	100	15,10	12	11.400.000	20	3	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA	
			4	11	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	8.105.000			12	1.621.000	12	1.550.000	100	95,62	12	1.550.000	20	19	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA	
			4	11	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	48	22.657.500			9	4.531.500	9	1.700.000	100	37,52	9	1.700.000	19	8	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA	
			4	11	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	50	46.675.000			10	9.335.000	10	3.200.000	100	34,28	10	3.200.000	20	7	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA	
			4	11	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	300.000.000			12	60.000.000	12	4.950.000	100	8,25	12	4.950.000	20	2	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA	
			4	11	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	64.750.000			12	12.950.000	12	800.000	100	6,18	12	800.000	20	1	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA	
			4	11	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	64.750.000			12	12.950.000	12	800.000	100	6,18	12	800.000	20	1	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA	
			4	11	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	25	315.300.000			5	63.060.000	5	30.494.500	100	48,36	5	30.494.500	20	10	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA	
			4	11	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	25	203.350.000			5	40.670.000	5	12.300.000	100	30,24	5	12.300.000	20	6	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA	
			4	11	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	40	37.700.000			8	7.540.000	8	3.350.000	100	44,43	8	3.350.000	20	9	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA	
			4	11	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	40	74.250.000			8	14.850.000	8	14.844.500	100	99,96	8	14.844.500	20	20	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA	
			4	11	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	45	12.280.701.825			9	2.456.140.365	9	2.310.662.030	100	94,08	9	2.310.662.030	20	19	KECAMATAN PADANG RATU	
			4	11	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	1.616.622.500			12	323.324.500	12	145.300.000	100	44,94	12	145.300.000	20	9	KECAMATAN PADANG RATU	
			4	11	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	715.327.500			12	143.065.500	12	13.120.000	100	9,17	12	13.120.000	20	2	KECAMATAN PADANG RATU	
			4	11	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	28.725.000			12	5.745.000	12	3.170.000	100	55,18	12	3.170.000	20	11	KECAMATAN PADANG RATU	
			4	11	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	48	56.202.500			9	11.240.500	9	4.000.000	100	35,59	9	4.000.000	19	7	KECAMATAN PADANG RATU	
			4	11	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	50	140.400.000			10	28.080.000	10	2.950.000	100	10,51	10	2.950.000	20	2	KECAMATAN PADANG RATU	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			4	11	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	490.000.000			12	98.000.000	12	3.000.000	100	3,06	12	3.000.000	20	1	KECAMATAN PADANG RATU	
			4	11	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	82.750.000			12	16.550.000	12	4.390.000	100	26,53	12	4.390.000	20	5	KECAMATAN PADANG RATU	
			4	11	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	82.750.000			12	16.550.000	12	4.390.000	100	26,53	12	4.390.000	20	5	KECAMATAN PADANG RATU	
			4	11	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	40	490.350.000			8	98.070.000	8	64.099.500	100	65,36	8	64.099.500	20	13	KECAMATAN PADANG RATU	
			4	11	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	20	223.350.000			4	44.670.000	4	16.250.000	100	36,38	4	16.250.000	20	7	KECAMATAN PADANG RATU	
			4	11	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	25	57.750.000			5	11.550.000	5	6.000.000	100	51,95	5	6.000.000	20	10	KECAMATAN PADANG RATU	
			4	11	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	209.250.000			1	41.850.000	1	41.849.500	100	100,00	1	41.849.500	20	20	KECAMATAN PADANG RATU	
			4	11	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	45	7.194.021.700			5	1.438.804.340	5	1.418.467.785	100	98,59	5	1.418.467.785	11	20	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI	
			4	11	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	824.451.500			10	164.890.300	10	44.558.000	100	27,02	10	44.558.000	17	5	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI	
			4	11	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	313.498.500			12	62.699.700	12	8.780.000	100	14,00	12	8.780.000	20	3	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI	
			4	11	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	8.105.000			12	1.621.000	12	580.000	100	35,78	12	580.000	20	7	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI	
			4	11	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	48	5.303.500			9	1.060.700	9	500.000	100	47,14	9	500.000	19	9	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI	
			4	11	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	50	40.090.000			10	8.018.000	10	1.200.000	100	14,97	10	1.200.000	20	3	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI	
			4	11	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	260.000.000			12	52.000.000	12	6.500.000	100	12,50	12	6.500.000	20	3	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI	
			4	11	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	82.750.000			12	16.550.000	12	1.592.000	100	9,62	12	1.592.000	20	2	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI	
			4	11	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	82.750.000			12	16.550.000	12	1.592.000	100	9,62	12	1.592.000	20	2	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI	
			4	11	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	25	339.650.000			5	67.930.000	5	13.800.000	100	20,32	5	13.800.000	20	4	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI	
			4	11	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	25	203.350.000			5	40.670.000	5	11.900.000	100	29,26	5	11.900.000	20	6	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI	
			4	11	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	20	35.050.000			4	7.010.000	4	1.900.000	100	27,10	4	1.900.000	20	5	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	4	11	9	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	40	101.250.000			0	20.250.000	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-		KECAMATAN TERUSAN NUNYAI
	4	11	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	60	11.965.881.080			12	2.393.176.216	12	2.323.600.088	100	97,09	12	2.323.600.088	20	19		KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
	4	11	2	2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	1.165.264.250			12	233.052.850	12	72.400.000	100	31,07	12	72.400.000	20	6		KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
	4	11	6			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	337.939.800			12	67.587.960	12	17.300.000	100	25,60	12	17.300.000	20	5		KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
	4	11	6	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	8.915.500			12	1.783.100	12	600.000	100	33,65	12	600.000	20	7		KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
	4	11	6	3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20	7.136.800			4	1.427.360	4	400.000	100	28,02	4	400.000	20	6		KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
	4	11	6	5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	50	35.887.500			10	7.177.500	10	1.800.000	100	25,08	10	1.800.000	20	5		KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
	4	11	6	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	286.000.000			10	57.200.000	10	14.500.000	100	25,35	10	14.500.000	17	5		KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
	4	11	8			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	71.225.000			12	14.245.000	12	2.300.000	100	16,15	12	2.300.000	20	3		KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
	4	11	8	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	71.225.000			12	14.245.000	12	2.300.000	100	16,15	12	2.300.000	20	3		KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
	4	11	9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	25	470.492.500			5	94.098.500	5	58.744.000	100	62,43	5	58.744.000	20	12		KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
	4	11	9	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	25	223.685.000			5	44.737.000	5	13.700.000	100	30,62	5	13.700.000	20	6		KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
	4	11	9	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	20	42.620.000			4	8.524.000	4	4.300.000	100	50,45	4	4.300.000	20	10		KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
	4	11	9	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	204.187.500			1	40.837.500	1	40.744.000	100	99,77	1	40.744.000	20	20		KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
	4	11	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	60	9.408.870.395			12	1.881.774.079	12	1.830.472.876	100	97,27	12	1.830.472.876	20	19		KECAMATAN BEKRI
	4	11	2	2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	1.161.439.500			12	232.287.900	12	65.540.000	100	28,21	12	65.540.000	20	6		KECAMATAN BEKRI
	4	11	6			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	193.210.500			12	38.642.100	12	3.355.000	100	8,68	12	3.355.000	20	2		KECAMATAN BEKRI
	4	11	6	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	9.050.000			0	1.810.000	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-		KECAMATAN BEKRI
	4	11	6	3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	48	4.095.500			0	819.100	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-		KECAMATAN BEKRI
	4	11	6	5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	50	22.265.000			10	4.453.000	10	1.855.000	100	41,66	10	1.855.000	20	8		KECAMATAN BEKRI
	4	11	6	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	157.800.000			12	31.560.000	12	1.500.000	100	4,75	12	1.500.000	20	1		KECAMATAN BEKRI

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
		4	11	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	58.750.000			12	11.750.000	12	2.720.000	100	23,15	12	2.720.000	20	5	KECAMATAN BEKRI		
		4	11	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	58.750.000			12	11.750.000	12	2.720.000	100	23,15	12	2.720.000	20	5	KECAMATAN BEKRI	
		4	11	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	20	332.900.000			4	66.580.000	4	26.035.000	100	39,10	4	26.035.000	20	8	KECAMATAN BEKRI		
		4	11	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	20	203.350.000			4	40.670.000	4	16.935.000	100	41,64	4	16.935.000	20	8	KECAMATAN BEKRI	
		4	11	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	20	35.050.000			4	7.010.000	4	3.200.000	100	45,65	4	3.200.000	20	9	KECAMATAN BEKRI	
		4	11	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	94.500.000			1	18.900.000	1	5.900.000	100	31,22	1	5.900.000	20	6	KECAMATAN BEKRI	
		4	11	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	45	11.259.700.900			9	2.251.940.180	9	2.177.730.854	100	96,70	9	2.177.730.854	20	19	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG		
		4	11	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	1.207.377.500			12	241.475.500	12	85.082.000	100	35,23	12	85.082.000	20	7	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG	
		4	11	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	180.750.000			12	36.150.000	12	35.772.000	100	98,95	12	35.772.000	20	20	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG		
		4	11	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60	180.750.000			12	36.150.000	12	35.772.000	100	98,95	12	35.772.000	20	20	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG	
		4	11	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	48	767.392.500			9	153.478.500	9	91.695.000	100	59,74	9	91.695.000	19	12	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG		
		4	11	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50	312.500.000			10	62.500.000	10	62.095.000	100	99,35	10	62.095.000	20	20	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG	
		4	11	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	60	131.892.500			10	26.378.500	10	10.120.000	100	38,36	10	10.120.000	17	8	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG	
		4	11	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	323.000.000			12	64.600.000	12	19.480.000	100	30,15	12	19.480.000	20	6	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG	
		4	11	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	205.200.000			12	41.040.000	12	7.859.265	100	19,15	12	7.859.265	20	4	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG		
		4	11	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	205.200.000			12	41.040.000	12	7.859.265	100	19,15	12	7.859.265	20	4	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG	
		4	11	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	25	650.550.000			5	130.110.000	5	95.200.000	100	73,17	5	95.200.000	20	15	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG		
		4	11	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	50	263.350.000			10	52.670.000	10	25.870.000	100	49,12	10	25.870.000	20	10	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG	
		4	11	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	40	74.700.000			8	14.940.000	8	7.180.000	100	48,06	8	7.180.000	20	10	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG	
		4	11	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	45	312.500.000			9	62.500.000	9	62.150.000	100	99,44	9	62.150.000	20	20	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			4	11	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	60	8.626.709.735			12	1.725.341.947	12	1.692.216.163	100	98,08	12	1.692.216.163	20	20	KECAMATAN WAY PINGGIRAN		
			4	11	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	958.049.500			12	191.609.900	12	50.304.000	100	26,25	12	50.304.000	20	5	KECAMATAN WAY PINGGIRAN	
			4	11	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	167.175.500			12	33.435.100	12	11.062.500	100	33,09	12	11.062.500	20	7	KECAMATAN WAY PINGGIRAN		
			4	11	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	48	9.165.000			9	1.833.000	9	916.500	100	50,00	9	916.500	19	10	KECAMATAN WAY PINGGIRAN	
			4	11	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	50	4.095.500			10	819.100	10	350.000	100	42,73	10	350.000	20	9	KECAMATAN WAY PINGGIRAN	
			4	11	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	60	33.915.000			12	6.783.000	12	2.261.000	100	33,33	12	2.261.000	20	7	KECAMATAN WAY PINGGIRAN	
			4	11	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	120.000.000			12	24.000.000	12	7.535.000	100	31,40	12	7.535.000	20	6	KECAMATAN WAY PINGGIRAN	
			4	11	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	51.875.000			12	10.375.000	12	2.370.000	100	22,84	12	2.370.000	20	5	KECAMATAN WAY PINGGIRAN		
			4	11	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	51.875.000			12	10.375.000	12	2.370.000	100	22,84	12	2.370.000	20	5	KECAMATAN WAY PINGGIRAN	
			4	11	9	Penyelenggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	20	740.100.000			4	148.020.000	4	116.590.550	100	78,77	4	116.590.550	20	16	KECAMATAN WAY PINGGIRAN		
			4	11	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	20	203.350.000			4	40.670.000	4	14.700.000	100	36,14	4	14.700.000	20	7	KECAMATAN WAY PINGGIRAN	
			4	11	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	40	34.250.000			4	6.850.000	4	1.665.000	100	24,31	4	1.665.000	10	5	KECAMATAN WAY PINGGIRAN	
			4	11	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	502.500.000			1	100.500.000	1	100.225.550	100	99,73	1	100.225.550	20	20	KECAMATAN WAY PINGGIRAN	
			4	11	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	60	9.209.048.415			12	1.841.809.683	12	1.769.882.817	100	96,09	12	1.769.882.817	20	19	KECAMATAN BANDAR MATARAM		
			4	11	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	1.062.524.000			12	212.504.800	12	53.150.000	100	25,01	12	53.150.000	20	5	KECAMATAN BANDAR MATARAM	
			4	11	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	325.926.000			12	65.185.200	12	9.400.000	100	14,42	12	9.400.000	20	3	KECAMATAN BANDAR MATARAM		
			4	11	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	48	8.105.000			9	1.621.000	9	1.300.000	100	80,20	9	1.300.000	19	16	KECAMATAN BANDAR MATARAM	
			4	11	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	50	5.556.000			10	1.111.200	10	500.000	100	45,00	10	500.000	20	9	KECAMATAN BANDAR MATARAM	
			4	11	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	60	32.265.000			12	6.453.000	12	1.600.000	100	24,79	12	1.600.000	20	5	KECAMATAN BANDAR MATARAM	
			4	11	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	280.000.000			12	56.000.000	12	6.000.000	100	10,71	12	6.000.000	20	2	KECAMATAN BANDAR MATARAM	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
		4	11	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	64.750.000			12	12.950.000	12	600.000	100	4,63	12	600.000	20	1	KECAMATAN BANDAR MATARAM		
		4	11	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	64.750.000			12	12.950.000	12	600.000	100	4,63	12	600.000	20	1	KECAMATAN BANDAR MATARAM	
		4	11	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	20	447.400.000			4	89.480.000	4	11.850.000	100	13,24	4	11.850.000	20	3	KECAMATAN BANDAR MATARAM		
		4	11	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	20	203.350.000			4	40.670.000	4	9.200.000	100	22,62	4	9.200.000	20	5	KECAMATAN BANDAR MATARAM	
		4	11	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	20	41.550.000			4	8.310.000	4	2.650.000	100	31,89	4	2.650.000	20	6	KECAMATAN BANDAR MATARAM	
		4	11	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	202.500.000			1	40.500.000	1	-	100	-	1	-	20	-	KECAMATAN BANDAR MATARAM	
		4	11	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	60	10.382.047.225			12	2.076.409.445	12	2.032.004.673	100	97,86	12	2.032.004.673	20	20	KECAMATAN PUBIAN		
		4	11	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	2.022.459.000			12	404.491.800	12	138.395.000	100	34,21	12	138.395.000	20	7	KECAMATAN PUBIAN	
		4	11	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	252.041.000			12	50.408.200	12	21.370.500	100	42,39	12	21.370.500	20	8	KECAMATAN PUBIAN		
		4	11	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	48	8.350.000			9	1.670.000	9	825.000	100	49,40	9	825.000	19	10	KECAMATAN PUBIAN	
		4	11	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	50	8.213.500			10	1.642.700	10	800.000	100	48,70	10	800.000	20	10	KECAMATAN PUBIAN	
		4	11	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	60	26.727.500			12	5.345.500	12	2.345.500	100	43,88	12	2.345.500	20	9	KECAMATAN PUBIAN	
		4	11	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	208.750.000			12	41.750.000	12	17.400.000	100	41,68	12	17.400.000	20	8	KECAMATAN PUBIAN	
		4	11	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	130.750.000			12	26.150.000	12	11.138.000	100	42,59	12	11.138.000	20	9	KECAMATAN PUBIAN		
		4	11	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	130.750.000			12	26.150.000	12	11.138.000	100	42,59	12	11.138.000	20	9	KECAMATAN PUBIAN	
		4	11	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	20	406.350.000			4	81.270.000	4	23.021.500	100	28,33	4	23.021.500	20	6	KECAMATAN PUBIAN		
		4	11	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	20	168.750.000			4	33.750.000	4	2.180.500	100	6,46	4	2.180.500	20	1	KECAMATAN PUBIAN	
		4	11	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	40	203.350.000			8	40.670.000	8	17.251.000	100	42,42	8	17.251.000	20	8	KECAMATAN PUBIAN	
		4	11	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	34.250.000			1	6.850.000	1	3.590.000	100	52,41	1	3.590.000	20	10	KECAMATAN PUBIAN	
		4	11	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	60	9.810.180.195			12	1.962.036.039	12	1.893.785.503	100	96,52	12	1.893.785.503	20	19	KECAMATAN SELAGAI LINGGA		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%			
	K	Rp	K	Rp	K			Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12		
	4	11	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	2.134.243.500			12	426.848.700	12	141.660.000	100	33,19	12	141.660.000	20	7	KECAMATAN SELAGAI LINGGA		
	4	11	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	367.041.500			12	73.408.300	12	14.052.000	100	19,14	12	14.052.000	20	4	KECAMATAN SELAGAI LINGGA		
	4	11	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	48	22.125.000			9	4.425.000	9	842.000	100	19,03	9	842.000	19	4	KECAMATAN SELAGAI LINGGA		
	4	11	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	50	14.541.500			10	2.908.300	10	1.177.000	100	40,47	10	1.177.000	20	8	KECAMATAN SELAGAI LINGGA		
	4	11	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	60	62.875.000			12	12.575.000	12	2.133.000	100	16,96	12	2.133.000	20	3	KECAMATAN SELAGAI LINGGA		
	4	11	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	267.500.000			12	53.500.000	12	9.900.000	100	18,50	12	9.900.000	20	4	KECAMATAN SELAGAI LINGGA		
	4	11	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	34.750.000			12	6.950.000	12	2.251.000	100	32,39	12	2.251.000	20	6	KECAMATAN SELAGAI LINGGA		
	4	11	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	34.750.000			12	6.950.000	12	2.251.000	100	32,39	12	2.251.000	20	6	KECAMATAN SELAGAI LINGGA		
	4	11	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	15	485.900.000			3	97.180.000	3	30.037.000	100	30,91	3	30.037.000	20	6	KECAMATAN SELAGAI LINGGA		
	4	11	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	15	218.350.000			3	43.670.000	3	11.900.000	100	27,25	3	11.900.000	20	5	KECAMATAN SELAGAI LINGGA		
	4	11	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	40	65.050.000			8	13.010.000	8	3.137.000	100	24,11	8	3.137.000	20	5	KECAMATAN SELAGAI LINGGA		
	4	11	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	202.500.000			1	40.500.000	1	1.703.897.516	100	4.207,15	1	1.703.897.516	20	841	KECAMATAN SELAGAI LINGGA		
	4	11	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	8.973.183.110			12	1.794.636.622	12	1.710.997.516	100	95,34	12	1.710.997.516	20	19	KECAMATAN ANAK TUHA		
	4	11	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	24.557.500			12	4.911.500	12	1.150.000	100	23,41	12	1.150.000	20	5	KECAMATAN ANAK TUHA		
	4	11	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	164.156.850			12	32.831.370	12	8.000.000	100	24,37	12	8.000.000	20	5	KECAMATAN ANAK TUHA		
	4	11	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	48	40.955.750			9	8.191.150	9	4.000.000	100	48,83	9	4.000.000	19	10	KECAMATAN ANAK TUHA		
	4	11	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		50	30.000.000			10	6.000.000	10	1.500.000	100	25,00	10	1.500.000	20	5	KECAMATAN ANAK TUHA		
	4	11	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	60	156.612.500			12	31.322.500	12	7.050.000	100	22,51	12	7.050.000	20	5	KECAMATAN ANAK TUHA		
	4	11	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60	12.375.000			12	2.475.000	12	400.000	100	16,16	12	400.000	20	3	KECAMATAN ANAK TUHA		
	4	11	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi tamu yang disediakan	60	50.500.000			0	10.100.000	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN ANAK TUHA	
	4	11	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan	18	77.000.000			3	15.400.000	3	11.000.000	100	71,43	3	11.000.000	17	14	KECAMATAN ANAK TUHA		
	4	11	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	25	55.000.000			5	11.000.000	5	11.000.000	100	100,00	5	11.000.000	20	20	KECAMATAN ANAK TUHA		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	4	11	7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	22.000.000			1	4.400.000	1	-	100	-	1	-	20	-	KECAMATAN ANAK TUHA		
	4	11	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	283.800.000			12	56.760.000	12	18.000.000	100	31,71	12	18.000.000	20	6	KECAMATAN ANAK TUHA		
	4	11	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	45	19.800.000			0	3.960.000	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	KECAMATAN ANAK TUHA		
	4	11	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	264.000.000			12	52.800.000	12	18.000.000	100	34,09	12	18.000.000	20	7	KECAMATAN ANAK TUHA		
	4	11	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	60	411.950.000			12	82.390.000	12	37.928.000	100	46,03	12	37.928.000	20	9	KECAMATAN ANAK TUHA		
	4	11	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	60	267.685.000			12	53.537.000	12	19.300.000	100	36,05	12	19.300.000	20	7	KECAMATAN ANAK TUHA		
	4	11	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	48	15.345.000			8	3.069.000	8	1.800.000	100	58,65	8	1.800.000	17	12	KECAMATAN ANAK TUHA		
	4	11	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	74.250.000			1	14.850.000	1	14.828.000	100	99,85	1	14.828.000	20	20	KECAMATAN ANAK TUHA		
	4	11	9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60	54.670.000			12	10.934.000	12	2.000.000	100	18,29	12	2.000.000	20	4	KECAMATAN ANAK TUHA		
	4	11	20		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		0	59.937.600			0	11.987.520	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	KECAMATAN ANAK TUHA		
	4	11	20	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0	59.937.600			0	11.987.520	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	KECAMATAN ANAK TUHA		
	4	11	23		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum		0	1.062.138.200			12	212.427.640	12	84.000.000	100	39,54	12	84.000.000	20	8	KECAMATAN ANAK TUHA		
	4	11	23	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlag Dokumen yang disusun	35	936.751.200			7	187.350.240	7	71.500.000	100	38,16	7	71.500.000	20	8	KECAMATAN ANAK TUHA		
	4	11	23	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		0	125.387.000			7	25.077.400	7	12.500.000	100	49,85	7	12.500.000	20	10	KECAMATAN ANAK TUHA		
	4	11	28		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		0	33.965.850			6	6.793.170	6	1.800.000	100	26,50	6	1.800.000	20	5	KECAMATAN ANAK TUHA		
	4	11	28	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		0	33.965.850			9	6.793.170	9	1.800.000	100	26,50	9	1.800.000	20	5	KECAMATAN ANAK TUHA		
	4	11	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	60	7.342.631.975			12	1.468.526.395	12	1.418.721.408	100	96,61	12	1.418.721.408	20	19	KECAMATAN SENDANG AGUNG		
	4	11	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	887.740.000			12	177.548.000	12	60.250.000	100	33,93	12	60.250.000	20	7	KECAMATAN SENDANG AGUNG		
	4	11	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	314.160.000			12	62.832.000	12	6.118.000	100	9,74	12	6.118.000	20	2	KECAMATAN SENDANG AGUNG		

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
									5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%				
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			4	11	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	48	7.702.500			8	1.540.500	8	450.000	100	29,21	8	450.000	17	6	KECAMATAN SENDANG AGUNG		
			4	11	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	50	9.882.500			10	1.976.500	10	500.000	100	25,30	10	500.000	20	5	KECAMATAN SENDANG AGUNG		
			4	11	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	60	39.075.000			12	7.815.000	12	2.168.000	100	27,74	12	2.168.000	20	6	KECAMATAN SENDANG AGUNG		
			4	11	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	257.500.000			12	51.500.000	12	3.000.000	100	5,83	12	3.000.000	20	1	KECAMATAN SENDANG AGUNG		
			4	11	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	58.750.000			12	11.750.000	12	3.930.537	100	33,45	12	3.930.537	20	7	KECAMATAN SENDANG AGUNG		
			4	11	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	58.750.000			12	11.750.000	12	3.930.537	100	33,45	12	3.930.537	20	7	KECAMATAN SENDANG AGUNG		
			4	11	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	25	443.150.000			5	88.630.000	5	11.700.000	100	13,20	5	11.700.000	20	3	KECAMATAN SENDANG AGUNG		
			4	11	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	25	203.350.000			5	40.670.000	5	10.900.000	100	26,80	5	10.900.000	20	5	KECAMATAN SENDANG AGUNG		
			4	11	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	40	37.300.000			8	7.460.000	8	800.000	100	10,72	8	800.000	20	2	KECAMATAN SENDANG AGUNG		
			4	11	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	45	202.500.000			0	40.500.000	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN SENDANG AGUNG	
			4	11	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	60	14.915.552.695			12	2.983.110.539	12	2.839.193.419	100	95,18	12	2.839.193.419	20	19	KECAMATAN KOTA GAJAH		
			4	11	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	946.540.000			12	189.308.000	12	61.244.000	#VALUE!	32,35	12	61.244.000	#VALUE!	6	KECAMATAN KOTA GAJAH		
			4	11	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	282.310.000			12	56.462.000	12	5.800.000	100	10,27	12	5.800.000	20	2	KECAMATAN KOTA GAJAH		
			4	11	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	48	8.452.500			8	1.690.500	8	300.000	100	17,75	8	300.000	17	4	KECAMATAN KOTA GAJAH		
			4	11	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	50	9.882.500			10	1.976.500	10	1.000.000	100	50,59	10	1.000.000	20	10	KECAMATAN KOTA GAJAH		
			4	11	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	60	28.475.000			12	5.695.000	12	1.000.000	100	17,56	12	1.000.000	20	4	KECAMATAN KOTA GAJAH		
			4	11	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	235.500.000			12	47.100.000	12	3.500.000	100	7,43	12	3.500.000	20	1	KECAMATAN KOTA GAJAH		
			4	11	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	64.750.000			12	12.950.000	12	2.336.000	100	18,04	12	2.336.000	20	4	KECAMATAN KOTA GAJAH		
			4	11	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	64.750.000			12	12.950.000	12	2.336.000	100	18,04	12	2.336.000	20	4	KECAMATAN KOTA GAJAH		
			4	11	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	20	443.150.000			4	88.630.000	4	15.350.000	100	17,32	4	15.350.000	20	3	KECAMATAN KOTA GAJAH		

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			4	11	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	18	203.350.000			3	40.670.000	3	9.900.000	100	24,34	3	9.900.000	17	5	KECAMATAN KOTA GAJAH	
			4	11	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	40	37.300.000			8	7.460.000	8	1.450.000	100	19,44	8	1.450.000	20	4	KECAMATAN KOTA GAJAH	
			4	11	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	202.500.000			1	40.500.000	1	4.000.000	100	9,88	1	4.000.000	20	2	KECAMATAN KOTA GAJAH	
			4	11	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	60	8.741.294.870			12	1.748.258.974	12	1.672.383.490	100	95,66	12	1.672.383.490	20	19	KECAMATAN BUMI NABUNG	
			4	11	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	521.951.500			12	104.390.300	12	38.050.000	100	36,45	12	38.050.000	20	7	KECAMATAN BUMI NABUNG	
			4	11	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	269.198.500			12	53.839.700	12	14.650.000	100	27,21	12	14.650.000	20	5	KECAMATAN BUMI NABUNG	
			4	11	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	48	7.580.000			9	1.516.000	9	1.300.000	100	85,75	9	1.300.000	19	17	KECAMATAN BUMI NABUNG	
			4	11	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	50	5.178.500			10	1.035.700	10	1.000.000	100	96,55	10	1.000.000	20	19	KECAMATAN BUMI NABUNG	
			4	11	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	60	36.440.000			12	7.288.000	12	3.500.000	100	48,02	12	3.500.000	20	10	KECAMATAN BUMI NABUNG	
			4	11	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	220.000.000			12	44.000.000	12	8.850.000	100	20,11	12	8.850.000	20	4	KECAMATAN BUMI NABUNG	
			4	11	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	58.750.000			0	11.750.000	-	4.250.000	#DIV/0!	36,17	-	4.250.000	-	7	KECAMATAN BUMI NABUNG	
			4	11	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	58.750.000			12	11.750.000	12	4.250.000	100	36,17	12	4.250.000	20	7	KECAMATAN BUMI NABUNG	
			4	11	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	25	440.900.000			5	88.180.000	5	43.400.000	100	49,22	5	43.400.000	20	10	KECAMATAN BUMI NABUNG	
			4	11	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	25	203.350.000			5	40.670.000	5	18.250.000	100	44,87	5	18.250.000	20	9	KECAMATAN BUMI NABUNG	
			4	11	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	40	35.050.000			8	7.010.000	8	4.800.000	100	68,47	8	4.800.000	20	14	KECAMATAN BUMI NABUNG	
			4	11	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	202.500.000			1	40.500.000	1	20.350.000	100	50,25	1	20.350.000	20	10	KECAMATAN BUMI NABUNG	
			4	11	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	60	7.201.671.085			12	1.440.334.217	12	1.376.614.239	100	95,58	12	1.376.614.239	20	19	KECAMATAN WAY SEPUTIH	
			4	11	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	647.740.000			12	129.548.000	12	41.620.000	100	32,13	12	41.620.000	20	6	KECAMATAN WAY SEPUTIH	
			4	11	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	301.510.000			12	60.302.000	12	9.536.000	100	15,81	12	9.536.000	20	3	KECAMATAN WAY SEPUTIH	

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			4	11	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	48	7.702.500			8	1.540.500	8	910.000	100	59,07	8	910.000	17	12	KECAMATAN WAY SEPUTIH	
			4	11	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	50	9.882.500			10	1.976.500	10	750.000	100	37,95	10	750.000	20	8	KECAMATAN WAY SEPUTIH	
			4	11	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	60	48.925.000			12	9.785.000	12	1.876.000	100	19,17	12	1.876.000	20	4	KECAMATAN WAY SEPUTIH	
			4	11	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	235.000.000			12	47.000.000	12	6.000.000	100	12,77	12	6.000.000	20	3	KECAMATAN WAY SEPUTIH	
			4	11	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	58.750.000			12	11.750.000	12	2.294.000	100	19,52	12	2.294.000	20	4	KECAMATAN WAY SEPUTIH	
			4	11	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	58.750.000			12	11.750.000	12	2.294.000	100	19,52	12	2.294.000	20	4	KECAMATAN WAY SEPUTIH	
			4	11	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	20	440.100.000			4	88.020.000	4	55.024.500	100	62,51	4	55.024.500	20	13	KECAMATAN WAY SEPUTIH	
			4	11	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	18	202.500.000			3	40.500.000	3	40.474.500	100	99,94	3	40.474.500	17	20	KECAMATAN WAY SEPUTIH	
			4	11	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	40	203.350.000			8	40.670.000	8	11.200.000	100	27,54	8	11.200.000	20	6	KECAMATAN WAY SEPUTIH	
			4	11	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	45	34.250.000			9	6.850.000	9	3.350.000	100	48,91	9	3.350.000	20	10	KECAMATAN WAY SEPUTIH	
			4	11	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	60	10.260.218.350			12	2.052.043.670	12	1.984.406.062	100	96,70	12	1.984.406.062	20	19	KECAMATAN BANDAR SURABAYA	
			4	11	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	760.644.500			12	152.128.900	12	52.000.000	100	34,18	12	52.000.000	20	7	KECAMATAN BANDAR SURABAYA	
			4	11	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	340.180.500			12	68.036.100	12	18.450.000	100	27,12	12	18.450.000	20	5	KECAMATAN BANDAR SURABAYA	
			4	11	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	48	6.850.000			9	1.370.000	9	1.300.000	100	94,89	9	1.300.000	19	19	KECAMATAN BANDAR SURABAYA	
			4	11	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	50	8.255.500			10	1.651.100	10	1.650.000	100	99,93	10	1.650.000	20	20	KECAMATAN BANDAR SURABAYA	
			4	11	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	60	47.575.000			12	9.515.000	12	4.500.000	100	47,29	12	4.500.000	20	9	KECAMATAN BANDAR SURABAYA	
			4	11	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	277.500.000			12	55.500.000	12	11.000.000	100	19,82	12	11.000.000	20	4	KECAMATAN BANDAR SURABAYA	
			4	11	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	69.875.000			12	13.975.000	12	1.650.000	100	11,81	12	1.650.000	20	2	KECAMATAN BANDAR SURABAYA	
			4	11	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	69.875.000			12	13.975.000	12	1.650.000	100	11,81	12	1.650.000	20	2	KECAMATAN BANDAR SURABAYA	
			4	11	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	20	447.400.000			4	89.480.000	4	45.205.000	100	50,52	4	45.205.000	20	10	KECAMATAN BANDAR SURABAYA	

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			4	11	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	20	203.350.000			4	40.670.000	4	12.400.000	100	30,49	4	12.400.000	20	6	KECAMATAN BANDAR SURABAYA	
			4	11	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	40	41.550.000			8	8.310.000	8	2.500.000	100	30,08	8	2.500.000	20	6	KECAMATAN BANDAR SURABAYA	
			4	11	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	45	202.500.000			9	40.500.000	9	30.305.000	100	74,83	9	30.305.000	20	15	KECAMATAN BANDAR SURABAYA	
			4	11	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	60	8.148.389.635			12	1.629.677.927	12	1.579.923.886	100	96,95	12	1.579.923.886	20	19	KECAMATAN ANAK RATU AJI	
			4	11	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	880.644.500			12	176.128.900	12	44.920.000	100	25,50	12	44.920.000	20	5	KECAMATAN ANAK RATU AJI	
			4	11	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	273.380.500			12	54.676.100	12	16.188.000	100	29,61	12	16.188.000	20	6	KECAMATAN ANAK RATU AJI	
			4	11	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	48	6.850.000			9	1.370.000	9	866.000	100	63,21	9	866.000	19	13	KECAMATAN ANAK RATU AJI	
			4	11	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	50	8.255.500			10	1.651.100	10	822.000	100	49,78	10	822.000	20	10	KECAMATAN ANAK RATU AJI	
			4	11	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	60	48.275.000			12	9.655.000	12	4.000.000	100	41,43	12	4.000.000	20	8	KECAMATAN ANAK RATU AJI	
			4	11	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	210.000.000			12	42.000.000	12	10.500.000	100	25,00	12	10.500.000	20	5	KECAMATAN ANAK RATU AJI	
			4	11	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	69.875.000			12	13.975.000	12	4.700.000	100	33,63	12	4.700.000	20	7	KECAMATAN ANAK RATU AJI	
			4	11	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	69.875.000			12	13.975.000	12	4.700.000	100	33,63	12	4.700.000	20	7	KECAMATAN ANAK RATU AJI	
			4	11	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	18	447.400.000			3	89.480.000	3	56.195.000	100	62,80	3	56.195.000	17	13	KECAMATAN ANAK RATU AJI	
			4	11	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang mendapat pemeliharaan	18	203.350.000			3	40.670.000	3	16.850.000	100	41,43	3	16.850.000	17	8	KECAMATAN ANAK RATU AJI	
			4	11	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	40	41.550.000			8	8.310.000	8	3.342.000	100	40,22	8	3.342.000	20	8	KECAMATAN ANAK RATU AJI	
			4	11	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	45	202.500.000			9	40.500.000	9	36.003.000	100	88,90	9	36.003.000	20	18	KECAMATAN ANAK RATU AJI	
			4	11	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	60	6.842.619.425			12	1.368.523.885	12	1.362.102.225	100	99,53	12	1.362.102.225	20	20	KECAMATAN PUTRA RUMBIA	
			4	11	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	765.144.500			12	153.028.900	12	54.168.000	100	35,40	12	54.168.000	20	7	KECAMATAN PUTRA RUMBIA	
			4	11	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	48	341.680.500			8	68.336.100	8	24.224.000	100	35,45	8	24.224.000	17	7	KECAMATAN PUTRA RUMBIA	

No	Kode						Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
									5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%				
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			4	11	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	50	6.850.000			10	1.370.000	10	783.000	100	57,15	10	783.000	20	11	KECAMATAN PUTRA RUMBIA		
			4	11	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	60	8.255.500			12	1.651.100	12	276.000	100	16,72	12	276.000	20	3	KECAMATAN PUTRA RUMBIA		
			4	11	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	60	49.075.000			12	9.815.000	12	3.867.000	100	39,40	12	3.867.000	20	8	KECAMATAN PUTRA RUMBIA		
			4	11	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	277.500.000			12	55.500.000	12	19.298.000	100	34,77	12	19.298.000	20	7	KECAMATAN PUTRA RUMBIA		
			4	11	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	60	63.875.000			12	12.775.000	12	3.950.000	100	30,92	12	3.950.000	20	6	KECAMATAN PUTRA RUMBIA		
			4	11	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	63.875.000			12	12.775.000	12	3.950.000	100	30,92	12	3.950.000	20	6	KECAMATAN PUTRA RUMBIA		
			4	11	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	25	447.400.000			5	89.480.000	5	17.658.000	100	19,73	5	17.658.000	20	4	KECAMATAN PUTRA RUMBIA		
			4	11	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang mendapat pemeliharaan	25	203.350.000			5	40.670.000	5	15.428.000	100	37,93	5	15.428.000	20	8	KECAMATAN PUTRA RUMBIA		
			4	11	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	24	41.550.000			4	8.310.000	4	2.230.000	100	26,84	4	2.230.000	17	5	KECAMATAN PUTRA RUMBIA		
			4	11	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	202.500.000			1	40.500.000	1	38.535.000	100	95,15	1	38.535.000	20	19	KECAMATAN PUTRA RUMBIA		
			4	12			Kesatuan Bangsa dan Politik	0	-	63.333.902.030			0	13.879.858.915	99,47	13.682.555.709	99,47	98,58	99,47	13.682.555.709	99,47	22	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
			4	3			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	21.472.350.641			100	3.770.638.817	100	3.560.708.857	100	94,43	100	3.560.708.857	100	17	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	100				100		100				100		100		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100				100		100	-			100		-	100		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85				85		85	-			85		-	85		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			4	12	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	-	262.000.000			0	80.000.000	0	79.836.700	0	99,80	0	79.836.700	0	30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
			4	12	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	15	106.000.000			3	30.000.000	3	29.899.000	100	99,66	3	29.899.000	20	28	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
		4	12	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	10	78.000.000			5	25.000.000	5	24.993.000	100	99,97	5	24.993.000	50	32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		4	12	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	30	78.000.000			3	25.000.000	3	24.944.700	100	99,78	3	24.944.700	10	32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		4	12	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	15	17.760.222.349			3	3.055.151.517	3	2.195.970.637	100	71,88	3	2.195.970.637	20	12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		4	12	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi Tunjangan dan Gaji	215	16.476.383.078			12	2.780.963.517	12	2.780.963.516	100	100,00	12	2.780.963.516	6	17	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		4	12	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	1.283.839.271			12	274.188.000	12	110.248.000	100	40,21	12	110.248.000	20	9	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		4	12	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya	100	73.748.343			50	6.500.000	50	6.500.000	100	100,00	50	6.500.000	50	9	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		4	12	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	70	32.750.000			50	6.500.000	50	6.500.000	100	100,00	50	6.500.000	71	20	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		4	12	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	22	40.998.343			3	-		-		-		-		-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		4	12	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	60	1.678.568.654			12	266.043.300	12	244.344.650	100	91,84	12	244.344.650	20	15	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		4	12	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51	17.820.405			5	8.677.000	5	8.677.000	100	100,00	5	8.677.000	10	49	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		4	12	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Ketersediaan kebutuhan Alat kebersihan rumah tangga	130	42.255.955			23	10.837.900	23	10.837.900	100	100,00	23	10.837.900	18	26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		4	12	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ketersediaan kebutuhan alat tulis kantor	275	1.046.447.181			50	91.986.900	50	91.000.000	100	98,93	50	91.000.000	18	9	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		4	12	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan Kebutuhan Cetak dan Penggandaan	59	334.530.150			7	111.119.500	7	109.214.750	100	98,29	7	109.214.750	12	33	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		4	12	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan dan minum harian yang tersedia	60	97.665.639			12	19.500.000	12	19.265.000	100	98,79	12	19.265.000	20	20	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		4	12	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	139.849.324			12	23.922.000	12	5.350.000	100	22,36	12	5.350.000	20	4	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		4	12	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan	100	412.275.785			100	139.256.000	99	138.480.000	99	99,44	99	138.480.000	99	34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
		4	12	7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ketersediaan kebutuhan peralatan kantor	65	412.275.785			11	139.256.000	11	138.480.000	100	99,44	11	138.480.000	17	34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
							Jumlah Ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor															BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		4	12	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	100	382.802.276			100	61.268.000	85	44.651.491	85	72,88	85	44.651.491	85	12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		4	12	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	35	382.802.276			7	61.268.000	7	44.651.491	100	72,88	7	44.651.491	20	12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		4	12	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	24.587	902.733.234			15	162.420.000	15	155.684.500	100	95,85	0	155.684.500	-	17	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		4	12	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang perlu pemeliharaan	40	483.930.425			6	90.040.000	6	83.992.000	100	93,28	6	83.992.000	15	17	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		4	12	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/Kantor yang dipelihara	8	284.038.924			1	55.000.000	1	54.972.500	100	99,95	1	54.972.500	13	19	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		4	12	9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang perlu di Pelihara	52	134.763.885			8	17.380.000	8	16.720.000	100	96,20	8	16.720.000	15	12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
							Jumlah Peralatan Kerja yang dilakukan perbaikan															BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
						PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Masyarakat, Pemuda dan Pelajar Yang mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	100	3.580.603.281			100	173.846.000	100	168.416.690	98	96,88	98	168.416.690	98	5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		4	12	15		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		0	3.580.603.281			100	173.846.000	100	168.416.690	98	96,88	98	168.416.690	98	5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		4	12	15	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Tokoh Masyarakat dan Pemuda dan Pelajar yang mendapatkan Pembinaan	2.880	2.664.395.675			480	88.846.000	480	83.851.190	100	94,38	480	83.851.190	17	3	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		4	12	15	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Tim FPK Kabupaten Lampung Tengah yang di fasilitasi	6.240	916.207.606			1600	85.000.000	1600	84.565.500	100	99,49	1600	84.565.500	26	9	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1						PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan Politik	78	6.766.275.610			100	1.439.816.398	98	1.400.562.450	98	97,27	98	1.400.562.450	98	21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
							Persentase parpol yang menyerahkan laporan keuangan sesuai PerUU	100						-								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	4	12	16			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	0	100	6.766.275.610			100	1.439.816.398	100	1.400.562.450	98	97,27	98	1.400.562.450	98	21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	4	12	16	1		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi	2.380	315.409.336			476	59.000.000	476	59.000.000	100	100,00	476	59.000.000	20	19	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	4	12	16	2		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Jumlah masyarakat yang mengikuti Pembinaan Politik Masyarakat	1.100	336.522.573			280	103.000.000	280	90.437.800	100	87,80	280	90.437.800	25	27	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
						Pelaksanaan Kebijakan DiBidang PendidikanPolitik, Etika BudayaPolitik, PeningkatanDemokrasi, FasilitasiKelembagaanPemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan UmumKepala Daerah, sertaPemantauan SituasiPolitik Di Daerah	Jumlah masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pemilihan Serentak	1.560	628.416.225							#DIV/0!					-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			4	12	16	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Sit	Jumlah Pengurus Parpol yang mengikuti verifikasi berkas	270	5.485.927.476			50	1.277.816.398	50	1.251.124.650	100	97,91	50	1.251.124.650	19	23	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang mendapat pembinaan dan telah terdaftar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100	29.923.322.887			8.202.500.000		7.233.352.900	#DIV/0!	88,18		7.233.352.900	-	24	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
			4	12	17		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	0	100	29.923.322.887			0	8.202.500.000	0	7.233.352.900	#DIV/0!	88,18	0	7.233.352.900	-	24	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			4	12	17	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas dan Golongan Masyarakat tertentu yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan	1.450	29.923.322.887			300	8.202.500.000	300	7.233.352.900	100	88,18	300	7.233.352.900	21	24	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemuda dan Pelajar yang mendapatkan Pembinaan terhadap bahaya Narkoba	100	-			100	38.500.000	100	38.500.000	99	100,00	99	38.500.000	99	19	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			4	12	18		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya																BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			4	12	18	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Sosialisasi terhadap bahaya Narkoba	2.100	203.722.177			300	38.500.000	300	38.500.000	100	100,00	300	38.500.000	14	19	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
							PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik yang dibahas dalam rakor	100	1.591.349.611			100	254.557.700	96	242.440.950	96	95,24	100	242.440.950	96	15	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
								Persentase cakupan pencegahan/tangkal dini konflik															BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			4	12	19		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	0															BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
			4	12	19	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	Jumlah Laporan pendataan dan pemetaan daerah rawan konflik	14	103.489.787			2	20.144.900	2	20.144.900	100	100,00	2	20.144.900	14	19	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			4	12	19	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang Asing dan Organisasi Asing	240	119.331.333			45	18.024.000	45	18.024.000	100	100,00	45	18.024.000	19	15	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			4	12	19	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Tim/Anggota FPK dalam penanganan konflik	2.205	1.368.528.491			45	101.675.000	45	98.558.250	97	96,93	45	98.558.250	2	7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			4	12	19	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	jumlah anggota Forjasi	3.110	350.648.642			0	48.858.000	0	48.858.000	100	100,00	100	48.858.000	3	14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			4	12	19	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan FORKOPIMDA Kabupaten yang dilaksanakan	60	354.892.785			12	65.855.800	12	56.855.800	100	86,33	12	56.855.800	20	16	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didaya gunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Adapun permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain sebagai berikut :

1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.

- Masih banyak ruang kelas dan perabotan yang rusak.
- Kurangnya jumlah ruang kelas untuk tingkat SMP.
- Kurang meratanya tenaga pendidik.
- Masih tingginya angka stunting (20,28%)
- Sarana dan prasarana kesehatan yang masih kurang.
- Distribusi tenaga kesehatan yang kurang merata.

2. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup.

- Belum optimalnya infrastruktur jalan, dengan kondisi jalan kabupaten kondisi rusak (38,50%).
- Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigrasi dan drainase serta masih adanya wilayah yang beresiko terkena bencana banjir.
- Kurangnya perlengkapan jalan berupa APILL, rambu, marka dan LPJU.
- Rumah Tangga belum dapat akses air bersih (10,12%).
- Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup;

3. Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

- Masih tingginya angka kemiskinan (11,82%)
- Tingginya jumlah koperasi yang belum aktif.
- Kurangnya kunjungan wisatawan, dikarenakan pandemi Covid-19.
- Rendahnya nilai Produksi industri kecil.
- Rendahnya kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap PDRB.
- Belum tercapainya Rasio ketersediaan pangan (315,67 Kg/perkapita).

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel).

- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
- Belum optimalnya pelayanan publik berbasis Online.
- Belum Optimal Penegakan Perda terutama berkenaan dengan pelayanan publik.
- Belum optimalnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat.

- Masih tingginya rasio angka criminal (3,53).

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Dengan mempertimbangkan sumber daya, kondisi aktual, dan kemampuan keuangan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, maka arah pembangunan selama satu tahun diupayakan untuk dapat memecahkan isu dan masalah mendesak sesuai kewenangan urusan pemerintah daerah yang diperkirakan akan dihadapi pada tahun 2023.

1. Pendidikan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah adalah :

- a. Banyaknya gedung sekolah dan meubelair yang rusak khususnya pada sekolah dasar, sehingga diperlukan rehabilitasi/perbaikan

secara bertahap, serta penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sekolah guna mendorong minat baca siswa.

- b. Belum meratanya jumlah guru untuk masing-masing sekolah, sehingga perlu diupayakan penataan penempatan guru secara proporsional sesuai dengan kebutuhan sekolah.
- c. Pendidikan anak usia dini (PAUD) belum mendapatkan perhatian dan pendanaan yang layak, untuk itu perlu diupayakan peningkatan dan pengembangan pembelajaran terhadap anak-anak usia pra sekolah.
- d. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan sebagai akibat masih lemahnya kemampuan tenaga pendidik dalam bidang teknologi informasi, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana teknologi informasi di sekolah-sekolah, sehingga perlu diupayakan peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi di sekolah-sekolah untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan yang juga dibarengi dengan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaannya.
- e. Belum optimalnya metode pembelajaran, sebagai cara meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu tenaga pendidik dan siswa.

2. Kesehatan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang Kesehatan sebagai berikut :

- a. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi sebagai akibat dari kesehatan ibu yang terganggu disamping kendala akses terhadap pelayanan kesehatan yang kurang memadai.
- b. Kompetensi dan kualifikasi akademik tenaga kesehatan belum dilaksanakan sesuai dengan bidang tugas;
- c. Kondisi lingkungan yang tidak sehat juga menjadi sumber utama penyakit menular di Kabupaten Lampung Tengah saat ini, seperti demam berdarah dengue, diare, malaria, TB Paru dan penyakit menular lainnya.

- d. Transisi epidemiologi ditandai dengan semakin meningkatnya kasus-kasus penyakit tidak menular yang berpengaruh pada sisi sosial, ekonomi, dan kesehatan. Perubahan pola hidup manusia seperti gaya hidup, tingkat sosial ekonomi, urbanisasi dan industrialisasi akan meningkatkan prevalensi penyakit tidak menular (PTM). Penyakit tidak menular utama (kardiovaskuler, stroke, kanker, diabetes melitus, penyakit paru kronik obstruktif) di negara berkembang telah mengalami peningkatan yang berdampak pada peningkatan angka kematian dan kecacatan.
- e. Potensi bencana alam di Kabupaten Lampung Tengah adalah banjir. Ancaman bencana alam ini harus diantisipasi dengan berbagai upaya pelayanan kesehatan baik yang bersifat preventif dan upaya kuratif dalam penanggulangan bencana.
- f. Distribusi atau penyebaran tenaga medis dan paramedis tidak merata, menumpuk pada Puskesmas yang berada dekat dengan pusat kota, sehingga puskesmas yang jauh banyak yang kekurangan tenaga kesehatan, dampaknya masyarakat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang pekerjaan umum adalah :

- a. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan, hal ini disebabkan panjangnya ruas jalan yang harus dikelola serta jumlah jembatan yang cukup banyak, kurang sebanding dengan alokasi anggaran yang dipergunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, serta jembatan. Selain itu juga ditunjang kurang tertibnya pengguna jalan untuk mematuhi tonase yang telah ditentukan, sehingga perlu penertiban bagi pengguna jalan yang melanggar tonase (kelebihan muatan) agar kondisi jalan tetap terjaga.
- b. Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan drainase.
- c. Masih rendahnya rumah tangga yang akses air bersih.
- d. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peraturan RTRW Kabupaten Lampung Tengah.

- e. Banyaknya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan arah pemanfaatan/perumusan ruang (pelanggaran pemanfaatan ruang).

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman diantaranya adalah :

- a. Banyaknya rumah tidak layak huni yang harus ditangani.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait menjaga bangunan dan lingkungannya.
- c. Keberadaan kawasan permukiman kumuh yang belum tertangani secara optimal.

5. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat adalah :

- a. Dalam melaksanakan penegakan Perda masih sering terjadi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Perda.
- b. Makin tingginya kuantitas maupun kualitas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perkada dengan variasi pelanggaran yang makin beragam.
- c. Belum optimalnya kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan.

6. Sosial

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang Sosial adalah masih tingginya angka kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah. Angka Kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,17 menjadi 11,99 % dari 11,82%, dan lebih rendah dari angka kemiskinan propinsi sebesar 12,62%.

7. Tenaga Kerja

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam adalah :

- a. Dampak dari pandemic covid 19 mengakibatkan meningkatnya tingkat angka pengangguran terbuka Kabupaten Lampung Tengah sebesar 4,31.

- b. Masih kurangnya kesesuaian antara ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan (kesempatan kerja) dengan rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun kerja ke atas sebesar 69,14.

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

- a. Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah.
- b. Belum optimalnya partisipasi dan dukungan dari masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
- c. Masih rentannya kekerasan anak dalam rumah tangga.

9. Pangan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang pangan adalah :

- a. Masih tingginya daerah rentan rawan pangan di Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Tingginya angka kelahiran dengan ukuran panjang dibawah standar (stunting) di Kabupaten Lampung Tengah.
- c. Kurang beragamnya konsumsi pangan masyarakat bergizi, berimbang dan aman.
- d. Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap keamanan pangan. Pada tahun 2021 pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dengan indikator pencapaian skor 85%.

10. Pertanian

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang Pertanian adalah :

- a. Semakin meningkatnya permasalahan konflik dan sengkata pertanian antar perusahaan dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat.

- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuat sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah.

11. Lingkungan Hidup

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang Lingkungan Hidup adalah :

- a. Menurunnya indeks kualitas air (56,67) dan udara (83,46) serta indeks kualitas tutupan lahan (24,28).
- b. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup
- c. Kurangnya sarana dan prasarana dalam penanganan persampahan.
- d. Pelayanan Pengelolaan Persampahan DLH Lampung Tengah masih melayani 2 kecamatan dari 28 kecamatan yang ada di Lampung Tengah, dan Belum ada pengolahan sampah untuk didaur ulang atau mengurangi volume timbunan sampah.

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil adalah :

- a. Peralatan perlengkapan SIAK dan EKTP banyak yang sudah rusak.
- b. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran sebagian warga masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa adalah :

- a. Rendahnya swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan BBGRM sehingga gotong royong yang ada dalam masyarakat agak berkurang masih kurangnya SDM aparatur pemerintah kampung sehingga belum maksimalnya pelayanan terhadap masyarakat.
- b. Rendahnya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam mendukung dan mensukseskan program – program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kampung khususnya pada swadaya program pembangunan fisik.

- c. Belum optimalnya pengelolaan APB Kampung. Kurangnya pemahaman Aparatur Kecamatan dan Aparatur Kampung tentang mengimplementasikan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sampai pada dengan Peraturan Daerah khususnya yang menyangkut masalah Undang-Undang Desa sehingga pelaksanaan Program yang ada di Desa tidak sesuai dengan target yang ingin dicapai.

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

- a. Kurangnya tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dibandingkan dengan luas wilayah di Kabupaten Lampung Tengah, hal ini terbukti sampai saat ini tinggal 60 tenaga penyuluh (38,96%).
- b. Terbatasnya kemampuan PPKBD/Sub PPKBD dalam menggerakkan masyarakat untuk supartisipasi dalam ber-KB.

15. Perhubungan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang Perhubungan adalah :

- a. Masih rendahnya *responsibility* dan *rediability* masyarakat pada umumnya, hal ini terlihat dari seringkalinya terjadi pengerusakan dan pencurian terhadap fasilitas lalu lintas yang telah dipasang, sehingga pencapaian sasaran peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas menjadi kurang optimal, sehingga diperlukan edukasi kepada masyarakat tentang fasilitas lalu lintas.
- b. Rendahnya disiplin berlalu lintas para pemakai jalan baik pengemudi maupun pejalan kaki dan masih kurangnya kegiatan penyuluhan tertib berlalu lintas, mengakibatkan pencapaian sasaran penanaman disiplin berlalu lintas sejak usia dini kurang optimal, sehingga diperlukan upaya penertiban bagi pengguna jalan.

- c. Jumlah SDM yang memiliki kualifikasi di bidang Perhubungan masih kurang, sehingga pelaksanaan tupoksi organisasi belum sepenuhnya sesuai dengan struktur organisasi yang ada, sehingga diperlukan diklat teknis bagi aparatur perhubungan.
- d. Semakin menurunnya pelayanan angkutan umum bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah, sehingga diperlukan peningkatan pelayanan angkutan umum bagi masyarakat terutama bagi angkutan pelajar.

16. Komunikasi dan Informatika

Beberapa permasalahan/ kendala yang perlu ditindaklanjuti dalam pembangunan bidang komunikasi dan informatika, diantaranya:

- a. Bentang geografis Kabupaten Lampung Tengah yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakatnya menghambat pemerataan penyebaran informasi.
- b. Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang belum maksimal pemanfaatannya.
- c. Terdapat kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, khususnya wilayah blank spot Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).
- d. Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK/ gagap teknologi (gaptek),
- e. Belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti penting komunikasi dan informatika.

17. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang Koperasi dan UKM adalah :

- a. Rendahnya kualitas kelembagaan dan lemahnya pengawasan Koperasi dan UKM.
- b. Masih kurangnya SDM Aparatur yang memiliki kemampuan teknis di bidang perkoperasian.

18. Penanaman Modal

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang Penanaman Modal adalah :

- a. Masih minimnya Sumber Daya Aparatur yang memahami tentang penanaman modal, sehingga perlu diupayakan peningkatan kapasitas, kualitas, dan kuantitas Sumberdaya Aparatur untuk memahami standar dan prosedur penanaman modal di daerah.
- b. Pemanfaatan teknologi informasi masih belum optimal dalam penyelenggaraan pelayanan public, sehingga perlu dilakukan sebuah kajian dan penyusunan system informasi yang mendukung optimalisasi pelayanan publik yang prima.

19. Kepemudaan dan Olahraga

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemuda dan olah raga adalah :

- a. Belum optimalnya pembinaan cabang olahraga prestasi, cabang olahraga unggulan, dan kegiatan kepemudaan.
- b. Fasilitas/ lapangan di daerah kampung dan kecamatan perlu ditingkatkan karena belum memenuhi standar sebagai sarana dan prasarana penunjang pengembangan olah raga dan kepemudaan.

20. Kebudayaan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang Kebudayaan adalah :

- a. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana alat kesenian untuk sanggar yang ada di Lampung Tengah.
- b. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang BCB (Benda Cagar Budaya daerah Lampung Tengah).
- c. Perlu peningkatan kualitas pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra.
- d. Belum tergalinya sejarah budaya lokal daerah Lampung Tengah.

21. Perpustakaan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang Perpustakaan adalah:

- a. Belum adanya tenaga pustakawan kompeten dibidangnya.
- b. Minimnya sarana dan prasaran penunjang di bidang perpustakaan.
- c. Belum optimalnya pembinaan pengelolaan perpustakaan.

22. Kearsipan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang Kearsipan adalah :

- a. Belum semua perangkat daerah maupun pemerintah desa yang memahami arti pentingnya arsip, sehingga pengelolaan arsip tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- b. Masih kurangnya tenaga arsiparis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- c. Sarana dan Prasarana yang belum memadai.

23. Kelautan dan Perikanan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang Kelautan dan Perikanan adalah :

- a. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi nelayan pembudidaya, tangkap dan pengolah serta pemasaran.
- b. Produksi menurun disebabkan adanya kesulitan dalam pemasaran akibat pandemi COVID-19.
- c. Masih kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan dan informasi teknis pembudidayaan.
- d. Masih tingginya harga pakan ikan sehingga biaya operasional kegiatan budidaya masih sangat tinggi yang pada akhirnya mempengaruhi harga jual ikan konsumsi.
- e. Kendala yang dihadapi oleh masyarakat nelayan kampung cabang yaitu kebutuhan nelayan akan es relatif tinggi.
- f. Masih sulitnya proses untuk mendapatkan surat kapal.

24. Pariwisata

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang pariwisata diantaranya :

- a. Keterbatasan akses menuju objek wisata dan sarana prasarana yang masih kurang memadai dan Masih kurangnya peran serta pelaku wisata dan masyarakat.
- b. Kurang prioritasnya pembangunan pariwisata di Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Upaya yang perlu ditindaklanjuti yaitu dengan menjadikan pembangunan pariwisata menjadi skala prioritas dengan melakukan kerjasama dengan para stake holder terkait.
- c. Pemahaman masyarakat tentang pariwisata masih kurang. Upaya yang perlu ditindaklanjuti yaitu membentuk kelompok sadar wisata di Kabupaten Lampung Tengah.

25. Pertanian

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang Pertanian adalah :

- a. Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pertanian TPH dan langkah antisipatif yang perlu dilakukan yaitu adanya keterlambatan pemberitahuan perbaikan jaringan irigasi yang dilaksanakan oleh institusi lain seperti Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah dan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyaluran bantuan benih, hal yang dilakukan oleh Dinas Pertanian TPH adalah terus melakukan koordinasi sehingga dapat dilakukan realokasi kegiatan.
- b. Sarana dan prasarana produksi, pasca panen dan pemasaran pertanian belum memadai.
- c. Minimnya partisipasi dan lemahnya kelembagaan kelompok peternak dan pekebun
- d. Belum adanya standar harga komoditas perkebunan sehingga harga komoditas sulit diprediksi sehingga petani sering mengalami kerugian.

- e. Masih lemahnya kelembagaan kelompok peternakan dan perkebunan.

26. Perdagangan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang adalah :

- a. Belum semua pelaku usaha dalam aktivitasnya berorientasi pada kepuasan pelanggan/konsumen.
- b. Kurangnya kemampuan pedagang kecil, menengah untuk mengakses guna menunjang peningkatan usaha.
- c. Kurangnya dukungan sarana promosi, pemasaran, dan pembinaan serta penyebaran informasi pasar.
- d. Masih lemahnya produk dalam menembus (penetrasi) pasar yang disebabkan lemahnya strategi pemasaran dan kurang efektifnyanya promosi.
- e. Belum dikembangkannya produk unggulan daerah yang memiliki potensi dan peluang pasar secara optimal.

27. Perindustrian

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang Perindustrian adalah:

- a. Mindset wirausaha belum dimiliki oleh sebagian besar pelaku usaha industri.
- b. Belum terwujudnya kawasan industri.
- c. Industri didominasi oleh industri pengolahan pangan dan kerajinan umum yang sangat tergantung ketersediaan hasil pertanian.
- d. Pemanfaatan teknologi dalam proses produksi relatif rendah.
- e. Lemahnya jejaringan usaha.

28. Transmigrasi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang transmigrasi adalah:

- a. Masalah lahan eks transmigrasi yang berada di bandar mataram dan anak ratu aji
- b. Jumlah alokasi yang diberikan pusat ke daerah masih sedikit.
- c. Informasi yang didapat masyarakat masih kurang tentang pengiriman transmigrasi.

29. Administrasi Pemerintahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang Administrasi Pemerintahan serta langkah antisipatif yang perlu dilakukan adalah :

- a. Rendahnya tingkat disiplin pegawai sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai aparatur pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga perlu diupayakan peningkatan disiplin pegawai dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Perkembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang sangat dinamis ditingkat pusat, sehingga perlu diupayakan peningkatan kemampuan dan pemahaman peraturan perundang-undangan melalui bintek, workshop maupun diklat perundang-undangan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.
- c. Pelayanan publik yang belum optimal, sehingga perlu dioptimalkan dengan meningkatkan sarana dan prasarana, serta kapasitas SDM.
- d. Masih belum optimalnya koordinasi antar PD, sehingga perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dalam mengelola permasalahan dan tugas masing-masing PD.

30. Pengawasan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang Pemerintahan Umum serta langkah antisipatif yang perlu dilakukan adalah :

- a. Masih kurangnya pejabat fungsional auditor khususnya auditor pertama.
- b. Pelaksanaan audit, monitoring, evaluasi belum maksimal.
- c. Kurangnya sumberdaya Aparatur Pengawas Intern Pemerintah yang kompeten dibidangnya hal ini disebabkan oleh kurangnya pengikutsertaan pendidikan dan pelatihan secara merata kepada seluruh pegawai dilingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah.
- d. Kurangnya sumberdaya Aparatur Pengawas Intern Pemerintah itu sendiri yaitu menyangkut individu masing-masing sehingga perlunya penataan penempatan pegawai yang lebih berkompeten.

31. Perencanaan

- a. Rendahnya kesadaran Perangkat Daerah dalam menyampaikan informasi dan data yang akurat serta tepat waktu mengakibatkan perencanaan yang disusun kurang optimal. Peningkatan kesadaran kepada satuan kerja perangkat daerah untuk mengirimkan informasi dan data yang akurat dan tepat waktu terus dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi.
- b. Masih timpangnya kualitas sumberdaya aparatur yang menangani bidang perencanaan pada satuan kerja perangkat daerah, perlu peningkatan kualitas sumberdaya aparatur perencana di lingkungan pemerintah daerah melalui deseminasi, bintek, diklat dibidang perencanaan.
- c. Dokumen perencanaan yang telah disusun belum digunakan sebagai acuan secara optimal, sehingga perlu penyebaran informasi hasil-hasil perencanaan melalui publikasi sehingga dapat dijadikan acuan bagi stakeholders.

- d. Masih rendahnya kesadaran PD dalam penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan, baik APBD/ DAK/ APBN sesuai dengan waktu dan form yang ditetapkan, sehingga perlu adanya sanksi bagi OPD yang tidak menyampaikan laporan secara tepat waktu.

32. Keuangan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang adalah :

- a. Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga diperlukan upaya untuk menggali potensi pendapatan daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, serta penyesuaian peraturan perundangan tentang pajak dan retribusi daerah, sesuai dengan kondisi sekarang.
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga perlu dupayakan peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.
- c. Luas wilayah yang cukup besar seringkali menjadi hambatan dalam koordinasi dan pemantauan pendapatan dan sumber-sumber potensi pendapatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah.
- d. Belum optimalnya tax coverege ratio, dimana masih banyaknya potensi wajib pajak yang belum terdaftar.
- e. Paradigma masyarakat dan persepsi publik terhadap minimnya kualitas pelayanan dan rumitnya proses birokrasi yang sulit diubah sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur pengelola pajak masih relatif rendah.
- f. Sebagian besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipergunakan untuk belanja tidak langsung terutama untuk membayar Gaji Pegawai. Sedangkan untuk belanja langsung yaitu belanja untuk pelaksanaan program guna membiayai urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang yang menjadi kewenangan daerah relatif kecil, sehingga fungsi APBD untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk

peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial belum dapat dilaksanakan secara optimal.

- g. Lambatnya penyerapan anggaran oleh pengguna anggaran, sehingga penyerapan anggaran menumpuk di akhir tahun anggaran, sebagai akibat kurangnya optimalnya OPD dalam menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

33.Kepegawaian

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang kepegawaian adalah:

- a. Penataan kelembagaan baru yang membutuhkan penanganan khusus dalam kaitannya dengan penataan pegawai yang ada. Dengan adanya penataan kelembagaan baru, maka dilakukan juga penataan pegawai untuk mengisi kekosongan yang ada.
- b. Adanya kebijakan pemerintah pusat dalam kaitannya dengan penerimaan pegawai sehingga menyebabkan jumlah pegawai yang ada semakin berkurang karena pensiun. Solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan koordinasi tentang penerimaan pegawai dengan pihak-pihak terkait untuk dapat memenuhi formasi yang belum terisi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

34. Penelitian dan Pengembangan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang penelitian dan pengembangan adalah :

- a. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Lampung Tengah belum memiliki pejabat fungsional peneliti.
- b. Pengembangan ekonomi masyarakat pada kelembagaan Tekno Park Lampung Tengah belum dimanfaatkan secara optimal dikarenakan sarana dan prasarana pendukung seperti Sumber Daya Manusia, belum ada tindak lanjut master plant Tekno Park Lampung Tengah yang telah disusun dan ketersediaan infrastruktur kelembagaan Tekno Park Lampung Tengah.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro Tahun 2022, proyeksi Tahun 2023, yang memuat pendapatan, kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan Tahun 2022. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2023 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan ditargetkan. Kunci dari kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah meliputi interaksi antara potensi pendapatan, alokasi anggaran dan prioritas pembangunan.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Perkembangan Tahun 2023

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, dan yang terakhir adalah pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada kelesuan pasar ekspor.

a. Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB

Secara makro besaran PDRB Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 yang diukur atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp 3,27 triliun atau 4,5% dari Rp 71,070 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 74,336 triliun pada tahun 2021. Capaian

peningkatan PDRB harga berlaku tersebut, menggambarkan perekonomian Lampung Tengah yang mulai bergeliat seiring diterapkannya Kenormalan Baru ditengah Pandemi Covid 19. Perkembangan PDRB belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Lampung Tengah, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.

Sementara itu, sama seperti halnya PDRB harga berlaku, PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2021 di Kabupaten Lampung Tengah pun mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2021 meningkat sebesar 2,88 persen dari sebesar Rp 47.348,0 trilyun pada tahun 2020 menjadi Rp 48.710,0 trilyun pada tahun 2021. Kondisi tersebut merupakan indikasi produk barang/jasa secara umum mengalami peningkatan atau perekonomian Kabupaten Lampung Tengah secara makro berkembang ke arah positif.

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Ditinjau dari indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang secara teknis merupakan pertumbuhan dari volume produk yang dihasilkan, secara kategori merupakan gambaran kecepatan peningkatan volume produk yang dihasilkan pada kategori yang bersangkutan dan dapat dipergunakan dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Kinerja perekonomian Kabupaten Lampung Tengah selama periode 2017-2021 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dari 5,27 persen tahun 2017, naik menjadi 5,45 persen pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 5,46 persen dan tahun 2020 justru berkontraksi atau menurun sebesar -1,02% akibat pandemi Covid-19. Namun pertumbuhan kembali bergerak ke zona positif pada tahun 2021 sebesar 2,88. Hal tersebut seiring dengan mulai diterapkannya kebiasaan normal baru dan pelaksanaan vaksinasi Covid 19.

c. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat

secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk berarti tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Pendapatan perkapita merupakan hasil bagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan mengasumsikan bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka pendapatan perkapita sama dengan PDRB perkapita yang diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan kata lain pendapatan perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk yang berasal dari proses produksi seluruh kegiatan ekonomi.

Pada tahun 2021 pendapatan per kapita mengalami peningkatan 2,97 persen atau dari semula Rp 48.862.000 rupiah/kapita/tahun,- pada tahun 2020 menjadi Rp 50.316.000 rupiah/kapita/tahunnya pada tahun 2021. Namun demikian, baik peningkatan maupun penurunan tersebut belum sepenuhnya dapat dipakai untuk menggambarkan peningkatan ataupun penurunan dari daya beli masyarakat. Karena pada PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB), selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional di Kabupaten Lampung Tengah tidak mutlak merata. Peningkatan Kembali pendapatan perkapitan pada tahun 2021 seiring dengan berhasilnya program vaksinasi nasional di Lampung Tengah dan mulainya terbentuknya perilaku kehidupan Normal Baru ditengah-tengah masyarakat. PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat produktifitas penduduk di suatu wilayah yang menunjukkan nilai pendapatan yang dihasilkan akibat kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah Lampung Tengah per penduduk selama satu tahun.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022

3.1.2.1 Tantangan Perekonomian Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2022

Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2022 hanya di kisaran 4,7 – 5,5%. Beberapa masalah ekonomi yang akan dihadapi pada tahun 2022 antara lain :

1. Konsumsi Rumah Tangga

- ❖ Meningkatnya pengangguran dan turunnya pendapatan pekerja akan berdampak pada lambatnya pemulihan konsumsi RT, meskipun alokasi bansos yang masih besar akan membantu.
 - ❖ Masih tingginya kasus *COVID-19* menyebabkan masyarakat kalangan menengah atas menahan konsumsi.
2. Investasi/PMTB masih melemah.
 3. Konsumsi Pemerintah diperkirakan masih akan tinggi seiring dengan program vaksinasi dan stimulus PEN yang direncanakan masih besar.
 4. Ekspor mengalami akselerasi pada pemulihan ekonomi global yang didorong otahun 2022 seiring dengan Ieh China dan negara maju yang telah memulai program vaksinasinya. Sedangkan kinerja Impor masih diperkirakan melemah seiring dengan proses pemulihan ekonomi masih berjalan.

Trend positif pertumbuhan ekonomi Lampung sepanjang tahun 2021 tentunya akan menjadi momentum untuk mendorong keberlanjutan ekonomi daerah di tahun 2022 saat ini dan tahun 2023 mendatang. Keadaan tersebut turut pula didukung dengan optimisme perekonomian global dan nasional yang terus menuju perbaikan pasca Covid-19 di tahun 2020. Bank Indonesia (BI) memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 4,7-5,5 persen yang akan didorong oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor Indonesia yang tetap kuat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi. Selain itu keberhasilan program vaksinasi, pengendalian atas pelanggaran sektor ekonomi dan aktifitas sosial, dan stimulus lanjutan kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2022 serta hadirnya perbaikan kinerja perekonomian di tahun 2021 menjadi modal untuk semakin bangkitnya pemulihan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 dan optimisme yang lebih baik di tahun 2023.

Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2021 mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 3,05 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun

2020 yang tumbuh sebesar -1,76 persen, sedangkan ekonomi Sumatera sebesar 3,78 persen dan Nasional sebesar 3,51 persen.

3.1.2.2 Tantangan Perekonomian Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022

Pada tahun 2021 dan 2022 diperkirakan perekonomian Kabupaten Lampung Tengah masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal dan efek dari pandemik Covid-19 serta pengaruh lingkungan perekonomian di Provinsi Lampung yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif dengan langkah- langkah yang lebih nyata. Terdapat beberapa isu yang menjadi perhatian dalam pembangunan perekonomian Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 dan 2022, yaitu:

1. Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga diperlukan upaya untuk menggali potensi pendapatan daerah mebaik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, serta penyesuaian peraturan perundangan tentang pajak dan retribusi daerah, sesuai dengan kondisi sekarang;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga perlu diupayakan peningkatan kesedaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
3. Luas wilayah yang cukup besar seringkali menjadi hambatan dalam koordinasi dan pemantauan pendapatan dan sumber-sumber potensi pendapatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah;
4. Belum optimalnya tax coverege ratio, dimana masih banyaknya potensi wajib pajak yang belum terdaftar;
5. Paradigma masyarakat dan persepsi publik terhadap minimnya kualitas pelayanan dan rumitnya proses birokrasi yang sulit diubah sehingga tingkat kepercayaan asyarakat terhadap kinerja aparatur pengelola pajak asih relatif rendah.
6. Dampak dari pandemi Covid-19 pada sektor perekonomian daerah.

Sementara itu, tingkat inflasi diperkirakan masih terdapat potensi terjadinya resiko peningkatan akibat gangguan pasokan bahan makanan

baik dari sisi produksi maupun distribusi yang dipengaruhi oleh gangguan cuaca dan faktor alam. Dari sisi permintaan, trend meningkatnya harga lada serta perayaan hari besar keagamaan dan momen pemilu kada Gubernur juga dapat berpotensi mendorong laju inflasi.

Tantangan lain yang mempengaruhi prospek pembangunan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2022 juga mencakup tantangan terkait dengan persaingan ekonomi regional yang saat ini terus berlangsung, meliputi antara lain:

- 1) Daya saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah harus mampu meningkatkan kualitas tenaga kerjanya sehingga dapat bersaing di daerah maupun pada level provinsi dan nasional. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah banyaknya tenaga dari luar daerah yang masuk ke daerah.
- 2) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial. Lemahnya Infrastruktur, khususnya bidang transportasi dan energi menyebabkan biaya ekonomi tinggi.
- 3) Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.
- 4) Pengembangan sektor unggulan Kabupaten Lampung Tengah harus terus ditangani dengan serius, khususnya pada sektor produk hasil/pertanian untuk dikembangkan dalam rangka mengisi pasar

lokal maupun nasional. Diantaranya, industri berbasis agro (CPO, kakao, karet dan singkong), industri produk olahan ikan, industri peternakan, industri makanan minuman serta industri kerajinan

- 5) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public-privatepartnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.

3.1.2.3 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023

Mulai pulihnya perekonomian secara regional diharapkan akan terus mampu untuk mendorong meningkatnya permintaan nasional dan ekspor terhadap komoditas primer. Kondisi ini berdampak positif terhadap peningkatan permintaan terhadap komoditi Kabupaten Lampung Tengah dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Momentum terbukanya pasar regional dapat memberikan prospek yang cerah bagi pembangunan ekonomi. Beberapa peluang yang dapat dioptimalkan dalam rangka pembangunan ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023 antara lain adalah:

- a. Kabupaten Lampung Tengah dikenal dengan daerah yang memiliki potensi sumber daya yang besar. Membaiknya perekonomian nasional dapat menyebabkan meningkatnya harga beberapa komoditi unggulan. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2022 dan 2023.
- b. Letak geografis dan Potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Tengah dapat menjadikan daya tarik bagi masuknya investasi, namun hal ini harus didukung oleh penciptaan iklim yang kondusif.
- c. Kabupaten Lampung Tengah harus mampu menyerap aliran modal untuk berinvestasi di Lampung Tengah melalui peningkatan kualitas jalan. Beberapa kawasan dengan daya dukung infrastruktur yang memadai diharapkan dapat menjadi tujuan utama arus modal. Serapan investasi ke Kabupaten Lampung

Tengah berpeluang lebih besar jika daya dukung infrastruktur diperkuat.

- d. Sistem perdagangan terbuka (online) menyebabkan arus keluar masuk barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi. Kondisi pasar bebas dapat menyebabkan produsen untuk memproduksi barang yang berkualitas dan mampu bersaing dengan produk dari daerah/negara lain.

Kinerja perekonomian daerah yang masih tumbuh positif pada tahun 2021 serta besarnya ekspektasi masyarakat pada perbaikan ekonomi daerah, diharapkan akan memberi dampak positif pada perekonomian Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2022 dan 2023. Peningkatan konsumsi rumah tangga yang diikuti dengan pertumbuhan investasi dan ekspor, diperkirakan akan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan. Sedangkan dari sisi produksi, peranan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan yang semakin menonjol diikuti oleh perkembangan sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor pariwisata diperkirakan akan memainkan peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Lampung Tengah di masa yang akan datang.

3.1.2.4 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan permasalahan dan prospek yang terjadi dan berkembang, kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 akan difokuskan pada beberapa tujuan, antara lain :

- a. Penangan pandemic covid-19 dengan mengalokasi belanja langsung pada penanganan dan penyelamatan kesehatan, penyediaan *social safety net/jaring* pengamanan social dan pemulihan dampak ekonomi.
- b. Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
- c. Peningkatan nilai ekspor melalui peningkatan produksi dan nilai tambah produk serta industrialisasi komoditi unggulan;
- d. Pengendalian angka inflasi melalui peningkatan ketahanan pangan daerah dengan cara perbaikan sistem perbenihan, intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil,fasilitasi sarana produksi, perbaikan infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan) dan menerapkan 4K dalam

pengendalian inflasi daerah yaitu, Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif;

- e. Peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- f. penyediaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan daya beli masyarakat;
- g. Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia yang diarahkan kepada peningkatan daya saing tenaga kerja;
- h. Mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah perkotaan dan pedesaan mendorong kegiatan gotong royong dan pembangunan ekonomi di pedesaan yang relatif rendah dengan memacu sektor unggulan masing-masing di pedesaan pada masing-masing daerah;
- i. Pengembangan kemitraan Pemerintah Daerah dengan Swasta terutama peningkatan peran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (peningkatan pendanaan kontribusi dana CSR dan peningkatan sinergitas pembangunan).


3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran



Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu :

- a. menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat;
- c. serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat dimana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari kualitas anggaran dalam APBD. Kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah mendukung kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, antara lain penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai perubahan dalam membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan APBD melalui tiga tahapan yaitu penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru



manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Berorientasi pada kepentingan publik / masyarakat luas;
- b. Disusun berdasarkan pendekatan kinerja;
- c. Mempunyai keterkaitan antara pengambil kebijakan (decision maker) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja/PD
- d. Upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Kebijakan pendapatan daerah lima tahunan diarahkan untuk meningkatkan efektifitas dan Optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui :

- a. Intersifikasi dan ekstersifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber-sumber penerimaan lain yang sah.
- b. Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pengeloaan dan pemanfaatan asset daerah yang potensial.
- d. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah.
- e. Peningkatan pelayanan kepada wajib /objek pajak dan retribusi.
- f. Peningkatan sosialisasi / penyuluhan tentang pajak dan retribusi kepada masyarakat.
- g. Pembangunan infrastruktur pendukung peningkatan pendapatan daerah.
- h. Koordinasi dan konsultasi pendapatan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi serta melakukan pemutakhiran data daerah dalam rangka peningkatan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
- i. Merintis kerjasama daerah sebagai upaya optimalisasi pendayagunaan asset dan pendapatan Daerah dan minimalisasi pemeliharaan asset.

Rencana yang ada pada dokumen perencanaan lima tahunan dan satu tahunan, perlu arah pengelolaan keuangan daerah. Arah pengelolaan ini agar seluruh sumber daya keuangan daerah dimanfaatkan lebih efektif

dan efisien. Arah pengelolaan meliputi arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan arah pengelolaan pembiayaan daerah. Berdasarkan hal tersebut serta dalam rangka mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan keuangan (anggaran) Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023 diarahkan untuk :

- a. Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan (fiscal sustainability) dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi obyektif dan isu-isu strategis di daerah, di samping memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. Langkah konsolidasi fiskal daerah tersebut, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah;
- c. Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara : (1) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah, (2) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien;

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi :

1). Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah diperkirakan sebesar Rp. 234,812 milyar lebih, yang berasal dari :

- a. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 114,541 milyar lebih;
- b. Retribusi Daerah sebesar Rp. 12,724 milyar lebih;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 7,711 milyar lebih; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah sebesar Rp. 99,836 milyar lebih.

Penetapan target PAD tersebut telah mempertimbangkan kondisi perekonomian tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Dalam upaya pengelolaan PAD, Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melakukan upaya penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD.

Pajak daerah dan retribusi tersebut seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, penetapan target pendapatannya pada tahun 2023 disesuaikan dengan ketentuan tersebut dengan tetap mengacu pada peraturan daerah yang ada.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tidak melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturannya sudah dibatalkan atau jenis pajak daerah dan retribusi daerah tersebut tidak diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

2). Pendapatan Transfer

Untuk dana perimbangan diperkirakan sebesar Rp. 2,485 triliun lebih yang berasal dari :

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 2,345 Triliyun lebih;
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 140 milyar;

3). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan sebesar Rp 953,503 juta lebih, yang berasal dari:

- a. Pendapatan Hibah Rp. 953,503 juta lebih;

Untuk Pendapatan daerah secara keseluruhan diprediksi pada tahun 2023 sebesar Rp. 2,721 triliun lebih.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk meningkatkan efektifitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, melalui :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.
2. Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah yang potensial.
4. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah.
5. Peningkatan pelayanan kepada wajib/obyek pajak dan retribusi.
6. Peningkatan sosialisasi/penyuluhan tentang pajak dan retribusi kepada masyarakat.
7. Pembangunan infrastruktur pendukung peningkatan pendapatan daerah.
8. Koordinasi dan konsultasi pendapatan daerah dengan pemerintah pusat dan propinsi, serta melakukan pemutakhiran data dasar dalam rangka perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Realisasi sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Kabupaten Lampung Tengah

Kode	Uraian	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
4	PENDAPATAN DAERAH						
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	165.414.795.485	193.634.175.310	179.883.067.925,86	234.891.264.050,19	221.122.067.655	234.812.997.036
4.1.01	Pajak Daerah	79.709.849.666	92.615.976.246	85.423.990.503	100.691.283.459,70	99.041.177.469	114.541.132.197
4.1.02	Retribusi Daerah	6.643.364.163	10.498.043.912	9.646.781.059	8.075.809.375,00	12.007.175.000	12.724.279.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.524.251.287	6.523.066.078	7.231.134.960,48	7.711.541.564,54	7.711.541.564	7.711.541.564
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	72.537.330.369	83.997.089.074	77.581.161.403,38	118.412.629.650,95	102.362.173.622	99.836.044.275
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	2.180.787.089.318	2.251.406.005.749	2.086.403.282.682,33	2.091.657.159.232	2.210.326.915.000	2.485.380.656.147
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.071.152.705.561	2.106.357.779.488	1.970.721.003.774,00	1.987.454.150.583	2.075.326.915.000	2.345.380.656.147
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	109.634.383.757	145.048.226.261	115.682.278.908,33	104.203.008.649	135.000.000.000	140.000.000.000
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	128.406.160.593	143.809.387.379	165.045.908.212,00	159.344.909.348	188.724.338.101	148.000.174.101
4.3.01	Pendapatan Hibah	117.520.593	82.604.684	164.969.440.975,00	8.817.781.348	2.681.838.101	953.503.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	128.288.640.000	143.726.782.695	76.467.237,00	150.527.128.000	186.042.500.000	-
Jumlah Pendapatan		2.474.608.045.396	2.588.849.568.438	2.431.332.258.820	2.485.893.332.630,19	2.620.173.320.756	2.721.147.156.183

Sumber : BPKAD dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Lampung Tengah 2022

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, serta sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Penggunaan anggaran harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, serta harus memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai.

- Penganggaran Gaji dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perencanaan belanja pegawai diperhitungkan kenaikan accres gaji paling tinggi 2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah

b. Belanja Barang dan Jasa

Penganggaran belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

c. Bunga

Penganggaran bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

d. Subsidi

Penganggaran subsidi digunakan untuk bantuan biaya pengobatan bagi ASN dan keluarga miskin sehingga mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, serta untuk biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

e. Hibah

Penganggaran pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/ atau jasa kepada perusahaan daerah dan organisasi kemasyarakatan, serta untuk fasilitasi pemilihan kepala daerah, secara spesifik dan selektif dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.

f. Bantuan Sosial

Penganggaran pemberian bantuan sosial diperuntukkan kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan penggunaannya.

2. Belanja Modal

Digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

- a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan

- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. Belanja Transfer

a. Bagi Hasil

Penganggaran bagi hasil digunakan untuk dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Propinsi kepada Pemerintah Kabupaten atau pendapatan Kabupaten kepada pemerintah kampung.

b. Bantuan Keuangan

Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah kampung dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan untuk pembangunan.

Adapun arah kebijakan dalam belanja sebagai berikut :

- a. Mendukung pencapaian target visi dan misi kepala daerah tahun awal yaitu tahun 2022.
- b. Mendukung penanganan pandemi covid-19 di daerah terutama melaksanakan vaksinasi.
- c. Memaksimalkan belanja urusan urusan wajib pelayanan dasar.
- d. Pengalokasian belanja yang fokus pada pengentasan kemiskinan dan *Stunting*.
- e. Pengalokasian belanja untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, guna meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Realisasi belanja Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 s.d 2023

Kode	Uraian	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA				
5,1	BELANJA OPERASI	1.751.804.973.672,78	1.709.448.587.852,85	1.853.135.846.486	1.951.586.974.926
5.1.01	Belanja Pegawai	1.179.969.542.945,00	1.182.712.688.859,00	1.164.743.861.667	1.196.133.035.738
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.002.558.337,78	451.814.621.700,70	574.913.108.727	635.005.441.582
5.1.03	Belanja Bunga	0	0	9.000.000.000	9.000.000.000
5.1.04	Belanja Subsidi	0	141.600.000,00	540.415.000	865.375.000
5.1.05	Belanja Hibah	127.832.872.390,00	74.779.677.293,15	103.513.461.092	110.371.622.606
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0	0	425.000.000	211.500.000
5,2	BELANJA MODAL	215.187.156.758,22	355.715.743.166,02	398.657.926.370	326.426.932.735
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	0	3.000.000.000	21.600.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.621.694.404,00	59.812.652.966,20	126.950.042.057	60.819.228.163
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.129.630.343,15	29.532.011.364,76	65.862.684.272	54.310.571.190
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	109.551.116.514,07	265.962.869.887,06	201.923.416.041	211.115.203.382
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	884.715.497,00	408.208.948,00	921.784.000	90.330.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	0	70.000.000
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	37.695.401.411,00	15.693.913.480,08	15.000.000.000	15.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	37.695.401.411,00	15.693.913.480,08	15.000.000.000	15.000.000.000
5,4	BELANJA TRANSFER	7.766.649.980,00	465.942.270.405,00	475.931.144.747,00	472.425.520.447
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.766.649.980,00	9.734.373.020,00	11.104.835.247	11.104.835.247
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	457.522.212.598,00	456.207.897.385,00	464.826.309.500	468.320.685.200
Jumlah Belanja		2.469.976.394.420,00	2.546.800.514.903,95	2.742.724.917.603,00	2.772.439.428.108

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Kabupaten Lampung Tengah hanya penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Kabupaten Lampung Tengah berasal dari Proyeksi SiLPA tahun 2022. Berdasarkan kondisi perekonomian pada tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023, maka Rencana penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2023 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu (SiLPA) sebesar Rp. 50,228 milyar lebih.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan Tahun 2023 diproyeksi sebesar Rp. 32,015 milyar lebih.

Tabel 3.3.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 s/d 2023

Kode	Uraian	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
1	2	3	4	5	5
6	PEMBIAYAAN				
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	200.010.842.976,16	257.110.970.014,44	156.528.918.385,00	90.308.135.395
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	200.010.842.976,16	148.470.970.014,44	156.528.918.385,00	90.308.135.395
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah		108.640.000.000,00		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	200.010.842.976,16	82.952.472.000,00	156.528.918.385,00	
6.2	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.895.737.362,61	4.721.346.711,00	33.977.321.538,00	39.015.863.470
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	9.444.031.942,61	3.500.000.000,00	2.961.458.068,00	-
6.2.03	Pembayaran Pokok Hutang	3.451.705.420,00	1.221.346.711,00	31.015.863.470,00	39.015.863.470
	Pembiayaan Netto	187.115.105.613,55	252.389.623.303,44	122.551.596.847,00	51.292.271.925
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	148.470.970.014,44	191.482.441.029,68	-	-

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan.

Pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Tengah Lampung Tahun 2023 merupakan tahap pembangunan kedua dari RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026, tahap pembangunan keempat dari RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 maupun RPJMN Tahun 2020-2024, dan menjadi moment penting untuk memperkuat sinergi dan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional. Untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan, RKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 disusun dengan mencermati capaian pembangunan daerah pada tahun sebelumnya serta mempertimbangkan permasalahan maupun tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun perencanaan, termasuk proyeksi kerangka ekonomi maupun kerangka pendanaan pembangunan daerah

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RKP 2023

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dijelaskan bahwa Visi Pembangunan Nasional adalah :

”Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditempuh melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kereangka Negara Kesatuan.

Selanjutnya, RPJMN 2020-2024 sebagai titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, maka penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian peningkatan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan hal tersebut, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan 9 (sembilan) misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia Maju, yaitu :

1. Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. **Penyederhanaan Birokrasi**

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. **Transformasi Ekonomi**

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk menjabarkan RPJMN 2020-2024 secara tahunan, pemerintah telah mencanangkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 “**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arah kebijakan pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, yaitu :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;

6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi;
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

4.1.2 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024


Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, telah ditetapkan bahwa Visi pembangunan Provinsi Lampung adalah :

“Rakyat Lampung Berjaya”


Dengan visi pembangunan tersebut, diharapkan Masyarakat Lampung menjadi "subyek utama" dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas, berbudaya dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai.

Untuk mencapai visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan daerah Tahun 2019 – 2024, sebagai berikut :

1. Misi-1 : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai, melalui Komitmen pelaksanaan pokok-pokok program prioritas :
 - a. Melaksanakan upaya untuk memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan informal, komunikasi publik dan mass media, serta lembaga dan organisasi terkait;


- 
- b. Memberikan dukungan dalam upaya menumbuhkembangkan, penghayatan, dan pelaksanaan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat;
 - c. Meningkatkan koordinasi dan dukungan kepada instansi vertikal dan Kab/Kota dalam mendorong terciptanya kamtibmas dan penegakan hukum;
 - d. Mendukung dan memperluas sosialisasi penegakan hukum (sadar hukum) sampai ke tingkat perdesaan;
 - e. Meningkatkan peran lembaga adat, lembaga agama, lembaga kemasyarakatan dan forum komunikasi dalam upaya mencegah dan mengatasi terjadinya konflik dalam masyarakat, penyalahgunaan narkoba, radikalisme, dan masalah-masalah sosial lainnya;
 - f. Memperkuat komunikasi antarlembaga dan kelompok masyarakat dalam menciptakan kebersamaan dan toleransi, serta meningkatkan kebudayaan daerah dan kerukunan hidup antar umat beragama;
 - g. Meningkatkan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
 - h. Mengembangkan tradisi budaya daerah sebagai kearifan lokal untuk menjadi dasar dan strategi dalam pembangunan daerah.
2. Misi-2 : Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik, melalui komitmen pelaksanaan pokok-pokok program prioritas :
- a. Membenahi dan meningkatkan kualitas birokrasi Pemerintah Daerah melalui manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional dalam pembangunan dan pelayanan publik;
 - b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dan antar Pemerintah Kabupaten/kota, instansi vertikal di daerah, dan dunia usaha dalam rangka membangun sinergitas pembangunan daerah;
 - c. Meningkatkan peranserta masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dengan mempergunakan teknologi informasi;




- 
- d. Memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui tatakelola yang profesional dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah untuk pembangunan;
 - e. Meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dalam upayapembangunan daerah Lampung melalui usulan program yang prospektif, inovatif, produktif, dan kolaboratif;
 - f. Mendorong peran BUMD untuk meningkatkan pendapatan daerah serta membantu dan mendukung peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan di sektor Pertanian, Pariwisata dan ekaonomi Kreatif, Infrastruktur, Energi, dan Transportasi;
 - g. Menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha melalui penyederhanaan perizinan, skema insentif dan dis-insentif, serta kepastian biaya pelayanan;
 - h. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat melalui upaya edukasi dan pemberdayaan bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota.
3. Misi-3 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel, melalui komitmen dalam pelaksanaan pokok-pokok program prioritas:
- a. Meningkatkan kualitas, pemerataan dan akses pelayanan pendidikan menengah (SMA), kejuruan (SMK), dan SLB bekerjasama dengan lembaga terkait;
 - b. Meningkatkan kualitas, pemerataan, dan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial sampai ke tingkat desa bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dan lembaga terkait (NGO, lembaga donor, dunia usaha, dll);
 - c. Mewujudkan lingkungan fisik, sosial dan budaya yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dalam bidang jasmani dan rohani secara baik;
 - d. Melaksanakan upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam rumah tangga, sosial ekonomi, dan kemasyarakatan, serta dalam bidang politik;
 - e. Melaksanakan upaya untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi pekerja dibawah umur (anak),



- perdagangan perempuan (women trafficking), dan menjamin hak-hak perempuan dalam bidang ketenagakerjaan;
- f. Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui pendidikan kejuruan, latihan kerja, sertifikasi kompetensi, serta program magang;
 - g. Menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas;
 - h. Mendukung berkembangnya peran lembaga-lembaga yang mengadvokasi perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas.
4. Misi-4 : Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah, komitmen dalam pelaksanaan melalui pokok-pokok program prioritas :
- a. Memperluas dan mengintegrasikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi untuk memperkuat konektivitas internal guna menumbuhkan ekonomi daerah dan pengembangan wilayah secara merata;
 - b. Mengembangkan dan memfungsikan jaringan infrastruktur regional (jalan tol Sumatera, jalan nasional, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, dermaga, kereta api, dan bandara) untuk meningkatkan konektivitas eksternal dalam upaya memperluas dan meningkatkan daya saing pasar komoditas Provinsi Lampung pada wilayah regional, nasional dan internasional;
 - c. Mendorong investasi pembangkit dan jaringan energi listrik (termasuk energi baru dan terbarukan) dalam upaya meningkatkan kemandirian energi daerah serta pemerataan layanan listrik;
 - d. Mendorong pengembangan sistem penyediaan air minum regional (SPAM Regional);
 - e. Mendorong pengembangan sistem pengolahan sampah regional;
 - f. Mendorong pengembangan dan perluasan jaringan gas agar bisa melayani rumah tangga secara merata;
 - g. Mendorong pengembangan dan perluasan jaringan telekomunikasi dan informasi sampai ke wilayah perdesaan;

- 
- h. Memperluas pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman perdesaan, kampung nelayan dan permukiman (kumuh) perkotaan, serta memfasilitasi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.
5. Misi-5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan, melalui komitmen dalam pelaksanaan pokok-pokok program prioritas :
 - a. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengairan serta meningkatkan tata kelola air irigasi dalam rangka memperluas jangkauan dan meningkatkan index pertanaman serta untuk pengendalian banjir;
 - b. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi untuk komoditas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan hutan kemasyarakatan melalui program subsidi, insentif, fasilitasi pemasaran, permodalan fasilitasi dan jaminan melalui BUMD Jamkrida, fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan saprodi dan alsintan;
 - c. Membangun dan mengembangkan sentra pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan), sentra industri kecil, kawasan industri menengah dan besar, serta sentra pariwisata;
 - d. Membuka peluang investasi seluas-luasnya bagi dunia usaha (bidang produksi, industri pengolahan, perdagangan, jasa, dan pariwisata) dengan prioritas investasi untuk industri hilir yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan ramah lingkungan;
 - e. Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan dan partnership dengan dunia usaha, lembaga donor, dan lembaga pemerintah (Kementerian dan Pemerintah Provinsi lainnya) dalam pembangunan daerah dan menciptakan kesempatan kerja;
 - f. Mengembangkan kewirausahaan (koperasi dan UMKM) melalui inovasi dan standarisasi produk (termasuk untuk industri kreatif), akses permodalan dengan BUMD Jamkrida, pemasaran, dan program kemitraan dengan pihak lainnya;



- 
- g. Mendukung perluasan program jaminan sosial dan jaminan kesehatan bekerjasama dengan BPJS, Asosiasi Pengusaha, dan Asosiasi Pekerja.
6. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama, melalui komitmen dalam pelaksanaan pokokpokok program prioritas :
- a. Pengarusutamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan;
 - b. Mengutamakan pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan dan investasi melalui pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals);
 - c. Mengembangkan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - d. Mengembangkan wilayah melalui pendekatan lingkungan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan hidup;
 - e. Mengintensifkan upaya rehabilitasi kawasan hutan, hutan bakau, dan lahan kritis;
 - f. Mengintensifkan program penghijauan di luar kawasan hutan dengan tanaman yang bernilai ekonomi;
 - g. Mengintensifkan upaya perhutanan sosial dalam rangka meningkatkan fungsi lindung kawasan hutan yang terpadu dengan kesejahteraan masyarakat;
 - h. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, pembalakan liar (illegal logging), pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pembangunan dengan memberdayakan peranserta masyarakat;
 - i. Meningkatkan upaya mitigasi bencana alam berbasis peranserta masyarakat.



Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan sejalan dengan RKP Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023 yang bertajuk :

**“PENGUATAN EKONOMI YANG INKLUSIF UNTUK MENINGKATKAN
DAYA SAING DAERAH”.**

Tema tersebut dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan tahunan Provinsi Lampung Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan;
2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia;
3. Pembangunan Infrastruktur;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya; dan
6. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, situasi dan tantangan perekonomian daerah, kerangka pendanaan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta sinergi pembangunan antara daerah dan nasional; sasaran makro pembangunan daerah Provinsi Lampung Tahun 2023. Penetapan sasaran makro pembangunan dalam RKPD Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi terkini (hasil diskusi antar pemangku kepentingan) dan kondisi yang terjadi akibat pandemi COVID-19, maka Pemerintah Daerah Provinsi Lampung melakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan yang sebelumnya telah dimuat dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Penyesuaian ini perlu dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap perkembangan keadaan sekaligus merupakan penerapan perencanaan dan penganggaran yang terpadu. Dengan kemampuan keuangan yang ada, maka target-target pembangunan juga perlu disesuaikan sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran serta berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya.

4.1.3 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 visi Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut **“Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya”**, maka tujuan dan sasaran pembangunan dapat dirumuskan sebagai berikut adalah sebagai berikut :

Misi I : Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten, dan produktif.

Sasaran :

1. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan Gender Prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan;
2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat dan pelestarian budaya daerah;
3. Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan derajat Kesehatan;
4. Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan ketahanan keluarga.

Misi II : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa.

Tujuan :

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, berdaya saing dan berwawasan lingkungan.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan Kabupaten;
3. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi;
4. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat;
5. Meningkatkan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup;

6. Meningkatnya kualitas penataan ruang yang berwawasan lingkungan.

Misi III : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Jual Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan.

Tujuan :

1. Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan sektor unggulan yang mendukung penanggulangan kemiskinan yang terpadu.

Sasaran :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan
2. Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
3. Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM dalam memajukan perekonomian rakyat
4. Meningkatkan iklim investasi daerah
5. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung
6. Menurunnya angka pengangguran
7. Meningkatnya penanganan masalah kesejangan sosial

Misi IV : Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah (Stabilitas Keamanan).

Tujuan :

1. Mewujudkan kondisi aman, tertib dan tentram dalam kehidupan masyarakat.

Sasaran :

1. Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial;
2. Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat;

3. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana.

Misi V : Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

Tujuan :

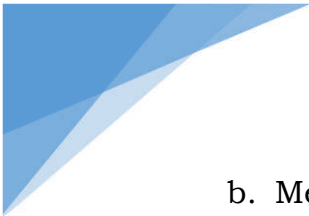
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional serta pelayanan publik yang berkualitas.

Sasaran :


1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Mewujudkan birokrasi yang kapabel;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 merupakan upaya strategis dan perlu dikedepankan sebagai prioritas utama dalam upaya mencapai visi dan misi. Program unggulan tersebut, meliputi:

1. Pendidikan Berjaya. Agenda pemerintah daerah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pendidikan berjaya adalah:
 - a. Memperluas akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
 - b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
 - c. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan SDM tenaga pendidik dan tenaga honorer.
 - d. Pemerataan keunggulan tempat pendidikan.
 - e. Pemberian beasiswa bagi pelajar dan santri yang berprestasi dan kurang mampu.
 - f. Bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta dalam upaya peningkatan mutu pendidikan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lampung Tengah.
 - g. Memberdayakan pondok pesantren serta memberikan insentif bagi guru ngaji dan marbot masjid.
2. Kesehatan Berjaya. Agenda pemerintah daerah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kesehatan berjaya adalah:
 - a. Mendorong peran serta kader-kader kesehatan dan bidan Kampung dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan.

- 
- b. Meningkatkan kesejahteraan tenaga medis dan pemerataan jangkauan penanganan Kesehatan melalui pembangunan rumah sakit di wilayah timur dan di wilayah barat.
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kelengkapan alat kesehatan serta ketersediaan obat di puskesmas.
 - d. Meningkatkan pelayanan puskesmas pembantu (Pustu).
 - e. Menjadikan Rumah Sakit Demang Sepulau Raya sebagai rumah sakit yang ramah dan berkualitas.
 3. Pemuda Milenial Berjaya. Agenda Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan wadah yang menghimpun, mengakomodir ragam kreatifitas dan inovasi untuk menunjang peningkatan UMKM serta ekonomi kreatif.
 4. SIJALU Berjaya. Untuk mewujudkan SIJALU Berjaya, agenda pemerintah daerah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat akan melakukan:
 - a. Percepatan perbaikan seluruh jalan kabupaten, kecamatan, dan kampung-kampung yang ditargetkan selesai dalam kurun waktu 3 tahun; dan
 - b. Pembangunan jembatan penghubung antara kecamatan/kampung sebagai akses transportasi hasil bumi.
 5. Petani Berjaya. Agenda pemerintah daerah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan petani berjaya adalah:
 - a. Memberikan bantuan usaha bagi kelompok tani.
 - b. Memberikan bantuan bibit tanaman produktif kepada KWT, Gapoktan, dan Petani Mandiri.
 - c. Memberikan bantuan bibit peternakan kepada kelompok masyarakat.
 - d. Menjamin kelancaran distribusi pupuk bersubsidi.
 - e. Penguatan regional Sentra Produk Pertanian dengan memberikan rasa nyaman dan aman kepada petani mulai dari pra panen, saat panen, dan pasca panen.
 6. BUMKAM Berjaya. Agenda pemerintah daerah dalam upaya mendorong peran BUNKAM di setiap Kampung sebagai poros ekonomi kerakyatan dalam rangka menekan angka kemiskinan.



- 
7. Keberagaman Umat Berjaya. Agenda pemerintah daerah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan keberagaman umat berjaya adalah:
 - a. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama, suku dan budaya serta golongan.
 - b. Meningkatkan dana bagi pengelola keamanan di kampung (Linmas dan Perangkat Kampung).
 - c. Bekerja sama dengan aparat hukum dan tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Adat untuk Bersama Meningkatkan Keamanan Daerah guna menekan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika.
 - d. Memfasilitasi agar terjadi komunikasi yang baik antar suku, agama, ras dan golongan untuk meminimalisir potensi konflik di masyarakat.
 - e. Mendorong dan menjaga upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal.
 - f. Penguatan pendidikan karakter yang berbasis pada agama, budaya, dan adat istiadat
 8. Pelayanan Berjaya. Agenda pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan berjaya adalah:
 - a. Menjaring aspirasi dan melayani masyarakat secara langsung setiap dua hari dalam satu minggu.
 - b. Melakukan jejak pendapat dengan turun langsung dan berkantor di Kampung dan kecamatan yang telah dijadualkan
 - c. Memangkas rantai birokrasi demi terciptanya pelayanan yang cepat dan tepat.
 - d. Melaksanakan pelayanan pemeriksaan (skrining) Kesehatan gratis di di Kampung dan kecamatan secara berkala.
 - e. *DPMPPT mobile* yang terjadwal di setiap Kecamatan.
 - f. Memudahkan segala aspek perizinan usaha sampai ke tingkat kampung/kelurahan, menggratiskan perizinan SIUP dan TDP dan selesai dalam satu hari.
 - g. Membentuk Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat guna terciptanya pemenuhan hak masyarakat dalam hal bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin dan buta hukum.



Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 dan sejalan dengan RKP dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menetapkan Tema Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 yang bertajuk :

“PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PEREKONOMIAN DAERAH SERTA PEMANTAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”.

Tema tersebut dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan tahunan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
2. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup;
3. Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif;
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel); dan
5. Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat.

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan dokumen yang berisi pemikiran-pemikiran Pokok DPRD tentang arah dan kebijakan Pembangunan Daerah untuk satu tahun ke depan. Pokok-pokok Pikiran DPRD diperoleh melalui :

1. Penjaringan Aspirasi Masyarakat yaitu melalui dengar pendapat, Kunjungan Kerja, Kegiatan Reses dengan mengadakan forum koordinasi partisipasi di daerah Pemilihan Anggota Dewan.
2. Dokumen Perencanaan Pembangunan,
3. Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah.

Pertimbangan dan masukan dari konstituen secara khusus dari masyarakat pada umumnya dicatat dan menjadi kajian bagi DPRD untuk melengkapi Pokok-Pokok Pikirannya. Selanjutnya dijadikan dasar

pertimbangan untuk pembahasan Kebijakan Umum APBD yang dibuat pihak eksekutif.

Tujuan disusunnya pokok-pokok pikiran DPRD adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dalam menyusun dokumen RKPD Tahun Anggaran 2023.
- b. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA PD, dan RAPBD Tahun Anggaran 2023.
- c. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi Kabupaten Lampung Tengah melalui perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2023.
- d. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD.
- e. Mewujudkan aspirasi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
- f. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah yang lebih baik.

Adapun Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan

Pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah masih didominasi dari dana perimbangan. Oleh karena itu untuk mengurangi dominasi tersebut pendapatan asli daerah perlu lebih ditingkatkan melalui :

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan Pajak dan Retribusi daerah dan sumber penerimaan lainya yang sah.
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

- c. Mengadakan evaluasi terhadap Perda-Perda yang terkait dengan pendapatan sesuai dengan keadaan perkembangan pembangunan dengan tidak memberatkan masyarakat.

2. Belanja

a. Bidang Pendidikan

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka meningkatkan SDM dan mewujudkan kemajuan diberbagai bidang. Pelayanan dan mutu pendidikan perlu ditingkatkan melalui :

- 1) Peningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dengan memprioritaskan pembangunan sekolah-sekolah yang rusak berat;
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik;
- 3) Meningkatkan penataan sistem pendidikan dan pengembangan kurikulum;
- 4) Biaya pendidikan tidak membebani masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu, jika perlu dibebaskan dari biaya atau diberi beasiswa bagi yang berprestasi;
- 5) Pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan terutama di Kecamatan dan kampung yang kekurangan tenaga pendidik;
- 6) Tambahan muatan lokal yang menggambarkan kearifan lokal Kabupaten Lampung Tengah;
- 7) Pendidikan moral dan karakter.

b. Bidang Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan modal utama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia, secara umum status kesehatan dan gizi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah cukup baik, meskipun demikian untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas masih sangat diperlukan.

Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan meringankan biaya pelayanan kesehatan perlu melaksanakan Arah Kebijakan Daerah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas-Puskesmas di seluruh Kabupaten Lampung Tengah;
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku bersih dan sehat;
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, mutu pelayanan kesehatan dan tersediannya obat-obatan yang memadahi;
- 4) Dialokasikan anggaran untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit yang mewabah yang penanganannya sangat mendesak seperti Covid 19, DBD, diare dan lainnya;
- 5) Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama untuk keluarga miskin dengan membantu kelancaran dan kemudahan dalam penggunaan asuransi kesehatan masyarakat;
- 6) Peningkatan disiplin tenaga medis, serta adanya pengawasan secara berjenjang.

c. Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan utama di bidang ketenagakerjaan adalah pengangguran dan kesejahteraan pekerja, sehingga perlu diperluas lapangan pekerjaan baik melalui sektor formal maupun non formal. Masalah kesejahteraan pekerja, kesehatan dan keselamatan kerja harus diperhatikan sehingga pekerja tidak menjadi korban dari pengusaha.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan tersebut adalah :

- 1) Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sehingga diharapkan dapat menciptakan lapangan usaha sendiri dan dapat mendukung ekonomi keluarga;
- 2) Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam menciptakan dan mengembangkan lapangan kerja dan kesempatan kerja;

- 3) Mengadakan koordinasi, fasilitasi serta perlindungan terhadap keselamatan kerja;
- 4) Mengadakan pembinaan terhadap pekerja tentang peraturan ketenaga kerjaan dan keselamatan tenaga kerja.

d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan jender;
- 2) Meningkatkan upaya perlindungan dan kesadaran masyarakat tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 3) Penarikan pekerja anak dibawah umur pada perusahaan;
- 4) Meningkatkan peranan Perangkat Daerah terkait;
- 5) Penempatan pos pengaduan di tingkat Kecamatan atau Kelurahan/Kampung;
- 6) Meningkatkan keterampilan tenaga kerja potensial khususnya untuk perempuan.

e. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum tetap terjaga dan kondusif. Demikian juga kerukunan antar pemeluk agama, suku dan golongan. Namun demikian tindak kriminalitas seperti penipuan, pencurian, perampokan dan tindak pidana lainnya masih terjadi.

Disamping itu menghadapi penyakit di masyarakat perlu meningkatkan keamanan dengan :

- 1) Memelihara suanana kondusif dan masyarakat tidak terpengaruh terhadap isu-isu / hasutan dari berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab;
- 2) Memelihara Kerukunan antar umat beragama dengan meningkatkan pemahaman umat beragama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, sehingga tidak mudah terpengaruh kepercayaan lain yang timbul di masyakat yang mengatas namakan agama dan mengaku sebagai malaikat atau nabi;

- 3) Melakukan antisipasi terhadap penyakit masyarakat, ajaran radikal dan paham komunis;
- 4) Melakukan Pengawasan peredaran miras dan tindakan tegas terhadap peredaran narkoba;
- 5) Menanamkan dan meningkatkan rasa cinta Tanah Air terhadap generasi muda;
- 6) Peningkatan antisipasi pra bencana dan tanggap darurat serta pasca gempa;
- 7) Peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil;
- 8) Seluruh bagian pemerintahan terutama yang terkait dengan layanan publik harus ramah terhadap penyandang disabilitas.

f. Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Pertanian merupakan kontribusi terbesar di Kabupaten Lampung Tengah, oleh karena itu dengan adanya swasembada pangan perlu diupayakan pembangunan dan peningkatan di bidang pertanian.

Begitu juga dengan peternakan dan perikanan yang merupakan pendukung pangan, peningkatan gizi masyarakat serta penguatan ekonomi sebagai penunjang sektor pertanian.

Pembangunan di bidang pertanian masih dihadapkan beberapa permasalahan diantaranya masih rendahnya produktifitas dan kualitas hasil pertanian, sebagai akibat terbatasnya benih/bibit unggul, rendahnya debit irigasi pada musim kemarau, kelangkaan pupuk dan serangan hama penyakit, oleh karena itu perlu adanya :

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani;
- 2) Meningkatkan kualitas budidaya benih/bibit serta teknik bercocok tanam yang benar;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- 4) Untuk mengatasi mahalanya harga pupuk, maka perlu dicari solusi lain di antaranya dengan memanfaatkan limbah ternak yang diolah menjadi pupuk buatan;
- 5) Memberikan penyuluhan terhadap kelompok-kelompok tani tentang penanggulangan serangan hama penyakit;

- 6) Mendukung komoditas unggulan peternakan dan perikanan;
- 7) Melakukan pembinaan terhadap masyarakat peternak dan perikanan sebagai pendukung pangan, peningkatan gizi masyarakat serta penguatan ekonomi sebagai penunjang sektor pertanian.

g. Bidang Pekerjaan Umum

Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sektor transportasi untuk meningkatkan kelancaran mobilitas penumpang, barang dan jasa, saluran irigasi dan infrastruktur lainnya.

Mengingat banyaknya infra sruktur yang rusak terutama jalan di Kabupaten Lampung Tengah, maka perlu adanya skala prioritas terhadap pembangunan jalan yaitu :

- 1) Perbaiki jalan-jalan utama yang menghubungkan antar kecamatan, sentra-sentra produksi dan jalan antar kampung guna mendukung aktifitas perekonomian rakyat;
- 2) Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan/gorong-gorong yang berkualitas sehingga tidak mudah rusak kembali setelah diperbaiki;
- 3) Memelihara saluran irigasi, sehingga dapat berfungsi dengan baik dan lancar;
- 4) Peningkatan pengawasan pekerjaan fisik yang ada di Kabupaten Lampung Tengah;

h. Bidang Koperasi UKM dan Penanaman Modal

Koperasi dan UKM yang merupakan penyangga ekonomi Nasional sudah seharusnya mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah, kondisi Koperasi dan UKM banyak sekali yang menyisakan persoalan (hidup segan, mati tak mau), untuk itu melalui Dinas terkait agar melakukan inventarisasi terhadap Koperasi dan UKM, walaupun yang masih memungkinkan untuk dilakukan pembinaan agar kembali sehat, seandainya tidak memungkinkan lagi, kiranya dapat meminimalisir dampaknya negatif kepada masyarakat.

Beberapa hal yang dapat dilakukan berkaitan dengan Koperasi, UKM dan Penanaman Modal, yaitu :

- 1) Melakukan pemberdayaan fungsi Koperasi;
- 2) Melakukan pembinaan terhadap Koperasi dan UKM, serta memantau perkembangannya;
- 3) Peningkatan peran Koperasi baik secara konvensional maupun syari'ah;
- 4) Melakukan inventarisasi Koperasi dan UKM di Kabupaten Lampung Tengah, berikut kondisi dan pertumbuhannya sebagai data base;
- 5) Memberikan perhatian terhadap potensi industri rumah tangga;
- 6) Mendorong investor agar menempatkan investasi di Kabupaten Lampung Tengah dengan mengacu kepada peraturan yang ada;
- 7) Mempermudah sistem dan aturan berinvestasi di Kabupaten Lampung Tengah.

i. Bidang Pariwisata

Kabupaten Lampung Tengah banyak memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan, tentunya hal ini juga harus mendapat perhatian kita bersama baik Pemerintah daerah dan masyarakat Lampung Tengah, sehingga hal ini akan menarik minat kunjungan warga dari luar Lampung Tengah selain sarana hiburan dari warga sekitarnya juga berdampak meningkatnya perekonomian masyarakat. Untuk itu dapat dilakukan beberapa hal, antara lain :

- 1) Pengembangan dan pemanfaatan potensi / destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lampung Tengah;
- 2) Perlu pengembangan wisata yang bersifat edukatif dan ramah keluarga serta anak-anak;
- 3) Wisata keluarga yang dibangun harus memperhatikan aspek pembangunan manusia sebagai Masyarakat Sadar Wisata;
- 4) Sektor pariwisata tentunya juga harus didukung kesadaran masyarakat dalam sisi pelestarian dan

keamanan, untuk itu perlu adanya pembinaan dan pendekatan dari Dinas terkait.

4.1.4 Sasaran Makro Nasional, Provinsi dan Kabupaten

Sasaran makro pembangunan Tahun 2023 untuk Nasional, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah disajikan dalam table 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2023 Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah

NO.	INDIKATOR	TARGET 2023		
		NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,9 %	3,5 – 4,5 %	4,5 – 5,0 %
2	Kemiskinan	7 - 8 %	11,4 – 11,9 %	11 – 12 %
3	Pengangguran	5,3 - 6 %	4 – 4,3 %	3 - 4 %
4	IPM	73,29 – 73,35	70,3 – 70,6	71 – 72
5	PDRB Perkapita (Juta Rp)		43 - 44	54-55

4.2. Prioritas dan Sasarana Pembangunan

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menetapkan tema pembangunan tahun 2023 untuk mendukung tema nasional dan tema Provinsi Lampung. Keselarasan tema pembangunan Kabupaten Lampung Tengah dengan tema pembangunan nasional dan Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2

**Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, Indikasi Tema Pembangunan
Provinsi Lampung dan Tema Kabupaten Pembangunan Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2023**

TEMA PEMBANGUNAN		
NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN
Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Penguatan Ekonomi Yang Inklusif Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah Serta Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan

Tabel 4.3

**Penyelarasan Sasaran Prioritas Nasional dan Sasaran Prioritas
Pembangunan Daerah Tahun 2023**

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2023		
NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN
1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	2 Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup
3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	3 Pembangunan Infrastruktur	3 Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif
4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4 Reformasi Birokrasi	4 Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)
5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	5 Kehidupan masyarakat yang Religius, Aman, Berbudaya	5 Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat
6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	6 Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	
7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		

Tabel 4.4
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten, Prioritas Daerah Provinsi dengan Prioritas Pembangunan Nasional

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN	PROGRAM	PAGU
1	Meningkatkan Sdm Berkualitas Dan Berdaya Saing	1.1 Pengendalian Penduduk Dan Tata Kelola Kependudukan	1 Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	1.1 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	1 Penguatan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	292.014.959.550
		1.2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		1.2 Peningkatan Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan Menengah		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	10.516.782.000
		1.3 Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan		1.3 Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	139.071.796.880
		1.4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas		1.4 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.824.727.700
		1.5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, Dan Pemuda		1.5 Meningkatnya Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	592.816.000
		1.6 Pengentasan Kemiskinan				Program Pemberdayaan	628.926.900

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN	PROGRAM	PAGU
		1.7 Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing				Masyarakat Bidang Kesehatan	
						Program Pemberdayaan Sosial	680.516.700
						Program Rehabilitasi Sosial	890.912.200
						Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	557.468.800
						Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1.290.262.130
						Program Perlindungan Perempuan	234.175.000
						Program Peningkatan Kualitas Keluarga	170.550.000
						Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	49.800.000
						Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	313.110.000
						Program Perlindungan Khusus Anak	211.636.400

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN	PROGRAM	PAGU
						Program Pendaftaran Penduduk	156.525.400
						Program Pencatatan Sipil	154.941.000
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	51.899.500
						Program Pengelolaan Profil Kependudukan	12.740.000
						Program Penataan Desa	125.984.900
						Program Peningkatan Kerja Sama Desa	5.122.328.002
						Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.295.650.098
						Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	960.936.400
						Program Pengendalian Penduduk	218.775.000

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN	PROGRAM	PAGU
						Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	6.385.211.000
						Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	5.473.120.000
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.166.434.200
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.540.115.000
						Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	370.000.000
						Program Pengembangan Kebudayaan	1.442.060.000
						Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	164.131.900
						Program Pembinaan Perpustakaan	423.425.800

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN	PROGRAM	PAGU
						Program Pengelolaan Arsip	156.199.800
						Program Perizinan Penggunaan Arsip	20.000.000
						Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	140.750.000
2	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2.1 Infrastruktur Pelayanan Dasar	2 Pembangunan Infrastruktur	2.1 Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	2 Pemerataan Kualitas Sarana Dan Prasarana Dan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	10.543.696.121
		2.2 Infrastruktur Ekonomi		2.2 Penguatan Sarana Dan Prasarana Dasar Wilayah		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4.461.992.920
		2.3 Infrastruktur Perkotaan		2.3 Terwujudnya Ketahanan Dan Kemandirian Energi		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.339.205.600
		2.4 Energi Dan Ketenagalistrikan				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	408.615.767
		2.5 Transformasi Digital				Program Pengembangan Permukiman	573.236.200
					Program Penataan Bangunan Gedung	24.551.926.530	
					Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	150.587.200	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN	PROGRAM	PAGU
						Program Penyelenggaraan Jalan	211.593.718.778
						Program Pengembangan Jasa Konstruksi	836.048.100
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	354.863.200
						Program Pengembangan Perumahan	33.041.900
						Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	6.162.574.700
						Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	2.929.049.831
						Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	25.715.500
						Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	133.340.800
						Program Perencanaan Lingkungan Hidup	690.000.000

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN	PROGRAM	PAGU
						Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.006.959.500
3	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3.1	Pembangunan Wilayah Sumatera			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	388.280.000
		3.2	Pembangunan Wilayah Jawa-Bali			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	76.000.000
		3.3	Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	123.500.000
		3.4	Pembangunan Wilayah Kalimantan			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha	53.000.000

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN	PROGRAM	PAGU
						Yang Terkait Dengan Pplh	
		3.5 Pembangunan Wilayah Sulawesi				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	201.000.000
		3.6 Pembangunan Wilayah Maluku				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	142.000.000
		3.7 Pembangunan Wilayah Papua				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	43.000.000
4	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim	1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	3 Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana	3.1 Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Iklh)		Program Pengelolaan Persampahan	522.150.000
		2 Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim		3.2 Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	2.468.186.800
		3 Pembangunan Rendah Karbon		3.3 Pembangunan Rendah Karbon		Program Pengelolaan Pelayaran	134.750.000

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN	PROGRAM	PAGU
5	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan	5.1 Pemenuhan Kebutuhan Energi Dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (Ebt)	4 Peningkatan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan	4.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	3 Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Inklusif	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	165.750.100
		5.2 Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi		4.2 Meningkatkan Kesejahteraan Petani		Program Penempatan Tenaga Kerja	240.749.700
		5.3 Peningkatan Ketersediaan, Akses Dan Kualitas Konsumsi Pangan		4.3 Menjaga Stabilitas Harga		Program Hubungan Industrial	140.749.750
		5.4 Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, Dan Kelautan		4.4 Menurunnya Kemiskinan		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	7.000.000.000
		5.5 Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (Umkm) Dan Koperasi				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.689.607.300

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN	PROGRAM	PAGU
		5.6 Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi				Program Penanganan Kerawanan Pangan	203.541.000
		5.7 Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi Dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (Tkdn)				Program Pengawasan Keamanan Pangan	175.713.100
		5.8 Penguatan Pilar Pertumbuhan Dan Daya Saing Ekonomi				Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	223.248.000
						Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	154.950.000
						Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	92.330.000
						Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	54.868.000
						Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	406.081.100

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN	PROGRAM	PAGU
						Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	154.353.000
						Program Pengembangan Ukm	224.150.000
						Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	114.907.400
						Program Promosi Penanaman Modal	195.826.500
						Program Pelayanan Penanaman Modal	173.423.500
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	474.163.700
						Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	143.878.900
						Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	237.155.000
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	473.764.500

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN	PROGRAM	PAGU
						Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	70.420.500
						Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	431.581.100
						Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	827.076.000
						Program Pemasaran Pariwisata	893.057.000
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	521.980.000
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.062.086.950
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.165.539.000
						Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	491.384.900

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN	PROGRAM	PAGU
						Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	580.048.000
						Program Penyuluhan Pertanian	2.611.760.035
						Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	24.128.200
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	691.027.700
						Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.066.437.400
						Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	268.561.500
						Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	87.681.900
						Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	2.297.718.900
						Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	196.730.400

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN	PROGRAM	PAGU				
6	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6.1	Konsolidasi Demokrasi	5	Reformasi Birokrasi	5.1	Meningkatnyankualitas Implementasi Reformasi Birokrasi	4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima (Profesional, Progresif, Bersih Dan Akuntabel)	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	4.464.823.600
		6.2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika			2.787.800.871	
		6.3	Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			34.928.500	
		6.4	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi			176.064.599	
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	15.711.992.750								
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.783.882.500								
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	30.581.777.100								
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.889.728.600								

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN	PROGRAM	PAGU
						Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.656.047.425
						Program Pengelolaan Keuangan Daerah	509.054.989.197
						Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	589.629.970
						Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.084.809.150
						Program Kepegawaian Daerah	2.802.346.500
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.583.492.700
						Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.601.045.425
						Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.223.495.400
						Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	680.678.600

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN	PROGRAM	PAGU
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	211.677.200
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.838.343.940
						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	5.495.699.200
						Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	314.350.000
						Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	201.448.000
						Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.456.806.494

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN	PROGRAM	PAGU
						Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	29.669.065.000
						Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	219.036.000
						Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	509.594.000
7	Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan	7.1 Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter	6 Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman Dan Berbudaya	6.1 Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	5 Peningkatan Kondusifitas Wilayah Dan Harmoni Sosial Masyarakat	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	201.448.000

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN	PROGRAM	PAGU
		7.2 Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia		6.2 Meningkatnya Kualitas Demokrasi Di Daerah		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.456.806.494
		7.3 Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial		6.3 Meningkatnya Pelestarian Dan Pemanfaatan Budaya		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	29.669.065.000
		7.4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	219.036.000

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN	PROGRAM	PAGU
						Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	509.594.000
						Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	847.923.800
						Program Penanggulangan Bencana	491.758.100
						Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	453.892.832
						Program Penanganan Bencana	511.533.700

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Secara rinci dukungan kegiatan pembangunan terhadap pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Pemetaan Dukungan Kegiatan Terhadap Standar Pelayanan Minimal

NO	SPM	TARGET	PRIORITAS DAERAH
A	SPM Bidang Pendidikan		
1	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
2	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	
3	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	
B	SPM Bidang Kesehatan		
1	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Penguatan kualitas dan daya saing

NO	SPM	TARGET	PRIORITAS DAERAH
2	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	sumber daya manusia
3	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	
4	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	
5	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	
6	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	
7	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	
8	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	
9	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	
10	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	
11	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	
12	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	
C	SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Pemerataan kualitas sarana dan

NO	SPM	TARGET	PRIORITAS DAERAH
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	prasarana dan tata kelola lingkungan hidup
D	SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Pemerataan kualitas sarana dan
2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	prasarana dan tata kelola lingkungan hidup
E	SPM Bidang Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	
F	SPM Bidang Sosial		
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Penguatan kualitas dan daya saing

NO	SPM	TARGET	PRIORITAS DAERAH
2	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	sumber daya manusia
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	
4	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	
5	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program dan kegiatan yang berhasil tentunya membawa dampak positif bagi kemajuan daerah serta peningkatan bagi kesejahteraan masyarakat secara langsung, karenanya dalam perencanaan diperlukan data-data hasil pembangunan sebelumnya. Rencana kerja Program/kegiatan dan pendanaan daerah untuk anggaran 2023.



Tabel 5.1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	01						837,749,787,690						804,274,441,890					
1	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan	persen		persen	100 persen	721,260,546,140			100 persen	688,534,800,740		
1	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan	persen		persen	100 persen	253,213,200			100 persen	120,634,200		
1	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	181,107,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	2 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 dokumen	72,105,700			Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	5 dokumen	120,634,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen penganggaran	persen		persen	100 persen	720,351,934,640				100 persen	687,980,253,940	
1	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				6310 Orang/bulan	717,980,253,940		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	6310 Orang/bulan	687,980,253,940	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor dalam pelaksana Tugas ASN				15 orang	2,331,330,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	15 orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.02	08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 dokumen	40,350,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	2 dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	persen		persen	85 persen	114,288,300				85 persen	56,212,600	
1	01	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5,247,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	5 Paket	5,413,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	44,949,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	5 Paket	44,949,600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	64,091,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	12 Laporan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	persen		persen	85 persen	113,447,500						85 persen	116,500,000	
1 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	113,447,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		6 Unit	116,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	persen		persen	85 persen	261,200,000						85 persen	261,200,000	
1 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan	261,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		12 bulan	261,200,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	persen		persen	85 persen	166,462,500						85 persen	0	
1 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	140,510,000				Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		3 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25,952,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	persen		persen	100 persen	105,972,459,550						100 persen	103,907,776,400	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	persen		persen	100 persen	62,706,994,550						100 persen	62,573,788,900	
1 01 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah lokal sekolah yang mendapat rehab atau pembangunan				23 paket	1,605,918,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Lampung Tengah	23 paket	2,523,150,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan bantuan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				418 sekolah	59,186,669,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Lampung Tengah	418 sekolah	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				39 Paket	535,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Lampung Tengah	39 Paket	59,300,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				500 paket	160,424,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Lampung Tengah	500 paket	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1054 Satuan Pendidikan	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Lampung Tengah	1054 Satuan Pendidikan	42,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				2500 Peserta Didik	532,761,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Lampung Tengah	2500 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				150 Orang	365,519,950			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Lampung Tengah	150 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				996 Satuan Pendidikan	275,202,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Lampung Tengah	996 Satuan Pendidikan	225,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	persen		persen	100 persen	16,631,625,200						100 persen	16,172,745,500	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah lokal sekolah yang mendapatkan pembangunan/rehabilitasi				12 paket	1,475,258,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Lampung Tengah	12 paket	1,475,303,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapat bantuan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	14,372,442,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Lampung Tengah	5 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia				400 siswa	136,435,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Lampung Tengah	400 siswa	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Lampung Tengah	150 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.02	46	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel yang tersedia					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Lampung Tengah	10 paket	175,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Siswa PAUD	persen		persen	100 persen	21,053,368,200			100 persen	19,818,314,700		
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				3 Unit	290,510,000		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	3 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia				7600 paket	316,922,500		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	7600 paket	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				1300 peserta didik	133,940,000		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	1300 peserta didik	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				200 Orang	246,185,500		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	200 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				741 Satuan Pendidikan	514,210,200		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	741 Satuan Pendidikan	367,374,700	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				741 Satuan Pendidikan	19,551,600,000		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	741 Satuan Pendidikan	19,375,200,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Presentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) Siswa Kesetaraan	persen		persen	70 persen	5,580,471,600			70 persen	5,342,927,300		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun di SKB				1 Unit	218,642,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SKB		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	1 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia				580 Paket	126,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	580 Paket	449,527,300	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				4 Satuan Pendidikan	342,429,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	4 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				580 Satuan Pendidikan	4,893,400,000				Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	580 Satuan Pendidikan	4,893,400,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Presentase Guru yang bersertifikasi	persen		persen	62 persen	10,516,782,000						62 persen	11,831,864,750	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Presentase Guru yang bersertifikasi	persen		persen	62 persen	10,516,782,000						62 persen	11,831,864,750	
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah guru yang mendapatkan tambahan penghasilan dan mendapatkan peningkatan kompetensinya				8313 Laporan	10,516,782,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		8313 Laporan	11,831,864,750	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						1,606,191,900							1,147,142,650	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	persen		persen	38 persen	1,442,060,000						38 persen	752,644,350	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	persen		persen	38 persen	963,232,600						38 persen	0	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah peserta kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				160 orang	641,512,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		160 orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan											DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	persen		persen	3 persen	253,827,400				3 persen	752,644,350		
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah peserta kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				600 orang	253,827,400				600 orang	752,644,350	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota						225,000,000					0		
2	22	02	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				7 Unit	225,000,000				7 Unit		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	persen		persen	20,60 persen	164,131,900				20,60 persen	394,498,300		
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						54,951,000					394,498,300		
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah peserta kegiatan Penetapan Cagar Budaya				180 peserta	54,951,000			0	180 peserta	394,498,300	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						109,180,900					0		
2	22	05	2.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				2 Objek	109,180,900				2 Objek		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						147,580,000						0	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						147,580,000					0		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						147,580,000					0		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				157 Satuan Pendidikan	147,580,000				157 Satuan Pendidikan		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						162,620,000						0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						162,620,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						162,620,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	162,620,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						181,420,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						181,420,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						181,420,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	181,420,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						230,300,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						230,300,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						230,300,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	230,300,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						205,860,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						205,860,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						205,860,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	205,860,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						140,060,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						140,060,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						140,060,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	140,060,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						18,800,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						18,800,000						0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						18,800,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	18,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						129,720,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						129,720,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						129,720,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	129,720,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						73,320,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						73,320,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						73,320,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	73,320,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						125,020,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						125,020,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						125,020,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	125,020,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						174,840,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						174,840,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						174,840,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	174,840,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						71,440,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						71,440,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						71,440,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	71,440,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						113,740,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						113,740,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						113,740,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	113,740,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						247,220,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						247,220,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						247,220,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	247,220,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						249,100,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						249,100,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						249,100,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	249,100,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						123,140,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						123,140,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						123,140,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	123,140,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						146,640,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						146,640,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						146,640,000								0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	146,640,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	355,320,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	127,840,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	281,060,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	178,600,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	182,360,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	169,200,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	65,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	58,280,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	189,880,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	144,760,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	144,760,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						305,500,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						305,500,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						305,500,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	305,500,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						77,080,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						77,080,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						77,080,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	77,080,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						172,960,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						172,960,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						172,960,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	172,960,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						98,700,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						98,700,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						98,700,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	98,700,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						160,740,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						160,740,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						160,740,000								0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	160,740,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	169,200,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	198,340,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	174,840,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	244,400,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	153,220,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	174,840,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	284,256,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	202,100,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	398,560,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	265,080,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						222,780,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						222,780,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						222,780,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	222,780,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						209,620,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						209,620,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						209,620,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	209,620,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						252,860,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						252,860,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						252,860,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	252,860,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						211,500,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						211,500,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						211,500,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	211,500,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						174,840,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						174,840,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						174,840,000								0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	174,840,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	357,576,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	159,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	91,180,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	380,700,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	153,220,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						631,116,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						631,116,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						631,116,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	631,116,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						218,080,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						218,080,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						218,080,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	218,080,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						9,400,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						9,400,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						9,400,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	9,400,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						352,500,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						352,500,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						352,500,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				683 Ruang	352,500,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						93,060,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						93,060,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						93,060,000								0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	93,060,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	125,020,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	312,080,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	227,480,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				684 Satuan Pendidikan	156,040,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		684 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				684 Satuan Pendidikan	308,320,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		684 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	308,320,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						125,020,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						125,020,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						125,020,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	125,020,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						325,240,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						325,240,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						325,240,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	325,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						162,620,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						162,620,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						162,620,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	162,620,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						209,620,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						209,620,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						209,620,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	209,620,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						250,980,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						250,980,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						250,980,000								0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	250,980,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	132,540,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	208,680,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	134,420,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	231,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	236,880,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	236,880,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	153,220,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	282,940,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	116,560,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	247,220,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	65,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	65,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	109,980,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	346,296,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	104,340,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	233,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	76,140,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	98,700,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	302,680,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	168,260,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	143,820,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	69,560,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	61,100,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	86,480,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	135,360,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	126,900,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	100,580,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	100,580,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	165,440,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	183,740,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	161,680,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	144,760,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	56,400,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						188,940,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						188,940,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						188,940,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	188,940,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						74,260,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						74,260,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						74,260,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	74,260,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						111,860,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						111,860,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						111,860,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	111,860,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						134,420,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						134,420,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						134,420,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	134,420,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						73,320,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						73,320,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						73,320,000								0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	73,320,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.201	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	169,200,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.201	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	269,780,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.201	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	78,960,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.201	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	100,580,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.201	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	178,600,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	178,600,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						136,300,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						136,300,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						136,300,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	136,300,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						185,180,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						185,180,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						185,180,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	185,180,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						292,340,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						292,340,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						292,340,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	292,340,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						114,680,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						114,680,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						114,680,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	114,680,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						143,820,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						143,820,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						143,820,000								0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	143,820,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	362,840,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	288,580,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	272,600,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	125,960,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	149,460,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	134,420,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	172,960,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	148,520,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	98,700,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	63,920,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						116,560,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						116,560,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						116,560,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	116,560,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						117,500,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						117,500,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						117,500,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	117,500,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						263,200,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						263,200,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						263,200,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	263,200,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						190,820,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						190,820,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						190,820,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	190,820,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						62,980,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						62,980,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						62,980,000								0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	62,980,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	191,760,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	163,560,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	63,920,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	238,760,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	176,720,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	74,260,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	83,660,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	101,520,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	58,280,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	91,180,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	91,180,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						72,380,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						72,380,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						72,380,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	72,380,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						202,100,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						202,100,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						202,100,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	202,100,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						64,860,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						64,860,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						64,860,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	64,860,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						124,080,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						124,080,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						124,080,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	124,080,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						103,400,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						103,400,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						103,400,000								0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	103,400,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	211,500,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	59,220,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	88,360,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	121,260,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	298,920,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						15,980,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						15,980,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						15,980,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	15,980,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						259,816,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						259,816,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						259,816,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	259,816,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						155,100,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						155,100,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						155,100,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	155,100,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						282,000,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						282,000,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						282,000,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	282,000,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						111,860,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						111,860,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						111,860,000								0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	111,860,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	269,780,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	159,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	143,820,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	202,100,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	148,520,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	148,520,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	409,840,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	283,880,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	66,740,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	56,400,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	80,840,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	275,420,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	172,960,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	487,860,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	327,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	112,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	38,540,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	121,260,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	196,460,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	292,340,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	104,340,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	248,160,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	153,220,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	139,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	217,140,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	164,500,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	164,500,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	139,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	98,700,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	116,560,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	264,140,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	160,740,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	72,380,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	338,400,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	191,760,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	68,620,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	77,080,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	338,400,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	99,640,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	167,320,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	119,380,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	111,860,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	111,860,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	92,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	109,980,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	344,980,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	77,080,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	109,980,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	168,260,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	92,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	189,880,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	144,760,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	189,880,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	109,040,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	137,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	109,980,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	74,260,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	233,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	116,560,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	93,060,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	96,820,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	175,780,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	123,140,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	123,140,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	159,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	193,640,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	107,160,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	63,920,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	300,236,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	300,236,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						150,400,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						150,400,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						150,400,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	150,400,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						217,140,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						217,140,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						217,140,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	217,140,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						98,700,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						98,700,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						98,700,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	98,700,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						169,200,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						169,200,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						169,200,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	169,200,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						236,880,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						236,880,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						236,880,000								0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	236,880,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	109,980,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	186,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	64,860,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	106,220,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	124,080,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						116,560,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						116,560,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						116,560,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	116,560,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						55,460,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						55,460,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						55,460,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	55,460,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						106,220,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						106,220,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						106,220,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	106,220,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						139,120,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						139,120,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						139,120,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	139,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						204,920,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						204,920,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						204,920,000								0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	204,920,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	116,560,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	109,980,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	125,960,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	349,680,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	89,300,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	89,300,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	70,500,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	46,060,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	92,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	66,740,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	282,000,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	78,960,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	89,300,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	92,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	137,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	78,020,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	192,700,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	91,180,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	172,020,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	328,060,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	61,100,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	122,200,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	68,620,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	217,140,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	194,580,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	177,660,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	223,720,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	247,220,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	124,080,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	162,620,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	121,260,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						187,060,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						187,060,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						187,060,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	187,060,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						238,760,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						238,760,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						238,760,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	238,760,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						141,940,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						141,940,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						141,940,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	141,940,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						65,800,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						65,800,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						65,800,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	65,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						93,060,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						93,060,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						93,060,000								0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	93,060,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	40,420,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	196,460,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	141,000,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	125,960,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	140,060,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	140,060,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						408,900,000								0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						408,900,000								0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						408,900,000								0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	408,900,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						73,320,000								0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						73,320,000								0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						73,320,000								0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	73,320,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						230,300,000								0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						230,300,000								0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						230,300,000								0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	230,300,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						266,020,000								0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						266,020,000								0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						266,020,000								0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	266,020,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						94,940,000								0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						94,940,000								0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						94,940,000								0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	94,940,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	101,520,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	74,260,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	131,600,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	187,060,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	86,480,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	62,040,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	99,640,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	99,640,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	62,980,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	97,760,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	148,520,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	125,020,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	88,360,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	233,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	232,180,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	232,180,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	246,280,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	62,040,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	33,840,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	79,900,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	178,600,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						156,980,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						156,980,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						156,980,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	156,980,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						296,100,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						296,100,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						296,100,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	296,100,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						61,100,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						61,100,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						61,100,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	61,100,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						68,620,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						68,620,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						68,620,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	68,620,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						120,320,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						120,320,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						120,320,000								0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	120,320,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	233,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	110,920,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	137,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	50,760,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	87,420,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	121,260,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	243,460,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	82,720,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	114,680,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	219,020,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	243,460,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	166,380,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	98,700,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	182,360,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	50,760,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	71,440,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	85,540,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	43,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	113,740,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	141,000,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						78,020,000								0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						78,020,000								0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						78,020,000								0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	78,020,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						52,640,000								0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						52,640,000								0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						52,640,000								0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	52,640,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						91,180,000								0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						91,180,000								0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						91,180,000								0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	91,180,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						94,000,000								0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						94,000,000								0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						94,000,000								0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	94,000,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						96,820,000								0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						96,820,000								0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						96,820,000								0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	96,820,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	31,960,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	46,060,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						143,820,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						226,540,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						169,200,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						444,620,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						444,620,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						444,620,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						132,540,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						132,540,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						132,540,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						132,540,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						185,180,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						185,180,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						185,180,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						185,180,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						221,840,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						221,840,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						221,840,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						221,840,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						303,620,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						303,620,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						303,620,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						303,620,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						149,460,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						149,460,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						149,460,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						149,460,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						263,200,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						263,200,000						0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						263,200,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						263,200,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						253,800,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						253,800,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						253,800,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						253,800,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						159,800,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						159,800,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						159,800,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						159,800,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						179,540,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						179,540,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						179,540,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						179,540,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						199,280,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						199,280,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						199,280,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						199,280,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						106,220,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						106,220,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						106,220,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						106,220,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						170,140,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						170,140,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						170,140,000						0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						170,140,000								DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						158,860,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						158,860,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						158,860,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						158,860,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						89,300,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						89,300,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						89,300,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						89,300,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						203,040,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						203,040,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						203,040,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						203,040,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						168,260,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						168,260,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						168,260,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						168,260,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						166,380,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						166,380,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						166,380,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						166,380,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						93,060,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						93,060,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						93,060,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						93,060,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01						176,720,000							0	
1	01	02					176,720,000							0	
1	01	02	2.01				176,720,000							0	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		176,720,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01						92,120,000							0	
1	01	02					92,120,000							0	
1	01	02	2.01				92,120,000							0	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		92,120,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01						107,160,000							0	
1	01	02					107,160,000							0	
1	01	02	2.01				107,160,000							0	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		107,160,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01						115,620,000							0	
1	01	02					115,620,000							0	
1	01	02	2.01				115,620,000							0	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		115,620,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01						86,480,000							0	
1	01	02					86,480,000							0	
1	01	02	2.01				86,480,000							0	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		86,480,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01						120,320,000							0	
1	01	02					120,320,000							0	
1	01	02	2.01				120,320,000							0	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		120,320,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01						41,360,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						41,360,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						41,360,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	41,360,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						72,380,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						72,380,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						72,380,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						72,380,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						170,140,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						170,140,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						170,140,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						170,140,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						125,020,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						125,020,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						125,020,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						125,020,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						65,800,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						65,800,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						65,800,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						65,800,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						38,540,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						38,540,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						38,540,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						38,540,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						161,680,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						161,680,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						161,680,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						161,680,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						179,540,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						179,540,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						179,540,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						179,540,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						117,500,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						117,500,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						117,500,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						117,500,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						185,180,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						185,180,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						185,180,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						185,180,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						195,520,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						195,520,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						195,520,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						195,520,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						168,260,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						168,260,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						168,260,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						168,260,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						49,820,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						49,820,000						0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						49,820,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						49,820,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						47,940,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						47,940,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						47,940,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						47,940,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						132,540,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						132,540,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						132,540,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						132,540,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						71,440,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						71,440,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						71,440,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						71,440,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						188,940,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						188,940,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						188,940,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						188,940,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						60,160,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						60,160,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						60,160,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						60,160,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						194,580,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						194,580,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						194,580,000						0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						194,580,000								DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						192,700,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						192,700,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						192,700,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						192,700,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						82,720,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						82,720,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						82,720,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						82,720,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						81,780,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						81,780,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						81,780,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						81,780,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						214,320,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						214,320,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						214,320,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						214,320,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						69,560,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						69,560,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						69,560,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						69,560,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						189,880,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						189,880,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						189,880,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						189,880,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01					122,200,000							0		
1	01	02				122,200,000							0		
1	01	02	2.01			122,200,000							0		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	122,200,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01					101,520,000							0		
1	01	02				101,520,000							0		
1	01	02	2.01			101,520,000							0		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	101,520,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01					98,700,000							0		
1	01	02				98,700,000							0		
1	01	02	2.01			98,700,000							0		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	98,700,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01					246,280,000							0		
1	01	02				246,280,000							0		
1	01	02	2.01			246,280,000							0		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	246,280,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01					175,780,000							0		
1	01	02				175,780,000							0		
1	01	02	2.01			175,780,000							0		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	175,780,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01					188,000,000							0		
1	01	02				188,000,000							0		
1	01	02	2.01			188,000,000							0		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	188,000,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01					128,780,000							0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						128,780,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						128,780,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						128,780,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						93,060,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						93,060,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						93,060,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						93,060,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						90,240,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						90,240,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						90,240,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						90,240,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						97,760,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						97,760,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						97,760,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						97,760,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						50,760,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						50,760,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						50,760,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						50,760,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						114,680,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						114,680,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						114,680,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						114,680,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						111,860,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						111,860,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						111,860,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						111,860,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						190,820,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						190,820,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						190,820,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						190,820,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						102,460,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						102,460,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						102,460,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						102,460,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						134,420,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						134,420,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						134,420,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						134,420,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						91,180,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						91,180,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						91,180,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						91,180,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						68,620,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						68,620,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						68,620,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						68,620,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						103,400,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						103,400,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						103,400,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						103,400,000								DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						94,000,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						94,000,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						94,000,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						94,000,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						156,040,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						156,040,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						156,040,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						156,040,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						96,820,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						96,820,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						96,820,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						96,820,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						105,280,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						105,280,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						105,280,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						105,280,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						69,560,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						69,560,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						69,560,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						69,560,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						199,280,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						199,280,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						199,280,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	199,280,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						129,720,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						218,080,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						205,860,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						187,060,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						158,860,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						149,460,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						149,460,000								DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						111,860,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						111,860,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						111,860,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						111,860,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						236,880,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						236,880,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						236,880,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						236,880,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						231,240,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						231,240,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						231,240,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						231,240,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						141,000,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						141,000,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						141,000,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						141,000,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						207,740,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						207,740,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						207,740,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						207,740,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						139,120,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						139,120,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						139,120,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						139,120,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01						297,980,000							0	
1	01	02					297,980,000							0	
1	01	02	2.01				297,980,000							0	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		297,980,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01						101,520,000							0	
1	01	02					101,520,000							0	
1	01	02	2.01				101,520,000							0	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		101,520,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01						179,540,000							0	
1	01	02					179,540,000							0	
1	01	02	2.01				179,540,000							0	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		179,540,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01						62,100,000							0	
1	01	02					62,100,000							0	
1	01	02	2.01				62,100,000							0	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		62,100,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01						194,580,000							0	
1	01	02					194,580,000							0	
1	01	02	2.01				194,580,000							0	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		194,580,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01						336,520,000							0	
1	01	02					336,520,000							0	
1	01	02	2.01				336,520,000							0	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		336,520,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01						324,676,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						324,676,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						324,676,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						324,676,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						226,540,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						226,540,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						226,540,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						226,540,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						49,820,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						49,820,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						49,820,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						49,820,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						152,280,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						152,280,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						152,280,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						152,280,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						251,920,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						251,920,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						251,920,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						251,920,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						287,640,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						287,640,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						287,640,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						287,640,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						73,320,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						73,320,000						0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						73,320,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						73,320,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						91,180,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						91,180,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						91,180,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						91,180,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						106,220,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						106,220,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						106,220,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						106,220,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						211,500,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						211,500,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						211,500,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						211,500,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						136,300,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						136,300,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						136,300,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						136,300,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						132,540,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						132,540,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						132,540,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						132,540,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						106,220,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						106,220,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						106,220,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						106,220,000								DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						145,700,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						145,700,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						145,700,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						145,700,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						119,380,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						119,380,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						119,380,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						119,380,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						292,716,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						292,716,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						292,716,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						292,716,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						98,700,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						98,700,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						98,700,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						98,700,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						78,960,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						78,960,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						78,960,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						78,960,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						54,520,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						54,520,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						54,520,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						54,520,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							0		
1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							0		
1	01	02	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0		
1	01	02	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							0		
1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							0		
1	01	02	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0		
1	01	02	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							0		
1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							0		
1	01	02	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0		
1	01	02	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							0		
1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							0		
1	01	02	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0		
1	01	02	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							0		
1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							0		
1	01	02	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0		
1	01	02	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							0		
1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							0		
1	01	02	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0		
1	01	02	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						161,680,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						161,680,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						161,680,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						115,620,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						115,620,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						115,620,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						115,620,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						46,060,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						46,060,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						46,060,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						46,060,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						89,300,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						89,300,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						89,300,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						89,300,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						91,180,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						91,180,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						91,180,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						91,180,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						162,620,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						162,620,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						162,620,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						162,620,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						72,380,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						72,380,000						0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						72,380,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						72,380,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						56,400,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						56,400,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						56,400,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						56,400,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						54,520,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						54,520,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						54,520,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						54,520,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						109,980,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						109,980,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						109,980,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						109,980,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						62,040,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						62,040,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						62,040,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						62,040,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						56,400,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						56,400,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						56,400,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						56,400,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						87,420,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						87,420,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						87,420,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						87,420,000								DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						103,400,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						103,400,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						103,400,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						103,400,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						125,960,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						125,960,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						125,960,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						125,960,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						156,980,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						156,980,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						156,980,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						156,980,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						157,920,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						157,920,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						157,920,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						157,920,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						93,060,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						93,060,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						93,060,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						93,060,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						214,320,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						214,320,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						214,320,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						214,320,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							0		
1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							0		
1	01	02	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0		
1	01	02	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							0		
1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							0		
1	01	02	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0		
1	01	02	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							0		
1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							0		
1	01	02	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0		
1	01	02	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							0		
1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							0		
1	01	02	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0		
1	01	02	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							0		
1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							0		
1	01	02	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0		
1	01	02	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							0		
1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							0		
1	01	02	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0		
1	01	02	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						158,860,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						158,860,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						158,860,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						191,760,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						191,760,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						191,760,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						191,760,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						188,000,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						188,000,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						188,000,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						188,000,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						174,840,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						174,840,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						174,840,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						174,840,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						122,200,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						122,200,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						122,200,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						122,200,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						163,560,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						163,560,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						163,560,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						163,560,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						94,000,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						94,000,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						94,000,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						94,000,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						250,040,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						250,040,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						250,040,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						250,040,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						107,160,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						107,160,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						107,160,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						107,160,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						133,480,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						133,480,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						133,480,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						133,480,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						238,760,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						238,760,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						238,760,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						238,760,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						251,920,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						251,920,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						251,920,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						251,920,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						78,960,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						78,960,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						78,960,000						0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						78,960,000								DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						188,000,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						188,000,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						188,000,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						188,000,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						124,080,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						124,080,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						124,080,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						124,080,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						94,000,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						94,000,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						94,000,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						94,000,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						165,440,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						165,440,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						165,440,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						165,440,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						198,340,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						198,340,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						198,340,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						198,340,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						186,120,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						186,120,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						186,120,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						186,120,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01						107,160,000						0		
1	01	02					107,160,000						0		
1	01	02	2.01				107,160,000						0		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		107,160,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01						86,480,000						0		
1	01	02					86,480,000						0		
1	01	02	2.01				86,480,000						0		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		86,480,000						0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01						129,720,000						0		
1	01	02					129,720,000						0		
1	01	02	2.01				129,720,000						0		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	683 Satuan Pendidikan	129,720,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01						110,920,000						0		
1	01	02					110,920,000						0		
1	01	02	2.01				110,920,000						0		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	683 Satuan Pendidikan	110,920,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01						183,300,000						0		
1	01	02					183,300,000						0		
1	01	02	2.01				183,300,000						0		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	683 Satuan Pendidikan	183,300,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01						184,240,000						0		
1	01	02					184,240,000						0		
1	01	02	2.01				184,240,000						0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	184,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						110,920,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						110,920,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						110,920,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	110,920,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						174,840,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						174,840,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						174,840,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	174,840,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						179,540,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						179,540,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						179,540,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	179,540,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						195,520,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						195,520,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						195,520,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	195,520,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						137,240,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						137,240,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						137,240,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	137,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	01						147,580,000							0			
1	01	02					147,580,000							0			
1	01	02	2.01				147,580,000							0			
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	147,580,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	01						133,480,000							0			
1	01	02					133,480,000							0			
1	01	02	2.01				133,480,000							0			
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	133,480,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	01						216,200,000							0			
1	01	02					216,200,000							0			
1	01	02	2.01				216,200,000							0			
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	216,200,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Reguler	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	01						260,380,000							0			
1	01	02					260,380,000							0			
1	01	02	2.01				260,380,000							0			
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	260,380,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	01						86,480,000							0			
1	01	02					86,480,000							0			
1	01	02	2.01				86,480,000							0			
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	86,480,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01						172,960,000						0		
1	01	02					172,960,000						0		
1	01	02	2.01				172,960,000						0		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	683 Satuan Pendidikan	172,960,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01						124,080,000						0		
1	01	02					124,080,000						0		
1	01	02	2.01				124,080,000						0		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	683 Satuan Pendidikan	124,080,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01						50,760,000						0		
1	01	02					50,760,000						0		
1	01	02	2.01				50,760,000						0		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	683 Satuan Pendidikan	50,760,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01						123,140,000						0		
1	01	02					123,140,000						0		
1	01	02	2.01				123,140,000						0		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	683 Satuan Pendidikan	123,140,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01						106,220,000						0		
1	01	02					106,220,000						0		
1	01	02	2.01				106,220,000						0		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	683 Satuan Pendidikan	106,220,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01						111,860,000						0		
1	01	02					111,860,000						0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						111,860,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	111,860,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						109,980,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						109,980,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						109,980,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	109,980,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						176,720,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						176,720,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						176,720,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	176,720,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						325,240,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						325,240,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						325,240,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	325,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						120,320,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						120,320,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						120,320,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	120,320,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						123,140,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						123,140,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						123,140,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	123,140,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						212,440,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						212,440,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						212,440,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	212,440,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						84,600,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						84,600,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						84,600,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	84,600,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						104,340,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						104,340,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						104,340,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	104,340,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						94,000,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						94,000,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						94,000,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	94,000,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						290,836,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						290,836,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						290,836,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	290,836,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					268,840,000							0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					268,840,000							0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					268,840,000							0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	268,840,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					231,240,000							0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					231,240,000							0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					231,240,000							0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	231,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					143,820,000							0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					143,820,000							0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					143,820,000							0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	143,820,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					193,640,000							0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					193,640,000							0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					193,640,000							0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	193,640,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					257,560,000							0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					257,560,000							0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					257,560,000							0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	257,560,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					137,240,000							0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					137,240,000							0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						137,240,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	137,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						133,480,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						133,480,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						133,480,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	133,480,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						193,640,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						193,640,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						193,640,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	193,640,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						117,500,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						117,500,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						117,500,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	117,500,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						187,060,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						187,060,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						187,060,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	187,060,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						176,720,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						176,720,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						176,720,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	176,720,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						87,420,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						87,420,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						87,420,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	87,420,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						113,740,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						113,740,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						113,740,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	113,740,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						125,960,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						125,960,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						125,960,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	125,960,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						150,400,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						150,400,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						150,400,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	150,400,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						142,880,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						142,880,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						142,880,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	142,880,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					147,580,000							0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					147,580,000							0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					147,580,000							0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	147,580,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					104,340,000							0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					104,340,000							0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					104,340,000							0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	104,340,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					176,720,000							0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					176,720,000							0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					176,720,000							0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	176,720,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					83,660,000							0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					83,660,000							0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					83,660,000							0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	83,660,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					153,220,000							0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					153,220,000							0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					153,220,000							0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	153,220,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					108,100,000							0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					108,100,000							0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						108,100,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	108,100,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						101,520,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						101,520,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						101,520,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						101,520,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						184,240,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						184,240,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						184,240,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	184,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						100,580,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						100,580,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						100,580,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	100,580,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						92,120,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						92,120,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						92,120,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	92,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						161,680,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						161,680,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						161,680,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	161,680,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						94,000,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						94,000,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						94,000,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	94,000,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						148,520,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						148,520,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						148,520,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	148,520,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						249,100,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						249,100,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						249,100,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	249,100,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						231,240,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						231,240,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						231,240,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	231,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						173,900,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						173,900,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						173,900,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	173,900,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	01						105,280,000							0				
1	01	02					105,280,000							0				
1	01	02	2.01				105,280,000							0				
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	105,280,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	01						171,080,000							0				
1	01	02					171,080,000							0				
1	01	02	2.01				171,080,000							0				
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	171,080,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	01						271,660,000							0				
1	01	02					271,660,000							0				
1	01	02	2.01				271,660,000							0				
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	271,660,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	01						431,460,000							0				
1	01	02					431,460,000							0				
1	01	02	2.01				431,460,000							0				
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	431,460,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	01						56,400,000							0				
1	01	02					56,400,000							0				
1	01	02	2.01				56,400,000							0				
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	56,400,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					173,900,000							0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					173,900,000							0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					173,900,000							0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	173,900,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					90,240,000							0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					90,240,000							0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					90,240,000							0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	90,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					64,860,000							0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					64,860,000							0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					64,860,000							0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	64,860,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					202,100,000							0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					202,100,000							0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					202,100,000							0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	202,100,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					425,820,000							0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					425,820,000							0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					425,820,000							0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	425,820,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					166,380,000							0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						166,380,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						166,380,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	166,380,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						200,220,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						200,220,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						200,220,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	200,220,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						220,900,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						220,900,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						220,900,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	220,900,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						338,400,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						338,400,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						338,400,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	338,400,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						181,420,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						181,420,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						181,420,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	181,420,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						475,640,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						475,640,000						0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						475,640,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	475,640,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						237,820,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						237,820,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						237,820,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	237,820,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						243,460,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						243,460,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						243,460,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	243,460,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						356,260,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						356,260,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						356,260,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	356,260,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						147,580,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						147,580,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						147,580,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	147,580,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						397,620,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						397,620,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						397,620,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	397,620,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	375,060,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	156,980,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	162,620,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS					191,760,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	397,620,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01						233,120,000						0		
1	01	02					233,120,000						0		
1	01	02	2.01				233,120,000						0		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	683 Satuan Pendidikan	233,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	01						153,220,000						0		
1	01	02					153,220,000						0		
1	01	02	2.01				153,220,000						0		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	683 Satuan Pendidikan	153,220,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	01						262,260,000						0		
1	01	02					262,260,000						0		
1	01	02	2.01				262,260,000						0		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	683 Satuan Pendidikan	262,260,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	01						337,460,000						0		
1	01	02					337,460,000						0		
1	01	02	2.01				337,460,000						0		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	683 Satuan Pendidikan	337,460,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	01						465,300,000						0		
1	01	02					465,300,000						0		
1	01	02	2.01				465,300,000						0		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	683 Satuan Pendidikan	465,300,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					211,500,000							0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					211,500,000							0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					211,500,000							0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	211,500,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					284,820,000							0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					284,820,000							0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					284,820,000							0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	284,820,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					369,420,000							0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					369,420,000							0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					369,420,000							0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	369,420,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					161,680,000							0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					161,680,000							0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					161,680,000							0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	161,680,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					275,420,000							0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					275,420,000							0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					275,420,000							0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	275,420,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					534,860,000							0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					534,860,000							0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						534,860,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	534,860,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						64,860,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						64,860,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						64,860,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	64,860,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						451,200,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						451,200,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						451,200,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	451,200,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						209,620,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						209,620,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						209,620,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	209,620,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						400,440,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						400,440,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						400,440,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	400,440,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						64,860,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						64,860,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						64,860,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	64,860,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						272,600,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						272,600,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						272,600,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	272,600,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						152,280,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						152,280,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						152,280,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	152,280,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						439,920,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						439,920,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						439,920,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	439,920,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						258,500,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						258,500,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						258,500,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	258,500,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						66,740,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						66,740,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						66,740,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	66,740,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					282,940,000							0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					282,940,000							0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					282,940,000							0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	282,940,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					77,080,000							0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					77,080,000							0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					77,080,000							0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	77,080,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					101,520,000							0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					101,520,000							0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					101,520,000							0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	101,520,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					140,060,000							0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					140,060,000							0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					140,060,000							0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	140,060,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					94,940,000							0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					94,940,000							0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					94,940,000							0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	94,940,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					75,200,000							0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					75,200,000							0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						75,200,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	75,200,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						47,000,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						47,000,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						47,000,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	47,000,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						78,020,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						78,020,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						78,020,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	78,020,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						63,920,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						63,920,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						63,920,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	63,920,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						71,440,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						71,440,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						71,440,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	71,440,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						78,020,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						78,020,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						78,020,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	78,020,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	94,940,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	205,860,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	139,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	136,300,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	201,160,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	90,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	125,020,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	89,300,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	33,840,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	90,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	62,980,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	78,020,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	86,480,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	85,540,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	170,140,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	170,140,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	53,580,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	251,920,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS					41,360,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	64,860,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	111,860,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01						80,840,000							0					
1	01	02					80,840,000							0					
1	01	02	2.01				80,840,000							0					
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	80,840,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	01						128,780,000							0					
1	01	02					128,780,000							0					
1	01	02	2.01				128,780,000							0					
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	128,780,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	01						59,220,000							0					
1	01	02					59,220,000							0					
1	01	02	2.01				59,220,000							0					
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	59,220,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	01						48,880,000							0					
1	01	02					48,880,000							0					
1	01	02	2.01				48,880,000							0					
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	48,880,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	01						106,220,000							0					
1	01	02					106,220,000							0					
1	01	02	2.01				106,220,000							0					
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	106,220,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01							60,160,000							0	
1 01 02							60,160,000							0	
1 01 02 2.01							60,160,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	60,160,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1															
1 01							128,780,000							0	
1 01 02							128,780,000							0	
1 01 02 2.01							128,780,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	128,780,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1															
1 01							43,240,000							0	
1 01 02							43,240,000							0	
1 01 02 2.01							43,240,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	43,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1															
1 01							57,340,000							0	
1 01 02							57,340,000							0	
1 01 02 2.01							57,340,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	57,340,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1															
1 01							90,240,000							0	
1 01 02							90,240,000							0	
1 01 02 2.01							90,240,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	90,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1															
1 01							44,180,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						44,180,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						44,180,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	44,180,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						112,800,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						112,800,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						112,800,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	112,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						186,120,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						186,120,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						186,120,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	186,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						180,480,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						180,480,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						180,480,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	180,480,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						112,800,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						112,800,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						112,800,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	112,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						207,740,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						207,740,000						0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						207,740,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	207,740,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						91,180,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						91,180,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						91,180,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	91,180,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						84,600,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						84,600,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						84,600,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	84,600,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						255,680,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						255,680,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						255,680,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	255,680,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						219,020,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						219,020,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						219,020,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	219,020,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						319,600,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						319,600,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						319,600,000						0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	319,600,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						61,100,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						61,100,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						61,100,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	61,100,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						65,800,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						65,800,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						65,800,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	65,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						252,860,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						252,860,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						252,860,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	252,860,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						87,420,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						87,420,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						87,420,000								0
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	87,420,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						62,980,000								0
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						62,980,000								0
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						62,980,000								0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	62,980,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						371,676,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						371,676,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						371,676,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	371,676,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						83,660,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						83,660,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						83,660,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	83,660,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						623,220,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						623,220,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						623,220,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	623,220,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						239,700,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						239,700,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						239,700,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	239,700,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						58,280,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						58,280,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						58,280,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	58,280,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					166,380,000							0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					166,380,000							0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					166,380,000							0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	166,380,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					102,460,000							0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					102,460,000							0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					102,460,000							0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	102,460,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					211,500,000							0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					211,500,000							0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					211,500,000							0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	211,500,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					58,280,000							0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					58,280,000							0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					58,280,000							0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	58,280,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					175,780,000							0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					175,780,000							0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					175,780,000							0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	175,780,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					166,380,000							0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					166,380,000							0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						166,380,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	166,380,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						109,980,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						109,980,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						109,980,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	109,980,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						83,660,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						83,660,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						83,660,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	83,660,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						106,220,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						106,220,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						106,220,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	106,220,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						96,820,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						96,820,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						96,820,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	96,820,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						59,220,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						59,220,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						59,220,000						0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	59,220,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						103,400,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						103,400,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						103,400,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	103,400,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						55,460,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						55,460,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						55,460,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	55,460,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						175,780,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						175,780,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						175,780,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	175,780,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						504,600,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						504,600,000							0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						504,600,000							0	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	504,600,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						450,080,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						450,080,000							0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						450,080,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	450,080,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	46,400,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	172,840,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	431,984,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	660,504,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	638,000,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						638,000,000							0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						638,000,000							0	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	638,000,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			81 Satuan Pendidikan		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						107,880,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						107,880,000							0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						107,880,000							0	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	107,880,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			81 Satuan Pendidikan		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						378,624,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						378,624,000							0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						378,624,000							0	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	378,624,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			81 Satuan Pendidikan		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						764,440,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						764,440,000							0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						764,440,000							0	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	764,440,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			81 Satuan Pendidikan		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						627,560,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						627,560,000							0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						627,560,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	627,560,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						313,200,000							0	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						313,200,000							0	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						313,200,000							0	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	313,200,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						327,120,000							0	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						327,120,000							0	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						327,120,000							0	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	327,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						92,800,000							0	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						92,800,000							0	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						92,800,000							0	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	92,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						449,384,000							0	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						449,384,000							0	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						449,384,000							0	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	449,384,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						332,920,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						332,920,000						0		
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						332,920,000						0		
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	332,920,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						409,944,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						409,944,000						0		
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						409,944,000						0		
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	409,944,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						793,440,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						793,440,000						0		
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						793,440,000						0		
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	793,440,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						295,800,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						295,800,000						0		
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						295,800,000						0		
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	295,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						80,040,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						80,040,000						0		
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						80,040,000						0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	80,040,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						604,360,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						604,360,000							0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						604,360,000							0	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	604,360,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						92,800,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						92,800,000							0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						92,800,000							0	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	92,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						511,560,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						511,560,000							0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						511,560,000							0	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	511,560,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						881,600,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						881,600,000							0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						881,600,000							0	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	881,600,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						963,960,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						963,960,000							0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						963,960,000							0	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	963,960,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			81 Satuan Pendidikan		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1,111,280,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						1,111,280,000							0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1,111,280,000							0	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	1,111,280,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			81 Satuan Pendidikan		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						680,920,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						680,920,000							0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						680,920,000							0	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	680,920,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			81 Satuan Pendidikan		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						93,960,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						93,960,000							0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						93,960,000							0	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	93,960,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			81 Satuan Pendidikan		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						165,880,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						165,880,000							0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						165,880,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	165,880,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	93,960,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	212,280,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	292,320,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	161,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	533,600,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						533,600,000						0		
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						533,600,000						0		
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	533,600,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						31,320,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						31,320,000						0		
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						31,320,000						0		
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	31,320,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						59,160,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						59,160,000						0		
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						59,160,000						0		
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	59,160,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						105,560,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						105,560,000						0		
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						105,560,000						0		
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	105,560,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						238,960,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						238,960,000						0		
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						238,960,000						0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	238,960,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	887,400,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	496,480,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	419,224,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	196,040,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	1,081,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						1,081,120,000							0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1,081,120,000							0	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	1,081,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			81 Satuan Pendidikan		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						205,320,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						205,320,000							0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						205,320,000							0	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	205,320,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			81 Satuan Pendidikan		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						186,760,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						186,760,000							0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						186,760,000							0	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	186,760,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			81 Satuan Pendidikan		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						103,240,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						103,240,000							0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						103,240,000							0	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	103,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			81 Satuan Pendidikan		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						191,400,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						191,400,000							0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						191,400,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	191,400,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	80,040,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	107,880,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	19,720,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	525,480,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	412,264,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						412,264,000							0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						412,264,000							0	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	412,264,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			81 Satuan Pendidikan		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						887,400,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						887,400,000							0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						887,400,000							0	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	887,400,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			81 Satuan Pendidikan		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						547,520,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						547,520,000							0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						547,520,000							0	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	547,520,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			81 Satuan Pendidikan		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						857,240,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						857,240,000							0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						857,240,000							0	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	857,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			81 Satuan Pendidikan		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						299,280,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						299,280,000							0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						299,280,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	299,280,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	696,000,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	908,280,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	875,104,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	508,544,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	789,264,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						789,264,000							0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						789,264,000							0	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	789,264,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			81 Satuan Pendidikan		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						533,600,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						533,600,000							0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						533,600,000							0	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	533,600,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			81 Satuan Pendidikan		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						866,520,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						866,520,000							0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						866,520,000							0	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	866,520,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			81 Satuan Pendidikan		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						816,640,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						816,640,000							0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						816,640,000							0	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	816,640,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			81 Satuan Pendidikan		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						914,544,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						914,544,000							0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						914,544,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	914,544,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	808,520,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	876,960,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	723,144,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	510,864,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						466,784,000						0		
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						466,784,000						0		
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	466,784,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						673,264,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						673,264,000						0		
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						673,264,000						0		
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	673,264,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1,002,240,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						1,002,240,000						0		
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1,002,240,000						0		
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	1,002,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						658,880,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						658,880,000						0		
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						658,880,000						0		
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	658,880,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						227,360,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						227,360,000						0		
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						227,360,000						0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	227,360,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	155,440,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	459,360,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	651,920,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	375,840,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	44,080,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						44,080,000							0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						44,080,000							0	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	44,080,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			81 Satuan Pendidikan		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						385,120,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						385,120,000							0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						385,120,000							0	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	385,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			81 Satuan Pendidikan		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						653,080,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						653,080,000							0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						653,080,000							0	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	653,080,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			81 Satuan Pendidikan		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						129,720,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						129,720,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						129,720,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						129,720,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						91,180,000							0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						91,180,000							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						91,180,000							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	91,180,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						40,670,960,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						40,670,960,000						0		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						40,670,960,000						0		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				198 Satuan Pendidikan	40,670,960,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			198 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						176,829,179,039						172,874,228,447		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan	%		%	100 %	108,147,055,698					100 %	128,278,118,216		
1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun	Buku		Buku	30 Buku	218,181,000					30 Buku	54,945,000		
1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	194,460,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Kesehatan	4 Dokumen	42,735,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	23,721,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Kesehatan	2 Laporan	12,210,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN dinas kesehatan yang menerima gaji dan Tunjangan	orang		orang	1400 orang	105,501,087,298						1400 orang	123,744,991,418	
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1400 Orang/bulan	104,160,099,298		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	ASN Dinas Kesehatan	1400 Orang/bulan	122,304,202,183	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				15 Dokumen	1,340,988,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	ASN Dinas Kesehatan	15 Dokumen	1,440,789,235	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	unit		unit	10 unit	72,444,200						10 unit	42,735,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	72,444,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Kesehatan	3 Laporan	42,735,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	dokumen		dokumen	1 dokumen	21,500,000						1 dokumen	0	
1 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	21,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Kesehatan	3 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Perlengkapan/Peralatan yang disediakan	dokumen		dokumen	6 dokumen	616,491,200						6 dokumen	304,436,448	
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	16,756,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Kesehatan	1 Paket	6,092,790	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	154,874,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Kesehatan	1 Paket	61,694,322	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	18,273,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Kesehatan	1 Paket	7,236,867	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	38,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Kesehatan	1 Paket	24,957,240	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13 Laporan	388,387,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Kesehatan	13 Laporan	204,455,229	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Milik daerah yang disediakan	dokumen		dokumen	2 dokumen	226,912,000						2 dokumen	181,868,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	113,412,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Kesehatan	3 Paket	50,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	113,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Kesehatan	10 Unit	131,868,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	Laporan		Laporan	36 Laporan	695,160,000						36 Laporan	659,340,000	
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	695,160,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Kesehatan	4 Laporan	659,340,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	unit		unit	20 unit	695,280,000						20 unit	2,289,802,350	
1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	445,360,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Kesehatan	12 Unit	50,879,070	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	41,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Kesehatan	1 Unit	454,236,420	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 45 Unit	30,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Kesehatan	0 Unit 45 Unit	30,293,010	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	110,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Kesehatan	6 Unit	1,161,903,600	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun (Pustu) Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi (Pustu)				1 Unit Pustu 8 Unit Pustu	67,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Kesehatan	1 Unit Pustu 8 Unit Pustu	592,490,250	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan BLUD	Puskesmas		Puskesmas	39 Puskesmas	100,000,000						39 Puskesmas	1,000,000,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas dan 1 Labkesda	1 Unit Kerja	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%		%	100 %	67,289,781,641						100 %	44,452,905,246	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Puskesmas		Puskesmas	39 Puskesmas	34,727,967,141						39 Puskesmas	12,167,140,708	
1 02 02 2.01 02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				3 Unit	7,257,600,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	3 Unit	11,917,140,708	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun Jumlah Rumah Dinas yang dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan				0 Unit 10 Unit	3,355,200,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	0 Unit 10 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana yang telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas				27 Unit	6,438,048,000				Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	27 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				22 Unit	6,323,480,000				Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	22 Unit	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					15 Unit	1,739,204,476			DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	15 Unit	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan					39 Paket	3,643,483,865			DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	39 Paket	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai							5,546,351,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas		0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) terpelihara sesuai dengan standar yang Terpelihara Sesuai Standar Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik (Peralatan Laboratorium) di Fasilitas Layanan Kesehatan terpelihara sesuai standar					210 Unit Alkes 7 Paket alkes Lab	194,599,800			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	210 Unit Alkes 7 Paket alkes Lab	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya							230,000,000			DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	39 Puskesmas		250,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan di intervensi kesehatannya Jumlah Layanan Kesehatan Rujukan Jumlah layanan kesehatan yang diberikan (sesuai indikator SPM)	Keluarga Layanan Indikator		Keluarga Layanan Indikator	750 Keluarga 15 Layanan 12 Indikator		31,409,154,800						750 Keluarga 15 Layanan 12 Indikator	31,485,764,538		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					22816 Orang	435,203,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	22816 Orang	2,000,781,455	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				21779 Orang	424,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	21779 Orang	1,241,515,242	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20012 Orang	124,937,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	20012 Orang	153,697,038	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20565 Orang	249,155,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	20565 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				126374 Orang	228,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	126374 Orang	527,996,786	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				895933 Orang	212,363,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	895933 Orang	651,077,737	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				103926 Orang	219,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	103926 Orang	343,454,724	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				34319 Orang	72,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	34319 Orang	54,500,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8257 Orang	65,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	8257 Orang	61,050,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1862 Orang	170,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	1862 Orang	302,104,316	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					14274 Orang	46,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	14274 Orang	61,455,372	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					18394 Orang	46,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	18394 Orang	63,197,910	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar					1 Dokumen	2,125,810,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar					1 Dokumen	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen	1,257,184,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	1 Dokumen	3,955,930,042	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	196,528,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	1 Dokumen	570,196,622	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					2 Dokumen	892,380,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	2 Dokumen	1,357,227,581	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					1 Dokumen	199,238,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	1 Dokumen	1,243,042,713	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya					1 Dokumen	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	1 Dokumen	60,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				2212 Orang	51,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	2212 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						51,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas		0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				1 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	752,648,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				39 Dokumen	21,020,869,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	39 Dokumen	18,527,487,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	125,260,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	1 Dokumen	61,050,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	754,305,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	39 Puskesmas	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				30 Unit	900,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	30 Unit	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	147,684,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	39 Puskesmas	1 Unit	100,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				750 Keluarga	150,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	39 Puskesmas	750 Keluarga	150,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan	dokumen		dokumen	5 dokumen	172,689,700						5 dokumen	800,000,000	
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				5 Dokumen	149,041,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	5 Dokumen	500,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				5 Dokumen	23,648,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	5 Dokumen	300,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan kesehatan yang ditingkatkan	Puskesmas		Puskesmas	39 Puskesmas	979,970,000						39 Puskesmas	0	
1 02 02 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				9 Unit	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas dan 9 Rumah Sakit	9 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.04 02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				20 Unit	51,640,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas dan 9 Rumah Sakit	20 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				39 Unit	878,330,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas dan 9 Rumah Sakit	39 Unit	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan yang diberikan izin praktik	%		%	100 %	276,023,700						100 %	0	
1 02 03 2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan hasil pemberian izin praktik tenaga kesehatan	dokumen		dokumen	2 dokumen	75,779,800						2 dokumen	0	
1 02 03 2.01 01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	49,499,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Tenaga Kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 03 2.01 02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	26,280,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Tenaga Kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan	orang		orang	400 orang	200,243,900						400 orang	0	
1 02 03 2.02 01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	58,533,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Tenaga Kesehatan di Puskesmas	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar Pengetahuan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan jenjang jabatan yang di tempati (Dlnas Kesehatan)				0 Orang 14 Orang	141,710,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Tenaga Kesehatan di Puskesmas	0 Orang 14 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diberikan izin	%		%	100 %	592,816,000						100 %	30,518,895	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diberikan izin	dokumen		dokumen	30 dokumen	170,000,000						30 dokumen	0	
1 02 04 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				35 Dokumen	102,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	35 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 04 2.01 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				40 Sarana	68,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	40 Sarana	0	DINAS KESEHATAN
1 02 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen terkait industri rumah tangga yang diberikan sertifikat P-IRT	dokumen		dokumen	50 dokumen	382,500,000						50 dokumen	0	
1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				50 Dokumen	382,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Industri Rumah Tangga di Lampung Tengah	50 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 04 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	jumlah dokumen yang diberikan terkait Tempat pengelolaan Makanan yang diberikan sertifikat laik hygiene	dokumen		dokumen	50 dokumen	40,316,000						50 dokumen	30,518,895	
1 02 04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	40,316,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Tempat Pengelolaan Makanan di Lampung Tengah	1 Dokumen	30,518,895	DINAS KESEHATAN
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase promosi kesehatan,advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan masyarakat	0		0	0 0	523,502,000						0 0	112,686,090	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen promosi kesehatan,advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan masyarakat	dokumen		dokumen	1 dokumen	175,132,000						1 dokumen	112,686,090	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	175,132,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	1 Dokumen	112,686,090	DINAS KESEHATAN
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	dokumen		dokumen	1 dokumen	248,120,000						1 dokumen	0	
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	248,120,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan masyarakat	dokumen		dokumen	1 dokumen	100,250,000						1 dokumen	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	100,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						18,656,450,999							18,656,450,999	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Persen		Persen	100 Persen	6,236,315,460						100 Persen	6,236,315,460	
1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja disusun	Dokumen		Dokumen	40 Dokumen	18,550,000						40 Dokumen	18,550,000	
1 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0	1 Dokumen	1,500,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0	1 Dokumen	1,500,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Dokumen	15,550,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0	2 Dokumen	15,550,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persen		Persen	90 Persen	4,941,228,600						90 Persen	4,941,228,600	
1 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	4,941,228,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0	12 Dokumen	4,941,228,600	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keperluan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dan Peralatan Perlengkapan kantor	Persen		Persen	75 Persen	53,392,100						75 Persen	53,392,100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,724,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	1 Paket	10,724,100	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Unit	28,988,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	2 Unit	28,988,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	13,680,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	40 Laporan	13,680,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Belanja Tagihan Listrik	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,110,340,500						12 Bulan	1,110,340,500	
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	1,110,340,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	1,110,340,500	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Kendaraan Dinas , Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Persen		Persen	85 Persen	112,804,260						85 Persen	112,804,260	
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	73,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	2 Unit	73,340,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Laporan	39,464,260		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	12 Laporan	39,464,260	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	Persen		Persen	100 Persen	12,389,835,539						100 Persen	12,389,835,539	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Sarana, Prasarana dan Obat-obatan Pelayanan Kesehatan	Persen		Persen	85 Persen	12,340,795,539						85 Persen	12,340,795,539	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					4 Paket 13 Unit	8,521,500,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	4 Paket 13 Unit	8,521,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					1 Paket	750,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	1 Paket	750,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					45 Unit	2,700,000,000			DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	45 Unit	2,700,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center					76 Unit	44,482,900			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	76 Unit	44,482,900	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan					156 Jenis	309,455,264			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	156 Jenis	309,455,264	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					15 Unit	15,357,375			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	15 Unit	15,357,375	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persen		Persen		90 Persen	49,040,000							90 Persen	49,040,000	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					4 Dokumen	33,200,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	4 Dokumen	33,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					12 Dokumen	15,840,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	12 Dokumen	15,840,000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persen		Persen	75 Persen	30,300,000						75 Persen	30,300,000	
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang		Orang	100 Orang	30,300,000						100 Orang	30,300,000	
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				3 Laporan	30,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0		3 Laporan	30,300,000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						43,302,042,799							43,302,042,799	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	Persen		Persen	85 Persen	43,302,042,799						85 Persen	43,302,042,799	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Terakomondasinya Keperluan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan dengan Baik	Persen		Persen	85 Persen	43,302,042,799						85 Persen	43,302,042,799	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	43,302,042,799		Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0		1 Unit Kerja	43,302,042,799	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,249,604,000							0	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,152,020,000							0	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,152,020,000							0	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				435 Orang	15,390,000		Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan				435 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				396 Orang	4,200,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan					396 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2411 Orang	11,130,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan					2411 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17092 Orang	5,200,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan					17092 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3024 Orang	5,400,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan					3024 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Pelacakan Kontak				65 Orang	57,580,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan					65 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				7 Dokumen	22,452,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan					7 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				4 Dokumen	5,200,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan					4 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				14 Dokumen	17,060,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan					14 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				50 Orang	4,780,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan					50 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				20 Dokumen	67,035,000	Semua Kab/Kota, Pubian, Semua Kelurahan				20 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas				16 Dokumen 3350 Orang	936,593,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan				16 Dokumen 3350 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						86,904,000						0		
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						86,904,000						0		
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				36 Dokumen	86,904,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan				36 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						10,680,000						0		
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						10,680,000						0		
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Penyebarluasan informasi melalui media spesifik lokal / tradisional				0 Dokumen 1711 Lembar	10,680,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan				0 Dokumen 1711 Lembar	0	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,350,093,000						1,921,893,200		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						100,000,000						0		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						100,000,000						0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						2,134,221,000							1,921,893,200	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2,134,221,000							1,921,893,200	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	41,950,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	41,950,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	2,800,000				Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	2,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	2,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	12,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	2,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	1,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	38,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
										Nasional	Daerah											
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					0 Dokumen	26,440,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen		0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					0 Dokumen	7,120,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen		0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					0 Dokumen	22,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen		0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					0 Dokumen	13,450,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen		0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					0 Dokumen	155,950,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen		0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					100 Dokumen	1,804,311,000	Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		100 Dokumen	1,879,943,200			DINAS KESEHATAN
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							115,872,000								0		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							115,872,000								0		
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					0 Orang	115,872,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang		0		DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,497,504,000									0	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,410,600,000								0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,410,600,000							0	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	23,000,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	1,400,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	11,200,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	12,700,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	19,200,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	60,200,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	76,100,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	10,900,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	24,000,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	31,100,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	84,756,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	1,056,044,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						86,904,000						0		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						86,904,000						0		
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Dokumen 0 Orang	86,904,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0 Dokumen 0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 02							1,296,850,000						635,755,000		
1 02 01							100,000,000						0		
1 02 01 2.10							100,000,000						0		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit Kerja	0 DINAS KESEHATAN	
1 02 02							1,109,946,000						635,755,000		
1 02 02 2.02							1,109,946,000						635,755,000		
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	7,040,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0 DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	2,700,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0 DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	1,300,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0 DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	11,600,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0 DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	17,670,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0 DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	2,436,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	72,954,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	40,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	3,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	28,871,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	37,760,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	98,420,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas						785,195,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			635,755,000	DINAS KESEHATAN
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						86,904,000							0	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						86,904,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	86,904,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,459,109,000							1,490,900,000		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							100,000,000							0	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000							0	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	100,000,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,301,173,000							1,490,900,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,301,173,000							1,490,900,000	

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				594 Orang	22,680,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidorejo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Cimarias Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Bangun Rejo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidoluhur Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Seputih Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Luas Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Pandan Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Jaya Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Mekar Jaya	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		594 Orang	27,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				605 Orang	1,600,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		605 Orang	2,700,000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				540 Orang	1,600,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidorejo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Cimarias Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Bangun Rejo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidoluhur Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Seputih Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Luas Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Pandan Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Jaya Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Mekar Jaya	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	540 Orang	2,700,000	DINAS KESEHATAN	

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2635 Orang	13,600,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidorejo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Cimarias Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Bangun Rejo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidoluhur Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Seputih Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Luas Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Pandan Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Jaya Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Mekar Jaya	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		2635 Orang	15,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				3509 Orang 1 Unit	2,800,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		3509 Orang 1 Unit	3,500,000	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				24881 Orang	8,700,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		24881 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				4400 Orang 1 Unit	13,800,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		4400 Orang 1 Unit	15,500,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				50 Orang	6,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		50 Orang	7,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	11,950,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	1 Dokumen	13,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	18,880,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	1 Dokumen	22,500,000	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	40,200,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	1 Dokumen	45,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	99,415,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	1 Dokumen	110,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	997,748,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	1 Dokumen	1,200,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					57,936,000						0		
1	02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					57,936,000						0		
1	02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				2 Orang	57,936,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	2 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,088,220,000						620,190,000	
1	02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					100,000,000							0	
1	02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					100,000,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	100,000,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Purwodadi Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidodadi Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidomulyo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Timbul Rejo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukanegara Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sri Pendowo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukowaringin Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Suka Negeri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						959,252,000						620,190,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						959,252,000						620,190,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				464 Orang	20,250,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Purwodadi Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidodadi Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidomulyo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Timbul Rejo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukanegara Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sri Pendowo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukowaringin Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Suka Negeri	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	464 Orang	23,000,000	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				443 Orang	3,500,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Purwodadi Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidodadi Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidomulyo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Timbul Rejo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukanegara Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sri Pendowo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukowaringin Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Suka Negeri	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	443 Orang	3,850,000	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				407 Orang	5,400,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Purwodadi Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidodadi Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidomulyo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Timbul Rejo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukanegara Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sri Pendowo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukowaringin Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Suka Negeri	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	407 Orang	5,940,000	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2049 Orang	13,800,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Purwodadi Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidodadi Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidomulyo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Timbul Rejo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukanegara Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sri Pendowo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukowaringin Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Suka Negeri	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	2049 Orang	15,080,000	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3869 Orang	20,000,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Purwodadi Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidodadi Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidomulyo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Timbul Rejo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukanegara Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sri Pendowo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukowaringin Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Suka Negeri	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	3869 Orang	22,000,000	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				18222 Orang	2,800,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Purwodadi Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidodadi Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidomulyo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Timbul Rejo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukanegara Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sri Pendowo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukowaringin Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Suka Negeri	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	18222 Orang	3,080,000	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3222 Orang	13,000,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Purwodadi Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidodadi Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidomulyo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Timbul Rejo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukanegara Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukowaringin Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Suka Negeri	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		3222 Orang	14,300,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				40 Orang	17,620,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Purwodadi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		40 Orang	19,382,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				10000 Dokumen	47,232,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		10000 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2300 Dokumen	14,670,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Purwodadi Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidodadi Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidomulyo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Timbul Rejo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukanegara Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sri Pendowo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukowaringin Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Suka Negeri	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		2300 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2300 Dokumen	7,350,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Purwodadi Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidodadi Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidomulyo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Timbul Rejo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukanegara Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sri Pendowo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukowaringin Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Suka Negeri	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	2300 Dokumen	8,085,000	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1200 Dokumen	16,900,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Purwodadi Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidodadi Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidomulyo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Timbul Rejo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukanegara Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sri Pendowo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukowaringin Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Suka Negeri	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1200 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	23,600,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Purwodadi Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidodadi Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidomulyo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Timbul Rejo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukanegara Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sri Pendowo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukowaringin Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Suka Negeri	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	131,900,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Purwodadi Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidodadi Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidomulyo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Timbul Rejo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukanegara Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sri Pendowo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukowaringin Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Suka Negeri	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	603,030,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Purwodadi Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidodadi Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidomulyo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Timbul Rejo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukanegara Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sri Pendowo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukowaringin Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Suka Negeri	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0 Dokumen	486,091,000	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				70000 Keluarga	18,200,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Purwodadi Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidodadi Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidomulyo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Timbul Rejo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukanegara Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sri Pendowo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukowaringin Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Suka Negeri	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		70000 Keluarga	19,382,000	DINAS KESEHATAN
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						28,968,000							0	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						28,968,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang 1 Orang	28,968,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Purwodadi Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidodadi Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidomulyo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Timbul Rejo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukanegara Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sri Pendowo Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukowaringin Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Suka Negeri	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Orang 1 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,354,127,000						768,319,000		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						100,000,000						0		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						100,000,000						0		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	100,000,000		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,196,191,000						768,319,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,196,191,000						768,319,000		
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				396 Orang	22,120,000	Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kota Baru Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kuripan Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sri Agung Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Haduyang Ratu Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Padang Ratu Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Karang Sari Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sumber Sari	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	396 Orang	0	DINAS KESEHATAN		

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	500,000	Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kota Baru Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kuripan Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sri Agung Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Haduyang Ratu Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Padang Ratu Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Karang Sari Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sumber Sari	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	2,500,000	Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kota Baru Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kuripan Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sri Agung Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Haduyang Ratu Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Karang Sari Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sumber Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	9,950,000	Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kota Baru Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kuripan Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sri Agung Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Haduyang Ratu Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Karang Sari Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sumber Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	7,740,000	Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kota Baru Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kuripan Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sri Agung Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Haduyang Ratu Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Karang Sari Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sumber Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	1,500,000	Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kota Baru Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kuripan Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sri Agung Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Haduyang Ratu Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Padang Ratu Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Karang Sari Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sumber Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	3,475,000	Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kota Baru Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kuripan Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sri Agung Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Haduyang Ratu Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Karang Sari Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sumber Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	28,700,000	Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kota Baru Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kuripan Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sri Agung Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Haduyang Ratu Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Karang Sari Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sumber Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	38,650,000	Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kota Baru Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kuripan Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sri Agung Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Haduyang Ratu Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Padang Ratu Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Karang Sari Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sumber Sari	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	12,460,000	Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kota Baru Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kuripan Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sri Agung Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Haduyang Ratu Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Padang Ratu Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Karang Sari Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sumber Sari	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	17,828,000	Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kota Baru Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kuripan Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sri Agung Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Haduyang Ratu Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Karang Sari Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sumber Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	57,936,000	Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kota Baru Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kuripan Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sri Agung Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Haduyang Ratu Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Padang Ratu Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Karang Sari Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sumber Sari	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,088,865,000						1,488,316,100		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						100,000,000						0		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						100,000,000						0		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,930,929,000						1,424,586,500		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,930,929,000						1,424,586,500		
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	25,757,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				120 Orang	6,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		120 Orang	6,600,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				28 Orang	1,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		28 Orang	1,540,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				576 Orang	9,713,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		576 Orang	10,684,500	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	17,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	17,175,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30 Orang	1,050,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		30 Orang	1,155,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				142 Orang	8,160,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		142 Orang	8,976,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	85,050,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	25,016,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	9,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	37,340,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	20,115,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	106,232,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas						1,561,021,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			1,395,631,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						57,936,000							63,729,600		
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						57,936,000							63,729,600		
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 Orang	57,936,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		2 Orang	63,729,600	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,221,814,000							0	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							100,000,000							0	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	100,000,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,063,878,000								0	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,063,878,000								0	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	46,120,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	10,990,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	4,000,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	36,400,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	4,732,500	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	5,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	1,820,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	21,850,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	45,496,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	1,700,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	6,040,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	15,460,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	91,820,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	771,849,500				Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						57,936,000							0	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						57,936,000							0	
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	57,936,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2,041,591,000							0	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 orang 200 Orang	47,580,000	Kab. Lampung Tengah, Selagai Lingga, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		200 orang 200 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	4,200,000	Kab. Lampung Tengah, Selagai Lingga, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	4,250,000	Kab. Lampung Tengah, Selagai Lingga, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	21,333,100	Kab. Lampung Tengah, Selagai Lingga, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	1,400,000	Kab. Lampung Tengah, Selagai Lingga, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	20,910,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	30,600,000	Kab. Lampung Tengah, Selagai Lingga, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						2,800,000	Kab. Lampung Tengah, Selagai Lingga, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	27,160,000	Kab. Lampung Tengah, Selagai Lingga, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	15,600,000	Kab. Lampung Tengah, Selagai Lingga, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	114,704,400	Kab. Lampung Tengah, Selagai Lingga, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				0 Dokumen 0 Unit	1,751,053,500	Kab. Lampung Tengah, Selagai Lingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen 0 Unit	0	DINAS KESEHATAN		
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						86,904,000								0		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						86,904,000								0		
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 Orang	86,904,000	Kab. Lampung Tengah, Selagai Lingga, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		3 Orang	0	DINAS KESEHATAN		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,681,798,000									2,700,000	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						100,000,000								0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						100,000,000						0		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	100,000,000		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,494,894,000							2,700,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,494,894,000							2,700,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	50,230,000	Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Purwosari Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sendang Ayu Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Bandar Sari Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Surabaya Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Margorejo Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Karang Tanjung Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Mojokerto Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Purworejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	6,124,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Surabaya	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	2,700,000						0 Orang	2,700,000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	7,890,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Surabaya	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	17,050,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Surabaya	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	10,780,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Surabaya	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	3,050,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Surabaya	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	41,280,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Surabaya	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	36,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Surabaya	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	10,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Surabaya	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	29,590,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Surabaya	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	8,590,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Surabaya	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	55,930,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Surabaya	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	1,214,330,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						86,904,000							0	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						86,904,000							0	
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	86,904,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Surabaya	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,136,740,000						775,099,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						100,000,000							0	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						100,000,000							0	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	100,000,000						0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						979,140,000							775,099,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						979,140,000							775,099,000	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	31,390,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Ratu Aji, Gedung Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	4,200,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Ratu Aji, Gedung Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	3,750,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Ratu Aji, Gedung Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	20,000,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Ratu Aji, Gedung Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	4,800,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Ratu Aji, Gedung Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	4,900,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Ratu Aji, Gedung Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	6,000,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Ratu Aji, Gedung Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	62,672,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Ratu Aji, Gedung Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	22,200,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Ratu Aji, Gedung Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	5,400,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Ratu Aji, Gedung Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	19,600,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Ratu Aji, Gedung Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	17,200,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Ratu Aji, Gedung Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	113,148,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Ratu Aji, Gedung Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	663,880,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Ratu Aji, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0 Dokumen	775,099,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						57,600,000						0		
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						57,600,000						0		
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Dokumen 0 Orang	57,600,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Ratu Aji, Gedung Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Dokumen 0 Orang		0 DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,109,225,000						1,369,663,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						100,000,000						0		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						100,000,000						0		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	100,000,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan				0 Unit Kerja		0 DINAS KESEHATAN	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,922,321,000						1,369,663,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,922,321,000						1,369,663,000		
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	37,800,000					0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	250,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	52,800,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	8,940,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	2,200,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	47,300,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	3,300,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	43,800,000					0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	12,562,000						0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	13,450,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan					0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	2,900,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan					0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	55,200,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan					0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	84,800,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan					0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas						1,557,019,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			1,369,663,000	DINAS KESEHATAN
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						86,904,000							0	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						86,904,000							0	
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	86,904,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan					0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,304,292,000						1,723,447,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						100,000,000						0		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						100,000,000						0		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	100,000,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Ratu Nuban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Unit Kerja	0 DINAS KESEHATAN	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						2,175,324,000						1,723,447,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2,175,324,000						1,723,447,000		
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	42,330,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Ratu Nuban, Semua Kelurahan					0 Orang	0 DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	450,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Ratu Nuban, Semua Kelurahan					0 Orang	0 DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	11,980,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Ratu Nuban, Semua Kelurahan					0 Orang	0 DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	4,000,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Ratu Nuban, Semua Kelurahan					0 Orang	0 DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	49,900,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Ratu Nuban, Semua Kelurahan					0 Orang	0 DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	13,750,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Ratu Nuban, Semua Kelurahan				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	44,700,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Ratu Nuban, Semua Kelurahan				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	109,650,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Ratu Nuban, Semua Kelurahan				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	9,200,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Ratu Nuban, Semua Kelurahan				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	25,100,000					0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	28,135,000					0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	79,923,000					0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas						1,756,206,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			1,723,447,000	DINAS KESEHATAN
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						28,968,000						0	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						28,968,000						0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	28,968,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Ratu Nuban, Semua Kelurahan					0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,410,554,500							780,571,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						100,000,000							0	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						100,000,000							0	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	100,000,000	Semua Kab/Kota, Gunung Sugih, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan					0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,194,682,500							780,571,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,194,682,500							780,571,000	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30 Orang 50 50 Orang	950,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan			Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		30 Orang 50 50 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	2,350,000						0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	9,000,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan					0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	13,160,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan					0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	11,610,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan					0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	4,400,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan					0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	40,522,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan					0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	9,910,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan					0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	3,880,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan					0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	16,950,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan					0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	62,819,500	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan					0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	80,598,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas						927,533,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		780,571,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				0 Keluarga	11,000,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan				0 Keluarga	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						115,872,000						0		
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						115,872,000						0		
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	115,872,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,331,953,000						709,003,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						100,000,000						0		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						100,000,000						0		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	100,000,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,145,049,000						709,003,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,145,049,000						709,003,000		
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				495 Orang	23,240,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		495 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				432 Orang	800,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		432 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2176 Orang	1,600,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		2176 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2729 Orang	6,460,500	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		2729 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3423 Orang	2,900,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		3423 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	40,990,500	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	22,479,500	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	7,037,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	30,110,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif									
										Nasional	Daerah												
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					12 Dokumen	20,780,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					12 Dokumen	159,434,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen	829,217,500	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	709,003,000	DINAS KESEHATAN			
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							86,904,000								0			
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							86,904,000									0		
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					0 Orang 3 Orang	86,904,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang 3 Orang			0 0	DINAS KESEHATAN	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,153,582,000										1,957,339,000	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							100,000,000									110,000,000		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000									110,000,000		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					0 Unit Kerja	100,000,000	Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Simbar Waringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Unit Kerja			110,000,000	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						2,053,582,000						1,847,339,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2,053,582,000						1,847,339,000		
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	36,710,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Adi Puro	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	200 Orang	6,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				181 Orang	2,400,000	Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Adi Puro Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Trimurjo	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	181 Orang	2,500,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				180 Orang	5,400,000	Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Trimurjo	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	180 Orang	6,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2360 Orang	10,040,000	Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Simbar Waringin	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	2360 Orang	12,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	17,900,000	Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Depok Rejo	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Orang	20,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	13,870,000	Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Simbar Waringin	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3000 Orang	12,600,000	Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Liman Benawi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		3000 Orang	13,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				80 Orang	23,660,000	Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Adi Puro	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		80 Orang	24,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	66,278,000	Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Adi Puro	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	68,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	47,220,000	Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Simbar Waringin	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	50,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	6,650,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	7,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	25,850,000	Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Adi Puro	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	27,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	23,860,000	Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Simbar Waringin	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	30,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	189,450,000	Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Simbar Waringin	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	110,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas						1,537,694,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			1,430,839,000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				0 Keluarga	34,000,000	Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Simbar Waringin	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Keluarga	40,000,000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD														
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				120 Orang	16,460,000	Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Semua Kelurahan					120 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				110 Orang	2,100,000	Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Semua Kelurahan					110 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	3,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	13,750,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	14,667,500		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	17,180,000		Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang 0 Orang	4,410,000		Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang 0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						14,605,000								0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						73,345,000								0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						7,100,000								0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						32,592,000								0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						36,150,000								0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						12,235,000								0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						105,650,000								0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	472,159,500		Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	257,949,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						15,070,000								0	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,006,916,500								47,986,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						100,000,000						0		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						100,000,000						0		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	100,000,000	Kab. Lampung Tengah, Punggur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,883,001,500						47,986,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,883,001,500						47,986,000		
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	20,150,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	6,500,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	8,126,500		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK				0 Orang	8,126,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	9,800,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	39,860,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK				0 Orang	39,860,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	22,800,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	49,885,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	25,780,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	8,446,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	20,290,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	145,371,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	1,525,993,000	Kab. Lampung Tengah, Punggur, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						23,915,000						0			
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						23,915,000						0			
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				0 Dokumen	23,915,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,491,966,000							0	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						100,000,000						0			
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						100,000,000						0			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	100,000,000	Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah					0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,334,030,000							0	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,334,030,000							0	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				427 Orang	22,524,000	Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Sumber Rejo Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Purworejo Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Timur				427 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				407 Orang	2,110,000	Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Sumber Rejo Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Purworejo Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Timur	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK			407 Orang	0	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				388 Orang	2,900,000	Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Sumber Rejo Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Purworejo Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Timur				388 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1885 Orang	9,784,000	Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Sumber Rejo Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Purworejo Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Timur				1885 Orang	0	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5924 Orang	24,541,000	Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Sumber Rejo Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Purworejo Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Timur				5924 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1946 Orang	3,580,000	Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Sumber Rejo Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Purworejo Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Timur				1946 Orang	0	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				65 Orang	10,850,000	Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Sumber Rejo Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Purworejo Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Timur				65 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	38,305,000	Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Sumber Rejo Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Purworejo Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Timur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				5 Dokumen	60,685,000	Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Sumber Rejo Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Purworejo Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Timur				5 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				5 Dokumen	8,800,000	Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Sumber Rejo Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Purworejo Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Timur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			5 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
															Nasional					Daerah	
1	02	02	2.02	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5 Dokumen	27,654,000	Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Sumber Rejo Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Purworejo Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Timur					5 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	18		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen 5 Dokumen	15,740,000	Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Sumber Rejo Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Purworejo Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Timur	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK					0 Dokumen 5 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	105,430,000	Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Sumber Rejo Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Purworejo Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Timur				5 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				5 Dokumen	1,001,127,000					5 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						57,936,000						0		
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						57,936,000						0		
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				68 Orang	57,936,000	Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Sumber Rejo Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Purworejo Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Timur				68 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							921,342,000						292,543,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						100,000,000						0		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						100,000,000						0		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Unit Kerja	0 DINAS KESEHATAN	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						792,542,000						292,543,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						792,542,000						292,543,000		
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				317 Orang	29,195,000	Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Sritejo Kencono Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Sapto Mulyo Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Nambah Rejo	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		317 Orang	0 DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	200,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0 DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	24,840,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0 DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	5,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0 DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	1,400,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0 DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	3,470,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				0 Dokumen	55,050,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	46,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	18,040,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	35,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	27,440,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						100,725,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	439,682,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	292,543,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				0 Keluarga	5,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Keluarga	0	DINAS KESEHATAN
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						28,800,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						28,800,000						0		
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	28,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							3,241,983,000						0	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						100,000,000							0	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				2 Unit Kerja	100,000,000		Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan		Pendapatan dari BLUD		2 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						3,055,079,000							0	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				140 Orang	55,210,000		Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan				140 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	11,100,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan				50 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	2,700,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan					50 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	7,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2000 Orang	14,500,000						2000 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	36,400,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan					200 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				250 Orang	18,900,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan					250 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				15 Orang	9,240,000						15 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				50 Dokumen	32,543,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan					50 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dokumen	19,150,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan					4 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	14,100,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan					2 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
										Nasional	Daerah											
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									2 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN					
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									2 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN					
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									5 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN					
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas												0	DINAS KESEHATAN				
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN												0					
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota												0					
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)									0 Orang	0	DINAS KESEHATAN					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														0			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													0				
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD													0				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan									0 Unit Kerja	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						2,000,972,000						0		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2,000,972,000						0		
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	43,400,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	17,450,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang 0 Orang	2,900,000				Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Orang 0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	1,800,000				Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	39,000,000				Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	40,450,000				Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	10,800,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	5,750,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	68,100,000				Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	65,954,000				Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas						1,625,368,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				0 Keluarga	80,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Keluarga	0	DINAS KESEHATAN
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						115,704,000							0	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						115,704,000							0	
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Dokumen 0 Orang	115,704,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen 0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,619,629,000							0	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						100,000,000							0	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						100,000,000							0	

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
															Nasional					Daerah		
1	02	01	2.10	01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	100,000,000	Kab. Lampung Tengah, Terusan Nunyai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN		
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						2,461,693,000								0		
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2,461,693,000									0	
1	02	02	2.02	01		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				800 Orang	30,400,000	Kab. Lampung Tengah, Terusan Nunyai, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		800 Orang	0	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	03		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				764 Orang	500,000	Kab. Lampung Tengah, Terusan Nunyai, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		764 Orang	0	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	7,200,000	Kab. Lampung Tengah, Terusan Nunyai, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	6,900,000	Kab. Lampung Tengah, Terusan Nunyai, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	06		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	13,820,000	Kab. Lampung Tengah, Terusan Nunyai, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	11,820,000	Kab. Lampung Tengah, Terusan Nunyai, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	4,030,000	Kab. Lampung Tengah, Terusan Nunyai, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	6,000,000	Kab. Lampung Tengah, Terusan Nunyai, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	50,050,000	Kab. Lampung Tengah, Terusan Nunyai, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	27,590,000	Kab. Lampung Tengah, Terusan Nunyai, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	18,080,000	Kab. Lampung Tengah, Terusan Nunyai, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	30,740,000	Kab. Lampung Tengah, Terusan Nunyai, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					0 Dokumen	25,730,000	Kab. Lampung Tengah, Terusan Nunyai, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					0 Dokumen	140,010,000	Kab. Lampung Tengah, Terusan Nunyai, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas							2,088,823,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0	DINAS KESEHATAN	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							57,936,000							0		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							57,936,000							0		
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					0 Orang	57,936,000	Kab. Lampung Tengah, Terusan Nunyai, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,610,643,300								375,894,300	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							100,000,000							1,000,000		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000							1,000,000		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					0 Unit Kerja	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Unit Kerja	1,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,453,043,300							374,894,300		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,453,043,300						374,894,300		
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	24,560,000	Kab. Lampung Tengah, Way Pangubuan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Orang	28,360,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	10,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Orang	11,300,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	11,500,000	Kab. Lampung Tengah, Way Pangubuan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Orang	12,500,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	9,390,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Orang	11,970,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang 0 Orang	1,560,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Orang 0 Orang	2,156,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	81,050,000	Kab. Lampung Tengah, Way Pangubuan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Dokumen	86,200,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	22,700,000	Kab. Lampung Tengah, Way Pangubuan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Dokumen	23,700,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	5,200,000	Kab. Lampung Tengah, Way Pangubuan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Dokumen	6,200,000	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	19,318,300		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0 Dokumen	20,318,300	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	9,710,000	Kab. Lampung Tengah, Way Pangubuan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Dokumen	10,710,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	151,480,000	Kab. Lampung Tengah, Way Pangubuan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Dokumen	161,480,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas						1,106,275,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0	DINAS KESEHATAN	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						57,600,000						0		
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						57,600,000						0		
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	57,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,529,341,000						0	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							100,000,000						0	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000						0	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	100,000,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,400,373,000						0		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,400,373,000						0		
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				120 Orang	44,200,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Terbanggi Besar				120 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	1,000,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	150,000					0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	3,500,000					0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	24,900,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	2,800,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	33,000,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	82,450,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	10,000,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	15,810,000					0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	15,450,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	131,605,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas						1,035,508,000	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0	DINAS KESEHATAN	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						28,968,000						0		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						28,968,000						0		
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	28,968,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,429,717,000							272,404,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						100,000,000						0		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						100,000,000						0		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	1 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,221,203,000						162,500,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,221,203,000						162,500,000		
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				525 Orang	22,580,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	525 Orang	30,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang 20 Orang	3,450,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0 Orang 20 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3140 Orang	14,910,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	3140 Orang	16,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				22028 Orang	4,360,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	22028 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2455 Orang	4,675,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		2455 Orang	5,500,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	51,650,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				3 Dokumen	78,000,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		3 Dokumen	86,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2,680,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Dokumen	3,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				3 Dokumen	10,950,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		3 Dokumen	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	136,215,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	859,733,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				0 Keluarga	32,000,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Keluarga	0	DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						86,904,000							86,904,000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						86,904,000							86,904,000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 Orang	86,904,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		3 Orang	86,904,000	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						21,610,000							23,000,000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						21,610,000							23,000,000	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				4 Dokumen	21,610,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		4 Dokumen	23,000,000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							992,568,000						275,097,000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						100,000,000							0	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						100,000,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	100,000,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						806,168,000							275,097,000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						806,168,000							275,097,000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				322 Orang	13,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Rama Indra	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		322 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				206 Orang	2,000,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		206 Orang	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				206 Orang	25,300,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		206 Orang	25,300,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				299 Orang	6,000,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		299 Orang	6,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3456 Orang	6,850,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		3456 Orang	6,850,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12669 Orang	4,450,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		12669 Orang	4,450,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1412 Orang	1,200,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1412 Orang	1,200,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				115 Orang	9,800,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		115 Orang	9,800,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	42,407,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	53,447,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	28,800,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	28,800,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	8,800,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	8,800,000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
										Nasional	Daerah											
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					0 Dokumen	5,350,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	5,350,000	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					0 Dokumen	25,400,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	25,400,000	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					0 Dokumen	97,700,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	97,700,000	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen	528,711,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN		
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							86,400,000								0		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							86,400,000								0		
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar					1 Unit	86,400,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Unit	0	DINAS KESEHATAN		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,447,431,000										0	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							100,000,000								0		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000								0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	100,000,000		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,347,431,000							0	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,347,431,000							0	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	32,700,000						0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	5,650,000						0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	1,820,000						0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	19,390,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang 0 Orang	17,820,000						0 Orang 0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	8,820,000						0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	27,450,000						0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar								0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					DAK Non Fisik- BOKKB-BOK			0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas						Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0	DINAS KESEHATAN				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,472,470,000					0				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						100,000,000					0				
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						100,000,000					0				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan								0 Unit Kerja	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,314,534,000					0				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,314,534,000						0		
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	10,360,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Nabung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		300 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	3,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	400,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Nabung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	100,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Nabung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	9,810,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Nabung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	12,460,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	6,280,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	20,230,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	19,770,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	14,160,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	19,020,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	22,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	136,092,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	1,039,252,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Nabung, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						57,936,000							0		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						57,936,000							0		
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	57,936,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,454,989,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						100,000,000							0	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						100,000,000							0	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	100,000,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				0 Unit Kerja		0	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,325,985,000							0	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,325,985,000							0	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	22,160,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0 Orang		0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	1,190,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0 Orang		0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	7,800,000	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0 Orang		0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	15,600,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0 Orang		0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	28,060,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0 Orang		0	DINAS KESEHATAN

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	2,200,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	30,665,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	58,078,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	7,440,000	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	21,010,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	32,350,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	113,162,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	986,270,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						29,004,000							0		
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						29,004,000							0		
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang 1 Orang	29,004,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang 1 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,141,088,000							0	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						100,000,000							0		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						100,000,000							0		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						2,009,820,000							0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2,009,820,000						0		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	30,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	2,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	18,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	5,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	9,650,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	14,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				0 Dokumen	62,092,500		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						45,550,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						16,150,000							0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	20,620,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	6,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	184,873,500		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	1,528,624,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	44,360,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				0 Keluarga	20,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Keluarga	0	DINAS KESEHATAN
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						28,968,000							0	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						28,968,000							0	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	28,968,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						2,300,000						0		
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2,300,000						0		
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0 Dokumen	2,300,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK DAK Non Fisik- BOKKB-BOK	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,039,014,100						475,986,000		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						100,000,000						100,000,000		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						100,000,000						100,000,000		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	100,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit Kerja	100,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						852,110,100						289,082,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						852,110,100						289,082,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	11,800,000	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		150 Orang	11,800,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	6,500,000	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Sri Binangun Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Sri Bawono Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Sri Budaya Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Sri Busono Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Sangga Buana	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	3,000,000	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	3,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	3,400,000	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	7,800,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	10,200,000	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	10,200,000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	55,260,000	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0 Dokumen	56,280,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	45,550,000	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0 Dokumen	45,500,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	3,200,000	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0 Dokumen	3,200,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	17,100,000	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0 Dokumen	17,100,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	13,100,000	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0 Dokumen	13,100,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	104,796,000	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0 Dokumen	109,302,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	578,204,100	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0 Dokumen	11,800,000	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						86,904,000						86,904,000		
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						86,904,000						86,904,000		
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 Orang	86,904,000	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	3 Orang	86,904,000	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,539,613,000							0	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						100,000,000							0	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						100,000,000							0	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	100,000,000					0 Unit Kerja		0	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						2,352,709,000							0	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2,352,709,000							0	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	59,840,000					0 Orang		0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	4,050,000					0 Orang		0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	2,500,000					0 Orang		0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	12,140,000					0 Orang		0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	13,180,000						0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	48,480,000						0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	28,870,000						0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	1,600,000						0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	14,900,000						0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	11,650,000						0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	189,027,000						0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas						1,966,472,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0	DINAS KESEHATAN
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						86,904,000							0	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						86,904,000							0	
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	86,904,000						0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,952,614,000						0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						100,000,000							0	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						100,000,000							0	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,794,678,000							0	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,794,678,000							0	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						37,900,000							0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	750,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	10,200,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	12,700,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	2,700,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	1,200,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	3,800,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	61,530,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	10,183,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	21,000,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	18,675,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	12,050,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	148,700,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas						1,453,290,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0	DINAS KESEHATAN
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						57,936,000							0	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						57,936,000							0	
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	57,936,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,213,476,000								0
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						100,000,000							0	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						100,000,000							0	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	100,000,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Surabaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,955,864,100							0	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,955,864,100							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	63,700,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Surabaya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	1,850,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Surabaya, Semua Kelurahan			Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	7,850,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	12,000,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Surabaya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	1,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	57,520,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Surabaya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				0 Dokumen 0 Unit	32,310,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Surabaya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen 0 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	4,350,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Surabaya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	16,000,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Surabaya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	93,222,100	Kab. Lampung Tengah, Seputih Surabaya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	1,665,362,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Surabaya, Semua Kelurahan			Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						115,872,000							0	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						115,872,000							0	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	115,872,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						41,739,900							0	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						23,079,900							0	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				0 Dokumen	23,079,900	Kab. Lampung Tengah, Seputih Surabaya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						18,660,000						0		
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Dokumen 0 Orang	18,660,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Surabaya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen 0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,717,909,200							0	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						100,000,000							0	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						100,000,000							0	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	100,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,496,857,200							0	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,496,857,200							0	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	5,400,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	250,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	42,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						3,660,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	7,550,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	4,434,500		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	32,426,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	13,425,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	1,040,500		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	6,200,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	7,675,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	159,363,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas						1,213,433,200		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0	DINAS KESEHATAN	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						115,872,000								0	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						115,872,000								0	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	115,872,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						5,180,000								0	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						5,180,000								0	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0 Dokumen	5,180,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,958,205,000								0
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						100,000,000								0	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						100,000,000								0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	100,000,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sriwijaya Mataram Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sendang Agung Mataram Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Mataram Jaya Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sumber Rejeki Mataram	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,771,301,000								0	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,771,301,000								0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	17,143,500	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sendang Agung Mataram Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Mataram Jaya Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sumber Rejeki Mataram	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	2,000,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sendang Agung Mataram Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Mataram Jaya Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sumber Rejeki Mataram	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kelas Ibu Balita yang di kunjungi				0 Orang 3 kampung	1,800,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sendang Agung Mataram Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Mataram Jaya Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sumber Rejeki Mataram	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang 3 kampung	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	9,450,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sendang Agung Mataram Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Mataram Jaya Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sumber Rejeki Mataram	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kampung yang dibangun Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah petugas bimbingan konseling Pranikah ke KUA Jumlah Sekolah yang di kunjungi				3 kampung 0 Orang 1 orang 41	15,200,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sendang Agung Mataram Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Mataram Jaya Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sumber Rejeki Mataram	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		3 kampung 0 Orang 1 orang 41	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	4,700,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sendang Agung Mataram Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Mataram Jaya Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sumber Rejeki Mataram	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	5,400,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sendang Agung Mataram Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Mataram Jaya Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sumber Rejeki Mataram	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	36,540,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sendang Agung Mataram Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Mataram Jaya Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sumber Rejeki Mataram	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	39,036,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sendang Agung Mataram Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Mataram Jaya Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sumber Rejeki Mataram	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	20,132,500	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sendang Agung Mataram Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Mataram Jaya Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sumber Rejeki Mataram	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	6,967,500	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sendang Agung Mataram Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Mataram Jaya Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sumber Rejeki Mataram	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	16,132,500	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sendang Agung Mataram Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Mataram Jaya Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sumber Rejeki Mataram	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	71,650,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sendang Agung Mataram Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Mataram Jaya Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sumber Rejeki Mataram	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	1,525,149,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sendang Agung Mataram Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Mataram Jaya Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sumber Rejeki Mataram	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		4 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						86,904,000								0	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						86,904,000								0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	86,904,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sendang Agung Mataram Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Mataram Jaya Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sumber Rejeki Mataram	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							814,418,000								0
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						100,000,000									0
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						100,000,000									0
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit Kerja			0 DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						656,818,000									0
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						656,818,000									0
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	15,900,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Negara Bumi Ilir	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang			0 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	300,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	15,480,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	4,750,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	800,000					0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	800,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	40,100,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	17,850,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	7,800,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	22,850,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	24,546,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	77,090,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan					0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas						428,552,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0	DINAS KESEHATAN	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						57,600,000							0		
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						57,600,000							0		
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	57,600,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan					0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						171,955,000							0		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						171,955,000							0		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						171,955,000							0		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	171,955,000		Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						233,562,086,502							281,324,568,000		
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													6 dokumen	23,624,472,000	
1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun				dokumen		dokumen	6 dokumen				6 dokumen	49,200,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	32,976,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	6 Laporan	49,200,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsinya	dokumen		dokumen	8 dokumen	9,362,448,359						8 dokumen	9,797,309,000	
1 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/bulan	7,779,627,159		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	85 Orang/bulan	8,557,600,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1 03 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1,562,751,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	1 Dokumen	1,215,542,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	4,530,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	3 Laporan	4,983,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1 03 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	11,220,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	3 Laporan	14,432,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1 03 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	4,320,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	4 Dokumen	4,752,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang		orang	7 orang	70,000,000						7 orang	66,000,000	
1 03 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Pegawai Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	10 Orang	66,000,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	unit		unit	61 unit	7,839,770,565						61 unit	9,209,978,000	
1 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,388,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	1 Paket	8,100,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	69,041,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	1 paket	687,150,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	13,310,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	2 Paket	70,086,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	65,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	1 Paket	72,000,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1 03 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				6 Paket	7,368,024,315		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	6 Paket	8,000,000,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	317,356,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	12 Laporan	372,642,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit		unit	4 unit	2,336,300,000						4 unit	2,954,043,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit	488,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	6 Unit	550,543,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	1,848,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	1 Unit	2,403,500,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan		laporan	27 laporan	268,502,000						27 laporan	222,257,000	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	237,552,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	12 Laporan	195,307,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara				49 unit	30,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	49 unit	26,950,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	unit		unit	21 unit	1,222,322,500						21 unit	1,325,685,000	
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	565,860,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	20 Unit	592,185,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				10 Unit	498,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	10 Unit	533,500,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	157,522,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	1 Unit	200,000,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten Meningkatnya Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten	Km Km		Km Km	90,05 Km 90.05 Km	211,593,718,778						90,05 Km 90.05 Km	256,658,346,000		
1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	Km		Km	90.05 Km	211,593,718,778						90.05 Km	256,658,346,000		
1 03 10 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan				50 dokumen	5,604,539,500			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	50 dokumen	3,907,642,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1 03 10 2.01 03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan				1 dokumen	33,685,400			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	1 dokumen	1,000,000,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1 03 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				2 KM	10,388,689,655			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	2 KM	6,043,258,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1 03 10 2.01 08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				72.05 KM	160,034,726,653			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	72.05 KM	187,110,900,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1 03 10 2.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				12 KM	3,782,235,300			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	12 KM	4,364,200,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				14 KM	1,273,231,310			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	14 KM	9,663,700,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun				124 M	24,319,960,340		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	124 M	20,000,000,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1 03 10 2.01 16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian				23 M	753,463,620		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	23 M	20,000,000,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1 03 10 2.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				3 Unit	146,930,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	3 Unit	164,846,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1 03 10 2.01 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				15 Dokumen	156,257,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	15 Dokumen	250,000,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1 03 10 2.01 23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				48 Dokumen	5,100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	48 Dokumen	4,153,800,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya Kualitas Tenaga Terampil Konstruksi	orang		orang	84 orang	836,048,100						84 orang	1,041,750,000	
1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang bersertifikat	orang		orang	84 orang	806,886,300						84 orang	984,280,000	
1 03 11 2.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				360 Orang	806,886,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Pegawai Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	360 Orang	984,280,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data Dokumen Harga Satuan Bahan Dinas Bina Marga	dokumen		dokumen	1 dokumen	29,161,800						1 dokumen	57,470,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.11.2.02.07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan				1 Dokumen	29,161,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	1 Dokumen	57,470,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						29,462,696,142						29,661,433,599		
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	persen		persen	100 persen	18,919,000,021						100 persen	19,117,737,478	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	dokumen		dokumen	4 dokumen	65,478,000						4 dokumen	21,706,000	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	65,478,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	-	5 Dokumen	21,706,000	DINAS SUMBER DAYA AIR
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	dokumen		dokumen	4 dokumen	17,812,392,242						4 dokumen	17,925,573,142	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				196 Orang/bulan	16,224,648,342	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	0	196 Orang/bulan	16,224,648,342	DINAS SUMBER DAYA AIR
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				14 Dokumen	1,584,493,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	14 Dokumen	1,692,427,300	DINAS SUMBER DAYA AIR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	3,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	0	2 Laporan	8,497,500	DINAS SUMBER DAYA AIR
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya	orang		orang	3 orang	20,000,000						3 orang	20,000,000	
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	0	3 Orang	20,000,000	DINAS SUMBER DAYA AIR
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	jenis		jenis	42 jenis	387,389,779						42 jenis	447,903,336	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	5,659,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	-	3 Paket	13,303,200	DINAS SUMBER DAYA AIR
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	106,406,079	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	-	5 Paket	109,598,261	DINAS SUMBER DAYA AIR
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	10,189,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	-	8 Paket	30,352,500	DINAS SUMBER DAYA AIR
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	19,962,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	-	3 Paket	20,561,375	DINAS SUMBER DAYA AIR
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33 Laporan	245,173,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	-	33 Laporan	274,088,000	DINAS SUMBER DAYA AIR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	bulan		bulan	12 bulan	191,400,000						12 bulan	251,400,000	
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	191,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	0	12 Laporan	251,400,000	DINAS SUMBER DAYA AIR
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	unit		unit	78 unit	442,340,000						78 unit	451,155,000	
1 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	41,670,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	0	1 Unit	41,670,000	DINAS SUMBER DAYA AIR
1 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				55 Unit	383,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	0	55 Unit	383,350,000	DINAS SUMBER DAYA AIR
1 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	17,320,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	0	33 Unit	26,135,000	DINAS SUMBER DAYA AIR
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	persen		persen	26,28 persen	10,543,696,121						26,28 persen	10,543,696,121	
1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	persen		persen	34.62 persen	3,300,507,907						34.62 persen	3,300,507,907	
1 03 02 2.01 04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				18 Dokumen	1,800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	0	18 Dokumen	1,800,000,000	DINAS SUMBER DAYA AIR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				3 Unit	808,095,407	Kab. Lampung Tengah, Selagai Lingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	0	3 Unit	808,095,407	DINAS SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi Jumlah Retensi Rehabilitasi Embung				0 Unit 1 paket	9,130,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	0	0 Unit 1 paket	9,130,000	DINAS SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	111,442,500	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	0	1 Unit	111,442,500	DINAS SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota				196 Orang	304,142,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	0	196 Orang	304,142,500	DINAS SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota				630 Orang	267,697,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	0	630 Orang	267,697,500	DINAS SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	persen		persen	34.62 persen	7,243,188,214						34.62 persen	7,243,188,214	
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah retensi pembangunan jaringan irigasi permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				3 paket 0 KM	26,249,654	Kab. Lampung Tengah, Seputih Agung, Fajar Asri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	-	3 paket 0 KM	26,249,654	DINAS SUMBER DAYA AIR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				1.4359 KM	1,346,446,465	Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Purwo Dadi Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Ratna Chaton Kab. Lampung Tengah, Seputih Banyak, Sri Bhakti Kab. Lampung Tengah, Seputih Mataram, Banjar Agung Mataram Kab. Lampung Tengah, Seputih Agung, Simpang Agung Kab. Lampung Tengah, Seputih Agung, Bumi Kencana Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Sapto Mulyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	-	1.4359 KM	1,346,446,465	DINAS SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				5.37783 KM	5,263,887,540	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	-	5.37783 KM	5,263,887,540	DINAS SUMBER DAYA AIR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				3.9 KM	260,070,555	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	-	3.9 KM	260,070,555	DINAS SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Bendung	226,300,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	-	1 Bendung	226,300,000	DINAS SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi				18 Unit	120,234,000	Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Punggur, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan Kab.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	-	18 Unit	120,234,000	DINAS SUMBER DAYA AIR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
								Lampung Tengah, Rumbia, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Seputih Mataram, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Seputih Surabaya, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Way Pangubuan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											33,851,552,317		72,926,374,048	
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	persen		persen	85 persen	11,124,900					85 persen	11,124,900	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paket		Paket	5 Paket	11,124,900						5 Paket	11,124,900	
1 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	11,124,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	11,124,900	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah tangga yang memperoleh layanan akses air minum	persen		persen	93,28 persen	4,461,992,920						93,28 persen	21,468,811,420	
1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SPAM dan SPM terbangun guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat	titik lokasi		titik lokasi	18 titik lokasi	4,461,992,920						18 titik lokasi	21,468,811,420	
1 03 03 2.01 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu				2 Liter/detik	1,547,828,880		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	2 Liter/detik	3,413,284,100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1 03 03 2.01 06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu				0 2 Liter/detik	2,081,031,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	0 2 Liter/detik	17,087,678,500	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1 03 03 2.01 15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan				4 Unit	833,133,040		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	4 Unit	967,848,820	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik	persen		persen	96,35 persen	3,339,205,600						96,35 persen	17,843,840,000	
1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah IPAL terbangun guna memenuhi kebutuhan sanitasi masyarakat	Titik Lokasi		Titik Lokasi	11 Titik Lokasi	3,339,205,600						11 Titik Lokasi	17,843,840,000	
1 03 05 2.01 12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah				272 Rumah Tangga	3,339,205,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	272 Rumah Tangga	17,843,840,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang drainase permukiman	persen		persen	69,49 persen	408,615,767						69,49 persen	2,811,757,100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 06 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Wilayah Perkotaan yang memiliki saluran drainase yang baik	meter		meter	500 meter	408,615,767						500 meter	2,811,757,100	
1 03 06 2.01 05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				500 M	408,615,767		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	500 M	2,811,757,100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Presentase Komplek Perumahan dengan PSU Memadai	persen		persen	48 persen	573,236,200						48 persen	1,322,724,100	
1 03 07 2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jalan permukiman terbangun	Titik Lokasi		Titik Lokasi	4 Titik Lokasi	573,236,200						4 Titik Lokasi	1,322,724,100	
1 03 07 2.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				4 Sistem Jaringan	573,236,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	4 Sistem Jaringan	1,322,724,100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan gedung ber IMB dan memenuhi standar keselamatan	persen		persen	52 persen	24,551,926,530						52 persen	29,245,149,328	
1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang memenuhi standar keselamatan dan ramah lingkungan	unit		unit	25 unit	24,551,926,530						25 unit	29,245,149,328	
1 03 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				10 Dokumen	19,373,738,050		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	10 Dokumen	21,018,311,050	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1 03 08 2.01 12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui				16 Unit	4,440,047,238		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	16 Unit	7,205,566,238	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 08 2.01 13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan				3 Unit	738,141,242		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	3 Unit	1,021,272,040	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata	persen		persen	52 persen	150,587,200						52 persen	197,967,200	
1 03 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan gedung dan lingkungannya yang memenuhi standar keselamatan dan ramah lingkungan	Kawasan		Kawasan	12 Kawasan	150,587,200						12 Kawasan	197,967,200	
1 03 09 2.01 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				1 Kawasan	150,587,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Kawasan	197,967,200	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase luas pemanfaatan tata ruang sesuai dengan rencana daerah	persen		persen	75 persen	354,863,200						75 persen	25,000,000	
1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	0 Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	0 Dokumen		0 Dokumen	0 0 1 Dokumen	201,539,100						0 0 1 Dokumen	0	
1 03 12 2.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	201,539,100				Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	0	1 Dokumen		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	0 Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	0 Rekomendas		0 Rekomendasi	0 0 10 Rekomendasi	153,324,100						0 0 10 Rekomendasi	25,000,000	
1 03 12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				10 Dokumen	133,324,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	0	10 Dokumen		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang				1 Dokumen	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	25,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							20,360,561,164						21,409,595,033	
1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	persen		persen	100 persen	11,235,894,733						100 persen	9,907,891,033	
1 04 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran dan laporan capaian kinerja	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	133,749,000						2 Dokumen	200,000,000	
1 04 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	133,749,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	200,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1 04 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	9,502,931,033						6 Dokumen	8,957,891,033	
1 04 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	7,377,891,033		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	80 Orang/bulan	7,377,891,033	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1 04 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	2,066,160,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	12 Dokumen	1,500,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1 04 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	58,880,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	80,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1 04 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang terlayani	persen		persen	100 persen	50,000,000						100 persen	60,000,000	
1 04 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	10 Orang	60,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paket		Paket	5 Paket	645,244,700						5 Paket	530,000,000	
1 04 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	23,951,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	30,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1 04 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	335,930,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	190,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1 04 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	47,073,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	60,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1 04 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	51,280,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	60,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	187,010,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	36 Laporan	190,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1 04 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya sarana dan prasarana penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit		unit	2 unit	66,880,000						2 unit	70,000,000	
1 04 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	66,880,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	2 Unit	70,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1 04 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pegawai yang terlayani	persen		persen	100 persen	244,640,000						100 persen	30,000,000	
1 04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	244,640,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	12 Laporan	30,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan dinas yang terpelihara, aman, nyaman, laik jalan dan bermanfaat sesuai dengan fungsinya	unit		unit	59 unit	592,450,000						59 unit	60,000,000	
1 04 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				33 Unit	562,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	33 Unit	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1 04 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	30,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	26 Unit	60,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak huni dan Kawasan Kumuh yang ditangani	persen		persen	82,61 persen	33,041,900						82,61 persen	200,000,000	
1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen data tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	33,041,900						1 Dokumen	200,000,000	
1 04 02 2.01 04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	33,041,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	200,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak huni dan Kawasan Kumuh yang ditangani	persen		persen	82,61 persen	6,162,574,700						82,61 persen	6,266,384,000	
1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah luasan Permukiman kumuh dan jumlah rumah yang tertangani	KK KK		KK KK	280 KK 280 KK	6,162,574,700						280 KK 280 KK	6,266,384,000	
1 04 04 2.01 02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1 Dokumen	6,162,574,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	6,266,384,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Presentase Komplek Perumahan dengan PSU Memadai	persen		persen	48 persen	2,929,049,831						48 persen	5,035,320,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan permukiman berkualitas dan sehat Jumlah Prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan permukiman berkualitas dan sehat	0 Lokasi		0 Lokasi	0 0 15 Lokasi	2,929,049,831					0 0 15 Lokasi	5,035,320,000		
1 04 05 2.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				5 Dokumen	307,499,973		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	5 Dokumen	501,340,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				15 Lokasi	2,621,549,858		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	15 Lokasi	4,533,980,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						159,056,300							0	
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Konflik Tanah Yang Difasilitasi oleh daerah	persen		persen	60 persen	25,715,500							60 persen	0
2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen		0 Dokumen	0 0 2 Dokumen	25,715,500							0 0 2 Dokumen	0
2 10 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	25,715,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	2 Berita Acara		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase realisasi penyediaan tanah untuk kepentingan umum di daerah	0		0	0 0	133,340,800							0 0	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2 10 05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen		0 Dokumen	0 0 1 Dokumen	133,340,800					0 0 1 Dokumen	0			
2 10 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	133,340,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	1 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CRIPTA KARYA	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						21,102,442,244							22,600,467,050		
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku	Persen		Persen	100 Persen	19,766,071,612							100 Persen	20,902,000,050	
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						47,015,400							50		
1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	47,015,400	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	SAT POL PP	1 Laporan	50	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						18,855,234,612							20,000,000,000		
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/bulan	11,727,954,612		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		1 Orang/bulan	12,000,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1 05 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	7,127,280,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		1 Dokumen	8,000,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						168,342,600						232,000,000		
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,947,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		1 Paket	5,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4,559,300				Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		1 Paket	7,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	35,650,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		1 Paket	50,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	37,636,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		1 Paket	40,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	85,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		1 Laporan	130,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						74,999,000							80,000,000	
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	74,999,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		1 Laporan	80,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						620,480,000							560,000,000	
1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21 Unit	620,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		21 Unit	560,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						882,477,800							935,000,000	
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						757,137,900							615,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				1 Kasus	479,169,000					Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		1 Kasus	185,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 05 02 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	73,008,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		1 Dokumen	350,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4495 Orang	204,960,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		4495 Orang	80,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						125,339,900								320,000,000	
1 05 02 2.02 03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP				1 Laporan	125,339,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		1 Laporan	320,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						453,892,832								763,467,000	
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						415,579,500								689,400,000	
1 05 04 2.01 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	415,579,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		1 Dokumen	467,800,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 05 04 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						26,148,500								31,267,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 05 04 2.02 01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	26,148,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan konduktivitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		1 Dokumen	31,267,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						12,164,832							42,800,000		
1 05 04 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				150 Orang	12,164,832		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan konduktivitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		150 Orang	42,800,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							4,698,424,786							5,909,173,786	
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4,206,666,686							5,169,323,786	
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						53,233,000							92,000,000		
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	8,774,300	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	32,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	9,681,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	10,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	6,867,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	10,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	6,948,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	10,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4,481,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	10,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	7,994,800					1 Laporan	10,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	8,484,100					1 Laporan	10,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,508,124,186						4,325,388,786	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah 24 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					24 Orang/Bulan 0 Orang/bulan	2,658,201,386	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			24 Orang/Bulan 0 Orang/bulan	2,936,301,386	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1 Dokumen	835,598,400	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	1,350,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	5,843,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	10,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					4 Laporan	8,481,400	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 Laporan	29,087,400	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							31,200,000						100,100,000	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (54 orang)					1 Paket	31,200,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Paket	100,100,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							209,339,500						220,165,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8,173,600	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Paket	9,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	85,102,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Paket	100,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6,693,900	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Paket	10,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	23,725,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Paket	15,520,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	85,645,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	85,645,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						119,140,000						90,000,000		
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	64,000,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	75,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	55,140,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	15,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						285,630,000						341,670,000		
1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	41,670,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Unit	41,670,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	243,960,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16 Unit	300,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						491,758,100						739,850,000		
1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						407,585,300						579,600,000		
1 05 03 2.02 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi				1 Dokumen	16,196,500	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	22,800,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 03 2.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas				60 Unit	89,345,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60 Unit	110,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 03 2.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				1 Kawasan	35,025,400	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Kawasan	50,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 03 2.02 07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah yang mendapat Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				300 orang	233,760,800	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			300 orang	300,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 03 2.02 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				52 Orang	33,257,600	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				52 Orang	96,800,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						84,172,800							160,250,000	
1 05 03 2.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				50 Orang	49,272,800	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50 Orang	71,250,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				200 Orang	34,900,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200 Orang	89,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						6,840,219,494						7,242,691,094		
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Persen		Persen	100 Persen	4,199,788,094						100 Persen	4,255,691,094	
1 06 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan perangkat daerah yang dibuat tepat waktu	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	21,202,000						10 Dokumen	21,850,000	
1 06 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	9,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	9,850,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	5,326,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	2 Laporan	5,500,000	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6,026,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	6 Laporan	6,500,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Pelayanan		Pelayanan	2 Pelayanan	3,511,110,994						2 Pelayanan	3,512,841,094	
1 06 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	3,012,841,094		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	35 Orang/bulan	3,012,841,094	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	498,269,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	12 Dokumen	500,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Pelayanan		Pelayanan	1 Pelayanan	8,000,000						1 Pelayanan	20,000,000	
1 06 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	2 Orang	20,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Pelayanan		Pelayanan	5 Pelayanan	300,199,100						5 Pelayanan	311,000,000	
1 06 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5,538,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	5 Paket	6,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	82,270,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	4 Paket	90,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	4,632,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	6 Paket	5,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				17 Paket	83,655,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	17 Paket	85,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	124,104,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	24 Laporan	125,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	77,686,000						3 Jenis	90,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	63,376,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	2 Unit	75,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	14,310,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	2 Paket	15,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	100,000,000						3 Jenis	110,000,000	
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	12 Laporan	110,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit		Unit	64 Unit	181,590,000						64 Unit	190,000,000	
1 06 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	118,140,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	36 Unit	120,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	14 Unit	15,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	49,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	4 Unit	55,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase (%) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang di bentuk dan dibina;	Persen		Persen	75 Persen	680,516,700						75 Persen	760,000,000	
1 06 02 2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilakukan pembinaan diberikan	Dokumen Jenis		Dokumen Jenis	1 Dokumen 3 Jenis	36,148,000						1 Dokumen 3 Jenis	50,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi				1 Dokumen 56 Orang	36,148,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	1 Dokumen 56 Orang	50,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilakukan pembinaan diberikan	Jenis		Jenis	3 Jenis	644,368,700						3 Jenis	710,000,000	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				33 Orang	65,955,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	33 Orang	85,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				28 Orang	57,075,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	28 Orang	80,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Keluarga	35,184,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	40 Keluarga	45,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang diverifikasi dan divalidasi Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah unsur kepahlawanan yang mendapatkan santunan				43 Lembaga 3 Lembaga 250 Orang	486,153,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	43 Lembaga 3 Lembaga 250 Orang	500,000,000	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen Persen Persen Persen		Persen Persen Persen Persen	40 Persen 40 Persen 10 Persen 5 Persen	890,912,200					40 Persen 40 Persen 10 Persen 5 Persen	958,000,000		
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang Orang Orang Orang		Orang Orang Orang Orang	306 Orang 13 Orang 526 Orang 336 Orang	708,090,100					306 Orang 13 Orang 526 Orang 336 Orang	767,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Disabilitas Terlantar yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				261 Orang 13 Orang 526 Orang	249,549,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	261 Orang 13 Orang 526 Orang	250,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	209,659,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	300 Orang	210,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	169,517,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	100 Orang	180,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	18,647,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	50 Orang	30,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	7,647,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	50 Orang	22,000,000	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 04 2.01 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				560 Orang	53,071,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	560 Orang	75,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantii Sosial						182,822,100							191,000,000	
1 06 04 2.02 06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Pantii	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Pantii Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Orang	163,322,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		75 Orang	165,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 04 2.02 14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				8 Dokumen	19,500,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		8 Dokumen	26,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase (%) PMKS skala Kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Persentase (%) Verifikasi dan validasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional Persentase (%) Verifikasi dan Validasi Data Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Verifikasi dan Validasi data Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Kabupaten	Persen Persen Persen Persen		Persen Persen Persen Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	557,468,800						100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	698,000,000	
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola	Keluarga		Keluarga	71740 Keluarga	557,468,800						71740 Keluarga	698,000,000	
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				30000 Orang	237,598,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	30000 Orang	215,000,000	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				30000 Keluarga	80,256,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	30000 Keluarga	85,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				71740 Keluarga	174,852,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	71740 Keluarga	323,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 05 2.02 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	64,762,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	100 Orang	75,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana lam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten Persentase TAGANA Aktif	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	511,533,700						100 Persen 100 Persen	571,000,000	
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang ditangani	Orang		Orang	810 Orang	420,569,700						810 Orang	465,000,000	
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				810 Orang	259,252,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	810 Orang	280,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 06 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	62,329,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	50 Orang	65,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 06 2.01 03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Unit	49,632,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	4 Unit	55,000,000	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan konduktivitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	100 Orang	30,000,000	DINAS SOSIAL		
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan konduktivitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	180 Orang	35,000,000	DINAS SOSIAL		
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat yang memiliki kesiapsiagaan terhadap bencana	Kelompok		Kelompok	4 Kelompok	90,964,000			4 Kelompok	106,000,000			
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Kampung	28,951,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan konduktivitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	3 Kampung	29,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	62,013,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan konduktivitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	50 Orang	77,000,000	DINAS SOSIAL
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						4,397,034,749						4,212,747,260	
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Persen		Persen	82 Persen	3,849,785,199					82 Persen	3,513,407,360	
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Persen		Persen	87 Persen	17,562,300					87 Persen	18,970,300	
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				30 Dokumen	11,812,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	30 Dokumen	13,220,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				30 Laporan	5,750,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	30 Laporan	5,750,300	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumah aparaturn perangkat daerah yang terlayani	Unit		Unit	90 Unit	3,380,720,399						90 Unit	2,958,950,560	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	3,012,780,099		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	12 Orang/bulan	2,933,950,560	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				40 Dokumen	367,940,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	40 Dokumen	25,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50,000,000							25,000,000	
2.07.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		40 Orang	25,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	Jenis		Jenis	80 Jenis	205,504,600						80 Jenis	288,746,500	
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	21,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	1 Paket	106,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3,990,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	1 Paket	10,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	14,133,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	1 Paket	15,765,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				40 Dokumen	54,003,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	40 Dokumen	54,003,500	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	111,978,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	24 Laporan	102,978,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah terpelihara dengan baik"	persen		persen	91 persen	8,000,000						91 persen	50,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	5 Unit	50,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	Persen		Persen	86 Persen	75,472,900						86 Persen	42,420,000	
2 07 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				410 Laporan	2,310,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	410 Laporan	2,310,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				20 Laporan	73,162,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	20 Laporan	40,110,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah terpelihara dengan baik"	Persen		Persen	91 Persen	112,525,000						91 Persen	129,320,000	
2 07 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya				2 Unit	78,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	2 Unit	78,670,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	12,180,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	30 Unit	12,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	22,005,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	1 Unit	38,150,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	Persen		Persen	90 Persen	165,750,100						90 Persen	165,749,900	
2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	Orang		Orang	100 Orang	83,308,700						100 Orang	87,018,500	
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				50 Orang	83,308,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	50 Orang	87,018,500	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 03 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang berkualitas	Persen		Persen	90 Persen	43,818,200						90 Persen	40,019,900	
2 07 03 2.02 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				45 Lembaga	43,818,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	45 Lembaga	40,019,900	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 03 2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan kecil yang berkualitas	Persen		Persen	90 Persen	38,623,200						90 Persen	38,711,500	
2 07 03 2.04 01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas				10 Perusahaan	38,623,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	10 Perusahaan	38,711,500	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Persen		Persen	80 Persen	240,749,700						80 Persen	405,840,000	
2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	orang		orang	2500 orang	135,477,300						2500 orang	200,446,000	
2 07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				2270 Orang	28,068,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	2270 Orang	65,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 04 2.03 03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				200 Orang	107,408,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	200 Orang	135,446,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 04 2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pmi (Pra dan Purna Penempatan) mendapat perlindungan pemerintah daerah	orang		orang	75 orang	105,272,400						75 orang	205,394,000	
2 07 04 2.04 01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				15 Orang	49,910,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	15 Orang	150,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 04 2.04 03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				20 Orang	55,362,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	20 Orang	55,394,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah perselisihan antara pengusaha/buruh di lingkungan perusahaan yang ada dikab.lampung tengah semakin menurun	Kasus		Kasus	14 Kasus	140,749,750						14 Kasus	127,750,000	
2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online	Perusahaan		Perusahaan	30 Perusahaan	40,928,500						30 Perusahaan	48,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 05 2.01 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				35 Perusahaan	40,928,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	35 Perusahaan	48,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang di cegah	perkara		perkara	15 perkara	99,821,250						15 perkara	79,750,000	
2 07 05 2.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				20 Perkara	60,895,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	20 Perkara	44,750,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 05 2.02 05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				52000 Orang	38,926,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	52000 Orang	35,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						140,750,000							140,750,000	
3 32 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase peserta transmigrasi yang diberangkatkan	Persen		Persen	85 Persen	140,750,000						85 Persen	140,750,000	
3 32 03 2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon transmigran yang akan diberangkatkan	KK		KK	20 KK	140,750,000						20 KK	140,750,000	
3 32 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	27,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	2 Laporan	27,800,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3 32 03 2.01 04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan				20 Kepala Keluarga	49,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	20 Kepala Keluarga	49,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3 32 03 2.01 05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan				250 Kepala Keluarga	37,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	250 Kepala Keluarga	37,200,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3 32 03 2.01 06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan				50 Orang	26,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	50 Orang	26,750,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08							5,432,284,802						4,611,898,412		
2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	jumlah Dokumen yang tersusun	8		8	8 8	3,162,751,272					8 8	3,467,223,872		
2 08 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	8 dokumen	32,718,500					8 dokumen	32,718,500		
2 08 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	26,868,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	8 Dokumen	26,868,500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				8 Dokumen	5,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	8 Dokumen	5,850,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan tunjangan	orang		orang	37 orang	2,699,836,572						37 orang	2,982,436,572	
2 08 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	2,388,436,572	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	22 Orang/bulan	2,673,436,572	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen	311,400,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	8 Dokumen	309,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi umum	persen		persen	100 persen	190,400,900						100 persen	197,597,900	
2 08 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,651,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 Paket	3,651,700	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpenuhinya peralatan kendaraan	unit		unit	6 unit	143,993,000						6 unit	157,010,000	
2 08 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	127,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	dinas pembebrdayaan perempuan dan perlindungan anak	6 Unit	127,010,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	16,983,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	dinas pembebrdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 Unit	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	orang		orang	60 orang	1,290,262,130						60 orang	149,890,000	
2 08 02 2.01	Pelebagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan	orang		orang	60 orang	1,190,262,130						60 orang	49,890,000	
2 08 02 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	terlaksananya sosialisasi kebijakan pelaksanaa npergarustamaan PUG Teramsuk perencanaan Pembangunan responsif Gender PPRG bagi organisasi Pemerintahan Kewenangan				32 Perangkat Daerah	1,190,262,130	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	orang	32 Perangkat Daerah	49,890,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	organisasi organisasi		organisasi organisasi	10 organisasi 10 organisasi	100,000,000						10 organisasi 10 organisasi	100,000,000	
2 08 02 2.02 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Organisasi	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	280 orang dengan 10 Organisasi	10 Organisasi	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang		orang	280 orang	234,175,000						280 orang	234,175,000	
2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang		orang	280 orang	135,950,000						280 orang	135,950,000	
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	135,950,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	masyarakat	3 Dokumen	135,950,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 03 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		Orang	180 Orang	98,225,000						180 Orang	98,225,000	
2 08 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				300 Orang	98,225,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	masyarakat	300 Orang	98,225,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang		orang	100 orang	170,550,000						100 orang	170,550,000	
2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang		orang	100 orang	170,550,000						100 orang	170,550,000	
2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah laporan peningkatan Bagi Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas keluarga kewenangan Kab/Kota				100 kader	170,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	warga Binaan P3KSS	100 kader	170,550,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Buku		Buku	90 Buku	49,800,000						90 Buku	49,800,000	
2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	buku		buku	90 buku	49,800,000						90 buku	49,800,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kabupaten/Kota				90 Buku	49,800,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	OPD	90 Buku	49,800,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	anak		anak	60 anak	313,110,000						60 anak	313,110,000	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	orang		orang	60 orang	193,152,000						60 orang	193,152,000	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				38 OPD dan Dunia Usaha	179,418,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	anak Kabupaten Lampung tengah	38 OPD dan Dunia Usaha	179,418,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	13,734,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	anak Kabupaten Lampung tengah	1 Dokumen	13,734,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	tersosialisasinya tentang hak-hak anak	anak/organisas		anak/organisas	480 anak/organisas	119,958,000						480 anak/organisas	119,958,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	28,380,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	anak dan kelompok organisasi	60 Orang	28,380,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	45,604,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	anak dan kelompok organisasi	1 Dokumen	45,604,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	14,320,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	anak dan kelompok organisasi	1 Dokumen	14,320,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	31,654,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	anak dan kelompok organisasi	1 Dokumen	31,654,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	terpenuhinya hak -hak anak	orang		orang	180 orang	211,636,400						180 orang	227,149,540	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	terpenuhinya hak -hak anak	orang		orang	60 orang	56,505,000						60 orang	56,505,000	
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				32 sektor/Pondok pesantren	43,028,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	orang	32 sektor/Pondok pesantren	43,028,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	13,477,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	orang	1 Dokumen	13,477,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pengaduan yang terlayani	persen		persen	100 persen	155,131,400						100 persen	170,644,540	
2 08 07 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 persen	155,131,400	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	perempuan dan anak korban kekerasan	100 persen	170,644,540	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						9,068,861,400						9,563,000,000		
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Desa dengan Kemandirian Pangan	rasio		rasio	47 rasio	7,000,000,000						47 rasio	8,000,000,000	
2 09 02 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	unit		unit	8 unit	7,000,000,000						8 unit	8,000,000,000	
2 09 02 2.01 01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia				7 Unit	7,000,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Gapoktan dan KWT	7 Unit	8,000,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rasio cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan (beras)	rasio		rasio	70 rasio	1,689,607,300						70 rasio	1,189,600,000	
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah	Persen		Persen	90 Persen	603,749,000						90 Persen	404,100,000	
2 09 03 2.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	454,199,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Gapoktan dan KWT	1 Laporan	105,600,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				1 Dokumen	69,910,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Gapoktan dan KWT	1 Dokumen	77,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2 09 03 2.01 06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				7 Unit	79,640,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Gapoktan dan KWT	7 Unit	221,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah CCP (Cadangan Pangan Pemerintah) yang disediakan (Beras)	ton		ton	30 ton	466,885,000						30 ton	339,500,000	
2 09 03 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	80,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Gapoktan, KWT dan Kelompok Masyarakat lainnya	1 Laporan	121,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2 09 03 2.02 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				1 Dokumen	244,364,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Gapoktan, KWT dan Kelompok Masyarakat lainnya	1 Dokumen	93,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2 09 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				10 Ton	142,021,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Gapoktan, KWT dan Kelompok Masyarakat lainnya	10 Ton	125,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase pelaksanaan Target Konsumsi pangan perkapita pertahun	Persen		Persen	90 Persen	618,973,300						90 Persen	446,000,000	
2 09 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	222,546,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	KWT	1 Dokumen	91,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				2 Laporan	60,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	KWT	2 Laporan	145,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2 09 03 2.04 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	336,427,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	KWT	1 Laporan	210,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Rawan Pangan	Persen		Persen	28 Persen	203,541,000						28 Persen	165,900,000	
2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan yang disusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	56,226,000						1 dokumen	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	56,226,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Masyarakat umum dan kelompok pangan yang membutuhkan data pangan	1 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung Rentan Rawan Pangan yang ditangani	kampung		kampung	10 kampung	147,315,000						10 kampung	165,900,000	
2 09 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	147,315,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Masyarakat di daerah rawan pangan dan stunting	1 Laporan	165,900,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	Persen		Persen	95 Persen	175,713,100						95 Persen	207,500,000	
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pangan segar yang diawasi	sampel		sampel	9 sampel	175,713,100						9 sampel	207,500,000	
2 09 05 2.01 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina				1 Dokumen	57,845,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pelaku Usaha Pangan dan Masyarakat umum	1 Dokumen	65,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2 09 05 2.01 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				14 Sertifikat	67,485,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pelaku Usaha Pangan dan Masyarakat umum	14 Sertifikat	75,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2 09 05 2.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50,383,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pelaku Usaha Pangan dan Masyarakat umum	1 Dokumen	67,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						35,669,946,717							41,164,507,432	
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	persen		persen	100 persen	28,235,204,732						100 persen	29,414,357,232	
3 27 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	dokumen		dokumen	3 dokumen	17,150,000						3 dokumen	23,500,000	
3 27 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	2 Dokumen	4,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4,760,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3 27 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2,760,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	1 Dokumen	3,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3 27 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	4,030,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	1 Laporan	8,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3 27 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	2,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	12 Laporan	2,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3 27 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi Keuangan	bulan		bulan	12 bulan	27,059,235,732						12 bulan	28,169,371,732	
3 27 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	23,496,075,732		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	12 Orang/bulan	24,496,075,732	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3 27 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3,555,746,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	3 Dokumen	3,665,796,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3 27 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	1 Dokumen	4,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3 27 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	4,414,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	6 Laporan	3,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3 27 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	jenis		jenis	12 jenis	502,999,000						12 jenis	597,015,500	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	6,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	1 Paket	7,300,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					10 Paket	24,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	10 Paket	50,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					3 Paket	3,297,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	3 Paket	5,397,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					2 Paket	126,109,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	2 Paket	171,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					5 Paket	23,212,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	5 Paket	24,213,500	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	320,079,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	12 Laporan	339,105,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	bulan		bulan		12 bulan	393,550,000							12 bulan	410,000,000	
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	393,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai kantor	12 Laporan	410,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	unit		unit		40 unit	262,270,000							40 unit	214,470,000	
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	41,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	1 Unit	42,670,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					2 Unit	110,160,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	2 Unit	75,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	68,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	60 Unit	51,800,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3 27 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	41,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	2 Unit	45,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Presentase peningkatan pendampingan sarana produksi pertanian utama (padi & cabai)	persen		persen	8 persen	508,450,450						8 persen	641,000,000	
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	persen		persen	5 persen	508,450,450						5 persen	641,000,000	
3 27 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				20 Laporan	143,130,450		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Petani	20 Laporan	280,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	365,320,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Petani	1 Laporan	361,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana yang digunakan	persen		persen	99,96 persen	4,417,966,000						99,96 persen	6,938,426,000	
3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase lahan sawah yang terdata	persen		persen	83 persen	936,880,000						83 persen	388,850,000	
3 27 03 2.01 01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola				1 Dokumen	606,980,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Petani, masyarakat	1 Dokumen	281,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3 27 03 2.01 02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				1 Dokumen	163,530,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Petani, masyarakat	1 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3 27 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				20 Laporan	166,370,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Petani, masyarakat	20 Laporan	107,850,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase luas sawah yang terairi	persen		persen	87 persen	3,481,086,000						87 persen	6,549,576,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara				3 Unit	634,554,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Petani, Masyarakat	3 Unit	734,600,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	360,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Petani, Masyarakat	3 Unit	470,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	400,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Petani, Masyarakat	4 Unit	600,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	360,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Petani, Masyarakat	3 Unit	710,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				7 Unit	1,200,341,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Petani, Masyarakat	7 Unit	1,900,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	526,191,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Petani, Masyarakat	3 Unit	2,134,976,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase fasilitas penanggulangan bencana	persen		persen	12,02 persen	505,027,500							12,02 persen	25,940,000	
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	persen		persen	28 persen	505,027,500							28 persen	25,940,000	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				8700 Ha	481,127,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Petani, masyarakat	8700 Ha	0		DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	05	2.01	05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan				16 Laporan	23,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Petani, masyarakat	16 Laporan	25,940,000		DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh	persen		persen	4,5 persen	2,003,298,035							4,5 persen	4,144,784,200	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
3	27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	persen	persen	0.75 persen	2,003,298,035						0.75 persen	4,144,784,200		
3	27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			10 Unit	30,210,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Petani dan penyuluh pertanian	10 Unit	31,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			700 Unit	820,841,035		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Petani dan penyuluh pertanian	700 Unit	795,675,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			28 Unit	198,744,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Petani dan penyuluh pertanian	28 Unit	200,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27 07 2.01 05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi			5 Unit	953,503,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Petani dan penyuluh pertanian	5 Unit	3,118,109,200	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						11,802,662,020							10,936,000,000	
2	11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	100	100 100	7,556,772,520						100 100	7,326,000,000		
2	11 01	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	dokumen	dokumen	4 dokumen	22,000,000						4 dokumen	50,000,000		
2	11 01	2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen	11,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah	4 Dokumen	25,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 01	2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 Laporan	11,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah	4 Laporan	25,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Administrasi Keuangan OPD(%)	%	%	80 %	6,136,120,520						80 %	6,300,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	3,550,000,520		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	DInas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah	48 Orang/bulan	3,700,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN dan Non ASN yang mendapatkan honor Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				160 Orang/bulan 1 Dokumen	2,586,120,000					DInas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah	160 Orang/bulan 1 Dokumen	2,600,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti (jenis)	jenis		jenis	2 jenis	10,000,000						2 jenis	10,000,000	
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	ASN DLH Lampung Tengah	2 Orang	10,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor (jenis) Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan Jumlah ketersediaan kebutuhan bahan logistik kantor (jenis) Jumlah ketersediaan Kebutuhan Cetak dan Penggandaan (item) Jumlah ketersediaan kebutuhan peralatan rumah tangga (Jenis) Jumlah Komponen listrik/penerangan yang diadakan(jenis) Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali) Tersedianya makan dan minum untuk Peserta Rapat/Tamu Jumlah penyediaan makan dan minum peserta rapat/tamu (bulan)	jenis buku jenis item jenis jenis kali bulan		jenis buku jenis item jenis jenis kali bulan	3 jenis 10 buku 50 jenis 11 item 18 jenis 10 jenis 100 kali 12 bulan	238,200,000						3 jenis 10 buku 50 jenis 11 item 18 jenis 10 jenis 100 kali 12 bulan	321,000,000	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Kantor DLH Lampung Tengah	10 Paket	5,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	9,560,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Kantor DLH Lampung Tengah	2 Paket	50,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	5,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Kantor DLH Lampung Tengah	2 Paket	6,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	39,120,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Kantor DLH Lampung Tengah	3 Paket	25,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	16,780,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Kantor DLH Lampung Tengah	10 Paket	15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				30 Dokumen	1,440,000				Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Kantor DLH Lampung Tengah	30 Dokumen	30,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	17,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Kantor DLH Lampung Tengah	12 Laporan	30,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas daerah				100 kali	145,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Kantor DLH Lampung Tengah	100 kali	160,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Mebeuler yang diadakan(unit) Jumlah peralatan kantor yg diadakan (unit)	unit unit		unit unit	9 unit 5 unit	62,200,000						9 unit 5 unit	120,000,000	
2 11 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				9 Unit	20,000,000				Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor DLH Lampung Tengah	9 Unit	60,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	42,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor DLH Lampung Tengah	5 Unit	60,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang dipenuhi	jenis		jenis	3 jenis	86,552,000						3 jenis	100,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah	2 Dokumen	100,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	0Persentase titik sampling Kualitas air sampling yang memenuhi standar baku mutu Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	% %		% %	73 % 83 %	2,006,959,500						73 % 83 %	865,000,000	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Kategori Titik Pantau Kualitas Udara ambien (Jenis) Kategori Kualitas Air yang dipantau	jenis jenis		jenis jenis	4 jenis 2 jenis	1,975,839,500						4 jenis 2 jenis	850,000,000	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1,419,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Kualitas Air DAS Way Seputih, Way Terusan dan Way Pengubuan Kualitas Udara Perkotaan, Pemukiman, Perkantoran dan Jalan Raya	1 Dokumen	200,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	48,316,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Kualitas Air DAS Way Seputih, Way Terusan dan Way Pengubuan Kualitas Udara Perkotaan, Pemukiman, Perkantoran dan Jalan Raya	1 Dokumen	50,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				1 Dokumen	508,123,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Kualitas Air DAS Way Seputih, Way Terusan dan Way Pengubuan Kualitas Udara Perkotaan, Pemukiman, Perkantoran dan Jalan Raya	1 Dokumen	600,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Acara Sosialisasi LH	orang		orang	75 orang	31,120,000						75 orang	15,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	31,120,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Pelaku Usaha perorangan atau perusahaan	1 Laporan	15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	0Persentase RTH yang Terpelihara	81,48		81,48	81,48 81,48	388,280,000						81,48 81,48	660,000,000	
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah RTH yang terpelihara	titik		titik	20 titik	388,280,000						20 titik	660,000,000	
2 11 04 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	RTH Lampung Tengah	1 Dokumen	60,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				5.26 Ha	338,280,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	RTH Lampung Tengah	5.26 Ha	600,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Total Perusahaan yang memiliki Perizinan B3 dengan Total Perusahaan	%		%	25 %	76,000,000						25 %	100,000,000	
2 11 05 2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Perizinan dan Instalasi LB 3 Perusahaan yang diverifikasi (Perusahaan)	perusahaan		perusahaan	35 perusahaan	76,000,000						35 perusahaan	100,000,000	
2 11 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				1 Laporan	76,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Pelaku Usaha Perorangan atau Perusahaan yang menghasilkan Limbah B3	1 Laporan	100,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rasio pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) di Kabupaten terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten	% %		% %	6 % 70 %	123,500,000					6 % 70 %	165,000,000		
2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha atau kegiatan yang memenuhi ketaatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan	perusahaan		perusahaan	35 perusahaan	123,500,000					35 perusahaan	165,000,000		
2 11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				2 Dokumen	62,500,000				Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Pelaku Usaha Perorangan atau Perusahaan di Lampung Tengah	2 Dokumen	75,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 06 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLH yang mengikuti pengembangan kapasitas				2 orang	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Pelaku Usaha Perorangan atau Perusahaan di Lampung Tengah	2 orang	40,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	21,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Pelaku Usaha Perorangan atau Perusahaan di Lampung Tengah	1 Laporan	50,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	0Jumlah MHA yg diakui pemerintah	kelompok		kelompok	1 kelompok	53,000,000						1 kelompok	60,000,000	
2 11 07 2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Meningkatnya partisipasi Kelompok MHA	kelompok		kelompok	1 kelompok	53,000,000						1 kelompok	60,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 07 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen	53,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Kelompok MHA di Lampung Tengah	1 Dokumen	60,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	%		%	100 %	201,000,000						100 %	200,000,000	
2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis Kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	201,000,000						1 kegiatan	200,000,000	
2 11 08 2.01 03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				400 Orang	201,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Kelompok Masyarakat Sadar LH Lampung Tengah	400 Orang	200,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Nominasi penerima penghargaan LH Lampung Tengah yang didaftarkan ke tingkat provinsi atau nasional	orang		orang	2 orang	142,000,000						2 orang	150,000,000	
2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Penghargaan LH	kategori		kategori	3 kategori	142,000,000						3 kategori	150,000,000	
2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				4 Entitas	142,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Sekolah Adiwiyata Kelompok Pengelola LH Kalpataru Kampung Iklim Perusahaan Pengelola LH	4 Entitas	150,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Total Pengaduan yang ditangani dengan Total Pengaduan yang masuk	%		%	50 %	43,000,000						50 %	50,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2	11	10	2.01														
2	11	10	2.01	01													
2	11	11															
2	11	11	2.01														
2	11	11	2.01	03													
2	11	11	2.01	05													
2																	
2	12																

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Persen		Persen	100 Persen	7,658,194,070						100 Persen	7,658,194,070	
2 12 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen		Dokumen	14 Dokumen	14,360,000						14 Dokumen	14,360,000	
2 12 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	13,260,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	4 Dokumen	13,260,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	1,100,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	10 Laporan	1,100,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	5,158,988,870						12 Dokumen	5,158,988,870	
2 12 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	3,956,748,970	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	34 Orang/bulan	3,956,748,970	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1,159,451,100	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	12 Dokumen	1,159,451,100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				10 Dokumen	2,929,900	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	10 Dokumen	2,929,900	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	39,858,900	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung S. Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	12 Laporan	39,858,900	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		Orang	100 Orang	16,870,000						100 Orang	16,870,000	
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	16,870,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	ASN	100 Orang	16,870,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase hasil penyediaan administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	Persen		Persen	95 Persen	1,901,830,400						95 Persen	1,901,830,400	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	1,668,435,200	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	6 Paket	1,668,435,200	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	5,225,200	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	2 Paket	5,225,200	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	55,200,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	4 Paket	55,200,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	6,200,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	5 Laporan	6,200,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	166,770,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	15 Laporan	166,770,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Tersedia Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	Dokumen Unit		Dokumen Unit	1 Dokumen 1 Unit	4,200,000						1 Dokumen 1 Unit	4,200,000	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	4,200,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	1 Unit	4,200,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	360,204,800						12 Bulan	360,204,800	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				9 Laporan	151,204,800	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	9 Laporan	151,204,800	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	209,000,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	12 Laporan	209,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit		Unit	5 Unit	201,740,000						5 Unit	201,740,000	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	123,010,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	5 Unit	123,010,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				48 Unit	31,480,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	48 Unit	31,480,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Unit	47,250,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	1 Unit	47,250,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP-EI	Persen		Persen	91 Persen	156,525,400								91 Persen	156,525,400	
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil pelayanan pendaftaran penduduk	Laporan		Laporan	12 Laporan	31,155,400								12 Laporan	31,155,400	
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				5 Dokumen	11,146,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	5 Dokumen	11,146,400	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL		
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				12 Dokumen	10,004,500	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	12 Dokumen	10,004,500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL		
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				12 Dokumen	10,004,500	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	12 Dokumen	10,004,500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL		
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Laporan		Laporan	8 Laporan	104,870,000								8 Laporan	104,870,000	
2	12	02	2.03	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan pendaftaran penduduk langsung (Jemput Bola)				12 Dokumen 28 Kecamatan	104,870,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	12 Dokumen 28 Kecamatan	104,870,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Laporan		Laporan	28 Laporan	20,500,000						28 Laporan	20,500,000	
2.12.02.2.04.02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataan Penduduk				10 Laporan	20,500,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	10 Laporan	20,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	154,941,000						100 Persen 100 Persen 100 Persen	154,941,000	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pelayanan pencatatan sipil	Laporan		Laporan	12 Laporan	26,983,000						12 Laporan	26,983,000	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				12 Dokumen	26,983,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	12 Dokumen	26,983,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pencatatan sipil	Laporan		Laporan	8 Laporan	107,458,000						8 Laporan	107,458,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan pencatatan sipil langsung (Jemput Bola) Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				28 Kecamatan 12 Laporan	107,458,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	28 Kecamatan 12 Laporan	107,458,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil	Laporan		Laporan	10 Laporan	20,500,000						10 Laporan	20,500,000	
2.12.03.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan				10 Laporan	20,500,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	10 Laporan	20,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan	Persen		Persen	9 Persen	51,899,500						9 Persen	51,899,500	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah laporan hasil Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Laporan		Laporan	2 Laporan	9,406,000						2 Laporan	9,406,000	
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				5 Dokumen	9,406,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	OPD	5 Dokumen	9,406,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Laporan		Laporan	2 Laporan	21,493,500						2 Laporan	21,493,500	
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				5 Dokumen	21,493,500	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	OPD	5 Dokumen	21,493,500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
2	12	04	2.04															
2	12	04	2.04	01														
2	12	05																
2	12	05	2.01															
2	12	05	2.01	01														
2	12	05	2.01	02														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						13,347,722,146						15,018,392,396	
2	13	01																
2	13	01	2.01															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								10 Dokumen	46,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	dokumen			dokumen				1 dokumen	4,901,172,996	
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN								36 Orang/bulan	3,719,060,246	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								12 Dokumen	1,152,089,600	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								1 Laporan	30,023,150	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang tidak pernah mendapat hukuman disiplin	orang			orang				64 orang	624,819,750	
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan								6 Paket	8,732,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								8 Paket	162,439,750	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan								4 Paket	15,445,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan								4 Paket	45,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 13 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 Laporan	393,203,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	14 Laporan	428,031,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						125,990,000							117,680,000	
2 13 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif		4 Laporan	4,680,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	93,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif		12 Laporan	85,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				24 Laporan	27,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif		24 Laporan	28,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						144,340,000							124,340,000	
2 13 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	114,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif		6 Unit	94,340,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif		1 Unit	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 02	PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah Kampung Tertib Administrasi	kampung		kampung	301 kampung	125,984,900						301 kampung	172,700,000	
2 13 02 2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah PERDA tentang Penataan kampung yang ditetapkan Jumlah Prodak Hukum tentang Penataan kampung yang ditetapkan	Produk Hukum Prodak hukum		Produk Hukum Prodak hukum	20 Produk Hukum 20 Prodak hukum	125,984,900						20 Produk Hukum 20 Prodak hukum	172,700,000	
2 13 02 2.01 03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya				301 Desa	125,984,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	301 Desa	172,700,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Peningkatan kerjasama antar Kampung	persen		persen	100 persen	5,122,328,002						100 persen	5,600,355,100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2	13	03	2.01														
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota									1 Dokumen	131,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan									50 Dokumen	5,469,355,100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase BUMKAM kategori berkembang	persen								21,6 persen	2,321,702,900	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	bumk								65 bumk	2,321,702,900	
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa									301 Dokumen	171,147,800	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa									10 Dokumen	48,100,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa									2 Dokumen	387,455,100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa									301 Dokumen	900,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa									1 Dokumen	135,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13	04	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa									2 Dokumen	350,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 13 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				3 Dokumen	202,995,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	3 Dokumen	330,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kampung yang tertata	persen		persen	100 persen	960,936,400						100 persen	1,031,000,000	
2 13 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	960,936,400						100 persen 100 persen	1,031,000,000	
2 13 05 2.01 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				2 Dokumen	164,601,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	2 Dokumen	160,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 05 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Lembaga	173,145,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	2 Lembaga	185,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2 13 05 2.01 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	197,969,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	1 Dokumen	250,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				3 Laporan	285,958,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	3 Laporan	286,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				28 Laporan	139,261,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	28 Laporan	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						16,094,520,462								16,075,869,722	
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	persen		persen	100 persen	4,017,414,462						100 persen	4,069,856,562		
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai	dokumen		dokumen	7 dokumen	4,200,000						7 dokumen	18,000,000		
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas PP dan KB		18,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	dokumen		dokumen	5 dokumen	3,485,685,762						5 dokumen	3,469,696,562		
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3,015,014,462		Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dins PPKB	30 Orang/bulan	3,015,014,462	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 Dokumen	470,671,300		Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dins PPKB	10 Dokumen	454,682,100	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	jenis		jenis	10 jenis	117,573,700						10 jenis	196,500,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1,058,200	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas PPKB	2 Paket	6,500,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	23,679,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas PPKB	8 Paket	60,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	2,524,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas PPKB	10 Paket	10,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9,618,500	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas PPKB	9 Paket	20,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18 Laporan	80,694,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas PPKB	18 Laporan	100,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	bulan		bulan	12 bulan	68,280,000						12 bulan	45,000,000	
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	68,280,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas PPKB	12 Laporan	45,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	unit		unit	115 unit	341,675,000						115 unit	340,660,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				95 Unit	292,010,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas PPKB	95 Unit	289,010,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	6,330,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas PPKB	10 Unit	11,650,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	43,335,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas PPKB	1 Unit	40,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						218,775,000							168,775,000	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						100,000,000							50,000,000	
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Dokumen	50,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02	Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	sektor		sektor	28 sektor	118,775,000						28 sektor	118,775,000	
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	37,175,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Perangkat Daerah dan Stakeholder di Kabupaten Lampung Tengah	1 Dokumen	37,175,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					1 Dokumen	81,600,000			DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Perangkat Daerah dan Stakeholder di Kabupaten Lampung Tengah	1 Dokumen	81,600,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	persen		persen	75 persen	6,385,211,000								75 persen	6,364,118,160	
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	orang		orang	500 orang	1,324,566,800								500 orang	1,325,191,300	
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				5 Organisasi	4,375,500				DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Masyarakat Kab. Lampung Tengah	5 Organisasi	5,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				1 Dokumen	25,000,000				DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Masyarakat Kab. Lampung Tengah	1 Dokumen	25,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				2 Dokumen	70,640,000				DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Masyarakat Kab. Lampung Tengah	2 Dokumen	70,640,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					1 Laporan	436,800,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Masyarakat Kab. Lampung Tengah	1 Laporan	436,800,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					6 Laporan	747,751,300	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-KB		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Masyarakat Kab. Lampung Tengah	6 Laporan	747,751,300	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK					1 Laporan	40,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Masyarakat Kab. Lampung Tengah	1 Laporan	40,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petugas Penyuluh KB	persen		persen		85 persen	2,903,854,000						85 persen	2,903,854,000	
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia					4 Unit	1,411,054,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Penyuluh Lapangan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Kab. Lampung Tengah	4 Unit	1,411,054,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)					1244 Orang	1,492,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Penyuluh Lapangan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Kab. Lampung Tengah	1244 Orang	1,492,800,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana alat dan obat kontrasepsi	persen		persen		100 persen	1,415,080,200						100 persen	1,393,362,860	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 03 2.03 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya				1 Laporan	39,588,700		DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Akseptor KB dan Fasilitas Kesehatan KB	1 Laporan	40,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.03 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				4820 Orang	1,248,491,500	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Akseptor KB dan Fasilitas Kesehatan KB	4820 Orang	1,248,491,500	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.03 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				3 Unit	97,600,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Akseptor KB dan Fasilitas Kesehatan KB	3 Unit	74,871,360	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.03 08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya				2 Laporan	29,400,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Akseptor KB dan Fasilitas Kesehatan KB	2 Laporan	30,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase partisipasi organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	persen		persen	40 persen	741,710,000						40 persen	741,710,000	
2 14 03 2.04 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				43 Kampung	741,710,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Organisasi kemasyarakata n dan Kampung KB Kabupaten Lampung Tengah	43 Kampung	741,710,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						5,473,120,000							5,473,120,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						5,473,120,000						5,473,120,000		
2 14 04 2.01 05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				2490 Orang	5,473,120,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		2490 Orang	5,473,120,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						8,810,556,600						19,731,945,500		
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai		nilai	80 nilai	6,207,619,800						80 nilai	8,463,263,200	
2 15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	Dokumen		Dokumen	40 Dokumen	8,612,000						40 Dokumen	9,618,000	
2 15 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				40 Dokumen	8,612,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	0	40 Dokumen	9,618,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	Laporan		Laporan	20 Laporan	5,160,398,100						20 Laporan	5,163,886,100	
2 15 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				51 Orang/bulan	4,450,312,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		51 Orang/bulan	4,468,056,900	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				181 Dokumen	704,574,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		181 Dokumen	689,251,200	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				20 Laporan	5,512,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		20 Laporan	6,578,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						334,629,500							2,491,319,100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik				12 paket	10,625,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		12 paket	11,653,900	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				18 Unit	37,474,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		18 Unit	2,193,078,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan alat rumah tangga				22 jenis	20,154,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		22 jenis	21,812,200	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan barang cetakan dan penggandaan				5 paket	69,310,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		5 paket	59,210,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan makan dan minum rapat Jumlah penyelenggaraan pelaksanaan SPPD				650 O/K 220 orang/hari	197,065,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		650 O/K 220 orang/hari	205,565,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						78,075,000							73,500,000	
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 laporan	78,075,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		36 laporan	73,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						625,905,200							724,940,000	
2 15 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	531,610,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		17 Unit	534,310,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah BBM operasional genset kantor Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				137 liter 18 Unit	13,295,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		137 liter 18 Unit	32,630,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				600 m2	81,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		600 m2	158,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						2,468,186,800						11,078,682,300		
2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						1,882,308,800						9,626,482,300		
2 15 02 2.02 01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan yang dibangun				100 Unit	837,318,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		100 Unit	7,812,174,400	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rambu yang dipasang				40 Unit	44,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		40 Unit	501,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 02 2.02 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				900 Unit	925,990,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		900 Unit	1,205,307,900	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Masa pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan APILL				1 tahun	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		1 tahun	108,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						137,500,000						422,500,000		
2 15 02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Blanko Bukti Lulus Uji				1500 blanko	37,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		1500 blanko	242,500,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				1 Unit	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		1 Unit	180,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						188,860,000						430,450,000		
2 15 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah petugas PAM Isidentil Jumlah petugas PAM Rutin				250 orang/hari 5016 orang/hari	188,860,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		250 orang/hari 5016 orang/hari	352,200,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						259,518,000						580,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 02 2.09 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				5 Unit	188,900,000				Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		5 Unit	430,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.09 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	70,618,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		2 Laporan	150,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						134,750,000							190,000,000	
2 15 03 2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau						134,750,000							190,000,000	
2 15 03 2.13 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah kapal yang beroperasi Jumlah Nahkoda dan ABK				2 kapal 3 orang	134,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		2 kapal 3 orang	165,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						11,847,946,551							11,446,164,749	
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	4,595,322,080						2 Dokumen	4,458,731,378	
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ketersediaan dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	24,300,000						2 Dokumen	25,400,000	
2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5,250,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintahan	2 Dokumen	6,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2 16 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	12,250,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintahan	5 Dokumen	9,500,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	6,800,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintahan	2 Dokumen	9,900,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Persen		Persen	100 Persen	3,483,229,080						100 Persen	3,661,511,378	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	2,580,474,080	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintahan	26 Orang/bulan	2,746,527,378	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				34 Dokumen	883,055,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintahan	34 Dokumen	895,484,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	6,250,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintahan	5 Laporan	7,500,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	13,450,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintahan	12 Laporan	12,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat	orang		orang	26 orang	16,000,000						26 orang	25,000,000	
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	16,000,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintahan	4 Orang	25,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	395,335,000						100 Persen	382,000,000	
2 16 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	2,496,600	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintahan	20 Paket	4,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	54,584,400	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintahan	50 Paket	53,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	29,724,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintahan	10 Paket	35,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250 Laporan	308,530,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintahan	250 Laporan	290,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2 16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia	Bulan		Bulan	12 Bulan	116,250,000						12 Bulan	50,000,000	
2 16 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	102,500,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintahan	15 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2 16 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	13,750,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintahan	20 Unit	50,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	Bulan		Bulan	12 Bulan	84,000,000						12 Bulan	84,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	84,000,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintahan	12 Laporan	84,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah gedung yang dipelihara Jumlah kendaraan yang difasilitasi Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan Bulan Bulan		Bulan Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	476,208,000						12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	230,820,000	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	245,470,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintahan	12 Unit	199,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	130,800,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintahan	20 Unit	31,720,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	99,938,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintahan	1 Unit	100,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	4,464,823,600						1 kegiatan	5,060,000,000	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Pelaksanaan Bakohumas Pelaksanaan PPID Tersedianya majalah Daerah Terselenggaranya kegiatan Internet sehat Terselenggaranya KIM Terselenggaranya pameran pembangunan	Bulan kegiatan Bulan kegiatan Bulan kegiatan Bulan kegiatan		Bulan kegiatan Bulan kegiatan Bulan kegiatan Bulan kegiatan	12 Bulan 1 kegiatan 12 Bulan 12 Bulan 1 kegiatan 12 Bulan 1 kegiatan	4,464,823,600						12 Bulan 1 kegiatan 12 Bulan 12 Bulan 1 kegiatan 12 Bulan 1 kegiatan	5,060,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				100 Dokumen	19,466,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya kualitas komunikasi publik pemerintahan	100 Dokumen	35,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				200 Dokumen	90,000,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya kualitas komunikasi publik pemerintahan	200 Dokumen	25,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	528,710,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya kualitas komunikasi publik pemerintahan	1 Dokumen	650,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2 16 02 2.01 07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				500 Layanan	3,560,919,500	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya kualitas komunikasi publik pemerintahan	500 Layanan	4,000,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2 16 02 2.01 08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				46 Dokumen	115,215,400	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya kualitas komunikasi publik pemerintahan	46 Dokumen	35,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2 16 02 2.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya				30 Orang	23,193,200	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas komunikasi publik pemerintahan	30 Orang	40,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2 16 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				31 Dokumen	127,319,500	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya kualitas komunikasi publik pemerintahan	31 Dokumen	275,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus , Belanja Kawat/Faksimili/Inter net/TV Berlangganan	paket		paket	1 paket	2,787,800,871						1 paket	1,927,433,371	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 03 2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Aplikasi yang dapat digunakan untuk Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus , Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Tercapainya Diskominfo sebagai wali data	Persen paket Persen		Persen paket Persen	100 Persen 1 paket 100 Persen	2,787,800,871					100 Persen 1 paket 100 Persen	1,927,433,371		
2 16 03 2.02 02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				1 Dokumen	172,800,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya kualitas komunikasi publik pemerintahan	1 Dokumen	100,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2 16 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				34 Unit	2,039,000,871	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya kualitas komunikasi publik pemerintahan	34 Unit	179,433,371	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				25 Unit	576,000,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya kualitas komunikasi publik pemerintahan	25 Unit	1,648,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							34,928,500						80,000,000	
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi data statistik	Bulan		Bulan	12 Bulan	34,928,500						12 Bulan	80,000,000	
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral Jumlah data yang ada di kominfotik	Bulan Bulan		Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan	34,928,500						12 Bulan 12 Bulan	80,000,000	
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				46 Dokumen	34,928,500	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	46 Dokumen	80,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							176,064,599						100,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya tata kelola keamanan informasi	paket		paket	1 paket	176,064,599						1 paket	100,000,000	
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya analisis kebutuhan dan pengelolaan keamanan informasi	paket		paket	1 paket	176,064,599						1 paket	100,000,000	
2 21 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1 Dokumen	26,064,599	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya Persandian dan Keamanan Informasi	1 Dokumen	50,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2 21 02 2.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	50,000,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Persandian dan Keamanan Informasi	1 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2 21 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	100,000,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya Persandian dan Keamanan Informasi	1 Laporan	50,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						15,492,651,030							16,735,125,230	
2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Persen		Persen	100 Persen	14,182,670,930						100 Persen	14,993,286,230	
2 17 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	31,003,200						5 Dokumen	44,583,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	20,576,900	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Lampung Tengah	3 Dokumen	33,115,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	10,426,300	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Lampung Tengah	1 Laporan	11,468,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan keuangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	13,044,353,930						12 Bulan	13,284,756,230	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				103 Orang/bulan	10,640,328,230	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Lampung Tengah	103 Orang/bulan	10,640,328,230	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.17.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				83 Dokumen	2,392,899,300	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Lain-lain PAD Yang Sah		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Lampung Tengah	83 Dokumen	2,632,189,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	11,126,400	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Lain-lain PAD Yang Sah		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Lampung Tengah	12 Laporan	12,239,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya	Orang		Orang	4 Orang	20,000,000						4 Orang	25,000,000	
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	20,000,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Lain-lain PAD Yang Sah		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Lampung Tengah	4 Orang	25,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	532,733,800						12 Bulan	987,041,000	
2 17 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	7,786,800	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Lain-lain PAD Yang Sah		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Lampung Tengah	8 Paket	8,565,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2 17 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	29,455,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Lain-lain PAD Yang Sah		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Lampung Tengah	2 Paket	433,435,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2 17 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	146,150,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Lain-lain PAD Yang Sah		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Lampung Tengah	15 Paket	160,765,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2 17 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				590 Laporan	349,342,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Lain-lain PAD Yang Sah		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Lampung Tengah	590 Laporan	384,276,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2 17 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	142,800,000						12 Bulan	157,080,000	
2 17 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	142,800,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Lain-lain PAD Yang Sah		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Lampung Tengah	12 Laporan	157,080,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2 17 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	Unit		Unit	68 Unit	411,780,000						68 Unit	494,826,000	
2 17 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	41,670,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Lain-lain PAD Yang Sah		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Lampung Tengah	1 Unit	41,670,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	217,560,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Lain-lain PAD Yang Sah		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Lampung Tengah	21 Unit	239,316,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2 17 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	40,490,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Lain-lain PAD Yang Sah		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Lampung Tengah	45 Unit	44,539,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2 17 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	112,060,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Lain-lain PAD Yang Sah		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Lampung Tengah	1 Unit	169,301,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2 17 02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen		Persen	18,15 Persen	223,248,000						18,15 Persen	256,933,000	
2 17 02 2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	Izin		Izin	13 Izin	93,005,500						13 Izin	113,667,000	
2 17 02 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				13 Unit Usaha	93,005,500		Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Koperasi	13 Unit Usaha	113,667,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2 17 02 2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Izin		Izin	4 Izin	130,242,500						4 Izin	143,266,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 02 2.02 01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				4 Unit Usaha	130,242,500		Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Lain-lain PAD Yang Sah		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Koperasi	4 Unit Usaha	143,266,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen		Persen	32,38 Persen	154,950,000						32,38 Persen	170,444,000	
2 17 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pemeriksaan dan pengawasan	Koperasi		Koperasi	40 Koperasi	154,950,000						40 Koperasi	170,444,000	
2 17 03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Unit Usaha	85,118,000		Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Lain-lain PAD Yang Sah		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Koperasi	40 Unit Usaha	93,629,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2 17 03 2.01 02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja				40 Unit Usaha	69,832,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Lain-lain PAD Yang Sah		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Koperasi	40 Unit Usaha	76,815,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen		Persen	31,77 Persen	92,330,000						31,77 Persen	101,563,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 04 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang mendapatkan penilaian kesehatan	Koperasi		Koperasi	40 Koperasi	92,330,000						40 Koperasi	101,563,000	
2 17 04 2.01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				40 Unit Usaha	92,330,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Lain-lain PAD Yang Sah		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Koperasi	40 Unit Usaha	101,563,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen		Persen	6,81 Persen	54,868,000						6,81 Persen	60,354,000	
2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan	Koperasi		Koperasi	30 Koperasi	54,868,000						30 Koperasi	60,354,000	
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				30 Orang	54,868,000		Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Koperasi	30 Orang	60,354,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen Persen		Persen Persen	13,62 Persen 13,62 Persen	406,081,100						13,62 Persen 13,62 Persen	446,689,000	
2 17 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi pembinaan produktivitas dan pemasaran	Koperasi		Koperasi	30 Koperasi	406,081,100						30 Koperasi	446,689,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 06 2.01 01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				30 Orang	406,081,100	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Lain-lain PAD Yang Sah		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Koperasi	30 Orang	446,689,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persen		Persen	2 Persen	154,353,000						2 Persen	459,291,000	
2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang didata dan dibina	Usaha Mikro		Usaha Mikro	75 Usaha Mikro	154,353,000						75 Usaha Mikro	459,291,000	
2 17 07 2.01 02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				75 Unit Usaha	70,790,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Lain-lain PAD Yang Sah		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Usaha Mikro	75 Unit Usaha	367,372,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2 17 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				30 Unit Usaha	83,563,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Lain-lain PAD Yang Sah		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Usaha Mikro	30 Unit Usaha	91,919,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Persen Persen		Persen Persen	19,92 Persen 19,92 Persen	224,150,000						19,92 Persen 19,92 Persen	246,565,000	
2 17 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan pengembangan usaha	Usaha Mikro		Usaha Mikro	141 Usaha Mikro	224,150,000						141 Usaha Mikro	246,565,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kabupaten	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	211,847,000						1 Dokumen	246,000,000	
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	138,223,900	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Lain-lain PAD Yang Sah		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat	1 Dokumen	150,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3 30 03 2.02 02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	73,623,100	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Lain-lain PAD Yang Sah		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat	1 Dokumen	96,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persen		Persen	<9 Persen	1,066,437,400						<9 Persen	1,565,955,000	
3 30 04 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penjaminan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten	Laporan		Laporan	1 Laporan	61,478,600						1 Laporan	77,260,000	
3 30 04 2.01 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1 Laporan	61,478,600		Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	77,260,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten	Laporan		Laporan	1 Laporan	547,690,000						1 Laporan	985,700,000	
3 30 04 2.02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				1 Laporan	56,813,200		Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Lain-lain PAD Yang Sah		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pasar Kabupaten	1 Laporan	85,700,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 04 2.02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	490,876,800		Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Lain-lain PAD Yang Sah		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pasar Kabupaten	1 Laporan	900,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3 30 04 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten	Laporan		Laporan	1 Laporan	457,268,800						1 Laporan	502,995,000	
3 30 04 2.03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1 Laporan	457,268,800		Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Lain-lain PAD Yang Sah		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1 Laporan	502,995,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang pada tahun berjalan	Persen		Persen	85 Persen	268,561,500						85 Persen	379,467,000	
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP wajib Tera/Tera Ulang yang bertanda Tera Sah yang berlaku	Unit		Unit	800 Unit	268,561,500						800 Unit	379,467,000	
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				800 Unit	204,780,700		Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Lain-lain PAD Yang Sah		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	800 Unit	225,258,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				300 Orang	63,780,800	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Lain-lain PAD Yang Sah		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	300 Orang	154,209,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku UMKM yang dibina	Persen		Persen	40 Persen	87,681,900						40 Persen	121,896,000	
3 30 07 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	UMKM		UMKM	10 UMKM	87,681,900						10 UMKM	121,896,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
										Nasional	Daerah											
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					10 UMKM	87,681,900			Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Lain-lain PAD Yang Sah		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	UMKM	10 UMKM	121,896,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						6,216,299,789										6,216,299,789	
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku	Persen		Persen	100 Persen	5,114,099,789									100 Persen	5,114,099,789	
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja OPD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	6,845,500									4 Dokumen	6,845,500	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	6,845,500	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			4 Dokumen	6,845,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	3,594,462,789									100 persen	3,594,462,789	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	2,962,385,789		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			44 Orang/bulan	2,962,385,789	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				31 Dokumen	624,210,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			31 Dokumen	624,210,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	7,867,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			6 Laporan	7,867,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen		persen	100 persen	54,000,000						100 persen	54,000,000	
2 18 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	54,000,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6 Orang	54,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	persen paket		persen paket	85 persen 31 paket	917,631,500						85 persen 31 paket	917,631,500	
2 18 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				24 Paket	642,880,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24 Paket	642,880,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	34,941,500	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20 Paket	34,941,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	51,731,500	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30 Paket	51,731,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	41,496,500	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5 Paket	41,496,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	146,582,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24 Laporan	146,582,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyedia Jasa Penunjang Urusan pemerintah pada Perangkat Daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	280,250,000						3 Jenis	280,250,000	
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	280,250,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12 Laporan	280,250,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit		Unit	13 Unit	260,910,000						13 Unit	260,910,000	
2 18 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	41,670,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	1 Unit	41,670,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	81,340,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	4 Unit	81,340,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	30,900,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	6 Unit	30,900,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	107,000,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	1 Unit	107,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Investasi	Persen		Persen	70 Persen	114,907,400						70 Persen	114,907,400	
2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang bisa diberikan kepada investor	Perda / Perkada		Perda / Perkada	3 Perda / Perkada	20,800,000						3 Perda / Perkada	20,800,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				3 Dokumen	20,800,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	3 Dokumen	20,800,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen RUPM ditambah dengan dokumen peta potensi peluang investasi	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	94,107,400						2 Dokumen	94,107,400	
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				1 Dokumen	94,107,400	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Dokumen	94,107,400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor Baru	Persen		Persen	10 Persen	195,826,500						10 Persen	195,826,500	
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah	Pameran		Pameran	2 Pameran	195,826,500						2 Pameran	195,826,500	
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	195,826,500	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2 Dokumen	195,826,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur	Persen		Persen	100 Persen	173,423,500						100 Persen	173,423,500	
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu yang menjadi kewenangan Kab. LT	Dokumen		Dokumen	35 Dokumen	173,423,500						35 Dokumen	173,423,500	
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				2000 Pelaku Usaha	151,950,900	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanaman Modl dan Pel;ayanan Terpadu Satu Pintu	2000 Pelaku Usaha	151,950,900	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				12 Orang	21,472,600	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12 Orang	21,472,600	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang dimonitoring LKPM Online-nya	Persen		Persen	70 Persen	474,163,700						70 Persen	474,163,700	
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kab. LT	Persen		Persen	70 Persen	474,163,700						70 Persen	474,163,700	
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Peserta Kegiatan Seminar Bisnis/business forum one on one meeting				40 Kegiatan Usaha. 20 Dokumen	48,150,100	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40 Kegiatan Usaha. 20 Dokumen	48,150,100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah LKPM dan Profil Pemantauan yang disusun Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				980 orang 150 Pelaku Usaha	390,743,900	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	980 orang 150 Pelaku Usaha	390,743,900	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Berita Acara dan Profil Pengawasan Perusahaan Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				40 Dokumen 25 Kegiatan Usaha	35,269,700	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40 Dokumen 25 Kegiatan Usaha	35,269,700	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi penanaman modal	Persen		Persen	75 Persen	143,878,900						75 Persen	143,878,900	
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	dokumen		dokumen	6 dokumen	143,878,900						6 dokumen	143,878,900	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				6 Dokumen	143,878,900	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6 Dokumen	143,878,900	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						8,968,148,323				1,504,129,000				
2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5,891,599,123				0				
2 19 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						17,825,000				0				
2 19 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	10,325,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih			Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Dokumen	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	7,500,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih			Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		4 Laporan	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5,289,406,423				0				
2 19 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	4,519,215,923	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih			Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		12 bulan	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Keuangan				12 bulan	754,793,100	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih			Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		12 bulan	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi yang disusun				6 dokumen	15,397,400	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih			Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		6 dokumen	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50,000,000							0	
2 19 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	50,000,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih			Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		3 Orang	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						206,259,700							0	
2 19 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen instalasi bangunan kantor				9 jenis	5,969,500	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih			Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		9 jenis	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah ketersediaan bahan dan peralatan kebersihan				12 bulan	9,633,200	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih			Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		12 bulan	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan kebutuhan cetak dan penggandaan				9 jenis	48,509,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih			Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		9 jenis	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Makan Minum dan Perjalanan Dinas				12 bulan	142,148,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih			Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		12 bulan	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						31,688,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	31,688,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih			Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Unit	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						108,000,000							0	
2 19 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Listrik dan Internet				12 bulan	108,000,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih			Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		12 bulan	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						188,420,000							0	
2 19 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas terpelihara				3 unit	82,340,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih			Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		3 unit	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	16,080,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih			Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		22 Unit	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	90,000,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih			Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Unit	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya kualitas pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila	persen		persen	5 persen	1,166,434,200						5 persen	1,008,129,000	
2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	orang		orang	140 orang	1,146,434,200						140 orang	1,008,129,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				5 Orang	112,513,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		pemuda pelopor	5 Orang	75,000,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				56 Orang	100,001,200			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	pemuda pelopor	56 Orang	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				35 Orang	933,920,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	pemuda pelopor	35 Orang	933,129,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan di tingkat Provinsi	orang		orang	75 orang	20,000,000						75 orang	0	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	20,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Organisasi Pemuda	1 Dokumen	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Cabang Olahraga yang berprestasi pada event Nasional (jenis)	persen		persen	17,86 persen	1,540,115,000						17,86 persen	496,000,000	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet yang berasal dari Kabupaten/Kota yang masuk Pelatda Jumlah Atlet yang berasal dari Kabupaten/Kota yang masuk Pelatda	cabor orang		cabor orang	5 cabor 5 orang	402,820,000						5 cabor 5 orang	400,000,000	
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				30 Orang	194,265,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Cabang Olahraga	30 Orang	200,000,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan				20 Orang	123,450,000				Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Cabang Olahraga	20 Orang	125,000,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 02 2.01 02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				2 Dokumen	192,429,500			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Destinasi wisata	2 Dokumen	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 02 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	perjalanan		perjalanan	100 perjalanan	251,825,500						100 perjalanan	0	
3 26 02 2.02 01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	38,657,500			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Kawasan Strategis	1 Dokumen	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 02 2.02 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	213,168,000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Kawasan Strategis	1 Laporan	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	destinasi		destinasi	20 destinasi	382,821,000						20 destinasi	0	
3 26 02 2.03 01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				15 lokasi	77,000,000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Destinasi	15 lokasi	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				28 Unit	199,397,000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Destinasi	28 Unit	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 02 2.03 05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	47,300,000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Destinasi	1 Dokumen	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 02 2.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	59,124,000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Destinasi	1 Laporan	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	persen		persen	52 persen	893,057,000						52 persen	175,000,000	
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	dokumen		dokumen	1 dokumen	893,057,000						1 dokumen	175,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Destinasi dan Kawasan Strategis	2 Dokumen	175,000,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri					Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Destinasi dan Kawasan Strategis	1 Laporan	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri					Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Destinasi dan Kawasan Strategis	1 Dokumen	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Usaha Ekonomi Kreatif yang HKI nya terfasilitasi	persen		persen	10 persen	521,980,000				10 persen	0	
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	buah		buah	1 buah	521,980,000				1 buah	0	
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				3 Laporan	368,320,000	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	SDM	3 Laporan	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				100 Orang	153,660,000	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	SDM	100 Orang	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						4,180,691,053					3,870,088,188	
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	persen		persen	100 persen	3,757,265,253				100 persen	3,363,846,288	
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan+Penganggaran+Evaluasi	dok		dok	7 dok	21,761,200				7 dok	21,145,215	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	15,751,400	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5 Dokumen	9,736,020	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	6,009,800	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 Dokumen	11,409,195	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi Keuangan	bulan		bulan	12 bulan	3,261,382,153						12 bulan	2,852,188,198	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	2,782,944,853	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	29 Orang/bulan	2,782,944,853	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen	478,437,300	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8 Dokumen	69,243,345	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyedia Kebutuhan Layanan Umum Perangkat Daerah	jenis		jenis	6 jenis	144,603,900						6 jenis	158,652,375	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	17,398,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13 Paket	17,325,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	61,057,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5 Paket	39,004,350	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				21 Paket	10,954,900	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	21 Paket	19,425,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					9 Paket	23,053,500	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9 Paket	23,818,725	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					3 Laporan	32,140,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3 Laporan	59,079,300	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	124,800,000							12 bulan	116,445,000	
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					4 Laporan	108,810,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4 Laporan	103,320,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharannya Peralatan Kantor					3 jenis	15,990,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3 jenis	13,125,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada OPD yang Mendapat Pemeliharaan	unit		unit	6 unit	204,718,000							6 unit	215,415,500	
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					6 Unit	163,630,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6 Unit	164,448,500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	41,088,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Unit	50,967,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	persen rasio		persen rasio	2,80 persen 86,00 rasio	423,425,800							2,80 persen 86,00 rasio	506,241,900	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah	judul		judul	16232 judul	297,895,800						16232 judul	367,091,900	
2 23 02 2.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Bertambahnya buku yang sudah dietry Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				10000 eks/tshun 0 Layanan	47,567,000				Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Perpustakaan Sekolah/Kamp ung	10000 eks/tshun 0 Layanan	66,280,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 02 2.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan				0 Perpustakaan 50 Kampung	19,960,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Perpustakaan Sekolah/Kamp ung	0 Perpustakaan 50 Kampung	44,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 02 2.01 05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan Kampung yang dil;akukan Pengawasan				0 Perpustakaan 50 Perpustakaan Kampung	29,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Perpustakaan Sekolah/Kamp ung	0 Perpustakaan 50 Perpustakaan Kampung	33,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 02 2.01 06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				28 Orang	51,860,200	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perpustakaan Sekolah/Kamp ung	28 Orang	71,311,900	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Bertambahnya Koleksi Bahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				300 e-book 0 Eksemplar	81,457,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Perpustakaan Sekolah/Kamp ung	300 e-book 0 Eksemplar	82,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif										
										Nasional	Daerah													
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Dinamis Yang dilakukan Pemeliharaan Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan									11 Dokumen 0 Berkas	67,216,500	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			seluruh opd dan kecamatan se kabupaten lampung tengah	11 Dokumen 0 Berkas	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota									1 Laporan	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			seluruh opd dan kecamatan se kabupaten lampung tengah	1 Laporan	30,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi JIKN yang dilakukan updating data dan informasi kearsipan tingkat kabupaten	aplikasi			aplikasi	2 aplikasi	49,999,800										2 aplikasi	55,000,000	
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Aplikasi JIKN yang dilakukan updating data dan informasi kearsipan tingkat kabupaten Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN					1 aplikasi 0 Pengguna	49,999,800		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Seluruh OPD dan Kecamatan se Kabupaten Lampung Tengah	1 aplikasi 0 Pengguna	55,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Pesentase PD yang melaksanakan pegnelolaan kearsipan dengan baik	persen			persen	60 persen	20,000,000										60 persen	30,000,000	
2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah SOP yang disusun	dok			dok	1 dok	20,000,000										1 dok	30,000,000	
2	24	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan					5 SOP	20,000,000		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Seluruh OPD dan Kecamatan se Kabupaten Lampung Tengah	5 SOP	30,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							1,212,921,100											1,274,878,300	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Volume produksi perikanan Tangkap (ton)	ton			ton	5.269 ton	237,155,000										5.269 ton	255,500,000	
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	tersedianya data, sarana dan prasarana bidang perikanan tangkap	paket			paket	1 paket	151,655,000										1 paket	165,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 03 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	25,000,000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	2 Dokumen	30,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 25 03 2.01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				220 Unit	126,655,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	220 Unit	135,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 25 03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	meningkatkan kapasitas nelayan, kelembagaan nelayan dalam bentuk KUB dan terciptanya perlindungan nelayan (nelayan berasuransi)	kelompok		kelompok	0 kelompok	85,500,000						0 kelompok	90,500,000	
3 25 03 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				50 Orang	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	50 Orang	35,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 25 03 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				2 Kelompok	55,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	2 Kelompok	55,500,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						473,764,500							500,000,000	
3 25 04 2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						35,000,000							35,000,000	
3 25 04 2.01 01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing				10 Rekomendasi	35,000,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif		10 Rekomendasi	35,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya pelatihan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	orang		orang	75 orang	112,124,000						75 orang	116,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 04 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				2 Kelompok	35,672,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	2 Kelompok	38,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 25 04 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				30 Kelompok	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	30 Kelompok	45,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 25 04 2.02 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				2 Kelompok	31,452,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	2 Kelompok	33,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Tersedianya laporan/data produksi budidaya 1 (satu) tahun	bulan		bulan	12 bulan	326,640,500						12 bulan	349,000,000	
3 25 04 2.04 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	25,512,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	2 Dokumen	28,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	122,625,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	3 Unit	125,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				6 Unit	136,110,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	6 Unit	150,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 25 04 2.04 04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	21,392,500	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	1 Dokumen	23,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 25 04 2.04 05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				20 Orang	21,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	20 Orang	23,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	meningkatkan Jumlah Kelompok Masyarakat pengawas yang aktif dalam pengawasan SDKP	kelompok		kelompok	2 kelompok	70,420,500						2 kelompok	75,000,000	
3 25 05 2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap sumberdaya ikan di perairan umum serta meningkatkan kelestarian sumberdaya perikanan	persen		persen	2 persen	70,420,500						2 persen	75,000,000	
3 25 05 2.01 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				2 Dokumen	49,420,500			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	2 Dokumen	52,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 25 05 2.01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				2 Dokumen	21,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	2 Dokumen	23,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan	persen		persen	0 persen	431,581,100						0 persen	444,378,300	
3 25 06 2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Tersedianya Data dan Jaringan Informasi Pelaku Usaha Perikanan	dokumen		dokumen	1 dokumen	27,000,000						1 dokumen	30,000,000	
3 25 06 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				2 Dokumen	27,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	2 Dokumen	30,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 25 06 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase peningkatan produksi ikan olahan	produk		produk	2 produk	64,000,000						2 produk	70,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3	27	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						0	1 Dokumen	1,505,561,500	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0	1 Laporan	14,072,500	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai mengikuti Bimbingan Teknis / pelatihan/ Seminar/Diklat	persen		persen				2 persen	20,000,000	
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						0	1 Orang	20,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	jenis		jenis				5 jenis	399,251,800	
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						0	93 Paket	144,649,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						0	14 Paket	13,149,800	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						0	8 Paket	32,535,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						0	2 Laporan	75,600,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0	9 Laporan	133,318,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	Tahun		Tahun				1 Tahun	226,691,200	
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0	14 Laporan	5,699,200	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	217,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	5 Laporan	220,992,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 27 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	unit		unit	77 unit	493,404,600						77 unit	493,404,600	
3 27 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				30 Unit	392,810,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	30 Unit	392,810,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 27 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				59 Unit	40,590,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	59 Unit	40,590,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 27 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	60,004,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	1 Unit	60,004,600	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas komoditas unggulan(Kakao) (ton/ha) Produktivitas komoditas unggulan(Kakao) (ton/ha)	ton/ha ton/ha		ton/ha ton/ha	0,816 ton/ha kelapa sawit 3,255 ton/ha, karet 0,976 ton/ha, kakao 0,816 ton/ha, tebu 7,265 ton/ha, lada 0,84 ton/ha, kelapa dalam 1,236 ton/ha ton/ha	1,553,636,500						0,816 ton/ha kelapa sawit 3,255 ton/ha, karet 0,976 ton/ha, kakao 0,816 ton/ha, tebu 7,265 ton/ha, lada 0,84 ton/ha, kelapa dalam 1,236 ton/ha ton/ha	1,553,636,500	
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi perkebunan	persen		persen	3 persen	473,775,000						3 persen	473,775,000	
3 27 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	473,775,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	1 Laporan	473,775,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 27 02 2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah produksi daging dan telur yang asuh (aman,sehat, utuh dan halal)	persen		persen	2 persen	510,913,000						2 persen	510,913,000	
3 27 02 2.03 01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				6 Laporan	510,913,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	6 Laporan	510,913,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
3	27	02	2.05														
3	27	02	2.05	06													
3	27	03															
3	27	03	2.01														
3	27	03	2.01	03													
3	27	03	2.02														
3	27	03	2.02	01													
3	27	03	2.02	09													
3	27	04															
3	27	04	2.01														
3	27	04	2.01	01													
3	27	05															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	jumlah luasan komoditas perkebunan yang dilakukan pengendalian dan penanggulangan serangan OPT (ha)	ha		ha	3 ha	75,020,500						3 ha	75,020,500	
3 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				3 Ha	75,020,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	3 Ha	75,020,500	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh	persen		persen	4,5 persen	608,462,000						4,5 persen	608,462,000	
3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kunjungan penyuluh (kali)	kali		kali	864 kali	608,462,000						864 kali	608,462,000	
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Unit	471,853,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	3 Unit	471,853,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				9 Unit	136,609,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	9 Unit	136,609,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						6,136,923,954							7,181,074,054	
3 31 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	persen		persen	100 persen	3,642,474,654						100 persen	3,974,074,054	
3 31 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun	dokumen		dokumen	10 dokumen	141,721,900						10 dokumen	151,000,000	
3 31 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	45,640,000		Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	2 Dokumen	50,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	7,765,500					0	1 Dokumen	8,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	7,765,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	8,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	40,950,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Laporan	45,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	39,600,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	40,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang di laksanakan	dokumen		dokumen	1 dokumen	2,909,318,054						1 dokumen	3,009,074,054	
3 31 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	2,479,070,054		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	24 Orang/bulan	2,479,074,054	DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	430,248,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	530,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	dokumen		dokumen	5 dokumen	299,709,700						5 dokumen	369,000,000	
3 31 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8,600,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	16,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	9,871,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	15,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	90,237,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	95,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	32,230,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	33,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	158,770,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	160,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	persen		persen	100 persen	33,355,000						100 persen	135,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	33,355,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Unit	135,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen		persen	100 persen	72,720,000						100 persen	75,000,000	
3 31 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	72,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	75,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit		unit	4 unit	185,650,000						4 unit	210,000,000	
3 31 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	86,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Unit	100,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				27 Unit	18,310,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	27 Unit	25,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 gedung	81,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 gedung	85,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Presentase Implentasi pelaksanaan RPIK	persen		persen	5 persen	2,297,718,900						5 persen	2,500,000,000	
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri	dokumen		dokumen	3 dokumen	2,297,718,900						3 dokumen	2,500,000,000	
3 31 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	110,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	1 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				3 Dokumen	323,694,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Dokumen	350,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3 31 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	722,405,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	750,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat								1 Dokumen	1,250,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase peningkatan data perusahaan industri yang ada di dalam Siinas terhadap jumlah total perusahaan industri	persen		persen	1 persen	196,730,400			1 persen	485,000,000		
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	1 dokumen	196,730,400			1 dokumen	485,000,000		
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	171,003,400			1 Dokumen	180,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN	
3	31	04	2.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	25,727,000			1 Dokumen	40,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						62,059,424,275					1,920,085,000	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Persen		Persen	100 Persen	43,563,549,025				100 Persen	1,020,085,000	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku	Dokumen		Dokumen	18 Dokumen	343,688,100				18 Dokumen	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	173,344,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	4 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	36,962,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	27,897,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	14,278,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	13,612,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9 Laporan	45,545,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	9 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	32,047,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang Undangan yang berlaku dalam satu tahun	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	27,365,805,355						8 Dokumen	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				178 Orang/bulan	22,089,369,555		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	178 Orang/bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	5,029,019,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	120,990,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	44,629,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	14,816,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	18,335,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	27,899,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	20,745,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	2 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Stel		Stel	20 Stel	140,000,000						20 Stel	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	140,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	20 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	Jenis		Jenis	7 Jenis	4,011,175,500						7 Jenis	0	
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	403,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	437,147,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,305,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	227,635,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	197,207,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1,261,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	178,746,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	2,176,900,000						3 Jenis	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	1,724,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	3 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	452,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	Unit Jenis		Unit Jenis	244 Unit 3 Jenis	4,797,366,000						244 Unit 3 Jenis	0	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	306,590,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	8 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				130 Unit	2,851,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	130 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	656,932,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	100 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	981,924,000				Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	6 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan operasional pelayanan KDH/WKD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Orang		Orang	2 Orang	1,043,189,170						2 Orang	0	
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	176,519,170		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	2 Orang/Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				8 Paket	186,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	8 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	2 Orang	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	2 Orang/Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah fasilitas kebutuhan kerumahtanggaan KDH/WKDH/Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan	Paket		Paket	3 Paket	1,626,000,000						3 Paket	0	
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	792,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	450,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	384,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Penataan Organisasi PD sesuai Ketentuan perundang-undangan	PD		PD	32 PD	1,011,385,000						32 PD	1,020,085,000	
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				14 Dokumen	415,808,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	14 Dokumen	415,808,400	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tersedianya Dokumen SOP Tersedianya Laporan Standar Pelayanan Publik Tersedianya Perkada Tata Laksana				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	102,058,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	102,058,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tersusunnya SAKIP dan PMPRB Perangkat Daerah				1 Dokumen 32 PD	353,923,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen 32 PD	362,623,900	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat pada unit layanan				0 Dokumen 3 Dokumen 39 Layanan	101,724,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	0 Dokumen 3 Dokumen 39 Layanan	101,724,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	37,870,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	37,870,700	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah kegiatan KDH yang difasilitasi keprotokolan	Kegiatan		Kegiatan	210 Kegiatan	1,048,039,900						210 Kegiatan	0	
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Laporan	609,935,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	340,544,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				4 Laporan	97,560,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	4 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kinerja kecamatan dan kelurahan yang mencapai target kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan	persen		persen	100 persen	15,711,992,750						100 persen	0	
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Kepada Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	1,081,632,400						2 Dokumen	0	
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi antar perangkat daerah yang dilaksanakan Jumlah pelaksanaan Upacara Hari-hari Besar Nasional Jumlah Rapat Koordinasi bidang DUKCAPIL, KESBANGPOL, dan TRANTIBUM				1 Dokumen 12 Kali 5 Kali 4 Kali	301,320,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen 12 Kali 5 Kali 4 Kali	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	382,039,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen LKPJ Kepala Daerah yang disusun Jumlah dokumen LPPD yang disusun Laporan Pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Perangkat Daerah				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	398,272,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jenis		Jenis	3 Jenis	13,228,070,350						3 Jenis	0	
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	7,216,837,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				500 Dokumen	270,456,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	500 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen kerjasama Pemerintah Daerah Dalam Negeri dan dokumen kerjasama Pemerintah Dalam Luar Negeri yang disusun sesuai dengan ketentuan	PKS		PKS	25 PKS	573,600,000						25 PKS	0	
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	363,213,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	210,387,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Realisasi Penerimaan PAD Sektor BUMD	Pesen		Pesen	100 Pesen	2,783,882,500						100 Pesen	900,000,000	
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah BUMD dan BLUD yang mendapat Pembinaan	BUMD		BUMD	1 BUMD	710,240,000						1 BUMD	0	
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	237,146,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	249,589,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	223,503,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah PD yang mencapai target realisasi fisik dan keuangan	PD		PD	32 PD	438,795,000						32 PD	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	138,454,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				3 Laporan	120,572,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	3 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	179,768,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	4 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan secara E-Procurement	persen		persen	100 persen	1,634,847,500						100 persen	900,000,000	
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen e_katalog lokal yang disusun Laporan Rekapitulasi E-Tendering pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang disusun Pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan Penyusunan standar Pedoman Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah				1 dokumen 5 dokumen 125 paket 8 Dokumen	808,248,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 dokumen 5 dokumen 125 paket 8 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah laporan analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa yang disusun Jumlah penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa Jumlah User ID Pelaku Pengadaan barang dan jasa				1 Dokumen 1 dokumen 2 unit 200 user id	513,939,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen 1 dokumen 2 unit 200 user id	550,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah ASN yang mendapat pembinaan dan pelatihan SIRUP/SPSE/e- Katalog/e-monev/SIKAP Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah dokumen analisis kebutuhan dan perencanaan pengembangan kompetensi personil UKPBJ Laporan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ yang disusun				750 orang 175 Orang 1 dokumen 1 dokumen	312,660,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	750 orang 175 Orang 1 dokumen 1 dokumen	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 02	SEKRETARIAT DPRD						76,502,894,413							76,469,295,313	
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku	persen		persen	100 persen	45,921,117,313						100 persen	45,921,117,313	
4 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku	dokumen		dokumen	14 dokumen	107,713,400						14 dokumen	107,713,400	
4 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	61,354,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	7 Dokumen	61,354,000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	46,359,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	3 Laporan	46,359,400	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Keuangan yang diberikan Jumlah Layanan Keuangan yang diberikan	bulan Bulan		bulan Bulan	12 bulan 12 Bulan	35,055,217,813						12 bulan 12 Bulan	35,055,217,813	
4 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				648 Orang/bulan	34,327,047,413		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	648 Orang/bulan	34,327,047,413	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	668,262,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	12 Dokumen	668,262,300	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	59,908,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	3 Laporan	59,908,100	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya	orang Orang		orang Orang	24 orang 24 Orang	551,770,500						24 orang 24 Orang	551,770,500	
4 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				48 Orang	551,770,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	48 Orang	551,770,500	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	4,531,674,600						12 Bulan	4,531,674,600	
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	36,780,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	36,780,400	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	348,910,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	348,910,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	71,685,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Paket	71,685,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	183,380,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	183,380,100	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	131,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	131,340,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				175 Dokumen	2,401,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	175 Dokumen	2,401,050,000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	1,358,529,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	15 Laporan	1,358,529,100	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan	unit		unit	2 unit	971,100,000						2 unit	971,100,000	
4 02 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	971,100,000				Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	2 Unit	971,100,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,857,816,000						12 Bulan	1,857,816,000	
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	303,000,000				Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	3 Laporan	303,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,554,816,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	12 Laporan	1,554,816,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	unit Unit		unit Unit	122 unit 122 Unit	1,099,370,000						122 unit 122 Unit	1,099,370,000	
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				31 Unit	490,590,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	31 Unit	490,590,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	484,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	4 Unit	484,000,000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	124,780,000					0	15 Unit	124,780,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Pelayanan yang diberikan ke DPRD Jumlah Pelayanan yang diberikan ke DPRD	orang Orang		orang Orang	50 orang 50 Orang	1,018,400,000						50 orang 50 Orang	1,018,400,000	
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				4 Paket	910,000,000					0	4 Paket	910,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				50 Orang	108,400,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	50 Orang	108,400,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Fasilitas Administrasi DPRD	Bulan		Bulan	12 Bulan	728,055,000						12 Bulan	728,055,000	
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				30 Laporan	306,675,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	30 Laporan	306,675,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				1 Paket	421,380,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	1 Paket	421,380,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pembahasan Raperda	persen		persen	90 persen	30,581,777,100						90 persen	30,548,178,000	
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Perda yang dibahas dan ditetapkan	Raperda		Raperda	13 Raperda	5,433,732,000						13 Raperda	5,433,732,000	
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				11 Dokumen	2,675,593,300			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	11 Dokumen	2,675,593,300	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				4 Dokumen	2,308,138,700			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	4 Dokumen	2,308,138,700	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan						10 Dokumen	350,000,000			0	10 Dokumen	350,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi						2 Dokumen	100,000,000			0	2 Dokumen	100,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Anggaran yang disepakati tepat waktu	Dokumen			Dokumen		6 Dokumen	1,160,174,600				6 Dokumen	1,160,174,600	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS						2 Dokumen	61,244,500			0	2 Dokumen	61,244,500	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						2 Dokumen	57,682,500			0	2 Dokumen	57,682,500	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD						1 Dokumen	125,448,200			0	1 Dokumen	125,448,200	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan						1 Dokumen	119,862,200			0	1 Dokumen	119,862,200	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						1 Dokumen	795,937,200			0	1 Dokumen	795,937,200	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah rekomendasi DPRD atas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan kepada Kepala Daerah Jumlah rekomendasi DPRD atas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan kepada Kepala Daerah	dokumen Dokumen			dokumen Dokumen		72 dokumen 72 Dokumen	9,509,309,000				72 dokumen 72 Dokumen	9,509,309,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				15 Laporan	1,955,559,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	15 Laporan	1,955,559,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				7 Laporan	1,730,772,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	7 Laporan	1,730,772,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				8 Laporan	2,507,963,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	8 Laporan	2,507,963,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				6 Laporan	1,872,038,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	6 Laporan	1,872,038,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				6 Laporan	761,289,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	6 Laporan	761,289,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				6 Dokumen	681,688,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	6 Dokumen	681,688,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang telah memiliki sertifikasi Jumlah anggota DPRD yang telah memiliki sertifikasi	orang Orang		orang Orang	50 orang 50 Orang	10,803,976,500						50 orang 50 Orang	10,803,977,400	
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				50 Dokumen	4,164,274,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	50 Dokumen	4,164,275,400	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				25 Dokumen	5,883,702,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	25 Dokumen	5,883,702,000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				14 Orang	504,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	14 Orang	504,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	252,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	7 Orang	252,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Fasilitas Reses yang diakomodir dan disalurkan kepada yang berwenang	Tahap		Tahap	3 Tahap	1,210,100,400						3 Tahap	1,210,100,400	
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				3 Dokumen	39,784,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	3 Dokumen	39,784,700	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	1,170,315,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	3 Dokumen	1,170,315,700	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pelaksanaan Kode Etik	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	183,490,000						1 Dokumen	183,490,000	
4 02 02 2.06 01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	183,490,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	183,490,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Rencana Kerja Sama Daerah yang dilakukan pembahasan Jumlah Rencana Kerja Sama Daerah yang dilakukan pembahasan	kegiatan Kegiatan		kegiatan Kegiatan	1 kegiatan 1 Kegiatan	163,976,000						1 kegiatan 1 Kegiatan	163,976,000	
4 02 02 2.07 02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				2 Dokumen	163,976,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	2 Dokumen	163,976,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Fasilitas Kegiatan DPRD yang disediakan	Bulan		Bulan	12 Bulan	2,117,018,600						12 Bulan	2,083,418,600	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						0	24 Dokumen	1,654,752,000	SEKRETARIAT DPRD			
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah						0	12 Dokumen	428,666,600	SEKRETARIAT DPRD			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	01				PERENCANAAN										13,031,185,732			13,275,434,722
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	persen		persen	100 persen	8,485,409,707					100 persen	8,513,820,942	
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	dokumen		dokumen	8 dokumen	101,513,300					8 dokumen	65,310,420	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	69,249,400	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	3 Dokumen	43,735,230	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	8,784,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	4 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	6,706,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	2 Dokumen	6,836,130	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	16,773,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	2 Laporan	14,739,060	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen keuangan perangkat daerah yang disusun	dokumen		dokumen	18 dokumen	6,556,505,107					18 dokumen	6,540,042,397		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/bulan	5,717,451,507		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	63 Orang/bulan	5,845,824,082	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	774,216,200	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	12 Dokumen	675,147,375	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 dokumen	8,460,700	Semua Kab/Kota, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	12 dokumen	6,152,160	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	7,531,900	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	2 Laporan	5,959,905	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				12 Dokumen	8,377,500	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	12 Dokumen	6,958,875	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	40,467,300	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	18 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang disusun	dokumen		dokumen	12 dokumen	14,681,700						12 dokumen	9,294,075	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 laporan 12 Laporan	14,681,700	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	12 laporan 12 Laporan	9,294,075	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah pegawai yang tidak pernah mendapat hukuman disiplin	orang		orang	60 orang	94,086,800						60 orang	166,816,755	
5 01 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	6,180,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	1 Unit	9,194,850	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	8,757,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	12 Dokumen	9,194,850	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				11 Dokumen	5,906,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	11 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				11 Dokumen	6,503,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	11 Dokumen	6,828,675	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	10 Orang	52,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	8,411,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	0 Orang	8,832,075	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	38,328,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	0 Orang	80,266,305	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	jenis		jenis	102 jenis	507,559,300						102 jenis	530,797,890	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	61,538,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	12 Paket	50,808,765	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18,883,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	1 Paket	210,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	86,295,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	12 Paket	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				30 Paket	142,131,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	30 Paket	80,767,575	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	198,711,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	24 Laporan	189,221,550	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang di adakan	unit		unit	34 unit	431,920,000					34 unit	410,000,000		
5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	321,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	2 Unit	325,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	110,820,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	5 Unit	85,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	jenis		jenis	3 jenis	458,040,000					3 jenis	480,942,000		
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	458,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	3 Laporan	480,942,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	persen		persen	85 persen	321,103,500					85 persen	310,617,405		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	41,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	43,735,230	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	154,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		14 Unit	208,960,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	95,090,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		10 Unit	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30,333,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	57,921,675	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator program pembangunan daerah tahunan dengan tingkat capaian outcome minimal 75%	persen		persen	77 persen	1,889,728,600					77 persen	1,738,024,229		
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	1,273,370,600					3 Dokumen	1,090,695,554		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 02 2.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				3 Dokumen	68,503,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	3 Dokumen	71,928,255	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	81,088,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Berita Acara	83,659,244	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	43,585,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Berita Acara	45,764,250	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	278,629,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Berita Acara	292,561,290	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				100 Usulan	68,936,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	100 Usulan	72,383,745	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJP/ RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	732,627,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	3 Dokumen	524,398,770	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	dokumen		dokumen	2 dokumen	301,603,800						2 dokumen	420,175,140	
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	101,851,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	1 Dokumen	241,217,235	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				46 Orang	79,311,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	46 Orang	57,019,200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	120,440,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Buku	121,938,705	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	dokumen		dokumen	13 dokumen	314,754,200					13 dokumen	227,153,535		
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				5 Laporan	54,306,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		5 Laporan	57,021,615	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				8 Laporan	260,447,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		8 Laporan	170,131,920	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik Persentase PD dengan rata-rata capaian kinerja di atas 76%	persen persen persen		persen persen persen	100 persen 100 persen 77 persen	2,656,047,425					100 persen 100 persen 77 persen	3,023,589,551		
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia kualitas baik	Dokumen		Dokumen	20 Dokumen	818,881,400					20 Dokumen	885,043,320		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	84,523,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	88,749,360	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				4 Laporan	22,963,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	4 Laporan	24,111,150	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				4 Laporan	93,221,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	4 Laporan	97,882,050	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	80,942,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	84,989,835	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	113,916,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	119,612,325	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	38,198,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	40,107,900	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	135,345,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	194,612,250	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	249,772,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	234,978,450	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	jumlah dokumen renstra dan renja PD lingkup bidang perekonomian kualitas baik	dokumen		dokumen	11 dokumen	845,421,250					11 dokumen	961,337,261		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	142,433,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	191,586,700	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				11 Laporan	47,149,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	11 Laporan	75,327,238	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				11 Laporan	29,373,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	11 Laporan	56,541,646	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	157,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)				1 Dokumen	186,843,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	179,188,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				11 Laporan	92,981,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	11 Laporan	83,659,244	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				11 Laporan	46,640,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	11 Laporan	60,034,433	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	157,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	jumlah dokumen renstra dan renja PD lingkup bidang Infrastruktur kewilayahan kualitas baik	dokumen		dokumen	6 dokumen	991,744,775					6 dokumen	1,177,208,970		
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	154,371,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	184,516,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				11 Laporan	30,744,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	11 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan	40,624,875		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	3 Laporan	70,497,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	66,472,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	218,610,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	248,251,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	3 Dokumen	260,663,550	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				12 Laporan	63,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	12 Laporan	67,042,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				5 Laporan	155,430,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	5 Laporan	163,201,920	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	232,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	212,677,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02	KEUANGAN						45,091,466,725							52,374,763,565	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Kesesuaian Laporan Kinerja Keuangan Yang Tepat waktu	Tahun		Tahun	1 Tahun	42,006,657,575						1 Tahun	50,065,084,979	
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	62,413,800						3 Laporan	62,632,961	
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	45,446,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	2 Dokumen	29,227,795	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	16,967,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	2 Laporan	33,405,166	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	12,270,544,979						3 Laporan	14,883,268,420	
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				61 Orang/bulan	11,376,466,729		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	61 Orang/bulan	11,717,760,731	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	859,833,450		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	3,130,204,645	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	34,244,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	3 Laporan	35,303,044	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan/ Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		Orang	15 Orang	50,000,000						15 Orang	100,000,000	
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	10 Orang	100,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit		Unit	107 Unit	657,515,600						107 Unit	1,333,453,998	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	10,466,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	13 Paket	10,799,980	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				36 Paket	161,235,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	36 Paket	400,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				28 Paket	19,897,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	28 Paket	386,456,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				18 Paket	195,760,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	18 Paket	225,745,718	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				72 Laporan	270,157,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	72 Laporan	310,452,300	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Laporan		Laporan	4 Laporan	28,388,562,396						4 Laporan	32,132,000,000	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	28,388,562,396		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	4 Laporan	32,132,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit		Unit	176 Unit	577,620,800						176 Unit	753,729,600	
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	325,690,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	27 Unit	376,723,800	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				94 Unit	192,080,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	94 Unit	257,030,800	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	59,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	2 Unit	119,975,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kepatuhan wajib pajak daerah Persentase Realisasi Pajak Daerah Persentase Realisasi Retribusi Daerah	persen persen persen		persen persen persen	100 persen 100 persen 100 persen	3,084,809,150						100 persen 100 persen 100 persen	2,309,678,586	
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah	persen		persen	100 persen	3,084,809,150						100 persen	2,309,678,586	
5 02 04 2.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	23,244,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	33,983,820	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	82,162,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	91,064,360	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				48 Laporan	80,782,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	48 Laporan	109,974,130	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	244,126,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	257,630,700	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	391,476,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	410,997,042	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				2500 Obyek Pajak	1,675,087,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	2500 Obyek Pajak	718,214,300	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	93,746,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	143,526,380	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				5100 Layanan	72,401,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	5100 Layanan	83,843,750	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				12 Dokumen	35,803,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	12 Dokumen	36,887,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah						0	2 Dokumen	177,348,902	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah						0	2787 Dokumen	88,366,790	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah						0	1 Dokumen	73,828,134	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah						0	60 Laporan	50,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	02				KEUANGAN						555,120,657,807			549,880,436,633		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Kesesuaian Laporan Kinerja dan Keuangan Yang ditetapkan Tepat Waktu	Persen		Persen	100 Persen	45,476,038,640			100 Persen	47,075,885,136	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DOkumen		DOkumen	3 DOkumen	163,424,300						3 DOkumen	176,469,112	
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	35,046,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Dokumen	45,046,700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	24,125,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	27,280,512	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	25,389,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	27,821,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	33,154,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	33,995,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	25,378,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	15,821,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	20,329,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan	26,504,900	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	42,933,644,840						1 Dokumen	43,968,209,424	
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/bulan	39,827,941,536		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Orang/bulan	40,827,941,536	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	2,745,523,704		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	2,730,283,704	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	101,919,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	101,723,784	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	80,055,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	90,055,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	46,193,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	56,193,400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	81,879,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan	101,879,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	50,133,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	60,133,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	231,389,000						1 Dokumen	144,608,000	
5 02 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	104,029,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	82,209,300	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	127,359,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	62,398,700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	8,000,000						1 Dokumen	84,000,000	
5 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Orang	10,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Unit		Unit	10 Unit	1,213,769,200						10 Unit	1,256,363,200	
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12,464,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	13,464,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	420,785,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6 Paket	476,600,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	24,221,000						1 Paket	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	134,382,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	154,382,700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	102,946,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	112,946,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	140,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	75,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	378,970,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	388,970,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit		Unit	1 Unit	31,688,000						1 Unit	527,788,000	
5 02 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	31,688,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		1 Unit	527,788,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	528,853,300						1 Dokumen	508,927,400	
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	109,303,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		1 Laporan	119,303,300	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	419,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		1 Laporan	389,624,100	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	365,270,000						1 Dokumen	409,520,000	
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	265,020,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		10 Unit	265,020,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	62,260,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		1 Unit	72,260,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	37,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	72,240,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase PD yang Menyampaikan Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu Prosentase jumlah PD yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP Prosentase ketepatan waktu penyelesaian SP2D berdasarkan SPM yang dinyatakan sah dan lengkap sesuai ketentuan dan ketepatan waktu Prosentase Ketepatan waktu penyusunan dan penetapan RAPBD Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun DPA sesuai ketentuan yang berlaku	100 Persen Persen Persen Persen		100 Persen Persen Persen Persen	100 100 100 Persen 100 Persen 100 Persen	509,054,989,197						100 100 100 Persen 100 Persen 100 Persen	502,089,633,197	
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Prosentase Pencapaian Kualitas Laporan Keuangan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	2,877,326,050						1 Dokumen	2,987,676,050	
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	143,819,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	153,819,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	128,213,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	138,213,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	78,572,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	88,572,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	76,355,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	86,355,100	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	79,995,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	89,995,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	76,355,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	86,355,100	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				1 Dokumen	1,246,041,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	1,256,391,100	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	727,186,900		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	2 Dokumen	737,186,900	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	169,575,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	179,575,750	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	67,277,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	77,277,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.01 12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	83,934,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	93,934,600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Prosentase Penyelenggaraan Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	10,446,455,800						1 Dokumen	10,514,145,000	
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				0 Dokumen	124,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	91,660,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				1 Dokumen	158,110,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	136,203,800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.02 04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	9,660,689,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	9,420,689,200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 Dokumen	119,659,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	70,799,400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)								0	1 Laporan	97,533,900	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait								0	1 Dokumen	194,361,400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Prosentase Penyelenggaraan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Dokumen			Dokumen	1 Dokumen	922,291,700			1 Dokumen	982,291,700	
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah								0	1 Laporan	111,127,800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban								0	1 Dokumen	130,275,800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran								0	1 Laporan	55,728,700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi								0	1 Laporan	279,662,600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						1 Dokumen	306,626,200			0	1 Dokumen	316,626,200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						1 Dokumen	78,870,600			0	1 Dokumen	88,870,600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								494,425,520,447					487,425,520,447	
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						1 Laporan	468,320,685,200				1 Laporan	461,320,685,200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						1 Laporan	15,000,000,000				1 Laporan	15,000,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota						1 Laporan	11,104,835,247				1 Laporan	11,104,835,247	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah								383,395,200					180,000,000	
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah						1 Dokumen	180,000,000				1 Dokumen	180,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						123 Orang	203,395,200				123 Orang	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Prosentase Perangkat Daerah Yang Menyampaikan Laporan Aset Barang Milik Daerah Tepat Waktu	Persen		Persen	100 Persen	589,629,970						100 Persen	714,918,300	
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase Perangkat Daerah Yang Menyampaikan Laporan Aset Barang Milik Daerah Tepat Waktu	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	589,629,970						1 Dokumen	714,918,300	
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	156,066,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	89,544,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	36,550,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	89,544,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	83,163,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	52,527,300	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	21,350,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	55,319,300	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	131,051,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	292,385,400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	161,448,570		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	46,054,300	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 03	KEPEGAWAIAN						10,477,937,178						10,477,937,178		
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Persen		Persen	100 Persen	7,675,590,678						100 Persen	7,675,590,678	
5 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi yang tersusun	Persen		Persen	100 Persen	30,350,000						100 Persen	30,350,000	
5 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	22,262,500		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			0	4 Dokumen	22,262,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	8,087,500					0	4 Laporan	8,087,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun	Persen		Persen	100 Persen	5,858,588,428						100 Persen	5,858,588,428	
5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				66 Orang/bulan	5,061,000,428		Lain-lain PAD Yang Sah			0	66 Orang/bulan	5,061,000,428	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	773,088,000		Lain-lain PAD Yang Sah			0	12 Dokumen	773,088,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	24,500,000		Lain-lain PAD Yang Sah			0	18 Laporan	24,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi	Orang		Orang	5 Orang	50,000,000						5 Orang	50,000,000	
5 03 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	50,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah			0	5 Orang	50,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Prasarana Kantor yang baik	Paket		Paket	8 Paket	662,542,250						8 Paket	662,542,250	
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19,624,000		Lain-lain PAD Yang Sah			0	1 Paket	19,624,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	30,074,000		Lain-lain PAD Yang Sah			0	2 Paket	30,074,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	200,780,900					0	4 Paket	200,780,900	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	101,633,350		Lain-lain PAD Yang Sah			0	1 Paket	101,633,350	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	310,430,000		Lain-lain PAD Yang Sah			0	12 Laporan	310,430,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Prasarana Kantor yang Baik	Unit		Unit	12 Unit	415,830,000						12 Unit	415,830,000	
5 03 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	321,100,000		Lain-lain PAD Yang Sah			0	1 Unit	321,100,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	94,730,000					0	11 Unit	94,730,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Prasarana Kantor yang baik	Laporan		Laporan	12 Laporan	336,000,000						12 Laporan	336,000,000	
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	336,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah			0	12 Laporan	336,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang baik	Unit		Unit	91 Unit	322,280,000						91 Unit	322,280,000	
5 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	98,340,000		Lain-lain PAD Yang Sah			0	7 Unit	98,340,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				82 Unit	67,440,000					0	82 Unit	67,440,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	156,500,000					0	2 Unit	156,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data kepegawaian yang akurat Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP Prosentase pemenuhan formasi sesuai dengan kebutuhan	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	100 Persen 100 Persen 90 Persen	2,802,346,500					100 Persen 100 Persen 90 Persen	2,802,346,500		
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang akurat Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian sesuai SOP	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	3 Dokumen 7 Dokumen	1,219,973,400					3 Dokumen 7 Dokumen	1,219,973,400		
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	23,247,000		Lain-lain PAD Yang Sah		0	1 Dokumen	23,247,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	20,610,000				0	1 Dokumen	20,610,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 02 2.01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				2 Laporan	805,324,700		Lain-lain PAD Yang Sah		0	2 Laporan	805,324,700	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	136,283,200				0	1 Dokumen	136,283,200	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 02 2.01 07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN				780 Dokumen	84,075,500		Lain-lain PAD Yang Sah		0	780 Dokumen	84,075,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	79,869,000		Lain-lain PAD Yang Sah		0	12 Dokumen	79,869,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				4 Dokumen	70,564,000		Lain-lain PAD Yang Sah			0	4 Dokumen	70,564,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian, Mutasi dan Promosi sesuai SOP	Persen		Persen	100 Persen	746,132,900						100 Persen	746,132,900	
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				2 Dokumen	36,096,000		Lain-lain PAD Yang Sah			0	2 Dokumen	36,096,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				3 Dokumen	84,414,000		Lain-lain PAD Yang Sah			0	3 Dokumen	84,414,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	625,622,900		Lain-lain PAD Yang Sah			0	1 Dokumen	625,622,900	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan kapasitasnya	Orang		Orang	502 Orang	207,857,200						502 Orang	207,857,200	
5 03 02 2.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				500 Orang	107,857,200		Lain-lain PAD Yang Sah			0	500 Orang	107,857,200	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				2 Orang	100,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah			0	2 Orang	100,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Pelayanan Disiplin dan peningkatan Integritas Aparatur	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	628,383,000						6 Dokumen	628,383,000	
5 03 02 2.04 01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	49,780,000		Lain-lain PAD Yang Sah			0	1 Dokumen	49,780,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	352,408,000					0	1 Dokumen	352,408,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				300 Orang	54,845,000		Lain-lain PAD Yang Sah			0	300 Orang	54,845,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 02 2.04 05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				100 Orang	40,096,000		Lain-lain PAD Yang Sah			0	100 Orang	40,096,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	102,804,000		Lain-lain PAD Yang Sah			0	1 Laporan	102,804,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 02 2.04 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				1 Dokumen	28,450,000		Lain-lain PAD Yang Sah			0	1 Dokumen	28,450,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						1,583,492,700							1,583,492,700		
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase tingkat kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional Persentase tingkat kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan teknis sesuai bidang tugas	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	1,583,492,700							100 Persen 100 Persen	1,583,492,700	
5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan kapasitasnya	Orang		Orang	188 Orang	428,717,900							188 Orang	428,717,900	
5 04 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				188 Orang	428,717,900		Lain-lain PAD Yang Sah			0	188 Orang	428,717,900	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	Orang		Orang	54 Orang	1,154,774,800							54 Orang	1,154,774,800	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				3 Laporan	1,154,774,800		Lain-lain PAD Yang Sah			0	3 Laporan	1,154,774,800	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							5,221,134,129						4,315,920,000	
5 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Persen		Persen	100 Persen	3,620,088,704						100 Persen	4,015,920,000	
5 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Persen		Persen	100 Persen	37,350,000						100 Persen	45,000,000	
5 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3,970,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	2 Dokumen	4,500,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3,670,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	5,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3,670,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	4,500,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3,670,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	4,500,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 05 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3,670,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	4,500,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	18,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	3 Laporan	22,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	3,020,512,954						100 Persen	3,455,500,000	
5 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	2,556,344,454		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	32 Orang/bulan	3,000,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	444,816,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	450,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3,952,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	10,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	3 Laporan	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	4,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	5,500,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	316,145,750						100 Persen	276,500,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,164,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	4,500,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				19 unit	113,561,350		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	19 unit	120,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	25,430,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	20,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	47,870,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	40,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	21,077,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	25,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	98,042,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	67,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	108,000,000						100 Persen	110,000,000	
5 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	108,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	110,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	138,080,000						100 Persen	128,920,000	
5 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	96,340,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Unit	80,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	21,760,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	2 Unit	18,920,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	19,980,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	5 Unit	30,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen Persen		Persen Persen	70 Persen 80 Persen	1,601,045,425						70 Persen 80 Persen	300,000,000	
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen		Persen	80 Persen	150,000,000						80 Persen	0	
5 05 02 2.01 13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Rekomendasi	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen		Persen	80 Persen	150,000,000						80 Persen	0	
5 05 02 2.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen		Persen	80 Persen	457,257,500						80 Persen	300,000,000	
5 05 02 2.03 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	157,257,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	100,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 02 2.03 02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	200,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 05 02 2.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Persen		Persen	80 Persen	843,787,925						80 Persen	0	
5 05 02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	843,787,925		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
6 01	INSPEKTORAT DAERAH						18,699,999,996						30,000,762,700		
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pegawai	persen		persen	92 persen	15,795,825,996						92 persen	25,448,693,800	
6 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan	persen		persen	87 persen	105,586,700						87 persen	82,647,000	
6 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	73,756,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya Perencanaan dan Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan	12 Dokumen	37,800,000	INSPEKTORAT
6 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	31,830,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya Perencanaan dan Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan	3 Laporan	44,847,000	INSPEKTORAT
6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Yang tersedia	bulan		bulan	12 bulan	13,554,489,196						12 bulan	23,491,250,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				87 Orang/bulan	12,312,337,696		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya Pemenuhan administrasi keuangan	87 Orang/bulan	23,000,000,000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				11 Dokumen	1,187,774,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya Pemenuhan administrasi keuangan	11 Dokumen	442,600,000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	54,377,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya Pemenuhan administrasi keuangan	3 Laporan	48,650,000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian yang terlayani	laporan		laporan	12 laporan	450,338,000						12 laporan	357,815,100	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				71 Orang	450,338,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya administrasi kepegawaian sesuai dengan tupoksinya	71 Orang	357,815,100	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang Tersedia	laporan		laporan	12 laporan	645,683,500						12 laporan	664,192,700	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	17,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya penyediaan administrasi umum	12 Paket	17,650,000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan				23 Paket	31,227,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya penyediaan administrasi umum	23 Paket	31,233,200	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				44 Paket	134,366,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya penyediaan administrasi umum	44 Paket	128,550,000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	123,425,500					Terlaksananya penyediaan administrasi umum	9 Paket	123,425,500	INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	45,390,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya penyediaan administrasi umum	1 Laporan	45,390,000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Bulan	293,624,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya penyediaan administrasi umum	6 Bulan	317,944,000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pengadaan barang milik daerah	persen		persen	82 persen	223,923,600						82 persen	89,274,000	
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				55 Unit	89,274,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	55 Unit	89,274,000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 bulan 0 Unit	134,649,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	12 bulan 0 Unit	0	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang tersedia	bulan		bulan	12 bulan	233,000,000						12 bulan	114,000,000	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				2 Laporan	233,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang	2 Laporan	114,000,000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	bulan		bulan	12 bulan	582,805,000						12 bulan	649,515,000	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	351,030,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	13 Unit	314,360,000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				72 Unit	41,560,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	72 Unit	50,980,000	INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	190,215,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	1 Unit	284,175,000	INSPEKTORAT
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal B Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang Undangan	persen persen		persen persen	87 persen 90 persen	2,223,495,400						87 persen 90 persen	3,574,941,600	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	persentase penyelenggaraan pengawasan internal yang dilaksanakan	persen		persen	87 persen	1,583,903,500						87 persen	2,929,594,700	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				12 Laporan	29,975,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya penyelenggara an pengawasan internal	12 Laporan	35,675,000	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				12 Laporan	1,019,148,000					Terlaksananya penyelenggara an pengawasan internal	12 Laporan	1,719,776,600	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				4 Laporan	113,521,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya penyelenggara an pengawasan internal	4 Laporan	202,943,500	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				12 Laporan	97,015,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya penyelenggara an pengawasan internal	12 Laporan	193,363,700	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				12 Laporan	244,918,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya penyelenggara an pengawasan internal	12 Laporan	575,116,300	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal yang Terbentuk				12 Kerjasama	41,875,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya penyelenggara an pengawasan internal	12 Kerjasama	165,269,600	INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				12 Dokumen	37,449,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya penyelenggaraan pengawasan internal	12 Dokumen	37,450,000	INSPEKTORAT
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	persentase OPD yang menindaklanjuti hasil pengawasan	persen		persen	42 persen	639,591,900						42 persen	645,346,900	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				12 Laporan	137,036,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya OPD yang menindaklanjuti hasil pengawasan	12 Laporan	142,446,900	INSPEKTORAT
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				12 Laporan	502,555,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya OPD yang menindaklanjuti hasil pengawasan	12 Laporan	502,900,000	INSPEKTORAT
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang membangun penilaian resiko Persentase OPD yang telah mengidentifikasi penilaian resiko	persen persen		persen persen	74 persen 92 persen	680,678,600						74 persen 92 persen	977,127,300	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Infrastruktur Yang Terpenuhi	persen		persen	87 persen	37,284,300						87 persen	31,250,000	
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				12 Rekomendasi	37,284,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya pemenuhan Infrastruktur SPIP	12 Rekomendasi	31,250,000	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Infrastruktur yang Terpenuhi	persen		persen	87 persen	643,394,300						87 persen	945,877,300	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				46 perangkat daerah	132,673,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya pemenuhan infrastruktur SPIP	46 perangkat daerah	253,813,200	INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				13 perangkat daerah	22,906,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya pemenuhan infrastruktur SPIP	13 perangkat daerah	55,450,000	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				12 Kegiatan	415,083,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya pemenuhan infrastruktur SPIP	12 Kegiatan	529,022,600	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah PD yg dilakukan pendampingan, asistensi penegakan integritas				3 Perangkat Daerah	72,731,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya pemenuhan infrastruktur SPIP	3 Perangkat Daerah	107,591,500	INSPEKTORAT
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.01	KECAMATAN						7,722,388,799							7,759,008,799	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7,327,138,799							7,750,788,799	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7,084,639,999							7,451,119,999	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	5,178,408,199		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		56 Orang/bulan	5,178,408,199	KECAMATAN TRIMURJO
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1,906,231,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	2,272,711,800	KECAMATAN TRIMURJO
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						130,073,800							187,243,800	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,702,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	2,702,000	KECAMATAN TRIMURJO
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,586,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	45,710,000	KECAMATAN TRIMURJO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	8,901,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	8,901,300	KECAMATAN TRIMURJO
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	26,984,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	27,930,500	KECAMATAN TRIMURJO
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	75,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	102,000,000	KECAMATAN TRIMURJO
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						41,040,000							41,040,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	41,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	41,040,000	KECAMATAN TRIMURJO
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						71,385,000							71,385,000	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	52,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		5 Unit	52,670,000	KECAMATAN TRIMURJO
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	2,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	2,920,000	KECAMATAN TRIMURJO
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15,795,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	15,795,000	KECAMATAN TRIMURJO
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						4,400,000							4,000,000	

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
															Nasional					Daerah	
7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan															
7	01	02	2.02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	2,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	2,000,000	KECAMATAN TRIMURJO	
7	01	02	2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat															
7	01	02	2.04	02		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	2,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	2,000,000	KECAMATAN TRIMURJO	
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
7	01	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa															
7	01	03	2.01	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						2,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			220,000	KECAMATAN TRIMURJO	
7	01	03	2.05			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)															
7	01	03	2.05	02		Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	2,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	2,000,000	KECAMATAN TRIMURJO	
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
7	01	04	2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	2,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	2,000,000	KECAMATAN TRIMURJO	
7 01 04 7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						384,000,000						0		
7 01 04 7.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	384,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN TRIMURJO	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							366,000,000						366,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							366,000,000						366,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							366,000,000						366,000,000	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	366,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		4 Pokmas / Ormas	366,000,000	KECAMATAN TRIMURJO	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							366,000,000						366,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							366,000,000						366,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							366,000,000						366,000,000	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	366,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		4 Pokmas / Ormas	366,000,000	KECAMATAN TRIMURJO	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							366,000,000						366,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						366,000,000						366,000,000		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						366,000,000						366,000,000		
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	366,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		4 Pokmas / Ormas	366,000,000	KECAMATAN TRIMURJO
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						6,362,614,814							4,533,442,340	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6,018,414,814							4,189,242,340	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5,462,288,424							3,694,209,200	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	3,534,266,824	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		34 Orang/bulan	1,765,972,600	KECAMATAN GUNUNG SUGIH
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	1,928,021,600	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Dokumen	1,928,236,600	KECAMATAN GUNUNG SUGIH
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						42,128,250							20,625,000	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						42,128,250							20,625,000	KECAMATAN GUNUNG SUGIH
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						256,753,140							256,753,140	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7,406,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	7,406,000	KECAMATAN GUNUNG SUGIH
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	29,429,500	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	29,429,500	KECAMATAN GUNUNG SUGIH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	39,917,640	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	39,917,640	KECAMATAN GUNUNG SUGIH
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	180,000,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	180,000,000	KECAMATAN GUNUNG SUGIH
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						62,290,000							22,700,000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	62,290,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	22,700,000	KECAMATAN GUNUNG SUGIH
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						28,900,000							28,900,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	28,900,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	28,900,000	KECAMATAN GUNUNG SUGIH
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						166,055,000							166,055,000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	63,470,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan			Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	63,470,000	KECAMATAN GUNUNG SUGIH
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	102,585,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Unit	102,585,000	KECAMATAN GUNUNG SUGIH
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						4,200,000							4,200,000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						4,200,000							4,200,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	4,200,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Pokmas / Ormas	4,200,000	KECAMATAN GUNUNG SUGIH	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						332,000,000						332,000,000		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						332,000,000						332,000,000		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	324,000,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	1 Laporan	324,000,000	KECAMATAN GUNUNG SUGIH	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	8,000,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	1 Laporan	8,000,000	KECAMATAN GUNUNG SUGIH	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						8,000,000						8,000,000		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						8,000,000						8,000,000		
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	4,000,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	1 Dokumen	4,000,000	KECAMATAN GUNUNG SUGIH	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	4,000,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	1 Dokumen	4,000,000	KECAMATAN GUNUNG SUGIH	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							366,000,000						0	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						366,000,000						0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						366,000,000						0			
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	366,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		4 Pokmas / Ormas	0	KECAMATAN GUNUNG SUGIH	
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01	KECAMATAN						366,000,000							366,000,000		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							366,000,000							366,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						366,000,000							366,000,000		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	366,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		4 Unit	366,000,000	KECAMATAN GUNUNG SUGIH	
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01	KECAMATAN						366,000,000							366,000,000		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							366,000,000							366,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						366,000,000							366,000,000		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	366,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		4 Unit	366,000,000	KECAMATAN GUNUNG SUGIH	
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01	KECAMATAN						366,000,000							366,000,000		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							366,000,000							366,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						366,000,000							366,000,000		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	366,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		4 Unit	366,000,000	KECAMATAN GUNUNG SUGIH	
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01	KECAMATAN						6,491,399,685							6,491,264,685		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6,249,399,685						6,249,264,685		
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,500,000						1,500,000		
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		3 Laporan	1,500,000	KECAMATAN TERBANGGI BESAR	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5,987,603,685						5,987,603,685		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	3,667,622,885		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		32 Orang/bulan	3,667,622,885	KECAMATAN TERBANGGI BESAR	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	2,319,980,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	2,319,980,800	KECAMATAN TERBANGGI BESAR	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						153,666,000						153,666,000		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2,405,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Paket	2,405,000	KECAMATAN TERBANGGI BESAR	
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	5,132,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Paket	5,132,500	KECAMATAN TERBANGGI BESAR	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	16,528,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		6 Paket	16,528,500	KECAMATAN TERBANGGI BESAR	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	129,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		10 Laporan	129,600,000	KECAMATAN TERBANGGI BESAR	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						39,300,000						39,300,000		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	39,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	39,300,000	KECAMATAN TERBANGGI BESAR
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						67,330,000						67,195,000		
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit 1 Unit	59,770,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		6 Unit 1 Unit	59,770,000	KECAMATAN TERBANGGI BESAR
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	7,560,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		3 Unit	7,425,000	KECAMATAN TERBANGGI BESAR
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						6,000,000						6,000,000		
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						3,000,000						3,000,000		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	3,000,000	KECAMATAN TERBANGGI BESAR
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						3,000,000						3,000,000		
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN TERBANGGI BESAR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						6,000,000						6,000,000		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						3,000,000						3,000,000		
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		3,000,000	KECAMATAN TERBANGGI BESAR	
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						3,000,000						3,000,000		
7 01 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	1 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN TERBANGGI BESAR	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						230,000,000						230,000,000		
7 01 04 7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						230,000,000						230,000,000		
7 01 04 7.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	230,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	12 Laporan	230,000,000	KECAMATAN TERBANGGI BESAR	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							366,000,000						366,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						366,000,000						366,000,000		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						366,000,000						366,000,000		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	366,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	4 Unit	366,000,000	KECAMATAN TERBANGGI BESAR	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							366,000,000						366,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						366,000,000						366,000,000		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						366,000,000						366,000,000		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	366,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		4 Unit	366,000,000	KECAMATAN TERBANGGI BESAR	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						366,000,000						366,000,000		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						366,000,000						366,000,000		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						366,000,000						366,000,000		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	366,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		4 Unit	366,000,000	KECAMATAN TERBANGGI BESAR	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						2,317,175,470						1,781,743,870		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,012,255,470						1,781,743,870		
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,875,479,170						1,781,743,870		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	1,781,743,870		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		16 Orang/bulan	1,781,743,870	KECAMATAN KALIREJO	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	93,735,300	Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Kalirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN KALIREJO	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						38,601,300						0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,405,000	Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Kalirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	0	KECAMATAN KALIREJO
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3,277,800	Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Kalirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	0	KECAMATAN KALIREJO
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8,438,500	Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Semua Kelurahan Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Kalirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	0	KECAMATAN KALIREJO
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	24,480,000	Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Kalirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN KALIREJO
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						16,550,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	16,550,000	Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	0	KECAMATAN KALIREJO
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						81,625,000							0	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	40,670,000	Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Unit	0	KECAMATAN KALIREJO
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	8,150,000	Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Kalirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		4 Unit	0	KECAMATAN KALIREJO
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	32,805,000	Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Kalirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	0	KECAMATAN KALIREJO
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						2,720,000							0	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						2,720,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	2,720,000	Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	0	KECAMATAN KALIREJO
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						9,360,000							0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						8,000,000							0	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						8,000,000	Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0	KECAMATAN KALIREJO
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						1,360,000							0	
7 01 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1,360,000	Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	0	KECAMATAN KALIREJO
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						289,440,000							0	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						289,440,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	31,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	38,850,000	KECAMATAN BANGUNREJO
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12,600,000							12,950,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	12,950,000	KECAMATAN BANGUNREJO
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						89,710,000							89,620,000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	40,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Unit	40,670,000	KECAMATAN BANGUNREJO
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 Unit	8,540,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		19 Unit	8,450,000	KECAMATAN BANGUNREJO
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	40,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		5 Unit	40,500,000	KECAMATAN BANGUNREJO
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						1,000,000							17,500,000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						1,000,000							17,500,000	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	17,500,000	KECAMATAN BANGUNREJO
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						8,943,840							8,450,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						7,943,840						8,450,000		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	7,943,840		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	8,450,000	KECAMATAN BANGUNREJO	
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						1,000,000						0		
7 01 03 2.05 03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	0	KECAMATAN BANGUNREJO	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						348,000,000						348,000,000		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						348,000,000						348,000,000		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	348,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	348,000,000	KECAMATAN BANGUNREJO	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						2,870,701,043						0		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,676,701,043						0		
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,560,776,043						0		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	2,444,173,043		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang/bulan	0	KECAMATAN PUNGGUR	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	116,603,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	KECAMATAN PUNGGUR	
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						11,700,000						0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	11,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Paket	0	KECAMATAN PUNGGUR
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						24,800,000							0	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	24,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN PUNGGUR
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						14,975,000							0	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	14,975,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN PUNGGUR
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						64,450,000							0	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	40,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Unit	0	KECAMATAN PUNGGUR
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	3,530,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit	0	KECAMATAN PUNGGUR
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	0	KECAMATAN PUNGGUR
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						7,000,000							0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						4,000,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				0 Dokumen	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	KECAMATAN PUNGGUR
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						3,000,000							0	
7 01 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				0 Dokumen	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	KECAMATAN PUNGGUR
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						183,000,000							0	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						183,000,000							0	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	180,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Laporan	0	KECAMATAN PUNGGUR
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0 Laporan	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Laporan	0	KECAMATAN PUNGGUR
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						4,000,000							0	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						4,000,000							0	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				0 Dokumen	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	KECAMATAN PUNGGUR
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							1,818,397,411						1,821,937,411	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							1,674,397,411						1,671,937,411	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,442,888,411						1,438,137,411		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	1,338,137,411		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		13 Orang/bulan	1,438,137,411	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	104,751,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						126,089,000							130,000,000	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	4,345,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Paket	5,000,000	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	11,159,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Paket	12,000,000	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	23,585,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Paket	25,000,000	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	87,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	88,000,000	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						16,550,000							0	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	16,550,000				Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						88,870,000							103,800,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	40,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Unit	50,000,000	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	40,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Unit	45,000,000	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	8,800,000	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						144,000,000							150,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						144,000,000							150,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	144,000,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	150,000,000	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							2,534,790,667						2,535,749,467	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2,231,992,667						2,231,992,667	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,082,410,367						2,082,410,367	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	1,998,868,867	Kab. Lampung Tengah, Seputih Banyak, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		19 Orang/bulan	1,998,868,867	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen	83,541,500	Kab. Lampung Tengah, Seputih Banyak, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		8 Dokumen	83,541,500	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						61,062,300						61,162,300		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	1,895,200	Kab. Lampung Tengah, Seputih Banyak, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		7 Paket	1,895,200	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				11 Paket	1,170,600	Kab. Lampung Tengah, Seputih Banyak, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		11 Paket	1,170,600	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	7,896,500	Kab. Lampung Tengah, Seputih Banyak, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		8 Paket	7,896,500	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	50,100,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Banyak, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	50,200,000	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12,700,000							12,600,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12,700,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Banyak, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	12,600,000	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						75,820,000							75,820,000	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	40,670,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Banyak, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	40,670,000	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	8,150,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Banyak, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		11 Unit	8,150,000	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	27,000,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	27,000,000	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						2,959,200							3,009,200	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						2,959,200							3,009,200	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				10 Dokumen	2,959,200	Kab. Lampung Tengah, Seputih Banyak, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		10 Dokumen	3,009,200	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						5,879,600							5,738,400	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2,959,200							3,009,200	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						2,959,200	Kab. Lampung Tengah, Seputih Banyak, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			3,009,200	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						2,920,400							2,729,200	
7 01 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				10 Dokumen	2,920,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		10 Dokumen	2,729,200	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						290,959,200							291,009,200	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							290,959,200						291,009,200	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				24 Laporan	288,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		24 Laporan	288,000,000	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				10 Laporan	2,959,200		Kab. Lampung Tengah, Seputih Banyak, Tanjung Harapan		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		10 Laporan	3,009,200	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							3,000,000						4,000,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							3,000,000						4,000,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	3,000,000				Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Dokumen	4,000,000	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							2,084,604,347						205,000,000	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							1,920,604,347						205,000,000	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,799,034,347						205,000,000	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1,715,050,247		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		15 Orang/bulan	0	KECAMATAN RUMBIA
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	83,984,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		3 Dokumen	205,000,000	KECAMATAN RUMBIA
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							32,920,000						0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	32,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN RUMBIA
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						16,400,000							0	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	16,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN RUMBIA
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						72,250,000							0	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	40,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Unit	0	KECAMATAN RUMBIA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 Unit	7,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		19 Unit	0	KECAMATAN RUMBIA
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	24,570,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	0	KECAMATAN RUMBIA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						8,000,000							0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						4,000,000							0	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0	KECAMATAN RUMBIA
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						4,000,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				12 Dokumen	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN RUMBIA
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						148,000,000							0	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						148,000,000							0	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	144,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN RUMBIA
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN RUMBIA
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						8,000,000							0	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						8,000,000							0	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN RUMBIA
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN RUMBIA
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						2,781,030,415							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,429,030,415							0	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,261,840,415							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				19 Orang/Bulan	2,139,336,015	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		19 Orang/Bulan	0	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	122,504,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						66,000,000							0	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	66,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						19,200,000							0	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	19,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	0	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						14,700,000							0	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	14,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						67,290,000							0	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	40,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit	0	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	6,370,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit	0	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	20,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Unit	0	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						4,000,000							0	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						4,000,000							0	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						8,000,000							0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						4,000,000							0	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembedaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						4,000,000							0	
7 01 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				12 Dokumen	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						336,000,000							0	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						336,000,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	336,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						4,000,000							0		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						4,000,000							0		
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN	
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01	KECAMATAN							2,004,568,829							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							1,804,568,829							0	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,686,933,829							0		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1,548,690,629		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		15 Orang/bulan	0	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	138,243,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						31,200,000							0		
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	31,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						15,375,000							0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	15,375,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						71,060,000							0	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	48,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Unit	0	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	7,540,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit	0	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	14,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	0	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						8,000,000							0	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						8,000,000							0	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						8,000,000							0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						4,000,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						4,000,000							0	
7 01 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				12 Dokumen	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						180,000,000							0	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						180,000,000							0	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	180,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						4,000,000							0	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						4,000,000							0	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							2,559,091,704						2,613,192,900	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2,299,091,704						2,357,192,900	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,051,497,504						2,132,278,700	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1,919,218,804		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		20 Orang/bulan	2,000,000,000	KECAMATAN PADANG RATU
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	132,278,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	132,278,700	KECAMATAN PADANG RATU
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						114,044,200							104,884,200	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	4,790,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		8 Paket	4,790,000	KECAMATAN PADANG RATU
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	109,254,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Paket	7,487,200	KECAMATAN PADANG RATU
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						15,700,000							2,520,000	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	15,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		4 Unit	2,520,000	KECAMATAN PADANG RATU
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						26,400,000							23,760,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	26,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	23,760,000	KECAMATAN PADANG RATU
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						91,450,000							93,750,000	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	40,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Unit	42,970,000	KECAMATAN PADANG RATU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	8,930,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		13 Unit	8,930,000	KECAMATAN PADANG RATU
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	41,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Unit	41,850,000	KECAMATAN PADANG RATU
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						4,000,000							4,000,000	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						4,000,000							4,000,000	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Laporan	4,000,000	KECAMATAN PADANG RATU
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						8,000,000							8,000,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						4,000,000							4,000,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			4,000,000	KECAMATAN PADANG RATU
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						4,000,000							4,000,000	
7 01 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				2 Dokumen	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Dokumen	4,000,000	KECAMATAN PADANG RATU
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						244,000,000							240,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						240,000,000							240,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	240,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	240,000,000	KECAMATAN PADANG RATU
7 01 04 7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						4,000,000							0	
7 01 04 7.03 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Laporan	0	KECAMATAN PADANG RATU
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						4,000,000							4,000,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						4,000,000							4,000,000	
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				2 Dokumen	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Dokumen	4,000,000	KECAMATAN PADANG RATU
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							1,471,420,968						1,264,143,883	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							1,333,020,968						1,264,143,883	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,180,395,683						1,223,143,883	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1,103,143,883		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		14 Orang/bulan	1,103,143,883	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	77,251,800	Kab. Lampung Tengah, Terusan Nunyai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	120,000,000	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							70,555,285						0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,760,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	0	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,656,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	0	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7,898,685		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	0	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	59,240,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						21,150,000							0	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	21,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						60,920,000							41,000,000	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	40,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Unit	41,000,000	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	0	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						1,600,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						1,600,000							0	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				7 Dokumen	1,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		7 Dokumen	0	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						3,200,000							0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						1,600,000							0	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						1,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI
7 01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						1,600,000							0	
7 01 03 2.06 06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				25 Keluarga	1,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		25 Keluarga	0	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						132,000,000							0	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						132,000,000							0	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	132,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						1,600,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						1,600,000						0		
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	0	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							2,509,789,278						3,161,741,798	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2,245,749,278						2,888,241,798	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,170,015,378						2,800,000,000	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	2,065,584,178		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		22 Orang/bulan	1,400,000,000	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				22 Dokumen	104,431,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		22 Dokumen	1,400,000,000	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							14,988,900						29,006,798	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1,131,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Paket	952,700	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Dokumen 0 Paket	5,773,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen 0 Paket	7,000,000	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	1,669,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Paket	1,669,100	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	2,265,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Paket	2,265,000	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	2,720,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Paket	2,719,998	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	1,430,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Laporan	14,400,000	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						24,575,000							15,575,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	24,575,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Laporan	15,575,000	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						36,170,000							43,660,000	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	33,670,000				Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit	33,670,000	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit	9,990,000	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						13,240,000							24,500,000	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						4,800,000							10,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10 Dokumen 10 Laporan	4,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		10 Dokumen 10 Laporan	10,000,000	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						8,440,000							14,500,000	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				20 Dokumen	7,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		20 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						1,240,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			4,500,000	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						9,600,000							4,500,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						4,800,000							4,500,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						4,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			4,500,000	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						4,800,000							0	
7 01 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				10 Dokumen	4,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		10 Dokumen	0	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						241,200,000							244,500,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						241,200,000							244,500,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10 Dokumen	1,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		10 Dokumen	4,500,000	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				0 Dokumen	240,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	240,000,000	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
7		UNSUR KEWILAYAHAN													
7 01		KECAMATAN					1,965,662,255							1,967,028,955	
7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,766,162,255							1,767,528,955	
7 01 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1,631,118,655							1,631,123,955	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1,533,523,955	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Kesuma Dadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		15 Orang/bulan	1,533,523,955	KECAMATAN BEKRI
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	97,594,700	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		6 Dokumen	97,600,000	KECAMATAN BEKRI
7 01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					44,698,600							45,700,000	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	1,684,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Kesuma Dadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		8 Paket	1,700,000	KECAMATAN BEKRI
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				19 Paket	5,325,600	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Kesuma Dadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		19 Paket	5,500,000	KECAMATAN BEKRI
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	8,189,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Kesuma Dadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		7 Paket	8,500,000	KECAMATAN BEKRI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	29,500,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Kesuma Dadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	30,000,000	KECAMATAN BEKRI
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						10,700,000							10,700,000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10,700,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Kesuma Dadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	10,700,000	KECAMATAN BEKRI
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						16,320,000							16,500,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	16,320,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Kesuma Dadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	16,500,000	KECAMATAN BEKRI
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						63,325,000							63,505,000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	40,670,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Kesuma Dadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Unit	40,670,000	KECAMATAN BEKRI
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 4 Unit	6,320,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Kesuma Dadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit 4 Unit	6,500,000	KECAMATAN BEKRI
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	16,335,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Kesuma Dadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	16,335,000	KECAMATAN BEKRI
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						1,500,000							1,500,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						1,500,000						1,500,000		
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1,500,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Kesuma Dadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	1,500,000	KECAMATAN BEKRI
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						3,000,000						3,000,000		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						1,500,000						1,500,000		
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			1,500,000	KECAMATAN BEKRI
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						1,500,000						1,500,000		
7 01 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1,500,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	1,500,000	KECAMATAN BEKRI
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						193,500,000						193,500,000		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						193,500,000						193,500,000		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				16 Laporan	192,000,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		16 Laporan	192,000,000	KECAMATAN BEKRI
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1,500,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Kesuma Dadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	1,500,000	KECAMATAN BEKRI
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						1,500,000						1,500,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						1,500,000						1,500,000		
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1,500,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Kesuma Dadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	1,500,000	KECAMATAN BEKRI
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							2,294,391,973						2,125,229,573	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2,154,391,973						2,005,229,573	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,803,606,673						2,005,229,573	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	1,605,270,573	Kab. Lampung Tengah, Seputih Agung, Dono Arum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		16 Orang/bulan	1,805,270,573	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	198,336,100	Kab. Lampung Tengah, Seputih Agung, Dono Arum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	199,959,000	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							105,887,300						0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,861,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Agung, Dono Arum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	0	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	9,664,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Agung, Dono Arum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	0	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	26,162,300	Kab. Lampung Tengah, Seputih Agung, Dono Arum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	0	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	67,200,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Agung, Dono Arum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						71,838,000							0	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	31,688,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Agung, Dono Arum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	0	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	16,000,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Agung, Dono Arum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		3 Unit	0	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	24,150,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Agung, Dono Arum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Unit	0	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						63,200,000							0	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	63,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		36 Laporan	0	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						109,860,000							0	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	52,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		5 Unit	0	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	14,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		22 Unit	0	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	42,250,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Agung, Dono Arum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Unit	0	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						128,000,000							120,000,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						120,000,000							120,000,000	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10 Laporan	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		10 Laporan	120,000,000	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						4,000,000							0	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 kali	4,000,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Agung, Dono Arum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 kali	0	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						4,000,000							0	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 kali	4,000,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Agung, Dono Arum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 kali	0	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						8,000,000							0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						4,000,000							0	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						4,000,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Agung, Dono Arum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						4,000,000						0		
7 01 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 jenis	4,000,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Agung, Dono Arum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 jenis	0	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						4,000,000						0		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						4,000,000						0		
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	4,000,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Agung, Dono Arum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	0	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							1,822,446,111						1,821,448,411	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							1,669,446,111						1,668,448,411	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,487,833,011						1,487,833,011	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	1,374,238,411		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		13 Orang/bulan	1,374,238,411	KECAMATAN WAY PENGUBUAN
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Dokumen 13 Orang/bulan	113,594,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		13 Dokumen 13 Orang/bulan	113,594,600	KECAMATAN WAY PENGUBUAN
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							62,968,100						61,970,400	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,895,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	1,895,600	KECAMATAN WAY PENGUBUAN
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	14,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Paket	14,200,000	KECAMATAN WAY PENGUBUAN
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	997,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	0	KECAMATAN WAY PENGUBUAN
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6,874,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	6,874,800	KECAMATAN WAY PENGUBUAN
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	39,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	39,000,000	KECAMATAN WAY PENGUBUAN
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						10,375,000							10,375,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	10,375,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	10,375,000	KECAMATAN WAY PENGUBUAN
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						108,270,000							108,270,000	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	40,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Unit	40,670,000	KECAMATAN WAY PENGUBUAN
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	6,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		17 Unit	6,850,000	KECAMATAN WAY PENGUBUAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	60,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Unit	60,750,000	KECAMATAN WAY PENGUBUAN
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						3,600,000							3,600,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						1,800,000							1,800,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	1,800,000	KECAMATAN WAY PENGUBUAN
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						1,800,000							1,800,000	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	1,800,000	KECAMATAN WAY PENGUBUAN
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						3,600,000							3,600,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						1,800,000							1,800,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			1,800,000	KECAMATAN WAY PENGUBUAN
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						1,800,000							1,800,000	
7 01 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	1,800,000	KECAMATAN WAY PENGUBUAN
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						145,800,000							145,800,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						145,800,000						145,800,000		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	144,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	12 Laporan	144,000,000	KECAMATAN WAY PENGUBUAN	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	1 Laporan	1,800,000	KECAMATAN WAY PENGUBUAN	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,901,222,621							1,931,591,500	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,711,698,621							1,931,591,500	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,565,036,421							1,747,591,500	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1,471,444,921		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	14 Orang/bulan	1,480,000,000	KECAMATAN BANDAR MATARAM	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	93,591,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	2 Dokumen	267,591,500	KECAMATAN BANDAR MATARAM	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						66,312,200							69,000,000	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1,141,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0 Paket	1,500,000	KECAMATAN BANDAR MATARAM	
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	1,003,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0 Paket	1,500,000	KECAMATAN BANDAR MATARAM	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	8,167,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Paket	7,000,000	KECAMATAN BANDAR MATARAM
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	56,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Laporan	59,000,000	KECAMATAN BANDAR MATARAM
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12,950,000							15,000,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	12,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Laporan	15,000,000	KECAMATAN BANDAR MATARAM
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						67,400,000							100,000,000	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	40,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit	45,000,000	KECAMATAN BANDAR MATARAM
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	6,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit	8,000,000	KECAMATAN BANDAR MATARAM
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	20,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit	47,000,000	KECAMATAN BANDAR MATARAM
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						4,762,000							0	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						2,381,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	2,381,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Laporan	0	KECAMATAN BANDAR MATARAM
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						2,381,000							0	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				0 Dokumen	2,381,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	KECAMATAN BANDAR MATARAM
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						4,762,000							0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						2,381,000							0	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						2,381,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0	KECAMATAN BANDAR MATARAM
7 01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						2,381,000							0	
7 01 03 2.06 02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				0 Keluarga	2,381,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Keluarga	0	KECAMATAN BANDAR MATARAM
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						180,000,000							0	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						180,000,000							0	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	180,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Laporan	0	KECAMATAN BANDAR MATARAM
7	UNSUR KEWILAYAHAN														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7	01						2,160,965,807						1,991,122,107		
7	01	01					1,787,341,307						1,991,122,107		
7	01	01	2.02				1,643,721,107						1,991,122,107		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1,537,783,307		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	15 Orang/bulan	1,537,783,307	KECAMATAN PUBIAN	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	105,937,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	1 Dokumen	453,338,800	KECAMATAN PUBIAN	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			44,418,200					0		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	192,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	1 Paket	0	KECAMATAN PUBIAN	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	1 Paket	0	KECAMATAN PUBIAN	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1,112,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	1 Paket	0	KECAMATAN PUBIAN	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 0 Paket	2,730,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	1 0 Paket	0	KECAMATAN PUBIAN	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2,693,000			Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, bersih dan akuntabel)	1 Paket	0	KECAMATAN PUBIAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	28,990,000					Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	0	KECAMATAN PUBIAN
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1,862,000								0	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1,862,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	0	KECAMATAN PUBIAN
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						22,920,000								0	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	22,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	0	KECAMATAN PUBIAN
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						74,420,000								0	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	40,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	0	KECAMATAN PUBIAN
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	33,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	0	KECAMATAN PUBIAN
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						3,011,000								0	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						3,011,000								0	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	3,011,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	0	KECAMATAN PUBIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						8,813,500						0		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						4,502,500						0		
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	4,502,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	0	KECAMATAN PUBIAN	
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						4,311,000						0		
7 01 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	4,311,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	0	KECAMATAN PUBIAN	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						361,800,000						0		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						361,800,000						0		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	361,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	0	KECAMATAN PUBIAN	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						2,126,527,186						2,117,776,091		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,784,632,186						1,758,276,091		
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2,648,600						1,700,000		
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	2,648,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		4 Dokumen	1,700,000	KECAMATAN SELAGAI LINGGA	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,607,688,386						1,622,876,091		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	1,462,876,086		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		18 Orang/bulan	1,462,876,091	KECAMATAN SELAGAI LINGGA	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	144,812,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	160,000,000	KECAMATAN SELAGAI LINGGA	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						91,342,700						85,700,000		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	4,452,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Paket	0	KECAMATAN SELAGAI LINGGA	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	3,305,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		10 Unit	3,200,000	KECAMATAN SELAGAI LINGGA	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	14,635,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		20 Paket	12,500,000	KECAMATAN SELAGAI LINGGA	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	68,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	70,000,000	KECAMATAN SELAGAI LINGGA	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						19,782,500						21,000,000		
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	19,782,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	6 Unit	21,000,000	KECAMATAN SELAGAI LINGGA	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						10,100,000						11,000,000		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	10,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	12 Laporan	11,000,000	KECAMATAN SELAGAI LINGGA	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						53,070,000						16,000,000		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	40,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	2 Unit	0	KECAMATAN SELAGAI LINGGA	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	12,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	8 Unit	16,000,000	KECAMATAN SELAGAI LINGGA	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						3,860,000						6,000,000		
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						2,400,000						3,000,000		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	2,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	1 Laporan	3,000,000	KECAMATAN SELAGAI LINGGA	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						1,460,000						3,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						1,460,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		3,000,000	KECAMATAN SELAGAI LINGGA	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						14,035,000						13,500,000		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						9,810,000						10,000,000		
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						9,810,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		10,000,000	KECAMATAN SELAGAI LINGGA	
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						4,225,000						3,500,000		
7 01 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				14 Dokumen	4,225,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	14 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN SELAGAI LINGGA	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						324,000,000						340,000,000		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						324,000,000						340,000,000		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	324,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	12 Laporan	340,000,000	KECAMATAN SELAGAI LINGGA	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							1,731,383,407						1,296,636,687	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,529,383,407						1,092,636,687		
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,324,381,207						856,890,187		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/bulan	1,229,581,207	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Orang/bulan	798,090,187	KECAMATAN ANAK TUHA
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	94,800,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	58,800,000	KECAMATAN ANAK TUHA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						88,287,200							119,176,500	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,935,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	5,925,000	KECAMATAN ANAK TUHA
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	36,454,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	42,853,300	KECAMATAN ANAK TUHA
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	8,221,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	9,221,200	KECAMATAN ANAK TUHA
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	22,677,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	31,177,000	KECAMATAN ANAK TUHA
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	16,000,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	30,000,000	KECAMATAN ANAK TUHA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6,075,000							7,500,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	6,075,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	7,500,000	KECAMATAN ANAK TUHA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						110,640,000							109,070,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	48,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	1 Unit	50,670,000	KECAMATAN ANAK TUHA	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	7,970,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	1 Unit	4,400,000	KECAMATAN ANAK TUHA	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	54,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	1 Unit	54,000,000	KECAMATAN ANAK TUHA	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						8,000,000						12,000,000		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						8,000,000						12,000,000		
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12,000,000	KECAMATAN ANAK TUHA	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						182,000,000						184,000,000		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						182,000,000						184,000,000		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	168,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	1 Laporan	168,000,000	KECAMATAN ANAK TUHA	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	14,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	1 Laporan	16,000,000	KECAMATAN ANAK TUHA	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						12,000,000						8,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						12,000,000						8,000,000		
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	8,000,000	KECAMATAN ANAK TUHA
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,618,555,827							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,461,755,827							0	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,000,000							0	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		4 Dokumen	0	KECAMATAN SENDANG AGUNG
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,329,014,927							0	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	1,238,555,827	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Sendang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		11 Orang/bulan	0	KECAMATAN SENDANG AGUNG
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	90,459,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN SENDANG AGUNG
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						28,780,900							0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,827,300	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Sendang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	0	KECAMATAN SENDANG AGUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2,310,100	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Sendang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	0	KECAMATAN SENDANG AGUNG
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5,443,500	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Sendang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	0	KECAMATAN SENDANG AGUNG
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	19,200,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Sendang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN SENDANG AGUNG
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						23,900,000							0	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	23,900,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Sendang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		3 Unit	0	KECAMATAN SENDANG AGUNG
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						18,000,000							0	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	18,000,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Sendang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		3 Laporan	0	KECAMATAN SENDANG AGUNG
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						61,060,000							0	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	40,670,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Sendang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Unit	0	KECAMATAN SENDANG AGUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	2,840,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Sendang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		4 Unit	0	KECAMATAN SENDANG AGUNG
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	17,550,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Sendang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	0	KECAMATAN SENDANG AGUNG
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						2,000,000							0	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						2,000,000							0	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				9 Laporan	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		9 Laporan	0	KECAMATAN SENDANG AGUNG
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						5,200,000							0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						3,200,000							0	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						3,200,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Sendang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0	KECAMATAN SENDANG AGUNG
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						2,000,000							0	
7 01 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				9 Dokumen	2,000,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Sendang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		9 Dokumen	0	KECAMATAN SENDANG AGUNG
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						146,000,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						146,000,000						0		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	144,000,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Sendang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	9 Laporan	0	KECAMATAN SENDANG AGUNG	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				9 Laporan	2,000,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Sendang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	9 Laporan	0	KECAMATAN SENDANG AGUNG	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						3,600,000						0		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						3,600,000						0		
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				9 Dokumen	3,600,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Sendang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	9 Dokumen	0	KECAMATAN SENDANG AGUNG	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						3,196,080,630							3,204,105,130	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3,028,080,630							3,034,105,130	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,926,555,630							2,926,230,130	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	2,839,241,430	Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Orang/bulan	2,839,241,430	KECAMATAN KOTA GAJAH	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						87,314,200						86,988,700	KECAMATAN KOTA GAJAH	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						24,705,000							27,000,000	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	4,705,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	8 Paket	7,000,000	KECAMATAN KOTA GAJAH	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		20,000,000	KECAMATAN KOTA GAJAH	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						15,700,000						16,000,000		
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	15,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	3 Unit	16,000,000	KECAMATAN KOTA GAJAH	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						17,750,000						17,750,000		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	17,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Laporan	17,750,000	KECAMATAN KOTA GAJAH	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						43,370,000						47,125,000		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit	40,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Unit	44,627,500	KECAMATAN KOTA GAJAH	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	1 Unit	2,497,500	KECAMATAN KOTA GAJAH	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						3,000,000						3,000,000		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						3,000,000						3,000,000		
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						3,000,000				Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		3,000,000	KECAMATAN KOTA GAJAH	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						159,000,000						159,000,000		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						159,000,000						159,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						156,000,000						156,000,000	KECAMATAN KOTA GAJAH	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		3,000,000	KECAMATAN KOTA GAJAH	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						6,000,000						8,000,000		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						6,000,000						8,000,000		
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				0 Dokumen	3,000,000				Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0 Dokumen	4,000,000	KECAMATAN KOTA GAJAH	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	3,000,000				Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	1 Dokumen	4,000,000	KECAMATAN KOTA GAJAH	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							1,728,388,615						0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							1,643,388,615						0	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,524,443,615						0	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1,420,788,315		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	15 Orang/bulan		0	KECAMATAN BUMI NABUNG
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	103,655,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	12 Dokumen		0	KECAMATAN BUMI NABUNG
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							31,500,000						0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	31,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN BUMI NABUNG
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						19,200,000							0	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	19,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		3 Unit	0	KECAMATAN BUMI NABUNG
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						11,920,000							0	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	11,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN BUMI NABUNG
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						56,325,000							0	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	40,670,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Nabung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		3 Unit	0	KECAMATAN BUMI NABUNG
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	4,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		6 Unit	0	KECAMATAN BUMI NABUNG
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,665,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	0	KECAMATAN BUMI NABUNG
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						3,000,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						3,000,000							0	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	3,000,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Nabung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN BUMI NABUNG
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						7,000,000							0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						4,000,000							0	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						4,000,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Nabung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0	KECAMATAN BUMI NABUNG
7 01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						3,000,000							0	
7 01 03 2.06 06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	3,000,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Nabung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		100 Keluarga	0	KECAMATAN BUMI NABUNG
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						72,000,000							0	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						72,000,000							0	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	72,000,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Nabung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN BUMI NABUNG
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						3,000,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						3,000,000						0		
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	3,000,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Nabung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	0	KECAMATAN BUMI NABUNG
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							1,518,892,691						1,468,307,381	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							1,411,717,691						1,372,307,381	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,212,032,691						1,372,307,381	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	1,086,160,991	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		10 Orang/bulan	1,372,307,381	KECAMATAN WAY SEPUTIH
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	125,871,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN WAY SEPUTIH
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							60,825,000						0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				150 Paket	13,200,000	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		150 Paket	0	KECAMATAN WAY SEPUTIH
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	47,625,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN WAY SEPUTIH
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							44,200,000						0	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				56 Unit	44,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		56 Unit	0	KECAMATAN WAY SEPUTIH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						94,660,000							0	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	48,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		4 Unit		0	KECAMATAN WAY SEPUTIH
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	9,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		10 Unit		0	KECAMATAN WAY SEPUTIH
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	36,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		3 Unit		0	KECAMATAN WAY SEPUTIH
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						2,025,000							0	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						2,025,000							0	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	2,025,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen		0	KECAMATAN WAY SEPUTIH
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						6,100,000							0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						3,050,000							0	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						3,050,000	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				0	KECAMATAN WAY SEPUTIH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						3,050,000						0		
7 01 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				12 Dokumen	3,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN WAY SEPUTIH
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						96,000,000							96,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						96,000,000							96,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	96,000,000	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		8 Laporan	96,000,000	KECAMATAN WAY SEPUTIH
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						3,050,000							0	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						3,050,000							0	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	3,050,000	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN WAY SEPUTIH
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							2,089,159,329						68,800,003	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							1,949,159,329						68,800,003	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,807,576,329						68,800,002	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/bulan	1,709,125,929		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Orang/bulan	2	KECAMATAN BANDAR SURABAYA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	98,450,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	68,800,000	KECAMATAN BANDAR SURABAYA
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						57,023,000							1	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,705,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket		1 KECAMATAN BANDAR SURABAYA
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	4,438,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Paket		0 KECAMATAN BANDAR SURABAYA
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	9,379,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Paket		0 KECAMATAN BANDAR SURABAYA
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	41,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan		0 KECAMATAN BANDAR SURABAYA
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						16,750,000							0	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	16,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan		0 KECAMATAN BANDAR SURABAYA
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						67,810,000							0	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	40,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Unit		0 KECAMATAN BANDAR SURABAYA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	7,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit	0	KECAMATAN BANDAR SURABAYA
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	19,440,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	0	KECAMATAN BANDAR SURABAYA
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						4,000,000							0	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						4,000,000							0	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN BANDAR SURABAYA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						8,000,000							0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						4,000,000							0	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0	KECAMATAN BANDAR SURABAYA
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						4,000,000							0	
7 01 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				12 Dokumen	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN BANDAR SURABAYA
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						124,000,000							0	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						124,000,000							0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN BANDAR SURABAYA
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN BANDAR SURABAYA
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						4,000,000							0	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						4,000,000							0	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN BANDAR SURABAYA
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							1,711,710,398						1,618,900,000	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							1,567,710,398						1,464,900,000	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,408,403,298						1,400,000,000	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	1,334,346,398		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		11 Orang/bulan	1,400,000,000	KECAMATAN ANAK RATU AJI
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen	74,056,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		8 Dokumen	0	KECAMATAN ANAK RATU AJI
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							69,827,100						12,900,000	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			1,500,000	KECAMATAN ANAK RATU AJI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,694,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	1,700,000	KECAMATAN ANAK RATU AJI
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9,682,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	9,700,000	KECAMATAN ANAK RATU AJI
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	57,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	0	KECAMATAN ANAK RATU AJI
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						89,480,000							40,000,000	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	40,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	0	KECAMATAN ANAK RATU AJI
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8400000 Unit	8,310,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		8400000 Unit	0	KECAMATAN ANAK RATU AJI
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	40,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	40,000,000	KECAMATAN ANAK RATU AJI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						144,000,000						145,000,000		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						144,000,000						145,000,000		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	144,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	1 Laporan	145,000,000	KECAMATAN ANAK RATU AJI	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,559,012,555						1,569,684,451		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,423,012,555						1,429,684,451		
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,190,409,655						1,198,601,201		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 orang/Bulan 11 Orang/bulan	1,063,489,980	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Bina Karya Utama	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	11 orang/Bulan 11 Orang/bulan	1,073,788,436	KECAMATAN PUTRA RUMBIA	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	126,919,675	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	1 Dokumen	124,812,765	KECAMATAN PUTRA RUMBIA	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						82,122,900						93,840,750		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						984,400	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1,250,000	KECAMATAN PUTRA RUMBIA	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	4,657,500	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0 Paket	15,000,000	KECAMATAN PUTRA RUMBIA	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	2,031,000	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Paket	2,132,550	KECAMATAN PUTRA RUMBIA
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	16,200,000	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Paket	14,295,700	KECAMATAN PUTRA RUMBIA
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	58,250,000	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Laporan	61,162,500	KECAMATAN PUTRA RUMBIA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						24,900,000							0	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	24,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit	0	KECAMATAN PUTRA RUMBIA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						17,385,000							13,492,500	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	17,385,000	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Laporan	13,492,500	KECAMATAN PUTRA RUMBIA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						108,195,000							123,750,000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	56,670,000	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		5 Unit	69,300,000	KECAMATAN PUTRA RUMBIA
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	9,000,000	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit	9,450,000	KECAMATAN PUTRA RUMBIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	42,525,000	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	45,000,000	KECAMATAN PUTRA RUMBIA
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						8,000,000							10,000,000	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						4,000,000							5,000,000	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	4,000,000	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Laporan	5,000,000	KECAMATAN PUTRA RUMBIA
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						4,000,000							5,000,000	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				0 Laporan	4,000,000	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Laporan	5,000,000	KECAMATAN PUTRA RUMBIA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						8,000,000							10,000,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						4,000,000							5,000,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						4,000,000	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			5,000,000	KECAMATAN PUTRA RUMBIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						4,000,000						5,000,000		
7 01 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				0 Dokumen	4,000,000	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	5,000,000	KECAMATAN PUTRA RUMBIA
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						120,000,000						120,000,000		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						120,000,000						120,000,000		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	120,000,000	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Laporan	120,000,000	KECAMATAN PUTRA RUMBIA
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						36,389,556,817							11,954,412,723	
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	persen		persen	100 persen	4,333,607,323						100 persen	4,131,564,123	
8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	80,000,000						100 persen	35,000,000	
8 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	30,000,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	6 Dokumen	20,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	25,000,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	2 Laporan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	25,000,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	7 Laporan	15,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Keuangan Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	3,423,759,223						100 persen	3,447,559,223	
8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	3,162,207,223		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	28 Orang/bulan	3,187,207,223	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaksanaan Administrasi ASN				12 Bulan	261,552,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	12 Bulan	260,352,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tercapainya Administrasi Kepegawaian	persen		persen	100 persen	12,000,000						100 persen	7,540,000	
8 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	12,000,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	3 Orang	7,540,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tercapainya Administrasi Umum PD	persen		persen	100 persen	335,918,100						100 persen	328,324,900	
8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang tersedia				7 Jenis	18,998,600		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	7 Jenis	3,340,500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan				24 Jenis	8,389,700		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	24 Jenis	7,181,900	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan				43 Jenis	123,347,800		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	43 Jenis	218,181,500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan				6 Jenis	53,236,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	6 Jenis	73,121,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu				1 Tahun	25,743,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	1 Tahun	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi				1 Tahun	106,203,000				Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	1 Tahun	26,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Persentase tercapainya Administrasi Umum PD	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	151,130,000						100 persen 100 persen	62,410,000	
8 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Jenis	151,130,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	4 Jenis	62,410,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang PD	persen		persen	100 persen	61,500,000						100 persen	73,500,000	
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yang disediakan				4 Jenis	61,500,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	4 Jenis	73,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang	persen		persen	100 persen	269,300,000						100 persen	177,230,000	
8 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	90,040,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	6 Unit	90,040,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	153,000,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	1 Unit	61,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	26,260,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	8 Unit	25,690,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat, Pemuda dan Pelajar Yang mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	persen		persen	100 persen	201,448,000						100 persen	597,558,000	
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat, Pemuda dan Pelajar Yang mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	persen		persen	100 persen	201,448,000						100 persen	597,558,000	
8 01 02 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Tokoh Masyarakat, Pemuda dan Tokoh Agama serta Pelajar yang mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara				480 Orang	89,488,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	480 Orang	597,558,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan FPK dan GNRM				600 Orang	111,960,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	600 Orang	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan Politik Persentase parpol yang menyerahkan laporan keuangan sesuai PerUU	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	1,456,806,494					100 persen 100 persen	468,829,000		
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan Politik Persentase parpol yang menyerahkan laporan keuangan sesuai PerUU	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	1,456,806,494					100 persen 100 persen	468,829,000		
8 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pemilihan Serentak 2024				400 Orang	71,000,000			Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	400 Orang	145,800,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Masyarakat yang mengikuti Pembinaan Politik Masyarakat				300 Orang	57,480,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	300 Orang	57,480,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban Hibah Parpol Jumlah pengurus Partai Politik yang mengikuti Verifikasi Berkas				9 Laporan 50 Orang	1,328,326,494		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	9 Laporan 50 Orang	103,549,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						29,669,065,000						6,244,282,600		
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						29,669,065,000						6,244,282,600		
8 01 04 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas yang dilakukan pengawasan dan pembinaan Jumlah Tokoh Agama dan Aliran Kepercayaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan				150 Orang 150 Orang	29,669,065,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan konduktivitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	150 Orang 150 Orang	6,244,282,600	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						219,036,000						38,333,500		
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						219,036,000						38,333,500		
8 01 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Siswa Sekolah/instansi Pendidikan yang mendapatkan Sosialisasi dan Pembinaan terhadap bahaya narkoba				300 Orang	219,036,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan konduktivitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	300 Orang	38,333,500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase cakupan pencegahan/tangkal dini konflik Persentase potensi konflik yang dibahas dalam rakor	persen persen		persen persen	80 persen 100 persen	509,594,000					80 persen 100 persen	473,845,500		
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase cakupan pencegahan/tangkal dini konflik Persentase potensi konflik yang dibahas dalam rakor	persen persen		persen persen	75 persen 56 persen	509,594,000					75 persen 56 persen	473,845,500		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Pendataan dan pemetaan daerah-daerah rawan konflik				2 Laporan	57,878,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	2 Laporan	19,337,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang Asing yang diawasi				45 Orang	20,342,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	45 Orang	23,504,500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Tim/Anggota dalam Penanganan Konflik Sosial				480 Orang	289,750,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	480 Orang	293,925,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Anggota Forjusi				500 Orang	56,774,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	500 Orang	70,019,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan FORKOMPIMDA Kabupaten yang disusun Jumlah pelaksanaan FORKOIMDA Kabupaten yang dilaksanakan				12 kali 12 Kali	84,850,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	12 kali 12 Kali	67,060,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL							2,772,475,026,908							2,509,896,000,428	

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan indikator kinerja utama bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Suatu indikator kinerja utama dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran berkenaan setelah program prioritas ditetapkan.

Tabel 6.1.
Target dan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2023

INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023
Indeks pembangunan gender (IPG)	indek	91,08
Rata-rata lama sekolah (MYS)	tahun	7,64
Lama harapan sekolah (EYS)	tahun	12,95
Usia harapan hidup	tahun	70,14
Prevalensi intervensi stunting	persen	11,42
Laju pertumbuhan penduduk	persen	0,56
Indeks pembangunan keluarga (iBangga)		60
Presentase cabang olahraga yang berprestasi pada event nasional (jenis)	persen	25,00
Indeks pembangunan literasi masyarakat	indek	14
Tingkat kemantapan jalan kabupaten	persen	67,50
Tingkat aksesibilitas jalan kabupaten	persen	90,36
Rasio konektivitas kabupaten/kota	persen	85,00
Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	v/c	0,60
Presentase luas areal sawah yang terairi jaringan irigasi	persen	94,65
Presentase Luas areal sawah daerah irigasi dengan IP > 2	Persen	96,737

INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023
Jumlah Luas kawasan kumuh	ha	34,89
Rumah tidak layak huni	persen	17,40
Persentase penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak dan atau aman	persen	93,28
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan atau aman	persen	96,35
Indeks kualitas lingkungan air	ika	75,00
Indeks kualitas udara	iku	87
Indeks tutupan lahan	itl	33
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan rencana tata ruang	persen	82
Kontribusi sektor pertanian, kehutanan perikanan terhadap PDRB	persen	37,00
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	persen	11,5
Kontribusi sektor industri pengolahan non migas dalam PDRB	persen	23,70
Skore PPH	score	87,20
Prosentase peningkatan volume usaha koperasi	persen	20
Rasio kemandirian fiscal	persen	8,10
Persentase peningkatan investasi	persen	10,00
Indeks desa membangun	indek	0,76
Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	74,33
Persentase penurunan warga miskin (DTKS) Desil 1	Persen	4
Jumlah kejadian konflik social	kali	0
Prosentase penurunan jumlah pelanggaran perda	persen	10
Indeks resiko bencana	indek	52,48
Opini BPK atas laporan keuangan	predikat	WTP
Indeks SPBE	indek	2,15
Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	predikat	BB
Indek inovasi daerah	indek	1.765
Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan public	nilai	88,81
Indeks profesionalitas ASN	indek	58

6.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Tengah tertuang pada tabel 6.2.

Tabel 6.2.
Target dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023
BIDANG PENDIDIKAN		
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	Persen	64,4
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	Persen	99,88
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	99,88
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	72
BIDANG KESEHATAN		
Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Persen	0,14
Presentase rumah sakit rujukan tingkat kabupaten yang terakreditasi	Persen	100
Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	100
Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100
Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan baru lahir	Persen	100
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100
Presentase anaka usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100
Presentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100
Presentase warga negara usisa 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100
Presentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100
Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100
Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100
Presentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100

INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023
Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir WS kewenangan kabupaten	%	26,28
Rasio daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Aplikasi	34,62
Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	%	93,28
Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	96,35
Rasio kepatuhan IMB	%	85
Tingkat kemantapan jalan	%	67,5
Rasio tenaga operator/teknisi/analisi yang memiliki sertifikat	%	88,89
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan tanpa kecelakaan konstruksi	%	100
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	%	100
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	Aplikasi	100
presentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	%	45
Berkurangnya jumlah unit RTLH	%	7000
Jumlah perumahan yang sudah di lengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	0,31
BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
Presentase gangguan trantibum yang diselesaikan	Petugas	94
Presentase Perda dan perkara yang ditegakkan	%	92
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	30
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	%	90
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	90
Prosentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100
Waktu tanggal (reponse) penanganan kebakaran	Menit	15

INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023
BIDANG SOSIAL		
Presentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan glandangan pengemis terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100
Presentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	%	100
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR		
BIDANG TENAGA KERJA		
Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100
Presentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	85
Tingkat Produktifitas tenaga kerja	%	85
Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/OKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	%	66
Presentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	%	84
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLIDUNGAN ANAK		
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0,00059
Presentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	%	100
Rasio Kekerasan perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	100
BIDANG PANGAN		
Presentase ketersediaan pangan	%	70
BIDANG PERTANAHAN		
Tersedianya tanah obyek <i>landreform</i> (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	%	100
Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
Indeks kualitas lingkungan hidup	Indek	63
Terlaksananya pengelolaan sampah	Persen	33
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH,	Persen	70

INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023
dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah		
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL		
Perekaman KTP Elektronik	%	92
Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	11
Kepemilikan akta kelahiran	%	97,74
Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	PD	11
Penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 Tahun	%	100
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEMERINTAHAN KAMPUNG		
Presentase pengentasan desa tertinggal	Poin	0
Presentase peningkatan status desa mandiri	Unit	5,65
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
TFR (Angka kelahiran total)	%	2,09
Presentase pemakaian kontrasepsi modern	%	72,65
Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	7.78
BIDANG PERHUBUNGAN		
Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	%	85
Kinerja lalu Lintas Kabupaten/Kota	V/C	0,60
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
Presentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo	%	10
Presentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	47,37
Presentase masyarakat yang menjadi sasaran peyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah	%	17
BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
Meningkatnya koperasi berkualitas	%	18,15
Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	1,86

INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023
BIDANG PENANAMAN MODAL		
Presentase peningkatan investasi	%	10
BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,55
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	3,13
Peningkatan prestasi olah raga	%	25,00
BIDANG STATISTIK		
Presentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan pembangunan daerah	%	100
Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100
BIDANG PERSANDIAN		
Tingkat keamanan data	Persen	100
BIDANG KEBUDAYAAN		
Terlestarikannya cagar budaya	Persen	44
BIDANG PERPUSTAKAAN		
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	60
Indeks pembangunan literasi masyarakat	Nilai	14
BIDANG KEARSIPAN		
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	Persen	100
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	55
URUSAN PILIHAN		
BIDANG PERIKANAN		
Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	Persen	51.521
BIDANG PARIWISATA		

INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023
Prosentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan	Persen	3
Presentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	Persen	57,00
Tingkat hunian akomodasi	Persen	40
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	5,5
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	3
BIDANG PERTANIAN		
Produktivitas pertanian perhektar pertahun	Ha/tahun	590
Presentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	0
BIDANG PERDAGANGAN		
Presentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	100
Presentase kinerja realisasi pupuk	Persen	100
Presentase alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan lainnya bertanda tera yang sah berlaku	Persen	77
BIDANG PERINDUSTRIAN		
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Persen	5
Presentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IU) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100
Presentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan usaha industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100
Presentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI)	Persen	100
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
PERENCANAAN DAN KEUANGAN		
Rasio belanja pegawai luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	34
Rasio PAD	Persen	8,1
Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Poin	3,17
Peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah (APIP)	Poin	3

INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023
Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi tranfer expenditures)	Persen	32
Opini laporan keuangan	OPini	WTP
KEPEGAWAIAN		
Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (persen) (PNS)= tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	130
Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	75
Rasio Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	92
MANAGEMEN KEUANGAN		
Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	11
Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	2
Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	2,27

BAB VII PENUTUP

Dalam proses pembangunan daerah, melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis pembangunan seperti yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, seluruh Perangkat Daerah harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pada pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan adanya keterpaduan/sinergitas dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program, antar program dalam Perangkat Daerah, dan antar Perangkat Daerah, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan Bidang Urusan Pemerintahan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 merupakan acuan/pedoman bagi Perangkat Daerah dan Stakeholder, sehingga terjalin sinergisme dalam program pembangunan dengan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah dan seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat melaksanakan program/kegiatan dalam RKPD tahun 2023 dengan sebaik-baiknya.
2. RKPD tahun 2023 menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi dan pelayanan umum dalam APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Pelaksanaan rencana tindak yang tertuang dalam RKPD, harus mengikuti prinsip-prinsip : partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan, pembangunan berkelanjutan, gender, tata pengelolaan yang baik, kesenjangan antar wilayah, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal.
4. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melalui tindak koreksi yang dilaporkan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pada akhir tahun 2023, setiap Perangkat Daerah harus melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

